Telkom Indonesia

the world in your hand

Melaju Melampaui Batas Telekomunikasi

Laporan Tahunan 2011
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Daftar Isi

IKHTISAR

- Ikhtisar Keuangan 3
- Ikhtisar Operasional 8
- Ikhtisar Saham Biasa dan Obligasi 10

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

- Sambutan Komisaris Utama 14
- Laporan Direktur Utama 18

PROFIL PERUSAHAAN

- Alamat 24
- Riwayat Singkat Telkom 25
- Visi, Misi, Tujuan dan Inisiatif Strategi 27
- Peta Daerah Operasional 29
- Struktur Organisasi Perusahaan 30
- Struktur Anak Perusahaan 32
- Profil Dewan Komisaris 37
- Profil Direksi 39
- Jajaran Manajemen Senior 41
- Penghargaan 2011 43
- Peristiwa Penting 2011 45
- Produk dan Layanan 47
- Penjualan, Pemasaran dan Distribusi 50

TINJAUAN KINERJA SDM

- Profil SDM 54
- Program-Program SDM Telkom 56

TINJAUAN KINERJA EFEK

- Mekanisme Perdagangan Pasar Modal dan ADS Telkom 64
- Pasar Saham Indonesia 64
- Perdagangan Saham di NYSE dan LSE 65
- Profesi Penunjang Pasar Modal 66
- Tinjauan Kinerja Saham 67
- Tinjauan Kinerja Obligasi 70

TINJAUAN OPERASI DAN STRATEGI

- Industri Telekomunikasi di Indonesia 72
- Peraturan 72
- Persaingan 79
- Perizinan 83
- Layanan Kepada Pelanggan 86
- Tagihan, Pembayaran dan Penagihan 88
- Tarif Layanan dan Biaya Interkoneksi 88
- Asuransi 95
- Merek, Hak Cipta dan Paten 95
- Strategi Perusahaan 97
- Strategi Anak Perusahaan 98
- Implementasi Strategi 98
- Infrastruktur Jaringan 103
- Pengembangan Jaringan 107

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

- Tinjauan Hasil Usaha 112
- Pendapatan Telkom 115
- Beban Telkom 117
- Tinjauan Keuangan 119
- Hasil Segmen 127
- Arus Kas Bersih 129
- Likuiditas dan Sumber Permodalan 130
- Aset Lancar 130
- Liabilitas Jangka Pendek 131
- Modal Kerja Bersih 131
- Struktur Modal 131
- Utang Bank dan Pinjaman Jangka Panjang 132
- Estimasi, Asumsi dan Kebijakan Akuntansi yang Signifikan 132
- Perpajakan 132
- Aset Tetap 135
- Informasi Setelah Tanggal Laporan Akuntan 136
- Kewajiban Kontraktual 136

INFORMASI TAMBAHAN (BAGI PEMEGANG SAHAM ADR)

Rangkuman Perbedaan Signifikan Antara Praktik Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan Standar Tata Kelola Perusahaan NYSE 137

Perubahan Anggaran Dasar 139

Informasi Tren 141

Hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah 142

Penilaian Manajemen atas Sistem Pengendalian Internal 143

Pengendalian Nilai Tukar 145

Kontrak Material 145

Belanja Modal 146

Riset dan Pengembangan 146

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Konsep dan Landasan 148

Kerangka Kerja dan Kinerja GCG Telkom 149

Struktur Tata Kelola Perusahaan 153

- Rapat Umum Pemegang Saham 153
- Dewan Komisaris 156
- Direksi 158
- Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris 161
- Komite-Komite di Bawah Direksi 173
- Sekretaris Perusahaan/ Investor Relations 174

Ketersediaan Dokumen 177

Tata Kelola Internal Audit 177

Penerapan IFRS di Tahun 2011 180

Penerapan Budaya Perusahaan dan Etika Bisnis 181

Penerapan *Whistleblowing* 182

Litigasi dan Perkara Hukum yang Sedang di Hadapi Perusahaan 184

Perlindungan Konsumen 185

Komunikasi dan Keterbukaan Informasi 185

Kepatuhan 186

Konsistensi Penerapan GCG di Tahun 2011 186

Evaluasi GCG 196

Faktor-Faktor Risiko 197

- Risiko-Risiko yang Terkait dengan Indonesia 197
- Risiko-Risiko yang terkait dengan Bisnis Telkom dan Anak Perusahaan 201

Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif atas Risiko Pasar 208

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Program Pelestarian Lingkungan 214

Program Kemitraan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 217

Pembangunan Sarana dan Prasarana Untuk Masyarakat 222

Program Bantuan Bencana Alam dan Bantuan Masyarakat 226

LAMPIRAN

Alamat dan Nomor Telepon 227

Daftar Istilah 230

Referensi Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 237

‘Melaju Melampaui Batas Telekomunikasi’

Kemajuan teknologi berbasis pita lebar (*broadband*) semakin mempersempit jarak antara penggunanya. Teknologi *broadband* memberikan pilihan luas bagi *end user* untuk membangun komunikasi dengan mitranya di daerah atau negara lain dengan sangat efektif dan biaya yang sangat efisien dibandingkan dengan menghubunginya via layanan telekomunikasi biasa. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat infrastruktur berbasis *broadband* untuk mendukung inovasi layanan dan produknya menuju *Information*, *Media* dan *Edutainment* ("IME"). Tak hanya membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi Perusahaan, fokus Telkom pada penyelenggaraan IME juga merupakan sumbangsih Telkom pada kemajuan ekonomi dan kecerdasan bangsa.

Berikut ini adalah definisi mengenai layanan TIME secara satu per satu:

TELECOMMUNICATION

Telekomunikasi merupakan bagian bisnis *legacy* Telkom. Sebagai ikon bisnis perusahaan, Telkom melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak *Plain Ordinary Telephone Service* ("POTS"), telepon nirkabel tidak bergerak, layanan komunikasi data, *broadband*, satelit, penyewaan jaringan dan interkoneksi, serta telepon seluler yang dilayani oleh Anak Perusahaan Telkomsel. Layanan telekomunikasi Telkom telah menjangkau beragam segmen pasar mulai dari pelanggan individu sampai dengan Usaha Kecil dan Menengah ("UKM") serta korporasi.

INFORMATION

Layanan informasi merupakan model bisnis yang dikembangkan Telkom dalam ranah *New Economy Business* ("NEB"). Layanan ini memiliki karakteristik sebagai layanan terintegrasi bagi kemudahan proses kerja dan transaksi yang mencakup *Value Added Services* ("VAS") dan *Managed Application/IT Outsourcing* ("ITO"), *e-Payment* dan *IT enabler Services* ("ITeS").

MEDIA

Media merupakan salah satu model bisnis Telkom yang dikembangkan sebagai bagian dari NEB. Layanan media ini menawarkan *Free To Air* ("FTA") dan *Pay* TV untuk gaya hidup digital yang modern.

EDUTAINMENT

Edutainment menjadi salah satu layanan andalan dalam model bisnis NEB Telkom dengan menargetkan segmen pasar anak muda. Telkom menawarkan beragam layanan di antaranya *Ring Back Tone* ("RBT"), *SMS Content*, portal dan lain-lain.

Sekilas Mengenai Laporan Tahunan 2011

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. atau disebut "Telkom", "Perusahaan", dan "Kami", menyajikan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") nomor X.K.6 dan X.K.7 serta berisikan informasi sesuai peraturan Securities and Exchange Commission ("SEC") Amerika Serikat yang diatur dalam Form 20-F. Namun, tidak ada bagian dari dokumen ini yang digabungkan untuk merujuk pada Form 20-F. Laporan Tahunan ini memuat data dan informasi dari data keuangan konsolidasian Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Laporan Tahunan Telkom ini memuat informasi keuangan tertentu dan hasil usaha, yang mengandung proyeksi, rencana, strategi dan tujuan Perusahaan yang bukan merupakan pernyataan data historis, dan dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang bersifat pandangan ke depan (*forward-looking statement*) sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku. Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut. Kami tidak dapat menjamin bahwa setiap hasil usaha yang diagendakan Telkom, yang dikategorikan sebagai pernyataan, yang bersifat ke depan dapat tercapai sesuai harapan.

Apabila Anda ingin mengetahui informasi mengenai Telkom lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Investor Relations, Grha Citra Caraka lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 52, Jakarta 12710, Indonesia. Tel. (62-21) 5215 109, Fax (62-21) 5220 500 atau E-mail: investor@telkom.co.id. Anda juga dapat mengunduh dokumen ini secara *online* melalui situs Kami pada http://www.telkom.co.id.

Sebutan "Indonesia" dalam Laporan Tahunan 2011 ini merujuk kepada Republik Indonesia sedangkan "Pemerintah" adalah Pemerintah Indonesia dan "Amerika Serikat" atau "AS" adalah Amerika Serikat. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau "Rp" merujuk pada mata uang resmi Indonesia sedangkan "Dolar AS" atau "US$" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Beberapa angka tertentu (termasuk persentase) telah mengalami pembulatan agar mempermudah perhitungan, sehingga angka, persentase maupun rasio yang diberikan dengan yang sesungguhnya dapat berbeda, kecuali jika disebutkan, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Ikhtisar Keuangan

(Berdasarkan SAK Indonesia)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2007*	2008*	2009*	2010	2011
Jumlah Aset Lancar	15.978	14.622	16.095	18.729	21.258
Jumlah Aset Tidak Lancar	66.078	76.634	81.836	81.772	81.796
Jumlah Aset	82.056	91.256	97.931	100.501	103.054
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	21.018	27.218	26.892	20.473	22.189
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	18.441	20.444	21.544	23.613	19.884
Jumlah Liabilitas	39.459	47.662	48.436	44.086	42.073
Ekuitas Yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	33.292	33.910	38.562	44.419	47.510
Kepentingan Nonpengendali	9.305	9.684	10.933	11.996	13.471
Modal Kerja Bersih	(5.040)	(12.596)	(10.797)	(1.744)	(931)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali untuk Laba per lembar dan Laba per ADS)

	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2007*	2008*	2009*	2010	2011
Jumlah Pendapatan	63.303	64.974	68.220	69.177	71.918
Jumlah Beban	36.392	43.606	44.139	46.254	49.970
EBITDA Disesuaikan**	37.521	33.700	38.056	37.535	36.811
LABA	26.911	21.368	24.081	22.923	21.948
Jumlah Biaya Pendanaan - bersih	(1.042)	(969)	(1.634)	(1.507)	(1.091)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	25.869	20.399	22.447	21.416	20.857
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	(8.015)	(5.674)	(6.404)	(5.546)	(5.387)
LABA TAHUN BERJALAN	17.854	14.725	16.043	15.870	15.470
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	13.043	10.672	11.399	11.537	10.965
Kepentingan Nonpengendali	4.811	4.053	4.644	4.333	4.505
	17.854	14.725	16.043	15.870	15.470
Laba bersih per Saham	653,40	540,38	579,52	586,54	559,67
Laba bersih per ADS (40 Saham Seri B per ADS)	26.135,70	21.615,20	23.180,80	23.461,60	22.386,80

Pengeluaran Modal

(dalam miliar Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Telkom	3.508	6.087	5.652	3.623	4.202
Telkomsel	12.132	15.915	12.673	8.197	8.472
Anak Perusahaan lainnya	140	243	836	831	1.929
Jumlah	15.780	22.245	19.161	12.651	14.603

Rasio Keuangan dan Operasi Konsolidasian

	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2007*	2008*	2009*	2010	2011
Laba per Jumlah Aset (ROA) (%)[1]	15,9	11,7	11,6	11,5	10,6
Laba per Ekuitas (ROE) (%)[2]	39,2	31,5	29,6	26,0	23,1
Rasio Lancar (%)[3]	76,0	53,7	59,9	91,5	95,8
Jumlah Liabilitas per Jumlah Aset (%)[4]	48,1	52,2	49,5	43,9	40,8
Jumlah Liabilitias per Ekuitas (%)[5]	118,5	140,6	125,6	99,3	88,6
Marjin Usaha (%)[6]	42,5	32,9	35,3	33,1	30,5
Rata-rata Periode Kolektibilitas Piutang (hari)[7]	19,4	19,7	19,8	22,9	24,9
Marjin EBITDA Disesuaikan (%)[8]	59,3	51,9	55,8	54,3	51,2
Marjin Laba (%)[9]	20,6	16,4	16,7	16,7	15,2
Utang per Ekuitas (%)[10]	47,4	58,2	56,7	48,2	36,5
Utang per EBITDA Disesuaikan (%)[11]	42,0	58,6	57,5	57,0	47,2
EBITDA Disesuaikan per Beban Bunga (kali)[12]	24,0	20,5	18,2	19,5	22,5
EBITDA Disesuaikan per Liabilitas Bersih (%)[13]	686,1	268,6	278,4	316,0	499,6
RASIO PRODUKTIVITAS:					
Total Pendapatan Usaha per Karyawan (Rp miliar)	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8
LIS per Karyawan (sst)[14]	593,4	853,7	1.015,6	1.252,0	1.154,7

(1) ROA merupakan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi jumlah aset pada 31 Desember akhir tahun.
(2) ROE merupakan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 31 Desember akhir tahun.
(3) Rasio lancar merupakan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek pada 31 Desember akhir tahun.
(4) Jumlah liabilitas per jumlah aset merupakan jumlah liabilitas dibagi jumlah aset pada 31 Desember akhir tahun.
(5) Jumlah liabilitas per ekuitas merupakan jumlah liabilitas dibagi ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 31 Desember akhir tahun.
(6) Marjin usaha merupakan laba dibagi pendapatan.
(7) Rata-rata periode kolektibilitas piutang merupakan jumlah piutang usaha dibagi dengan pendapatan dikali 365 hari.
(8) Marjin EBITDA disesuaikan merupakan disesuaikan EBITDA dibagi pendapatan.
(9) Marjin laba bersih merupakan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi pendapatan.
(10) Utang per ekuitas merupakan jumlah liabilitas dikurangi utang sewa pembiayaan dibagi ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada akhir tahun.
(11) Utang per EBITDA disesuaikan merupakan liabilitas dikurangi utang sewa pembiayaan dibagi EBITDA disesuaikan.
(12) EBITDA disesuaikan per beban bunga merupakan EBITDA disesuaikan dibagi beban bunga.
(13) EBITDA disesuaikan per liabilitas bersih merupakan EBITDA dibagi jumlah liabilitas dikurangi utang sewa pembiayaan yang dikurangi kas dan setara kas, aset tersedia untuk dijual dan rekening *escrow* pada akhir tahun.
(14) LIS per karyawan merupakan jumlah pelanggan telepon kabel dan nirkabel tidak bergerak dibagi dengan jumlah karyawan Telkom (tidak termasuk Anak Perusahaan).

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 2a dan 47 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Rekonsiliasi Laba terhadap EBITDA disesuaikan

(dalam miliar Rupiah)

	2007*	2008*	2009*	2010	2011
Laba	26.911	21.368	24.081	22.923	21.948
Tambah:					
Penyusutan	9.440	11.070	12.566	13.085	13.701
Amortisasi	1.170	1.262	1.409	1.527	599
Rugi penurunan nilai	-	-	-	-	563
EBITDA disesuaikan	37.521	33.700	38.056	37.535	36.811

**) EBITDA disesuaikan merupakan laba sebelum penyusutan dan amortisasi (termasuk rugi penurunan nilai). EBITDA disesuaikan dan rasio-rasio terkait lainnya yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini adalah sebagai indikator tambahan atas kinerja dan tingkat likuiditas Perusahaan yang tidak diwajibkan oleh atau disajikan sesuai dengan Indonesia. EBITDA disesuaikan bukan merupakan indikator dari kinerja atau likuiditas keuangan Telkom sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan Indonesia dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti dari laba bersih, laba atau pengukur kinerja lainnya yang didapat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau sebagai pengganti dari arus kas yang didapat dari kegiatan operasional sebagai indikator dari tingkat likuiditas Perusahaan. Telkom menganggap bahwa EBITDA adalah indikator yang efektif dalam mengukur kinerja operasional Perusahaan karena mencerminkan biaya kas operasional dengan mengeliminasi penyusutan dan amortisasi. Metode yang digunakan untuk menghitung EBITDA mungkin saja berbeda dengan istilah yang digunakan oleh perusahaan lain untuk EBITDA atau EBITDA disesuaikan. Berikut ini adalah rekonsiliasi laba Telkom terhadap EBITDA disesuaikan.

RANGKUMAN KEUANGAN

KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (sebelum 8 Maret 2010, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan), yang merupakan anggota jaringan global PwC ("PwC"), ditunjuk untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom untuk tahun fiskal 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 (secara keseluruhan disebut "Laporan Keuangan Konsolidasian").

Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia yang memiliki perbedaan tertentu dengan *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"). Catatan 48 pada Laporan Keuangan Konsolidasian memuat ikhtisar perbedaan signifikan antara SAK Indonesia dan IFRS beserta rekonsiliasi ke IFRS untuk laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.

Laporan Keuangan dari sembilan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2011 telah dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom untuk tahun buku 2011. Sembilan Anak Perusahaan tersebut antara lain PT Telekomunikasi Indonesia International ("Telin", dengan kepemilikan 100%), PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel", dengan kepemilikan 100%), PT Pramindo Ikat Nusantara ("Pramindo", dengan kepemilikan 100%), PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel", dengan kepemilikan 65,0%), PT Multimedia Nusantara ("Metra", dengan kepemilikan 100%), PT Infomedia Nusantara ("Infomedia", dengan kepemilikan saham 100%, melalui kepemilikan langsung dan 49,0% saham dimiliki oleh Metra), PT Indonusa Telemedia ("Indonusa", dengan kepemilikan saham 100%, melalui kepemilikan langsung dan 0,46% saham dimiliki oleh Metra), PT Graha Sarana Duta ("GSD", dengan kepemilikan 99,99%) dan PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo", dengan kepemilikan 60,0%). Lihat Catatan 1d dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom.

Tabel berikut merupakan ikhtisar informasi keuangan Telkom dalam beberapa tahun terakhir. Informasi ini sebaiknya dibaca bersama dengan "Pembahasan dan Analisis Manajemen - Tinjauan Keuangan" dan lihat Laporan Keuangan Konsolidasian Kami dan catatan terkait dalam Laporan Tahunan ini.

	Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2007*	2008*	2009*	2010	2011	2011 (angka disajikan dalam juta Dolar AS kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)[1]
	(angka disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)					
Data Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian						
SAK Indonesia						
PENDAPATAN						
Telepon						
Seluler	23.541	26.529	28.532	29.134	28.598	3.154
Tidak bergerak	19.683	16.709	14.286	12.940	11.619	1.281
Data, internet dan jasa teknologi informatika	14.785	14.768	18.512	19.801	23.924	2.638
Interkoneksi	3.637	4.363	3.867	3.735	3.509	387
Jaringan	707	1.079	1.218	1.058	1.301	143
Jasa telekomunikasi lainnya	330	718	1.263	1.961	2.302	254
Jumlah Pendapatan	**62.683**	**64.166**	**67.678**	**68.629**	**71.253**	**7.857**
Pendapatan lainnya	620	808	542	548	665	73
BEBAN						
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	9.662	12.301	14.549	16.046	16.372	1.806
Penyusutan dan amortisasi	10.610	12.332	13.975	14.612	14.863	1.639
Karyawan	8.414	8.979	8.371	7.332	8.555	943
Interkoneksi	3.055	3.263	2.929	3.086	3.555	392
Pemasaran	1.769	2.350	2.260	2.525	3.278	362
Umum dan administrasi	2.583	2.504	2.806	2.537	2.935	324
Rugi (laba) selisih kurs - bersih	295	1.614	(973)	(43)	210	23
Bagian rugi (laba) bersih perusahaan asosiasi	(7)	(20)	30	14	10	1
Lain-lain bersih	11	283	192	145	192	21
Jumlah Beban	**36.392**	**43.606**	**44.139**	**46.254**	**49.970**	**5.511**
LABA SEBELUM (BIAYA) PENGHASILAN PENDANAAN	**26.911**	**21.368**	**24.081**	**22.923**	**21.948**	**2.419**
Penghasilan pendanaan	519	672	462	421	546	60
Biaya pendanaan	(1.561)	(1.641)	(2.096)	(1.928)	(1.637)	(181)
Jumlah biaya pendanaan	(1.042)	(969)	(1.634)	(1.507)	(1.091)	(121)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**25.869**	**20.399**	**22.447**	**21.416**	**20.857**	**2.298**
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN						
Pajak kini	(7.234)	(5.824)	(6.030)	(4.669)	(5.673)	(626)
Pajak tangguhan	(781)	150	(374)	(877)	286	32
	(8.015)	(5.674)	(6.404)	(5.546)	(5.387)	(594)
LABA TAHUN BERJALAN	**17.854**	**14.725**	**16.043**	**15.870**	**15.470**	**1.704**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2	8	(7)	2	7	1
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual setelah pajak	2	(30)	37	32	4	-
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain - bersih setelah pajak	4	(22)	30	34	11	1
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**17.858**	**14.703**	**16.073**	**15.904**	**15.481**	**1.705**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	13.043	10.672	11.399	11.537	10.965	1.209
Kepentingan nonpengendali	4.811	4.053	4.644	4.333	4.505	495
	17.854	14.725	16.043	15.870	15.470	1.704
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	13.047	10.650	11.429	11.571	10.976	1.210
Kepentingan nonpengendali	4.811	4.053	4.644	4.333	4.505	495
	17.858	14.703	16.073	15.904	15.481	1.705
LABA PER SAHAM DASAR						
Rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam (juta)	19.962	19.749	19.669	19.669	19.592	19.592
Laba per Saham	653,40	540,38	579,52	586,54	559,67	0,06
Laba ADS (40 saham Seri B per ADS)	26.135,70	21.615,20	23.180,80	23.461,60	22.386,8	2,47
Dividen periode berjalan (dasar akrual)						
Dividen diumumkan per saham	455,87	296,94	288,06	322,59	-	-
Dividen diumumkan per ADS	18.234,80	11.877,60	11.522,40	12.903,60	-	-
Dividen dibayarkan periode berjalan (dasar kas)						
Dividen diumumkan per saham[2]	303,25	407,42	323,59	275,45	308,56	0,03
Dividen diumumkan per ADS	12.130,00	16.296,80	12.943,60	11.017,83	12.342,57	1,36

	Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2007*	2008*	2009*	2010	2011	2011
	(angka disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)					(angka disajikan dalam juta Dolar AS, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)(1)
Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian						
SAK Indonesia						
Aset lancar	15.978	14.622	16.095	18.729	21.258	2.344
Aset tidak lancar	66.078	76.634	81.836	81.772	81.796	9.020
Jumlah aset	82.056	91.256	97.931	100.501	103.054	11.364
Liabilitas jangka pendek(3)	21.018	27.218	26.892	20.473	22.189	2.447
Liabilitas jangka panjang	18.441	20.444	21.544	23.613	19.884	2.193
Jumlah liabilitas	39.459	47.662	48.436	44.086	42.073	4.640
Modal Saham	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	556
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	33.292	33.910	38.562	44.419	47.510	5.240
Kepentingan nonpengendali	9.305	9.684	10.933	11.996	13.471	1.484
Jumlah liabilitas dan ekuitas	82.056	91.256	97.931	100.501	103.054	11.364

(1) Nilai tukar Rupiah ke Dolar AS ditujukan hanya untuk kemudahan kepada pembaca dan menggunakan nilai tengah atas nilai beli dan jual sebesar Rp9.067,5 per Dolar AS yang dipublikasikan oleh Reuters pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu Rp9.067,5 per Dolar AS. Kemudahan translasi ini tidak untuk diartikan sebagai representasi dari nilai tukar di mana Rupiah telah dapat atau akan, dikonversikan ke dalam Dolar AS.

(2) Dividen yang dibagikan pada tahun 2007 terdiri dari dividen tunai untuk tahun 2006 sebesar Rp254,80 per lembar saham dan dividen tunai interim tahun 2007 sebesar Rp48,45 per lembar saham. Dividen yang dibagikan pada tahun 2008 terdiri dari dividen tunai dan dividen spesial untuk tahun 2007 sebesar Rp455,87 per lembar saham dikurangi dividen tunai interim yang didistribusikan pada bulan November 2007 sebesar Rp48,45 per lembar saham. Dividen yang diumumkan pada tahun 2009 merupakan dividen tunai tahun 2008, sebesar Rp296,94 per lembar saham dan dividen tunai interim tahun 2008 sebesar Rp26,65 per lembar saham. Pada tahun 2010, Kami membagikan dividen yang terdiri dari dividen tunai tahun 2009 sebesar Rp261,41 per lembar saham dan dividen tunai interim tahun 2010 sebesar Rp26,75 per lembar saham. Pada tahun 2011, Kami membagikan dividen tunai tahun 2010 sebesar Rp322,59 per lembar saham (lihat Catatan 33 pada Laporan Keuangan Konsolidasian).

(3) Termasuk pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo.

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 2a dan 47 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

PENCAPAIAN KEUANGAN

a. Pendapatan konsolidasian meningkat 3,8% menjadi Rp71.253 miliar.
b. Kontribusi pendapatan dari sektor bisnis data, internet dan jasa teknologi informatika meningkat 4,7% menjadi 33,6% terhadap total pendapatan Perusahaan.

IKHTISAR OPERASIONAL

	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
TELEPON KABEL TIDAK BERGERAK					
Jumlah pelanggan (dalam ribuan)	8.685	8.630	8.377	8.303	8.602
Jumlah produksi pulsa (dalam jutaan pulsa)*	75.451	62.940	54.186	9.403	8.054
*) dalam jutaan menit untuk tahun yang berakhir 31 Des 2010 dan 2011					
TELEPON NIRKABEL TIDAK BERGERAK (FLEXI)					
Jumlah pelanggan (dalam ribuan):					
Classy/Pascabayar	828	731	649	546	468
Trendy/Prabayar	5.535	11.994	14.490	17.615	13.770
Jumlah	6.363	12.725	15.139	18.161	14.238
ARPU (rata-rata 12 bulan-dalam ribuan Rupiah):					
Pascabayar	115	93	84	82	80
Prabayar	42	32	18	13	9
Campuran	53	38	22	15	10
Jaringan:					
Base Tranceiver Station/BTS (unit)	1.911	4.054	5.543	5.641	5.718
Jumlah kota yang termasuk dalam layanan	238	353	370	370	370
SELULER					
Base Transceiver Station/BTS (unit)	20.858	26.872	30.992	36.557	42.623
Kapasitas jaringan (dalam jutaan pelanggan)	50,5	67,3	85,2	98,6	115,9
Jumlah pelanggan (dalam jutaan)	47,9	65,3	81,6	94,0	107,0
Pascabayar (*kartuHALO*)	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2
Prabayar (*simPATI*)	24,0	43,0	58,0	56,9	51,3
Prabayar (Kartu As)	22,0	20,3	21,6	35,0	53,5
ARPU – campuran (dalam ribuan Rupiah)	80	59	48	42	39
Pascabayar (*kartuHALO*)	264	216	214	211	197
Prabayar (*simPATI*)	84	63	48	42	45
Prabayar (Kartu As)	57	37	31	28	24
LAIN-LAIN					
Internet Broadband (Speedy):					
Jumlah pelanggan (dalam ribuan)	241	645	1.145	1.649	1.789
Jumlah kota yang termasuk dalam layanan	88	375	378	431	456
Internet Dial-up (TelkomNet Instan):					
Rata-rata pengguna (dalam ribuan)	662	574	448	103	40
Jumlah produksi menit (dalam miliaran)	3,7	2,8	1,5	0,4	0,2
Televisi kabel dan berbayar (TelkomVision):					
Jumlah pelanggan (dalam ribuan)	67	210	179	213	1.000

PENCAPAIAN OPERASIONAL

a. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, pelanggan Kami meningkat sebesar 7,8% menjadi 129,8 juta pelanggan yang terdiri dari 8,6 juta pelanggan telepon kabel tidak bergerak. 14,2 juta pelanggan telepon nirkabel tidak bergerak, serta 107,0 juta pelanggan telepon seluler.

b. Pertambahan jumlah pelanggan seluler Kami sebesar 13,8% atau 13,0 juta pelanggan menjadi 107,0 juta pelanggan di akhir tahun 2011.

129,8
juta
Jumlah pelanggan Kami meningkat **7,8%**

IKHTISAR SAHAM BIASA DAN OBLIGASI

Grafik Harga dan Volume Perdagangan Saham Telkom di Bursa Efek Indonesia 2010-2011

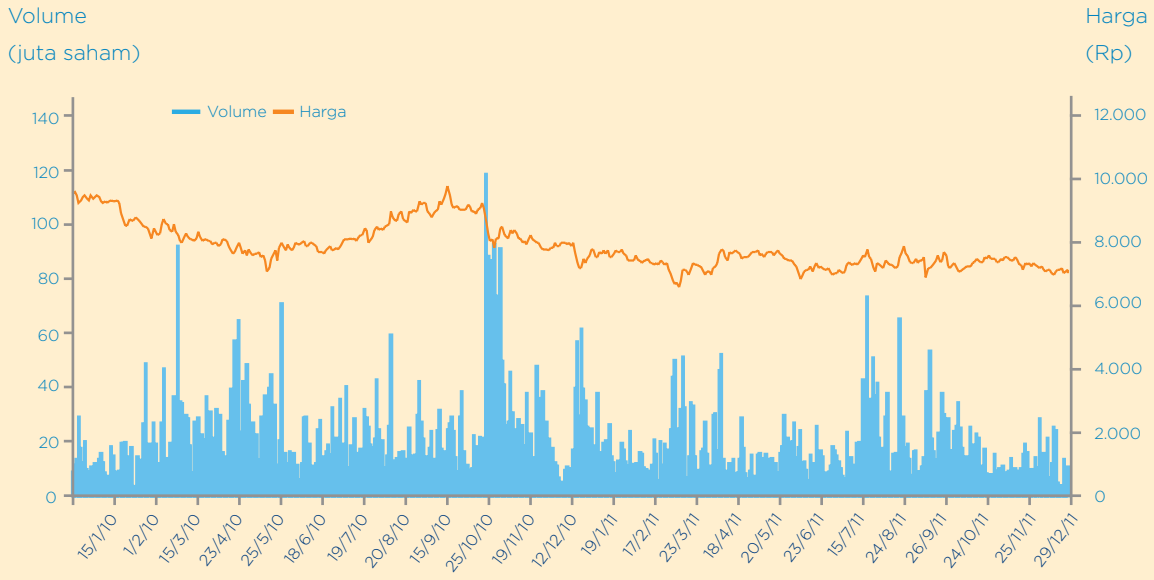

Grafik Harga dan Volume Perdagangan Saham Telkom di New York Stock Exchange 2010-2011

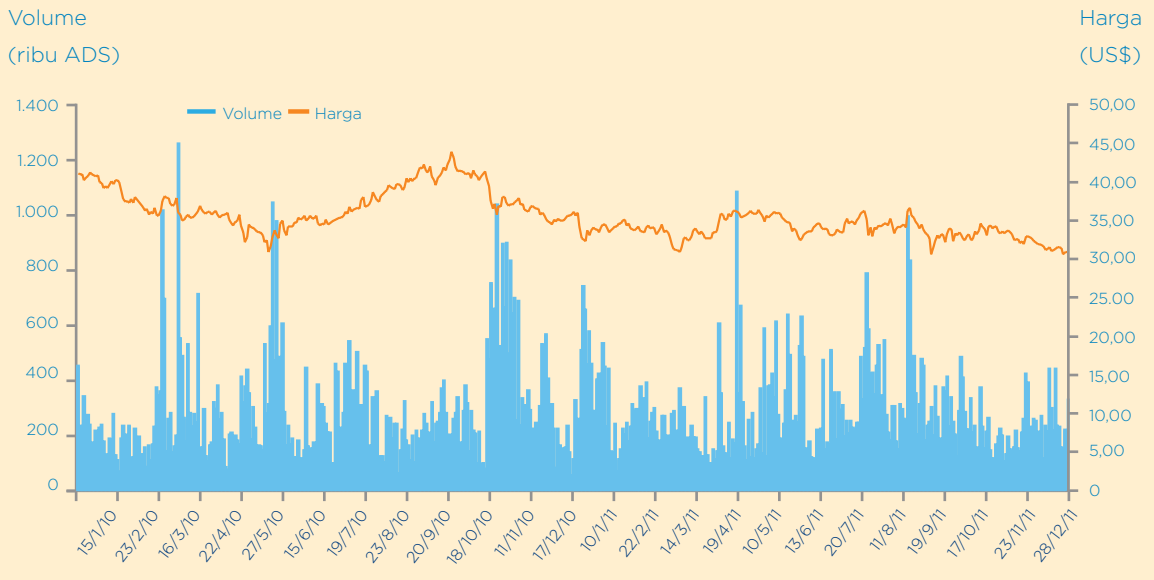

HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN

Berikut Kami sajikan laporan harga saham tertinggi, terendah, penutupan serta volume perdagangan dari saham biasa yang tercatat di BEI pada jangka waktu tertentu:

Tahun Kalendar	Harga Per saham Biasa*			
	Tertinggi	Terendah	Penutupan	Volume
		(dalam Rupiah)		(lembar saham)
2007	12.650	8.900	10.000	5.718.438.000
Kuartal Pertama	10.350	8.900	9.700	1.250.176.000
Kuartal Kedua	10.800	9.400	9.700	1.340.736.500
Kuartal Ketiga	11.450	9.850	10.850	1.230.125.000
Kuartal Keempat	12.650	10.000	10.000	1.897.400.500
2008	10.250	5.000	6.900	6.162.126.500
Kuartal Pertama	10.250	8.400	9.500	1.615.643.500
Kuartal Kedua	9.700	7.189	7.200	1.424.645.500
Kuartal Ketiga	7.878	6.155	7.050	1.663.345.000
Kuartal Keempat	7.250	5.000	6.900	1.458.492.500
2009	10.350	5.750	9.450	4.174.413.500
Kuartal Pertama	7.900	5.750	7.550	677.507.000
Kuartal Kedua	8.100	6.850	7.500	1.405.779.000
Kuartal Ketiga	9.450	7.550	8.650	1.232.832.000
Kuartal Keempat	10.350	7.850	9.450	858.295.500
2010	9.800	6.950	7.950	5.707.850.000
Kuartal Pertama	9.700	7.950	8.050	1.143.530.500
Kuartal Kedua	8.350	6.950	7.700	1.550.508.500
Kuartal Ketiga	9.450	7.600	9.200	1.186.753.000
Kuartal Keempat	9.800	7.650	7.950	1.827.058.000
2011	8.050	6.600	7.050	4.441.579.000
Kuartal Pertama	8.050	6.600	7.350	1.297.346.000
Kuartal Kedua	7.850	6.800	7.350	957.638.000
Kuartal Ketiga	7.900	6.900	7.600	1.261.616.000
Kuartal Keempat	7.750	6.900	7.050	924.979.000
September	7.900	6.900	7.600	447.377.500
Oktober	7.750	7.000	7.400	442.462.000
November	7.650	7.150	7.350	222.600.500
Desember	7.500	6.900	7.050	259.916.500
2012				
Januari	7.150	6.800	6.800	344.578.000
Februari	7.100	6.650	7.050	369.165.000
Maret (15)	7.150	6.700	6.800	182.332.000

(*) Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (*stock split*) dengan rasio 1:2 untuk Saham Biasa dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham menjadi nilai nominal Rp250 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPST pada tanggal 30 Juli 2004, yang efektif pada tanggal 1 Oktober 2004. Nilai nominal hasil *stock split* telah diperhitungkan pada seluruh periode yang tertera.

Pada tanggal 30 Desember 2011 harga Saham Biasa Telkom pada hari terakhir perdagangan BEI di tahun 2011 ditutup di level Rp7.050 per lembar saham.

Pada tabel di bawah ini, Kami sajikan harga tertinggi, terendah, penutupan serta volume perdagangan ADS Telkom untuk jangka waktu tertentu, yang tercatat di NYSE dan LSE. Perdagangan ini dilakukan secara "*off exchange*" (di luar bursa) di LSE. Berdasarkan peraturan LSE, yang dimaksud perdagangan "*off exchange*" adalah perdagangan yang dilakukan di bursa lain. Perdagangan baru dilaporkan ke LSE setelah transaksi selesai dilakukan.

Tahun Kalender	Harga Per ADS (NYSE)			Volume	Harga Per ADS (LSE)			Volume
	Tertinggi	Terendah	Penutupan	(lembar saham ADS)	Tertinggi	Terendah	Penutupan	(lembar saham ADS)
	(dalam Dolar AS)				(dalam Dolar AS)			
2007	56,50	37,74	41,57	83.650.348	56,87	38,29	41,33	43.051
Kuartal Pertama	46,98	37,74	42,69	23.459.831	46,82	39,30	42,91	30.000
Kuartal Kedua	47,02	42,70	42,65	16.844.563	47,15	39,60	43,23	10.137
Kuartal Ketiga	51,61	40,00	48,31	19.900.045	51,60	38,29	48,80	1.729
Kuartal Keempat	56,50	41,88	41,57	23.445.909	56,87	41,79	41,33	1.185
2008	45,50	17,31	25,01	98.988.347	45,74	16,89	24,62	38.028
Kuartal Pertama	45,50	37,50	41,50	21.441.196	45,74	36,32	41,99	6.808
Kuartal Kedua	42,86	31,50	31,91	22.504.983	41,99	32,03	32,40	120
Kuartal Ketiga	34,49	26,47	29,47	23.663.355	35,43	26,46	28,49	20.000
Kuartal Keempat	30,65	17,31	25,01	31.378.813	29,31	16,89	24,62	11.100
2009	41,55	20,19	39,95	67.767.999	40,76	25,67	41,02	3.757
Kuartal Pertama	26,45	20,19	25,70	16.518.171	27,92	25,67	25,67	3.000
Kuartal Kedua	31,25	24,93	29,98	20.038.628	36,91	31,76	31,76	429
Kuartal Ketiga	35,93	31,38	35,70	18.490.886	37,43	37,16	37,16	270
Kuartal Keempat	41,55	33,56	39,95	12.720.314	40,76	37,16	41,02	58
2010	43,80	30,33	35,65	69.803.576	42,00	30,76	34,91	19.673
Kuartal Pertama	41,18	34,62	35,76	15.338.571	41,20	35,41	35,41	1.030
Kuartal Kedua	36,89	30,33	34,23	16.873.723	36,16	30,76	34,89	2.392
Kuartal Ketiga	42,31	33,75	41,29	15.732.144	42,00	34,20	42,00	15.324
Kuartal Keempat	43,80	34,10	35,65	21.859.138	40,60	34,91	34,91	927
2011	36,96	30,29	30,74	69.279.100	35,89	21,02	30,50	1.406.292
Kuartal Pertama	36,05	30,51	33,58	17.278.400	35,73	33,39	33,44	697
Kuartal Kedua	36,28	32,21	34,50	16.636.000	35,89	35,82	35,88	354.770
Kuartal Ketiga	36,96	30,29	33,07	20.886.200	35,59	33,58	34,44	87.554
Kuartal Keempat	34,48	30,62	30,74	14.478.500	21,02	21,02	30,50	963.271
September	36,65	30,29	33,07	7.379.100	34,44	34,44	34,44	50.000
Oktober	34,48	32,01	33,80	5.563.300	33,56	21,02	33,44	1.420
November	34,42	31,66	32,75	3.766.400	33,59	33,59	33,59	5.800
Desember	33,06	30,62	30,74	5.148.800	32,53	30,39	30,50	956.051
2012								
Januari	31,47	30,30	30,65	5.563.480	31,23	30,09	30,48	82.547
Februari	31,57	29,86	30,61	6.473.837	31,26	30,03	31,26	376
Maret (15)	31,69	29,26	29,51	3.643.721	31,35	29,67	29,67	65

Pada tanggal 30 Desember 2011, hari terakhir perdagangan di NYSE dan LSE untuk tahun 2011, harga penutupan untuk satu ADS Telkom masing-masing US$30,74 dan US$30,50.

Obligasi

Nama Obligasi	Jumlah (Rp juta)	Tanggal Efektif	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga	Penjamin	Wali Amanat	Peringkat*
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A	1.005.000	25 Juni 2010	6 Juli 2015	5	9,6%	PT Bahana Securities; PT Danareksa Sekuritas; PT Mandiri Sekuritas;	PT CIMB Niaga, Tbk.	idAAA
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B	1.995.000	25 Juni 2010	6 Juli 2020	10	10,2%	PT Bahana Securities; PT Danareksa Sekuritas; PT Mandiri Sekuritas;	PT CIMB Niaga, Tbk.	idAAA

(*) Diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

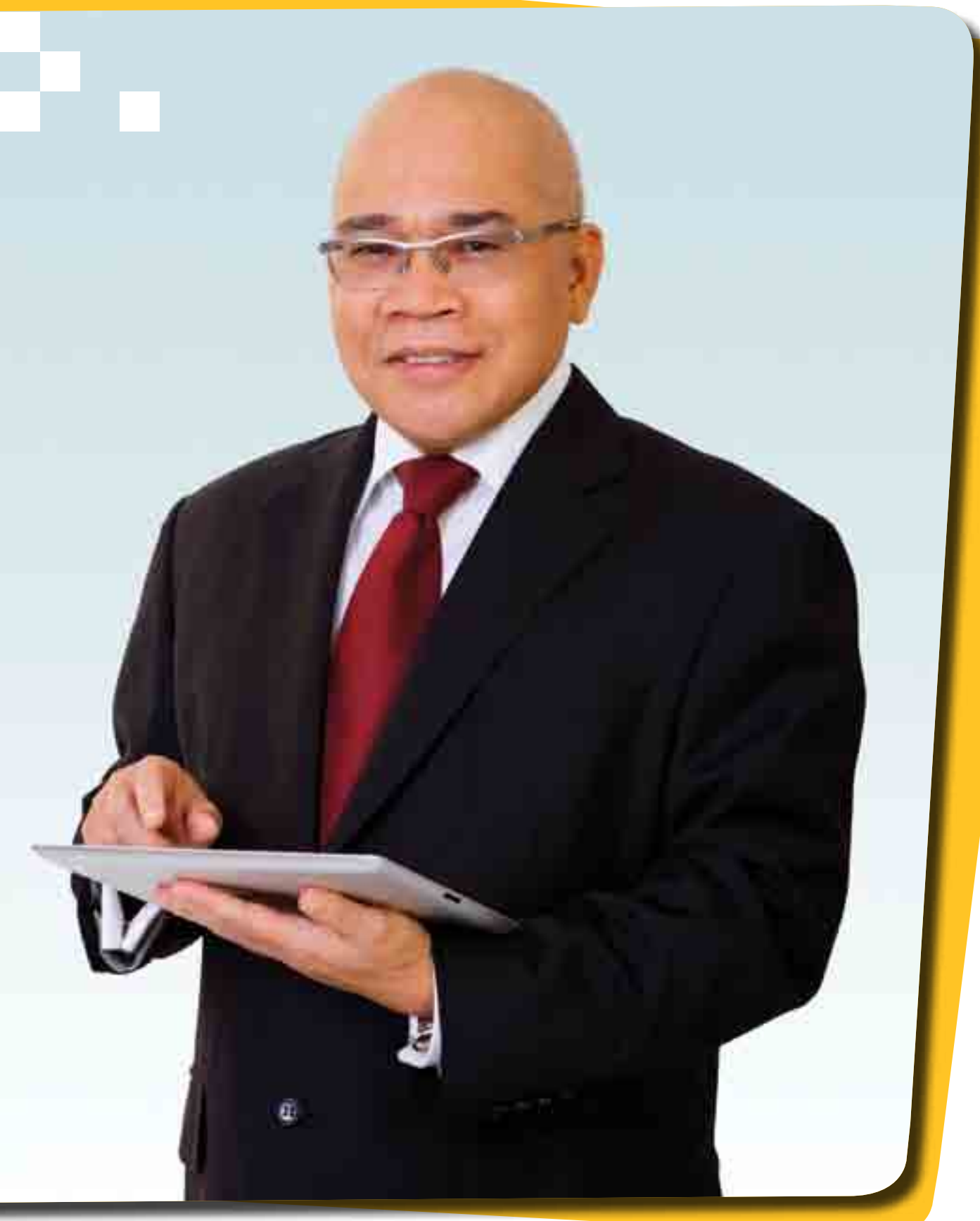

Sambutan Komisaris Utama

Melalui kerja keras Direksi dan seluruh jajaran karyawan Telkom, telah dicapai sejumlah kemajuan seperti jaringan serat optik yang pada tahun 2015 diharapkan dapat menjangkau 85% kota besar di Indonesia, peningkatan jumlah pelanggan *broadband* sebesar 64,3%, dan pendapatan bisnis layanan data sebesar 21,1%.

Ini merupakan tahun yang penuh tantangan. Tahun dengan persaingan ketat dan kecepatan perubahan teknologi yang tinggi. Industri menghadapi proses transformasi ke arah *Triple Play* (*voice*, data dan video). Namun begitu, Telkom mampu menyajikan performa yang masih sangat menjanjikan.

Pertumbuhan bisnis secara keseluruhan masih di bawah harapan, yang diakibatkan oleh sejumlah faktor. Situasi bisnis yang amat kompetitif dengan 11 operator yang saling berkompetisi dalam hal harga terendah *(price competition)* dibandingkan persaingan untuk peningkatan kualitas layanan dan variasi produk, mengakibatkan perlambatan pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan harus menyesuaikan dengan situasi pasar yang dinamis tersebut. Namun Telkom masih mampu membukukan pertumbuhan di bisnis *new wave*, khususnya di layanan *broadband* dan data yang nantinya akan menjadi penggerak pertumbuhan utama di masa datang. Di samping itu, jumlah pengguna layanan seluler terus bertambah dan bisnis telepon kabel masih menguntungkan.

Telkom sendiri sebenarnya dalam masa transisi. Melalui pemahaman potensi yang besar dari *broadband*, Kami telah menanamkan investasi besar untuk melaksanakan transformasi sistem, infrastruktur dan kemampuan Telkom untuk menjadi penyedia layanan *broadband* di masa depan. Saat ini adalah fase konsolidasi dari transformasi bisnis Telkom awalnya sebagai penyelenggara layanan telekomunikasi menjadi penyedia layanan *Telecommunication, Information, Media* dan *Edutainment* ("TIME"). Pada lansekap bisnis baru ini, pertumbuhan bisnis akan didorong oleh masuknya teknologi dan perangkat *mobile* baru, seperti *tablet* iPad dan *tablet* berbasis Android serta perangkat Blackberry, yang tak hanya merevolusi gaya hidup tapi juga meningkatkan permintaan untuk komunikasi data. Agar dapat meraih peluang dari situasi ini, Telkom membuka potensi sumber pertumbuhan pendapatan baru, yaitu dengan menyediakan layanan bernilai tambah dan konten, yang berbasis data bukan *voice*. Oleh karenanya, prioritas bagi Direksi telah ditetapkan sebagai berikut:

- Mempercepat ekspansi kapasitas dan jangkauan jaringan melalui pembangunan infrastruktur berbasis *broadband* berkecepatan tinggi yang menyediakan konektivitas yang cepat kepada pelanggan melalui layanan *voice*, video dan data (Program Telkom Nusantara Super Highway);
- Meningkatkan produktivitas dan melanjutkan proses efisiensi dan konsolidasi transformasi Telkom;
- Revitalisasi kompetensi utama Telkom dan penataan ulang postur sumber daya manusia ("SDM") yang lebih seimbang dan lebih ramping (*revitalizing core competencies* dan *resizing*), yang akan mampu merespon permintaan dari lingkungan bisnis yang baru.

Melalui kerja keras Direksi dan seluruh jajaran karyawan Telkom, telah dicapai sejumlah kemajuan seperti jaringan serat optik yang pada tahun 2015 diharapkan dapat menjangkau 85% kota besar di Indonesia, telah berhasil memperbaiki kecepatan, kualitas dan kehandalan layanan Kami. Basis pelanggan *broadband* meningkat sebesar 64,3%. Pendapatan bisnis layanan data meningkat 21,1%. Pelanggan layanan *new wave* telah menikmati layanan informasi dan *edutainment* dengan teknologi masa depan melalui produk *Triple Play* IPTV, Groovia-TV. Pada saat yang sama, terjadi peningkatan di segmen pelanggan layanan seluler dan telepon kabel tidak bergerak.

Untuk meningkatkan efisiensi, telah diluncurkan sejumlah inisiatif, yakni di antaranya program penurunan biaya administratif, biaya energi dan biaya perawatan jaringan.

Selain itu, lebih dari 750 karyawan berpartisipasi dalam program pensiun dini selama tahun 2011, sehingga Perusahaan berkesempatan untuk merampingkan jumlah SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Permintaan terhadap layanan informasi, media dan *edutainment* tengah berkembang pesat di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan Indonesia sebagai salah satu pasar amat menarik: Indonesia saat ini merupakan pasar kedua terbesar untuk layanan Facebook dan Blackberry, dan juga basis pengguna Twitter terbesar ketiga di dunia.

Di masa depan Telkom secara sistematis dan berkelanjutan terus berinvestasi untuk membuka peluang-peluang bisnis baru yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Telkom akan terus mengembangkan program pembangunan dan revitalisasi infrastruktur secara bijaksana dan tepat sasaran agar tercipta ruang kesempatan dan peluang bisnis yang dapat melanggengkan kesinambungan proses penciptaan nilai tambah dengan memfokuskan pada kebutuhan pelanggan seperti dijelaskan berikut ini:

1. Jaringan *backbone* kabel serat optik yang terpasang sepanjang 47.000 kilometer –disebut Telkom Nusantara Super Highway– akan mampu menyediakan kecepatan pengiriman data hingga 100 Mbps ke lebih dari 12 juta rumah dan pelanggan bisnis di seluruh Indonesia pada tahun 2015.
2. Pengembangan produk dan layanan Telkom, yang mampu memproteksi tingkat keamanan pengiriman dan penyimpanan data, seperti Delima, T-Cash, *cloud computing* dan pusat data, untuk mempertajam posisi Telkom dalam hal keamanan data.
3. Penciptaan ekosistem inovasi bagi lahirnya produk baru program aplikasi yang inovatif dan fungsional ke pasar.

Meskipun pertumbuhan ekonomi dan industri terus berlanjut dalam beberapa bulan terakhir, tantangan dan kendala bisnis yang mengikuti bayangan krisis finansial di Eropa pada tahun-tahun mendatang perlu terus dicermati secara seksama. Program pembelian kembali saham Telkom yang diluncurkan pada tahun 2011 tetap akan digunakan sebagai wahana antisipatif terhadap tekanan mekanisme pasar yang mungkin timbul dalam bentuk penurunan harga saham, sekaligus sebagai mekanisme penguatan struktur.

Tantangan terbesar yang dihadapi Telkom saat ini adalah kompetisi yang semakin ketat. Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, berbagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah terlibat dalam perang harga, yang tentunya

“Permintaan terhadap layanan informasi, media dan *edutainment* tengah berkembang pesat di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan Indonesia sebagai salah satu pasar yang amat menarik.”

tidak menguntungkan baik bagi pelanggan maupun operator. Peran aktif pemerintah sebagai regulator dalam menciptakan pertumbuhan industri telekomunikasi yang sehat di Indonesia sangat diharapkan. Sinergi dengan pemerintah dalam rangka menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi operator maupun pelanggan, perlu terus ditumbuh kembangkan.

Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris akan terus ditingkatkan untuk memperkuat sistem tata kelola perusahaan. Selama tahun 2011 komposisi jajaran Dewan Komisaris Telkom tidak mengalami perubahan sehingga memungkinkan Kami untuk memperkuat kerjasama diantara anggota Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite diantaranya Komite Audit, Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah bekerja secara intensif selama tahun 2011. Komite Audit terus melakukan upaya sosialisasi pelaporan berbasis IFRS, sebuah standar pelaporan global yang akan memperkuat kualitas dan keterbukaan informasi keuangan. Kami juga telah menerapkan dan memperluas cakupan dari sistem peringatan dini yang akan membantu daya antisipasi dan tindak dini terhadap isu apapun yang dapat mengganggu pelaksanaan tata kelola.

Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko terus melakukan pengawasan secara harian, mingguan hingga bulanan terhadap seluruh potensi risiko investasi maupun pelaksanaan program.

Telkom Group terus membuka peluang bisnis dengan daya sinergi dan skala keekonomian yang terbentuk dari integrasi portofolio bisnis. Kami akan terus menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi untuk mengembangkan budaya bisnis untuk selalu "*care*" pada pelanggan. Komitmen Telkom 5C yang menekankan prinsip bahwa unit-unit usaha di jajaran Telkom Group bukan merupakan entitas yang terpisah, melainkan saling bersinergi satu sama lain untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman menyenangkan yang tak tergantikan, serta produk yang sangat handal dan layanan terbaik.

Selama tahun 2011 Telkom terus berinvestasi untuk memberdayakan potensi kreatif dan kewirausahaan di Indonesia melalui program tanggung jawab sosial Perusahaan. Kontribusi Telkom melalui investasi untuk pengembangan infrastruktur *broadband* di Indonesia sangat signifikan. Kami menyadari bahwa masih banyak pihak yang belum memahami gaya hidup digital. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dan individu untuk mengakses manfaat dari teknologi *broadband* agar mampu menciptakan nilai tambah, memperbaiki lingkungan dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan membangun sinergi di antara perusahaan mikro, kecil dan menengah terutama dalam industri musik dan industri berbasis tradisi dan kultur seperti batik dan karya kreatif lainnya, melalui penggunaan infrastruktur TIME diharapkan akan dapat meningkatkan pangsa pasar produk di pasar global.

Kami berterima kasih dan menyampaikan aspirasi yang tinggi terhadap Direksi dan karyawan yang telah bekerja keras dan mencurahkan semua potensi terbaiknya untuk selalu meningkatkan nilai tambah Perusahaan dari waktu ke waktu sesuai misi yang diamanatkan pemegang saham Telkom.

Telkom telah berperan penting dalam membawa bangsa Indonesia memasuki gaya hidup masa depan yang berbasis *broadband* melalui investasi di pengembangan infrastruktur digital. Dengan kemampuan teknologi dan fondasi pengelolaan Perusahaan yang memenuhi kaidah *"Good Corporate Governance"* serta kepercayaan para pemegang saham dan investor kepada Telkom, Saya yakin Perusahaan kini memiliki posisi strategis untuk tetap tumbuh dan berkembang di masa depan.

Jusman Syafii Djamal
Komisaris Utama

Laporan Direktur Utama

Di tahun ini, Kami melayani 129,8 juta pelanggan seluler, telepon tidak bergerak dan telepon tidak bergerak nirkabel. Jumlah pengguna *broadband* Kami sebesar 10,5 juta atau tumbuh 64,3%.

KINERJA

Tahun 2011 adalah periode penting bagi Telkom yang ditandai dengan pesatnya perkembangan bisnis-bisnis *new wave* Kami dalam memperkokoh layanan TIME dimana pertumbuhan bisnis IME dan Anak Perusahaan sangat tinggi di tengah tetap menurunnya layanan telepon kabel sehingga Kami dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang tetap solid serta lebih baik daripada periode sebelumnya. Kami juga telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis dalam menuntaskan agenda transformasi bisnis, infrastruktur, SDM serta budaya Perusahaan untuk terus mempertahankan posisi Kami sebagai *market leader* di industri TIME di Indonesia.

Jumlah pelanggan telefoni yang Kami layani terus meningkat, penggunaan *broadband* internet tumbuh pesat, demikian pula bisnis-bisnis *new wave* yang dikelola oleh Anak Perusahaan. Kami melayani sebanyak 129,8 juta pelanggan seluler, telepon tidak bergerak dan telepon tidak bergerak nirkabel atau tumbuh sebesar 7,8% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pengguna *broadband* Kami sebesar 10,5 juta atau tumbuh 64,3% yang terdiri dari pengguna *broadband wireline* Speedy sebesar 1,8 juta serta *broadband wireless* antara lain Telkomsel Flash dan layanan Blackberry sebesar 9,6 juta pengguna. Bisnis lainnya terutama bisnis *new wave* yang dikelola melalui Anak Perusahaan yang terkonsolidasi di Telkom seperti layanan TI, *call center* dan bisnis proses *outsourcing, tower*, perangkat pelanggan ("CPE"), TV berbayar, media serta bisnis *edutainment* lainnya berkembang sangat pesat. Melalui Anak Perusahaan TelkomVision jumlah pelanggan layanan TV berbayar Kami mencapai lebih dari satu juta pelanggan. Pada tahun 2011 pendapatan usaha Kami sebesar Rp71.253 miliar atau naik 3,8% dibandingkan tahun 2010.

Untuk memperkuat bisnis *legacy* dan mendorong pertumbuhan bisnis *new wave* sebagai strategi korporasi, Kami melakukan transformasi berkelanjutan menuju perusahaan yang memiliki portofolio bisnis TIME. Untuk mendukung bisnis tersebut Kami membangun sumber daya penunjangnya dalam bentuk infrastruktur, organisasi dan SDM. Sebagai bagian penting dari strategi TIME, Kami membangun infrastruktur *IP backbone* berbasis kabel optik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, yang Kami sebut Telkom Nusantara Super Highway. Di sisi akses ke pelanggan Kami telah mulai pembangunan *True Broadband Access* sebanyak 13 juta *homepass* dengan kecepatan 20-100 Mbps dengan mengganti kabel tembaga menjadi serat optik yang dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2015. Dengan kapasitas tersebut maka seluruh layanan TIME bisa diproduksi dan pelanggan akan menikmati layanan dengan kualitas tinggi. Sebagai bagian dari implementasi strategi korporasi, sampai dengan tahun 2011 Kami telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jaringan *IP backbone* dan metro berbasis kabel optik tidak kurang dari 63.000 kilometer yang menghubungkan kota-kota utama di Indonesia. Di sisi jaringan akses pelanggan sampai dengan tahun 2011 Kami telah berhasil membangun 2,5 juta sambungan *homepass* termasuk 1,2 juta sambungan akses berkecepatan tinggi (*True Broadband Access*).

Posisi keuangan Telkom yang kuat memfasilitasi pencapaian agenda investasi strategis Perusahaan."

Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan langkah-langkah strategis Kami untuk dapat mempersembahkan layanan *Triple Play* yang lebih luas dan memberikan kualitas layanan yang lebih baik di seluruh lini bisnis Kami termasuk Speedy, Indonesia Wi-Fi dan *cloud computing*. Layanan *Triple Play* Kami pada tahun 2011 telah tergelar di Jakarta serta beberapa kota utama di Jawa dan segera meluncur di wilayah-wilayah lainnya, menawarkan paket sambungan telepon tetap, internet berkecepatan tinggi (Speedy) dan Groovia-TV yang merupakan layanan IPTV pertama di Indonesia. Groovia-TV semakin melengkapi lini bisnis Kami dalam bisnis TV berbayar di Indonesia dengan memberikan pengalaman tersendiri kepada pelanggan melalui beberapa fitur utama IPTV, disamping pilihan paket berlangganan TV berbayar, seperti video dan TV *on-demand* yang memiliki kemampuan untuk merekam dan mengulang kembali siaran-siaran TV. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang handal dan terintegrasi dan dalam rangka implementasi *True Broadband everywhere* bagi pelanggan Telkom Group, Kami telah menggelar pula layanan Indonesia Wi-Fi dan menyediakan lebih dari 5.000 *access point* sebagai upaya memperluas layanan internet berkecepatan tinggi bagi pelanggan Speedy, Flash dan Flexi EVDO dimanapun mereka berada. Untuk melayani pasar aplikasi dan solusi bisnis termasuk *cloud computing*, pada tahun 2011 Kami telah menyediakan solusi untuk beragam tipe bisnis termasuk keuangan, kesehatan, transportasi dan logistik. Kami juga telah memulai layanan Delima *("Delivery Money Access")* yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pengiriman dana secara *peer to peer* melalui Telkomsel dan Flexi maupun layanan *agent to agent* melalui *cash points* yang berlogo Delima.

Sejalan dengan agenda transformasi, Kami melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan melakukan optimalisasi aset menuju struktur biaya Perusahaan semakin baik. Seiring dengan menurunnya pertumbuhan pendapatan pada bisnis sambungan tidak bergerak dan pergeserannya menuju bisnis data serta perkembangan teknologi telekomunikasi jaringan menuju berbasis IP, Kami selalu melakukan upaya memperbaiki struktur kompetensi karyawan. Pada tahun 2011 terdapat 762 karyawan yang mengikuti program pensiun dini dan memberi dampak positif terhadap penurunan biaya serta proporsi yang semakin baik antara kompetensi karyawan dengan kebutuhan Perusahaan.

Sesuai dengan modernisasi jaringan yang sedang berlangsung, Kami sedang menginventarisasi aset termasuk kapasitas ruangan dan pemakaian sumber daya energi yang dapat dioptimalkan untuk keperluan bisnis lainnya. Kami juga meningkatkan kualitas sinergi infrastruktur dalam grup seperti pengelolaan menara Telkomsel dan Flexi melalui Anak Perusahaan Kami Mitratel serta mendorong pengembangan bisnis persewaan menara untuk semakin mengoptimalkan aset yang Kami miliki. Dalam upaya pengembangan SDM Kami memperkuat integrasi dan sinergi grup dengan mendorong mobilitas karyawan di antara jajaran Telkom Group, tidak hanya antara Telkom dan Anak Perusahaan tetapi juga antar sesama Anak Perusahaan sehingga memperkuat upaya pencapaian tujuan bersama Kami. Kami juga meng-*upgrade* kemampuan SDM seiring dengan perubahan portofolio layanan Kami dari jasa layanan telekomunikasi standar menuju layanan TIME.

KONDISI PASAR SELAMA TAHUN 2011

Selama tahun 2011, terdapat berbagai dinamika di pasar dan perubahan regulasi yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja bisnis Kami. Secara umum bila dilihat dari portofolio bisnis Telkom maka pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi di bisnis *broadband* dan internet, serta pertumbuhan yang tinggi di bisnis-bisnis baru (*new wave*/IME) baik yang dialami oleh Telkom maupun pasar secara keseluruhan.

Setelah mengawali tahun 2011 dengan pertumbuhan yang moderat, kinerja bisnis seluler Kami kembali meningkat pada kuartal ketiga menyusul penyelesaian beberapa perbaikan penting di sistem TI, penagihan dan distribusi sehingga kini Kami dapat merespon dinamika pasar yang kompetitif ini dengan lebih cepat. Situasi bisnis seluler yang kompetitif terus terjadi selama tahun 2011 terutama dalam memperebutkan basis pelanggan, layanan data dan *value added service*. Peluncuran perangkat canggih seperti *tablet* dan *smartphone* dengan harga yang semakin terjangkau telah mendorong tumbuhnya permintaan data dan aplikasi terutama konten seluler yang sesuai dengan kebutuhan masyakarat. Dinamika eksternal seperti Peraturan Pemerintah yang terbit pada bulan Oktober 2011 yang menyerukan operator seluler untuk menghentikan dan memulai kembali dari awal layanan berlangganan konten SMS telah mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan di Kami maupun seluruh operator seluler, tetapi tidak berdampak serius pada seluruh kinerja perusahaan Kami. Pada tanggal 6 Desember 2011 regulator telah mengumumkan penataan kanal alokasi frekuensi 3G untuk lima operator dan itu memberikan kepastian bagi Kami untuk dapat merencanakan dan membangun kembali jaringan *broadband wireless* ke depan.

Pembatalan rencana merger antara Flexi dengan salah satu pesaing di bisnis telepon tetap nirkabel pada awal tahun ini membuat Kami bisa lebih fokus dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Flexi. Kami telah meluncurkan layanan data Flexi EVDO pada pertengahan tahun 2011, yang merupakan layanan berbasis *broadband wireless* sehingga dapat mempertahankan daya saing Flexi di pasaran. Pada layanan TV berbayar terjadi pertumbuhan jumlah pelanggan yang signifikan. TelkomVision sebagai Anak Perusahaan Kami mencatatkan lebih dari satu juta sambungan TV berlangganan di akhir tahun 2011. Pada tahun 2011 Kami juga mencatat adanya permintaan yang tinggi untuk berbagai layanan solusi bisnis termasuk yang berbasiskan *cloud computing*. Di sisi lain Kami juga memiliki bisnis *wireline* yang sesuai dengan industrinya sedang mengalami masa penurunan. Namun demikian secara keseluruhan Kami masih mencatatkan hasil bisnis yang positif di tahun 2011 ini.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Telkom adalah perusahaan yang menerapkan standar tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan terutama dalam penyajian laporan keuangan. Laporan Tahunan 2011 ini menjadi tonggak penting bagi Perusahaan karena pada tahun 2011 ini merupakan pertama kalinya Kami menggunakan pelaporan berbasis *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"). Persiapan untuk mengubah dasar pelaporan berstandar internasional ini telah direncanakan sejak lama, bahkan Kami dengan aktif mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") lainnya untuk mengadopsi inisiatif ini karena Kami yakin akan meningkatkan transparansi sekaligus memfasilitasi investor dan analis untuk mengukur nilai perusahaan secara adil.

Komitmen Kami dalam menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik dan upaya untuk terus melakukan perbaikan mendapatkan pengakuan dari pengamat dan regulator di industri ini. Pada bulan September Kami mendapat penghargaan *Most Consistent Dividend Policy and Strongest Adherence to Corporate Governance* pada ajang Best Financial Institutional Awards 2011, kemudian di bulan Desember 2011 Kami mendapat anugrah penghargaan Corporate Governance Perception Index sebagai *The Most Trusted Company 2011*, serta sejumlah penghargaan lain di antaranya penghargaan Anugerah *Business Award* untuk *Best Corporation* 2011, *Indonesia Sustainability Reporting Awards* ("ISRA") 2011 dan *Asia's Best Managed Company* dari Majalah Finance Asia. Penghargaan-penghargaan tersebut tentunya mencerminkan integritas Kami dalam menerapkan standar tertinggi dalam menjalankan usaha. Selain itu Laporan Tahunan 2010 Kami juga memperoleh anugerah satu dari tiga laporan terbaik untuk kategori perusahaan BUMN non-keuangan.

Sementara itu, sejalan dengan hasil RUPST, selama tahun 2011 tidak ada perubahan komposisi di jajaran Direksi Perusahaan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sebagai entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia, banyak hal yang telah dilakukan oleh Telkom sebagai kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan tanggung jawab sosial difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan ICT dimulai dari donasi, hibah, pembinaan sampai dengan inkubasi bisnis. Program utama yang telah dilaksanakan diantaranya Internet Goes to School, Program Bagimu Negeri, Santri Indigo dan terakhir inkubasi bisnis *Bandung* Digital Valley ("BDV"). Di samping itu, Telkom tetap melakukan kepedulian terhadap masyarakat melalui bantuan kemanusiaan di daerah-daerah yang mengalami bencana. Kami telah menyelesaikan pembangunan kembali beberapa gedung sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya yang terkena bencana alam seperti di Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta sehingga dapat digunakan kembali sebagai tempat belajar mengajar yang nyaman.

Untuk mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya industri kreatif digital di Indonesia, Kami telah membangun BDV yang merupakan inkubasi bisnis bagi *individual creative developers* dan *startup-companies* yang menekuni industri kreatif digital. Di tempat ini para penggiat industri tersebut dapat berinovasi menuangkan segala kreativitasnya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat. Melalui perannya menjembatani para pengembang solusi ICT

dan pasar, BDV tidak hanya akan memberikan konsultasi teknis tapi juga advokasi bisnis kepada mereka. Kami juga berupaya menumbuhkan *digital-preneurship* melalui program *Indigo Fellowship* dan *Indigo Digital Music Award*. Bersama dengan komunitas musik Kami aktif mengkampanyekan penggunaan musik digital yang legal.

Berbagai kegiatan lainnya yang terangkum dalam program tanggung jawab sosial selama tahun 2011 diantaranya partisipasi aktif Telkom dalam mendukung perkembangan olahraga seperti penyelenggaraan Speedy Tour d'Indonesia yang telah dilaksanakan rutin tahunan selama 4 tahun terakhir serta dalam pembinaan olahraga sepakbola dan bola basket secara nasional. Kami juga mempelopori penggunaan hidrokarbon sebagai refrigeran yang menjadi salah satu bukti nyata Kami dalam program *environmental leadership* Kami 'Telkom Go Green' dengan memanfaatkan produk-produk yang ramah lingkungan dan hemat energi dalam operasi bisnis Kami.

PROSPEK USAHA 2012

Kami melihat tahun 2012 akan menjadi tahun penting dalam masa transformasi Telkom untuk menjadi penyelenggara layanan TIME yang komprehensif. Kami optimis bahwa Telkom dapat mengambil manfaat yang maksimal dari prospek bisnis di tahun 2012 terutama dalam beberapa hal yang mendasar.

Pertama, pasar untuk bisnis-bisnis *new wave* semakin berkembang. Penetrasi *broadband* saat ini sedang berada dalam tahap pertumbuhan yang cepat dan Kami melihatnya sebagai sebuah peluang yang baik untuk terus melakukan ekspansi layanan *broadband* serta mengisinya dengan konten yang menarik dan terintegrasi dengan konektivitas yang Kami sediakan. Groovia-TV yang merupakan layanan baru IPTV Kami hadirkan untuk melengkapi TelkomVision sebagai layanan televisi berlangganan yang kompetitif di pasar dan untuk memperkuat optimisme Kami menjadi yang terdepan dalam layanan TV berbayar. IPTV ini juga merupakan perekat layanan *Triple Play* dan *triple-screen* yang akan memperkuat posisi Telkom di mata pelanggan. Di samping itu, Anak Perusahaan Kami yang bergerak dalam bisnis *new wave* maupun bisnis pendukung lainnya memiliki kemampuan yang prima untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan pasar saat ini seperti layanan TI dan *cloud computing*, *contact center*, *international carrier, customer premise equipments* serta pengelolaan infrastruktur (*managed services*) termasuk penyediaan menara telekomunikasi.

Kedua, Kami tetap memberikan perhatian yang serius kepada *core business* yaitu layanan telefoni dasar yang sampai saat ini masih menjadi kontributor utama terhadap pendapatan serta masih terbukanya prospek pertumbuhan terutama dalam bisnis seluler Kami serta terdapat peluang besar dalam konvergensi layanan *fixed, mobile* serta konten IME yang dapat disalurkan di dalamnya. Kebutuhan akan layanan *broadband*,

internet berkecepatan tinggi maupun video yang memerlukan kapasitas jaringan yang besar merupakan tren permintaan pasar yang akan Kami jawab dengan mentransformasikan infrastruktur lama menuju *next generation network* ("NGN"), diantaranya dengan mengganti kabel-kabel tembaga dengan fiber optik serta mengintegrasikannya dengan *wireless network* sehingga pelanggan dapat menikmati layanan *multiplay* maupun *multiscreen*. Kami yakin bahwa ke depan konvergensi tersebut dapat menjadi keunggulan bersaing Kami dan akan memperkuat faktor keunggulan lainnya yaitu *customer base* yang terbesar di setiap jenis layanan tersebut, serta visi untuk selalu menjadi yang terdepan dari seluruh kelompok usaha dalam perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group.

Ketiga, dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan, Kami terus melaksanakan *cost optimization* di berbagai lini agar struktur biaya Perusahaan semakin membaik namun tidak mengurangi kualitas layanan kepada pelanggan. Fokus efisiensi Kami adalah biaya-biaya yang masih bisa diefisienkan baik melalui perbaikan sistem pengelolaannya maupun dengan meningkatkan sinergi antara perusahaan yang ada di dalam Telkom Group. Dan Kami mengupayakan agar *cost optimization* ini akan meningkatkan kualitas pelayanan (*service assurance*) yang akan dirasakan hasilnya oleh pelanggan.

Hal-hal yang Kami lakukan di atas pada dasarnya merupakan upaya-upaya menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham Perusahaan. Kami yakin bahwa terdapat potensi yang besar untuk terus tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif di industri ini dengan hasilnya adalah neraca keuangan yang kuat yang dilandasi oleh prinsip pengelolaan perusahaan yang hati-hati. Kami siap menjadi *role model* pengelolaan perusahaan yang sehat bagi organisasi-organisasi lain yang dinamis dan berkeinginan untuk terus maju.

Akhirnya, Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan Kami atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga Perusahaan dapat mencapai kinerja yang baik di tahun 2011. Kami menyampaikan pula terima kasih serta penghargaan atas arahan dan bimbingan dari Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya Kami sampaikan bagi para pemegang saham, mitra usaha, mitra bisnis, pelanggan serta pemangku kepentingan lain atas kepercayaan dan dukungannya yang tiada henti kepada Telkom Indonesia.

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama/CEO

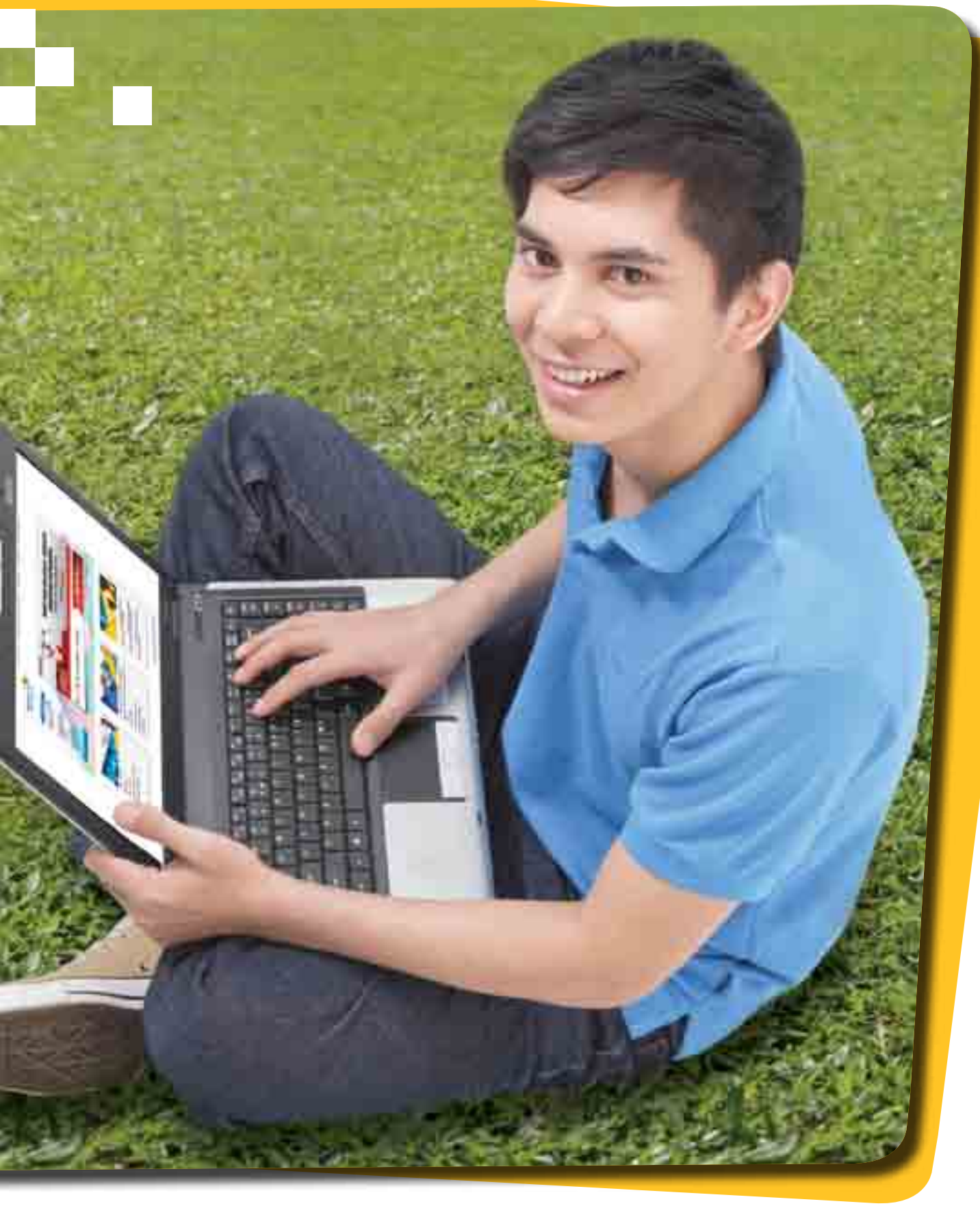

Profil Perusahaan

ALAMAT

KANTOR PUSAT
GKP Telkom
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 7101
Fax.: (62-22) 424 0313

INVESTOR RELATIONS
Grha Citra Caraka, Lantai 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 521 5109
Fax.: (62-21) 522 0500

DIVISI CONSUMER SERVICE BARAT
Grha Citra Caraka, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 525 8416
Fax.: (62-21) 520 2733

DIVISI CONSUMER SERVICE TIMUR
Jl. Ketintang No. 156
Surabaya 60231
Tel. : (62-31) 828 6250
Fax.: (62-31) 828 6080

DIVISI BUSINESS SERVICE
Jl. Letjen S. Parman Kav. 8, Lantai 2
Jakarta 11440
Tel. : (62-21) 565 8500
Fax.: (62-21) 565 2800

DIVISI ENTERPRISE SERVICES
Gedung Chase Plaza, Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12910
Tel. : (62-21) 386 6600
Fax.: (62-21) 386 8400

DIVISI MULTIMEDIA
Menara Multimedia, Lantai 15
Jl. Kebon Sirih No. 12
Jakarta 10110
Tel. : (62-21) 386 0500
Fax.: (62-21) 386 6267

DIVISI TELKOM FLEXI
Jl. Kebon Sirih Raya No. 36
Jakarta 10110
Tel. : (62-21) 344 7070
Fax.: (62-21) 344 0707

RIWAYAT SINGKAT TELKOM

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. ("Telkom", "Perseroan", "Perusahaan", atau "Kami") merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), New York Stock Exchange ("NYSE"), London Stock Exchange ("LSE") dan *public offering without listing* ("POWL") di Jepang.

Layanan telekomunikasi dan jaringan Telkom sangat luas dan beragam meliputi layanan dasar telekomunikasi domestik dan internasional, baik menggunakan jaringan kabel, nirkabel tidak bergerak (*Code Division Multiple Access* atau "CDMA") maupun *Global System for Mobile Communication* ("GSM") serta layanan interkoneksi antar operator penyedia jaringan. Di luar layanan telekomunikasi, Telkom juga berbisnis di bidang Multimedia berupa konten dan aplikasi, melengkapi portofolio bisnis Perusahaan yang disebut TIME. Bisnis telekomunikasi adalah fundamental *platform* bisnis Perusahaan yang bersifat *legacy*, sedangkan portofolio bisnis lainnya disebut sebagai bisnis *new wave* yang mengarahkan Perusahaan untuk terus berinovasi pada produk berbasis kreatif digital. Hal tersebut mempertegas komitmen Telkom untuk terus meningkatkan pendapatan di dalam situasi persaingan bisnis di industri ini yang sangat terbuka.

Adalah obsesi Perusahaan untuk secara berkelanjutan membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah menjadi perusahaan dengan skala besar, dengan tetap mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, Perusahaan juga terus melakukan diversifikasi usaha baik melalui merger ataupun akuisisi. Saat ini Perusahaan sedang memperkuat fundamental jaringan *broadband* di kawasan Indonesia Timur melalui proyek Palapa Ring sehingga dapat mewujudkan jaringan nasional yang kuat dengan nama Nusantara Super Highway.

Komitmen Kami terhadap konektivitas dan mobilitas data yang handal dan terpercaya, mampu meningkatkan jumlah pelanggan *broadband* Kami menjadi 10,5 juta pelanggan per 31 Desember 2011, atau meningkat sebesar 64,3%. Sementara itu, pelanggan layanan seluler meningkat pesat sebesar 13,8% atau 13 juta pelanggan baru sehingga total pelanggan seluler menjadi 107 juta.

1856-1882

Pada tanggal 23 Oktober 1856, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengoperasian telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia yang menghubungkan *Batavia* (Jakarta) dan *Buitenzorg* (Bogor).

1906-1965

Pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga pemerintah untuk mengendalikan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi pemisahan jasa pos dan telekomunikasi sehingga ditangani oleh dua perusahaan negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi.

1974

PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua divisi, yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("PT INTI") yang memproduksi perangkat telekomunikasi dan Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) untuk melayani jasa telekomunikasi domestik dan internasional.

1980

Bisnis telekomunikasi internasional diambil alih oleh PT Indonesian Satellite Corporation ("Indosat").

1991

Nama PT PERUMTEL berubah menjadi PT. Telekomunikasi Indonesia atau Telkom dengan operasi bisnis terbagi atas dua belas wilayah telekomunikasi (witel). Kedua belas witel tersebut kemudian dirombak menjadi tujuh divisi regional (divre), yaitu Divisi I Sumatera, Divisi II Jakarta dan sekitarnya, Divisi III Jawa Barat, Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Divisi V Jawa Timur, Divisi VI Kalimantan dan Divisi VII Indonesia Bagian Timur.

1995

Telkom melaksanakan penawaran saham perdana publik (*Initial Public Offering*) pada tanggal 14 November 1995 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 26 Mei 1995, Telkom mendirikan Anak Perusahaan yang menangani bisnis telepon seluler, Telkomsel.

1999

Undang-Undang telekomunikasi (UU No.36/1999) yang berlaku efektif pada bulan September 2000 telah memfasilitasi masuknya pemain baru sehingga menumbuhkan persaingan usaha di industri telekomunikasi.

2001

Telkom mengakuisisi 35% saham Indosat di Telkomsel sehingga menjadikannya pemegang saham mayoritas di perusahaan seluler itu dengan kepemilikan 77,7% Indosat kemudian mengambil alih 22,5% saham Telkom di Satelindo dan 37,7% saham Telkom di PT Lintasarta Aplikanusa. Pada saat yang bersamaan, Telkom kehilangan hak eksklusifnya sebagai penyelenggara tunggal layanan telepon tidak bergerak di Indonesia.

2002

Telkom melepaskan kepemilikan sahamnya sebesar 12,7% di Telkomsel kepada Singapore Telecom Mobile Pte Ltd ("SingTel Mobile").

2004

Telkom meluncurkan layanan sambungan langsung internasional untuk telepon tidak bergerak.

2005

Satelit Telkom-2 diluncurkan untuk menggantikan seluruh layanan transmisi satelit yang sebelumnya dilayani oleh satelit Palapa B-4. Peluncurannya menjadikan jumlah satelit yang telah diluncurkan oleh Telkom menjadi delapan satelit, termasuk satelit Palapa A-1.

2009

Telkom bertransformasi dari Perusahaan Infocomm menjadi Perusahaan penyelenggara TIME. Wajah baru Telkom diperkenalkan kepada publik dengan menampilkan logo dan *tagline* baru Perusahaan *'the world in your hand*".

2010

Proyek kabel serat optik bawah laut JaKaLaDeMa yang menghubungkan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar dan Mataram telah berhasil dirampungkan pada bulan April 2010.

2011

Reformasi infrastruktur telekomunikasi melalui proyek Telkom Nusantara Super Highway yang menyatukan nusantara mulai dari Sumatera hingga Papua, serta proyek *True Broadband Access* yang menyediakan akses internet berkapasitas 20-100 Mbps ke pelanggan di seluruh Indonesia.

Telkom Indonesia

the world in your hand

Visi

Menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan TIME di kawasan regional.

Misi

- Menyediakan layanan TIME yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
- Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

Tujuan

Menjadi posisi terdepan dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015.

Inisiatif Strategi

1. Mengoptimalkan layanan POTS dan memperkuat infrastruktur broadband.
2. Mengkonsolidasikan dan mengembangkan bisnis sambungan telepon nirkabel tidak bergerak/ Fixed Wireless Access ("FWA") serta mengelola portofolio nirkabel.
3. Mengintegrasikan Solusi Ekosistem Telkom Group.
4. Berinvestasi di layanan Teknologi Informasi (TI).
5. Berinvestasi di bisnis media dan edutainment.
6. Berinvestasi pada peluang bisnis wholesale dan internasional yang strategis.
7. Berinvestasi pada peluang domestik yang strategis dengan mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki.
8. Mengintegrasikan Next Generation Network ("NGN") dan Operational support system, Business support system, Customer support system and Enterprise relations management ("OBCE").
9. Menyelaraskan struktur bisnis dengan pengelolaan portofolio.
10. Melakukan transformasi budaya Perusahaan.

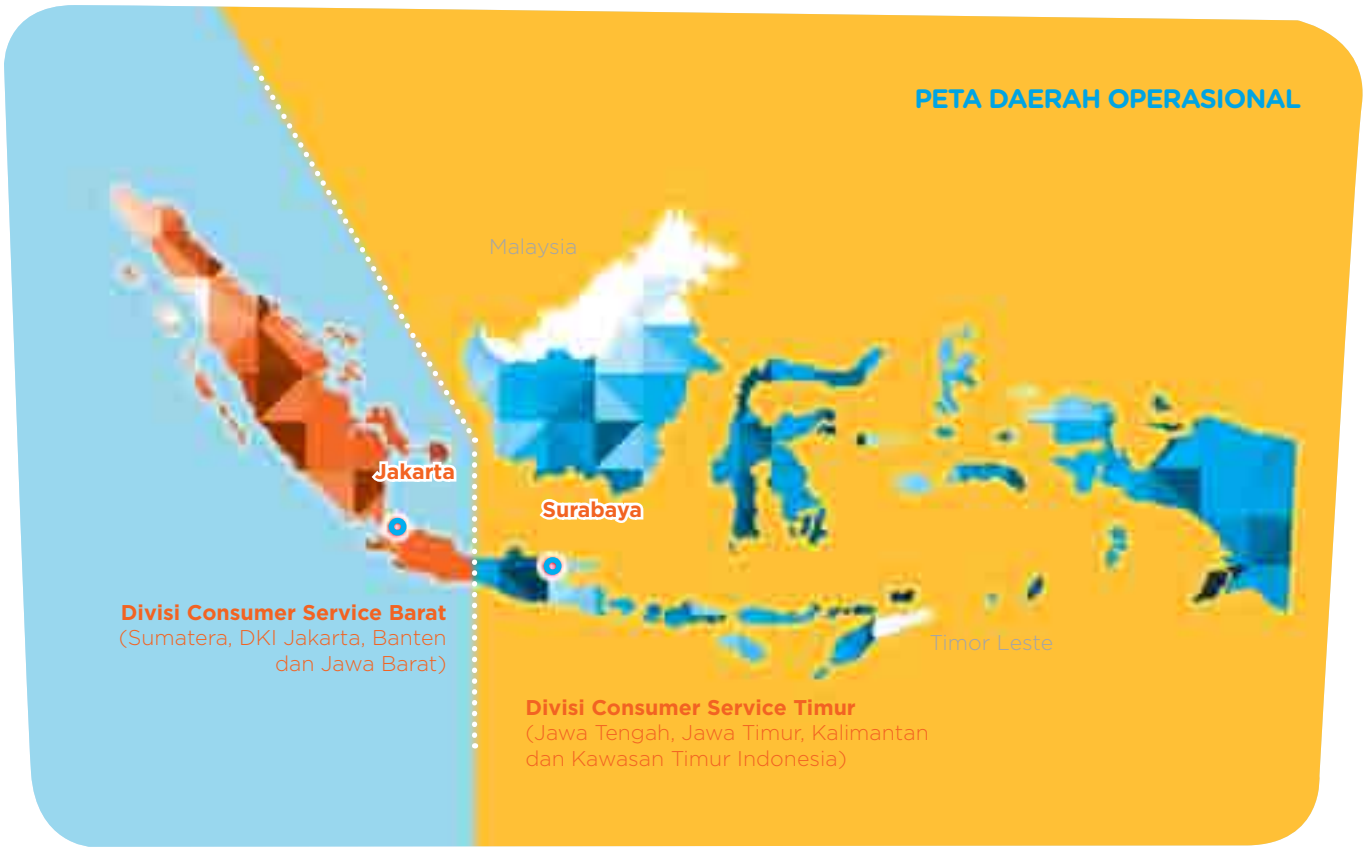

PETA DAERAH OPERASIONAL

Sejalan dengan ditetapkannya inisiatif strategis Telkom untuk mengoptimalkan layanan POTS yang merupakan salah satu layanan bisnis *legacy* Telkom, Perusahaan merasa perlu menata kembali mekanisme pengelolaan bisnis tersebut, terutama pada segmen ritel kabel tidak bergerak (*Fixed Wireline* atau "FWL") yang memiliki karakteristik pelanggan berdasarkan lokasi, alamat dan tempat tinggal.

Oleh karena itu, Telkom memetakan kembali segmen dan pelanggan yang menjadi pasar utama bisnis ritel FWL tersebut serta memanfaatkan *channel* potensial yang lebih sesuai dengan lingkungan usaha Perusahaan guna mewujudkan konvergensi layanan Telkom secara efektif.

Dalam mengupayakan hal tersebut, Telkom telah membentuk Divisi Consumer Service yang merupakan sebuah unit bisnis khusus untuk mengelola dan menyelenggarakan operasi penjualan dan layanan kepada pelanggan bisnis segmen ritel FWL serta penjualan *channel*. Divisi Consumer Service berada di bawah naungan Direktorat Konsumer.

Dalam menjalankan peran operasionalnya, Divisi Consumer Service dibagi menjadi dua wilayah besar, yaitu:

1. Divisi Consumer Service Barat, dikepalai oleh seorang Executive General Manager dan berkantor pusat di Jakarta. Divisi ini membawahi sejumlah wilayah operasional meliputi Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
2. Divisi Consumer Service Timur, dikepalai oleh seorang Executive General Manager dan berkantor pusat di Surabaya. Divisi ini membawahi wilayah operasional meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari implementasi transformasi bisnis Perusahaan menjadi penyelenggara layanan TIME, Telkom telah melakukan penataan organisasi untuk memastikan *sustainable competitive growth*.

Pada "tahun 2011", Telkom telah melakukan penyesuaian tugas dan fungsi pada beberapa unit strategis yaitu:

a. Mengubah nama Direktorat IT, Solution & Supply menjadi Direktorat IT, Solution & Strategic Portfolio menyusul penambahan fungsi *Strategic Investment & Corporate Planning* yang merupakan implikasi dari diintegrasikannya unit Strategic Investment & Corporate Planning ke dalam direktorat tersebut untuk mengkondisikan penyelarasan proses *corporate planning & strategic investment*. Kemudian agar lebih fokus pada pengelolaan *IT, Service* serta *Strategic Planning & Strategic Portfolio*, terdapat pengalihan beberapa fungsi dari direktorat ini kepada direktorat lain, yaitu pengalihan fungsi *supply management* yang terdiri dari *supply planning* & *control* serta *supply center* kepada Direktorat Compliance & Risk Management. Pengalihan fungsi ini membantu Direktorat IT, Solution & Strategic Portfolio untuk fokus pada pelaksanaan fungsinya.
b. Penambahan fungsi *supply management* pada Direktorat Compliance & Risk Management dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan proses *supply management* dengan proses *compliance* dan perimbangan beban kerja direktorat.
c. Perubahan struktur organisasi Internal Audit yang diselaraskan dengan kebutuhan proses audit secara komprehensif *(end to end)*.
d. Penggabungan Departemen Corporate Communication dan Departemen Corporate Affair untuk memastikan proses kerja yang lebih efektif dan efisien.

Bagan Struktur Organisasi Telkom

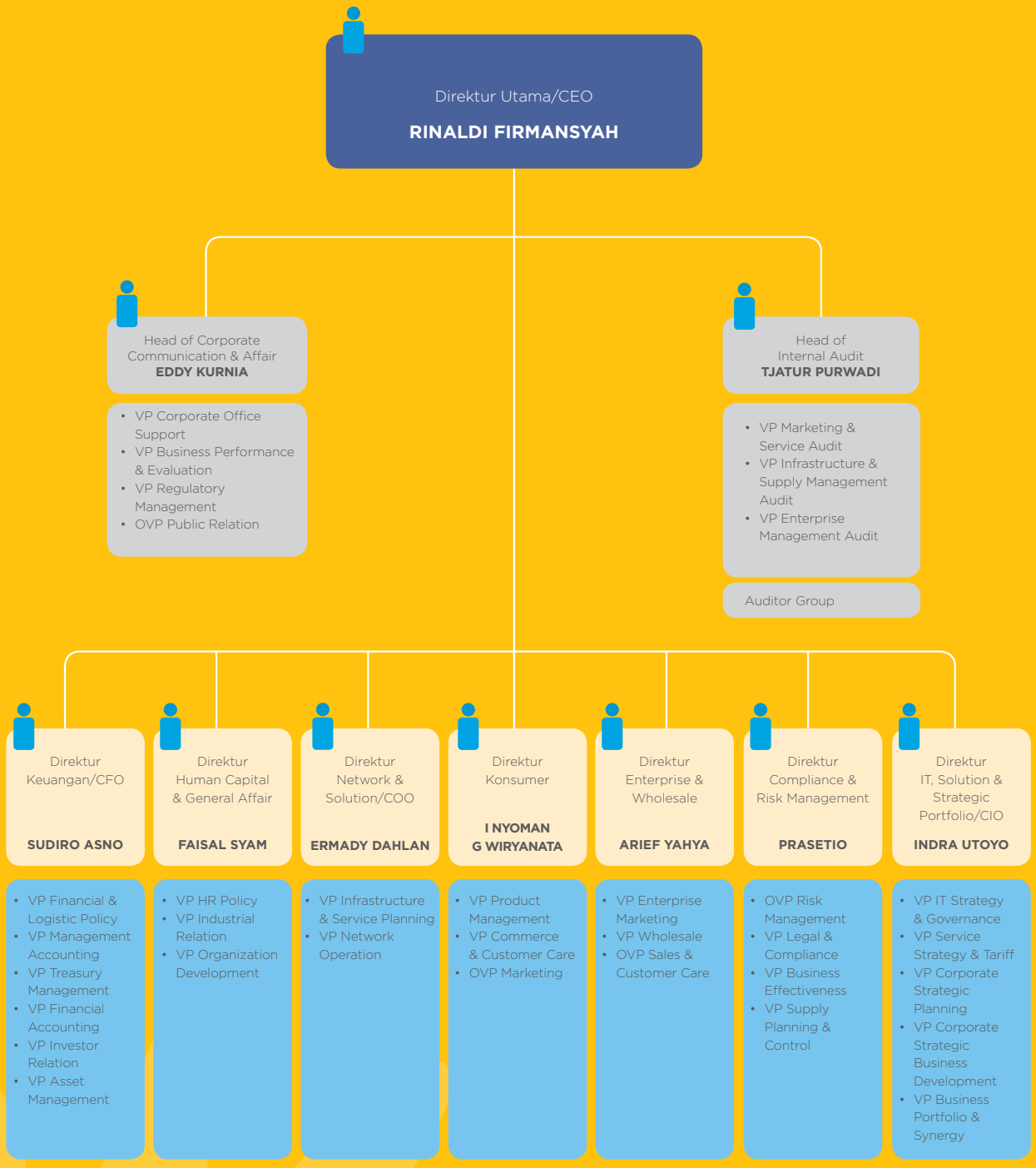
Direktur Utama/CEO
RINALDI FIRMANSYAH
Head of Corporate Communication & Affair
EDDY KURNIA
• VP Corporate Office Support
• VP Business Performance & Evaluation
• VP Regulatory Management
• OVP Public Relation
Head of Internal Audit
TJATUR PURWADI
• VP Marketing & Service Audit
• VP Infrastructure & Supply Management Audit
• VP Enterprise Management Audit
Auditor Group
Direktur Keuangan/CFO
SUDIRO ASNO
• VP Financial & Logistic Policy
• VP Management Accounting
• VP Treasury Management
• VP Financial Accounting
• VP Investor Relation
• VP Asset Management
Direktur Human Capital & General Affair
FAISAL SYAM
• VP HR Policy
• VP Industrial Relation
• VP Organization Development
Direktur Network & Solution/COO
ERMADY DAHLAN
• VP Infrastructure & Service Planning
• VP Network Operation
Direktur Konsumer
I NYOMAN G WIRYANATA
• VP Product Management
• VP Commerce & Customer Care
• OVP Marketing
Direktur Enterprise & Wholesale
ARIEF YAHYA
• VP Enterprise Marketing
• VP Wholesale
• OVP Sales & Customer Care
Direktur Compliance & Risk Management
PRASETIO
• OVP Risk Management
• VP Legal & Compliance
• VP Business Effectiveness
• VP Supply Planning & Control
Direktur IT, Solution & Strategic Portfolio/CIO
INDRA UTOYO
• VP IT Strategy & Governance
• VP Service Strategy & Tariff
• VP Corporate Strategic Planning
• VP Corporate Strategic Business Development
• VP Business Portfolio & Synergy

Berikut ini adalah struktur organisasi Telkom yang berlaku selama tahun 2011:

Nama Direktorat	Fungsi dan Wewenang
Direktorat Keuangan	Fokus pada pengelolaan keuangan Perusahaan serta mengendalikan operasi keuangan secara terpusat melalui unit Finance, Billing & Collection Center.
Direktorat Human Capital & General Affair	Fokus pada manajemen SDM Perusahaan serta penyelenggaraan operasional SDM secara terpusat melalui unit Human Resources Center, serta pengendalian operasi unit: Learning Center, HR Assessment Center, Management Consulting Center dan Community Development Center.
Direktorat Network & Solution	Fokus pada pengelolaan *Infrastructure Planning & Development, Network Operation Policy*, dan pengendalian operasional infrastruktur melalui Divisi Infrastruktur Telekomunikasi, Divisi Access, dan Maintenance Service Center.
Direktorat Konsumer	Fokus dalam pengelolaan bisnis segmen konsumer serta pengendalian operasi Divisi Consumer Services Barat dan Divisi Consumer Services Timur serta Divisi Telkom Flexi.
Direktorat Enterprise & Wholesale	Fokus pada pengelolaan bisnis segmen *Enterprise & Wholesale* serta pengelolaan Divisi Enterprise Service, Divisi Business Service dan Divisi Carrier & Interconnection Service.
Direktorat Compliance & Risk Management	Fokus pada pengelolaan fungsi *Risk Management, Legal* dan *Compliance, Business Effectiveness, Security & Safety,* dan *Supply Planning & Control*, serta pengendalian operasi unit Supply Center.
Direktorat IT, Solution & Strategic Portfolio (IT, SSP)	Fokus pada pengelolaan *IT Strategy & Policy, Service Strategy & Tariff,* dan pengelolaan fungsi *Strategic Investment & Corporate Planning,* serta pengendalian operasi unit-unit: Divisi Multimedia, Information System Center serta R&D Center.

STRUKTUR ANAK PERUSAHAAN

Untuk mendukung pengembangan bisnisnya, Telkom Group terus bertumbuh baik secara organik maupun anorganik. Pertumbuhan secara organik dilakukan dengan ekspansi divisi-divisi yang ada dan sinergi di antara Anak Perusahaan Telkom. Sementara pertumbuhan secara unorganik dicapai melalui aksi korporasi berupa akuisisi terhadap Perusahaan yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada seluruh jajaran Telkom Group dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kelangsungan bisnis.

A. Anak Perusahaan dengan kepemilikan langsung lebih dari 50%

PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")

Telkomsel, yang merupakan operator seluler terkemuka di Indonesia, didirikan pada tanggal 26 Mei 1995, menyediakan layanan jasa telepon *mobile* seluler (GSM). Telkomsel dimiliki 65% oleh Telkom.

PT Multimedia Nusantara ("Metra")

Metra, yang berperan sebagai *strategic invesment company* guna mendukung realisasi bisnis *new wave* Telkom Group, diakuisisi pada tanggal 9 Mei 2003. Metra yang 100% sahamnya dimiliki Telkom berfokus pada layanan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan jaringan dan jasa, serta layanan multimedia (jasa sistem komunikasi data, jasa portal dan jasa transaksi *online*).

PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII" atau "Telin")

Telin pada awal pendiriannya menyediakan layanan telepon-tetap (KSO-III Jabar & Banten) dan telekomunikasi internasional. Diakuisisi pada tanggal 31 Juli 2003, seluruh saham Telin dimiliki Telkom. Telin bertanggung jawab mengelola telekomunikasi internasional serta mengelola bisnis Telkom di luar negeri.

PT Pramindo Ikat Nusantara ("Pramindo")

Pramindo pada awalnya didirikan untuk menyelenggarakan Kerja Sama Operasi ("KSO") Telekomunikasi di wilayah Sumatera, diakuisisi pada tanggal 15 Agustus 2002, 100% saham Pramindo dimiliki Telkom dengan menyediakan layanan jasa dan pengembangan telekomunikasi.

PT Infomedia Nusantara ("Infomedia")
Infomedia, diakuisisi pada tanggal 22 September 1999 untuk menyelenggarakan KSO di Sumatera, dengan fokus pada layanan buku petunjuk telepon dan layanan informasi dan *call center*. Infomedia yang 100% sahamnya dimiliki Telkom, melalui 49% kepemilikan Metra, telah melakukan transformasi bisnis dari 3 pilar bisnis (layanan direktori, layanan *contact center* dan layanan konten) menjadi *Business Process Outsourcing* ("BPO") dan *Digital Media & Rich Content* ("DMRC").

PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra" atau "Mitratel")
Mitratel menyediakan layanan telepon tidak bergerak, penyediaan sarana-prasarana telekomunikasi dan jasa telekomunikasi. Diakuisisi pada tanggal 17 Mei 2001, Mitratel yang 100% sahamnya dimiliki Telkom telah bertransformasi dengan menggarap bisnis penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk penyediaan menara telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan penempatan BTS bagi para operator telekomunikasi di seluruh Indonesia.

PT Indonusa Telemedia ("Indonusa")
Indonusa didirikan pada tanggal 7 Mei 1997, dengan fokus pada penyediaan layanan multimedia (TV berbayar dan internet). Sejak tahun 2007, Indonusa yang 100% sahamnya dimiliki Telkom, melalui 0,46% kepemilikan Metra, merupakan operator Pay TV pertama di Indonesia yang meluncurkan produk *DTH Prepaid* (*prepaid satellite pay-TV*) dengan nama TelkomVision. Layanan ini memungkinkan pelanggan memilih konten dengan harga terjangkau dan bebas mengisi *voucher* apa saja dan kapan saja.

PT Graha Sarana Duta ("GSD")
GSD menyediakan layanan pengelolaan gedung, jasa konstruksi dan pengembangan. Diakuisisi pada tanggal 25 April 2001, Telkom memiliki 99,99% saham GSD. GSD memiliki cakupan wilayah kerja di seluruh Indonesia dan melakukan pengelolaan terhadap gedung-gedung Perusahaan Telkom Group serta juga mengelola gedung lain di luar gedung Telkom Group.

PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo")
Didirikan pada tanggal 29 Desember 1998, Napsindo menyediakan layanan *network access point*. Telkom memiliki 60% saham Napsindo. Sejak tanggal 13 Januari 2006, Napsindo telah berhenti beroprasi.

B. Anak Perusahaan dengan kepemilikan langsung antara 20% sampai dengan 50%

PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")
Patrakom didirikan pada tanggal 28 September 1995, dengan fokus pada layanan komunikasi satelit (*Very Small Aperture Terminal* atau "VSAT") dan layanan serta fasilitas terkait kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan. Telkom memiliki 40% saham Patrakom.

PT Citra Sari Makmur ("CSM")
CSM didirikan pada tanggal 14 Februari 1986, dengan fokus pada layanan telekomunikasi terkait dengan aplikasi VSAT dan teknologi telekomunikasi lainnya, serta jasa konsultasi. Telkom memiliki 25% saham CSM.

PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN")
PSN didirikan pada tanggal 2 Juli 1991. Telkom memiliki 22,38% saham PSN. PSN menyediakan layanan sewa transponder satelit dan satelit berbasis jasa komunikasi untuk negara di kawasan Asia Pasifik. PSN melakukan penawaran saham perdana atas saham biasa dan mencatatkan sahamnya di NASDAQ pada bulan Juni 1996, namun Perusahaan melakukan divestasi pada tanggal 6 November 2001 setelah gagal memenuhi persyaratan tertentu dari NASDAQ National Market Listing.

C. Anak Perusahaan dengan kepemilikan langsung kurang dari 20%

PT Batam Bintan Telekomunikasi ("BBT")
BBT didirikan pada tanggal 15 Juni 1996 melayani telekomunikasi sambungan kabel tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo, Batam dan Bintan Beach International Resort serta Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan. Saham BBT dikuasai Telkom sebesar 5%.

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia ("Bangtelindo")
Bangtelindo didirikan pada tanggal 24 Desember 1993, yang menyediakan jasa konstruksi dan pemeliharaan sarana telekomunikasi. Saham Bangtelindo 2,11% dimiliki oleh Telkom.

D. Anak Perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung

PT Metranet ("Metra-Net")
Metra-Net yang didirikan pada tanggal 17 April 2009, dengan fokus layanan jasa portal multimedia. Saham Metra-Net 100% dimiliki Metra.

PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma")
Sigma didirikan pada tanggal 1 Mei 1987 dengan fokus pada penyediaan jasa *IT & Solution*. Telkom kini memiliki 100% saham Sigma setelah bulan Agustus 2010 Metra mengakuisisi 20% sahamnya.

PT Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd
PT Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Telin, PT Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd didirikan pada tanggal 6 Desember 2007 berdasarkan hukum Republik Singapura. Ragam layanan yang dimiliki adalah jasa telekomunikasi termasuk tetapi tidak terbatas jasa *voice* dan data berbasis internet, layanan data, *callback/call-reorigination*, jasa kartu telpon *pre-paid* dan *resale* jasa sewa sirkuit.

Telkomsel Finance B.V ("TFBV")
TFBV didirikan di Amsterdam pada tanggal 7 Februari 2005 untuk tujuan peminjaman dan pengumpulan dana, termasuk penerbitan obligasi, surat kesanggupan bayar dan surat berharga lainnya. Telkom memiliki saham TFBV melalui Telkomsel sebesar 65%.

PT Telekomunikasi Indonesia International (Hong Kong) Ltd
PT Telekomunikasi Indonesia International (Hong Kong) Ltd didirikan di Hong Kong pada tanggal 8 Desember 2010 dan telah memperoleh *Unified Carrier License* ("UCL") pada tanggal 1 Maret 2011 untuk membangun, memberikan dan memelihara pelayanan jaringan telekomunikasi publik dengan menggunakan instalasi radio komunikasi. Telkom memiliki 100% saham Telin Hong Kong melalui Telin.

PT Administrasi Medika ("AdMedika")
AdMedika didirikan pada tanggal 25 Februari 2010, yang melayani jasa *claim online* antara pihak rumah sakit dan perusahaan asuransi kesehatan. Telkom memiliki saham di AdMedika melalui Metra sebesar 75%.

PT Balebat Dedikasi Prima ("Balebat")
Balebat yang diakuisisi pada tanggal 1 Oktober 2003, melayani jasa percetakan. Telkom memiliki 65% saham di Balebat melalui Infomedia.

Telekomunikasi Selular Finance Limited ("TSFL")
TSFL merupakan Telkomsel yang didirikan pada tanggal 22 April 2002 dan bergerak di bidang investasi dan keuangan. Telkom menguasai 65% saham TSFL melalui Telkomsel.

PT Finnet Indonesia ("Finnet")
Finnet didirikan pada tanggal 31 Oktober 2005, dengan fokus pada penyediaan infrastruktur TI, aplikasi & konten untuk melayani kebutuhan sistem informasi dan transaksi keuangan bagi industri perbankan dan jasa keuangan lainnya. Saham Finnet dimiliki oleh Metra (60%).

PT Melon Indonesia ("Melon")
Melon merupakan perusahaan *joint venture* didirikan pada tanggal 16 Agustus 2010 oleh Metra dan South Korea Telecom dengan komposisi saham 51% dan 49%. Perusahaan yang merupakan realisasi ekspansi di bisnis *Media & Edutainment* ini fokus pada bisnis layanan musik digital dan konten lain untuk telepon seluler, komputer pribadi, kanal elektronik konsumen dan media digital lainnya.

Scicom ("MSC") Bhd
Scicom didirikan pada tahun 1997, merupakan perusahaan penyedia jasa *contact centre* yang berbasis di Malaysia. Kepemilikan saham Telkom di Scicom melalui Telin adalah sebesar 29,71% yang memposisikannya sebagai pemegang saham mayoritas.

Struktur Kelompok Usaha Telkom

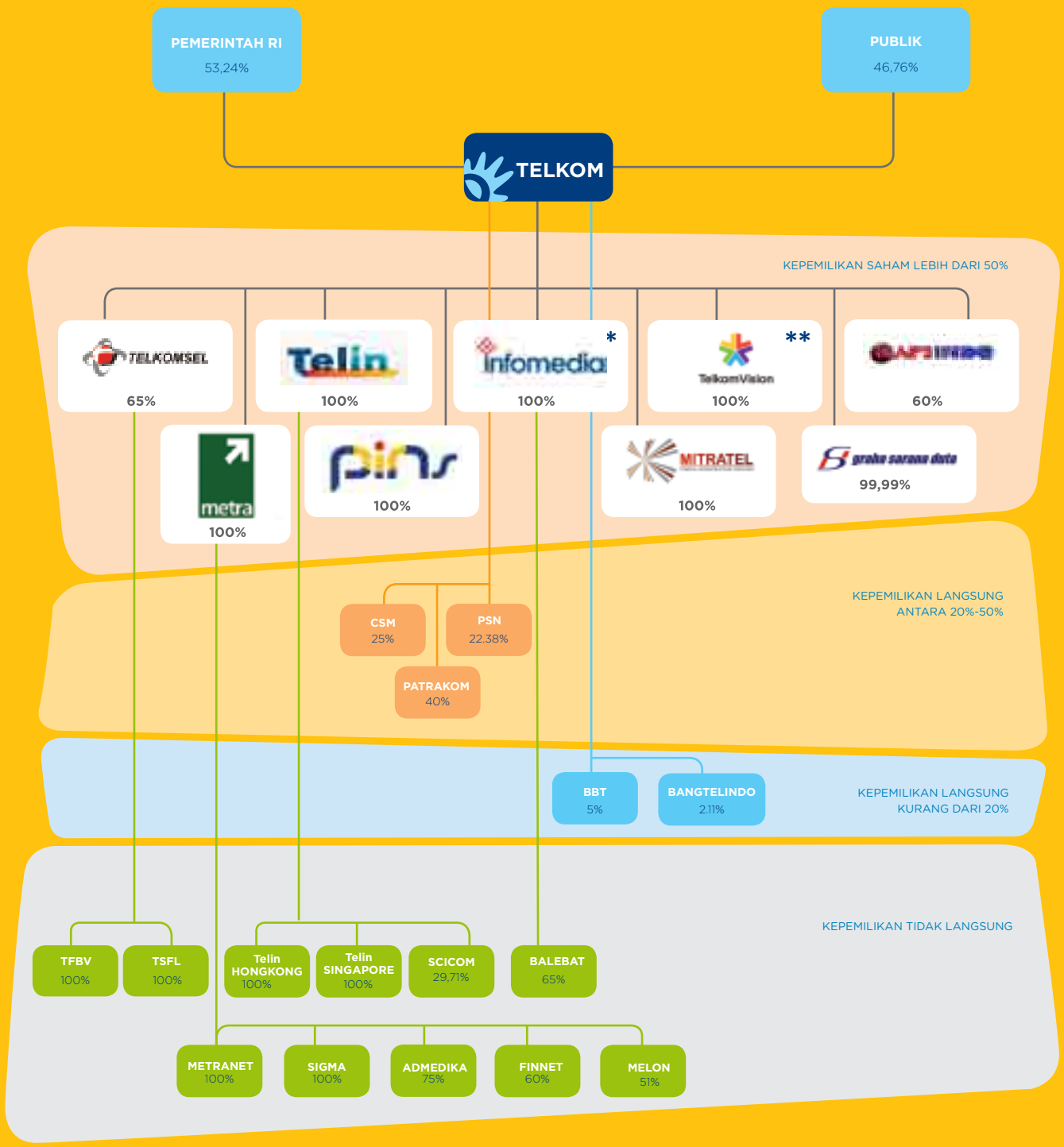

* 51% saham dimiliki oleh Telkom dan 49% saham dimiliki oleh Metra.
** 99,54% saham dimiliki oleh Telkom dan 0,46% saham dimiliki oleh Metra.

Profil Dewan Komisaris

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Komisaris Utama

Jusman Syafii Djamal, 57 tahun, sejak 1 Januari 2011 diberi amanah Pemegang Saham menjadi Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sarjana Teknik Mesin ITB Jurusan *Aeronautical Engineering* (1983), Penerima Bintang Jasa Nararya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1995 (Tahun Emas Kemerdekaan RI), sejak tanggal 20 Mei 2010 ditunjuk oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu anggota Komite Inovasi Nasional (*Think Thank of President Republic Indonesia on Innovation Policy*). Saat ini beliau tercatat sebagai Komisaris Utama (Independen) PT Cardig Aero Services, Tbk. Komisaris Utama (Independen) PT Toba Bara Sejahtera, Komisaris (Independen) PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. dan *Chairman* Matsushita Gobel *Foundation*. Beliau pernah memiliki pengalaman "*National Policy Makers*" sebagai Pembantu Presiden Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu Pertama (Mei 2007 – Oktober 2009) sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Penulis Buku "*Grand Techno Economic Strategy*" - Siasat Memicu Produktivitas (Penerbit Mizan, 2009). Melalui pengalaman yang luas sebagai *Technical/Engineering Advisor and Auditor* ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Anggota Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi (2007), untuk mengevaluasi dan menemukan "*root causes*" tragedi kecelakaan transportasi di sektor Angkutan Udara, Angkutan Pelayaran/Laut, Kereta Api dan Jalan Raya. Memiliki pengalaman mengelola industri pesawat terbang dalam berbagai posisi strategis antara lain Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (2000 – 2002), Direktur Sumber Daya Manusia PT IPTN (1999 – 2000), Direktur Helikopter, Sistem Senjata dan Antariksa (*Helicopters, Defence Technology and Satellite*) (1996 – 1999), Ketua Tim Implementasi Program Restrukturisasi PT IPTN (1998 – 2001), *Chief Project Engineer*, Pengembangan & Rancang bangun N250 (1989 – 1995). 20 tahun bekerja sebagai *Professional Aerodynamics Engineer* dengan bidang keahlian *Computational Aerodynamics* dan *Configuration Development*. Beliau menerima Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten No.ID 0 021 669 *Flight Control Systems* berbasis elektronik bersama Alm. Bambang Pamungkas pada 15 Agustus 2008.

BOBBY A.A. NAZIEF
Komisaris

Bobby A.A. Nazief, 52 tahun, telah dipercaya sebagai Komisaris Telkom sejak tanggal 19 September 2008. Pemilik gelar Ph.D bidang Ilmu Komputer dari Universitas Illinois di Urbana-Champaign, AS, ini ditunjuk sebagai Penasihat Senior TI bagi Menteri Keuangan Republik Indonesia, disamping merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Beliau juga pernah dipercaya sebagai Penasihat Senior TI bagi Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Pusat Ilmu Komputer di Universitas Indonesia.

MAHMUDDIN YASIN
Komisaris

Mahmuddin Yasin, 57 tahun, telah menjabat posisi Komisaris Telkom sejak tanggal 29 Juni 2007. Pemilik gelar Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, dan gelar *Master of Business Administration* dari *Washington University, St. Louis, AS*, saat ini juga menjabat Wakil Menteri Negara BUMN dan pernah dipercaya sebagai Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi serta Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"). Di lingkungan korporasi, beberapa posisi penting yang pernah dijabat beliau yaitu Komisaris Utama PT Socfin Indonesia (2005-2007), Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya (2004-2008) dan Komisaris PT Indo Farma, Tbk. (2002). Sementara itu, beliau hingga kini masih dipercaya sebagai Komisaris di PT Bank Mandiri, Tbk. sejak tahun 2008.

JOHNNY SWANDI SJAM
Komisaris Independen

Johnny Swandi Sjam, 51 tahun, telah menjabat posisi Komisaris Independen Telkom sejak tanggal 1 Januari 2011. Pemilik beberapa gelar akademik, diantaranya Diploma III bidang Ahli Teknik Komputer dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Diploma IV Manajemen Industri dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Departemen Perdagangan, Sarjana bidang Manajemen Informatika dari Universitas Gunadharma serta Pasca Sarjana bidang Administrasi & Kebijakan Bisnis dari Universitas Indonesia ini pernah dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan penting di Anak Perusahaan Indosat, seperti Satelindo, Sisindosat dan Intikom (1997-2002), sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur Satelindo (2002-2003), Direktur Indosat (2005-2007) dan Direktur Utama Indosat (2007-2009) dan anggota Dewan Komisaris PT INTI (2010 - 1 Maret 2011). Beliau juga terpilih sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Infrastruktur & Jasa Telekomunikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

RUDIANTARA
Komisaris Independen

Rudiantara, 52 tahun, telah menjabat posisi Komisaris Independen Telkom sejak tanggal 1 Januari 2011. Pemilik gelar sarjana bidang Statistika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, serta gelar MBA dari IPPM-Indonesia ini sebelumnya pernah menjabat beragam posisi penting, yaitu sebagai Direktur dan Komisaris di berbagai perusahaan telekomunikasi seluler seperti Indosat, Telkomsel dan XL, selain itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Wakil Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero), serta menjabat sebagai CEO Bukit Asam Transpacific Railways dan PT Rajawali Asia Resources.

Profil Direksi

RINALDI FIRMANSYAH
Direktur Utama

Rinaldi Firmansyah, 52 tahun, telah dipercaya sebagai Direktur Utama Telkom sejak tanggal 28 Februari 2007. Pemilik gelar Sarjana bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, Bandung dan MBA dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta, ini mengawali karirnya di Telkom sebagai Direktur Keuangan pada tahun 2004-2007. Beliau juga membangun karir profesionalnya di beberapa perusahaan, yaitu diantaranya sebagai Presiden Direktur PT Bahana Securities pada tahun 2001-2003 dan Wakil Komisaris Utama PT Bahana Securities pada tahun 2003-2004, serta Komisaris dan Kepala Komite Audit PT Semen Padang pada tahun 2003. Beliau juga memiliki sertifikasi *Chartered Financial Analyst* ("CFA").

SUDIRO ASNO
Direktur Keuangan

Sudiro Asno, 55 tahun, telah menjabat sebagai Direktur Keuangan Telkom sejak tanggal 28 Februari 2007. Pemilik gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, memulai karir profesionalnya di Telkom pada tahun 1985 dan pernah dipercaya untuk memegang sejumlah jabatan penting di Direktorat Keuangan Telkom sebelum akhirnya beliau dipercaya sebagai Senior General Manager di Finance Center.

FAISAL SYAM
Direktur Human Capital & General Affair

Faisal Syam, 56 tahun, telah menjabat Direktur Human Capital & General Affair Telkom sejak tanggal 28 Februari 2007. Pemilik gelar Sarjana bidang Matematika dari Universitas Sumatera Utara dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung ("STMB") ini memulai karir profesionalnya di Telkom sejak tahun 1983. Beliau sebelumnya ditunjuk untuk menempati berbagai posisi penting di Telkom, diantaranya Senior General Manager Human Resource Center.

ERMADY DAHLAN
Direktur Network & Solution

Ermady Dahlan, 59 tahun, telah dipercaya menjabat Direktur Network & Solution Telkom sejak tanggal 1 Maret 2008 setelah sebelumnya menduduki posisi Direktur Konsumer sejak tanggal 28 Februari 2007. Lulusan dari Joint Program Pendidikan Pengatur Muda Teknik dari Akademi Telekomunikasi Bandung (PAMTK – ATN) tahun 1978 ini bergabung di Telkom pada tahun 1973. Beliau juga pernah menduduki berbagai posisi strategis termasuk sebagai Executive General Manager Divisi Regional II (Jakarta).

I NYOMAN G. WIRYANATA
Direktur Konsumer

I Nyoman G. Wiryanata, 52 tahun, telah menjabat sebagai Direktur Konsumer Telkom sejak tanggal 1 Maret 2008, setelah sebelumnya dipercaya sebagai Direktur Network & Solution sejak tanggal 28 Februari 2007. Pemilik gelar Sarjana bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Surabaya, dan gelar Master bidang *Business Administration* dari Institut Manajemen Prasetya Mulya ini mulai bergabung di Telkom pada tahun 1983. Beliau juga pernah memegang beberapa posisi penting, termasuk Executive General Manager Divisi Regional I (Sumatera).

ARIEF YAHYA
Direktur Enterprise & Wholesale

Arief Yahya, 51 tahun, telah diangkat sebagai Direktur Enterprise & Wholesale Telkom sejak tanggal 24 Juni 2005. Pemilik gelar Sarjana bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master bidang *Telecommunications Engineering* dari University of Surrey, UK, ini telah bergabung di Telkom sejak tahun 1986. Beliau sebelumnya telah dipercaya untuk memegang berbagai posisi penting di Telkom, di antaranya menjabat sebagai Kepala Divisi Regional V (Jawa Timur) dan Kepala Divisi Regional VI (Kalimantan).

PRASETIO
Direktur Compliance & Risk Management

Prasetio, 51 tahun, telah menjabat Direktur Compliance & Risk Management sejak tanggal 28 Februari 2007. Pemilik gelar kesarjanaan bidang Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga, Magister bidang Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada serta pernah aktif mengikuti berbagai pendidikan eksekutif di berbagai perguruan tinggi, diantaranya State University of New York di Buffalo, Asian Institute Management, Manila, Kellog University of Chicago, Illinois serta The Wharton School of Management, University of Pennsylvania, AS, mengawali karirnya di Telkom sebagai Executive Vice President Risk Management, Legal & Compliance pada tahun 2006. Karir profesionalnya dimulai di PT Bank Niaga, Tbk. pada tahun 1984 dengan jabatan terakhir sebagai Vice President-Credit Policy & Administration Group Head pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, beliau menjabat sebagai Senior Vice President/Chief Credit Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional hingga tahun 2001 dan merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Bank Prima Ekspress. Pada periode tahun 2002-2004, beliau memulai karirnya di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Commercial & SME Banking Director merangkap Chief Financial Officer. Beliau pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer PT Merpati Nusantara Airlines hingga tahun 2005 dan Penasihat Direktur Utama PT Bank BNI, Tbk. pada tahun 2004.

INDRA UTOYO
Direktur IT, Solution & Strategic Portfolio

Indra Utoyo, 50 tahun, telah menjabat sebagai Direktur IT, Solution & Supply Telkom sejak tanggal 28 Februari 2007. Pemilik gelar Sarjana bidang Teknik Elektro Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master dalam *Communication and Signal Processing* dari Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, Inggris, ini bergabung di Telkom sejak tahun 1986. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di Telkom, termasuk diantaranya sebagai Senior General Manager Information System Center.

JAJARAN MANAJEMEN SENIOR

Eddy Kurnia
Head of Corporate Communication & Affair

Tjatur Purwadi
Head of Internal Audit

Priyantono Rudito
VP Corporate Strategic Planning

Honesti Basyir
VP Corporate Strategic Business Development

Eddie Wibawa
VP Business Portfolio & Synergy

Budhi Santoso
VP Business Performance Evaluation

Ahmad Kordinal
VP Corporate Office Support

Agina Siti Fatimah
OVP Public Relation

Herdy Rosadi Harman
VP Regulatory Management

Purwoto
VP Enterprise Management Audit IA

Harry Suseno Hadisoebroto
VP Infrastructure & Supply Management Audit IA

Mohammad Nuhin
VP Marketing & Service Audit IA

Dani Ramdani
VP Network Operation

Revolin Simulsyah
VP Infrastructure & Service Planning

Syarif Syarial Ahmad
VP Wholesale

Budi Siswanto
VP Enterprise Marketing

Slamet Riyadi
OVP Sales & Customer Care

Judi Rifajantoro
VP IT Strategy & Governance

Judi Achmadi
VP Service Strategy and Tariff

Sutoto
VP Supply Planning & Control

Michael Gatut Awantoro
VP Business Effectiveness

Rudy Agustian
VP Legal & Compliance

Ikhsan
OVP Risk Management

Martinus Wisnu Adji
VP Financial & Logistic Policy

Teguh Wahyono
VP Management Accounting

R. Gatot Rustamadji
VP Treasury Management

Sunarto
VP Financial Accounting

Agus Murdiyatno
VP Investor Relation

Syamsul Bahri
VP Asset Management

Djaka Sundan
VP Organization Development

Wien Aswantoro Waluyo
VP Industrial Relation

Sofyan Rohidi
VP HR Policy

Teni Agustini
VP Commerce and Customer Care

Pramasaleh Hario Utomo
VP Product Management

Dendi Tegar Danianto
OVP Marketing

Tri Djatmiko
EGM Divisi Consumer Service Barat

Sukardi Silalahi
EGM Divisi Consumer Service Timur

Arko Maryono
EGM Divisi Business Service

Abdus Somad Arief
EGM Divisi Enterprise Service

Zulheldi
EGM Divisi Carrier & Interconnection Service

David Bangun
EGM Divisi Telecommunication Infrastucture

Arief Musta'in
EGM Divisi Access

Joddy Hernady
EGM Divisi Multimedia

Mas'ud Khamid
EGM Divisi Telkom Flexi

Otong Iip
SGM Finance Billing and Collection Center

Nilawati Djuanda
SGM Maintenance Service Center

Mustapa Wangsaatmadja
SGM Research & Development Center

Halim Sulasmono
SGM Information System Center

Sri Heribowo G Iman Tidarto
SGM Supply Center

Teuku Zilmahram
SGM HR Center

Tonda Priyanto
SGM Learning Center

R. Gatot Rustamadji
SGM Community Development Center

Tengku Hedi Safinah
Head of Management Consulting Center

Freddy Triany
Project Management Office Coordinator

Penghargaan 2011

FEBRUARI

1. Meraih penghargaan *Top Brand Award 2011* untuk produk *kartuHALO, simPATI,* Flexi, Speedy dan Flash dari Marketing Magazine & Frontier Consulting Group.
2. Meraih penghargaan *Indonesia Brand Champion Award 2011* untuk kategori *Most Popular Brand of Stock, Most Recommended Brand of Stock dan Customer's Brand Choice of Stock* (dihitung berdasarkan Kapitalisasi Pasar per 30 Desember 2010 yang melampaui Rp100 miliar) dari MarkPlus Insight & Marketeers Magazine.
3. Meraih penghargaan *Brand Equity Champion of Cellular Operator* untuk produk *simPATI* dan penghargaan *Brand Equity Champion of Mobile Internet Provider* untuk Flash dari MarkPlus Insight & Marketeers Magazine.
4. Meraih anugrah *Perusahaan Idaman Award 2010 dan The Most Gracious Company* dari Majalah Warta Ekonomi.

03

MARET

1. Meraih penghargaan *Indonesia Brand Champion Award 2011 Telco & Gadget* untuk produk *Speedy,* Flexi, simPATI, dan Flash dari MarkPlus.
2. Meraih penghargaan *Call Center Award 2011* untuk Telkom 147 dalam kategori *Telecommunication, Pay TV* dan *Internet Service Provider* dari Majalah Service Excellence.

APRIL

Dianugerahi *Forsel Award 2011* untuk Flexi dalam kategori *Operator CDMA terfavorit versi Majalah Forsel* serta *The Best CDMA Operator* dari Majalah Selular.

05

MEI

1. Meraih penghargaan *Asia's Best Managed Company* dari Majalah Finance Asia.
2. Memenangkan *Service Quality Award 2011* dari Majalah Marketing untuk kategori *Walk in Center* Terbaik untuk PlasaTelkom dan GraPARI.

06

JUNI

1. Meraih penghargaan dalam ajang *Indonesian Human Capital Study* (IHCS) 2011, yaitu *The Best For Human Capital Index* kategori *Infrastructure, Utilities, & Transportation Industry', The Best For Employee Net Promoter Score* kategori *Infrastructure, Utilities, & Transportation Industry, The Best for All Criteria, The Best for CEO Commitment,* dan *The Best For Human Capital Initiative* untuk kategori *Career Management*.
2. Meraih penghargaan *Corporate Image Award* (IMAC) 2011 untuk kategori *Telecommunication Industry* dan *Internet Provider* dari Frontier Consulting Group.

JULI

1. Memenangkan penghargaan *Capital Market Awards 2011* yang diselenggarakan BEI bersama KPEI dan KSEI.
2. Meraih penghargaaan dalam *World HRD Congress and Stars of the Industry Group* untuk kategori *Best Employer Brand Award* dan *Asia's Best Brand Award*.
3. Meraih *CMO Asia Awards* untuk kategori *Excellence in Branding & Marketing* dari CMO Council & World Branding Congress.
4. Meraih penghargaan *UNI Apro Outstanding Employer Partner Award 2011* dari UNI Global Union Asia Pasific Region.

SEPTEMBER

09

1. Meraih penghargaan *MDG's Gold Award 2011* untuk kategori *CSR Best Practice* dari *Corporate Forum* for Community Development.
2. Meraih penghargaan *Digital Marketing Award 2011* kategori *Great Performing Brand in Social* Media dari Frountier Media Group.
3. Memenangkan penghargaan *Indonesia Green Award 2011* dari La Tofi School of CSR.
4. Meraih *Annual Best Financial Institutional Award 2011* dari Alpha Southeast Asia untuk kategori *Most Consistent Dividend Policy and Strongest Adherence to Corporate Governance.*
5. Meraih Annual Report Award 2010 dari IDX & Bapepam-LK.

OKTOBER

1. Meraih penghargaan *Net Promoter Customer Loyalty Award 2011* pada kategori *CDMA and Broadband Internet* untuk layanan Flexi & Speedy dari Majalah Swa.
2. Meraih *ICSA 2011* untuk kategori *Postpaid FWA Simcard* dan *Internet Service Provider Wireline/Fixed* dari Frontier Consulting Group.

11

NOVEMBER

1. Meraih penghargaan *Frost & Sullivan Indonesia Excellence Award 2011* untuk *Data Communication Service Provider of the Year* dan *Broadband Service Provider of the Year,* dan *Most Innovative Application of the Year* untuk Telkomsel dari Frost & Sullivan.
2. Meraih penghargaan *Economic Challenges 2011* untuk sektor telekomunikasi dari Metro TV.

12

DESEMBER

1. Memenangkan penghargaan *The Best Corporation 2011, The Best Corporation for Corporate Communication, The Best Corporation for Marketing Management, The Best Corporation for Risk Management,* dan *The Best Finance Perfomance for Non-Finance Corporation* dari Majalah Business Review.
2. Meraih penghargaan *The Best Overall Sustainability Report 2010* dan *The Best Sustainability Report 2010* kategori *Services* dalam *Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) from National Centre for Sustainability Reporting ("NCSR").*
3. Meraih penghargaan *Investor Award 2011* untuk kategori *BUMN non keuangan sektor terbaik telekomunikasi* dari Majalah Investor.
4. Meraih *Indonesia CSR Award 2011* dari Corporate Forum for Community Development.
5. Meraih *Best State Owned Enterprise* dalam *GCG 2011* dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) bekerjasama dengan Majalah Business Review.

Peristiwa Penting 2011

JANUARI

Telkom meluncurkan *Delivery Money Access* ("Delima") pada tanggal 31 Januari 2011 di Grha Citra Caraka Lantai 6, Jakarta. Delima merupakan fasilitas bertransaksi seperti pengiriman dan penerimaan uang baik domestik maupun internasional dengan menggunakan perangkat telepon seluler.

FEBRUARI

Pendeklarasian tahun 2011 sebagai Tahun *Quality of Service* sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas layanan pelanggan yang lebih baik, yang dilakukan di Aula Pangeran Kuningan, Graha Citra Caraka, Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011.

MARET

Telkom dan 32 BUMN lainnya menandatangani MoU mengenai perjanjian kerja sama sinergi BUMN terkait penyediaan layanan *Enterprise Resource Planning* (ERP), di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada tanggal 30 Maret 2011 di hadapan Menneg BUMN, Mustafa Abubakar.

APRIL

Telkom merealisasikan komitmen untuk mereformasi infrastruktur telekomunikasi Indonesia melalui Proyek Nusantara Super Highway berbentuk pembangunan jaringan *backbone fiber optic* sepanjang 47.099 km yang menyatukan nusantara mulai dari Sumatera hingga Papua.

MEI

Penguatan sinergi New Plasa Telkom Group antara Telkom dan Anak Perusahaan, Telkomsel, melalui penandatanganan MoU di Gedung Wisma Mulia, Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2011 untuk menjadikan Plasa Telkom sebagai titik pelayanan terpadu. Sinergi serupa telah dilakukan sebelumnya dengan TelkomVision pada akhir April 2011.

JUNI

1. Telkom meluncurkan produk terbaru, Groovia TV, di Gandaria City, Jakarta, tanggal 4 Juni 2011, yang menawarkan pengalaman menonton televisi baru di Indonesia dengan fitur layanan yang canggih seperti video *on demand,* karaoke dan *game online*.
2. Telkom meluncurkan Indigo Fellowship 2011 pada tanggal 16 Juni 2011 di Menara Multimedia, Jakarta, dalam rangka mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia.

JULI

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, Telkom meluncurkan Indonesia Wi-Fi pada tanggal 26 Juli 2011 yang bertepatan dengan penutupan Rapat Pimpinan Telkom Group II/2011.

SEPTEMBER

1. Telkom dan 15 perusahaan BUMN lainnya menandatangani MoU tentang konektivitas nasional melalui *Indonesia Logistics Company Services* (ILCS) di Kantor Kementerian BUMN pada tanggal 15 September 2011 dalam rangka pengembangan potensi ekonomi, penguatan konektivitas nasional serta SDM dan TI.
2. Telkom bersama SK Telecom menandatangani perjanjian kerja sama pada tanggal 28 September 2011 di Hotel Ritz Carlton Jakarta untuk menggarap layanan *tutorial* bahasa Inggris secara *online* yang disebut *Connected Learning*.

OKTOBER

1. Telkom terpilih sebagai ICT Partner dalam penyelenggaraan 19th ASEAN Summit 2011 di Nusa Dua, Bali pada tanggal 9-19 Oktober 2011 dengan menyediakan kebutuhan *voice* dan data bagi peserta acara.
2. Telkom memperkenalkan logo baru Flexi sekaligus meresmikan pengadopsian teknologi EVDO Rev A pada tanggal 12 Oktober 2011 untuk mendukung layanan Flexi sehingga pelanggan dapat melakukan video *call*, video *streaming*, video *chatting*, dan lain-lain dari perangkat seluler.
3. Telkom menjadi penyedia layanan ICT di acara bertaraf internasional "Sail Wakatobi – Belitong 2011" pada tanggal 13 Oktober 2011 di Tanjung Kelayang, Belitong, yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Boediono.
4. Telkom resmi mengganti sistem informasi terpadu bagi pelanggan dari Sistem Informasi Kastamer (SISKA) menjadi i-SISKA pada tanggal 27 Oktober 2011 di ruang iSure, Grha Citra Caraka, Jakarta.
5. Telkom dan PB ISSI kembali menyelenggarakan ajang balap sepeda bernama Speedy Tour d'Indonesia yang diikuti oleh 19 tim dari dalam dan luar negeri dengan melintasi rute Jawa-Bali.

NOVEMBER

1. Telkom dan Pertamina pada tanggal 24 November 2011 menandatangani MoU dalam hal penggunaan *refrigerant* hidrokarbon buatan Pertamina, MUSIcool, dalam rangka mendukung kampanye ramah lingkungan sekaligus penghematan konsumsi listrik Perusahaan (Telkom Go Green).
2. Telkom menyerahkan *Lifetime Achievement Award* di acara Indigo Digital Music Award 2011 pada tanggal 24 November 2011 sebagai bentuk dukungan pada pengembangan industri konten dan penciptaan ekosistem musik digital.

DESEMBER

Telkom mendukung perkembangan konten-konten kreatif digital Indonesia melalui *Bandung Digital Valley* ("BDV") yang berlokasi di Telkom Research & Development Center – Gegerkalong Hilir Bandung. BDV resmi beroperasi pada bulan Desember 2011.

PRODUK DAN LAYANAN

Sebagai perusahaan penyelenggara layanan TIME, Telkom berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk dan layanan di sektor-sektor di luar telekomunikasi. Kami menciptakan produk dan layanan yang mampu mengantisipasi perkembangan konten (*content*) dan perangkat (*device*), baik itu *smartphone,* PC (*Personal Computer*) atau *tablet*, yang sangat pesat. Selain itu, inovasi Kami juga dikembangkan dengan menggabungkan komunikasi suara, layanan data via internet dan IPTV dalam satu paket yang Kami sebut *Triple Play*. Produk dan layanan inovatif ini sangat berbeda dari kompetitor Kami sehingga memberikan keunggulan bagi Telkom dalam hal *Time to Market* dan memposisikannya sebagai perusahaan yang prestisius di tahun-tahun yang akan datang. Kreativitas ini pula yang mendorong evolusi besar dalam tubuh Telkom yang terefleksi dalam program transformasi yang telah dimulai sejak penghujung tahun 2009.

Namun untuk mengantisipasi dinamika bisnis telekomunikasi yang semakin pesat, Telkom berdasarkan Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No.PD.506 tahun 2011 tentang Pohon Produk mensinergikan seluruh produk, layanan dan solusinya, mulai dari produk dan layanan *legacy* hingga *new wave*, dan mengelompokkannya ke dalam sejumlah kegiatan usaha sebagaimana berikut ini:

1. Telekomunikasi

a. Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak

***Plain Old Telephone Services* ('POTS')** merupakan layanan telefoni dasar pada sambungan telepon kabel.

Layanan Telepon Tetap Bernilai Tambah *(VAS Fixed Wireline)* merupakan fasilitas layanan bernilai tambah yang dihadirkan satu paket dengan produk inti Kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Layanan *Intelligent Network (IN)* atau Jaringan Pintar Teknologi Informasi ("JAPATI") merupakan arsitektur jaringan layanan berbasis teknologi informasi yang terhubung dengan sistem sentral dan jaringan telekomunikasi Telkom. Pelanggan jasa JAPATI dapat menikmati layanan *FreeCall*, *Personal FreeCall*, *Split Charging*, *UniCall*, *VirtualNet*, *PremiumCall*, *VoteCall* dan *VoteFree.*

Layanan *Session Initiation Protocol (SIP)* adalah layanan berbasis teknologi *IP Multimedia Subsystem (IMS)* yang memadukan teknologi nirkabel dan kabel untuk melayani jasa *voice* dan data.

b. Sambungan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Layanan Prabayar merupakan jasa sambungan telepon yang dapat dinikmati pelanggan dengan membeli nomor perdana dan *voucher* isi ulang agar dapat menggunakan jasa telekomunikasi yang diinginkan.

Layanan Pascabayar merupakan layanan telepon dengan sistem pembayaran yang ditagihkan pada pelanggan di akhir bulan atas jasa telekomunikasi yang digunakan pada bulan sebelumnya.

c. Seluler

Telkom melayani jasa komunikasi seluler melalui Anak Perusahaan, Telkomsel, yang memanfaatkan teknologi GSM dan frekuensi 3,5G. Layanan seluler masih menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan konsolidasi Perusahaan.

Produk dan layanan seluler yang ditawarkan oleh Telkomsel dibagi ke dalam dua model, yaitu layanan pascabayar yang disajikan melalui produk *kartuHALO*, serta layanan prabayar yang disajikan melalui produk *simPATI* dan Kartu As. Diferensiasi dari ketiga produk tersebut adalah sebagai berikut:

- ***kartuHALO*** hingga kini masih tercatat sebagai layanan komunikasi seluler pascabayar yang paling banyak digunakan sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995. Pelanggan *kartuHALO* pada akhir tahun 2011 mencapai 2,2 juta, atau setara dengan pangsa pasar sebesar 53,4% dari total pelanggan seluler pascabayar yang ada di Indonesia.
- ***simPATI*** adalah produk prabayar yang tersedia dalam bentuk *voucher* perdana dan isi ulang dengan fitur canggih dan lengkap dengan harga terjangkau pada waktu *off-peak*.
- **Kartu As** adalah inovasi layanan seluler terakhir dari Telkomsel untuk jenis prabayar dengan tarif yang dihitung per detik pemakaian. Kartu As ini menargetkan segmen pengguna muda.

d. Jasa Layanan Internet *(Narrowband & Broadband)*

Layanan *Dial-Up* merupakan jasa akses internet yang memanfaatkan jaringan telepon biasa dan modem *dial up,* pelanggan diharuskan berlangganan ke Internet Service Provider ("ISP") tertentu atau melakukan akses internet ke Telkomnet Instan.

Flexi Net merupakan layanan akses internet yang menggunakan jaringan TelkomFlexi.

Jasa Penyewaan *Port* (*Port Wholesale*) melayani penyewaan Port *Remote Access Server* bagi penyelenggara jasa internet, penyelenggara jasa konten (*Content Service Provider*/CSP), dan korporat untuk kemudian diperjualbelikan kepada pelanggan.

Metro I-net merupakan solusi jaringan data berkapasitas tinggi dan berbasis *Internet Protocol* ("IP") atau *Ethernet* yang menjamin fleksibilitas, kemudahan dan keefektifan serta jaminan kualitas untuk segmen pelanggan bisnis dan residensial.

Astinet melayani akses Internet dengan menggunakan *Gateway Internet default* dan *IP Address* publik milik Telkom untuk saluran komunikasi tetap atau *dedicated* selama 24 jam sehari.

Broadband Internet melayani akses Internet secara *dedicated* dengan kecepatan di atas 384 kbps.

Hotspot/Wi-Fi merupakan solusi akses nirkabel Intranet dan Internet bagi pelanggan layanan data bergerak pada area tertentu dengan memanfaatkan alat bayar Telkom, alat bayar ISP lain (*roaming*) maupun secara *bulk* dengan peralatan *Customer Premises Equipment* berbasis teknologi Wi-Fi.

IP Transit melayani jasa interkoneksi ke global internet dengan memanfaatkan fitur *Full Route BGP Internet* dan blok IP serta *Autonomous System* ("AS") Pelanggan (Non Telkom) dengan rasio *bandwidth* 1:1 dari CPE hingga ke *upstream* Telkom.

e. Layanan Jaringan

Sirkit Langganan merupakan bentuk jasa jaringan transmisi terestrial *unregulated* yang menghubungkan 2 (dua) titik terminasi antar *Point of Presence* ("POP") *dedicated* untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas kanal transmisi yang simetris.

IPLC (International Private Leased Channel) merupakan saluran telekomunikasi terestrial yang disewakan secara *dedicated* untuk memfasilitasi komunikasi *voice*, data, video dan layanan telekomunikasi lainnya yang dilakukan oleh pelanggan di Indonesia dengan pelanggan telekomunikasi di negara lain atau sebaliknya, sesuai dengan kewenangan pelanggan berdasarkan regulasi yang berlaku.

VPN Backhaul adalah suatu *node* yang berada di jaringan *Virtual Private Network* ("VPN") yang berfungsi sebagai pusat dari *node-node* lainnya.

ADSL Link/EBIS ESP merupakan saluran akses pelanggan berbasis teknologi *Asymetric Digital Subscriber Line* guna menyediakan akses internet yang disewakan kepada penyelenggara jasa internet selain Telkom.

Jasa Satelit melayani sewa *bandwidth transponder* satelit dan/atau produk turunannya yang memanfaatkan satelit milik Telkom atau satelit pengganti.

f. Jasa Komunikasi Data

ISDN PRA adalah jaringan digital untuk memfasilitasi layanan telekomunikasi multimedia, yang menggunakan *bandwidth* yang lebih lebar dan sistem digital dari terminal ke terminal untuk melayani komunikasi suara, data dan video serta dengan kecepatan, kualitas dan kapasitas tinggi melalui satu saluran. Jaringan ini berkapasitas total 1.984 kbps, yang terdiri dari 30B+D64, dan dapat digunakan untuk menghubungkan PABX, dari komputer *mainframe* ke jaringan PASOPATI, dan hubungan antar *Local Area Network* ("LAN").

DINA Access merupakan layanan komunikasi dengan akses *dedicated* untuk melayani interkoneksi antar LAN dan layanan multimedia yang kecepatannya dapat disesuaikan permintaan pelanggan, mulai dari 64 hingga 2.084 Kbps.

VPN merupakan jaringan pribadi yang menggunakan media seperti internet untuk menghubungkan *remote site* secara aman.

Global Datacom adalah bentuk layanan komunikasi data bagi pelanggan korporasi yang menghubungkan kantor pusat dengan cabang atau kliennya di berbagai negara di dunia. Telkom bekerja sama dengan mitra global melalui Telin dalam menyediakan layanan ini.

Metro Link adalah bentuk layanan konektivitas berbasis jaringan Metro yang melayani *point to point*, *point to multipoint* dan *multipoint to multipoint*.

VAS Datacom memberikan fasilitas tambahan yang menawarkan nilai tambah bagi pelanggan komunikasi data.

g. Layanan Interkoneksi dan Intercarrier

Interkoneksi Transit adalah bentuk jasa penyaluran panggilan interkoneksi dari penyelenggara komunikasi asal kepada penyelenggara tujuan dengan memanfaatkan jaringan tetap Telkom.

Interkoneksi Terminasi adalah bentuk layanan pengakhiran panggilan interkoneksi pada jaringan Telkom dari penyelenggara telekomunikasi domestik lainnya.

Layanan berbasis *Signalling* ditawarkan kepada penyelenggara lain melalui jaringan *signalling* Telkom, baik domestik maupun internasional.

Interkoneksi *Originating* merupakan layanan pembangkitan panggilan interkoneksi yang ditawarkan jaringan penyelenggara asal.

Akses Jasa Telkom disediakan oleh penyelenggara layanan telekomunikasi lain untuk layanan, seperti akses Sambungan Langsung Jarak Jauh ("SLJJ") dan Sambungan Langsung Internasional ("SLI") 007.

Terminasi Internasional adalah layanan pengakhiran panggilan oleh Mitra Internasional pada jaringan Telkom.

VAS Interkoneksi adalah layanan bernilai tambah antara lain Telkom Free, Telkom Split Charging, Telkom Vote, Telkom Uni, Telkom Premium, dan *call center* dari penyelenggara jasa melalui jaringan Telkom.

h. Sarana Penunjang

Layanan mekanikal dan elektrikal ("ME") menyediakan sarana pasokan listrik AC milik Telkom bagi mitra penyelenggara.

Layanan Non ME menyediakan sarana penunjang milik Telkom untuk mitra penyelenggara antara lain berupa ruangan, lahan, kolokasi, *Integrasi Grounding*, *Tower*, *Duct*, *Roof Top*, dan Jalan Akses.

CPE adalah perangkat yang digunakan oleh pelanggan Telkom sebagai pelengkap dari penyelenggara telekomunikasi dan terletak di tempat pelanggan.

2. Layanan Teknologi Informasi ("TI")

***a. Managed Application & Performance*/ITO**

Cloud Based Managed Services yang berbasis aplikasi *client server* mendukung layanan *cloud computing* yang dapat diakses pelanggan melalui jaringan internet.

Server Based Managed Services yang berbasis *server* yang diakses oleh pelanggan melalui layanan internet atau aplikasi khusus lain sebagai *client*.

IT Consulting merupakan layanan konsultasi TI yang terdiri dari pekerjaan pengembangan sistem/aplikasi, *Blueprint/MasterPlan TI* atau perancangan dokumen strategis lainnya.

b. E-Payment/Payment Service

Billing Payment adalah layanan yang memudahkan proses transaksi pembayaran bagi pelanggan jasa atau barang kepada perusahaan penyedia jasa seperti PLN, Telkom, PDAM, PJKA, dan lain-lain melalui jasa yang disediakan *collection agent* di antaranya bank, koperasi, BPR, *convenience store*, dan lain-lain sehingga tidak harus mendatangi perusahaan bersangkutan.

Remittance adalah layanan pengiriman uang di mana pengirim dan penerima dana tidak harus memiliki rekening di bank namun harus memiliki perangkat seluler untuk menerima notifikasi.

E-Money melayani penyimpanan uang pelanggan/penggunaannya secara elektronik dalam suatu media (*handphone*, kartu prabayar, atau suatu rekening virtual yang dapat diakses melalui media internet) untuk melakukan transaksi secara elektronik.

E-Voucher atau *Telkom Voucher* merupakan *single voucher* yang diterbitkan Telkom yang berfungsi untuk membeli layanan atau mengisi pulsa layanan milik Telkom Group, seperti Kartu As, *simPATI* dan Flexi Trendy, layanan prabayar TelkomVision dan *Speedy Hotspot*.

***c. IT enabler Services* ("ITeS")**

***Business Process Outsourcing* ("BPO")** merupakan layanan berbasis kontrak untuk mengelola/menjalankan beberapa proses perusahaan pelanggan.

***Knowledge Process Outsourcing* ("KPO")** merupakan layanan BPO untuk proses bisnis yang memerlukan kompetensi khusus untuk pengelolaannya.

d. Network Centric VAS

Data & Telephony merupakan layanan data dan telepon berbasis TI yang menawarkan nilai tambah bagi pelanggan layanan konektivitas.

Security merupakan layanan *security* berbasis TI yang bernilai tambah bagi pelanggan layanan konektivitas.

Server & Storage merupakan layanan *server & storage* berbasis TI yang bernilai tambah bagi pelanggan layanan konektivitas.

e. Jasa Integrasi

Jasa Integrasi Jaringan & Piranti Keras memadukan dan menyediakan perangkat konektivitas di lokasi pelanggan (CPE).

Jasa Integrasi Aplikasi dan Piranti Lunak memadukan dan menyediakan seluruh sistem yang diperlukan untuk mengintegrasikan dua atau lebih aplikasi/piranti lunak/sistem.

Jasa Integrasi *Computing Hardware* memadukan sistem yang menggabungkan seluruh perangkat komputasi yang diperlukan untuk membantu sistem informasi bagi pelanggan.

3. Media & *Edutainment*

a. Konten

Musik adalah konten yang disajikan dalam berbagai bentuk, baik unsur lagu atau melodi, syair, dan lirik serta aransemen musiknya yang merupakan karya seni seseorang atau lebih.

Berita adalah konten yang memberitakan suatu kejadian atau peristiwa pada waktu dan tempat tertentu.

Sport adalah konten mengenai informasi seputar olahraga yang disajikan dalam bentuk teks, video, dan multimedia.

Edukasi adalah konten terkait dunia pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dengan mengedepankan metode pembelajaran yang menarik.

Permainan (*Game*) adalah konten yang diakses oleh pengguna sebagai bentuk hiburan ataupun alat pembelajaran dengan karakteristik di antaranya *skill game*, *Mass Multiplayer Online* ("MMO"), *sport game*, *board game* dan sebagainya.

Anti Virus adalah konten yang berisi perangkat lunak untuk mendeteksi dan menghapus virus dari sistem komputer.

b. Portal

E-Commerce merupakan portal yang memfasilitasi transaksi secara elektronik oleh pihak ketiga atau jajaran Telkom Group, terdiri dari aktivitas penjualan, *delivery*, layanan pelanggan dan pembayaran.

E-Store adalah portal yang memfasilitasi penjualan konten atau aplikasi yang dapat diunduh secara langsung ke perangkat *mobile* atau *web*, seperti *game*, aplikasi, musik, dan sebagainya, yang disediakan secara berbayar maupun gratis.

Community adalah portal komunitas yang menyediakan konten yang dapat menarik minat komunitas tertentu baik dalam bentuk berita, video, *user generated content*, artikel tertentu, dan sebagainya.

On Device Portal merupakan portal yang dipasang di perangkat *mobile* guna memfasilitasi penggunanya dalam memilih, membeli dan menggunakan konten *mobile* dan layanan.

c. Media

Pay TV adalah layanan TV berbayar yang disediakan melalui satelit atau kabel dengan sajian berupa konten premium seperti berita, *sport*, hiburan dan lain-lain.

***Over the Top TV* ("OTT TV")** adalah layanan TV yang dapat diakses oleh pelanggan melalui jaringan internet.

Advertisement merupakan layanan promosi komersial untuk produk atau jasa milik pihak ketiga yang disediakan melalui media digital maupun cetak.

PENJUALAN, PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Telkom memiliki strategi untuk pendistribusian layanan dan produk utama, termasuk layanan telepon nirkabel tidak bergerak kecuali layanan telepon seluler yang dilakukan oleh Anak Perusahaan Telkomsel. Berikut adalah jalur-jalur distribusi layanan dan produk Telkom:

- **Plasa Telkom**, adalah tempat yang berfungsi sebagai *walk-in customer service points*, di mana pelanggan dapat mengakses ke seluruh produk dan layanan Telkom;
- **Tim AM**, bertugas melayani pelanggan *Enterprise* dan OLO yang proaktif dan bersifat individual. Untuk pengelolaan top pelanggan SME dilakukan oleh AM, sedangkan untuk pelanggan SME lainnya dilayani oleh *Tele Account Managers* dengan memanfaatkan media telekomunikasi seperti internet/*website* maupun *outbound call*;
- ***Telkom Solution House* ("TSH"),** adalah tempat yang berfungsi untuk melayani pelanggan *enterprise* yang ingin mendapat informasi mengenai ragam solusi TIME; layanan dan produk, serta teknologi terkini. Informasi yang disajikan di TSH ditayangkan dalam bentuk *Live Demo for Free* (seperti Speedy, *Hotspot, PDN, IP-Phone*), *Live Demo for Commercial usage* (seperti Video *Conference*), Konsultasi *Enterprise* dan *Ecosystem Business Solution* untuk kustomisasi TIME korporasi, dan demo simulasi (seperti *e-Payment* & *VPN over*, *GSM* dan *Flexi*);
- ***SME Centers***, yang berfungsi sebagai *communication center* dengan dukungan fasilitas perkantoran yang canggih, *community center* sebagai tempat berinteraksinya pelanggan Telkom, serta sebagai *commerce center* terutama untuk melayani solusi *e-commerce*;
- **Warung Telkom**, berfungsi sebagai outlet yang melayani pelanggan dari segala segmen. Outlet ini dioperasikan oleh pelaku bisnis skala kecil dan melayani jasa telekomunikasi dasar, yaitu di antaranya telepon lokal, SLJJ dan internasional, mengirim faksimili, jasa penyewaan internet, dan penjualan kartu telepon paket perdana dan *voucher* Flexi, serta *voucher* yang diterbitkan operator telekomunikasi lainnya mengingat konsepnya yang tidak eksklusif. Untuk layanan via outlet ini, Telkom memberikan potongan harga kepada wartel tersebut sebesar 30% dibandingkan dengan tarif telepon pelanggan biasa;
- ***Dealer* resmi dan gerai ritel**, merupakan outlet pendistribusian ragam produk telekomunikasi seperti penjualan kartu telepon dan langganan Telkom Flexi, paket perdana dan *voucher*. Dealer tersebut mendapat potongan harga atas seluruh produk yang mereka terima dan beroperasi secara non-eksklusif;

- ***Website***, merupakan wadah informasi seluruh produk dan layanan Telkom, baik multimedia maupun telefoni, yang dapat diakses pelanggan melalui situs *online* korporat, www.telkom.co.id, atau www.plasa.com;
- **Untuk layanan Speedy**, pelanggan dapat memperoleh informasinya dengan menghubungi nomor *inbound* 147, *telemarketing/outbound call*, *dealer*, maupun *partnership store*.

Strategi pemasaran produk dan layanan Telkom diantaranya dilakukan dengan memasang iklan di media massa, baik cetak maupun televisi, pemasaran langsung kepada pelanggan dan personil distribusi, infrastruktur dan kampanye promosi khusus melalui berbagai program komunikasi pemasaran dalam rangka memperkuat merek dagang, serta profil kepada masyarakat umum terkait produk dan layanan Telkom.

Dalam memasarkan produknya, Telkomsel memanfaatkan jalur distribusi berikut ini:
(i) Pusat GraPARI;
(ii) Outlet layanan Gerai HALO;
(iii) Jaringan dealer resmi yang terutama menjual kartu SIM prabayar dan *voucher*;
(iv) Gerai bersama dengan Plasa Telkom dan PT Pos Indonesia; dan
(v) Gerai lainnya seperti bank.

Khusus untuk *kartuHALO*, Telkomsel fokus pada segmen korporasi dan profesional yang cenderung memiliki tingkat pemakaian yang tinggi. Pemasaran untuk segmen ini dilakukan oleh tim akun korporasi khusus yang juga bertugas untuk mengelola hubungan yang berkelanjutan dengan para pelanggan. Tim ini senantiasa memperbaiki kualitas layanan agar mampu memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan korporasi.

Sementara itu, Produk *simPATI* dan Kartu As mempunyai segmen yang lebih luas, khususnya masyarakat kalangan muda. Telkomsel memanfaatkan jalur pemasaran *above and below the line*, dengan melakukan kampanye ke sekolah dan komunitas tertentu selain memasang iklan di media cetak dan elektronik untuk keperluan *brand awareness*. Telkomsel juga menerapkan metode pemasaran seperti sisipan tagihan dan tayangan *point-of-sale* sebagai media promosi *event* atau program tertentu.

Inovasi Kami juga dikembangkan dengan menggabungkan komunikasi suara, layanan data via internet dan IPTV dalam satu paket yang Kami sebut ***Triple Play.***

Tinjauan Kinerja SDM

Sumber Daya Manusia ("SDM") Telkom merupakan aset yang sangat penting bagi Perusahaan. Oleh karena itu, Telkom mengubah cara pandangnya terhadap SDM yang dimiliki sebagai *Human Capital*.

Untuk mengoptimalkan potensi *Human Capital* yang ditempatkan di Telkom Group, Perusahaan menyusun *Human Capital Plan* yang terpadu dengan merujuk pada perencanaan korporasi jangka panjang maupun tahunan dan strategi bisnis masing-masing perusahaan yang tergabung di Telkom Group. Selain itu, penyusunannya juga diperkuat oleh analisis penawaran dan permintaan yang akurat serta terukur, yaitu dengan menggunakan referensi data acuan terutama acuan rasio produktivitas pada beberapa perusahaan sejenis.

Informasi yang harus dimasukkan dalam *Human Capital Plan* Telkom Group terdiri dari:

a. Proyeksi mengenai jumlah *Human Capital* Telkom Group yang dihitung berdasarkan portofolio bisnis selama periode lima tahun ke depan;
b. Proyeksi tentang komposisi *Human Capital* secara rinci dengan mengacu pada komposisi *job stream*, pendidikan, usia dan jabatan;
c. Rencana ketenagakerjaan yang berisi rencana SDM tahunan di masing-masing perusahaan yang termasuk jajaran Telkom Group.

Penyusunan *Human Capital Plan* yang terpadu membantu Perusahaan dalam:

a. Memproyeksikan kebutuhan *Human Capital* Telkom Group secara tepat, baik dari sisi jumlah dan kompetensinya;
b. Menyusun rencana pengalokasian karyawan dan rencana pengembangan karir Telkom Group;
c. Mengukur produktivitas *Human Capital* Telkom Group.

PROFIL SDM

Pemenuhan kebutuhan SDM serta infrastruktur terkait dilakukan dengan berdasar pada prinsip sinergi dan optimalisasi sumber daya internal yang ada di jajaran Telkom Group.

Strategi pengembangan SDM Kami menekankan pada harmonisasi jumlah kompetensi SDM searah dengan portofolio bisnis Telkom Group yang semakin fokus pada Telekomunikasi, Informasi, Multimedia dan *Edutainment* (TIME). Kami juga berupaya meningkatkan sinergi dan efisiensi diantara perusahaan di jajaran Telkom Group dan menanamkan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk lima tahun ke depan dan rencana ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha Perusahaan.

Rencana ketenagakerjaan Telkom Group difokuskan pada peningkatan produktivitas dengan merujuk pada acuan yang kompetitif. Rencana ketenagakerjaan termasuk penjelasan mengenai profil sumber daya yang dihitung berdasarkan aktivitas bisnis dan Perusahaan di jajaran Telkom Group, serta penjelasan berdasarkan pekerjaan, posisi, umur dan latar belakang pendidikan. Melalui penerapan rencana ketenagakerjaan tersebut, Kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada baik di organisasi Telkom sendiri dan di jajaran Telkom Group di samping tetap melakukan rekrutmen sekitar 20% dari jumlah karyawan yang pensiun.

Rencana pengalokasian karyawan Telkom Group disusun paling lambat pada triwulan IV dan berlaku selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana pengalokasian karyawan berisi berbagai informasi diantaranya:

a. Nama posisi yang sudah atau sedang dan akan dijabat oleh karyawan;
b. *Layer* posisi;
c. *Job stream*;
d. Lokasi kerja;
e. Jumlah formasi;
f. Rencana pengaturan karyawan tiap bulan termasuk promosi dan mutasi;
g. Status penugasan (berjangka waktu/tidak berjangka waktu);
h. Mutasi masuk dan keluar (*in/out*)

Rencana ketenagakerjaan disusun dengan mengidentifikasi kebutuhan karyawan di jajaran Telkom Group, yang mengacu pada *Human Capital Plan* atau *Rolling Human Capital Plan* Telkom Group.

Sementara itu, pelaksanaan rekrutmen SDM Telkom Group dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya internal melalui sinergi di jajaran Telkom Group. Sinergi di bidang perekrutan ini bertujuan mengedepankan efisiensi dalam hal biaya rekruitmen dan biaya pergantian karyawan di masing-masing Perusahaan, serta untuk mendapatkan kandidat terbaik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Telkom Group. Selain itu, sinergi ini dengan sendirinya juga memfasilitasi pengembangan karir setiap karyawan di jajaran Telkom Group. Jika dimungkinkan, kebutuhan karyawan akan dipenuhi oleh kandidat yang berasal dari dalam Telkom Group sendiri. Kami juga mengirim lebih banyak karyawan dari Telkom untuk penugasan di perusahaan lain di Telkom Group.

Sinergi dalam hal perekrutan mencakup:

a. Pelaksanaan *Career Days*;
b. Pemanfaatan bersama atas infrastruktur dan fasilitas seperti tempat kegiatan pelatihan atau penilaian dalam proses penyeleksian karyawan;
c. pemanfaatan bersama atas *database* kandidat serta modul atau materi terkait pengetahuan produk Telkom Group; dan
d. Inisiatif sinergi di bidang perekrutan lainnya.

Telkom Group memiliki 26.023 orang karyawan per tanggal 31 Desember 2011, yang terdiri dari 19.780 karyawan Telkom dan 6.243 karyawan pada Anak Perusahaan. Jumlah ini menurun 3,1% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2010 sebanyak 26.847 karyawan, dikarenakan pelaksanaan program *multi exit* sejak tahun 2005.

A. Profil Karyawan Berdasarkan Posisi Jabatan

Berikut ini rincian karyawan Telkom Group berdasarkan posisinya:

Jabatan	Telkom	Anak Perusahaan	Telkom Group	%
Manajemen Senior	136	76	212	0,8
Manajemen Madya	2.497	1.157	3.654	14,0
Pengawas	9.694	2.162	11.856	45,6
Lainnya	7.453	2.848	10.301	39,6
Jumlah	**19.780**	**6.243**	**26.023**	**100,0**

Grafik Profil Karyawan Telkom Group Berdasarkan Posisi Jabatan

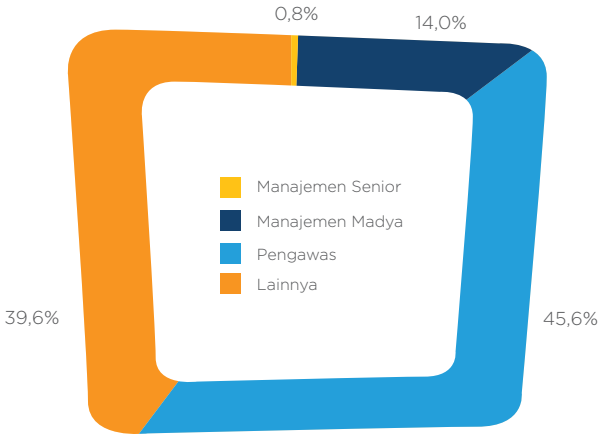

B. Profil Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi karyawan Telkom Group per 31 Desember 2011 menunjukkan porsi karyawan berpendidikan pra kuliah lebih kecil, yaitu 27,9%, dibandingkan karyawan lulusan universitas yang menguasai porsi 42,1%. Hal ini dikarenakan Perusahaan lebih memfokuskan pada perekrutan karyawan berpendidikan lebih tinggi dalam rangka memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan usaha.

Tingkat Pendidikan	Telkom	Anak Perusahaan	Telkom Group	%
Pra Kuliah	6.695	564	7.259	27,9
Lulusan Diploma	4.808	944	5.752	22,1
Lulusan Universitas	6.594	4.351	10.945	42,1
Pasca Sarjana	1.683	384	2.067	7,9
Jumlah	**19.780**	**6.243**	**26.023**	**100,0**

Grafik Profil Karyawan Telkom Group Berdasarkan Tingkat Pendidikan

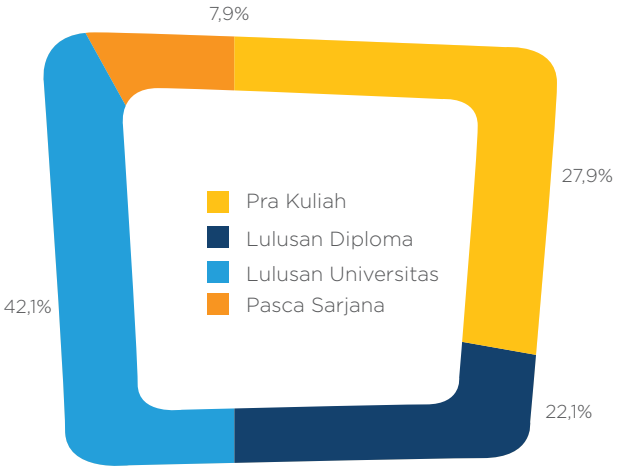

C. Profil Karyawan Berdasarkan Usia

Berdasarkan tingkat usia, kelompok karyawan Telkom Group berusia di atas 45 tahun per 31 Desember 2011 masih mendominasi dengan persentase sebesar 54,6%, yang diikuti kelompok karyawan berusia 31 hingga 45 tahun sebesar 35,4% dan kelompok karyawan di bawah usia 30 tahun sebesar 10,0%.

Kelompok Usia	Telkom	Anak Perusahaan	Telkom Group	%
<30	913	1.686	2.599	10,0
31 - 45	5.089	4.127	9.216	35,4
>45	13.778	430	14.208	54,6
Jumlah	**19.780**	**6.243**	**26,023**	**100,0**

Grafik Profil Karyawan Berdasarkan Usia

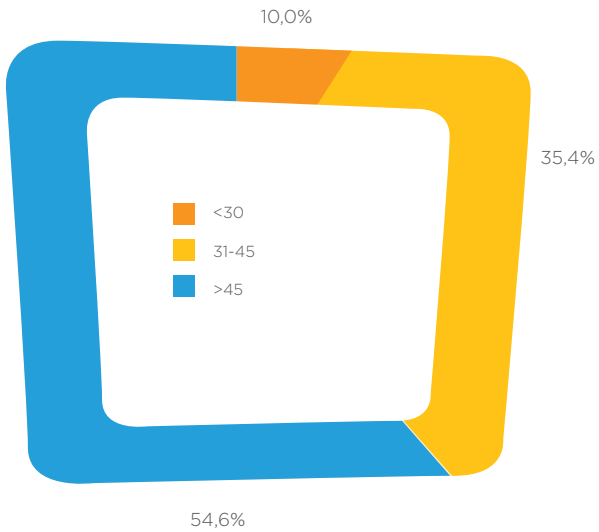

PROGRAM-PROGRAM SDM TELKOM

A. Pengembangan Kompetensi SDM

Telkom telah menetapkan strategi pengembangan kompetensi *Human Capital* yang dituangkan dalam *Master Plan Human Capital* 2011 – 2015, yang senantiasa diperbaharui setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perusahaan. Pelaksanaannya juga diselaraskan dengan strategi bisnis yang berdasarkan kepada *Corporate Strategic Scenario* ("CSS"), *Master Plan for Human Capital* ("MPHC"), *Training Needs Analysis* ("TNA"), transformasi organisasi serta situasi keuangan Perusahaan.

Selain itu, Telkom juga menerapkan pendekatan *Competency Based Human Resources Management* ("CBHRM") dalam rangka penilaian terhadap kompetensi SDM yang ada. Model CBHRM terdiri atas *Core Competency (values), Generic Competency (Personal Quality)*, dan *Specific Competency (Skill & Knowledge)*. Ketiga model ini dikembangkan dan disempurnakan untuk mendukung penilaian kemampuan pegawai secara adil dan transparan.

Telkom memiliki direktori kompetensi yang memuat daftar kompetensi yang diperlukan perusahaan yang senantiasa diperbaharui agar mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis Perusahaan. Dengan penerapan nilai Perusahaan (*core values*), yaitu *Commitment to Long Term, Customer First, Caring Meritocracy, Co-Creation of Win-Win Partnership,* dan *Collaborative Innovation* atau disebut Telkom 5C. Perusahaan pun menyesuaikan sejumlah kompetensi yang terdapat dalam direktori kompetensi keterampilan dan pengetahuan agar sesuai dengan perubahan portfolio bisnis perusahaan menjadi TIME.

Pengembangan kompentensi karyawan Telkom dititikberatkan pada hal-hal berikut ini:

1. Pengembangan budaya, yang memfokuskan pada internalisasi dan penguatan nilai perusahaan, sebagai basis pembentukan budaya.
2. Pengembangan kemampuan peran, yang terfokus pada pengembangan kualitas pribadi yang dibutuhkan oleh setiap kategori peran yang dipilih/ didefinisikan.
3. Pengembangan kemampuan sesuai tuntutan pekerjaan.

Menyusul transformasi bisnis perusahaan yang terfokus pada bisnis TIME, penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan yang bersifat perubahan kompetensi dan pengembangan kompetensi baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategi bisnis dan operasional. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi bertujuan

untuk menyiapkan kompetensi karyawan agar mampu menyikapi pada perubahan telekomunikasi berbasis TDM menjadi telekomunikasi berbasis IP dan kompetensi IME (Informasi, *Media* dan *Edutainment*). Sementara itu, kompetensi pengembangan bertujuan untuk menyiapkan karyawan dengan kompetensi tertentu yang dapat mendukung untuk menghadapi transformasi portofolio bisnis perusahaan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada strategi bisnis Perusahaan.

Selama 2011, fokus program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan yang diselenggarakan Telkom adalah di bidang teknologi, pemasaran & manajemen, telekomunikasi, informasi bisnis dan pengembangan bisnis *new wave* untuk mendukung terwujudnya visi Telkom menjadi pemimpin pasar dalam penyelenggaraan TIME. Pelatihan ini diselenggarakan bersama lembaga pendidikan terkemuka.

Berikut ini strategi pengembangan kompetensi Telkom, yaitu:

1. *Lateral Strategy*, yaitu berupa pelatihan yang diarahkan ke *many to many marketing* dan *community marketing;*
2. *Empower Strategy*, yaitu berupa pelatihan yang mengarah ke saluran pengiriman, pemberdayaan manusia, dan peningkatan penjualan;
3. *Accelerate Strategy*, yaitu berupa pelatihan untuk mendukung penetrasi dan akuisisi, serta peningkatan proses bisnis; dan
4. *DNA Strategy*, yaitu berupa pelatihan untuk menggali informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan Telkom Group, meliputi device, network dan aplikasi atau konten.

Untuk meningkatkan kerjasama unit bisnis Telkom Group dan untuk efisiensi biaya, dilakukan sinergi Telkom Group yang meliputi kerjasama program, kerjasama partisipan, maupun kerjasama di bidang fasilitas.

Kemudian guna menciptakan pemimpin masa depan, disediakan program pengembangan kepemimpinan antara lain:

- Kepemimpinan Tingkat Dasar (*Supervisory Leadership Fundamental, Supervisory Leadership Functional*);
- Kepemimpinan Tingkat Menengah (Suspim 135 B, *Public Leadership* untuk Manajemen Madya); dan
- Kepemimpinan Tingkat Senior (Suspim 135 A, *Functional Leadership, Commander Training, Public Leadership* untuk Manajemen Senior).

Sebanyak 11.874 karyawan telah mengikuti kompetensi perubahan dan kompetensi pengembangan selama tahun 2011. Dalam program pelatihan kompetensi perubahan, sebanyak 3.864 karyawan mengikuti program Telekomunikasi, 6.362 karyawan mengikuti program Informasi, 3.266 karyawan mengikuti program Media serta program *Edutainment*, baik di dalam maupun luar negeri.

Kemudian program pengembangan kompetensi yang terdiri dari Pengembangan bakat dan kepemimpinan diikuti sebanyak 3.172 karyawan, Telkom *New Culture* diikuti 1.714 karyawan, *Synergy* Telkom Group diikuti 450 karyawan, program Edukasi diikuti 3 karyawan, program sertifikasi diikuti 161 karyawan dan *Core Function* diikuti 11.874 karyawan. Penetapan keikutsertaan karyawan dalam keseluruhan program pengembangan kompetensi atau pelatihan tersebut ditentukan oleh kebutuhan Perusahaan dan karyawan dengan memperhatikan kesetaraan *gender*.

Untuk pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan selama tahun 2011, Telkom mengeluarkan Rp157,0 miliar atau rata-rata sebesar Rp7,9 juta per karyawan yang mengikuti program tersebut.

Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi karyawan juga termasuk fasilitas *Knowledge Management,* dimana setiap karyawan berkesempatan untuk bertukar ide, konsep dan berbagi informasi melalui artikel yang dapat diakses oleh semua karyawan.

Agar karyawan tergerak mengikuti jalur pengembangan kompetensi perusahaan, Telkom telah menerapkan sistem penilaian yang obyektif atas kinerja karyawan. Penilaian atas kinerja masing-masing karyawan terkait dua aspek, yaitu aspek hasil yang berdasarkan sasaran kerja individu dan aspek proses, yang berdasarkan kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan. Pelaksanaannya dilakukan secara *online* terhadap sejumlah indikator perilaku terkait yang ditunjukkan oleh karyawan saat bekerja (*demonstrated behavior*).

Hasil penilaian kompetensi selanjutnya dikaitkan dengan proses-proses lainnya, antara lain untuk kepentingan pengembangan kompetensi, pengembangan karir, penghargaan/remunerasi, kinerja, bahkan untuk kebijakan pensiun dini.

Untuk memperkuat pengembangan manajemen karir karyawan, Telkom juga memiliki jalur pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dianggap memiliki kinerja baik dan berbakat. Jalur ini terdiri dari kegiatan pengembangan kompetensi standar dan khusus yang dituangkan dalam Program Pengembangan Terpadu ("IDP") dalam rangka mempersiapkan mereka sebagai calon pemimpin di posisi penting Perusahaan. Telkom

menyiapkan wadah yang disebut *TopTalent* Telkom Group (*TopTalent*), yaitu kumpulan karyawan yang memiliki kompetensi dan atau kinerja yang paling tinggi, serta potensi tinggi. Melalui *Assessment Center* Telkom dapat menggunakan data Top Talent untuk mengisi posisi layer 1 dan 2 (di bawah Direksi) dari seluruh perusahaan di bawah Group.

Untuk pergerakan karir karyawan Telkom mengacu pada rencana pengaturan karyawan, yaitu adanya permintaan untuk pengisian posisi yang tersedia setingkat Pimpinan Unit/Direksi kepada Direktur SDM Telkom.

Pengelolaan SDM kami telah mendapatkan pengakuan dari pihak luar. Kami memenangkan 5 penghargaan dalam Indonesian Human Capital Studies 2011 yang diselenggarakan oleh Dunamis Human Capital dan majalah Business Review pada 30 Juni 2011, serta memperoleh peringkat kedua untuk kategori Inovasi HR BUMN terbaik dalam BUMN Award 2011 pada tanggal 1 Desember 2011 dari majalah BUMN Track, BUMN Public Relations Forum dan Kementrian BUMN.

B.Remunerasi yang Kompetitif

Telkom memberikan paket remunerasi yang kompetitif sesuai peraturan yang berlaku dan harga pasar, yang terdiri dari gaji pokok dan gaji terkait dengan tunjangan, bonus dan berbagai fasilitas, termasuk program pensiun dan program pelayanan kesehatan pasca kerja, tunjangan kesehatan karyawan dan beberapa anggota keluarga inti, bantuan perumahan dan fasilitas lainnya, juga yang terkait dengan kinerja unit. Paket remunerasi ini senantiasa dievaluasi agar pergerakan gaji karyawan sesuai dengan harga pasar.

Untuk pemberian bonus, Perusahaan umumnya telah membuat anggaran namun baru akan mendistribusikannya pada tahun berikutnya setelah bonus tersebut diakui *(accrued)*. Dalam kurun lima tahun terakhir, Perusahaan telah membayarkan bonus tahunan berkisar antara Rp236 miliar sampai Rp518,0 miliar. Terkait pemberian bonus 2011, Perusahaan akan berpegang pada penyelesaian audit atas Laporan Keuangan 2011 serta persetujuan dari RUPS 2011.

Anak Perusahaan Telkom juga memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawannya

C.Penghargaan Karyawan

Sebagai bentuk terima kasih perusahaan terhadap karyawan yang berprestasi dalam membantu pencapaian target bisnis perusahaan maupun pihak eksternal yang ikut membesarkan nama Telkom, Perusahaan memberikan beberapa bentuk penghargaan setiap tahunnya.

Berikut daftar pemberian penghargaan bagi karyawan maupun Unit Telkom selama tahun 2011:

No.	Jenis Penghargaan	Penerima Penghargaan	
		Jumlah	Satuan
PENGHARGAAN PERORANGAN			
Penghargaan Internal			
1.	Penghargaan Bidang Keagamaan (Haji, Umrah, Ziarah Kristiani, Tirtayatra)	104	Orang
2.	*The Healthiest Family*	3	Orang
3.	Manajer dan Staff Terbaik	16	Orang
4.	Inovator Terbaik	15	Orang
5.	Apresiasi Khusus Inovasi Bidang CSR	1	Orang
6.	Kampiun *Award*	3	Orang
7.	*Reward* Utama	4	Orang
Penghargaan Eksternal			
	Customer Service Award	33	Orang
JUMLAH		**179**	**Orang**
PENGHARGAAN UNIT KERJA			
Penghargaan Internal			
1.	Penghargaan Unit Terbaik	11	Unit
2.	Kampiun *Award*	3	Unit
Penghargaan Eksternal			
3.	*Best Channel Award*	35	Unit
4.	TCSR *Award*	20	Unit
JUMLAH		**69**	**Unit**

Untuk memotivasi karyawan, Anak Perusahaan Telkom juga terus memberikan program penghargaan.

D.Pelayanan SDM Berbasis TI

Untuk memfasilitasi proses kerja seluruh karyawan, Telkom membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kebijakan dan strategi bisnis Perusahaan antara pembuat kebijakan, pengelola SDM dan karyawan. Infrastruktur yang dimaksud adalah situs *Human Capital & General Affair* yang dapat diakses oleh karyawan yang ingin mengetahui berbagai kebijakan dan informasi lain terkait pengelolaan dan pengembangan SDM.

Selain itu, layanan-layanan SDM berbasis TI yang telah Kami kembangkan sejak tahun 2009 terus dioptimalkan, seperti Sasaran Kerja Individu ("SKI") *online,* absensi *online,* Surat Perintah Perjalanan Dinas ("SPPD") *online*, cuti *online, career online* dan *Training Need Analisys* ("TNA") *online*. Telkom juga menerapkan berbagai aplikasi TI seperti proses otomatisasi bisnis Perusahaan baik berupa nota dinas elektronik, *virtual meeting, shared files,* survei *online,* dan intranet.

Pada bulan Oktober 2007 Perusahaan telah mendirikan media relasi karyawan dan pusat pelayanan SDM untuk memastikan isu-isu yang berhubungan dengan karyawan dapat ditangani dan dikomunikasikan secara efektif. Kami juga menyiapkan sarana telepon, layanan personal, *email* dan *website* agar dapat memfasilitasi komunikasi antara karyawan dan pihak SDM.

Anak Perusahaan Telkom juga menerapkan beragam strategi komunikasi agar fungsi SDM dapat dirasakan oleh seluruh karyawan.

E.Progam Pensiun

1. Kelanjutan Program Pensiun Dini ("Pendi")

Pendi merupakan program yang dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efektif dan kompetitif. Program ini sejalan dengan pelaksanaan *Master Plan Human Capital* 2011-2015 yang diperkirakan akan mengurangi jumlah karyawan Telkom sebanyak 2.870 karyawan. Program ini ditawarkan secara sukarela kepada karyawan yang dianggap telah memenuhi persyaratan tertentu, (terkait pendidikan, usia, jabatan dan kinerja). Sejak tahun 2002 hingga 31 Desember 2011 Perusahaan telah mengalokasikan dana sebesar Rp7 triliun sebagai kompensasi bagi sebanyak 13.414 karyawan yang mengikuti program ini.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP")

Masa pensiun untuk seluruh karyawan Telkom adalah 56 tahun. Telkom memiliki dua program pensiun;

(i) Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") yang ditujukan bagi karyawan tetap yang direkrut sebelum tanggal 1 Juli 2002; dan

(ii) Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang berlaku bagi semua karyawan tetap lainnya.

Perhitungan pensiun bagi peserta PPMP didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika karyawan tersebut meninggal. Dana Pensiun Telkom bertugas mengelola program ini dan sumber utama Dana Pensiun ini berasal dari iuran karyawan dan Perusahaan. Partisipasi karyawan dalam program ini sebesar 18% dari gaji pokok (sebelum bulan Maret 2003, tingkat kontribusi karyawan adalah sebesar 8,4%) sedangkan Perusahaan memberikan kontribusi sisanya. Minimum manfaat pensiun bulanan untuk karyawan yang pensiun sekitar Rp425.000 setiap bulannya. Kontribusi Perusahaan kepada Dana Pensiun dalam program ini masing-masing mencapai Rp889 miliar, Rp485 miliar dan Rp187 miliar untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011.

3. Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP")

Telkom menyelenggarakan PPIP bagi karyawan tetap yang direkrut sejak tanggal 1 Juli 2002. PPIP dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"), dimana karyawan dapat memilih di antara berbagai DPLK yang menyelenggarakan program ini. Kontribusi tahunan Perusahaan terhadap PPIP ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji dasar karyawan peserta, yang masing-masing mencapai Rp4 miliar, Rp4miliar dan Rp5 miliar untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2010 dan 2011. Bagi karyawan yang telah memenuhi masa kerja tertentu, Telkom memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk seperti, Bantuan Fasilitas Perumahan Terakhir, Penghargaan Purnabhakti, Biaya Perjalanan Pensiun dengan tarif yang telah ditetapkan pada saat karyawan yang dimaksud pensiun atau mengundurkan diri.

Telkomsel juga melaksanakan PPMP bagi karyawannya. Dengan program ini, karyawan berhak mendapatkan manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan gaji pokok atau gaji total terakhir dan masa bakti. PT Asuransi Jiwasraya, BUMN asuransi jiwa, mengelola program ini berdasarkan kontrak asuransi tahunan. Hingga tahun 2004, kontribusi karyawan kepada program ini adalah sebesar 5% dari gaji yang dibayarkan bulanan

sementara Telkomsel membayar sisa kontribusi yang ditetapkan. Mulai tahun 2005, total kontribusi kepada program dilakukan sepenuhnya oleh Telkomsel.

Selain itu, Telkomsel juga menyediakan program penghargaan bagi karyawan dengan masa bakti yang lama dalam bentuk uang tunai atau cuti. Penghargaan ini diberikan ketika karyawan telah bekerja selama jangka waktu tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. Beberapa program penghargaan merupakan kebijakan manajemen.

Selain Telkomsel, Infomedia juga menyelenggarakan PPMP bagi karyawannya.

F. Program Pelayanan Kesehatan

1. Pengelolaan Kesehatan Karyawan

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan karyawan yang diharapkan berdampak pada perbaikan produktivitas Perusahaan, Telkom menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan dan pensiunan beserta keluarga intinya yang dikelola oleh Yayasan Kesehatan ("Yakes") Telkom. Hingga 31 Desember 2011, total karyawan dan pensiunan beserta keluarga intinya yang menjadi peserta layanan kesehatan Yakes Telkom mencapai 130.660 orang. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya, salah satunya karena karyawan yang bersangkutan meninggal atau umur progresifnya diluar batas usia yang telah ditetapkan.

2. Pelayanan Kesehatan Pasca Kerja

Perhatian Telkom terhadap kesejahteraan karyawan juga berlanjut hingga karyawan memasuki masa pensiun, yaitu di antaranya dengan menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh karyawan yang telah pensiun, termasuk istri atau suami dan anak. Telkom dalam hal ini menyediakan dua jenis pendanaan untuk jaminan kesehatan pensiun, yakni:

(i) bagi karyawan yang diangkat sebagai calon pegawai sebelum tanggal 1 November 1995 dan memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun, mereka berhak mengikuti jaminan layanan kesehatan yang dikelola oleh Yakes. Kontribusi Telkom terhadap pelaksanaan program ini sebesar Rp1.101 miliar, Rp991 miliar dan Rp361 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011.

(ii) bagi semua karyawan tetap lainnya, berhak memperoleh layanan kesehatan dalam bentuk tunjangan asuransi. Telkom memberikan kontribusi masing-masing sebesar Rp23 miliar, Rp20 miliar dan Rp19 miliar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 untuk menjalankan program ini.

Anak Perusahaan Telkom memberikan tunjangan kesehatan melalui program jaminan kesehatan yang disponsori oleh pemerintah yang dikenal sebagai Jamsostek.

G. Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Lingkungan Kerja ("K3")

Telkom berkomitmen untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan dan keamanan dalam lingkungan operasional serta pengamanan terhadap sumber daya, proses, dan alat produksi dan lingkungan kerja yang diwujudkan melalui penerapan program Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Lingkungan Kerja (K3).

Sejak 2009, pengelolaan K3 difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun.

Pada tahun 2009, survei K3 diselenggarakan bersamaan dengan survei pendapat karyawan Telkom. Survei K3 ini merupakan survei pertama yang dilakukan untuk mengetahui apakah lingkungan kerja karyawan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Hasil survei K3 tersebut menunjukkan Telkom memperoleh skor 77,7% yang dikategorikan sebagai "Cukup Baik". Keberhasilan Kami dalam pelaksanaan K3 telah diakui secara luas dengan prestasi terkini mendapatkan enam penghargaan pada tahun 2011.

H. Pengelolaan Hubungan Karyawan dengan Manajemen

Merujuk pada Keputusan Presiden No.83 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.87 tahun 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Membentuk Organisasi, beberapa karyawan Telkom mendirikan "Serikat Karyawan Telkom" atau "SEKAR". Hingga 31 Desember 2011, SEKAR beranggotakan 18.691 karyawan atau 94,5% dari jumlah karyawan Telkom.

Sesuai dengan UU No.13 tahun 2003, SEKAR berhak mewakili karyawan dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"). PKB yang berlaku saat ini efektif sampai dengan tahun 2012. Kami mengantisipasi pelaksanaan negosiasi untuk PKB V yang akan dilakukan bulan Juni 2012.

Telkomsel dan Infomedia juga memiliki serikat pekerja. Serikat karyawan di Telkomsel, "SEPAKAT" atau Serikat Pekerja Karyawan Telkomsel"beranggotakan 3.730 karyawan atau 84% dari jumlah karyawan Telkomsel.

I. Aktivitas Ekstrakurikuler

Telkom memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk berperan aktif dalam berbagai aktivitas ekstrakurikuler, terutama yang dapat mendukung produktivitas karyawan. Aktivitas ekstrakurikuler karyawan yang difasilitasi Telkom selama ini meliputi bidang keagamaan, budaya dan olahraga. Kegiatan ini juga terbuka bagi keluarga karyawan, seperti dalam kompetisi pembacaan Al-Quran, paduan suara gereja dan Ustawa Dharma Gita (Hindu) dan kegiatan olah raga.

Fokus program pelatihan dan pendidikan karyawan tahun 2011 adalah bidang teknologi, pemasaran & manajemen telekomunikasi, informasi bisnis dan pengembangan bisnis *new wave.*

1.7900
1.7855
1.7810
14.56

Tinjauan Kinerja Efek

MEKANISME PERDAGANGAN PASAR MODAL DAN ADS TELKOM

Saham Biasa Telkom tercatat dan diperdagangkan di pasar saham dalam negeri, yaitu BEI. Selain BEI, saham Telkom juga tercatat di NYSE dan LSE melalui mekanisme ADS. Satu lembar saham ADS mewakili 40 lembar saham dari Saham Biasa. Saham Telkom juga terdaftar di Jepang melalui POWL.

PASAR SAHAM INDONESIA

Pasar saham Indonesia yang kini lebih dikenal dengan BEI sejak 1 Desember 2007, merupakan penggabungan dua bursa saham yang beroperasi di dua lokasi berbeda di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta yang berlokasi di Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

BEI memiliki 440 emiten dan 117 anggota perusahaan pialang. Selama tahun 2011, volume perdagangan di BEI mencapai 1.203,6 miliar lembar saham. Pada tanggal 31 Desember 2011 total kapitalisasi pasar BEI senilai Rp3,537 triliun.

Perdagangan saham harian di BEI berlangsung dari Senin hingga Jumat yang terdiri dari dua sesi perdagangan untuk pasar reguler maupun pasar negosiasi. Sesi perdagangan pertama dimulai pukul 09.30 hingga pukul 12.00, sementara sesi kedua berlangsung antara pukul 13.30-16.00. Pada hari Jumat, sesi pertama di mulai pukul 09.30-11.30 dan sesi kedua di mulai pukul 14.00-16.00. Hanya ada satu sesi perdagangan pasar tunai setiap harinya yang berlangsung dari Senin hingga Kamis mulai pukul 09.30-12.00 dan pada hari Jumat dari pukul 09.30-11.30.

Perdagangan sekuritas dibagi menjadi tiga segmen yaitu pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai (kecuali untuk *right issue* yang hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan pasar negosiasi pada sesi pertama). Pasar reguler merupakan mekanisme perdagangan saham dalam lot standar di pasar lelang yang dilakukan secara terus menerus selama jam bursa. Perdagangan pasar reguler dan pasar tunai pada umumnya dilaksanakan dalam unit lot, yaitu satu lot yang terdiri dari 500 lembar saham. Selain itu, BEI juga memberlakukan pembatasan atas pergerakan harga saham.

Lelang di BEI yakni pada pasar reguler dan pasar tunai, mengacu pada prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga yaitu pemberian prioritas berdasarkan pesanan pembelian dengan harga yang lebih tinggi atau pesanan penjualan dengan harga yang lebih rendah. Jika terdapat pesanan pembelian atau penjualan yang diajukan dengan harga yang sama, prioritas diberikan bagi pesanan pembelian atau penjualan yang diajukan lebih awal (prioritas waktu).

Di pasar negosiasi, BEI memfasilitasi pelaksanaan negosiasi langsung antara (i) anggota BEI atau (ii) antara nasabah melalui satu anggota BEI atau (iii) antara nasabah dan anggota BEI atau (iv) antara anggota BEI dengan Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI").

Seluruh anggota bursa yang terlibat dalam kegiatan perdagangan saham di pasar regular BEI harus menyelesaikan transaksi selambat-lambatnya pada hari perdagangan ketiga. Sementara untuk kegiatan transaksi di pasar negosiasi, anggota bursa dapat menyelesaikannya melalui perjanjian antara sesama anggota bursa yang menjual dan yang membeli secara per transaksi. Namun untuk transaksi tunai, penyelesaiannya harus pada hari transaksi itu dilakukan dan dilaporkan kepada BEI. Bagi anggota bursa yang gagal

melakukan penyelesaian, diperbolehkan melakukan negosiasi langsung berdasarkan persyaratan tunai dan langsung *(cash and carry)*. Atas setiap transaksi dikenakan biaya sesuai aturan BEI dan untuk keterlambatan pembayaran biaya transaksi, BEI mengenakan denda sebesar 1,0% dari jumlah yang terhutang untuk setiap hari keterlambatan. Atas pelanggaran terhadap peraturan BEI ini, bursa berhak mengenakan sanksi yang sesuai, mulai dari denda, peringatan tertulis, skorsing, hingga pencabutan ijin sebagai anggota bursa.

BEI berwenang untuk membatalkan sebuah transaksi apabila terdapat bukti adanya kecurangan, manipulasi pasar atau penggunaan informasi orang dalam. BEI juga berwenang memblokir perdagangan saham suatu emiten jika ditemukan indikasi penipuan atau peningkatan harga saham yang tidak wajar, informasi yang menyesatkan, referensi informasi orang dalam, sekuritas palsu atau sekuritas yang diblokir dari perdagangan, atau peristiwa material lainnya.

Untuk tiap transaksi saham di BEI, setiap anggota bursa diwajibkan untuk membayar biaya transaksi sebesar 0,018% dari nilai transaksi (untuk transaksi di pasar regular dan pasar tunai). Untuk pasar negosiasi, biaya transaksi tergantung kepada kebijakan bursa. Besaran biaya transaksi yang dikenakan minimal sebesar Rp20 juta per bulan sebagai kontribusi untuk penyediaan fasilitas bursa efek dan tetap berlaku untuk anggota bursa efek yang sedang diskors.

Para pemegang saham atau pihak yang ditunjuk, dapat meminta emiten atau biro administrasi sekuritas yang ditunjuk oleh emiten saham tersebut untuk mendaftarkan saham mereka ke dalam daftar pemegang saham emiten. Para pemegang saham dengan kepemilikan saham sebesar 5,0% atau lebih dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh harus melaporkan kepemilikan sahamnya ke Bapepam-LK jika terjadi peristiwa yang bersifat material yang mengubah porsi kepemilikannya di perusahaan tersebut.

Sejak krisis keuangan global pada kuartal terakhir 2008 yang mengakibatkan fluktuasi harga saham yang tidak wajar, BEI kemudian menerapkan kebijakan *auto rejection*, yaitu suatu mekanisme yang mengatur pemberhentian perdagangan saham secara otomatis pada saat tertentu guna menjaga kinerja bursa yang teratur, wajar dan efisien. Pada bulan Oktober 2008 dan Januari 2009, BEI menyesuaikan level pemberlakuan *auto rejection* menjadi 35% di atas atau di bawah harga acuan untuk saham seharga antara Rp50 – Rp200, 25% untuk saham dengan harga antara Rp200 sampai dengan Rp5.000, dan 20% untuk saham dengan harga di atas Rp5.000.

PERDAGANGAN SAHAM DI NYSE DAN LSE

Bank of New York Mellon (sebelumnya The Bank of New York) bertindak sebagai lembaga penyimpan ("Kustodian") saham ADS, yang diperdagangkan di NYSE dan LSE.

Dalam transaksi saham ADS, investor dapat secara langsung atau melalui pialang yang mewakili mereka membayar biaya penjaminan untuk pengiriman dan penyerahan ADS demi keperluan penarikan saham. Kustodian berhak menerima bayaran saat pendistribusian saham kepada investor dengan mengurangi jumlah yang didistribusikan dengan upah tersebut atau dengan menjual sebagian dari properti yang akan didistribusikan untuk membayar upah tersebut. Kustodian dapat menarik iuran tahunan untuk layanan penjaminan dengan mengurangi distribusi kas atau secara langsung mengirim tagihan ke investor atau dengan menagih ke rekening dari sistem pembukuan pihak yang mewakili mereka. Kustodian dapat menolak memberikan layanan sebelum investor menyelesaikan tagihan atas layanan tersebut.

Biaya Terkait Penerbitan dan Pembuatan ADS

Pemegang saham yang melakukan deposit atau penarikan dari Saham Biasa atau ADS, harus membayar:	Untuk:
US$5 (atau kurang) per 100 saham ADS (atau sebagian dari 100 saham ADS).	Penerbitan saham ADS, termasuk penerbitan hasil dari pembagian saham atau hak atau kepemilikan lainnya. Pembatalan dari saham ADS untuk keperluan penarikan, termasuk jika perjanjian deposit berakhir.
US$0,02 (atau kurang) per saham ADS.	Setiap pembayaran tunai kepada pemegang saham ADS yang terdaftar.
Biaya yang setara dengan biaya yang terutang apabila surat berharga yang didistribusikan kepada pemegang saham telah dibagikan dan saham tersebut dideposit untuk penerbitan saham ADS.	Penyampaian surat berharga oleh Kustodian kepada pemegang saham tercatat ADS.
US$0,02 (atau kurang) per saham ADS per tahun kalender.	Layanan penyimpanan.
Biaya registrasi atau pemindahan.	Pemindahan dan pencatatan saham pada daftar saham Perusahaan dari atau kepada atas nama kustodian atau agennya ketika pemegang saham melakukan deposit atau melakukan penarikan saham biasa.
Biaya penyimpanan.	Pengiriman melalui telegram, telex dan faksimili (jika disediakan sesuai perjanjian deposit). Menukar mata uang asing ke Dolar AS.
Pajak dan biaya lainnya yang dibebankan oleh Pemerintah dan kustodian pada saat membayar saham ADS atau saham lain di bawah jaminan ADS, seperti pajak untuk pemindahan saham, meterai atau pajak penghasilan.	Sesuai dengan kebutuhan.
Setiap biaya yang dikenakan oleh kustodian atau agennya untuk melayani surat berharga yang didepositkan.	Sesuai dengan kebutuhan.

Kustodian menyetujui penggantian biaya pada Perusahaan sampai dengan US$400.000 per tahunnya sampai tahun 2015 untuk beban tertentu yang timbul akibat dari kegiatan administrasi dan pemeliharaan fasilitas ADS. Biaya ini termasuk, namun tidak terbatas, untuk beban hubungan investor, baik langsung maupun tidak langsung, serta beban program ADS terkait lainnya. Penggantian ini akan dievaluasi dan disesuaikan jika jumlah saham ADS yang beredar berada di bawah jumlah minimum yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak tercatat lagi dari NYSE. Kami berharap dapat melakukan negosiasi ulang terhadap jumlah penggantian biaya tersebut untuk tahun-tahun setelah tahun 2015. Pada tahun 2011, Kami telah menerima penggantian biaya penyimpanan sebesar US$299.217,30 dari kustodian.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Perseroan

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, anggota jaringan global PwC ("PwC"). Sebelum 8 Maret 2010, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan.

Pemeringkat Efek

Agen pemeringkat Kami adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo")

Kustodian

Kustodian Kami adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan The Bank of New York Mellon sebagai Kustodian ADS Kami.

Wali Amanat Obligasi

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

TINJAUAN KINERJA SAHAM

Komposisi Pemegang Saham

Modal dasar Perseroan terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna, dan 79.999.999.999 saham Seri B (saham biasa). Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh 20.159.999.280, terdiri dari satu saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Satu lembar saham Seri A Dwiwarna tersebut merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) sehingga Pemerintah memiliki hak suara istimewa dan hak untuk memveto pengangkatan dan pemberhentian Direksi atau Dewan Komisaris, penerbitan saham baru dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk perubahan untuk menggabungkan atau membubarkan Perusahaan sebelum masa berlakunya berakhir, menambah atau mengurangi modal dasar dan mengurangi saham yang dipesan *(subscribed capital)*. Hak-hak dan batasan-batasan material yang terdapat pada saham biasa, juga berlaku pada saham Dwiwarna kecuali Pemerintah tidak dapat mengalihkan saham Dwiwarna. Saham Dwiwarna yang dimiliki Pemerintah memberikan hak pengawasan yang efektif pada Telkom bahkan jika terjadi penurunan pemilikan saham biasa dan hak-hak yang terkait dengan saham Dwiwarna hanya dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar, yang mungkin akan diveto oleh Pemerintah. Lihat Catatan 22, 23 dan 24 dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pemegang Saham Telkom pada tanggal 31 Desember 2011

	Saham Seri A Dwiwarna	Saham Seri B (Saham Biasa)	%
Pemerintah Republik Indonesia	1	10.320.470.711	53,24
Publik		9.065.868.608	46,76
Sub Total Modal (ditempatkan dan beredar di pasar)	1	19.386.339.319	100,00
Saham Treasuri (saham yang dibeli kembali)		773.659.960	-
Jumlah	**1**	**20.159.999.279**	**100,00**

Pemegang Saham Telkom dengan Kepemilikan Lebih dari 5% dan Jumlah Saham yang Dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2011

Jenis Saham	Identitas Orang atau Kelompok	Jumlah Saham yang Dimiliki	Persentase Saham (%)
Seri A	Pemerintah	1	-
Seri B	Pemerintah	10.320.470.711	53,24
Seri B	Direksi	23.112	<0,01

Pemegang Saham Biasa Telkom dengan Kepemilikan Perorangan Kurang dari 5% pada tanggal 31 Desember 2011

Kelompok	Jumlah Saham Biasa yang Dimiliki	Persentase (%) Kepemilikan Saham Biasa Beredar
Asing		
Badan Usaha	7.534.677.378	38,87
Perorangan	5.738.440	0,03
Lokal		
Badan Usaha		
Perusahaan Terbatas	534.553.309	2,76
Reksa Dana	302.776.225	1,56
Perusahaan Asuransi	292.822.540	1,51
Dana Pensiun	168.726.530	0,87
Lain-lain	5.448.004	0,03
Perorangan	221.126.182	1,14
Jumlah	**9.065.868.608**	**46,76**

Kepemilikan Saham

Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara individual memiliki kurang dari satu persen saham Perusahaan Hanya 2 direktur yang memiliki saham biasa Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2011, Ermady Dahlan memiliki 17.604 saham dan Indra Utoyo memiliki 5.508 saham.

Program Kepemilikan Saham Karyawan Telkom

Program utama kepemilikan saham karyawan atau *employee stock ownership program* ("ESOP") antara lain melayani transaksi jual beli saham ESOP dan penetapan dividen saham ESOP. Pada saat penawaran saham perdana tanggal 14 November 1995, terdapat jumlah saham Telkom sebanyak 116.666.475 lembar dimiliki oleh 43.218 pegawai. Pada tanggal 31 Desember 2011, sebanyak 12.682.122 lembar saham Telkom dimiliki oleh 11.040 pegawai dan pensiunan Telkom.

Proporsi Saham yang Dimiliki di Indonesia dan di Luar Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2011, sebanyak 36.314 pemegang saham, termasuk Pemerintah, terdaftar sebagai pemegang saham biasa Telkom, termasuk 7.540.415.818 saham biasa yang dimiliki oleh 1.322 pemegang saham di luar Indonesia. Hingga tanggal 31 Desember 2011, terdapat 120 pemegang saham ADS yang memiliki 73.824.138 ADS (setara dengan 2.952.965.536 pemegang saham biasa).

Kronologi Aksi Korporasi

Tanggal	Tindakan Korporasi	Komposisi Kepemilikan Saham			
		Pemerintah Republik Indonesia	%	Publik	%
13/11/1995	Pra-Penawaran Umum Perdana	8.400.000.000	100,0	-	-
14/11/1995	IPO				
	Penjualan saham milik Pemerintah	(933.334.000)		933.334.000	
	Emisi saham baru Telkom			933.333.000	
	Komposisi kepemilikan saham	7.466.666.000	80,0	1.866.667.000	20,0
11/12/1996	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(388.000.000)		388.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	7.078.666.000	75,8	2.254.667.000	24,2
15/05/1997	Pemerintah membagikan saham insentif kepada para pemegang saham publik	(2.670.300)		2.670.300	
	Komposisi kepemilikan saham	7.075.995.700	75,8	2.257.337.300	24,2
07/05/1999	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(898.000.000)		898.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	6.177.995.700	66,2	3.155.337.300	33,8
02/08/1999	Pembagian bonus saham (emisi) (setiap 50 saham mendapatkan 4 saham)	494.239.656		252.426.984	
	Komposisi kepemilikan saham	6.672.235.356	66,2	3.407.764.284	33,8
07/12/2001	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(1.200.000.000)		1.200.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	5.472.235.356	54,3	4.607.764.284	45,7
16/07/2002	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(312.000.000)		312.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	5.160.235.356	51,2	4.919.764.284	48,8
30/07/2004	Pemecahan nilai nominal saham (1:2)				
	Komposisi kepemilikan saham	10.320.470.712	51,2	9.839.528.568	48,8
21/12/2005	Program pembelian saham kembali (I)[1]	10.320.470.712	51,7	9.628.238.068	48,3
29/06/2007	Program pembelian saham kembali (II)[2]	10.320.470.712	52,3	9.413.238.068	47,7
20/06/2008	Program pembelian saham kembali (III)[3]	10.320.470.712	52,5	9.348.954.068	47,5
19/05/2011	Program pembelian saham kembali (IV)[4]	10.320.470.712	53,2	9.065.868.608	46,8

(1) Program pembelian kembali saham tahap pertama dimulai pada tanggal 21 Desember 2005 (bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Juni 2007.
(2) Program pembelian kembali saham tahap kedua dimulai pada tanggal 29 Juni 2007 (bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Juni 2008.
(3) Program pembelian kembali saham tahap ketiga dimulai pada tanggal 20 Juni 2008 (bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Desember 2009.
(4) Program pembelian kembali saham tahap ketiga dimulai pada tanggal 19 Mei 2011 (bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan November 2012.

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen Telkom harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") terkait jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2011 akan ditetapkan pada pelaksanaan RUPST pada tahun 2012.

Tahun Dividen	Tanggal RUPST	Rasio Pembayaran (%)[1]	Jumlah Dividen (Rp juta)	Dividen Per Lembar Saham
2006	29 Juni 2007	55	6.053.067[2]	303,21
2007	20 Juni 2008	70	8.999.913[3]	455,87
2008	12 Juni 2009	55	5.840.708	296,94
2009	11 Juni 2010	50	5.666.070[4]	288,06
2010	19 Mei 2011	55	6.345.350[5]	322,59

(1) Rasio pembayaran merupakan persentase laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang dibayar ke pemegang saham sebagai dividen.
(2) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan November 2006 sejumlah Rp971.017 juta.
(3) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan Desember 2007 sejumlah Rp965.398 juta.
(4) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan Desember 2009 sejumlah Rp524.190 juta.
(5) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 masing-masing sejumlah Rp276.072 juta dan Rp250.085 juta.

Berdasarkan RUPST yang diselenggarakan pada bulan Juni 2011, Telkomsel menyetujui, antara lain, dividen tunai sebesar Rp8.653,7 miliar yang merupakan 70% dari laba bersih Telkomsel di tahun 2010. Dari dividen yang diumumkan, sebanyak 35% telah dibayarkan kepada SingTel Mobile, pemegang saham minoritas terbesar Telkomsel.

Pada tahun 2009, 2010 dan 2011, dividen tunai dibayarkan kepada SingTel Mobile, pemegang saham minoritas Telkomsel, masing-masing berjumlah Rp2.518,2 miliar, Rp3.261,3 miliar dan Rp2.725,6 miliar.

Perubahan Pengendalian

Sampai dengan Laporan Tahunan 2011 ini dibuat, Kami tidak mengetahui adanya rencana atau pengembangan yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian atas Telkom, termasuk perubahan yang masih dalam tahap perencanaan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Telkom memiliki beberapa perjanjian tertentu dan terlibat dalam transaksi dengan sejumlah pihak yang berelasi dengan Telkom, baik yang berbentuk perusahaan patungan, koperasi maupun yayasan. Pihak yang berelasi tersebut termasuk juga dengan Pemerintah serta badan usaha yang terkait atau yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, seperti BUMN. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Catatan 37 pada Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom mengenai transaksi dengan pihak berelasi.

Pembelian Efek oleh Penerbit dan Pembeli Terafiliasi

Sampai dengan 31 Desember 2011, Telkom telah membeli kembali saham sebanyak 773.659.960 lembar saham biasa atau setara dengan 3,8% dari saham biasa yang diterbitkan dan beredar dengan harga pembelian kembali senilai Rp6.323 miliar, yang sudah termasuk biaya broker dan kustodian. Selama program pembelian kembali, Telkom telah membeli kembali saham biasa dengan perincian sebagai berikut: 118.376.500 lembar saham di tahun 2006; 126.364.000 lembar saham di tahun 2007 dan 245.834.000 lembar saham di tahun 2008. Pada tahun 2011, Telkom telah melakukan pembelian kembali saham biasa sebanyak 283.085.460 lembar dengan harga pembelian kembali sebesar Rp2.059 miliar. Lihat Catatan 24 Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom.

Kami berencana untuk mempertahankan, menjual atau menggunakan saham yang dibeli kembali untuk keperluan lain sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.XI.B.2, UU No.40/2007 mengenai Perusahaan Terbatas dan hasil keputusan RUPST tanggal 11 Juni 2010 yang mensyaratkan Direksi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk melaksanakan atau mengalihkan saham yang dibeli kembali dan melaporkan penggunaan atau pengalihannya kepada RUPST. Sebelum memberikan persetujuan, Dewan Komisaris terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Sesuai dengan hasil RUPST pada tanggal 11 Juni 2010, Direksi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melaksanakan setiap perubahan atau pengalihan dari saham *treasury* dan melaporkan penggunaan atau pengalihan tersebut dalam RUPST. Sebelum memberikan persetujuan, Dewan Komisaris harus berkonsultasi dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

TINJAUAN KINERJA OBLIGASI

Kronologi Penerbitan Obligasi

Pada tanggal 16 Juli 2002, Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar Rp1.000 miliar pada harga nominal untuk jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini dikenakan bunga tetap sebesar 17% per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan sejak tanggal 16 Oktober 2002. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya, dan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2007. Wali amanat obligasi ini adalah BRI (efektif sejak tanggal 17 Januari 2006 menggantikan BNI) dan kustodiannya adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2007, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas hutang obligasi tersebut.

Obligasi Rupiah kedua diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2010 masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT CIMB Niaga, Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2011, peringkat obligasi yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA *(stable outlook)*.

Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum

- Jumlah Hasil Penawaran Umum: Rp3.000 miliar
- Biaya Penawaran Umum: Rp9 miliar
- Hasil Bersih: Rp2.991 miliar

Rencana Penggunaan Dana

- *New Wave*: Rp1.496 miliar
- Infrastruktur: Rp1.196 miliar
- Optimisasi *Legacy* dan Fasilitas Penunjang: Rp299 miliar

Realisasi Penggunaan Dana

- *New Wave*: Rp1.496 miliar
- Infrastruktur: Rp1.196 miliar
- Optimisasi *Legacy* dan Fasilitas Penunjang: Rp299 miliar

Sisa Dana Hasil per 31 Desember 2011: -

Tinjauan Operasi dan Strategi

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Industri telekomunikasi di Indonesia telah memasuki momentumnya seiring dengan semakin tingginya kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis teknologi informasi serta manfaatnya terhadap kehidupan.

Populasi Indonesia yang besar serta pertumbuhan ekonominya yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara menawarkan peluang tersendiri bagi kelanjutan bisnis di industri telekomunikasi sehingga memperbesar pangsa pasar telekomunikasi itu sendiri. Namun secara geografis, industri telekomunikasi di Tanah Air dihadapkan pada tantangan pengembangan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan atas akses terhadap layanan telekomunikasi yang berkualitas bagi penduduk di daerah terpencil.

Sementara itu, masuknya pemain baru baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang difasilitasi oleh reformasi di sisi regulasi, mengukuhkan posisi industri ini sebagai salah satu sektor paling potensial dan strategis untuk investasi jangka panjang. Meskipun di satu sisi, situasi ini menciptakan persaingan, terutama di bisnis sambungan telepon seluler berbasis GSM maupun CDMA, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menjamin adanya pertumbuhan bisnis yang sehat di antara para operator telekomunikasi yang ada sehingga masing-masing dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Peluang bisnis di industri telekomunikasi Tanah Air semakin terbuka lebar sejalan dengan pertumbuhan bisnis seluler yang terus menciptakan inovasi baru dan memudahkan akses internet secara *mobile* bagi para pelanggannya sehingga ikut meningkatkan prospek bisnis layanan komunikasi data. *Roadmap* maupun tren teknologi di bidang telekomunikasi data ke depannya akan mengarah pada penerapan teknologi HSPA+, *Wimax* dan *Long Term Evolution* ("LTE"). Arah perkembangan teknologi juga mengkonfirmasikan bahwa kebutuhan pelanggan terhadap layanan data terus meningkat, tidak hanya suara (*voice*) namun juga *Short Messaging Service* ("SMS").

Apabila mengacu pada standar internasional, penetrasi akses internet maupun sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia terbilang masih rendah. Namun Kami meyakini ada beberapa kecenderungan ke arah pertumbuhan yang signifikan pada industri telekomunikasi di Indonesia yang didukung oleh beberapa faktor, yakni di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan mendorong peningkatan permintaan akan layanan telekomunikasi, termasuk layanan komunikasi data.
2. Perpindahan ke jaringan telepon nirkabel. Kami meyakini layanan telepon nirkabel akan semakin populer merujuk pada ekspansi cakupan layanan yang disertai peningkatan kualitas jaringan nirkabel, harga telepon seluler yang semakin terjangkau dan pertambahan fitur layanan prabayar yang mempermudah akses data secara *mobile*.
3. Pertambahan jumlah operator telekomunikasi. Kami memperkirakan persaingan pasar di sektor telekomunikasi di Indonesia akan semakin terbuka dan ketat ke depannya sebagai akibat dari reformasi peraturan Pemerintah yang menghapuskan sistem monopolistik.

PERATURAN

Kerangka kerja untuk industri telekomunikasi terdiri dari undang-undang tertentu, Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Menteri yang diberlakukan dan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Kebijakan telekomunikasi saat pertama kali diformulasikan dan diartikulasi dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi", yang termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM.72/1999 tanggal 17 September 1999.

Kebijakan ini ditujukan untuk:

- Meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi di era globalisasi;
- Meliberalisasi sektor ini dengan struktur yang kompetitif dengan menghapus kontrol monopolistik;
- Meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kerangka peraturan;
- Menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan mitra asing;
- Menciptakan peluang bisnis untuk usaha skala kecil dan skala menengah; dan
- Memfasilitasi kesempatan pekerjaan baru.

Selama tahun 2011, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Telkom.

Undang-Undang Telekomunikasi

Secara umum sektor telekomunikasi diatur melalui Undang-Undang No.36/1999 ("Undang-Undang Telekomunikasi"), yang berlaku sejak tanggal 8 September 2000. Undang-Undang Telekomunikasi menetapkan panduan dalam reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi masuknya pemain baru dan meningkatkan transparansi dan kompetisi.

Undang-Undang Telekomunikasi menghapuskan konsep "badan penyelenggara" di dalam industri, yang mengakhiri status khusus Indosat dan Kami sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab melakukan koordinasi layanan telekomunikasi dalam negeri dan internasional. Dalam rangka meningkatkan persaingan, Undang-Undang Telekomunikasi melarang praktik monopolistik dan persaingan tidak sehat antar sesama operator telekomunikasi.

Undang-Undang Telekomunikasi diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, termasuk Peraturan Pemerintah No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Menkominfo No.1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tertanggal 25 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan No.33/2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.4/2001 tertanggal 16 Januari 2001 tentang Rencana Teknik Dasar Nasional 2000 untuk Pengembangan Telekomunikasi Nasional ("Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional"). Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah Peraturan Menkominfo No.09/PER/M.KOMINFO/06/2010 tertanggal 9 Juni 2010. Bersama dengan Undang-Undang Telekomunikasi, Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional menetapkan visi dasar untuk pengembangan regulator telekomunikasi Indonesia.

Regulator Telekomunikasi

Pada bulan Februari 2005, kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi beralih dari Departemen Perhubungan ke kementerian yang baru terbentuk, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"). Melalui Menkominfo, berwenang mengatur dan mengontrol pelaksanaan kebijakan yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, Menkominfo mengatur alokasi spektrum frekuensi radio bagi seluruh operator telekomunikasi, yang masing-masing harus memperoleh lisensi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("Ditjen Postel"). Sejak 1 Januari 2011, Ditjen Postel dibubarkan dan menyerahkan kewenangan perizinan dan pengaturan dalam industri telekomunikasi kepada dua direktorat jenderal baru di dalam Menkominfo, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, berdasarkan Peraturan Menkominfo No.17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tertanggal 28 Oktober 2010. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No.15/PER/M.KOMINFO/06/2011 tertanggal 20 Juni 2011, seluruh hal yang terkait dengan Ditjen Postel dalam hal peraturan dan keputusan Menkominfo dan Ditjen Postel secara formal yang terkait dengan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan standarisasi peralatan beralih ke Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sedangkan yang terkait dengan pos dan telekomunikasi beralih kepada Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Secara khusus, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika bertanggung jawab dalam perizinan telekomunikasi, penomoran, interkoneksi dan persaingan.

Menyusul pemberlakuan Undang-Undang Telekomunikasi, Kementerian Perhubungan membentuk badan regulasi independen sebagaimana termaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.31/2003 tertanggal 11 Juli 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Independen Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"). Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.31/2003 kemudian diganti dengan Peraturan Menkominfo No.36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 tentang hal yang sama (kemudian diubah dengan Peraturan Menkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tertanggal 7 Februari 2011) ("Peraturan Menkominfo No.36/2008"). Menurut Peraturan Menkominfo No.36/2008, BRTI berfungsi mengatur, memonitor dan mengontrol industri telekomunikasi. BRTI terdiri dari sembilan orang, enam dari elemen sosial dan tiga dari elemen pemerintah (Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta pihak ketiga yang mewakili pemerintah yang ditunjuk oleh Menkominfo), dan dipimpin

oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. BRTI berperan melengkapi hal-hal yang ditentukan Menkominfo antara lain dalam hal perizinan, standarisasi, biaya interkoneksi, persaingan usaha dan penyelesaian konflik.

Sebelum tanggal 25 Februari 2009, BRTI juga mengoperasikan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi ("SKTT"), yang memonitor segala hal yang terkait dengan interkoneksi dan menentukan biaya interkoneksi. Melalui SKTT, BRTI memperoleh data mengenai profil trafik interkoneksi antar operator dan memastikan transparansi dalam pengenaan biaya interkoneksi. Menurut Peraturan Menkominfo No.14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tertanggal 25 Februari 2009 tentang Kliring Trafik Telekomunikasi, tanggung jawab dalam melaksanakan kliring dan penyelesaian biaya interkoneksi telah dialihkan dari BRTI kepada penyedia jaringan telekomunikasi, yang diwajibkan untuk melaporkan data trafik interkoneksi kepada BRTI. Peranan BRTI saat ini lebih kepada pengawasan, daripada pelaksanaan, proses kliring dan penyelesaian interkoneksi.

Klasifikasi dan Perizinan Penyedia Telekomunikasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52/2000, Undang-Undang Telekomunikasi membagi penyedia telekomunikasi ke dalam tiga kategori:

- Penyedia jaringan telekomunikasi;
- Penyedia jasa telekomunikasi; dan
- Penyedia telekomunikasi khusus.

Tiap penyedia telekomunikasi harus memiliki izin yang diterbitkan Menkominfo. Peraturan Menkominfo No.1/2010 dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM21/2001 tertanggal 31 Mei 2001 tentang Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi (diubah dengan Keputusan No.KM.30/2004 tertanggal 11 Maret 2004, Peraturan Menkominfo No.07/P/M.KOMINFO/04/2008 tertanggal 4 April 2008 dan Peraturan Menkominfo No.31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tertanggal 9 September 2008) adalah peraturan pelaksanaan dasar yang mengatur perizinan.

Peraturan Menkominfo No.1/2001 dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21/2001 membedakan layanan telepon dasar dari layanan telepon bernilai tambah dan layanan multimedia, yang membutuhkan izin terpisah. Izin penyedia jaringan telekomunikasi diberikan kepada yang memiliki dan atau mengoperasikan jaringan telekomunikasi, sementara izin penyedia layanan telekomunikasi diberikan kepada layanan yang disediakan melalui kapasitas jaringan yang disewa dari penyedia jaringan. Izin telekomunikasi khusus yang terpisah dibutuhkan bagi penyedia layanan telekomunikasi pribadi yang berhubungan dengan penyiaran dan kepentingan keamanan nasional.

Munculnya Persaingan dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia

Pada tahun 1995, Telkom memperoleh hak monopoli untuk menyediakan layanan telekomunikasi lokal tidak bergerak yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2010, dan layanan SLJJ hingga tanggal 31 Desember 2005. Indosat dan Satelindo (yang kemudian melebur ke dalam Indosat) memperoleh hak duopoli untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional dasar hingga tahun 2004.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Telekomunikasi, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Telkom dan hak duopoli Indosat dan Satelindo. Pemerintah sebaliknya menerapkan kebijakan duopoli dengan memberlakukan persaingan antara Telkom dan Indosat sebagai penyelenggara layanan dan jaringan yang lengkap. Pasar bagi penyelenggaraan layanan SLI kemudian diliberalisasi pada bulan Agustus 2003 dengan penghapusan hak eksklusif Indosat dan Satelindo. Indosat memulai layanan telepon tidak bergerak pada tahun 2002 dan layanan nirkabel tidak bergerak dan layanan SLJJ pada tahun 2003 setelah memperoleh izin layanan SLJJ. Telkom memperoleh izin layanan SLI dan mulai menyediakan layanan SLI pada tahun 2004 sehingga menciptakan persaingan terbuka dengan Indosat.

Layanan SLJJ

Dalam rangka liberalisasi layanan SLJJ, Pemerintah mengubah Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional berdasarkan Keputusan Menkominfo No.6/P/M.KOMINFO/5/2005 tertanggal 17 Mei 2005 (Keputusan Menkominfo No.6/2005) yang memberikan kepada tiap penyelenggara layanan SLJJ suatu kode akses tiga angka yang memperbolehkan pelanggan memilih penyedia layanan SLJJ alternatif dengan cara memutar kode akses tiga angka. Keputusan Menkominfo No.6/2005 tidak mengharuskan adanya penerapan langsung kode akses tiga angka untuk panggilan SLJJ, namun sebagai penyedia layanan SLJJ pertama, Telkom harus secara bertahap membuka jaringan untuk kode akses tiga angka di seluruh wilayah berkode di Indonesia mulai tanggal 1 April 2010. Telkom diberikan kode akses SLJJ 017 sedangkan Indosat diberikan kode akses 011. Menkominfo kemudian mengubah kembali Rencana Telekomunikasi Nasional berdasarkan Keputusan Menkominfo No.43/P/M.KOMINFO/12/2007 tertanggal 3 Desember 2007 (Keputusan Menkominfo No. 43/2007) yang menunda penerapan akses tiga angka untuk panggilan SLJJ di seluruh wilayah berkode di Indonesia hingga tanggal 27 September 2011.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No.43/2007, Telkom diminta membuka jaringan bagi layanan akses tiga angka 01X di Balikpapan pada tanggal 3 April 2008, dan hal ini telah dilakukan oleh Telkom. Sejak tanggal 3 April 2008, para pelanggan dapat melakukan panggilan SLJJ dari Balikpapan dengan menggunakan kode Indosat "011" sebagai awalan.

Namun demikian, Telkom yakin bahwa Indosat tidak lagi menyediakan layanan tersebut di Balikpapan. Seperti disyaratkan dalam Keputusan Menkominfo No.43/2007, Telkom juga membuka jaringan ke seluruh Indonesia untuk penerapan kode akses tiga angka untuk panggilan SLJJ kabel tidak bergerak dan nirkabel tidak bergerak "01X" bagi Indosat dan operator berlisensi lainnya mulai tanggal 27 September 2011. Namun, hingga saat ini tidak ada operator telekomunikasi lain yang menyelenggarakan layanan akses SLJJ tiga angka pada jaringan Telkom. Jika operator lain menyelenggarakan layanan akses SLJJ tiga angka "01X", baik di seluruh Indonesia atau di sebagian wilayah Indonesia, pelanggan Telkom dapat memilih penyedia layanan SLJJ lainnya (jika tersedia di wilayah tersebut) dengan memutar nomor akses tiga angka yang dituju, dan sebaliknya.

Pada tanggal 16 Desember 2008, Menkominfo menerbitkan izin prinsip SLJJ kepada Bakrie Telecom sehingga meningkatkan jumlah operator SLJJ menjadi tiga. Hingga saat laporan ini dibuat/diterbitkan, Bakrie Telecom belum memperoleh izin penyelenggaraan SLJJ, yang mengharuskan Bakrie Telekom untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.

Tarif yang Telkom bebankan kepada pelanggan diatur dalam Peraturan Menkominfo No.PM.15/Per/M.KOMINFO/4/2008 tertanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Telepon Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap ("Peraturan Menkominfo No.15/2008"), yang menyatakan bahwa tarif yang akan dibebankan Telkom untuk layanan ini dibatasi berdasarkan rumusan biaya yang ditentukan dalam Peraturan Menkominfo No.15/2008. Ketentuan ini juga menyatakan bahwa struktur tarif terdiri dari biaya sambungan, biaya bulanan, biaya pemakaian dan biaya fasilitas tambahan. Kami juga diwajibkan oleh Peraturan Menkominfo No.15/2008 untuk melaporkan perhitungan biaya sesuai ketentuan tersebut kepada BRTI.

Layanan SLI

Telkom memperoleh izin penyelenggaraan SLI pada bulan Mei 2004 dan mulai menawarkan layanan SLI bagi pelanggan layanan telepon tidak bergerak dengan menggunakan kode akses "007" pada bulan Juni 2004. Sedangkan kode akses untuk pengguna layanan SLI Indosat adalah "001". Pada bulan Desember 2005, perjanjian interkoneksi dengan Indosat membuat pelanggan Indosat dapat mengakses layanan SLI Kami dengan memutar "007" dan pelanggan layanan Kami dapat mengakses layanan SLI Indosat dengan memutar "001".

Pada bulan September 2007, Menkominfo menerbitkan izin utama SLI kepada Bakrie Telecom, dengan kode akses internasional "009", yang meningkatkan jumlah operator SLI potensial menjadi tiga. Hingga saat laporan ini dibuat/diterbitkan, Bakrie Telecom belum memperoleh izin penyelenggaraan SLI, yang mengharuskan mereka menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.

Biaya interkoneksi dari penyedia jaringan internasional bagi penyedia jaringan lokal ditentukan oleh dokumen penawaran interkoneksi bagi penyedia jaringan lokal tidak bergerak. Tarif yang dibebankan Telkom kepada pelanggan untuk layanan SLI tidak bergerak diatur oleh Peraturan Menkominfo No.15/2008 sebagaimana halnya layanan SLJJ.

Layanan Nirkabel Tidak Bergerak

Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.35/2004 tertanggal 11 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (kemudian diubah dengan Keputusan Menkominfo No.16/PER/M.KOMINFO/06/2011 tertanggal 27 Juni 2011) ("Keputusan Menhub No.KM.35/2004") mengatur bahwa hanya operator jaringan tetap yang memiliki izin dari Kementerian Perhubungan dan menggunakan jaringan akses frekuensi radio yang dapat menawarkan layanan akses nirkabel tidak bergerak. Keputusan Menhub No. 35/2004 juga menyatakan bahwa tiap penyedia akses nirkabel tidak bergerak harus menyediakan layanan telepon dasar. Namun, penyedia akses nirkabel tidak bergerak hanya menyediakan layanan akses nirkabel tidak bergerak untuk nomor-nomor yang tercakup dalam kode area tertentu. Selain itu, layanan akses nirkabel tidak bergerak tidak dapat menyediakan fitur-fitur *roaming*. Melalui fitur migrasi otomatis, pelanggan dapat melakukan dan menerima panggilan pada perangkat telepon nirkabel tidak bergerak mereka dengan menggunakan nomor dan kode area yang berbeda.

Indosat, Bakrie Telecom dan Mobile-8 juga memiliki izin penyelenggaraan layanan nirkabel tidak bergerak.

Tarif yang diberlakukan Telkom kepada pelanggannya untuk layanan nirkabel tidak bergerak diatur oleh Peraturan Menkominfo No.15/2008 seperti halnya layanan SLJJ dan layanan SLI.

Seluler

Layanan telepon seluler di wilayah Indonesia dilakukan melalui spektrum frekuensi radio 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Menkominfo mengendalikan alokasi spektrum frekuensi radio untuk spektrum 2,1 GHz sejalan dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/1/2006, tanggal 13 Januari 2006, mengenai Penyeleksian IMT-2000 Operator Jaringan Seluler *Mobile* untuk Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz. Peraturan ini memungkinkan pengalokasian spektrum frekuensi itu melalui tender terbuka bagi peserta tender yang memenuhi syarat.

Tarif yang Telkomsel bebankan kepada pelanggan seluler diatur oleh Peraturan Menkominfo No.09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tertanggal 7 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Pungut Layanan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Seluler Bergerak (Peraturan Menkominfo No.9/2008), yang menyediakan panduan untuk penetapan

tarif seluler berdasarkan biaya elemen jaringan dan aktivitas layanan ritel ditambah marjin biaya. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No.9/2008, tarif yang dibebankan Telkom kepada pelanggan seluler terdiri dari tarif layanan dasar, tarif *roaming* dan tarif multimedia. Tiap bagian tarif dibagi menjadi biaya koneksi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan biaya fasilitas tambahan.

Interkoneksi

Sejalan dengan larangan dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengenai kegiatan yang dapat mengarah pada praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak adil, Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan penyedia jaringan untuk mengizinkan pengguna dalam satu jaringan untuk mengakses pengguna atau layanan di jaringan lainnya dengan membayar biaya yang disepakati oleh tiap operator jaringan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.52/2000 tertanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan pengenaan biaya interkoneksi antara dua operator jaringan atau lebih harus transparan, adil dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 8 Februari 2006, Menkominfo menerbitkan Peraturan No.8/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi ("Peraturan Menkominfo No.8/2006"), yang mengatur penerapan skema tarif interkoneksi berbasis biaya bagi seluruh operator layanan dan jaringan telekomunikasi sebagai ganti dari skema pembagian pendapatan. Dengan skema baru tersebut operator jaringan panggilan berakhir akan menentukan biaya interkoneksi berdasarkan rumusan tarif pada biaya inkremen jangka panjang. Peraturan Menkominfo No.8/2006 mencakup metode penentuan biaya inkremen jangka panjang. Menkominfo meminta data Telkom untuk digunakan sebagai model dalam penentuan biaya jaringan tidak bergerak, sementara data Telkomsel digunakan dalam penentuan biaya jaringan seluler.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menkominfo No.8/2006 operator harus memasukkan proposal Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) kepada BRTI yang berisi pengajuan tarif interkoneksi untuk tahun berikutnya. Operator wajib menggunakan metode berbasis biaya dalam menyiapkan proposal DPI, BRTI dan Menkominfo wajib menggunakan metode yang sama dalam mengevaluasi DPI dan menyetujui tarif interkoneksi. Proposal DPI juga mencantumkan skenario panggilan, *traffic routing*, titik interkoneksi, prosedur untuk meminta dan menyediakan layanan interkoneksi, serta hal lainnya. DPI juga harus mengungkapkan jenis layanan interkoneksi yang ditawarkan beserta tarif yang dibebankan pada tiap layanan yang ditawarkan. Penyedia akses interkoneksi harus menerapkan sistem antrian berdasarkan pada pemberian layanan bagi pelanggan pertama yang datang. Selain itu, mekanisme interkoneksi juga harus transparan dan tanpa diskriminasi.

Terkait dengan Peraturan Menkominfo No.8/2006 dan Surat BRTI No.246/BRTI/VIII/2007 tertanggal 6 Agustus 2007, Telkom mengajukan proposal DPI pada bulan Oktober 2007, yang meliputi penyesuaian atas penyelenggaraan, konfigurasi, teknis dan layanan yang ditawarkan. Pada bulan Desember 2007, seluruh operator jaringan termasuk Telkom menandatangani perjanjian interkoneksi baru untuk menggantikan seluruh perjanjian interkoneksi antara operator jaringan, termasuk perubahan atas seluruh perjanjian interkoneksi yang ditandatangani pada bulan Desember 2006. Perjanjian ini sementara disampaikan dalam DPI, sementara BRTI melanjutkan penelaahan atas proposal DPI yang diterima dari Telkom dan operator lainnya.

Pada tanggal 5 Februari 2008, BRTI meminta Telkom dan operator lainnya untuk mulai menerapkan tarif interkoneksi berbasis biaya. Pada tanggal 11 April 2008, sesuai dengan Keputusan Dirjen Postel No.205/2008, BRTI dan Menkominfo menyetujui DPI dari operator dominan (operator yang mengendalikan lebih dari 25% pangsa pasar), termasuk Telkomsel dan Telkom, untuk menggantikan perjanjian interkoneksi sebelumnya. DPI yang disetujui pada tahun 2008 berlaku hingga tanggal 1 Januari 2011 (atau tanggal 1 Juli 2011 dalam kasus telepon nirkabel tidak bergerak), ketika BRTI menyetujui DPI baru yang akan berlaku kemudian. Dalam menentukan besaran interkoneksi berdasarkan DPI saat ini, data Telkom menjadi model dalam menentukan biaya jaringan tidak bergerak, sementara data Telkomsel digunakan untuk menentukan biaya jaringan seluler, serta data Indosat sebagai pembanding untuk biaya jaringan seluler. Dalam DPI saat ini, besaran interkoneksi yang berbeda pertama kali berlaku untuk interkoneksi jaringan nirkabel tidak bergerak dan jaringan kabel tidak bergerak. DPI yang berlaku juga menurunkan besaran interkoneksi yang ditawarkan rata-rata antara 1,5% hingga 3,0%. Telkom mengharapkan DPI saat ini diberlakukan selama satu hingga dua tahun.

VoIP

Pada bulan Januari 2007, Pemerintah memberlakukan peraturan interkoneksi baru serta sistem kode akses lima angka untuk layanan VoIP berdasarkan Keputusan Menkominfo No.06/P/M.KOMINFO/5/2005. Berdasarkan keputusan ini, kode/nomor awal untuk VoIP, yang sebelumnya 01X, berubah menjadi 010XY. Pada tanggal 27 April 2011, Menkominfo menerbitkan Permen No.14/PER/M.KOMINFO/04/2011, yang menekankan standar kualitas, dan berlaku efektif tiga bulan kemudian, yang mengharuskan Kami dan operator lainnya mematuhi peraturan tersebut dalam melayani layanan VoIP.

IPTV

Pada bulan Agustus 2009, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No.30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan IPTV di Indonesia, yang mengatur rencana bisnis IPTV Telkom, yaitu layanan TV berbasis langganan yang disalurkan melalui jaringan protokol internet. Menkominfo memperbaiki dan mengubah peraturan ini pada bulan Juli 2010 melalui Peraturan Menkominfo No.11/PER/M.KOMINFO/07/2010. Peraturan Menkominfo No.11/2010 menegaskan IPTV dapat ditayangkan melalui perangkat televisi dan alat telekomunikasi lainnya, sementara Keputusan Menkominfo No.30/2009 hanya mencakup perangkat televisi.

Peraturan Menkominfo No.11/2010 menyatakan bahwa IPTV adalah bentuk konvergensi dari telekomunikasi, penyiaran, multimedia dan transaksi elektronik. Peraturan Menkominfo No.11/2010 menjadi dasar hukum bagi pemberian izin dan penyediaan layanan IPTV, dan termasuk diantaranya mengenai hak dan kewajiban, nama, kepemilikan asing serta penggunaan penyedia konten dalam negeri, termasuk hal lainnya.

Hanya konsorsium yang terdiri dari setidaknya dua entitas bisnis Indonesia dapat memperoleh izin sebagai penyedia IPTV. Tiap anggota konsorsium, setidaknya harus memiliki satu izin sebagai penyedia jaringan tidak bergerak lokal, salah satu sebagai penyedia layanan internet, dan yang satu sebagai penyelenggara layanan penyiaran berbayar. Konsorsium dapat menyediakan layanan IPTV hanya pada area cakupan dimana konsorsium memiliki ketiga izin yang disyaratkan. Peraturan Menkominfo No.11/2010 juga mensyaratkan bahwa layanan IPTV disalurkan melalui jaringan kabel.

Telkom memperoleh izin IPTV dalam konsorsium bersama Indonusa ("TelkomVision") pada tanggal 27 April 2011 dan izin penyelenggaraan meliputi wilayah JABODETABEK, Surabaya, Bali dan Semarang.

Satelit

Industri satelit internasional sangat diatur keberadaannya. domestik di Indonesia, seperti peraturan penggunaan slot orbit dan frekuensi radio, penempatan dan pengoperasian satelit Telkom juga menjadi subyek dari pendaftaran ke Badan Komunikasi Radio dari Persatuan Telekomunikasi Internasional.

Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, tiap operator harus mampu menjamin perlindungan konsumen terkait dengan kualitas layanan, biaya penggunaan atau layanan, kompensasi serta hal-hal lainnya. Konsumen yang dirugikan oleh penyelenggaraan yang ceroboh dapat mengajukan klaim kepada penyedia layanan tersebut. Peraturan perlindungan konsumen telekomunikasi menyediakan standar layanan bagi operator telekomunikasi.

Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")

Seluruh operator jaringan telekomunikasi dan penyedia layanan terikat oleh KPU yang mensyaratkan mereka untuk berkontribusi menyediakan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi universal, yang pada umumnya dilakukan melalui kontribusi secara finansial. Peraturan Menkominfo No.32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tertanggal 10 Oktober 2008 mengenai KPU (diubah dengan Peraturan Menkominfo No.03/2010 tertanggal 1 Februari 2010) ("Peraturan Menkominfo No.32/2008") menyebutkan dana KPU yang diterima akan digunakan untuk membiayai layanan telepon, SMS dan akses internet di wilayah terpencil dan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang tidak ekonomis dalam penyediaan layanan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menkominfo No.21/PER/M.KOMINFO/20/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 tentang Dana Informasi dan Teknologi Komunikasi, dana yang dikenal dengan Dana Informasi dan Teknologi Komunikasi akan bersumber dari dana KPU dan digunakan untuk mendukung pendanaan bagi penyediaan jaringan serat optik, layanan akses internet Wi-Fi umum, layanan pusat pengamanan data dan pengembangan industri informasi dan teknologi komunikasi dalam negeri.

Pembayaran KPU yang disyaratkan dihitung dari pendapatan kotor non konsolidasi Telkom dan Telkomsel dikurangi piutang tak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi (misalnya beban biaya piutang tak tertagih) dan pembayaran yang diterima dari biaya interkoneksi yang merupakan milik pihak lain. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7/2009 tertanggal 16 Januari 2009 mengenai Tarif untuk penerimaan negara bukan pajak yang berlaku untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP No.7/2009), tarif KPU yang berlaku adalah 1,25% dari pendapatan kotor. Telkom membayar nilai KPU sebesar Rp835 miliar pada tahun 2010 dan Rp879 miliar pada tahun 2011.

Peraturan Menkominfo No.32/2008 juga menyatakan hak untuk menyediakan layanan KPU akan ditawarkan kepada penyedia layanan dengan biaya terendah. Sebagai contoh, Peraturan Menkominfo No.48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tertanggal 23 November 2009 (diubah dengan Peraturan Menkominfo No.19/PER/M.KOMINFO/12/2010 tertanggal 13 Desember 2010), berisi 11 tender yang akan menggunakan dana KPU bagi pendirian Pusat Layanan Internet di ibu kota kecamatan dengan lokasi antara wilayah layanan yang ditenderkan.

Beban Regulator Telekomunikasi

Pada tanggal 16 Januari 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.7/2009, yang mengatur jenis dari penerimaan negara bukan pajak yang berlaku untuk Menkominfo yang berasal dari berbagai layanan, termasuk telekomunikasi.

Kami berkewajiban membayar biaya hak penggunaan terkait dengan stasiun radio yang digunakan dalam jaringan Telkom serta spektrum frekuensi radio yang dalam kontrol Telkom. Biaya perizinan untuk stasiun radio dibayarkan secara tahunan berdasarkan rumusan yang memperhitungkan dasar biaya untuk spektrum frekuensi radio dan kapasitas transmisi, yang disesuaikan dengan indeks biaya yang diatur oleh Menkominfo setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Biaya perizinan untuk spektrum frekuensi radio ditentukan berdasarkan tender dan terdiri dari biaya di muka dan iuran tahunan.

Pada tanggal 13 Desember 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.76/2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah No.7/2009. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.76/2010, Kami tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar biaya atas hak penggunaan yang dihitung berdasarkan stasiun radio yang Kami dirikan di jaringan Kami, kecuali stasiun radio yang didirikan di *backbone* Kami, terhitung sejak 15 Desember 2010. Akibatnya, biaya atas hak penggunaan Kami dihitung berdasarkan *bandwith spectrum* frekuensi radio yang Kami gunakan.

Selain biaya atas hak penggunaan *spectrum* frekuensi radio, Peraturan Pemerintah No.7/2009 mewajibkan seluruh operator telekomunikasi untuk membayar biaya izin konsesi tahunan, yang dapat dibayarkan secara kuartalan, sebesar 0,5% dari pendapatan kotor non-konsolidasi dikurangi piutang tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi (misalnya beban biaya piutang tak tertagih) dan pembayaran yang diterima dari biaya interkoneksi yang dimiliki pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang No.28/2009), pemerintah daerah diberikan izin untuk mengenakan retribusi atas tanah yang Kami gunakan sebagai menara telekomunikasi per tanggal 15 September 2011. Retribusi ini tidak lebih dari 2% nilai jual objek pajak. Pemerintah daerah saat ini mengenakan retribusi pada (keseluruhan) dari sekitar 500 wilayah hukum dimana menara telekomunikasi Kami berada. Kami mengantisipasi jumlah peraturan daerah yang mengenakan biaya ini akan meningkat ke depannya.

Menara Telekomunikasi

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No.02/PEER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama (Keputusan Menara). Sesuai Keputusan Menara tersebut, pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan izin dari lembaga pemerintah terkait, sedangkan pemerintah daerah menentukan penempatan dan lokasi

pendirian menara telekomunikasi tersebut. Selain itu, penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki menara telekomunikasi dan pemilik menara lainnya harus memberikan izin kepada operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasi mereka (namun bukan menara yang dipergunakan sebagai jaringan utamanya), tanpa diskriminasi.

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2009, beberapa menteri menerbitkan peraturan bersama dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18/2009, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2009, Peraturan Menkominfo No.19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3/P/2009 mengenai pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi ("Peraturan Bersama").

Peraturan Bersama itu mengizinkan bupati yang mengepalai pemerintahan lokal di Indonesia, atau gubernur, khususnya Provinsi DKI Jakarta, serta memberi wewenang untuk memberikan izin pembangunan menara telekomunikasi. Peraturan bersama itu juga memuat standar pembangunan dan mensyaratkan agar menara telekomunikasi dibangun untuk dapat digunakan bersama oleh para penyedia layanan telekomunikasi. Pemilik menara telekomunikasi diizinkan untuk mengenakan biaya tertentu, yang dinegosiasikan dengan merujuk pada biaya terkait dengan biaya investasi dan operasional, pengembalian investasi dan keuntungan. Tidak diperbolehkan adanya praktik monopoli terkait kepemilikan dan pengelolaan menara telekomunikasi.

Di samping peraturan bersama dan keputusan menara, beberapa otoritas daerah telah menerapkan peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi serta mewajibkan operator untuk berbagi dalam hal penggunaan menara telekomunikasinya.

PERSAINGAN

Langkah-langkah yang diambil pasca adopsi Undang-Undang Telekomunikasi di tahun 2001 mengubah sektor telekomunikasi Indonesia dari duopoli antara Indosat dan Kami menjadi beberapa penyedia layanan telekomunikasi. Lihat "Peraturan-Munculnya Persaingan dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia".

UU Persaingan

Pemerintah saat ini berkampanye mengenai liberalisasi persaingan dan transparansi di sektor telekomunikasi, walaupun Pemerintah tidak berupaya mencegah para operator untuk memperoleh dan meningkatkan dominasinya di pasar. Pemerintah sebaliknya melarang para operator untuk menyalahgunakan posisi dominannya tersebut. Pada bulan Maret 2004. Menteri Perhubungan menerbitkan keputusan No.33/2004, yang berisi larangan untuk melakukan penyalahgunaan oleh para penyedia layanan dan jaringan yang memiliki posisi dominan. Sebuah penyedia dinilai memiliki posisi dominan berdasarkan faktor seperti cakupan bisnis, jangkauan wilayah layanan, dan mengendalikan pasar tertentu. Secara khusus, keputusan No.33/2004 melarang *dumping,* penetapan harga yang merugikan, subsidi silang, menggunakan layanan penyelenggara tertentu (kecuali para pesaing) dan menghambat interkoneksi wajib (termasuk diskriminasi terhadap penyelenggara tertentu).

Persaingan di sektor telekomunikasi, sebagaimana seluruh sektor usaha di Indonesia, diatur secara lebih umum dalam UU No.5/1999 tanggal 5 Maret 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat ("UU Anti Monopoli"). UU Anti Monopoli melarang perjanjian dan kegiatan yang mengarah pada persaingan bisnis tidak sehat, serta penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Anti Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") dibentuk dengan fungsi sebagai pengawas anti monopoli di Indonesia yang berwenang untuk menerapkan ketentuan UU Anti Monopoli.

UU Anti Monopoli diterapkan bersama peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah No.57/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengenai Merger dan Akuisisi yang dapat Mengarah pada Praktik-Praktik Monopoli atau Praktik Bisnis yang Tidak Sehat. Peraturan Pemerintah No.57/2010 memperbolehkan konsultasi secara sukarela dengan KPPU sebelum dilakukannya sebuah aksi merger atau akuisisi, yang mengakibatkan KPPU mengeluarkan pendapat yang tidak mengikat. Peraturan Pemerintah No.57/2010 juga mewajibkan penyerahan laporan kepada KPPU setelah sebuah merger atau akuisisi diselesaikan jika transaksi melebihi batas nilai aset atau penjualan.

Telepon Kabel Tidak Bergerak, Telepon Nirkabel Tidak Bergerak dan SLJJ

Hak eksklusif Kami untuk menyediakan layanan telekomunikasi kabel tidak bergerak untuk jangkauan domestik di Indonesia berakhir setelah diterapkannya UU Telekomunikasi pada tahun 2001. Menteri Perhubungan menerbitkan lisensi kepada Indosat untuk melayani telepon kabel tidak bergerak untuk jangkauan domestik pada bulan Agustus 2002 dan untuk SLJJ pada bulan Mei 2004. Kami membuat kesepakatan interkoneksi dengan Indosat pada tanggal 23 September 2005 yang memungkinkan interkoneksi antara layanan telepon kabel tidak bergerak di Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Balikpapan, Denpasar dan wilayah tertentu lainnya. Pada tahun 2006, Indosat dapat melayani SLJJ ke seluruh penjuru Tanah Air melalui jaringan nirkabel tidak bergerak berbasis CDMA, jaringan telepon tidak bergerak dan kesepakatan interkoneksi dengan Kami.

Dalam upaya meliberalisasi SLJJ, Pemerintah mewajibkan tiap penyedia SLJJ untuk menerapkan kode akses tiga angka yang dapat diputar oleh pelanggan yang melakukan panggilan SLJJ. Peraturan ini pertama kali diterapkan di Balikpapan pada tahun 2008, di mana penduduk Balikpapan diberi pilihan untuk melakukan panggilan SLJJ secara normal atau untuk memilih kode akses tiga angka yang diberikan kepada Indosat atau kepada Kami. Dengan peraturan yang berlaku saat ini, sistem ini akan diterapkan secara nasional mulai tanggal 27 September 2011. Lihat "Peraturan Munculnya Persaingan dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia".

Indosat tetap merupakan pesaing terbesar Kami dalam melayani telepon kabel tidak bergerak dan SLJJ dan Kami juga bersaing dengan penyedia layanan telepon kabel tidak bergerak lain seperti PT Bakrie Telecom (sebelumnya Ratelindo) dan PT Batam Bintan Telecom. Layanan telepon kabel tidak bergerak yang sudah sejak lama Kami layani, akan tetapi mengalami dan terus menghadapi persaingan dari layanan seluler, terutama dengan menurunnya tarif untuk layanan ini, dan dari layanan alternatif lainnya seperti layanan telepon nirkabel tidak bergerak, layanan SMS, VoIP dan layanan e-mail.

Telkom Flexi, layanan sambungan telepon nirkabel tetap Kami, adalah jaringan akses nirkabel terbesar di Indonesia dengan cakupan 370 kota dan menawarkan mobilitas terbatas dan membebankan pelanggan dengan dasar tarif PSTN yang secara umum lebih rendah dari tarif seluler. Sebagai perbandingan Indosat meluncurkan layanan CDMA dengan nama "StarOne" di Surabaya dan Jakarta pada tahun 2004. Bakrie Telecom menawarkan layanan sambungan telepon nirkabel tidak bergerak di lebih dari 30 kota dan Mobile-8 diberikan lisensi sambungan telepon nirkabel tidak bergerak secara nasional pada tahun 2009, yang meningkatkan persaingan pada sektor sambungan telepon kabel tidak bergerak. Secara umum, teknologi yang digunakan oleh CDMA dan operator sambungan telepon nirkabel tidak bergerak lebih murah, dan membuat operator dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dibanding operator GSM. Selain itu, biaya pengguna frekuensi untuk sambungan telepon nirkabel tidak bergerak untuk lisensi stasiun radio lebih rendah dari seluler.

Seluler

Kami mengoperasikan bisnis layanan seluler melalui Anak Perusahaan Kami dengan kepemilikan saham mayoritas, Telkomsel. Per tanggal 31 Desember 2011, pasar seluler Indonesia didominasi oleh Telkomsel, Indosat dan XL Axiata, yang secara gabungan menguasai 82.3% dari pasar seluler bergerak. Para penyedia layanan lainnya adalah Hutchinson, Natrindo, Smart Telecom dan Bakrie Telecom.

Per tanggal 31 Desember 2011, terdapat 249,4 juta pelanggan seluler bergerak di Indonesia, meningkat sebesar 21,1% dari sekitar 205,8 juta yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2010. Meskipun mencatat pertumbuhan, penetrasi seluler di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, yang mencapai rata-rata 105,0% pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasar seluler ini menghadapi peningkatan persaingan selama pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Para penyedia layanan seluler di Indonesia secara historis bersaing di sisi harga, merek, jangkauan jaringan, kualitas jaringan, dan layanan bernilai tambah termasuk layanan data. Pada tahun 2007 dan 2008, sebagai akibat perubahan dari pola bagi hasil kepada tarif interkoneksi berbasis biaya, sebagian besar penyedia termasuk Kami sendiri terus bersaing di sisi harga dan potongan harga promosi guna menarik jumlah pelanggan yang besar. Berdasarkan riset oleh A.T. Kearney pada tahun 2009, angka pemutusan di Indonesia, rasio pelanggan yang berpindah kepada penyedia layanan seluler lainnya, merupakan salah satu yang tertinggi di dunia yaitu rata-rata 11% per bulan. Baik pelanggan seluler prabayar dan pasca bayar di Indonesia sangat sensitif terhadap harga, dan yang terakhir menikmati biaya perubahan yang lebih rendah terkait dengan penutupan kontrak yang terbatas. Penurunan harga berakibat pada peningkatan jumlah pelanggan dan trafik jaringan, yang berujung pada meningkatnya kepadatan jaringan di antara para operator.

Kami menilai Telkomsel bersaing secara efektif di pasar seluler Indonesia di sisi harga, jangkauan, kualitas layanan, dan layanan bernilai tambah. Per tanggal 31 Desember 2011, Telkomsel tetap menjadi penyedia layanan seluler terbesar di Indonesia, yang melayani sekitar 107,0 juta pelanggan dan menguasai pangsa pasar 42,9% dari pasar seluler bergerak. Di urutan kedua dan ketiga, terdapat Indosat dan XL Axiata, dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 20,7% dan 18,6%, berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan yang dilayani per tanggal 31 Desember 2011. Selain operator GSM yang beroperasi secara nasional, sejumlah penyelenggara GSM dengan cakupan wilayah lebih kecil, layanan analog, dan telepon nirkabel tidak bergerak, juga beroperasi di Indonesia.

Tabel berikut memuat rangkuman informasi per tanggal 31 Desember 2011 mengenai tiga penyedia utama telepon seluler GSM berlisensi nasional:

	Operator		
	Telkomsel	Indosat	XL Axiata
Tanggal Peluncuran	Mei 1995	November 1994(2)	Oktober 1996
Frekuensi berlisensi 2G (GSM 900 dan 1800)	30 MHz	30 MHz	15 MHz
Frekuensi berlisensi 3G (2,1 GHz)	10 MHz	10 MHz	5 MHz
Pangsa pasar(1)	42,9%	20,7%	18,6%
Pelanggan(1)	107,0 juta	51,7 juta	46,4 juta

(1) Perkiraan tertanggal 31 Desember 2011 berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh Telkom.
(2) Pada bulan November 2003, Indosat dan Satelindo dimerger dan Indosat telah mengambil alih operasi seluler Satelindo.

Hutchison dan Natrindo juga menyediakan layanan seluler di Indonesia dan pada tahun 2011 telah mendapatkan tambahan 5 MHz dari spektrum frekuensi berlisensi 3G (2,1 GHz). Spektrum tambahan ini menaikkan spektrum frekuensi menjadi masing-masing 10 MHz. Kami mengantisipasi kompetisi dengan Indosat dan XL Axiata untuk mendapat tambahan dua blok 5 MHz frekuensi berlisensi 3G (2,1 GHz) yang Kami perkirakan akan dialokasikan Pemerintah pada tahun 2012.

Pada bulan Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan kesepakatan kerja sama mereka dalam penggunaan logo yang sama dan merek "smartfren". Penyedia layanan seluler lainnya berpeluang melakukan kerjasama serupa di masa mendatang.

Pada bulan Januari 2012, Bakrie Telecom mendapat alokasi nomor akses telepon seluler dan akan segera mendapatkan izin usaha dalam waktu dekat. Kami memahami Bakrie Telecom, yang fokus pada layanan jaringan bergerak tetap, akan meluncurkan teknologi yang mengubah dari akses telepon bergerak tetap menjadi akses seluler di luar wilayah basis layanan. Kami melihat bahwa bisnis telepon seluler Kami ke depannya akan menghadapi persaingan ketat dari penyedia layanan telepon bergerak tetap dan layanan telepon bergerak berbasis *broadband* yang menawarkan mobilitas serupa dalam daftar layanannya.

Sambungan Langsung Internasional ("SLI")

Kami memperoleh lisensi SLI komersial pada bulan Mei 2004 dan pada bulan Juni 2004 Kami mulai melayani SLI secara penuh bagi pelanggan telepon kabel tidak bergerak. Kami memperoleh lisensi tersebut setelah penghapusan hak eksklusif Indosat atas pengoperasian layanan SLI pada bulan Agustus 2001 oleh Ditjen Postel.

Kami melakukan persiapan menyeluruh untuk dapat menawarkan layanan SLI sebelum diperolehnya lisensi itu pada tahun 2004. Persiapan awal Kami termasuk meningkatkan fasilitas *switching* untuk membangun kemampuan *International Gateway* di Batam, Jakarta dan Surabaya. Dua penghubung *microwave*, yang menghubungkan Batam-Singapura dan Batam-Pangerang (Malaysia), dibangun untuk memfasilitasi koneksi dengan operator luar negeri. Pada tahun 2003, bersama dengan Singtel Mobile dan CAT, Kami membangun sistem kabel bawah laut TIS untuk menghubungkan Batam, Singapura dan Thailand. Kami menyelesaikan pengembangan kabel optik bawah laut untuk menghubungkan Dumai (Indonesia) dengan Melaka (Malaysia) pada bulan Desember 2004, merujuk pada perjanjian dengan Telekom Malaysia Berhad. Kabel internasional Kami diperpanjang dengan membeli kapasitas *bandwidth* untuk menghubungkan Hong Kong, Amerika Serikat dan negara lainnya. Pada bulan Desember 2004, Kami menyelesaikan bagian dasar untuk menghubungkan dengan Satelit Intelsat. Jaringan BSCS (*Batam Singapore Cable System*) mulai beroperasi pada bulan Mei 2009, sementara jaringan AAG mulai beroperasi pada bulan Oktober 2009. Pada tanggal 25 Januari 2008, Telkom mengalihkan kegiatan operasi internasionalnya, termasuk SLI, kepada salah satu Anak Perusahaan Kami, Telin.

Setelah Telkomsel, basis pelanggan konsumen terbesar dalam layanan SLI adalah pengguna layanan dari operator XL Axiata. Kami mengantisipasi XL Axiata dan perusahaan telekomunikasi lainnya, Axis, akan mendapat izin untuk mengoperasikan SLI sendiri pada tahun 2012, yang tentunya dapat berdampak material pada pendapatan Kami dari layanan SLI.

Bisnis layanan SLI menghadapi persaingan ketat dari alat komunikasi jarak jauh alternatif, terutama VoIP.

Voice over Internet Protocol ("VoIP")

Kami secara resmi meluncurkan layanan VoIP pada bulan September 2002. VoIP menggunakan komunikasi data untuk mengalihkan trafik suara ke internet, yang umumnya menawarkan penghematan biaya yang sangat besar kepada pelanggan. Sejumlah perusahaan, antara lain: XL Axiata, Indosat, Atlasat, Gaharu, PT Satria Widya Prima, Primedia Armoekadata dan Jasnita Telekomindo juga menyediakan layanan VoIP berlisensi di Indonesia. Operator yang tidak berlisensi lainnya juga melayani VoIP

yang dapat diakses melalui situs atau melalui piranti lunak yang memungkinkan komunikasi suara dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jalur internet.

Operator VoIP bersaing terutama berdasarkan harga dan kualitas layanan. Operator VoIP, termasuk Kami, telah mulai menawarkan *budget call* dan produk lainnya yang ditujukan untuk pengguna yang sensitif terhadap harga seperti kartu panggil prabayar, yang diharapkan dapat menghasilkan persaingan lebih besar di antara operator VoIP dan penyedia layanan SLI. Saat ini Kami menawarkan layanan utama VoIP TelkomGlobal-01017 dan alternatif yang lebih rendah-biaya TelkomSave. TelkomSave menawarkan potongan harga untuk negara-negara tertentu yang memiliki trafik dari Indonesia yang terbesar sementara menawarkan tarif reguler VoIP untuk negara-negara lain. Kami menawarkan layanan bersaing yang disebut TelkomGlobal 01017.

Satelit

Persaingan bisnis satelit di kawasan Asia-Pasifik terus menunjukkan peningkatan, terutama dalam hal jangkauan, produk dan harga. Pemerintah Indonesia tidak mengatur secara ketat industri satelit di Tanah Air sehingga dalam prakteknya, industri ini beroperasi sesuai dengan kebijakan "*open-sky*" yang membuka peluang persaingan besar antara operator satelit Indonesia dengan operator satelit asing.

Kawasan Asia-Pasifik masih membutuhkan satelit untuk infrastruktur baik telekomunikasi maupun infrastruktur penyiaran *(broadcasting)*. Ini dibuktikan dengan beberapa faktor yaitu:

- Banyaknya operator regional maupun global yang mengarahkan operasi layanan satelitnya untuk kawasan Asia-Pasifik;
- Tingginya permintaan pasar untuk *trunking* GSM;
- Masih bertumbuhnya pasar *Direct To Home* ("DTH"); dan
- Satelit sebagai solusi pemulihan pada saat bencana alam *(disaster recovery)*.

Saat ini operator satelit baik regional maupun global di kawasan Asia – Pasifik adalah:

- Intelsat/PanAmsat (USA)
- SES Global (Luxembourg)/SES New Skies (Netherlands)
- Telesat (Canada)/Loral Skynet (USA)
- RSCC (Russia)
- Eutelsat (France) *APT Satellite (Hong Kong)*
- AsiaSat (Hong Kong)
- SCC (Japan)
- JSAT (Japan)
- MEASAT (Malaysia)
- Insat (India)
- MCI – Media Citra Indostar (Indonesia)
- Indosat (Indonesia)
- VinaSat (Vietnam)
- SingTel/Optus (Singapore)
- Telkom (Indonesia)
- ChinaSat (China)
- SinoSat (China)
- KoreaSat (Korea)
- Mabuhay (Philippines)
- Thaicom (Thailand)
- ABS (Hong Kong)
- ProtoStar (Singapore)

Sedangkan operator Mobile Satellite Service (MSS) yaitu:

- Inmarsat (UK)
- Aces – Asia Cellular Satellite (Indonesia)
- Thuraya Satellite (UAE)
- Iridium (USA)
- Globalstar (USA)
- MBCO (Japan)
- Tu Media (Korea)
- CMBSAT (China)

Operator satelit global dengan kapasitas yang lebih besar dapat memanfaatkan kelebihan skala ekonominya tersebut untuk dapat memberikan harga yang lebih murah tanpa mempengaruhi kinerja keuangan operator tersebut. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya subsidi dari pasar premium terhadap pasar yang sangat kompetitif. Namun operator nasional dapat meminta perlindungan *entry barrier* melalui regulasi seperti hak labuh yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap satelit asing.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru mengenai penyelenggaraan satelit yaitu Peraturan Menteri No.37/P/M.KOMINFO/12/2006 tanggal 6 Desember 2006 dimana operator satelit asing harus memiliki izin hak labuh dengan kriteria sebagai berikut:

- Operator satelit asing harus melakukan koordinasi dengan operator satelit domestik sehingga tidak mengganggu sistem satelit dan sistem terestrial milik Indonesia; dan
- Negara yang mengoperasikan satelitnya di Indonesia harus memberikan kesempatan kepada operator satelit Indonesia untuk beroperasi di negaranya.

Pada umumnya, biaya jasa penyedia layanan bergantung pada tenaga dan jangkauan. Penyelenggaraan satelit Kami pada intinya terdiri dari menyewakan transponder kepada penyiar *(broadcaster)* dan operator telekomunikasi seperti VSAT, seluler dan layanan SLI, ISP dan menyediakan jasa *uplinking* dan *downlinking* satelit stasiun bumi kepada pengguna domestik dan internasional. Kami menghadapi persaingan dari penyedia jasa asing dan domestik dan bersaing ketat di Indonesia dengan Indosat dan Pasifik

Satelit Nusantara ("PSN"). Satelit yang dioperasikan swasta dan melayani pasar penyiaran di wilayah yang dijangkau satelit Telkom-1 dan Telkom-2 termasuk AsiaSat-2, AsiaSat-4, AsiaSat-3S, Apstar-2R, Apstar-5, Apstar-6, ThaiCom-3, Measat-2, Measat-3, Measat-3a, PanAmSat-4 dan PanAmSat-7. Measat Sdn. Bhd, penyelenggara satelit Measat, APT Satellite penyelenggara satelit Apstar, dan Shin Satellite PCL, penyelenggara satelit ThaiCom, juga bersaing secara langsung dengan Kami di wilayah Asia.

Selain itu, dengan bertambahnya popularitas televisi DTH, menyebabkan peningkatan persaingan dalam bisnis satelit karena bertambahnya penyelenggaraan satelit regional baru yang lebih kuat. DTH adalah penerimaan program-program satelit dengan pilihan tersendiri di setiap rumah. Penyiar nasional mulai berusaha mendapatkan lisensi DTH agar dapat menyediakan jasa penyiaran nasional di Indonesia. Televisi DTH akan membuat penyiar dapat menyalurkan program mereka tanpa mempergunakan jaringan telekomunikasi Kami, atau dengan kata lain tidak melewati jasa telekomunikasi Kami sama sekali. Dengan bertambahnya popularitas DTH, Kami berhadapan dengan kemungkinan berkurangnya jumlah pelanggan karena DTH mempergunakan platform satelit yang tidak Kami sediakan.

Base Transceiver Stations ("BTS")

Kami mengoperasikan 48.341 BTS, menara, di seluruh Indonesia. Melalui Anak Perusahaan Kami, PT Dayamitra Telekomunikasi, Kami menyewakan ruang kepada operator lain untuk menempatkan peralatan telekomunikasinya pada menara-menara tersebut, yang tentunya akan memberikan pendapatan sewa kepada Kami. Pesaing utama Kami dalam bisnis ini adalah XL Axiata, Indosat, Bakrie Telecom dan PT Tower Bersama.

Lain-lain

Deregulasi di sektor telekomunikasi Indonesia telah membuka peluang persaingan yang berkenaan dengan bisnis multimedia, internet, dan layanan yang terkait dengan komunikasi data. Ragam bisnis ini mencapai momentumnya saat ini sehingga memunculkan persaingan yang sangat ketat. Persaingan layanan multimedia, internet dan komunikasi data di Indonesia terletak dalam hal harga, rentang layanan yang disediakan, kualitas maupun jangkauan jaringan, serta kualitas layanan kepada pelanggan.

PERIZINAN

Dalam menyelenggarakan layanan telekomunikasi secara nasional, Telkom memiliki sejumlah izin atas beberapa produk dan layanannya sesuai dengan undang-undang, peraturan atau keputusan yang berlaku.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tertanggal 25 Januari 2010 mengenai Ketentuan Jaringan Telekomunikasi, Telkom diwajibkan untuk menyesuaikan lisensi yang dimilikinya agar dapat menjalankan layanan telekomunikasi sesuai peraturan Menkominfo khususnya yang berhubungan dengan layanan jaringan telekomunikasi. Baru-baru ini Telkom telah memiliki lisensi baru yang telah disesuaikan dengan yang diisyaratkan sebagai berikut:

Jaringan Tetap dan Layanan Telepon Dasar

Berdasarkan penyampaian laporan tersebut di atas oleh Telkom mengenai pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan jaringan tetap dan dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Menkominfo No.01/2010, Telkom telah mendapatkan penyesuaian izin di tahun 2010 untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal, SLJJ, SI dan jaringan tetap tertutup, sebagaimana berikut:

- Keputusan Menkominfo No.381/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Telefoni Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;
- Keputusan Menkominfo No.382/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Telefoni Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;
- Keputusan Menkominfo No.383/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Telepon Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.; dan
- Keputusan Menkominfo No.398/KEP/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 12 November 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menkominfo No.381, 382 dan 383 di atas, izin penyelenggaraan jaringan tetap dan layanan telepon dasar yang sebelumnya dimiliki Telkom berdasarkan Keputusan Menhub No.KP.162 Tahun 2004 tanggal 13 Mei 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Masing-masing izin tersebut di atas tidak memiliki batas waktu untuk masa keberlakuannya, namun setiap izin tersebut harus dievaluasi setiap tahunnya dan dievaluasi secara menyeluruh setiap lima tahun.

Seluler

Telkomsel mempunyai izin untuk melaksanakan layanan telepon seluler GSM secara nasional dengan menggunakan radio 7,5 MHz dalam band 900 MHz dan frekuensi radio 22,5 MHz dalam band 1800 MHz. Telkomsel juga memiliki izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia untuk mengembangkan layanan seluler dengan jangkauan nasional, termasuk memperluas kapasitas jaringannya. Telkomsel juga memiliki izin dan lisensi serta registrasi pada pemerintah daerah tertentu dan/atau instansi pemerintah,

terutama terkait dengan operasinya di wilayah tersebut, properti yang dimiliki oleh pihaknya dan/atau lembaga pembangunan dan penggunaan BTS.

Pada bulan Februari 2006, Pemerintah melaksanakan tender untuk tiga izin penggunaan spektrum frekuensi radio 2,1 GHz, masing-masing memiliki *broadband* 5 MHz, yang akan digunakan bersama izin baru untuk pengoperasian jaringan telekomunikasi seluler 3G tingkat nasional. Salah satu izin 3G ini diberikan kepada Telkomsel. Telkomsel mendapatkan izin 3G pada pita frekuensi 2,1 GHz tersebut untuk periode 10 tahun berdasarkan Keputusan Menkominfo No.19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tanggal 14 Februari 2006. Izin tersebut dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi oleh Menkominfo. Telkomsel mulai menyediakan layanan 3G secara komersial sejak bulan September 2006.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No.101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006, izin penyelenggaraan Telkomsel diperbaharui dengan memberikan hak kepada Telkomsel untuk menyediakan: (i) layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 900 MHz dan 1800 MHz; (ii) layanan telekomunikasi bergerak IMT-2000 dengan pita frekuensi radio di 2,1 GHz (3G); dan (iii) layanan telekomunikasi dasar. Izin ini memiliki masa berlaku tidak terbatas yang akan dievaluasi setiap lima tahun.

Sambungan Langsung Internasional ("SLI")

Telkom memulai layanan sambungan internasional sejak tahun 2004. Lisensi operasi jaringan tidak bergerak dari layanan sambungan internasional mengalami penyesuaian pada tahun 2010 untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menkominfo No.01/2010 dengan penerbitan Keputusan Menkominfo No.383/2010. Lisensi tersebut tidak memiliki tanggal kadaluwarsa, tetapi akan dievaluasi pada tahun 2015.

Telkom juga memiliki lisensi untuk mengoperasikan jaringan tidak bergerak tertutup berdasarkan Keputusan Menkominfo No.398/2010 yang menyesuaikan lisensi sebelumnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menkominfo No.01/2010. Lisensi ini memungkinkan Telkom untuk menyewakan jaringan terpasang tidak bergerak tertutup, bersama dengan operator kepada operator jaringan dan layanan telekomunikasi lainnya, termasuk menyediakan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") langsung ke Indonesia untuk operator telekomunikasi luar negeri.

Menurut Keputusan Menkominfo No.16/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 6 Oktober 2005 tentang ketentuan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui SKKL, operator telekomunikasi luar negeri yang akan memberikan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL langsung ke Indonesia diwajibkan untuk membangun kemitraan dengan jasa penyedia layanan jaringan tetap tertutup. Sejalan dengan Keputusan Menkominfo No.16/2005 fasilitas transmisi telekomunikasi internasional yang disediakan melalui SKKL dilayani oleh Telkom dengan mengacu pada hak labuh, yang melekat pada lisensi Telkom untuk mengoperasikan jaringan tetap layanan panggilan internasional. Telkom juga memiliki hak labuh berdasarkan surat hak labuh No.006-OS/DJPT.6/HLS/3/2010 tanggal 2 Maret 2010 dari Menkominfo.

Pada tanggal 2 Maret 2010, Menkominfo mengeluarkan keputusan No.75/KEP/M.KOMINFO/03/2010 yang memberikan lisensi kepada Telin, Anak Perusahaan Telkom, lisensi untuk operasi jaringan tetap tertutup yang memungkinkan Telin untuk menyediakan layanan infrastruktur internasional. Secara terpisah, Telin mendapat jaminan hak labuh di Indonesia dari Ditjen Postel untuk memberikan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL.

VoIP

Telkom memiliki izin penyelenggaraan jasa internet telepon untuk keperluan publik ("ITKP") sesuai Keputusan Ditjen Postel No.384/KEP/DJPT/KOMINFO/11/2010 tanggal 29 November 2010 untuk menyediakan layanan VoIP. Izin tersebut di atas tidak memiliki batas waktu masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

ISP

Telkom memiliki izin untuk menyediakan layanan internet sesuai dengan Keputusan Ditjen Postel No.83/KEP/DJPPI/KOMINFO/4/2011 pada tanggal 7 April 2011. Izin penyelenggaraan ini tidak memiliki batas masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

Akses Jaringan

Telkom memiliki izin untuk menyediakan koneksi internet dengan keputusan Ditjen Postel No.275/Dirjen/2006. Izin penyelenggaraan jasa ini tidak memiliki batas waktu masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

Akses Pita Lebar Nirkabel/Broadband Wireless Access ("BWA")

Pada bulan Juli 2009, Telkom mendapatkan lisensi BWA untuk 12 zona, yang terdiri dari 7 zona lisensi 3,3 GHz (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, JABODETABEK dan Banten) dan lima zona berlisensi untuk 2,3 GHz (Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Maluku dan Sulawesi bagian Utara).

Pada bulan Agustus 2009, menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No.237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 tentang Penunjukan Pemenang Lelang untuk *Packet Switched* Berbasis Akses Jaringan Tetap Lokal Menggunakan Operator 2.3 GHz Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* Nirkabel. Karena kegagalan pelaksanaan oleh pemenang tender, Menkominfo lalu menerbitkan Permen No.19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tertanggal 14 September 2011 ("Peraturan Menkominfo No. 19/2011"), yang membebaskan operator yang memberikan layanan di frekuensi radio 2,3 GHz untuk tidak wajib menggunakan teknologi khusus seperti disyaratkan untuk frekuensi radio 2,3 GHz, yang diatur dalam Permen No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009, 24 April 2009 ("Peraturan Menkominfo No.22/2009"). Terkait dengan Peraturan Menkominfo No. 19/2011, operator yang melayani pada frekuensi radio 2,3 GHz sekarang diizinkan untuk bebas memilih teknologi mereka untuk menyediakan layanan BWA di frekuensi radio 2,3 GHz, yang disesuaikan dengan persyaratan bahwa mereka harus membayar biaya hak penggunaan tahunan pada tahun ke-tiga hingga ke-sepuluh dari masa berlaku lisensi perubahan teknologi dari yang disyaratkan Peraturan Menkominfo No. 22/2009. Pada tanggal 9 Januari 2012, Menkominfo mengumumkan rencananya untuk mengadakan tender tambahan untuk frekuensi radio 2,3 GHz di *range* 2300-2360 MHz untuk layanan BWA dengan menggunakan teknologi netral.

Peraturan Menkominfo No.19/2011 juga mengatur kewajiban komponen tertentu bagi perangkat dan perlengkapan telekomunikasi yang digunakan dalam melayani BWA di frekuensi radio 2,3 GHz. Kewajiban komponen domestik sebelumnya ditetapkan 30% untuk stasiun pelanggan dan 40% untuk *base stations*, dan akan dinaikkan menjadi 50% dalam lima tahun.

Akibat perubahan ke teknologi netral sesuai Peraturan Menkominfo No.19/2011, Kami kehilangan dukungan vendor bagi teknologi pilihan Kami yang berdasarkan teknologi BWA tidak bergerak. Vendor sebaliknya memilih mendukung teknologi BWA bergerak yang dipilih oleh operator lain. Teknologi BWA bergerak bersaing dengan Telkomsel. Karenanya Kami mengembalikan 4 dari 5 zona untuk layanan BWA di frekuensi 2,3 GHz yang Kami terima. Kami mempertahankan lisensi BWA dan zona Maluku sehingga Kami dapat tetap memenuhi kualifikasi sebagai operator BWA frekuensi 2,3 GHz dan mendapat akses ke jaringan BWA yang dikelola oleh operator lain.

Menjadi operator BWA ini sejalan dengan transformasi bisnis Kami menuju TIME yang menuntut Kami untuk memiliki infrastruktur dengan kemampuan merespon pasar yang semakin kompleks dan permintaan layanan yang semakin konvergen, baik pada segmen *consumer, enterprise* maupun pada segmen *wholesale*.

Sistem Komunikasi Data ("SISKOMDAT")

Berdasarkan penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.30/2004 tentang penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi, Telkom wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Layanan SISKOMDAT. Izin Penyelenggaraan Jasa SISKOMDAT tersebut diperlukan untuk menyelenggarakan layanan jasa komunikasi data. Telkom menerima izin operasional jasa SISKOMDAT pada tanggal 6 Juni 2011. Kami sebelumnya menggunakan izin jaringan tetap tertutup untuk komunikasi kami layanan data.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan untuk Indonusa

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (kesempatan penyesuaian izin selama 2 tahun), PT Indonusa Telemedia, mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan ("IPP LPB") kepada Pemerintah pada tahun 2007. Menkominfo telah menerbitkan IPP LPB Jasa Penyiaran Televisi kepada Indonusa Telemedia melalui Keputusan Menkominfo No.392/KEP/M.KOMINFO/11/2010 pada tanggal 11 November 2010.

Pada tanggal 27 April 2011, PT Indonesia Telemedia mendapatkan lisensi IPTV untuk wilayah JABODETABEK, Bali, Bandung, Semarang dan Surabaya. Pada bulan Agustus 2011, Kami meluncurkan layanan IPTV secara komersial dibawah merk Groovia TV.

Metode Pembayaran Menggunakan *e-Money*

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 Mei 2009 tentang pengoperasian Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ("APMK") dan Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tentang *e-money*, Bank Indonesia telah mengatur kembali definisi dari "Penerbit" dan "Pengakuisisi" dalam kegiatan APMK dan bisnis *e-money.* Bank Indonesia telah mengkonfirmasikan status Telkom sebagai penerbit *e-money* berdasarkan surat Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No.11/13/DASP pada tanggal 25 Mei 2009. Kami menjalankan bisnis *e-Money* dengan nama T-Cash dan Flexi Cash.

Kegiatan Transfer Uang

Berdasarkan izin Bank Indonesia No.11/23/Bd/8, tertanggal 5 Agustus 2009, Telkom telah mendapatkan izin sebagai penyedia layanan transfer uang. Telkom memenyediakan jasa transfer uang yang disebut Delima.

LAYANAN KEPADA PELANGGAN

Pelanggan Telkom dapat mengakses beragam produk dan layanannya secara nyaman melalui beberapa cara berikut ini:

1. **Plasa Telkom**

   Ini adalah tempat di mana pelanggan dapat menanyakan berbagai informasi produk dan layanan, termasuk tagihan, pembayaran, penangguhan akun, promosi hingga penyampaian keluhan. Layanan pelanggan bersifat *walk-in* ini kini telah menjangkau berbagai wilayah, yaitu dengan rincian 727 *customer service point*, termasuk 32 Plasa Telkom yang juga dimanfaatkan oleh Anak Perusahaan Kami, Telkomsel, dalam memberikan layanan seluler bagi pelanggannya melalui gerai yang disebut Plasa GraPARI. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Telkomsel mengelola 84 Plasa GraPARI. Sedangkan Gerai HALO merupakan gerai layanan seluler yang dioperasikan oleh pihak ketiga saat ini jumlahnya 328 titik layanan. Pelanggan dapat melakukan pembayaran elektronik melalui *Electronic Data Capture* yang digunakan di kurang lebih 150 terminal yang terdapat di tiap gerai layanan pelanggan.

   Khusus pelanggan *enterprise*, Kami melayani mereka secara personal melalui *Telkom Solution House* ("TSH") yang berlokasi di 3 (tiga) mal prestisius, yaitu di Jakarta, Bali dan Surabaya. Untuk pelanggan UKM, Kami juga telah mendirikan UKM Center di sembilan lokasi di delapan kota, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya (2), Medan, Bandung, Yogyakarta, Palembang dan Makassar. UKM Center secara umum berfungsi sebagai *communication center, community center* dan *commerce center*.

2. *Call Centers*

Layanan *phone-in* atau *call center* merupakan salah satu akses yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk mengetahui beragam layanan Telkom secara mudah, yaitu dengan memutar nomor "147" dari pesawat telepon. Selain akses terhadap produk dan layanan Telkom, pelanggan juga dapat berbicara dengan *call center officer* Kami untuk menyampaikan beragam keluhan, atau menanyakan informasi seputar tagihan, promosi dan fitur layanan. *Call center* Telkom berada di tiga lokasi yaitu Medan, Jakarta dan Surabaya.

Kami juga memberikan layanan khusus bebas pulsa untuk pelanggan korporasi dengan memutar "08001Telkom" ("08001835566") atau layanan bagi pelanggan UKM, di nomor "500250".

Bagi pelanggan seluler, Kami memiliki Caroline atau *Customer Care Online* yang dapat dihubungi melalui nomor-nomor sebagai berikut:

- melalui *kartuHALO*: 111.
- melalui *simPATI* dan Kartu As: 155 (24 jam, gratis) dan 188 (24 jam, berbayar).
- melalui ponsel atau *fixed phone*: nasional ("08071811811"), Jakarta ("021-21899811"), Bandung ("022-2553811"), Surabaya ("031-8403811") dan Medan ("061-4578811").

3. Internet

Layanan berbasis online yang dapat diakses melalui *website* Kami www.telkom.co.id.

4. Broadband Learning Center ("BLC")

BLC berfungsi memberikan edukasi kepada berbagai komunitas guru, pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum tentang komputer, internet, *broadband* dan teknologi terbaru di industri telekomunikasi. Untuk mendukung kualitas edukasi, BLC bekerja sama dengan kalangan profesional di wilayah setempat.

5. Layanan *Enterprise* dan *Wholesale* serta Tim Account Manager ("AM")

Dalam melayani pelanggan korporasi, Telkom mengelompokkan pelanggan ke dalam 6 segmen berdasarkan bidang usahanya:

a. *Finance* dan *Banking;*
b. *Government, Army* dan *Police;*
c. *Manufacturing;*
d. *Mining* dan *Construction;*
e. *Trade* dan *Industrial Park;* dan
f. *Trading* dan *Services.*

Selain berdasarkan bidang usaha, pengelolaan pelanggan korporasi ini juga didasarkan pada kontribusi pendapatan, yakni cluster-1 untuk kelompok pelanggan dengan kontribusi pendapatan di atas Rp500 juta/bulan dan cluster-2 untuk pelanggan dengan kontribusi pendapatan di antara Rp100 juta/bulan hingga Rp500 juta/bulan. Pengelolaan ini dilakukan oleh AM yang berada di bawah Divisi Enterprise Service.

Untuk pelanggan dengan kontribusi pendapatan kurang dari Rp100 juta/bulan, Telkom mengategorikannya sebagai segmen UKM yang dikelola oleh AM dan Tele Account Management yang berada di bawah Divisi Business Service. Pelanggan kategori UKM juga terbagi ke dalam beberapa bidang usaha, yaitu:

a. *Public* dan *General Services;*
b. *Plantation* dan *Manufacturing Services;* dan
c. *Trading* dan *Business Services.*

Berdasarkan kontribusi pendapatannya, pelanggan SME dibagi menjadi dua kelompok, yaitu cluster-3 untuk kelompok pelanggan SME dengan kontribusi pendapatan di antara Rp50 juta/bulan hingga Rp100 juta/bulan dan cluster-4 untuk kelompok pelanggan dengan kontribusi pendapatan di bawah Rp50 juta/bulan.

Layanan bagi segmen pelanggan *wholesale*, yakni kategori operator telekomunikasi berlisensi lainnya atau disebut *other licensed operator* ("OLO"), ditangani oleh AM yang berada di bawah Divisi Wholesale Service.

6. Program Jaminan Tingkat Layanan

Telkom merancang Program Jaminan Tingkat Layanan untuk melayani pelanggan sambungan telepon tidak bergerak, Flexi maupun Speedy. Program ini menawarkan jaminan layanan pada tingkat minimum tertentu bagi pelanggan yang ingin melakukan pemasangan sambungan baru, perubahan jenis layanan, penyelesaian perbaikan gangguan, pemulihan sambungan yang terisolir, dan keluhan atas tagihan. Sebagai konsekuensi Telkom memberikan kompensasi non-tunai, seperti biaya berlangganan gratis bagi pelanggan apabila tingkat layanan minimum tersebut tidak terpenuhi. Khusus untuk segmen korporasi, UKM dan OLO, jaminan tingkat layanan diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pelanggan.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap seluruh layanan yang diberikan, Telkom bekerja sama dengan sebuah perusahaan survei independen melakukan riset dengan tujuan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Pelanggan atau *Customer Satisfaction Index* ("CSI") dan Indeks Loyalitas Pelanggan atau *Customer Loyalty Index* ("CLI") dengan menggunakan metode Top Two Boxes. Pada tahun 2011, layanan untuk pelanggan korporasi memperoleh angka CSI 88,92% dan angka CLI 86,26%, sedangkan untuk segmen pelanggan *wholesale* atau pelanggan OLO nilai CSI 82,68% dan nilai CLI 74,81%.

TAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Kami menerapkan sistem tagihan secara periodik sesuai dengan karakteristik produk dan segmen pelanggan. Pelanggan jasa telekomunikasi Telkom dapat memilih berbagai jenis pembayaran, di antaranya secara tunai dengan datang langsung ke loket-loket pembayaran jasa Telkom terdekat, melalui auto debit, kartu kredit, transfer ke rekening Telkom (khusus pelanggan korporasi/OLO), Anjungan Tunai Mandiri ("ATM"), *mobile banking, internet banking* dan *source of fund* (Flexicash, Mcash, atau Tcash).

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada pelanggan, Telkomsel telah menerapkan sistem penagihan baru yang diharapkan memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Sistem ini mengubah basis penagihan Kami menjadi berbasis *Online Charging System* ("OCS"), yang akan berlaku untuk produk prabayar maupun pascabayar. Dengan sistem yang baru, diharapkan pelanggan ke depannya dapat memilih metode penagihan sesuai kebutuhannya.

Sebelumnya Kami menerapkan sistem tagihan secara periodik sesuai dengan karakteristik produk dan segmen pelanggan dengan sistem yang sudah tersentralisasi, akurat dan standar di setiap wilayah. Pelanggan layanan pascabayar *kartuHALO* memperoleh lembar tagihan yang dikirim ke tempat residensial pelanggan setiap bulan dengan hitungan pemakaian berdasarkan: (i) jumlah menit penggunaan untuk layanan seluler; (ii) layanan nilai-tambah yang dikenakan biaya penggunaan selama jangka waktu, tertentu; dan (iii) biaya langganan untuk layanan dasar dan layanan lain.

Proses pembayaran tagihan dapat melalui cara pembayaran langsung ke *cash teller* yang ditempatkan di Gerai HALO maupun Plasa GraPARI, ATM, *phone banking, internet banking, mobile banking*, anjak piutang dan *auto debit*. Pelanggan *kartuHALO* dapat melakukan pembayaran melalui pendebitan otomatis dari kartu kredit yang berpartisipasi, cek, tunai, setoran langsung melalui transfer telepon atau *over-the-counter facility* di sebagian besar kantor pos dan bank yang mempunyai perjanjian dengan Telkomsel.

Pengelolaan Piutang Pelanggan

Finance, Billing and Collection Center mengelola pembayaran dari pelanggan yang dikelompokkan sesuai konsep pengelolaan layanan pelanggan dan segmen produknya. Pembayaran pelanggan dikelola dengan aplikasi Telkom *Revenue Management System* ("TREMS") yang memasukkan menu *Security Deposit* ("SD"). Telkom menerapkan kebijakan deposit kepada pelanggan yang akan berhenti berlangganan yang jumlahnya diprognosa berdasarkan *warm usage* pada bulan berjalan ditambah dengan abonemen, atau sebesar tagihan jika layanannya terhitung *flat* atau tidak berdasarkan jumlah penggunaan. Deposit tersebut kemudian dikliringkan saat tagihan bulan berikutnya dikeluarkan. Telkom akan mengembalikan kelebihan atau menagihkan kekurangan atas deposit yang dibayarkan namun dalam hal keterlambatan pembayaran, tiap unit bisnis di Direktorat Konsumer maupun Direktorat Enterprise dan Wholesale memiliki aturan tersendiri dalam memberikan sanksi terhadap pelanggan yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak perjanjian antara pelanggan dan Telkom. Sanksi yang dikenakan berupa pengenaan denda, isolir dan pencabutan, yang semuanya telah diatur dalam perjanjian kerjasama ("PKS"). Bagi pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran, Telkom mengirimkan pelanggannya *electronic billing statement* dan *billing statement* melalui *email* atau *invoice* yang tercetak dan dikirim melalui kurir khusus (terutama pelanggan korporasi/OLO).

Telkomsel telah memiliki mekanisme bagi penagihan piutang pelanggan. Untuk pembayaran yang tidak diterima hingga jatuh tempo dari tagihan yang bersangkutan, Telkomsel akan mengenakan sanksi berupa penghentian penerimaan seluruh panggilan masuk. Apabila Telkomsel masih belum menerima pembayaran hingga dua bulan sejak tanggal jatuh tempo, sanksi akan ditingkatkan menjadi penutupan nomor pelanggan. Sementara itu, Telkomsel tetap mengupayakan adanya pembayaran dari pelanggan, termasuk dengan menggunakan jasa instansi penagih utang.

Bagi pelanggan yang telah ditutup nomor pelanggannya tapi masih ingin berlangganan layanan Telkomsel, mereka harus menyelesaikan seluruh tunggakan dan mengajukan kembali permohonan layanan seluler baru. Telkomsel tidak membebankan biaya atau bunga atas keterlambatan.

TARIF LAYANAN DAN BIAYA INTERKONEKSI

Dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi Kami, Telkom mengacu pada ketentuan yang berlaku dari Pemerintah. Pemerintah membagi jenis tarif menjadi dua kategori yaitu tarif untuk penyediaan jasa telekomunikasi dan tarif untuk layanan jaringan telekomunikasi. Operator telekomunikasi dapat menyesuaikan besaran tarif yang akan dikenakan bagi pelanggannya serta bersaing secara sehat dengan operator telekomunikasi lainnya, sesuai dengan peraturan Menkominfo. Selain mengacu pada ketentuan Pemerintah, unit bisnis Telkom menentukan tarif berdasarkan panduan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi Telkom.

1. Telekomunikasi

a. Tarif Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak

Biaya pemasangan dan biaya bulanan

Biaya akses	Bisnis (Rp)	Residensial (Rp)	Sosial (Rp)
Pasang baru	175.000 - 450.000	75.000 - 295.000	50.000 - 205.000
Abonemen	38.400 - 57.600	20.600 - 32.600	12.500 - 18.500

Biaya penggunaan sambungan lokal

	Harga per Pulsa (Rp)	Durasi Pulsa
Sampai 20 km	250	3 menit (di luar jam sibuk) dan 2 menit (jam sibuk)
Lebih dari 20 km	250	2 menit (di luar jam sibuk) dan 1,5 menit (jam sibuk)

Biaya penggunaan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ)

	Harga per Menit (Rp)	Pembulatan Durasi Blok Waktu
0-20 km	83 - 122	1 menit
20-30 km	122 - 163	1 menit
30-200 km	320 - 1.100	6 detik
200-500 km	320 - 1.770	6 detik
Lebih dari 500 km	320 - 2.100	6 detik

b. Tarif Sambungan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Telkom menawarkan layanan telepon nirkabel tidak bergerak prabayar dan pascabayar. Tarif yang dibebankan kepada pelanggan sambungan telepon nirkabel tidak bergerak dilaporkan sebagai pendapatan telepon tidak bergerak.

- **Pascabayar (Flexi Classy)**

  Pelanggan pascabayar membayar biaya aktivasi satu kali sebesar Rp7.500 dan biaya bulanan sebesar Rp30.000, (belum termasuk PPN 10%). Selain itu, Telkom juga mengenakan biaya Rp75 per SMS untuk ke sesama Flexi *(on-net)* dan PSTN Telkom, Rp136 dari Flexi ke operator lainnya dan Rp450 dari Flexi ke luar negeri (internasional).

  Berikut perhitungan tarif untuk layanan pascabayar:

	Harga per Unit (Rp)	Durasi Unit
Flexi ke Flexi		
Lokal	49	1 menit
SLJJ	300	30 detik
Flexi ke PSTN		
Lokal	200	1 menit
SLJJ	600	30 detik
Flexi ke OLO Kabel tidak bergerak		
Lokal	270	1 menit
SLJJ	625	30 detik
Flexi ke Seluler		
Lokal	550	1 menit
SLJJ	625	30 detik
Flexi ke *Mobile* Satelit (Byru)	3.850	30 detik

- **Prabayar (Telkom Flexi Trendy)**

  Layanan telepon nirkabel tidak bergerak prabayar dikenakan biaya SMS Rp100 per pesan dari Flexi ke Flexi (*on-net*) dan PSTN Telkom, Rp165 per pesan ke operator lainnya dan Rp500 per pesan dari Flexi ke luar negeri (internasional). Biaya penggunaannya telah termasuk PPN sebesar 10%, yaitu:

	Harga per Unit (Rp)	Durasi Unit
Flexi ke Flexi		
Lokal	55	1 menit
SLJJ	375	30 detik
Flexi ke PSTN		
Lokal	250	1 menit
SLJJ	750	30 detik
Flexi ke OLO kabel tidak bergerak		
Lokal	350	1 menit
SLJJ	800	30 detik
Flexi ke Seluler		
Lokal	780	1 menit
SLJJ	800	30 detik
Flexi ke *Mobile* Satelit (Byru)	4.235	30 detik

c. Tarif SLI

Telkom menerapkan tarif panggilan SLI sesuai ketentuan batas maksimum tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berikut Kami sajikan tarif SLI terkini Telkom:

Wilayah		Tarif per Menit (Rp)		Pembulatan Durasi Blok Waktu
		PSTN/Classy	Trendy	
Grup I	Asia Tenggara, Pasifik Selatan	4.550	5.550	6 detik
Grup II	Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia Timur, Asia Barat dan Asia Selatan	5.550	6.550	6 detik
Grup III	Eropa	7.570	8.700	6 detik
Grup IV	Timur Tengah	8.080	9.290	6 detik
Grup V	Tujuan khusus	20.200	23.300	6 detik

d. Tarif VoIP

Untuk layanan VoIP, operator memiliki kesempatan untuk menentukan tarifnya. Telkom sendiri memiliki layanan VoIP yang terdiri dari TelkomGlobal-01017 dan TelkomSave dengan pilihan tarif yang lebih rendah.

e. Tarif Telepon Seluler

- **Tarif Pascabayar (*kartuHALO*)**

Tarif dasar yang dikenakan kepada pelanggan pascabayar sepanjang 2011 adalah sebagai berikut:

	Harga (Rp)	Pembulatan Durasi Blok Waktu
***On-net* Seluler:**		
Lokal	217	20 detik
SLJJ	213	15 detik
***Off-net* seluler:**		
Lokal	250	20 detik
SLJJ	300	15 detik
***Off-net* PSTN:**		
Lokal	217	20 detik
SLJJ	300	15 detik
SMS (harga per SMS):		
On-net	125	
Off-net	150	
Internasional	500	

- **Tarif Prabayar**

Tarif dasar yang dikenakan kepada pelanggan prabayar (*simPATI* dan Kartu As) selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

	Harga (Rp)		Pembulatan Durasi Blok Waktu	
	simPATI	Kartu As	*simPATI*	Kartu As
***On-net* Seluler:**				
Lokal	750	13	per 30 detik	per detik
SLJJ	750	13	per 30 detik	per detik
***Off-net* Seluler:**				
Lokal	800	13	per 30 detik	per detik
SLJJ	1.000	13	per 30 detik	per detik
***Off-net* PSTN:**				
Lokal	450	13	per 30 detik	per detik
SLJJ		13		per detik
Zona-1	900		per 30 detik	
Zona-2	900		per 30 detik	
Zona-3	900		per 30 detik	
SMS (harga per SMS):				
On-net	100	99		
Off-net	150	99		
Internasional	600	1.000		

f. Tarif Layanan Jaringan

- **Sewa Sirkit**

  Untuk bentuk, jenis, struktur harga dan formula tarif untuk sewa jaringan, penyedia layanan harus mengikuti aturan Pemerintah.

  Sewa sirkit merupakan layanan penyediaan jaringan transmisi *terrestrial unmanaged* untuk komunikasi elektronik yang menghubungkan dua titik terminasi antar *point of presence* ("POP") *dedicated* dan digunakan secara eksklusif dengan kapasitas kanal transmisi simetris. Tarif sewa sirkit yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai kini, yaitu

	Tarif (Rp)
Aktivasi	
Akses Pelanggan	2.400.000 - 30.000.000(1)
Biaya Pemakaian:	
Point to Point	
Lokal (sampai dengan 25 km)	1.200.000 - 84.300.000(2)
Inter-lokal (lebih dari 25 km)	3.900.000 - 1.257.800.000(2)
End to End	
Lokal (sampai dengan 25 km)	3.400.000 - 187.800.000(2)
Inter-lokal (lebih dari 25 km)	6.100.000 - 1.361.300.000(2)

(1) Tarif berdasarkan kecepatan
(2) Tarif berdasarkan kecepatan dan wilayah

- **Satelit**

  Telkom mengenakan tarif maksimum tahunan per transponder sebesar US$1,20 juta, namun Kami juga dapat menawarkan tarif dengan potongan harga bagi pelanggan yang memiliki komitmen jangka panjang atau dengan kata lain, pelanggan setia Kami.

g. Tarif Jasa Komunikasi Data

- **Akses Pita Lebar ("Speedy")**

  Kami menawarkan layanan akses pita lebar ("*broadband*") melalui paket Speedy. Telkom mengenakan tarif untuk pelanggan layanan prabayar Speedy sebesar Rp75/menit namun Telkom memberlakukan penurunan tarif secara selektif sesuai pergerakan harga pasar khusus untuk *red zone area* (daerah yang memiliki tingkat kompetisi yang tinggi).

  Berikut ini Kami sajikan daftar tarif tetap layanan akses *broadband*:

Layanan Pascabayar Speedy	Biaya Aktivasi (Rp)	Biaya Bulanan (Rp)	Kuota Pemakaian perBulan	Biaya Kelebihan Pemakaian (Rp)
Volume Based *				
Limited Home	75.000	200.000	1,0Gb	175/MB
Limited Professional	75.000	400.000	3,0Gb	175/MB
Unlimited Office	75.000	750.000	*Unlimited*	-
Unlimited Warnet	75.000	1.750.000	*Unlimited*	-

(*) berlaku bagi pelanggan lama sebelum migrasi ke paket Speedy *multi speed,* tidak untuk pelanggan baru.

Layanan Pascabayar Speedy	Biaya Aktivasi (Rp)	Biaya Bulanan (Rp)	Kecepatan *Link*
Multispeed **			
Socialia	75.000	195.000	sampai dengan 384 Kbps
Load	75.000	275.000	sampai dengan 512 Kbps
Familia	75.000	455.000	sampai dengan 1 Mbps
Executive	75.000	695.000	sampai dengan 2 Mbps
Biz	75.000	995.000	sampai dengan 3 Mbps

(**) berlaku bagi pelanggan paket Speedy baru dan pelanggan lama

Layanan Pascabayar Speedy	Biaya Aktivasi (Rp)	Biaya Bulanan (Rp)	Kuota Pemakaian per Bulan	Kecepatan *Link*	Biaya Kelebihan Pemakaian
Time Based					
Limited 15 Jam/bulan	75.000	75.000	15 jam	sampai dengan 1 Mbps	75/menit
Limited 50 Jam/bulan	75.000	145.000	50 jam	sampai dengan 1 Mbps	25/menit

- **Akses FlexiNet**

  - **Flexi Pascabayar**

    Flexi pascabayar untuk mengakses internet via PDN atau WAP (dengan menggunakan #777), pelanggan Flexi pasca bayar membayar Rp200 per menit atau Rp3 per Kbps. Akses internet via jaringan *dial-up* nirkabel (menggunakan TelkomNet Instant di nomor 0809 89999) akan dikenakan biaya, sesuai kebijakan tarif layanan TelkomNet Instant per 30 detik.

    Untuk tarif pemakaian layanan data FlexiNet *Unlimited* Telkom Flexi Classy terdapat 3 paket layanan, yaitu Paket Harian bertarif Rp2.250/hari dengan masa berlaku 24 jam, Paket Mingguan bertarif Rp13.500/minggu dengan masa berlaku 7 x 24 jam, dan Paket Bulanan bertarif Rp45.000/bulan dengan masa berlaku 30x24 jam (tarif belum termasuk PPN 10%)

  - **Flexi Prabayar**

    Untuk akses internet melalui PDN, pelanggan prabayar dikenakan Rp220 per menit atau Rp5 per Kbps. Pelanggan prabayar yang menggunakan akses internet Telkom melalui *dial-up* nirkabel dan WAP akan dikenakan biaya masing-masing Rp300 per menit dan Rp5 per Kbps.

    Bagi pemakaian layanan data FlexiNet *Unlimited* Telkom Flexi Trendy, Telkom menawarkan tiga paket layanan, yaitu Paket Harian bertarif Rp2.500/hari dengan masa berlaku 24 jam, Paket Mingguan bertarif Rp15.000/minggu dengan masa berlaku 7x24 jam, dan Paket Bulanan bertarif Rp50.000/bulan yang berlaku 30x24 jam (tarif sudah termasuk PPN 10%).

  - **Telkom Link**

    Telkom menyediakan layanan Telkom Link yang merupakan layanan komunikasi data yang terdiri dari DINAccess, VPN Frame Relay, VPN IP, VPN Dial, VPN Instan, Transactional Access, Global Datacom, Video Conference, Telkom Metro, dan VPN Lite. Untuk layanan ini, tarif yang dikenakan dihitung berdasarkan asas manfaat dan profitabilitas Perusahaan dengan mengacu pada analisa lingkungan bisnis, seperti harga pasar, harga yang diberikan kompetitor, volume dan lama berlangganan, tingkat kelengkapan akses pelanggan dan atau pertimbangan ekonomis lainnya.

h. Tarif Interkoneksi

Menkominfo menetapkan tarif interkoneksi dan akses, termasuk jumlah biaya interkoneksi yang diterima masing-masing operator terkait dengan panggilan lintas jaringan. Operator mengenakan tarif untuk panggilan berdasarkan biaya untuk menyambungkan panggilan tersebut.

Tarif interkoneksi untuk jaringan PSTN terdiri dari:

1. Tarif interkoneksi originasi lokal ke OLO sebesar Rp73/menit sampai dengan Rp283/menit.
2. Tarif interkoneksi originasi jarak jauh ke OLO sebesar Rp539/menit sampai dengan Rp608/menit.
3. Tarif interkoneksi originasi internasional ke OLO internasional sebesar Rp594/menit.
4. Tarif interkoneksi terminasi lokal dari OLO sebesar Rp73/menit sampai dengan Rp283/menit.
5. Tarif interkoneksi terminasi jarak jauh dari OLO sebesar Rp539/menit sampai dengan Rp608/menit.
6. Tarif interkoneksi terminasi internasional dari OLO internasional sebesar Rp594/menit.

7. Tarif interkoneksi transit lokal (OLO ke *fixed wireline* ke OLO) sebesar Rp67/menit.
8. Tarif interkoneksi transit jarak jauh (OLO ke *fixed wireline* ke OLO) sebesar Rp273/menit.
9. Tarif interkoneksi transit internasional *gateway* (OLO ke *fixed wireline* ke OLO) sebesar Rp290/menit.

Tarif interkoneksi untuk jaringan fixed *wireless* access terdiri dari:

1. Tarif interkoneksi originasi lokal ke OLO sebesar Rp73/menit sampai dengan Rp271/menit.
2. Tarif interkoneksi originasi jarak jauh ke OLO sebesar Rp419/menit sampai dengan Rp611/menit.
3. Tarif interkoneksi originasi internasional ke OLO internasional sebesar Rp610/menit.
4. Tarif interkoneksi terminasi lokal dari OLO sebesar Rp73/menit sampai dengan Rp271/menit.
5. Tarif interkoneksi terminasi jarak jauh dari OLO sebesar Rp419/menit sampai dengan Rp611/menit.
6. Tarif interkoneksi terminasi internasional dari OLO internasional sebesar Rp610/menit.

Tarif interkoneksi untuk jaringan seluler terdiri dari:

1. Tarif interkoneksi *voice* terminasi dan originasi lokal sebesar Rp251/menit.
2. Tarif interkoneksi *voice* terminasi dan originasi jarak jauh sebesar Rp357/menit sampai dengan Rp463/menit.
3. Tarif interkoneksi *voice* terminasi dan originasi internasional sebesar Rp453/menit.

i. Tarif Wartel

Wartel adalah telepon umum yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Tarif untuk wartel dapat ditentukan dengan bebas oleh penyedia layanan. Telkom mendapatkan hingga 70% dari tarif dasar yang dikenakan oleh wartel kepada pelanggannya untuk panggilan domestik dan mendapatkan hingga 92% dari tarif dasar yang dikenakan wartel untuk sambungan langsung internasional (SLI).

2. Information, Media and Edutainment Business ("IME")

Sebagai penyelenggara layanan IME yang merupakan bisnis *new wave* Kami, Telkom bekerja sama dengan beberapa mitra. Kerja sama ini didasarkan kepada pertimbangan kapabilitas, *time to market* dan *creation idea*. Tarif layanan IME ditentukan oleh Unit Service Strategy & Tarif, namun Telkom bekerja sama dengan mitra untuk menetapkan harga jual *end user* layanan IME yang diselenggarakan oleh mitra.

ASURANSI

Telkom memberikan perlindungan asuransi atas aset tetap yang dimilikinya dan bernilai signifikan. Aset tetap yang diasuransikan tidak termasuk tanah dan kabel tembaga bawah tanah, sedangkan untuk seluruh aset yang meliputi peralatan elektronik, mesin, SKKL, serat optik dan gedung diasuransikan dari risiko akibat gempa bumi, tsunami, erupsi, kebakaran, pencurian, petir, bencana alam dan risiko lainnya. Aset Kami dilindungi oleh *Property All Risk Insurance Policy* dengan skema "*sum insured basis*" dan "*first loss basis*". Polis asuransi Kami juga melindungi terhadap gangguan sementara yang terjadi pada bisnis Kami. Selain itu Kami juga memberikan perlindungan asuransi untuk satelit Telkom-1 dan Telkom-2 secara terpisah. Manajemen Kami meyakini bahwa cakupan asuransi Kami konsisten dengan praktek bisnis di Indonesia.

MEREK, HAK CIPTA DAN PATEN

Sejalan dengan dinamika portofolio bisnis Perusahaan, Telkom telah melahirkan inovasi baru dalam layanan dan produknya. Untuk melindungi sekaligus memberikan penghargaan terhadap kreativitas tersebut, Telkom telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan ìntelektual yang terdiri dari merek, hak cipta, dan paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ("Ditjen HKI") Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual yang didaftarkan Telkom meliputi: (i) merek dagang maupun jasa atas produk barang dan layanan jasa Perseroan, domain dan logo Perseroan, nama; (ii) hak cipta atas logo nama Perseroan, logo produk barang dan layanan jasa Perseroan, program-program komputer, karya tulis dan lagu; dan (iii) paten sederhana dan biasa atas penemuan-penemuan di bidang teknologi berupa produk, sistem dan metode di bidang telekomunikasì.

33

Daftar Merek Hak Cipta dan Paten

Berikut ini daftar merek dan hak cipta yang telah terdaftar atas nama Telkom untuk periode tahun 2010-2011:

No.	Nama Merek	No. Permohonan	Tanggal Permohonan	Tanggal Terdaftar
1	Telkom Vote	R002011001826	21 Februari 2011	31 Mei 2011
2	Andara	R002011001830	21 Februari 2011	31 Mei 2011
3	TelkomSave	R002011001831	21 Februari 2011	31 Mei 2011
4	Sandi Nada	R002011001832	21 Februari 2011	31 Mei 2011
5	Telkom e-Learning	R002011001833	21 Februari 2011	31 Mei 2011
6	Telkom Klip	R002011001834	21 Februari 2011	31 Mei 2011
7	Telkom Permata	R002011001817	21 Februari 2011	31 Mei 2011
8	Trimitra	R002011001820	21 Februari 2011	31 Mei 2011
9	Telkom Memo	R002011001825	21 Februari 2011	31 Mei 2011
10	TelkomNet	R002011001837	21 Februari 2011	31 Mei 2011
11	TelkomNet Instan	R002011001829	21 Februari 2011	31 Mei 2011
12	Telkom 108	R002011001828	21 Februari 2011	31 Mei 2011
13	Telkom Indonesia dengan *tagline* "*The World In Your Hand*"	J002009036810	13 November 2009	17 Juni 2011
14	Telkom Indonesia	J002009036809	13 November 2009	17 Juni 2011
15	Speedy Pre Paid	D002009017071	25 Mei 2009	23 November 2010
16	Flexi Lebih Irit Kan!	J002010020956	9 Juni 2010	11 Oktober 2011
17	Flexi Land	J002008028409	6 Agustus 2008	17 Mei 2010

No.	Judul Ciptaan	No. Permohonan	Tanggal Permohonan	Tanggal Terdaftar
1	Program komputer "Aplikasi Home Monitoring"	C00200904712	21 Desember 2009	27 Juni 2011
2	Program komputer "Sistem Diseminasi Informasi Berbasis VIPO"	C00200904713	21 Desember 2009	27 Juni 2011
3	Program komputer "Sistem Pengelolaan Data Tarif Berbasis Activity Based Pricing (ABP) dan Simulasi Perhitungan Tarif Berbasiskan Web"	C0020094711	21 Desember 2009	27 Juni 2011
4	Karya tulis "Sistem Sekuriti Paket Data pada Jaringan Flexi"	C00200901819	25 Mei 2009	14 Juni 2010
5	Karya tulis berjudul *"Telecommunication System Standard Tera Router"*	C00200900098	13 Januari 2009	28 Januari 2010
6	Karya tulis berjudul *"Technology Release Tera Router Technology"*	C00200900099	13 Januari 2009	28 Januari 2010
7	Logo: Telkom Indonesia	C00200904624	15 Desember 2009	27 Juni 2011
8	Program Komputer "Kemilau Indonesia"	C00201002083	9Juni 2010	3 Oktober 2011
9	Program Komputer "Kartu Masuk Terminal (KMT) online"	C00201002084	9 Juni 2010	3 Oktober 2011

Berikut daftar paten yang sudah diajukan pendaftarannya pada periode tahun 2010:

No.	Judul Paten	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan
1	Perangkat STB (Set Top Box) Untuk Akses Internet via Televisi	P00201000916	23 Desember 2010
2	Panggilan Telepon Teranggarkan untuk pelanggan pra bayar	P00201000915	23 Desember 2010
3	Sistem Penyampaian Informasi Melalui SCA Pada Pemancar Radio	P00201000430	12 Juli 2010
4	Layanan Home Automation dengan Metoda Akses Melalui Internet	P00201000373	9 Juni 2010
5	Penyisipan Teks pada Isi SMS menggunakan Prefiks	P00201000129	17 Februari 2010
6	Unstructured Supplementary Service Data ("USSD") Interaktif pada Sistem CDMA	P00201000032	14 Januari 2010
7	Ruang Obrolan Suara *(Voice Chat Room)* di Jaringan Telepon Bergerak	P00201000032	14 Januari 2010

STRATEGI PERUSAHAAN

Agar mampu beradaptasi dengan dinamika industri dan bisnis Perusahaan, pada tahun 2011 Telkom kembali melakukan penyempurnaan inisiatif strategi Perusahaan dengan fokus pada implementasi kerangka bisnis TIME dan penguatan konsolidasi internal Perusahaan. Upaya ini untuk mendukung transformasi menyeluruh yang meliputi organisasi, portofolio bisnis, infrastruktur dan sistem, serta budaya Perusahaan dalam rangka mewujudkan visi untuk menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan bisnis TIME di tingkat regional. Dengan besarnya peluang pertumbuhan pada bisnis IME, Kami berharap kontribusi bisnis IME dapat meningkat terhadap pendapatan Perusahaan pada tahun 2015 menyusul investasi Perusahaan yang besar dalam pembangunan infrastruktur *Next Generation Network* ("NGN") berbasis *Internet Protocol*.

Selain sebagai sumber pertumbuhan baru, bisnis IME juga merupakan *enabler* untuk mendukung kelanjutan dan pertumbuhan bisnis sektor telekomunikasi. Disamping itu, Perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan sinergi antara layanan telekomunikasi serta menjajaki pertumbuhan anorganik dengan berekspansi ke luar negeri, terutama ke Asia dan Timur Tengah.

Inisiatif strategis Telkom untuk tahun 2011 dijabarkan seperti berikut ini:

1. **Mengoptimalkan layanan Plain Ordinary Telephone Systems ("POTS") dan memperkuat bisnis *broadband***
   Inisiatif strategis ini difokuskan untuk meningkatkan efisiensi biaya serta perlambatan penurunan pendapatan, POTS sebagai salah satu layanan *legacy* Telkom. Selain itu dalam rangka penguatan bisnis *broadband*, Telkom mengedepankan strategi pertumbuhan untuk merealisasikan '*broadband* anywhere' dan mendukung tercapainya '*meaningful broadband*'.

2. **Mengkonsolidasikan dan mengembangkan bisnis sambungan telepon nirkabel tidak bergerak/Fixed Wireless Access ("FWA") serta mengelola portofolio nirkabel**
   Arah utama dari inisiatif strategis ini adalah peningkatan nilai dari portofolio layanan telepon nirkabel Telkom Group secara menyeluruh. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan nilai bisnis FWA untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan portofolio nirkabel lain. Inisiatif ini juga memberikan dukungan pada Anak Perusahaan Kami, Telkomsel untuk mampu menjadi pemimpin pasar seluler di Indonesia. Dalam hal ini, Telkomsel didorong untuk menerapkan '*value-based market approach*' dan mengimplementasikan '*segment-based approach*' untuk mempertahankan kepemimpinan pasar di bisnis seluler.

3. **Mengintegrasikan Solusi Ekosistem Telkom Group**
   Inisiatif strategis ini mengupayakan untuk mendesain solusi bagi kebutuhan pelanggan Telkom Group secara ekosistem dengan tujuan untuk menciptakan *system lock-in* dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Solusi ekosistem merupakan solusi bisnis bagi pelanggan yang dirancang untuk membangun hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara Telkom sebagai penyedia layanan dengan pelanggan (termasuk individu/Usaha Kecil Menengah ("UKM")/korporasi) dalam melakukan kegiatan usaha bersama komunitasnya. Pelanggan dari segmen ritel, UKM, *Enterprise* dan *Wholesale* dari dalam maupun luar negeri diharapkan menjadi tumpuan pertumbuhan bisnis portofolio pelanggan.

4. **Berinvestasi di layanan Teknologi Informasi ("TI")**
   Inisiatif strategis ini merupakan arahan untuk memasuki industri TI guna melengkapi kapabilitas Telkom dalam menyediakan solusi TI guna meningkatkan performa pelanggan dari segmen ritel, *Enterprise* dan UKM. Melalui inisiatif ini pula, Telkom akan memasuki bisnis *Premises Integration* yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan kunci di segmen *enterprise* dan UKM. Sementara itu, pengembangan *e-payment* Telkom yang meliputi (APMK, *Billing payment, Payment Gateway, e-Money, e-Voucher dan Remittance)* diarahkan menuju *single operating platform* dengan mengusung *brand* DELIMA.

5. **Berinvestasi di bisnis media dan *edutainment***
   Inisiatif strategis ini diarahkan sebagai langkah antisipasi konvergensi antara telekomunikasi, informasi, media dan *edutainment* ke dalam industri media dan *edutainment* ini Telkom akan berperan sebagai *content aggregator* dan *delivery point*.

6. **Berinvestasi pada bisnis *wholesale* dan peluang bisnis internasional yang strategis**
   Inisiatif strategis ini mendorong pertumbuhan bisnis *wholesale* melalui konsep *supply leading* dan serta menyeimbangkan bisnis *wholesale* dan ritel selain itu Perusahaan juga didorong untuk mencari peluang investasi internasional yang strategis baik di sektor telekomunikasi melalui Anak Perusahaan Telin maupun di sektor IME melalui Metra.

7. **Berinvestasi di peluang domestik yang strategis dengan memanfaatkan aset yang dimiliki**
   Inisiatif strategis ini terfokus pada peluang investasi di luar TIME di dalam negeri yang salah satu tujuannya adalah optimalisasi aset Telkom Group yang ada guna mendukung realisasi pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi.

8. **Mengintegrasikan *Next Generation Network* ("NGN") dan Operational support system, Business support system, Customer support system and Enterprise relations management ("OBCE")**
   Inisiatif strategis ini merupakan perwujudan upaya transformasi di bidang infrastruktur menuju *converged network* yang akan mendukung layanan *multiplay*. Inisiatif ini juga merefleksikan transformasi TI sebagai *enabler* menuju *Consolidated Data, Consolidated Billing* dan *Integrated CRM* bagi Telkom Group.

9. **Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio**
   Inisiatif strategis ini menawarkan pendekatan baru bagi pengelolaan bisnis TIME dari pilihan yang ada yaitu *segment based, geography based, business based* dan *functional based.* Telkom mengkaji lebih lanjut efektivitas dari model pengelolaan *holding* guna mengoptimalkan pertumbuhan portofolio TIME. Metra telah diposisikan sebagai *holding* yang akan menangani portofolio bisnis TIME Telkom.

10. **Melakukan transformasi budaya Perusahaan**
    Inisiatif strategis ini mendorong percepatan transformasi budaya Perusahaan dari Telkom 135 menjadi Telkom's 5C yang terkait dengan "Values – 5C" yang akan diimplementasikan di seluruh jajaran Telkom Group dengan penyesuaian yang diperlukan di masing-masing Anak Perusahaan.

STRATEGI ANAK PERUSAHAAN

Sejalan dengan upaya penguatan dan pertumbuhan bisnis inti Telkom Group dan sesuai amanat inisiatif strategi Telkom, Perusahaan menerapkan strategi pengembangan anorganik. Beberapa alasan yang mendasari upaya tersebut adalah:

a. Merupakan strategi pertumbuhan (bisnis *legacy* yang cenderung stagnan/turun);
b. Merupakan langkah untuk memitigasi risiko (permodalan, kompetensi) dan mendapatkan sinergi serta penciptaan nilai *(value creation)* secara cepat;
c. Transformasi bisnis Anak Perusahaan yang bergantung kepada pendapatan KSO (yang berakhir 2010) agar mempunyai *value* di mata investor;
d. Akuisisi dan aliansi bisnis IME sebagai antisipasi sektor telekomunikasi yang cenderung menjadi komoditas (konvergensi *Devices-Network-Application*);
e. Akuisisi internasional untuk mendapatkan skala/manfaat yang besar dan memonetisasi *(monetize)* aset domestik dan internasional.

Selama periode 2006-2011, Telkom telah menetapkan inisiatif-inisiatif penting, yaitu mentransformasikan bisnis Ex-KSO, membangun *value chain* dan fundamental bisnis IME serta meluncurkan inisiasi BIG DEAL. Sejalan dengan penetapan inisiatif tersebut, Telkom menentukan juga pilar-pilar yang menjadi fundamental pelaksanaan pertumbuhan anorganik Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. *New Development*, yang merupakan pengembangan portofolio bisnis melalui pendirian bisnis baru atau ekspansi.
2. *Transformasi*, yang merupakan upaya transformasi bisnis Anak Perusahaan/Eks KSO dengan portofolio bisnis yang baru.
3. Penguatan struktur permodalan Anak Perusahaan agar mampu tumbuh dan mandiri.
4. *Spin off* dan Transfer, yang merupakan upaya penyelarasan, fokus dan pilar bagi pengembangan bisnis (ekspansi) termasuk divestasi bisnis sejenis.
5. Merger dan Akuisisi, yang merupakan langkah konsolidasi atau pembelian suatu unit usaha dalam rangka memperkuat *value chain* bisnis dan menonjolkan potensi Telkom Group serta memposisikan Perusahaan agar tidak tertinggal momentum pertumbuhan atau perubahan bisnis.

Pada tahun 2011, inisiatif ini diwujudkan Telkom melalui sejumlah aksi korporasi, yaitu di antaranya:

1. Pengalihan VSAT IP.
2. Inisiatif *Data Center.*
3. Transformasi Indonusa (lanjutan).
4. Pengembangan Mitratel.
5. Pengembangan PIN.

IMPLEMENTASI STRATEGI

Berdasarkan segmen bisnis, Kami melayani empat segmen, yaitu telepon kabel tidak bergerak, nirkabel tidak bergerak, seluler dan lain-lain.

Segmen telepon kabel tidak bergerak menyediakan sambungan telepon lokal, sambungan langsung jarak jauh ("SLJJ") dan internasional, serta jasa telekomunikasi lain (seperti sewa sirkit, teleks, transponder, satelit dan *Very Small Aperture Terminal* atau VSAT) sebagai jasa pelengkapnya. Kemudian, segmen telepon nirkabel tidak bergerak menyediakan sambungan telepon lokal dan SLJJ berbasis CDMA serta jasa telekomunikasi lainnya. Segmen seluler menyediakan jasa telekomunikasi dasar terutama jasa telekomunikasi telepon seluler. Sementara itu segmen operasi yang tidak melebihi 10% dari pendapatan, dikategorikan sebagai segmen lain-lain yang terdiri dari layanan buku petunjuk telepon dan bisnis pengelolaan gedung. Pada tahun 2011, tidak ada satu pelanggan pun, selain pelanggan interkoneksi dan departemen serta lembaga Pemerintah, yang menyumbangkan lebih dari 1% terhadap jumlah pendapatan usaha. Kami memastikan bahwa bisnis Telkom tidak memiliki bisnis musiman yang signifikan.

Penerapan inisiatif strategis dalam operasional Perusahaan berdasarkan keterkaitan bisnis strategis, portofolio bisnis, *delivery channel* dan investasi internasional dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Portofolio Bisnis Telekomunikasi

Portofolio bisnis telekomunikasi yang dilayani Telkom Group adalah POTS baik sambungan telepon lokal maupun sambungan langsung jarak jauh, sambungan telepon nirkabel tidak bergerak yang terdiri dari *voice*, SMS dan PDN, telepon seluler baik berupa *voice* dan SMS, SLI, layanan *broadband* (bergerak maupun tidak bergerak), layanan jaringan dan menara.

a. Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak

Yang termasuk dalam lini layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak adalah POTS, VAS *fixed wireline*, *intelligent network* ("IN") *service* dan layanan *session initiation protocol* ("SIP"). Setelah sebelumnya mengalami penurunan, pada tahun 2011, Kami berhasil memperbaiki kinerja bisnis ini dengan meluncurkan beberapa program, seperti *point reward* "Telkom Poin Rejeki Tumpah" dan *fixed business improvement program* ("FBIP").

Telkom melayani 8,6 juta pelanggan yang mewakili pangsa pasar sebesar 99,0% dari total penetrasi pasar telepon kabel tidak bergerak di Indonesia sebesar 4,0% per tanggal 31 Desember 2011.

b. Layanan *Broadband* dan Internet

Ini merupakan layanan *dial up* dengan lini produk, terdiri dari TelkomNet instan, FlexiNet, *port wholesale*, Metro I-net, Astinet, *broadband* internet dengan nama komersialnya Speedy dan Flash, hotspot/Wi-Fi dan IP transit. TelkomNet Instan merupakan internet pascabayar kelas premium dengan jangkauan seluruh kota di Indonesia. Jumlah pelanggan TelkomNet Instan pada tahun 2011 mencapai 40,2 ribu, atau menurun 60,9% dari jumlah pelanggan tahun sebelumnya dikarenakan status pelanggan ini masih terhitung sebagai pelanggan baru layanan akses internet yang nantinya diharapkan bermigrasi sepenuhnya ke layanan berbasis *broadband* Telkom Speedy.

Layanan internet *broadband* Telkom dioperasikan salah satunya melalui kabel tembaga yang telah ada dan berbasis teknologi *symmetric digital subscriber line* ("ADSL"). Dominasi Telkom di pasar layanan *broadband* di Indonesia mencapai 12,9 juta pelanggan, dimana layanan data, internet dan teknologi informasi berkontribusi sebesar 33,7% terhadap total pendapatan Perusahaan per tanggal 31 Desember 2011.

Pada tahun 2011, Telkom meluncurkan layanan Flexi Hotspot bagi pelanggan yang ingin memperoleh akses internet berkecepatan tinggi melalui koneksi internet tanpa kabel yang didukung infrastruktur Hotspot Telkom. Layanan dapat diakses dengan mudah dari semua perangkat yang memiliki koneksi Wi-Fi hanya dengan hanya memasukkan username dan password FlexiNet *Unlimited* atau Flexi *Mobile Broadband* yang tersedia di tiap area Hotspot.

Kemudian, Telkom menyediakan fasilitas untuk panggilan internasional dalam paket layanan VoIP premium dengan tarif terjangkau, yaitu melalui "TelkomGlobal-01017", sedangkan panggilan internasional standar dilayani melalui "TelkomSave". Kedua layanan tersebut dapat diakses dengan memutar nomor awalan khusus untuk panggilan internasional. Telkom dalam hal ini bekerja sama dengan delapan *carrier global* yang merupakan *wholesaler* yang mengizinkan Telkom untuk mengkakses jaringan internasional mereka. Diantara delapan *carrier* itu, empat *carrier* dikerjasamakan untuk layanan panggilan keluar, satu untuk panggilan ke dalam dan tiga untuk panggilan keluar dan ke dalam.

Selama tahun 2011, Kami mencatat sebanyak 358,6 juta menit panggilan keluar (menggunakan layanan TelkomSave dan TelkomGlobal-01017) dan panggilan masuk VoIP (dari para mitra global Telkom). Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 47,4 juta menit atau 15,2% pada segmen panggilan VoIP dibandingkan tahun 2010.

Informasi tentang layanan-layanan VoIP Telkom dijelaskan pada tabel berikut:

Jenis	TelkomGlobal-01017	TelkomSave
Dial	Satu Tahap	Dua Tahap
Kualitas/ Teknologi	VoIP Premium	VoIP Standar

c. Layanan Seluler

Pada tahun 2011, Telkomsel melakukan sejumlah program *marketing* layanan seluler dalam rangka promosi sekaligus *brand awareness*. Program promosi tersebut berhasil mengukuhkan posisi Kami di industri telekomunikasi seluler Indonesia menyusul peningkatan jumlah basis pelanggan seluler Telkomsel dari 94,0 juta pelanggan yang tercatat pada akhir tahun 2010 menjadi 107,0 juta pelanggan pada akhir tahun 2011 atau tumbuh sebesar 13,8% atau 13,0 juta pelanggan. Berikut program *marketing* Telkomsel selama tahun 2011:

Program Seluler	Keterangan
Kartu As Rp0	Pada bulan Januari 2011, promosi Kartu As Rp0/menit untuk 30 detik pertama diperpanjang. Promosi ini memberlakukan tarif khusus Rp0 untuk 30 detik pertama dan selanjutnya Rp10 per 30 detik pada pukul 00:00-16:59 untuk pelanggan baru yang mengaktifkan *starter pack* dari tanggal 22 Desember 2010. Pelanggan juga mendapat tambahan 5.000 SMS ke semua operator, Facebook dan *chatting*.
Flash Unlimited	Peluncuran paket layanan *broadband* Flash Unlimited seharga Rp50.000 pada bulan Februari 2011. Bagi pelanggan yang mengaktifkan *starter pack* Flash Unlimited mulai tangal 10 Februari hingga 30 Juni 2011, akan memperoleh akses data 300-800 MB, dengan kecepatan akses maksimum 384 Kbps dan masa aktif 30 hari.
simPATI Gratis Nelpon Berjam-jam	Peluncuran paket baru bebas pulsa untuk produk *simPATI* Freedom yang disebut *simPATI* Gratis Nelpon Berjam-jam pada bulan Maret 2011. Promo berlaku bagi pelanggan yang mengaktifkan *starter pack* mulai dari tanggal 10 Maret 2011, dan setelah dikenakan biaya untuk pemakaian selama satu menit (akumulasi) ke semua nomor Telkomsel, pelanggan akan dapat melakukan panggilan gratis yang bisa digunakan pada pukul 00:00-05:59 dan 06:00-10:59.
simPATI Double TalkMania	Peluncuran versi baru program *simPATI* Double TalkMania pada Maret 2011. Dengan biaya registrasi Rp2.000 per hari (pukul 01:00-18:00) dan Rp3.000 (17:00-24:00), program ini memberikan panggilan 50-100 menit dan tambahan panggilan 100 menit. Tambahan panggilan 100 menit diberikan sehari setelah registrasi dan digunakan pada pukul 00:00-06:00.
Flash Midnight Sale	Pada bulan April 2011, Telkom meluncurkan promo Flash Midnight Sale bagi pengguna Flash, *simPATI* dan Kartu As yaitu pengguna dapat memilih paket akses internet tanpa batas seharga Rp25.000 dan Rp50.000, untuk penggunaan malam hari mulai dari pukul 00:00 -05:59 dengan kecepatan akses 2 Mbps dan masa berlaku selama 30 hari.
Kartu As Ozone	Peluncuran Kartu As Ozone merupakan modifikasi dari Kartu As Rp0/menit yang diluncurkan bulan April 2011, yang menawarkan tarif yang tersegmentasi untuk diwilayah dengan 4 batas waktu (kecuali untuk pelanggan di Papua & Maluku). Telkomsel mengenakan tarif Rp0 untuk 30 detik pertama dan selanjutnya Rp20/menit untuk pemakaian hingga 30 menit pada pukul 00:00-05:59 dan 06:00-10:59 (kecuali untuk pelanggan di Sulawesi & Nusa Tenggara Timur dan Papua & Maluku). Program ini juga memberikan tambahan layanan SMS.
Unlimited Data & BlackBerry *Roaming*	Program Unlimited Data Roaming & Unlimited BlackBerry Roaming diluncurkan pada bulan Mei 2011, yang menawarkan tarif khusus untuk pemakaian *general packet radio service* ("GPRS") *roaming* di 38 negara melalui kerjasama 54 operator di 5 benua.
Speedy Flash	Bekerja sama dengan Telkom dalam meluncurkan promo paket Speedy Flash pada bulan Mei 2011 yang memanfaatkan teknologi DSL and HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS untuk koneksi internetnya.
HALOTalk	Program *HALOTalk* diluncurkan bulan Juni 2011 untuk pelanggan layanan pascabayar *kartuHALO* dengan biaya panggilan per hari *on-net* (ARPU) kurang dari Rp15.000. Pada saat yang sama fitur layanan Halo Cek (CLS) diaktifkan. Program ini menawarkan harga paket yang bervariasi Rp1.000 – Rp15.000 dengan tambahan panggilan 10-150 menit ke seluruh nomor Telkomsel (lokal & non-lokal) hingga pukul 23:59 setiap hari.
Telkomsel Tap Izy	Peluncuran promo Telkomsel Tap Izy pada bulan Juli 2011 sebagai inovasi baru dari layanan T-Cash *(mobile payment)* yang memanfaatkan teknologi *contact less* dengan *Radio Frequency Identification* ("RFID") untuk keamanan transaksi. Dengan menghubungkan perangkat seluler yang berisi *chip* yang dimasukkan ke dalam *sim card (kartuHALO & simPATI)* ke perangkat *terminal reader*, pelanggan dapat bertransaksi secara aman. RF-SIM card dapat dibeli seharga Rp50.000 pada gerai GraPARI. Pembayaran secara tunai atau deposit dapat juga dilakukan di gerai GraPARI atau toko Indomaret dengan biaya Rp25.000 hingga Rp1.000.000.
Kartu As Bonus 60 Menit	Peluncuran paket promo Rp1.000 pada Juli 2011 bagi seluruh pengguna Kartu As dengan tarif Rp0 (dan Ozone) kecuali bagi pelanggan di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Promo ini juga menawarkan layanan bebas panggilan selama 60 menit bagi seluruh pelanggan Telkomsel.
Kartu As Extra Ampuh	Peluncuran paket tarif baru untuk pengguna Kartu As pada bulan Agustus 2011 dengan tujuh zona dan berlaku 24 jam. Promo ini juga menawarkan bonus panggilan selama 300 menit setelah pengguna dikenakan biaya panggilan sebesar Rp25/detik (kecuali pelanggan di Sulawesi) sementara bonus 1.000 SMS diberikan untuk kiriman SMS ke semua operator setelah dikenakan biaya Rp150/SMS.
Kartu As BonbAStis	Peluncuran promo baru bagi pengguna Kartu As dengan tarif Rp0 pada bulan September 2011. Promo ini memberikan pelanggan bonus pemakaian *cashback* dalam bentuk kredit/pulsa setelah melakukan panggilan atau mengirim SMS (*on-network usage*).
Telkomsel Skype Go Mobile	Peluncuran paket data tak terbatas untuk panggilan antar Skype dan layanan *Chat* bagi seluruh pengguna Telkomsel pada bulan Oktober 2011. Aplikasi layanan ini dapat diunduh melalui http://m.skype.com dan mendaftar melalui *363# atau dengan mengetik SMS "SKYPE" dan dikirim ke 3636. Layanan ini dapat diakses melalui 24 tipe perangkat seluler.
simPATI Bonus Surprise	Peluncuran promo baru pada bulan November 2011 bagi semua pengguna layanan *simPATI* dengan akses internet 100 MB dan bonus panggilan 100 menit (*on-network*) setelah melakukan pengisian ulang sebesar minimum Rp10.000.
Facebook SIM *Card*	Peluncuran *starter pack* prabayar baru seharga Rp3.000 pada bulan Desember 2011 yang menawarkan akses mudah ke Facebook dari *handset* dengan bonus pulsa awal Rp3.000, paket data 10MB dan gratis akses ke http://m.facebook.com.
Kartu As Bonus Bicara 30 Jam	Peluncuran promo baru bagi pengguna Kartu As pada bulan Desember 2011 yang menawarkan bonus percakapan untuk digunakan dalam jangka waktu 30 jam (*on-network*) dan ribuan bonus SMS setelah mencapai akumulasi pemakaian.
simPATI Puas 2	Peluncuran promo *simPATI* Puas 2 pada bulan Desember 2011 yang menawarkan paket menarik untuk panggilan, SMS dan akses internet.

d. Layanan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Layanan ini dioperasikan dengan menggunakan teknologi CDMA yang memiliki mobilitas terbatas. Lini produk dan layanan yang termasuk segmen bisnis ini ditawarkan dengan merek dagang "Telkom Flexi" atau "Flexi". Telkom telah membangun sebuah unit bisnis terpisah, yaitu Divisi Telkom Flexi ("DTF"), untuk mengelola segmen bisnis ini.

Pada tahun 2011, Telkom meluncurkan sejumlah produk dan layanan baru, yang dijelaskan berikut ini:

Program Flexi	Keterangan
Flexi Bebas Bicara	Program ini diluncurkan pada bulan Februari 2011 dan berakhir bulan Desember 2011. Program yang menawarkan gratis panggilan lokal dan SLJJ (*Clear Channel* & 01017) ditujukan bagi sesama pelanggan Flexi di Area Jabodetabek-Sekapur-Banten dan kemudian diperluas ke daerah lain di Indonesia. Program ini menawarkan *gimmick* yang berbeda antara satu area dengan lainnya.
Flexi Mobile Broadband	Program ini diluncurkan pada bulan Oktober 2011. Program yang menawarkan akses internet berbasis teknologi *evolution data optimize* ("EVDO") pada awalnya hanya menjangkau 7 (tujuh) kota, yaitu Medan, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Denpasar, Banjarmasin dan Makasar. Kemudian, diperluas ke 3 (tiga) kota besar lainnya, yaitu Yogyakarta, Surabaya dan Malang.

Paket EVDO *Speed (up to)*		Promo (1.200 KBps)	*Get* (300 KBps)	*Set* (600 KBps)	*Go* (1.200 KBps)
Harian	Tarif	2.500	2.500	5.000	8.000
	FUP (MB)	500	500	750	1.000
Mingguan	Tarif	15.000	15.000	30.000	45.000
	FUP (MB)	1.000	1.000	1.600	2.000
Bulanan	Tarif	50.000	50.000	80.000	120.000
	FUP (MB)	3.000	3.000	4.000	5.000

Flexi Android	Program ini diluncurkan dalam paket *bundling* Flexi dan *handset smartphone* berbasis sistem operasi Android. Program ini digunakan untuk mengakses Flexi *Mobile Broadband*. Pelanggan dapat memperoleh *gimmick* seperti *Free* Flexi *Mobile Broadband* selama satu bulan dan Flexi Bebas Bicara 100 menit lokal F2F dan SLJJ 01017 selama 30 hari untuk pembelian paket *handset* Flexi Android ZTE Blade.
Flexi Market	Program ini merupakan toko aplikasi *online* yang menawarkan berbagai aplikasi untuk perangkat Flexi berbasis sistem operasi Android. Fitur-fitur yang ditawarkan: • *Online Application Store* yang menawarkan *Applications, Games, Music, Books,* dan sebagainya. • *Online Transaction* yang memfasilitasi pengguna Flexi untuk mengunduh atau membeli aplikasi yang tersedia di Flexi Market langsung dari *handset* Flexi. • *Direct Billing Capability* yang memfasilitasi pengguna Flexi untuk membayar aplikasi yang dibelinya dari Flexi Market secara *online* dengan mengurangi pulsa pelanggan prabayar atau menagihkan pada lembar tagihan pelanggan pascabayar. • *Advertisement Platform* yang menawarkan pengiklan untuk memasang iklan pada *top banner* di halaman Flexi Market. • *3rd Party & Community Support* yang terbuka untuk para penyedia layanan konten (*Content Provider/CP*) dan komunitas pengembang menggunakan *Application Programming Interface* Google Android dan proses integrasi mudah. • Unduh dan *Sales Statistics* yang memfasilitasi para pengembang dan CP anggota Flexi Market untuk melihat performa mereka melalui statistik yang dapat diunduh secara *online*, serta mengetahui pendapatan yang menjadi haknya dan menagihnya secara *online*.

Ke depannya, Telkom berkomitmen untuk terus meningkatkan performa Telkom Flexi sehingga mampu menjadi pemimpin di bisnis sambungan telepon nirkabel tidak bergerak, salah satunya melalui sinergi yang menguntungkan dengan lini produk dan layanan Telkom lainnya, kemitraan strategis hingga menjajaki rencana merger dengan operator sambungan telepon nirkabel tidak bergerak lainnya guna memperluas pangsa pasar. Sinergi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pendapatan Perusahaan yang sebagian besar masih didominasi dari layanan seluler.

e. Layanan Interkoneksi

Sebagai operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Telkom juga memperoleh pendapatan dari perusahaan operator telekomunikasi lainnya yang memanfaatkan jaringan Telkom.

Sebagai hasil dari pelaksanaan pola interkoneksi berbasis biaya, pada bulan Desember 2006 Telkom memasuki perjanjian interkoneksi baru dengan para operator jaringan domestik lainnya. Perjanjian baru ini mempertegas persyaratan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") Telkom.

Pada tanggal 5 Februari 2008, Pemerintah menerbitkan regulasi mengenai penyesuaian tarif yang mengacu pada tarif interkoneksi berbasis biaya pada 1 Januari 2007. Aturan ini mewajibkan Telkom dan Telkomsel bersama 10 operator telekomunikasi lainnya di Indonesia untuk menyesuaikan tarif interkoneksi sesuai regulasi baru paling lambat tanggal 1 April 2008. Pada tanggal 11 April 2008, Pemerintah menyetujui DPI dari operator dominan (operator yang menguasai pangsa pasar lebih dari 25%), di mana Telkom dan Telkomsel termasuk dalam kategori operator dominan, sebagai acuan untuk melakukan penyesuaian tarif interkoneksi berbasis biaya.

Kemudian dalam siaran pers tanggal 30 Desember 2010, Pemerintah kembali menetapkan agar operator-operator telekomunikasi menerapkan hasil perhitungan biaya interkoneksi untuk tahun 2011 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sebagai acuan untuk tarif interkoneksi berbasis biaya yang baru

	Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
	(juta menit)				
Interkoneksi Telepon Seluler[1]					
Menit Masuk Berbayar	4.970,0	6.626,9	5.748,5	4.924,0	4.777,2
Menit Keluar Berbayar	7.251,8	5.879,4	4.622,9	3.973,9	3.462,3
Interkoneksi Sambungan Tidak Bergerak[2]					
Menit Masuk Berbayar	923,5	1.362,3	1.547,8	1.414,9	999,6
Menit Keluar Berbayar	1.437,1	1.988,5	1.910,6	1.502,2	1.097,0
Interkoneksi Telepon Satelit					
Menit Masuk Berbayar	5,1	3,2	1,8	1,3	0,6
Menit Keluar Berbayar	2,3	1,6	1,0	0,8	0,4
Interkoneksi Internasional[3]					
Menit Masuk Berbayar	1.208,5	1.409,8	1.475,4	2.046,7	2.504,1
Menit Keluar Berbayar	162,9	165,5	160,4	161,2	158,3
Jumlah					
Menit Masuk Berbayar	7.107,2	9.402,1	8.773,6	8.386,8	8.281,6
Menit Keluar Berbayar	8.854,1	8.035,0	6.695,0	5.638,2	4.718,0

(1) Termasuk interkoneksi dengan Telkomsel.
(2) Menit interkoneksi telepon tidak bergerak mencerminkan interkoneksi dengan jaringan PT Bakrie Telecom (semula PT Radio Telepon Indonesia atau Ratelindo), PT Batam Bintan Telekomunikasi, Indosat mulai 2004, dan Mobile 8 Phone mulai 2008.
(3) Menit interkoneksi internasional didapat dari interkoneksi dengan jaringan internasional Indosat mulai tahun 2004, dan juga didapat dari interkoneksi dengan jaringan Internasional Bakrie Telkom mulai 2009 (panggilan masuk dan keluar juga menggunakan TIC-007)

Menit berbayar Telkomsel tahun 2007 – 2011 sebagai berikut:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
	(juta menit)				
Menit Masuk Berbayar	2.663,2	3.637,6	3.379,6	2.857,1	2.697,4
Menit Keluar Berbayar	4.188,0	3.270,6	2.611,9	2.184,5	1.895,0

f. Layanan Jaringan

Telkom mengelola secara langsung penyediaan layanan jaringan bagi pelanggan yang merupakan mitra usaha, pelaku bisnis dan operator telekomunikasi pemegang lisensi lainnya. Kami menyediakan layanan sewa transponder satelit, siaran satelit, VSAT, distribusi audio, sirkit langganan berbasis satelit dan teresterial. Pelanggan layanan jaringan Telkom dapat membuat perjanjian untuk memperoleh layanan singkat seperti siaran beberapa menit atau perjanjian untuk jangka waktu yang lama untuk periode layanan satu sampai lima tahun.

Selain itu, Kami juga memiliki usaha pendukung lainnya, yaitu usaha penyediaan menara untuk sarana pemasangan *Base Transceiver Station* ("BTS") bagi operator seluler. Kami mengelola usaha ini melalui Anak Perusahaan kami, Mitratel.

g. Perjanjian Pola Bagi Hasil ("PBH")

Telkom memiliki perjanjian terpisah dengan beberapa penanam modal berdasarkan perjanjian pola bagi hasil dalam rangka mengembangkan jasa telepon tidak bergerak, telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya) dan fasilitas-fasilitas pendukung telekomunikasi terkait. Rincian lebih lanjut tentang skema PBH, lihat Catatan 39 pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

2. Portofolio Bisnis NEB dan *Strategic Opportunities*

Telkom mengkualifikasikan portofolio bisnis IME sebagai *New Economic Business* ("NEB") dan *strategic opportunity* dengan ragam layanan informasi yang terdiri dari VAS, MAP, e-Payment, dan ITeS. Media terdiri dari Pay TV dan FTA. *Edutainment* terdiri dari RBT, SMS Konten, portal dan lain-lain. Telkom dalam hal ini telah menunjuk Anak Perusahaannya, Metra, sebagai *sub-holding* yang akan fokus menangani pengembangan bisnis IME Telkom Group.

INFRASTRUKTUR JARINGAN

Sejalan dengan transformasi bisnis Perusahaan dan transformasi infrastruktur jaringan, Telkom meningkatkan infrastruktur jaringan untuk mewujudkan Telkom One Network, dimana dimaksudkan untuk dikembangkan menjadi jaringan bersama unit Telkom, terutama Telkomsel. Pengembangan jaringan menggunakan konsep "Telkom One" bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyebaran sumber daya, misalnya Telkomsel dapat memanfaatkan sumber daya jaringan Telkom dimana diperlukan kapasitas lebih besar guna memenuhi permintaan. Hal ini juga untuk mendukung transformasi infrastruktur jaringan Telkom yang berkualitas, efisien dan *cost competitive* dalam memberikan layanan TIME. Transformasi infrastruktur ini terdiri dari aspek:

a. Transformasi layanan, dengan mengedepankan dukungan terhadap layanan *multiplay* dan konvergensi dengan *broadband* sebagai penggerak utamanya;
b. Transformasi jaringan, yang mengarah pada *all IP Networks* serta konvergensi infrastruktur Telkom Group melalui implementasi IMS (IP Multimedia SubSystem);
c. Transformasi operasional, dengan mencapai pelaksanaan operasional yang lebih efisien dan fokus pada penanganan pengalaman pelanggan; dan
d. Transformasi OBCE, dengan menekankan pada transformasi teknologi informasi dan sistem.

Telkom telah berhasil menyelesaikan proyek kabel bawah laut dan kabel serat optik JaKaLaDeMa yang menyambungkan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar dan Mataram pada April 2010.

Sambungan Telepon Tidak Bergerak dan *Backbone*

a. Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak

Sambungan telepon kabel tidak bergerak Telkom terdiri dari hirarki sentral telepon lokal sampai sentral jarak jauh. Melalui jaringan ini, lokasi pelanggan Kami terhubung dengan sentral telepon lokal melalui fasilitas yang dinamakan *outside plant,* yaitu berupa jaringan kabel (serat optik dan tembaga) dan penghubung transmisi lokal nirkabel, serta fasilitas-fasilitas distribusi yang menghubungkan mereka.

Per tanggal 31 Desember 2011, Telkom mengelola 8,6 juta sambungan telepon kabel tidak bergerak. Namun guna merespon *Master Plan* Layanan dan Operasional (INSYNC2014 tahun 2008-2014), Kami menargetkan untuk melakukan transisi secara bertahap dari jaringan *legacy* ke NGN yang mencakup infrastruktur, metode layanan *new wave* dan operasi jaringan termasuk modernisasi jaringan infrastruktur sampai semua infrastruktur IP. Target Telkom adalah untuk menjadi penyedia layanan NGN yang lengkap pada tahun 2014

Tabel berikut menyajikan data sambungan telepon nirkabel tidak bergerak sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011:

Statistik Operasi	2007	2008	2009	2010	2011
Kapasitas sentral	10.732.304	11.038.818	11.094.063	11.237.229	12.180.214
Sambungan terpasang	9.704.576	9.838.537	10.013.565	10.510.048	11.005.208
Sambungan terpakai(1)	8.684.888	8.629.783	8.376.793	8.302.818	8.688.526
Sambungan berbayar	8.324.197	8.302.730	8.038.294	7.980.337	8.323.175
Telepon umum	360.691	327.053	338.499	322.481	278.505
Sambungan sirkit sewa terpakai(2)	6.338	6.084	4.273	3.988	3.662
Produksi pulsa telepon kabel tidak bergerak kabel (juta)(3)	75.451	62.940	54.186	9.403(5)	8.054(5)
Tingkat kegagalan(4)	3,8	3,5	3,1	2,5	2,2

(1) Sambungan terpakai terdiri dari sambungan pelanggan dan telepon umum, juga termasuk sejumlah sambungan yang Kami operasikan untuk pola bagi hasil.
(2) Tidak termasuk sirkit sewa untuk jaringan dan bisnis multimedia.
(3) Terdiri dari pulsa panggilan lokal dan SLJJ, tidak termasuk telepon umum dan telepon seluler.
(4) Kesalahan per 100 kali sambungan setiap bulan.
(5) Dalam jutaan menit untuk tahun 2010 dan 2011.

Tabel berikut menyajikan informasi jaringan telepon tidak bergerak di tiap area yang melayani segmen pelanggan pada tanggal 31 Desember 2011:

	Area Sumatera	Area Jakarta	Area Jawa Barat dan Banten	Area Jawa Tengah & Jogjakarta	Area Jawa Timur	Area Kalimantan	Area Indonesia Timur	Jumlah
Kapasitas sentral lokal	1.435.014	3.947.821	1.918.052	1.222.573	1.966.263	615.138	1.075.353	12.180.214
Total sambungan terpakai	1.192.960	3.003.752	810.170	827.076	1.494.643	453.657	906.268	8.688.526
Kapasitas penggunaan (%)(1)	83,1	76,1	42,2	67,7	76,0	73,7	84,3	71,3
Sambungan terpasang	1.601.598	3.764.827	877.513	1.066.114	2.037.752	568.979	1.088.425	11.005.208
Tingkat utilisasi (%)(1)	74,5	79,8	92,3	77,6	73,3	79,7	83,3	78,9
Populasi (juta)(2)	51,5	20,7	43,9	36,0	37,8	14,1	37,4	241,4
Tingkat penetrasi Telkom (%)(3)	2,3	14,5	1,8	2,3	4,0	3,2	2,4	3,6

(1) Kapasitas penggunaan (sambungan terpakai/kapasitas sentral) dan tingkat utilisasi (sambungan terpakai/sambungan terpasang) kabel tidak bergerak.
(2) Sumber: jumlah indeks dari Badan Pusat Statistik Indonesia (angka perkiraan).
(3) Penetrasi Telkom berdasarkan perkiraan populasi.

b. Sambungan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Telkom mempunyai infrastruktur sambungan telepon nirkabel tidak bergerak yang terdiri dari *Mobile* Switching *Center* ("MSC") yang terhubung dengan setiap sentral trunk lainnya. Setiap MSC terkait dengan *Base Station Sub* System ("BSS") yang terdiri dari *Base Station Controller* ("BSC") dan *Base Transceiver Station* ("BTS"). Semuanya menghubungkan perangkat telepon genggam dan terminal telepon nirkabel tidak bergerak pelanggan ke sambungan telepon nirkabel tidak bergerak Telkom.

Jumlah sambungan aktif telepon nirkabel tidak bergerak Telkom menurun dari 18,2 juta pada tahun 2010 menjadi sekitar 14,2 juta pada tahun 2011

Tabel berikut menyajikan data sambungan telepon nirkabel tidak bergerak sejak tahun 2007:

	Sampai dengan akhir 31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Kapasitas sentral (MSC)(2)	12.831.841	15.885.020	23.393.631	24.048.993	33.261.850
Sambungan terpasang (BTS)(2)	9.383.924	19.861.324	27.653.553	27.344.151	27.635.751
Sambungan terpakai(1)	6.362.844	12.725.425	15.139.057	18.161.278	14.237.522
Sambungan berbayar	6.335.452	12.698.827	15.115.892	18.142.955	14.221.413
Telepon umum	27.392	26.598	23.165	18.323	16.109
Produksi pulsa telepon nirkabel tidak bergerak/produksi menit (juta)(3)	9.144	12.304	14.627	11.768	7.931

(1) Sambungan terpakai terdiri dari sambungan pelanggan dan telepon umum, termasuk sambungan yang Kami operasikan untuk pola bagi hasil.
(2) Kapasitas BTS dan MSC pada 2007 dan 2008 dihitung dengan asumsi trafik percakapan per pelanggan sebesar 30 mE.
(3) Berisi menit pemakaian dari panggilan-panggilan lokal dan SLJJ, kecuali panggilan melalui telepon umum koin dan telepon seluler bergerak.

c. Jaringan Broadband *(Backbone)*

Pengembangan jaringan *broadband* merupakan fokus utama Kami selama tahun 2011 karena perannya sebagai *backbone* infrastruktur Telkom Group secara keseluruhan. Jaringan telekomunikasi *backbone* terdiri dari transmisi, sentral *(switching)* jarak jauh dan *core routers* yang menghubungkan beberapa akses *node*. Sambungan-sambungan transmisi antara *node* dan fasilitas *switching* mencakup transmisi terestrial, yaitu serat optik, gelombang mikro, kabel bawah laut, transmisi satelit, kabel serat optik dan teknologi transmisi lainnya.

Tabel berikut ini menunjukkan kapasitas transmisi backbone per tanggal 31 Desember 2010 dan 2011:

2010	Kapasitas (jumlah sirkit medium transmisi)				
	E1	STM-1	STM-4	STM-16	STM-64
Jaringan transmisi terestrial					
Kabel serat optik	25.467	319	46	26	121
Gelombang mikro	4.566	16	-	-	-
Kabel bawah laut	2.368	37	7	-	10
Jaringan transmisi satelit	666	-	-	-	-
Jumlah	**33.067**	**372**	**53**	**26**	**131**

2011	Kapasitas (jumlah sirkit medium transmisi)				
	E1	STM-1	STM-4	STM-16	STM-64
Jaringan transmisi terestrial					
Kabel serat optik	23.891	327	49	27	194
Gelombang mikro	4.456	16	-	-	-
Kabel bawah laut	2.245	37	7	-	14
Jaringan transmisi satelit	680	-	-	-	-
Jumlah	**31.272**	**380**	**56**	**27**	**208**

Catatan : Satuan transmisi *backbone* menggunakan satuan E1, STM1 (setara dengan 63 E1), STM4 (setara dengan 4 STM1), STM16 (setara dengan 4 STM4), dan STM64 (setara dengan 4 STM16). STM *(Synchronous Transfer Mode)* yang merupakan satuan transmisi yang umum diterapkan pada jaringan transmisi *backbone*. Untuk memfasilitasi layanan broadband, dibutuhkan jaringan transmisi berkapasitas besar dengan satuan nxSTM-1. Satuan E1 digunakan untuk mendukung layanan *legacy*

Perusahaan mengoperasikan satelit Telkom-1 dan Telkom-2 beserta 205 stasiun bumi, termasuk satu stasiun master kendali satelit. Satelit Telkom-1 mempunyai kapasitas 36 transponder, termasuk 12 *transponder extended* C-band dan 24 transponder C-band standar, sedangkan satelit Telkom-2 mempunyai berkapasitas 24 transponder C-band standar. Kami menggunakan kedua satelit itu untuk hal-hal sebagai berikut:

- Jaringan transmisi *backbone*;
- Telekomunikasi daerah terpencil;
- Kapasitas transmisi cadangan untuk jaringan telekomunikasi nasional;
- Pemancaran satelit, VSAT dan layanan-layanan multimedia;
- Penyewaan kapasitas transponder satelit;
- Sewa sirkit berbasis satelit; dan
- Teleport (layanan *uplinking* dan *downlinking* stasiun bumi ke dan dari satelit-satelit lain).

Sebagai tambahan, dari dua satelit yang kini digunakan, Telkom juga menyewa beberapa transponder dari penyedia layanan satelit lainnya, seperti GE 23 dengan sebelas transponder, star-1 dengan dua transporder Sinosat dengan dua transponder, dan JCSaT5a dengan sepuluh transponder.

Telkom menyediakan sewa transponder satelit, siaran satelit, VSAT, distribusi audio, sirkit langganan berbasis satelit dan terestrial. Pelanggan layanan jaringan Kami terdiri dari para pelaku bisnis dan operator telekomunikasi lain. Pelanggan dapat mengadakan perjanjian untuk layanan singkat seperti siaran beberapa menit atau perjanjian untuk jangka waktu yang lama untuk periode layanan satu sampai lima tahun. Tarif maksimum tahunan per transponder adalah US$1,20 juta, meskipun dalam beberapa hal Telkom juga menawarkan tarif dengan potongan harga untuk komitmen jangka panjang atau untuk pelanggan setia.

Mengantisipasi pertumbuhan permintaan layanan satelit dan untuk mendukung strategi bisnis Telkom dalam menyediakan layanan TIME, pada tanggal 2 Maret 2009, Telkom telah menandatangani kontrak untuk pengadaan Sistem Satelit Telkom-3 dengan perusahaan Joint Stock Company Academician M.F. Reshetnev Information Satellite

Systems ("ISS Reshetnev") dari Rusia. Dengan nilai investasi sebesar kurang lebih US$200 juta, satelit Telkom-3 akan menambah kapastitas transponder Telkom sebanyak 42 transponder aktif. Jumlah ini setara dengan 49 transponder dengan BW 36 MHz.

Satelit Telkom-3 yang direncanakan akan diluncurkan pada triwulan-2 tahun 2012 terdiri dari 24 transponder Standard C-band, 8 transponder extended C-Band dan 10 transponder Ku-Band. Cakupan geografis satelit Telkom-3 meliputi Indonesia dan ASEAN (Standar C-Band), Indonesia dan Malaysia (Ext. C-Band) serta Indonesia (Ku-Band). Dari 42 transponder Satelit Telkom-3 sebesar 40 - 45% atau sekitar 20 transponder akan dikomersialkan, sedangkan sisanya digunakan untuk menambah kapasitas seluruh layanan Telkom.

Jaringan Seluler

Layanan seluler Kami yang dioperasikan oleh Anak Perusahaan, Telkomsel, memiliki cakupan terbesar dibandingkan operator seluler lainnya di Indonesia. Saat ini Telkomsel mengoperasikan layanan pada jaringan GSM/DCS, GPRS, EDGE serta 3,5G. Jaringan GSM/DCS terdiri dari *bandwidth* 7,5 MHz pada frekuensi 900 MHz dan *bandwidth* 22,5 MHz pada frekuensi 1.800 MHz. Kedua jaringan tersebut beroperasi sebagai sebuah jaringan *dual band* yang terintegrasi. Jaringan 3G Telkomsel memanfaatkan *bandwidth* 10 MHz pada frekuensi 2,1 GHz.

Per tanggal 31 Desember 2011, jaringan digital Telkomsel diperkuat oleh infrastruktur yang terdiri dari 42.623 BTS dengan kapasitas keseluruhan jaringan yang mampu memfasilitasi kebutuhan komunikasi bagi 107 juta pelanggan.

Jaringan Data dan Internet

Telkom mulai mengoperasikan layanan jaringan data pada tahun 1997 serta terus mengembangkan dan memperluas jaringannya secara progresif. Per tanggal 31 Desember 2011, jaringan berbasis-IP Telkom mencakup 2.856 lokasi dengan 2.977 *node router* dalam lingkup nasional. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kecepatan akses maupun kualitas jaringan berbasis-IP. Jaringan berbasis-IP ini berfungsi sebagai jaringan penghubung yang digunakan untuk memfasilitasi layanan VPN berkualitas tinggi, VoIP, *dial-up* serta layanan internet *broadband*. Telkom memiliki server dengan akses jarak jauh *(remote access server)* di 117 lokasi dengan 167 *node* dalam lingkup nasional yang digunakan sebagai layanan internet *dial-up* "TelkomNet Instan" dan layanan internet *dial-up* Perusahaan.

Kami telah menyediakan layanan akses *broadband* berbasis telepon kabel tidak bergerak dengan nama dagang "Speedy" berbasis teknologi ADSL sejak 2004. Per tanggal 31 Desember 2011, Telkom melayani 2,0 juta pelanggan Speedy dengan pertumbuhan sebesar 23,4% dibandingkan per tanggal 31 Desember 2010 lalu sebesar 1,6 juta pelanggan. Kecepatan *bandwith* Speedy untuk keperluan *download* paling tinggi mencapai 3 Mbps.

Selain itu, Telkomsel juga menyediakan layanan *broadband* dengan nama dagang "Flash". Per tanggal 31 Desember 2011, Kami melayani 5,5 juta pelanggan. dengan pertumbuhan sebesar 45,7% dibandingkan 3,8 juta pelanggan per tanggal 31 Desember 2010.

Jaringan Internasional

Untuk memfasilitasi layanan SLI, yakni "SLI-007", baik untuk panggilan keluar maupun panggilan masuk, Telkom mengoperasikan *gateway* internasionalnya yang berada di Batam, Jakarta dan Surabaya yang tersambung dengan jaringan domestik yang handal. Sampai saat ini Telkom belum berencana untuk mengembangkan *gateway* baru.

Kami telah melakukan pengembangan atas infrastruktur jaringan internasional sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan kapasitas, meningkatkan kehandalan, efisiensi investasi dan pertimbangan untuk transformasi infrastruktur berbasis NGN. Dalam pengembangan *service nodes*, Telkom akan mengembangkan *softswitch* untuk mendukung layanan internasionalnya.

Jaringan internasional Kami didukung oleh Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL"), Dumai-Malaka Cable System ("DMCS"), Thailand-Indonesia-Singapore ("TIS"), hak pakai yang tidak dapat dibatalkan (*Indefeasible Right of Use*, "IRU"), radio perbatasan berbasis *microwave* dan satelit. Dalam rangka mengembangkan dan memperkokoh jaringan internasional dan memperluas layanan *broadband*, Telkom juga bergabung dalam konsorsium kabel AAG untuk menyediakan *bandwidth* 40Gb dengan porsi investasi awal sebesar US$48 juta pada bulan April 2007 untuk pembangunan Batam Singapore Cable System ("BSCS") sebagai *extended* AAG yang menghubungkan Batam dengan Singapore. Pada tahun 2012 akan dilakukan *upgrade* kapasitas AAG sebesar 120 Gbps untuk jalur utama Singapore-Hongkong-US. Perusahaan juga memiliki sebuah rencana jangka panjang untuk mengembangkan akses internasional ke wilayah Indonesia Timur di samping bertujuan untuk menciptakan variasi layanan dan meraih peluang bisnis di Asia Selatan, Timur Tengah dan Eropa.

Selain ekspansi infrastruktur, Perusahaan telah mengadakan perjanjian layanan telekomunikasi internasional dengan operator di beberapa negara untuk memfasilitasi interkoneksi panggilan internasional. Selain itu, karena Perusahaan tidak memiliki perjanjian dengan operator telekomunikasi di setiap tempat tujuan SLI, Telkom pun mengantisipasinya melalui kesepakatan yang dibuat dengan SingTel, Telekom Malaysia, Verizon, Belgacom, NTT, TIS, France Telecom, dan operator lainnya sehingga para operator telekomunikasi tersebut dapat berfungsi sebagai penghubung untuk mengalihkan panggilan internasional

ke tempat tujuan mereka. Per tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah mengadakan perjanjian layanan telekomunikasi internasional dengan 65 operator internasional di 26 negara, dibandingkan dengan 33 operator internasional di 20 negara pada tanggal 31 Desember 2010. Perusahaan berencana mengadakan perjanjian layanan telekomunikasi internasional tambahan dengan operator telekomunikasi lainnya guna melayani interkoneksi secara langsung, terutama operator di 20 tempat tujuan teratas untuk trafik SLI *outgoing*.

PENGEMBANGAN JARINGAN

a. Pengembangan Jaringan Telepon Tidak Bergerak

Pada tahun 2011, Telkom memperkuat infrastruktur NGN seiring dengan Rencana Induk INSYNC2014 untuk mewujudkan *Next Generation National Backbone Network* yang mendukung layanan "*Broadband for Digital Home*", "*Broadband for Enterprise*" dan "*Broadband Anywhere*".

Beberapa poin utama pengembangan sambungan telepon tidak bergerak selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Nama Proyek	Penjelasan
Proyek Jawa-Sumatera-Kalimantan (Jasuka)	Infrastruktur *backbone* bawah laut Jasuka terus dilakukan ekspansi kapasitasnya untuk mendukung kebutuhan internet domestik dan internasional serta kebutuhan Telkomsel. Selama tahun 2011 kapasitas tambahan yang telah selesai dibangun sebesar 15 lambda (150Gb) untuk *Ring* 3, 4 lambda (40Gb) untuk *Ring* 1A, dan 2 lambda (20 Gb) untuk *Ring* 2.
Proyek Palapa Ring Mataram-Kupang	Sejak kesepakatan untuk pengadaan dan instalasi Palapa Ring sistem kabel laut Mataram-Kupang yang ditandatangani pada tanggal 24 November 2009, Telkom telah menyelesaikan pembangunan transport *backbone* bawah laut Mataram ke Kupang pada bulan November 2011 dengan kapasitas awal 40Gb. Proyek ini akan menghubungkan jaringan antara Mataram dan Kupang yang akan menghubungkan Pulau Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. Pada proyek ini akan ditambah dengan pembangunan transportasi *backbone* kabel darat Kupang-Atambua yang direncanakan selesai pada bulan Mei 2012.
Pembangunan dan Modernisasi Broadband Access dengan Pola *Trade In Trade Off* ("TITO")	Untuk dapat membangun *Broadband Access* dengan kapasitas yang sangat besar, mulai tahun 2011, Telkom merintis Pembangunan dan Modernisasi *Broadband Access* dengan Pola TITO *(Trade In Trade Off)*. Dengan pola TITO ini dilakukan program pertukaran dari kabel tembaga saat ini menjadi kabel serat optik dan perangkat aktif teknologi terkini seperti MSAN, GPON, dan FTTx. Dalam pembangunan dengan pola TITO ini Telkom bekerja sama dengan PT INTI dan PT LEN. Sampai saat ini, Telkom sudah berhasil memigrasikan pelanggan saat ini dengan program TITO sejumlah 64.352 SST dari kapasitas total yang dibangun 386.598 SST yang sisanya akan diselesaikan pada bulan Maret 2012. Untuk tahun 2012 akan dilanjutkan dengan pembangunan sebanyak 41 sentral office dengan PT INTI dan 25 sentral *office* dengan mitra ke-2 dengan kapasitas total 2,27 juta SST.
Pembangunan *Broadband Access* dengan *Platform* MSAN	Telkom membangun *platform* jaringan *broadband* melalui MSAN untuk sambungan telepon tidak bergerak sebanyak 313.893 sambungan untuk proyek tahun 2009 dan 299.936 sambungan untuk proyek tahun 2010. Saat ini terdapat 3 platform MSAN yang memberikan cakupan nasional. Pada tahun 2011, proyek MSAN dengan *platform broadband* telah diselesaikan sebanyak 496.664 SST.
Proyek Pembangunan *Gigabyte-Passive Optical Network* ("GPON")	Telkom memperluas GPON pada tahun 2011 sebanyak 40.735 ONT, dimana di antaranya untuk mendukung *deployment node* B, serta FTTH. Rencana pada tahun 2012 akan dilanjutkan kembali perluasan pembangunan infrastruktur *broadband* akses yang akan memprioritaskan penggunaan teknologi GPON untuk memperluas implementasi jaringan FTTH *(Fiber To The Home)*.
Pembangunan IMS *(IP Multimedia Subsystem)*	Pembangunan IMS dalam rangka transformasi infrastruktur yang bertujuan untuk memodernisasi *service node* dengan kapabilitas IP, konvergensi serta *enabler new service* berbasis aplikasi, sehingga dapat menginterasikan *New Customer & Migration Customer*. Pada tahun 2011 dilakukan pembangunan infratruktur skala lab untuk demo serta inovasi layanan. Tahun Pada tahun 2012 akan dilanjutkan rencana pembangunan sistem secara komersial yang akan selesai pada bulan Agustus 2012.
Proyek TSCS (Tarakan Sangata Cable System), SBCS (Sumatera Bangka Cable System)	Untuk menambah kapasitas dan membentuk transportasi *backbone* dengan keandalan yang tinggi, pada tahun 2011 Telkom mulai membangun transportasi bawah laut Sumatra-Bangka dan Tarakan-Sangata. Proyek TSCS dan SBCS ini dalam tahap pembangunan yang akan selesai di akhir tahun 2012.
Proyek Satelit Telkom-3	Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari pangsa pasar satelit, Telkom sedang membangun Satelit Telkom-3 yang akan memiliki 42 transponder aktif yang setara dengan 49 transponder dengan BW 36MHz dengan cakupan geografis meliputi Indonesia dan ASEAN (Standar C-Band), Indonesia dan Malaysia (Ext. C-Band) serta Indonesia (Ku-Band). Satelit Telkom-3 akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2012.
Proyek DWDM Regional	Untuk dapat memenuhi kebutuhan internet domestik yang cukup besar di segmen metro regional, mulai tahun 2011 Telkom membangun transportasi DWDM sampai *level* metro regional pada wilayah pulau Jawa sebanyak 22 *node*. Proyek DWDM regional ini akan selesai pada akhir tahun 2012.
Implementasi Telkom *Cache System*	Telkom mulai membangun Telkom *Cache System* di jaringan internet dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan *bandwidth* internet internasional serta meningkatkan kualitas performansi layanan internet. Pembangunannya direncanakan selesai pada bulan April 2012.

Sebagai upaya lebih lanjut untuk memperkokoh layanan TIME, Telkom berencana untuk:

1. Terus mengimplementasikan dan mentransformasikan jaringannya sesuai dengan tiga visi implementasi *broadband* Telkom yaitu *Home Digital Environment*, *Enterprise Broadband, dan Broadband Anywhere*;
2. Terus meningkatkan kemampuan jaringan *full IP transport* melalui program: peningkatan *bandwidth* internet domestik & internasional, ekspansi Terra IP *backbone*, ekspansi IP *over* Lambda berbasis 10Gb, 40Gb dan selanjutnya berbasis 100Gb per lambda, melakukan sinergi jaringan Telkom Group menuju *converged* dan *single transport*, melanjutkan pembangunan *Metro Ethernet* yang difungsikan sebagai jaringan *single transport metro* untuk menyediakan layanan-layanan berbasis IP dan *multiplay*, melanjutkan implementasi *Fiber To The Home* ("FTTH") dan GPON, serta melanjutkan migrasi kabel tembaga yang telah ada dengan mekanisme TITO.
3. Mengimplementasikan *Smart Core* melalui program layanan konvergen *platform* berbasiskan *IP-Multimedia Subsystem* ("IMS"), mengimplementasikan *database* profil pelanggan terpadu, serta *Service Delivery Platform* ("SDP") sebagai *service brokerage & orchestration.*
4. Memperluas jangkauan akses *broadband* sampai dengan pelanggan *Enterprise* dan Residensial melalui rangkaian program *Managed Enterprise Services*, *Managed Smart Customer Premises Equipment* ("CPE"), *Home Automation, Surveillance,* dan *Home Interconnect*.

   Untuk rincian komitmen dan kontrak Telkom lainnya yang signifikan lihat Catatan 41 di Laporan Keuangan Konsolidasian.

b. Pengembangan Jaringan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Divisi sambungan telepon tidak bergerak *Fixed Wireless Network* ("FWN") secara resmi menjadi divisi tersendiri pada tahun 2009, yang saat ini dikenal sebagai Divisi Telkom Flexi ("DTF").

Pada tahun 2011, DTF mengoptimalkan BTS *existing* yang telah ada dengan salah satu kegiatan adalah melakukan relokasi BTS dari area *low occupancy* ke area *inner city* dengan maksud untuk meningkatkan utilisasi. Secara total, jumlah BTS per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebanyak 5.718 dengan total kapasitas 33,3 juta satuan sambungan Flexi.

Pada tahun 2011, DTF juga mengembangkan layanan Flexi *Mobile Broadband* ("FMB") untuk meningkatkan layanan Flexi berbasis *Network Evolution Data Optimization* ("EVDO"). Pembangunan jaringan EVDO dilakukan di 10 kota yang meliputi kota-kota: Medan, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin dan Makasar. Jumlah BTS EVDO yang dibangun pada tahun 2011 adalah sebesar 1.123 BTS dengan jumlah kapasitas 281.203. Disamping itu juga telah dilakukan beberapa program yang dapat meningkatkan efisiensi beban operasional seperti memulai pengimplementasian *free cooling* dan *hydrocarbon* untuk efisiensi biaya listrik.

c. Pengembangan Jaringan Seluler

Jangkauan layanan telepon seluler berbasis GSM yang diberikan oleh Anak Perusahaan Kami, Telkomsel, merambah ke semua kota/kabupaten di Indonesia. Pada tahun 2011, Telkomsel telah menambah perangkat 6.066 BTS (termasuk 1.736 *node* 3,5G) dan 73,695 sentral pemancar dan penerima, serta memperluas jaringan selulernya untuk menjangkau semua kecamatan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sumatera.

Telkomsel berencana melanjutkan pemasangan BTS tambahan untuk memperluas jangkauannya hingga ke kecamatan di Kalimantan, Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, meningkatkan kapasitas di wilayah padat penduduk, mengembangkan jaringan 3G, mengembangkan *backbone* transmisi serat optik di kota-kota besar Jawa, memasang sel-sel mikro tambahan dan sentral-sentral pemancar dan penerima terutama di wilayah provinsi, terus memperbaiki kualitas cakupannya, meningkatkan peralatan *switching* untuk menambah kapasitas jaringan, dan untuk meluaskan jaringan pintarnya yang dipakai dalam koneksi dengan produk-produknya.

d. Pengembangan Jaringan Data

Pada tahun 2011, Perusahaan terus memperbaiki kualitas jaringan data dengan menambah kapasitas dan cakupannya, dan Telkom menambahkan akses broadband yang menggunakan teknologi IP DSLAM untuk 289.904 sambungan telepon.

Perluasan baru meliputi perluasan cakupan dan kapasitas *IP core* melalui penerapan IP berbasis Lambda 10 Gbps dan Tera Router. Pada tahun 2009, Tera Router ini dipasang dan sudah beroperasi sejak bulan Maret 2009 di tiga kota dan enam *node* (Jakarta, Batam dan Surabaya) dan tiga tambahan *node gateway* internet. Pada tahun 2010, pengembangan Terra Router merambah ke delapan kota lainnya di 12 *node* (Medan, Pekanbaru, Bandung, Cirebon, Solo, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makasar). Pada Tahun 2011, Telkom telah melakukan ekspansi tiga *node* Tera Router di Medan dan Makasar.

Dalam mendukung program NGN, Kami telah meningkatkan jaringan IP *Core* yang digunakan untuk mendukung bisnis *new wave* dan mengintegrasikan jaringan *NGN Core* antara bisnis telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak. IP *Core* dikembangkan dengan mengimplementasikan *platform* tunggal *tera-byte router*

dengan arsitektur jaringan yang menggunakan sistem proteksi penuh. IP *Core* yang sudah beroperasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari 23 *node* router *core, router* 481 PE, 467 *port* 10GE, 532 *port* GE, 12 STM-4, 6 STM-16 dan 8 *port* STM-256.

Jaringan *Metro Ethernet* Kami telah semakin meluas menyusul diselesaikannya pembangunan 74 *node* baru (yang terletak pada *node* sentral). Sampai dengan 31 Desember 2011, total *node Metro Ethernet* sebanyak 1.010 dan telah siap untuk mendukung kebutuhan *bandwidth* layanan *broadband* Kami di seluruh Indonesia. *Metro Ethernet* juga digunakan sebagai penghubung utama dari IP DSLAM, MSAN untuk *broadband* Speedy, *Softswitch*, VPN IP serta GPON baik untuk *mobile backhaul*, solusi bisnis korporasi dan serta layanan Triple Play bagi pelanggan tertentu. Sejak tahun 2009, Telkom telah menggunakan Metro *Ethernet* sebagai *mobile* backhaul pada hampir 1.000 *node* Bs milik Telkomsel, guna mendukung penetrasi *mobile broadband*. Sinergi jaringan ini akan terus dikembangkan untuk menyediakan *backhaul* sebanyak 1.540 *node* Bs pada tahun 2010 dengan total menjadi 2.423 *node* Bs. Sampai dengan 31 Desember 2011, ada penambahan 729 *node* sehingga bertambah menjadi 3.152 *node*.

Sampai dengan 31 Desember 2011, Kami telah menambah kapasitas *gateway internet* sehingga kapasitas terpasang mencapai 115 Gbps. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecukupan kapasitas *gateway internet* agar mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik *broadband* yang tinggi baik *fixed broadband* maupun *mobile broadband*.

10

Kota Terjangkau Jaringan EVDO (Network Evolution Data Optimization)

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan

Pembahasan dan analisis berikut mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan Konsolidasian ini disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang dalam beberapa hal berbeda dengan IFRS. Lihat Catatan 48 pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk rekonsiliasi dengan IFRS.

TINJAUAN HASIL USAHA

Telkom adalah penyedia utama layanan telekomunikasi lokal, domestik, dan internasional di Indonesia, serta penyedia layanan telepon seluler terkemuka melalui kepemilikan mayoritas Perusahaan pada Anak Perusahaan, Telkomsel. Visi Kami adalah menjadi Perusahaan penyelenggara TIME terkemuka di kawasan regional melalui penyediaan berbagai layanan komunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan memiliki 129,8 juta satuan sambungan telepon yang terdiri dari 8,6 juta sambungan telepon kabel tidak bergerak, 14,2 juta sambungan telepon nirkabel tidak bergerak dan 107 juta pelanggan telepon seluler yang dimiliki Telkomsel. Perusahaan juga menyediakan beragam layanan komunikasi lain, termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data dan layanan terkait komunikasi internet, sewa transponder satelit, sirkit langganan, jaringan pintar dan layanan terkait, televisi kabel dan layanan VoIP.

Hasil usaha Perusahaan selama dua tahun untuk periode 2010 sampai 2011 mencerminkan pertumbuhan pada pendapatan. Pertumbuhan pendapatan ini dikontribusikan oleh pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika. Selain itu, pelanggan seluler Telkomsel bertambah 13,8% di tahun 2011.

Hasil usaha Perusahaan dari tahun 2010 ke 2011 juga menunjukkan pertumbuhan beban. Pertumbuhan beban dipicu oleh beban karyawan dan beban pemasaran. Pertumbuhan beban karyawan terutama disebabkan Program Pensiun Dini dan pertumbuhan beban pemasaran terutama disebabkan oleh peningkatan *fee* pemasaran dan beban iklan.

Peningkatan pada Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika memberikan kontribusi sebesar 33,6% terhadap jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dibandingkan dengan 28,9% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Pendapatan Perusahaan dari layanan data, internet dan jasa teknologi informatika meningkat sebesar 20,8% dari tahun 2010 ke 2011. Peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan SMS sebesar 16,0% dan peningkatan pendapatan internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika sebesar 27,1%. Sebagai bagian dari transformasi Telkom untuk menjadi penyelenggara bisnis TIME dan tujuan Perusahaan untuk menumbuhkan bisnis *new wave*, Telkom tetap mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis tersebut.

Pendapatan Seluler Stabil dengan Peningkatan Pelanggan dan Penurunan ARPU

Pendapatan telepon seluler sedikit menurun sebesar 1,8% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Pelanggan seluler meningkat sebesar 13,8% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Pendapatan Telkomsel dari layanan telepon seluler (pendapatan pemakaian, pendapatan abonemen bulanan, pendapatan jasa sambungan, dan fitur) mencakup sekitar 40,1% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dibandingkan dengan 42,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pertumbuhan pelanggan didorong oleh pertumbuhan permintaan layanan seluler di Indonesia dan seiring dengan upaya Perusahaan untuk menarik pelanggan baru dengan perluasan serta peningkatan jaringan dan kapasitas jaringan. Perilaku penggunaan oleh pelanggan baru seluler bervariasi, bergantung pada paket harga yang kami tawarkan, pada periode tertentu dibandingkan dengan paket harga yang ditawarkan kompetitor. Kondisi ini menyebabkan operator saling bersaing untuk menyediakan tarif yang paling rendah sehingga pendapatan dari layanan seluler tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pelanggan. Faktor ini menjadi penyebab penurunan ARPU, dengan ARPU campuran bulanan menurun dari sekitar Rp42.000 pada tahun 2010 menjadi Rp39.000 pada tahun 2011.

Seiring dengan pertumbuhan pasar seluler, persaingan ketat terjadi antar para operator seluler, terutama pada segmen prabayar. Para operator seluler juga bersaing dalam tingkat persaingan yang lebih rendah, dengan operator sambungan telepon nirkabel tidak bergerak, seiring dengan berkembangnya jumlah layanan tersebut. Lihat "Faktor-Faktor Risiko - Risiko-Risiko yang Terkait dengan Bisnis Telkom dan Anak Perusahaan - Risiko-Risiko Terkait dengan Bisnis Seluler Kami (Telkomsel)".

Penurunan Pendapatan Telepon Kabel Tidak Bergerak

Pendapatan telepon kabel tidak bergerak menurun sebesar 6,5% dari Rp10.990 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp10.277 miliar pada tahun 2011.

Telkom meyakini bahwa pendapatan telepon kabel tidak bergerak menurun disebabkan peningkatan pemakaian dan penurunan tarif layanan seluler dan telepon nirkabel tidak bergerak dan juga peningkatan penetrasi dari pelanggan seluler di Indonesia. Layanan seluler dan telepon nirkabel tidak bergerak meningkatkan kenyamanan pengguna bahkan untuk keadaan tertentu, panggilan ke sesama pengguna dalam satu penyedia jaringan dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif panggilan telepon kabel tidak bergerak ke pengguna dari penyedia jaringan lain. Walaupun demikian, Telkom memperkirakan telepon tidak bergerak termasuk telepon kabel tidak bergerak akan tetap memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan Telkom, namun Kami menyadari kecenderungan penurunan pendapatan telepon kabel tidak bergerak diperkirakan akan terus terjadi.

Sebagai bagian dari strategi Perusahaan, Telkom sedang mencari upaya untuk mengoptimalisasi bisnis telepon tidak bergerak kabel melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan efisiensi biaya, mengembangkan layanan sambungan langsung internasional telepon kabel tidak bergerak dan meningkatkan nilai tambah layanan telepon kabel tidak bergerak. Kami juga berupaya mempercepat peningkatan penetrasi telepon tidak bergerak dengan mengurangi belanja modal per satuan sambungan melalui penggunaan teknologi telepon nirkabel tidak bergerak dan meningkatkan jaringan akses telepon kabel tidak bergerak dan infrastruktur yang telah ada menuju infrastruktur NGN dengan kemampuan *broadband*.

Penurunan Pendapatan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Pendapatan telepon nirkabel tidak bergerak menurun sebesar 31,2% dari Rp1.950 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.342 miliar di tahun 2011. Penurunan ini terjadi terutama disebabkan oleh tarif rata-rata yang lebih rendah yang akibat persaingan yang ketat dan penurunan pendapatan pemakaian telepon nirkabel tidak bergerak.

Bisnis telepon nirkabel tidak bergerak Telkom menghadapi persaingan dari peningkatan jumlah operator, termasuk Indosat dan Bakrie Telecom, serta layanan seluler, SMS, VoIP dan *e-mail*. Persaingan pasar telepon nirkabel tidak bergerak semakin ketat, dengan peluncuran program-program pemasaran yang semakin menarik dan kreatif dari setiap operator. Selain itu aktivitas telepon nirkabel tidak bergerak Telkom menghadapi keterbatasan frekuensi *bandwidth* disebabkan tidak disediakannya frekuensi *bandwidth* baru oleh Pemerintah untuk keperluan ekspansi dan di daerah padat penduduk. Perusahaan telah menggunakan semua frekuensi *bandwidth* telepon nirkabel tidak bergerak yang telah dialokasikan. Akibatnya, kapasitas untuk layanan suara, data dan internet telepon nirkabel tidak bergerak di daerah yang padat penduduk menjadi sangat terbatas. Hal ini membatasi kemampuan Kami untuk bersaing di daerah-daerah tersebut.

Walaupun demikian, Telkom meyakini masih ada peluang-peluang lain di pasar telepon nirkabel tidak bergerak. Untuk itu Kami terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan data dan internet telepon nirkabel tidak bergerak serta memperluas jaringan

untuk melayani area-area baru. Telkom berencana untuk terus mengembangkan secara selektif, jaringan telepon nirkabel tidak bergerak berbasis CDMA. Dibandingkan dengan jaringan telepon kabel tidak bergerak, jaringan berbasis CDMA pada umumnya lebih cepat dan mudah untuk dibangun serta menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar bagi pelanggan.

Layanan telepon nirkabel tidak bergerak menurun dari 18,2 juta layanan pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi 14,2 juta layanan pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini disebabkan oleh terminasi atas beberapa pelanggan yang dilakukan Telkom untuk meningkatkan mutu kredit pelanggan.

Penurunan Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi memberikan kontribusi sekitar 4,9% terhadap jumlah pendapatan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, dibandingkan dengan 5,4% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010. Pendapatan interkoneksi menurun sebesar 6,1% dari Rp3.735 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.509 miliar pada tahun 2011.

Tren penurunan pendapatan interkoneksi terutama disebabkan penerapan ketentuan baru interkoneksi. Pemerintah menetapkan ketentuan tarif interkoneksi yang dikenakan pada semua operator jaringan telekomunikasi di Indonesia. Mulai tanggal 11 April 2008, Pemerintah untuk pertama kalinya menetapkan tarif interkoneksi berbasis biaya yang dikenakan terhadap seluruh operator jaringan telekomunikasi. Pemerintah mengamandemen ketentuan tarif interkoneksi efektif tanggal 1 Januari 2011 (atau tanggal 1 Juli 2011 untuk telepon lokal nirkabel tidak bergerak).

Di bawah ketentuan interkoneksi baru, tarif interkoneksi yang dikenakan terhadap operator jaringan yang menerima panggilan di Indonesia ditetapkan Pemerintah setiap satu atau dua tahun sekali berdasarkan Daftar Penawaran Interkoneksi ("DPI") yang diserahkan oleh operator. Data dalam DPI adalah data yang menunjukkan biaya operator. Kami percaya penerapan ketentuan baru tarif interkoneksi berdasarkan biaya dimana Kami, termasuk Telkomsel, menyebabkan penurunan pendapatan interkoneksi. Kami perkirakan tarif interkoneksi yang akan ditetapkan Pemerintah di masa mendatang akan menunjukkan tren penurunan.

Ketentuan interkoneksi berbasis biaya juga mendukung transparansi dalam biaya interkoneksi, dimana operator dimungkinkan untuk mencari rute panggilan dengan biaya yang paling efisien dengan menggunakan perangkat lunak yang kemudian dapat mengurangi biaya interkoneksi. Sebagai tambahan, banyak operator seluler bergerak pada tahun-tahun terakhir ini menawarkan promosi yang agresif dengan tarif yang sangat rendah untuk percakapan sesama pelanggan dalam operator yang sama. Semua percakapan ini tidak melalui jaringan Kami, sehingga Kami tidak menerima pendapatan interkoneksi. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan penurunan pendapatan interkoneksi yang secara umum terjadi di industri telekomunikasi di Indonesia.

Grafik Pendapatan Telkom

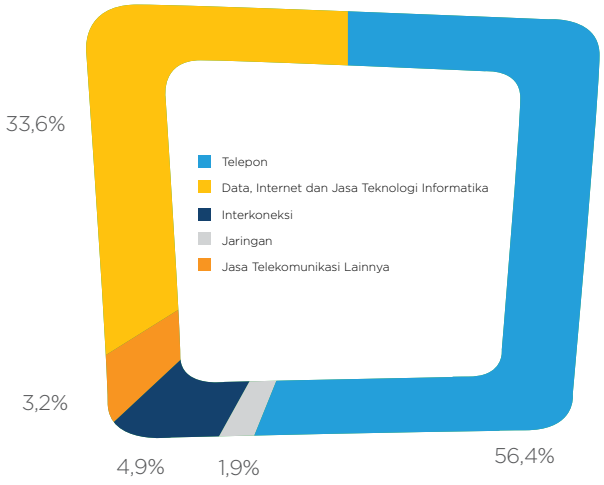

Grafik Beban Telkom

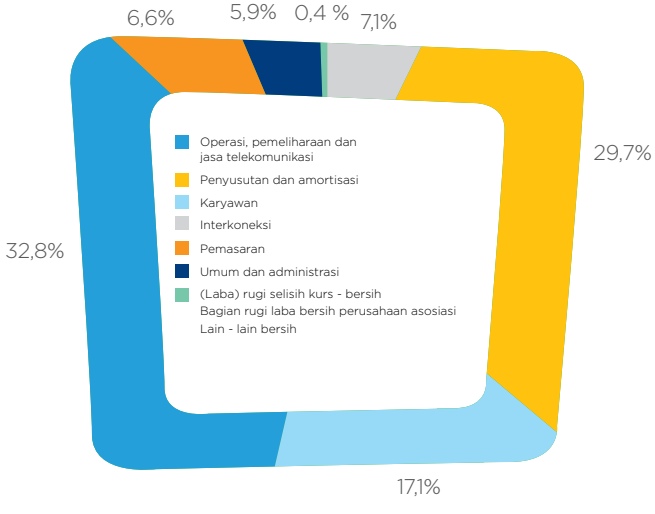

PENDAPATAN TELKOM

Tabel berikut menunjukkan pendapatan Telkom, yang dikelompokkan sesuai dengan produk dan jasa utama Telkom selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah pendapatan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009 (Rp miliar)	%	2010 (Rp miliar)	%	2011 (Rp miliar)	%	2011 (US$ juta)
Telepon							
Seluler	28.532	42,2	29.134	42,5	28.598	40,1	3.154
Tidak bergerak	14.286	21,1	12.940	18,9	11.619	16,3	1.281
Data, internet dan jasa teknologi informatika	18.512	27,4	19.801	28,9	23.924	33,6	2.638
Interkoneksi	3.867	5,7	3.735	5,4	3.509	4,9	387
Jaringan	1.218	1,8	1.058	1,5	1.301	1,9	143
Jasa Telekomunikasi Lainnya	1.263	1,8	1.961	2,8	2.302	3,2	254
Jumlah Pendapatan	67.678	100,0	68.629	100,0	71.253	100,0	7.857

Pendapatan Telepon Seluler

Pendapatan telepon seluler selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah pendapatan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009 (Rp miliar)	%	2010 (Rp miliar)	%	2011 (Rp miliar)	%	2011 (US$ juta)
Pendapatan pemakaian	27.402	40,6	28.024	40,9	27.189	38,1	2.999
Fitur	483	0,7	582	0,8	838	1,2	92
Pendapatan abonemen bulanan	423	0,6	488	0,7	569	0,8	63
Pendapatan jasa sambungan	224	0,3	40	0,1	2	-	-
Jumlah	28.532	42,2	29.134	42,5	28.598	40,1	3.154

Pendapatan Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan telepon tidak bergerak selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah pendapatan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009 (Rp miliar)	%	2010 (Rp miliar)	%	2011 (Rp miliar)	%	2011 (US$ juta)
Pendapatan pemakaian	10.322	15,2	9.287	13,6	8.213	11,5	906
Pendapatan abonemen bulanan	3.507	5,2	3.251	4,7	3.004	4,2	331
Pendapatan instalasi	186	0,3	179	0,3	135	0,2	15
Lain-lain	271	0,4	223	0,3	267	0,4	29
Jumlah	14.286	21,1	12.940	18,9	11.619	16,3	1.281

Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah pendapatan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Short Messaging Service ("SMS")	10.499	15,5	11.289	16,5	13.093	18,4	1.444
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	7.790	11,5	8.297	12,1	10.548	14,8	1.163
VoIP	186	0,3	197	0,3	245	0,3	27
e-Business	37	0,1	18	-	38	0,1	4
Jumlah	18.512	27,4	19.801	28,9	23.924	33,6	2.638

Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah pendapatan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Interkoneksi domestik dan transit	2.338	3,4	2.174	3,1	2.071	2,9	228
Interkoneksi internasional	1.529	2,3	1.561	2,3	1.438	2,0	159
Jumlah	3.867	5,7	3.735	5,4	3.509	4,9	387

Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah pendapatan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Sewa sirkit	743	1,1	687	1,0	911	1,3	100
Sewa *transponder* satelit	475	0,7	371	0,5	390	0,6	43
Jumlah	1.218	1,8	1.058	1,5	1.301	1,9	143

Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah pendapatan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Customer Premise Equipment ("CPE") dan terminal	721	1,0	851	1,2	739	1,0	81
Kompensasi KPU	48	0,1	342	0,5	430	0,6	47
Directory assistance	340	0,5	322	0,5	349	0,5	38
Pendapatan TV berbayar	106	0,2	159	0,2	259	0,4	29
Penjualan modem	38	-	170	0,2	163	0,2	18
Lain-lain	10	-	117	0,2	362	0,5	41
Jumlah	1.263	1,8	1.961	2,8	2.302	3,2	254

BEBAN TELKOM

Tabel berikut menampilkan beban Telkom selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah beban:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	14.549	33,0	16.046	34,7	16.372	32,8	1.806
Penyusutan dan amortisasi	13.975	31,7	14.612	31,6	14.863	29,7	1.639
Karyawan	8.371	19,0	7.332	15,9	8.555	17,1	943
Interkoneksi	2.929	6,6	3.086	6,7	3.555	7,1	392
Pemasaran	2.260	5,1	2.525	5,5	3.278	6,6	362
Umum dan administrasi	2.806	6,4	2.537	5,5	2.935	5,9	324
(Laba) rugi selisih kurs - bersih	(973)	(2,2)	(43)	(0,1)	210	0,4	23
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	30	0,1	14	-	10	-	1
Lain-lain - bersih	192	0,3	145	0,2	192	0,4	21
Jumlah Beban Usaha	44.139	100,0	46.254	100,0	49.970	100,0	5.511

Beban Operasi, Pemeliharaan, dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah beban:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Operasi dan pemeliharaan	7.447	16,9	8.836	19,1	9.191	18,4	1.013
Beban pemakaian frekuensi radio	2.785	6,3	2.892	6,3	2.846	5,7	314
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.137	2,6	1.177	2,5	1.235	2,5	136
Beban pokok penjualan telepon, *set top box*, kartu SIM, dan RUIM	1.142	2,6	1.067	2,3	879	1,8	97
Listrik, gas, dan air	724	1,7	841	1,8	836	1,7	92
Asuransi	312	0,8	384	0,8	431	0,9	48
Sewa sirkit dan CPE	474	1,1	215	0,5	406	0,8	45
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	266	0,6	283	0,6	291	0,5	32
Beban pokok jasa teknologi informatika	181	0,4	200	0,5	144	0,3	16
Perjalanan	61	0,1	60	0,1	54	0,1	6
Lain-lain	20	-	91	0,2	59	0,1	7
Jumlah	14.549	33,0	16.046	34,7	16.372	32,8	1.806

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah beban:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Penyusutan	12.566	28,5	13.085	28,3	13.701	27,4	1.511
Amortisasi	1.409	3,2	1.527	3,3	599	1,2	66
Rugi Penurunan Nilai	-	-	-	-	563	1,1	62
Jumlah	13.975	31,7	14.612	31,6	14.863	29,7	1.639

Beban Karyawan

Beban karyawan selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah beban:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Gaji dan tunjangan	3.021	6,9	2.751	6,0	3.001	6,0	331
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	2.214	5,0	2.574	5,6	2.814	5,6	310
PPh karyawan	674	1,5	796	1,7	1.043	2,1	115
Program pensiun dini	1.044	2,4	-	-	517	1,0	57
Beban pensiun berkala bersih	626	1,4	505	1,2	501	1,0	55
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	331	0,8	238	0,5	199	0,4	22
Perumahan	206	0,6	214	0,5	197	0,4	22
Beban LSA	117	0,3	78	0,2	96	0,2	11
Asuransi	18	-	68	0,1	70	0,2	8
Beban imbalan pasca kerja lainnya	81	0,2	66	0,1	65	0,1	7
Imbalan karyawan lainnya	20	-	23	-	30	0,1	3
Lain-lain	19	-	19	-	22	-	2
Jumlah	8.371	19,0	7.332	15,9	8.555	17,1	943

Beban Interkoneksi

Beban interkoneksi selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah beban:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Interkoneksi domestik dan transit	1.874	4,2	1.980	4,3	2.414	4,8	266
Interkoneksi internasional	1.055	2,4	1.106	2,4	1.141	2,3	126
Jumlah	2.929	6,6	3.086	6,7	3.555	7,1	392

Beban Pemasaran

Beban pemasaran selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah beban:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Iklan dan promosi	1.724	3,9	1.994	4,3	2.743	5,5	303
Edukasi pelanggan	438	1,0	398	0,9	427	0,9	47
Lain-lain	98	0,2	133	0,3	108	0,2	12
Jumlah	2.260	5,1	2.525	5,5	3.278	6,6	362

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut, dengan setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari jumlah beban:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2009		2010		2011		2011
	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(US$ juta)
Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang	574	1,3	525	1,1	883	1,8	98
Beban penagihan	718	1,6	401	0,8	327	0,6	36
Beban umum	284	0,6	301	0,7	326	0,6	36
Sumbangan sosial	99	0,2	171	0,4	290	0,6	32
Perjalanan	223	0,5	260	0,5	256	0,5	28
Jasa profesional	184	0,4	163	0,4	235	0,5	26
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	205	0,5	216	0,5	229	0,5	25
Keamanan dan *screening*	265	0,6	215	0,5	97	0,2	11
Rapat	76	0,2	80	0,2	86	0,2	9
Alat tulis dan cetakan	65	0,2	64	0,1	53	0,1	6
Sewa kendaraan	66	0,2	51	0,1	43	0,1	5
Lain-lain	47	0,1	90	0,2	110	0,2	12
Jumlah	2.806	6,4	2.537	5,5	2.935	5,9	324

TINJAUAN KEUANGAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

A. Pendapatan

Jumlah pendapatan meningkat sebesar Rp2.624 miliar, atau 3,8%, dari Rp68.629 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp71.253 miliar pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan di tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika, jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya yang diimbangi dengan penurunan pendapatan telepon tidak bergerak, pendapatan telepon seluler dan interkoneksi. Pendapatan telepon seluler, yang merupakan komponen terbesar dari pendapatan Kami, menunjukkan sedikit penurunan sebesar Rp536 miliar, atau 1,8% di tahun 2011.

1. *Pendapatan Telepon*

   Pendapatan Telepon Seluler

   Pendapatan telepon seluler menurun sebesar Rp536 miliar, atau 1,8%, dari Rp29.134 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp28.598 miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pemakaian, yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan fitur.

   Pendapatan pemakaian menurun sebesar Rp835 miliar, atau 3,0% dari Rp28.024 miliar di tahun 2010 menjadi Rp27.189 miliar di tahun 2011 disebabkan oleh penurunan pemakaian lokal. Penurunan pada pemakaian diimbangi dengan peningkatan pada pendapatan fitur sebesar Rp256 miliar, atau 44,0%, dari Rp582 miliar di tahun 2010 menjadi Rp838 miliar di tahun 2011.

   Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

   Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak menurun sebesar Rp1.321 miliar, atau 10,2%, dari Rp12.940 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp11.619 miliar pada tahun 2011. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terutama disebabkan oleh penurunan pada pendapatan pemakaian sebesar Rp1.074 miliar, atau 11,6%, dari Rp9.287 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp8.213 miliar pada tahun 2011 disebabkan oleh penurunan pemakaian lokal dan SLJJ. Kemudian, pendapatan abonemen bulanan juga menurun sebesar Rp247 miliar, atau 7,6% di tahun 2011. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak ini disebabkan oleh penurunan penggunaan layanan telepon tidak bergerak karena adanya teknologi baru.

2. *Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika*

   Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika meningkat sebesar Rp4.123 miliar, atau 20,8%, dari Rp19.801 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp23.924 miliar pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika sebesar Rp2.251 miliar, atau 27,1%, dari Rp8.297 miliar di tahun 2010 menjadi Rp10.548 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh peningkatan pelanggan Speedy sebesar 23,4%, dari 1,6 juta pelanggan di tahun 2010 menjadi 1,8 juta pelanggan di tahun 2011, dan peningkatan pelanggan Flash sebesar 44,7%, dari 3,8 juta pelanggan di tahun 2010 menjadi 5,5 juta pelanggan di tahun 2011. Peningkatan ini juga disebabkan oleh peningkatan volume data yang melalui jaringan VPN sebesar 18,4%, dari 24.237 Mbps menjadi 28.702 mbps, dan peningkatan volume data yang melalui Metro ethernet sebesar 131,0%, dari 60.924 Mbps menjadi 140.733 Mbps. Keduanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan.

   Pendapatan SMS juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan sebesar Rp1.804 miliar atau 16,0% dari Rp11.289 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp13.093 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan volume SMS sebesar 13,4% dari 199,6 miliar SMS di tahun 2010 menjadi 226,4 miliar SMS di tahun 2011.

3. *Pendapatan Interkoneksi*

   Pendapatan interkoneksi menurun sebesar Rp226 miliar, atau 6,1% dari Rp3.735 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.509 miliar pada tahun 2011. Pendapatan interkoneksi internasional menurun sebesar Rp123 miliar, atau 7,9%, dari Rp1.561 miliar di tahun 2010 menjadi Rp1.438 miliar di tahun 2011. Pendapatan interkoneksi domestik dan transit menurun sebesar Rp103 miliar, atau 4,7%, dari Rp2.174 miliar di tahun 2010 menjadi Rp2.071 miliar di tahun 2011. Penurunan pendapatan interkoneksi sebagian disebabkan oleh penurunan pendapatan interkoneksi seluler sebesar Rp113 miliar, atau 6,0%, yang disebabkan oleh promosi dari industri seluler dengan mengurangi tarif panggilan antar sesama pelanggan dalam satu penyedia jaringan. Selain itu, pemerintah menetapkan tarif interkoneksi yang lebih rendah di tahun 2011 dibandingkan dengan tarif di tahun 2010. Penurunan pendapatan interkoneksi juga disebabkan oleh peningkatan substantial pada penggunaan VoIP untuk melakukan panggilan, termasuk melalui telepon seluler dengan menggunakan aplikasi seluler VoIP.

Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak dan pendapatan interkoneksi dari jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung *incoming* dari layanan SLI (TIC-007).

Jumlah pendapatan interkoneksi berkontribusi sebesar 4,9% dari pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 5,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

4. *Pendapatan Jaringan*
   Pendapatan jaringan meningkat sebesar Rp243 miliar, atau 23,0%, dari Rp1.058 miliar di tahun 2010 menjadi Rp1.301 miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan substansial pada pendapatan sewa sirkit sebesar Rp224 miliar, atau 32,6%, dari Rp687 miliar di tahun 2010 menjadi Rp911 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kapasitas sewa sirkit dari 40.451 E1 di tahun 2010 menjadi 118.357 E1 di tahun 2011 sejalan dengan peningkatan permintaan akibat pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan penurunan tarif sewa sirkit.

   Pendapatan sewa *transponder* satelit meningkat sebesar Rp19 miliar, atau 5,1%, dari Rp371 miliar di tahun 2010 menjadi Rp390 miliar di tahun 2011 yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas sewa yang mengikuti peningkatan permintaan.

5. *Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya*
   Pada tahun 2011, pendapatan Telkom dari jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp341 miliar, atau 17,4%, dari Rp1.961 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp2.302 miliar pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan TV berbayar sebesar Rp100 miliar, atau 62,9%, dari Rp159 miliar di tahun 2010 menjadi Rp259 miliar pada tahun 2011; peningkatan kompensasi KPU sebesar Rp88 miliar, atau 25,7% dari Rp342 miliar di tahun 2010 menjadi Rp430 miliar di tahun 2011 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp245 miliar, atau 209,4% dari Rp 117 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp362 miliar pada tahun 2011.

   Pendapatan TV berbayar meningkat disebabkan oleh peningkatan substansial pada pelanggan TelkomVision sebesar 369,7% dari 212,9 ribu pelanggan di tahun 2010 menjadi 1 juta pelanggan di tahun 2011 akibat promosi yang intensif dan penurunan tarif. Pendapatan dari kompensasi KPU meningkat disebabkan oleh pendapatan dari proyek KPU di tahun 2011 untuk membangun layanan pusat internet di berbagai ibu kota provinsi. Pendapatan lain-lain meningkat disebabkan oleh pendapatan dari bisnis direktori telepon menjadi Rp349 miliar pada tahun 2011.

B. Beban

Jumlah beban meningkat sebesar Rp3.716 miliar, atau 8,0% dari Rp46.254 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp49.970 miliar pada tahun 2011. Peningkatan jumlah beban terutama disebabkan oleh meningkatnya beban karyawan, beban pemasaran serta beban interkoneksi. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. *Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi*
   Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp326 miliar, atau 2,0%, dari Rp16.046 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp16.372 miliar pada tahun 2011. Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban pemeliharaan menara, gedung perkantoran dan BTS sebesar Rp355 miliar, atau 4,0%, disebabkan oleh meningkatnya beban yang terkait dengan peningkatan kapasitas stasiun penerima dan transmisi serta layanan *broadband*.

   Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi juga disebabkan oleh hal-hal lain berikut:
   - Beban sewa sirkit dan CPE meningkat sebesar Rp191 miliar, atau 88,8%, dari Rp215 miliar di tahun 2010 menjadi Rp406 miliar di tahun 2011;
   - Beban hak penyelenggaraan dan KPU meningkat sebesar Rp58 miliar, atau 4,9%, dari Rp1.177 miliar di tahun 2010 menjadi Rp1.235 miliar di tahun 2011. Peningkatan beban ini mengikuti peningkatan jumlah pendapatan sebesar 3,8%; dan
   - Beban asuransi meningkat sebesar Rp47 miliar, atau 12,2%, dari Rp384 miliar di tahun 2010 menjadi Rp431 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh beban asuransi atas kerusakan kabel bawah laut terkait bencana tsunami di Sumatera Barat dan gempa di Sumbawa pada tahun 2010.

   Peningkatan di atas dimbangi oleh hal-hal berikut:
   - Beban pokok penjualan telepon, *set top box*, kartu SIM dan RUIM menurun sebesar Rp188 miliar, atau 17,6%, dari Rp1.067 miliar di tahun 2010 menjadi Rp879 miliar di tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh kemasan yang lebih murah untuk kartu SIM dan RUIM;

- Beban pokok jasa teknologi informatika menurun sebesar Rp56 miliar, atau 28,0%, dari Rp200 miliar di tahun 2010 menjadi Rp144 miliar di tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah lisensi *software* akibat berakhirnya beberapa lisensi *software* dan penunjukan Sigma sebagai penyedia *software* serta menurunnya beban pemeliharaan *software*; dan
- Beban pemakaian frekuensi radio menurun sebesar Rp46 miliar, atau 1,6%, dari Rp2.892 miliar di tahun 2010 menjadi Rp2.846 miliar di tahun 2011, disebabkan oleh peraturan baru yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2010, dimana biaya hak pakai BTS yang dibayarkan kepada pemerintah tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah BTS yang dipakai, namun dihitung berdasarkan *bandwidth* yang digunakan.

2. *Beban Penyusutan dan Amortisasi*
   Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar Rp251 miliar, atau 1,7%, dari Rp14.612 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp14.863 miliar pada tahun 2011 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyusutan sebesar Rp616 miliar, atau 4,7%, dari Rp13.085 miliar di tahun 2010 menjadi Rp13.701 miliar di tahun 2011, disebabkan oleh beban penyusutan fasilitas pendukung, BTS dan peralatan *switching* diimbangi dengan penurunan beban penyusutan untuk jaringan kabel, peralatan pemrosesan data serta sewa pembiayaan.

   Terdapat penurunan beban amortisasi sebesar Rp928 miliar, atau 60,7% terutama karena aset takberwujud terkait dengan KSO telah diamortisasi sepenuhnya pada tanggal 31 Desember 2010, sesuai dengan berakhirnya KSO pada tanggal tersebut. Pada tahun 2011, aset tak berwujud tersebut telah dihapusbukukan.

   Setelah mempertimbangkan persaingan yang meningkat dalam pasar layanan telepon nirkabel tidak bergerak yang berdampak pada tarif rata-rata yang lebih rendah, menurunnya jumlah pelanggan aktif, dan menurunnya rata-rata pendapatan per pelanggan ("*Average Revenue Per User*" atau "ARPU"), kami melakukan pengujian penurunan nilai untuk unit penghasil kas layanan telepon nirkabel tidak bergerak. Lihat Bab 3 "Faktor-faktor Risiko – Layanan telepon nirkabel tidak bergerak kami mengalami persaingan ketat". Jumlah tercatat aset terkait layanan telepon nirkabel tidak bergerak yang mengalami penurunan nilai diturunkan hingga sebesar jumlah terpulihkan, yang ditentukan berdasarkan perhitungan estimasi nilai pakai. Dalam menentukan nilai pakai, Perusahaan dan entitas anak menggunakan pertimbangan manajemen dalam menentukan proyeksi kinerja operasional masa depan, dan dalam menentukan tingkat pertumbuhan dan tingkat diskonto.

   Pertimbangan-pertimbangan tersebut diterapkan berdasarkan pemahaman kami atas informasi historis dan ekspektasi atas kinerja operasional masa depan. Proyeksi arus kas mencerminkan ekspektasi manajemen terhadap pendapatan, pertumbuhan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi ("*Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortisation*" atau "EBITDA"), dan arus kas operasi atas dasar unit penghasil kas layanan telepon nirkabel tidak bergerak menghasilkan surplus arus kas bersih sejak tahun 2013 dan pengembalian tingkat profitabilitas di tahun 2016. Proyeksi arus kas manajemen juga mempertimbangkan ekspektasi wajar manajemen terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro dan ekspektasi pasar terhadap industri telekomunikasi di Indonesia. Proyeksi tersebut mengasumsikan bahwa manajemen akan menerima lisensi dan menyelenggarakan jasa layanan telepon nirkabel bergerak secara efektif yang akan mengeliminasi keterbatasan pada jasa yang diselenggarakan sekarang dimana hanya dapat digunakan oleh pelanggan dalam kode area tertentu. Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 11,4%, yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia. Tingkat pertumbuhan perpetuitas yang digunakan adalah 0% dengan asumsi jumlah pelanggan akan terus meningkat setelah lima tahun, rata-rata pendapatan per pelanggan akan menurun sehingga hanya tingkat pertumbuhan jangka panjang yang dapat diabaikan akan dicapai dalam pasar yang kompetitif.

   Perusahaan menentukan kelompok aset dalam unit penghasil kas layanan telepon nirkabel tidak bergerak mengalami penurunan nilai pada 31 Desember 2011, yang menyebabkan rugi penurunan nilai sebesar Rp 563 miliar (2010: nihil) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai bagian dari "Penyusutan dan amortisasi". Perubahan asumsi penting, termasuk asumsi tingkat diskonto atau tingkat pertumbuhan dalam proyeksi arus kas, dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai pakai. Kenaikan sebesar 1% pada tingkat diskonto yang digunakan akan menambah rugi penurunan nilai menjadi Rp 907 miliar. Namun jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas layanan telepon nirkabel tidak bergerak sangat dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam melaksanakan rencananya,

termasuk rencana untuk menyelenggarakan jasa layanan telepon nirkabel bergerak, yang diharapkan akan menghasilkan surplus arus kas dan tingkat profitabilitas sesuai proyeksi. Apabila kinerja dari unit penghasil kas layanan telepon nirkabel tidak bergerak terus mengalami penurunan atau rencana-rencana manajemen tidak terlaksana seperti yang diharapkan dalam periode keuangan selanjutnya, analisa harus dilakukan untuk menentukan apakah terdapat tambahan penurunan nilai di tahun yang akan datang.

3. *Beban Karyawan*
   Beban karyawan meningkat sebesar Rp1.223 miliar, atau 16,7%, dari Rp7.332 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp8.555 miliar pada tahun 2011. Peningkatan beban karyawan ini sebagian disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp250 miliar, atau 9,1%, dari Rp2.751 miliar di tahun 2010 menjadi Rp3.001 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan gaji dasar tahunan sebesar 8,0% untuk mengimbangi inflasi.

   Selain itu, kenaikan juga disebabkan oleh adanya beban program pensiun dini sebesar Rp517 miliar di tahun 2011 dan tidak adanya program pensiun dini yang ditawarkan di 2010. Beban cuti, insentif dan tunjangan lainnya juga memberikan kontribusi kenaikan sebesar Rp240 miliar, atau 9,3%, dari Rp2.574 miliar di tahun 2010 menjadi Rp2.814 miliar di tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan insentif.

   Beban pajak penghasilan karyawan juga meningkat sebesar Rp247 miliar, atau 31,0%, dari Rp796 miliar di tahun 2010 menjadi Rp1.043 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini mengikuti peningkatan beban gaji dan tunjangan.

4. *Beban Interkoneksi*
   Beban interkoneksi meningkat sebesar Rp469 miliar, atau 15,2%, dari Rp3.086 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.555 miliar pada tahun 2011. Beban interkoneksi meningkat terutama disebabkan peningkatan beban interkoneksi domestik seluler dan transit (beban interkoneksi untuk panggilan antara sesama pelanggan Telkomsel yang diarahkan melalui jaringan operator lain), sebesar Rp434 miliar, atau 21,9% sejalan dengan peningkatan pada jumlah pelanggan Telkomsel di 2011 sebesar 13,8%.

   Beban interkoneksi mencapai 7,1% dari jumlah beban konsolidasian untuk tahun 2011 dibandingkan dengan 6,7% untuk tahun 2010.

5. *Beban Pemasaran*
   Beban pemasaran meningkat sebesar Rp753 miliar, atau 29,8%, dari Rp2.525 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.278 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan dan promosi sebesar Rp749 miliar, atau 37,6%. Peningkatan beban iklan dan promosi ini disebabkan oleh perubahan skema insentif *dealer* di Telkomsel.

6. *Beban Umum dan Administrasi*
   Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp398 miliar, atau 15,7%, dari Rp2.537 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp2.935 miliar pada tahun 2011, sebagian disebabkan oleh peningkatan substansial beban penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang sebesar Rp358 miliar, atau 68,2%, dari Rp525 miliar di tahun 2010 menjadi Rp883 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan perubahan perhitungan piutang ragu-ragu berdasarkan umur piutang menjadi tingkat kolektibilitas.

   Selain itu, beban sumbangan sosial meningkat sebesar Rp119 miliar, atau 69,6%, dari Rp171 miliar di tahun 2010 menjadi Rp290 miliar di tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh ketetapan pemegang saham untuk meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk tanggung jawab sosial perusahaan dari 1,0% jumlah laba komprehensif di tahun 2010 menjadi 2,0% jumlah laba komprehensif di tahun 2011. Dana ini dialokasikan secara merata untuk pembangunan komunitas dan program kemitraan.

   Beban jasa profesional meningkat sebesar Rp72 miliar, atau 44,2%, dari Rp163 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp235 miliar pada tahun 2011.

   Peningkatan beban jasa profesional, sumbangan sosial serta beban penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang diimbangi oleh penurunan substansial beban keamanan dan *screening* sebesar Rp118 miliar, atau 54,9%, dari Rp215 miliar di tahun 2010 menjadi Rp97 miliar di tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan Telkom untuk melakukan penurunan jumlah tenaga kerja keamanan dan menggunakan tenaga kerja keamanan dari Anak Perusahaan, bukan dari pihak ketiga.

   Selain itu beban penagihan menurun sebesar Rp74 miliar, atau 18,5%, dari Rp401 miliar di tahun 2010 menjadi Rp327 miliar di tahun 2011.

7. *(Laba) Rugi Selisih Kurs* - bersih
   (Laba) rugi selisih kurs bersih menurun sebesar Rp253 miliar, atau 588,4% dari laba selisih kurs

sebesar Rp43 miliar pada tahun 2010 menjadi rugi selisih kurs sebesar Rp210 miliar pada tahun 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh apresiasi mata uang Yen dan Dolar AS sebesar 5,6% dan 0,7% di tahun 2011 yang berakibat pada peningkatan biaya hutang dalam denominasi Yen dan Dolar AS.

C. Laba dan Marjin Laba

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, laba menurun sebesar Rp975 miliar, atau 4,3%, dari Rp22.923 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp21.948 miliar pada tahun 2011. Sementara itu, pendapatan meningkat sebesar Rp2.624 miliar atau 3,8%. Marjin laba menurun dari 33,1% pada tahun 2010 menjadi 30,5% pada tahun 2011.

D. Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak menurun sebesar Rp559 miliar, atau 2,6% dari Rp21.416 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp20.857 miliar pada tahun 2011. Marjin laba sebelum pajak menurun dari 31,0% pada tahun 2010 menjadi 29,0% pada tahun 2011.

E. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp159 miliar, atau 2,9%, dari Rp5.546 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp5.387 miliar pada tahun 2011, mengikuti penurunan laba sebelum pajak sebesar 2,9%.

F. Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali meningkat sebesar Rp172 miliar, atau 4,0%, dari Rp4.333 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp4.505 miliar pada 2011.

G. Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menurun sebesar Rp572 miliar, atau 5,0%, dari Rp11.537 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp10.965 miliar pada tahun 2011.

H. Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp4.566 miliar, atau 8,1%, dari Rp56.415 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp60.981 miliar pada tahun 2011. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp15.481 miliar pada tahun 2011, diimbangi dengan dividen tunai sebesar Rp8.849 miliar dan pembelian modal saham yang diperoleh kembali sebesar Rp2.059 miliar. Sebagai hasilnya, laba ditahan mengalami peningkatan sebesar Rp5.146 miliar, atau 19,4% dari Rp41.908 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp47.054 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

Laba bersih per saham menurun sebesar Rp27 atau 4,6% dari Rp587 di tahun 2010 menjadi Rp560 di tahun 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

A. Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar Rp951 miliar, atau 1,4%, dari Rp67.678 miliar dalam tahun 2009 menjadi Rp68.629 miliar pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika, seluler serta jasa telekomunikasi lainnya yang diimbangi dengan penurunan pendapatan telepon tidak bergerak, interkoneksi dan jaringan. Pendapatan dari telepon seluler yang merupakan komponen terbesar dari pendapatan usaha Kami, mencatat sedikit peningkatan sebesar Rp602 miliar atau 2,1% pada tahun 2010.

1. *Pendapatan Telepon Seluler*

   Pendapatan telepon seluler meningkat sebesar Rp602 miliar, atau 2,1%, dari Rp28.532 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp29.134 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pemakaian, fitur dan pendapatan abonemen bulanan, diimbangi dengan penurunan substansial pada pendapatan jasa sambungan sebesar Rp184 miliar atau 82,1% dari Rp224 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp40 miliar pada tahun 2010. Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp622 miliar, atau 2,3% dari Rp27.402 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp28.024 miliar pada tahun 2010. Peningkatan dalam pendapatan pemakaian sejalan dengan peningkatan jumlah pemakaian jaringan seluler Telkomsel sekitar 1,5% dari 133,8 juta menit pada tahun 2009 menjadi 135,8 juta menit pada tahun 2010. Pendapatan fitur meningkat sebesar Rp99 miliar, atau 20,5% dari Rp483 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp582 miliar pada tahun 2010. Hal ini mencerminkan perpindahan preferensi pelanggan dalam pembelian fitur seluler tambahan. Pendapatan abonemen bulanan meningkat sebesar Rp65 miliar atau 15,4% dari Rp423 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp488 miliar pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan abonemen bulanan terutama disebabkan peningkatan pelanggan Telkomsel sebesar 15,1% dari 81,6 juta pelanggan pada tahun 2009 menjadi 94,0 juta pelanggan pada tahun 2010. Peningkatan

ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan prabayar dan pascabayar yang tumbuh masing-masing sebesar 15,4% dan 5,0% pada tahun 2010.

2. *Pendapatan Telepon Tidak Bergerak*
   Pendapatan telepon tidak bergerak menurun sebesar Rp1.346 miliar, atau 9,4%, dari Rp14.286 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp12.940 miliar pada tahun 2010. Penurunan pada pendapatan telepon tidak bergerak terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pemakaian sebesar Rp1.035 miliar atau 10,0% dari Rp10.322 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp9.287 miliar pada tahun 2010. Kemudian pendapatan dari abonemen bulanan turun sebesar Rp256 miliar, atau 7,3% pada tahun 2010. Penurunan pendapatan pemakaian terutama disebabkan penurunan pemakaian lokal sebesar 21,3% dari Rp2.493 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.963 miliar pada tahun 2010, dan penurunan sebesar 12,5% pada pendapatan SLJJ dari Rp1.983 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.736 miliar pada tahun 2010.

3. *Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika*
   Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika meningkat sebesar Rp1.289 miliar, atau 7,0%, dari Rp18.512 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp19.801 miliar pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan layanan SMS, data, internet dan jasa teknologi informatika. Pendapatan layanan data dan internet dan jasa teknologi informatika meningkat sebesar Rp507 miliar, atau 6,5% dari Rp7.790 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp8.297 miliar pada tahun 2010 terutama karena peningkatan usaha pemasaran untuk mendorong peningkatan penjualan atas layanan data dan internet terutama terhadap pelanggan Speedy pada tahun 2010. Pelanggan Speedy meningkat sebesar 44,0% dari sekitar 1,1 juta pelanggan pada tahun 2009 menjadi sekitar 1,6 juta pelanggan pada tahun 2010. Pendapatan SMS meningkat sebesar Rp790 miliar atau 7,5% dari Rp10.499 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp11.289 miliar pada tahun 2010.

4. *Pendapatan Interkoneksi*
   Pendapatan interkoneksi menurun sebesar Rp132 miliar, atau 3,4%, dari Rp3.867 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp3.735 miliar pada tahun 2010. Penurunan pendapatan interkoneksi terutama disebabkan penurunan interkoneksi domestik dan transit. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak dan pendapatan interkoneksi dari jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung internasional *incoming* dari layanan SLI (TIC-007). Pendapatan interkoneksi domestik dan transit menurun sebesar Rp164 miliar, atau 7,0%, dari Rp2.338 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.174 miliar pada tahun 2010, diimbangi dengan peningkatan pendapatan interkoneksi internasional sebesar Rp32 miliar, atau 2,1%, dari Rp1.529 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.561 miliar pada tahun 2010.

   Jumlah pendapatan interkoneksi mencapai kontribusi sebesar 5,4% dari pendapatan usaha konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 5,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

5. *Pendapatan Jaringan*
   Pendapatan jaringan menurun sebesar Rp160 miliar, atau 13,1%, dari Rp1.218 miliar di tahun 2009 menjadi Rp1.058 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sewa *transponder* satelit. Pendapatan sewa *transponder* satelit menurun sebesar Rp104 miliar, atau 21,9%, dari Rp475 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp371 miliar pada tahun 2010 disebabkan penurunan tarif untuk penerimaan satelit stasiun bumi dan *transponder*. Pendapatan sewa sirkit menurun sebesar Rp56 miliar atau 7,5% dari Rp743 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp687 miliar pada tahun 2010 juga disebabkan penurunan tarif sewa sirkit walaupun kapasitas *transponder* satelit yang digunakan maupun kapasitas sewa sirkit mengalami peningkatan pada tahun 2010.

6. *Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya*
   Pada tahun 2010, pendapatan Telkom dari jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp698 miliar, atau 55,3%, dari Rp1.263 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.961 miliar pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan ini terutama berasal dari peningkatan kompensasi KPU sebesar Rp294 miliar dari Rp48 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp342 miliar pada tahun 2010 serta pendapatan lainnya sebesar Rp292 miliar dari Rp154 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp446 miliar pada tahun 2010. Pada tahun 2009 proyek KPU baru dalam tahap pra-operasi, sehingga pendapatan pada tahun tersebut adalah untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2009. Pada tahun 2010 proyek KPU sudah beroperasi penuh.

B. Beban

Jumlah beban meningkat sebesar Rp2.115 miliar, atau 4,8% dari Rp44.139 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp46.254 miliar pada tahun 2010. Kenaikan jumlah beban terutama disebabkan oleh meningkatnya beban

operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi, beban penyusutan dan amortisasi dan beban interkoneksi, serta menurunnya laba selisih kurs-bersih. Peningkatan ini terutama diimbangi dengan penurunan beban karyawan dan beban umum dan administrasi dengan persentase yang lebih kecil. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. *Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi*
   Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp1.497 miliar, atau 10,3%, dari Rp14.549 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp16.046 miliar pada tahun 2010. Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp1.389 miliar atau 18,7% yang disebabkan oleh peningkatan beban yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas stasiun transmisi dan penerimaan, *switching* dan peralatan jaringan pintar Telkomsel serta peningkatan dalam beban *outsourcing*. Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi lainnya terutama juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

   - Beban listrik, gas dan air meningkat sebesar Rp117 miliar atau 16,2% dari Rp724 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp841 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan meningkatnya jumlah BTS seluler dan sambungan nirkabel tidak bergerak serta peningkatan tarif listrik;
   - Beban pemakaian frekuensi radio meningkat sebesar Rp107,7 miliar atau 3,8% dari Rp2.785 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.892 miliar pada tahun 2010, disebabkan oleh peningkatan jumlah total BTS (Flexi dan Telkomsel). BTS Flexi tumbuh sebesar 1,8% dari 5.543 unit pada tahun 2009 menjadi 5.641 unit pada tahun 2010, sementara BTS Telkomsel tumbuh sebesar 18,0% dari 30.992 unit pada tahun 2009 menjadi 36.557 unit pada tahun 2010.
   - Beban asuransi meningkat sebesar Rp72 miliar atau 23,1%, dari Rp312 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp384 miliar pada tahun 2010;
   - Beban sewa kendaraan dan fasilitas pendukung meningkat sebesar Rp17 miliar atau 6,4%.

   Peningkatan di atas dikurangi dengan penurunan beban sewa sirkit dan CPE sebesar Rp259 miliar atau 54,7% serta beban pokok penjualan pesawat telepon, kartu SIM dan RUIM sebesar Rp75 miliar atau 6,6%.

2. *Beban Penyusutan dan Amortiasi*
   Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar Rp637 miliar, atau 4,6%, dari Rp13.975 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp14.612 miliar pada tahun 2010 yang terutama disebabkan peningkatan beban penyusutan Rp519 miliar, atau 4,1%. Peningkatan beban penyusutan terutama disebabkan oleh peningkatan beban penyusutan fasilitas pendukung, BTS dan transportasi dikurangi dengan penurunan beban penyusutan untuk jaringan kabel, peralatan *switching* serta sewa pembiayaan. Beban amortisasi juga meningkat sebesar Rp118 miliar atau 8,4% terutama disebabkan peningkatan *goodwill* akibat dilaksanakannya beberapa akuisisi dan perolehan aset tidak berwujud.

3. *Beban Karyawan*
   Beban karyawan menurun sebesar Rp1.039 miliar, atau 12,4%, dari Rp8.371 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp7.332 miliar pada tahun 2010. Penurunan beban karyawan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya beban program pensiun dini dimana untuk tahun 2009 dikeluarkan sebesar Rp1.044 miliar sedangkan untuk tahun 2010 tidak ada karyawan yang ditawarkan untuk pensiun dini. Sebagai tambahan, beban gaji dan tunjangan menurun sebesar Rp270 miliar atau 8,9%, sejalan dengan penurunan jumlah karyawan di tahun 2010. Selain itu:
   - Beban pensiun berkala bersih menurun sebesar Rp121 miliar, atau 19,3%, dari Rp626 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp505 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan penurunan beban pensiun Telkom sebesar Rp140 miliar diimbangi sebagian dengan peningkatan beban pensiun Telkomsel. Penurunan beban pensiun terutama disebabkan peningkatan imbal hasil pada aset program;
   - Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih menurun sebesar Rp93 miliar, atau 28,1% dari Rp331 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp238 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan imbal hasil yang diharapkan dari aset program berdasarkan perhitungan aktuaria; dan
   - Beban penghargaan masa kerja menurun sebesar Rp39 miliar atau 33,3% dari Rp117 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp78 miliar pada tahun 2010.

   Penurunan di atas dikurangi dengan peningkatan beban-beban sebagai berikut:
   - Beban cuti, insentif dan tunjangan lainnya meningkat sebesar Rp360 miliar atau 16,3%, dari Rp2.214miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.574 miliar pada tahun 2010 disebabkan kenaikan insentif karyawan Telkom pada tahun 2010 sejumlah Rp236 miliar dan juga dipengaruhi kenaikan gaji tahunan; dan

- Pajak penghasilan (PPh) karyawan meningkat sebesar Rp122 miliar, atau 18,1%, dari Rp674 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp796 miliar pada tahun 2010 disebabkan pembayaran pajak untuk program pensiun dini. Program pensiun dini dilaksanakan pada tahun 2009 akan tetapi pembayaran hak karyawan dilakukan pada tahun 2010. Karena itu pencatatan pemotongan pajak dicatat pada tahun 2010 yang menyebabkan peningkatan beban pajak penghasilan karyawan.

4. *Beban Interkoneksi*
   Beban interkoneksi meningkat sebesar Rp157 miliar, atau 5,4%, dari Rp2.929 miliar tahun 2009 menjadi Rp3.086 miliar pada tahun 2010. Beban interkoneksi meningkat terutama disebabkan peningkatan beban interkoneksi domestik dan transit serta interkoneksi internasional. Beban interkoneksi mencapai 6,7% dari beban konsolidasian untuk tahun 2010 dibandingkan dengan 6,6% untuk tahun 2009.

5. *Beban Pemasaran*
   Beban pemasaran meningkat sebesar Rp265 miliar, atau 11,7%, dari Rp2.260 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.525 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan dan promosi sebesar Rp270 miliar atau 15,7%. Peningkatan beban iklan ini disebabkan promosi produk seluler serta produk *broadband* Kami yaitu seperti Flash dan Speedy.

6. *Beban Umum dan Administrasi*
   Beban umum dan administrasi menurun sebesar Rp269 miliar, atau 9,6%, dari Rp2.806 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.537 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh penurunan beban penagihan sebesar Rp317 miliar, atau 44,2% dan beban keamanan dan *screening* sebesar Rp50 miliar atau 18,9%. Penurunan beban penagihan disebabkan karena di tahun 2010 Telkom hanya menggunakan Finnet sebagai agen penagihan, sedangkan pada tahun 2009 menggunakan banyak agen penagihan. Penurunan pada beban penagihan serta beban keamanan dan *screening* diimbangi dengan peningkatan beban sumbangan sosial sebesar Rp72 miliar, atau 72,7%, dan peningkatan beban perjalanan sebesar Rp37 miliar atau 16,6%.

7. *(Laba) rugi selisih kurs-bersih*
   Laba selisih kurs mengalami penurunan sebesar Rp930 miliar, atau 95,6% dari Rp973 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp43 miliar pada tahun 2010. Penurunan laba selisih kurs terutama disebabkan oleh apresiasi Yen yang berakibat pada meningkatnya biaya jasa atas utang berdenominasi Yen yang diimbangi dengan apresiasi Rupiah yang diakibatkan oleh laba translasi atas pinjaman dalam mata uang Dolar AS.

C. Laba dan Marjin Laba

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba menurun sebesar Rp1.158 miliar, atau 4,8% dari Rp24.081 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp22.923 miliar pada tahun 2010. Sementara itu, pendapatan meningkat sebesar Rp951 miliar atau 1,4%. Margin laba Telkom sedikit menurun dari 35,6% pada tahun 2009 menjadi 33,4% pada tahun 2010.

D. Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak menurun sebesar Rp1.031 miliar, atau 4,6% dari Rp22.447 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp21.416 miliar pada tahun 2010. Margin laba sebelum pajak menurun dari 33,2% pada tahun 2009 menjadi 31,0% pada tahun 2010.

E. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp858 miliar, atau 13,4%, dari Rp6.404 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp5.546 miliar pada tahun 2010, disebabkan karena penurunan tarif pajak pendapatan perusahaan yang dikenakan pada Telkom yang sebelumnya 23,0% menjadi 20,0% pada akhir tahun 2010. Penurunan ini diterapkan pada BUMN yang setidaknya 40,0% sahamnya dimiliki publik.

F. Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali

Laba tahun penjualan diatribusikan kepada kepentingan non- pengendali menurun sebesar Rp311 miliar, atau 6,7%, dari Rp4.644 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp4.333 miliar pada tahun 2010.

G. Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Pemilik Induk

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba tahun penjualan diatribusikan kepada pemilik induk meningkat sebesar Rp138 miliar, atau 1,2%, dari Rp11.399 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp11.537 miliar pada tahun 2010.

H. Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp6.920 miliar, atau 14,0%, dari Rp49.495 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp56.415 miliar pada tahun 2010. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp15.904 miliar pada tahun 2010, dikurangi dengan dividen tunai sebesar Rp8.892 miliar. Sebagai hasilnya laba ditahan

Kami meningkat sebesar Rp5.869 miliar, atau 28,3% dari Rp36.039 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp41.908 miliar pada tanggal 31 Desember 2010.

Hasil Operasi Telkom Berdasarkan Segmen

	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember,			
	2009 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2011 (Rp miliar)	2011 (US$ juta)
Sambungan Kabel Tidak Bergerak				
Hasil Segmen				
Pendapatan Eksternal	21.210	21.619	21.970	2.423
Pendapatan Antar Segmen	4.237	5.434	6.549	722
Jumlah Pendapatan Segmen	25.447	27.053	28.519	3.145
Pendapatan Lainnya	361	314	309	34
Beban Segmen	(21.401)	(22.268)	(23.385)	(2.579)
Hasil Segmen	4.407	5.099	5.443	600
Penyusutan dan Amortisasi	(4.684)	(4,211)	(3.249)	(358)
Beban Non-Kas lain-lain	(461)	(337)	(709)	(78)
Sambungan Nirkabel Tidak Bergerak				
Hasil Segmen				
Pendapatan Eksternal	3.431	2.951	2.101	232
Pendapatan Antar Segmen	209	174	126	14
Jumlah Pendapatan Segmen	3.640	3.125	2.227	246
Pendapatan Lainnya	8	22	11	1
Beban Segmen	(3.368)	(2.877)	(3.671)	(405)
Hasil Segmen	280	270	(1.433)	(158)
Penyusutan dan Amortisasi	(637)	(730)	(1.309)	(144)
Beban Non-Kas lain-lain	-	(34)	(19)	(2)
Seluler				
Hasil Segmen				
Pendapatan Eksternal	42.633	43.592	46.632	5.143
Pendapatan Antar Segmen	1.764	1.931	2.054	227
Jumlah Pendapatan Segmen	44.397	45.523	48.686	5.370
Pendapatan Lainnya	145	220	295	33
Beban Segmen	(25.326)	(28.386)	(31.314)	(3.453)
Hasil Segmen	19.216	17.357	17.667	1.950
Penyusutan dan Amortisasi	(8.623)	(9.637)	(10.261)	(1.132)
Beban Non-Kas lain-lain	(108)	(148)	(155)	(17)
Lain-Lain				
Hasil Segmen				
Pendapatan Eksternal	404	467	550	61
Pendapatan Antar Segmen	325	745	941	104
Jumlah Pendapatan Segmen	729	1.212	1.491	165
Pendapatan Lainnya	290	52	250	27
Beban Segmen	(840)	(1.053)	(1.460)	(161)
Hasil Segmen	179	211	281	31
Penyusutan dan Amortisasi	(31)	(34)	(44)	(5)
Beban Non-Kas lain-lain	(4)	(6)	(1)	-

HASIL SEGMEN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2010

Segmen Telepon Kabel Tidak Bergerak

Pendapatan segmen telepon kabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp1.466 miliar atau 5,4% dari Rp27.053 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp28.519 miliar pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan segmen ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data dan internet sebesar Rp1.134 miliar atau 16,8% dari peningkatan pendapatan koneksi internet dari layanan *broadband* dan jasa telekomunikasi lainnya sebesar Rp819 miliar, atau 37,9%. Peningkatan ini diimbangi dengan penurunan dari pendapatan pemakaian sebesar Rp193 miliar atau 2,1% dan penurunan pendapatan jaringan sebesar Rp160 miliar atau 3,6%.

Beban segmen telepon kabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp1.117 miliar. atau 5,0% dari Rp22.268 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp23.385 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan karena peningkatan pada beban pegawai sebesar Rp845 miliar, atau 17,4% terutama disebabkan adanya program pensiun dini, beban umum dan administrasi Rp497 miliar atau 28,5% dan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp728 miliar atau 10,0%. Peningkatan ini diimbangi dengan penurunan pada beban amortisasi sebesar Rp955 miliar atau 73,5%.

Segmen Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Pendapatan segmen telepon nirkabel tidak bergerak menurun sebesar Rp898 miliar atau 28,7% dari Rp3.125 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp2.227 miliar pada tahun 2011 yang disebabkan menurunnya pendapatan percakapan telepon nirkabel sebesar Rp546 miliar atau 28,4% data, internet dan layanan teknologi informatika sebesar Rp290 miliar atau 32,1%, juga karena menurunnya pendapatan penerimaan interkoneksi sebesar Rp62 miliar, atau 20,6%.

Beban segmen telepon nirkabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp794 miliar atau 28% dari Rp2.877 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.671 miliar pada tahun 2011, terutama karena adanya penurunan nilai aset sebesar

Rp564 miliar, meningkatnya beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp158 miliar atau 10,9% dan meningkatnya beban pegawai sebesar Rp30 miliar atau 12,6%.

Segmen Seluler

Pendapatan segmen seluler meningkat sebesar Rp3.163 miliar, atau 6,9% dari Rp45.523 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp48.686 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan percakapan seluler sebesar Rp1.164 miliar atau 3,7% serta pendapatan data dan internet sebesar Rp1.990 miliar, atau 19,9%.

Beban segmen seluler meningkat sebesar Rp2.928 miliar atau 10,3%. dari Rp28.386 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp31.314 miliar pada tahun 2011, terutama karena meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan layanan telekomunikasi sebesar Rp1.082 miliar atau 4,4%, beban penyusutan sebesar Rp600 miliar atau 6,4%, beban pegawai sebesar Rp270 miliar atau Rp16,3%, beban interkoneksi sebesar Rp249 miliar, atau 17,1%; dan peningkatan beban pemasaran sebesar Rp215 miliar, atau 52,4% serta peningkatan beban amortisasi sebesar Rp138 miliar atau 168,5%.

Segmen Lain-lain

Pendapatan segmen lain-lain meningkat sebesar Rp279 miliar atau 23,0% dari Rp1.212 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.491 miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan *directory assistant*, properti serta pendapatan lainnya sebesar Rp149 miliar atau 21,8% dan pendapatan *call center* sebesar Rp130 miliar atau 24,6%.

Beban segmen lain-lain meningkat sebesar Rp407 miliar atau 38,7% dari Rp1.053 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.460 miliar pada tahun 2011, terutama karena meningkatnya beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp252 miliar atau 39,7%, dan beban pegawai sebesar Rp63 miliar atau 58,6% serta beban pemasaran sebesar Rp29 miliar atau 20,1%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Segmen Telepon Kabel Tidak Bergerak

Pendapatan segmen telepon tidak bergerak kabel meningkat sebesar Rp1.606 miliar atau 6,3% dari Rp25.447 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp27.053 miliar pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan segmen ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data dan internet sebesar Rp3.763 atau 65,3% dari peningkatan pendapatan koneksi internet dari layanan *broadband*. Kontribusi kenaikan ini juga berasal dari pendapatan layanan jaringan sebesar Rp571 miliar, atau 13,7% dan pendapatan interkoneksi sebesar Rp308 miliar, atau 10,3%. Peningkatan pendapatan layanan pada segmen telepon kabel tidak bergerak ini diimbangi oleh penurunan pendapatan percakapan telepon kabel tidak bergerak sebesar Rp3.177 miliar, atau 28,9% terutama karena menurunnya volume panggilan.

Beban segmen telepon kabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp867 miliar, atau 4,1% dari Rp21.401 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp22.268 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan karena peningkatan pada beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp992 miliar atau 25,8% terutama disebabkan peningkatan beban kerjasama dan transmisi radio, layanan interkoneksi sebesar Rp810 miliar, atau 15,8% disebabkan karena peningkatan interkoneksi internasional dan beban pemasaran sebesar Rp103 miliar, atau 18,3%. Kenaikan dari beban segmen telepon tidak bergerak diimbangi dengan penurunan beban pegawai sebesar Rp849 miliar, atau 13,2% terutama disebabkan karena tidak adanya beban pensiun dini pada tahun 2010 dan beban umum dan administrasi sebesar Rp306 miliar atau 24,3%.

Segmen Telepon Nirkabel Tidak Bergerak

Pendapatan segmen telepon nirkabel tidak bergerak menurun sebesar Rp515 miliar, atau 14,1%, dari Rp3.640 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp3.125 miliar pada tahun 2010, yang disebabkan menurunnya pendapatan percakapan telepon nirkabel tidak bergerak sebesar Rp568 miliar, atau 22,8% dan pendapatan interkoneksi sebesar Rp67 miliar, atau 18,1%. Penurunan ini diimbangi dengan kenaikan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika sebesar Rp121 miliar, atau 15,4%.

Beban segmen telepon tidak bergerak nirkabel menurun sebesar Rp491 miliar atau 14,6%, dari Rp3.368 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.877 miliar pada tahun 2010, terutama karena menurunnya beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp385miliar, atau 22,6%, beban pegawai sebesar Rp130 miliar atau 46,0%, beban interkoneksi sebesar Rp66 miliar, atau 21,9% dan beban pemasaran sebesar Rp47, atau 15,4%. Penurunan beban segmen telepon nirkabel tidak bergerak diimbangi oleh kenaikan beban penyusutan sebesar Rp100 miliar, atau 15,8% dan beban umum dan administrasi sebesar Rp31 miliar, atau 22,5%.

Segmen Seluler

Pendapatan segmen seluler meningkat sebesar Rp1.126miliar, atau 2,5%, dari Rp44.397 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp45.523 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan percakapan seluler sebesar Rp2.035 miliar, atau 6,7% sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan Telkomsel sebesar 15,1% dari 81,6 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 94,0 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini diimbangi dengan penurunan pada pendapatan data dan internet sebesar Rp932 miliar, atau 8,5%.

Beban segmen seluler meningkat sebesar Rp3.060 miliar, atau 12,1%, dari Rp25.326 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp28.386 miliar pada tahun 2010, terutama karena meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan layanan telekomunikasi sebesar Rp1.082 miliar, atau 10,5% terutama disebabkan peningkatan sewa peralatan *radio carrier*, antena dan menara;

beban penyusutan sebesar Rp876 miliar atau 10,3%, beban interkoneksi sebesar Rp249 miliar atau 8,7%, beban pegawai sebesar Rp233 miliar, atau 16,2%, beban amortisasi sebesar Rp138 miliar, atau 168,5% disebabkan karena amortisasi perangkat lunak; serta peningkatan beban pemasaran sebesar Rp215 miliar, atau 17,3% sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan seluler Telkomsel dan meningkatnya BTS Telkomsel dari 30.992 unit pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 36.557 unit pada tahun 2010. Peningkatan segmen seluler diimbangi dengan penurunan dalam beban umum dan administrasi sebesar Rp67 miliar, atau 5,5%.

Segmen Lain-lain

Pendapatan segmen lain-lain meningkat sebesar Rp483 miliar, atau 66,3%, dari Rp729 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.212 miliar pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan *call center* sebesar Rp163 miliar, atau 42,9% dan pendapatan layanan pengelolaan gedung dan properti sebesar Rp320 miliar, atau 91,6%.

Beban segmen lain-lain meningkat sebesar Rp213 miliar, atau 25,4%, dari Rp840 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.053 miliar pada tahun 2010, terutama karena meningkatnya beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp511 miliar, atau 409,7% dan beban umum dan administrasi sebesar Rp50 miliar, atau 98,4%. Kenaikan beban segmen lain-lain diimbangi dengan penurunan beban pegawai sebesar Rp271 miliar, atau 70,0%.

ARUS KAS BERSIH

Tabel berikut menyajikan informasi yang berhubungan dengan arus kas konsolidasian Perusahaan, seperti yang disajikan dalam (dan disiapkan dalam basis yang sama) pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2009 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2011 (Rp miliar)	2011 (US$ juta)
Arus Kas Bersih:				
Yang dihasilkan dari kegiatan operasi	29.811	27.759	30.553	3.368
Untuk kegiatan investasi	(21.828)	(16.518)	(14.505)	(1.600)
Untuk kegiatan pendanaan	(6.749)	(9.820)	(15.539)	(1.713)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	1.234	1.421	509	55
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas	(319)	(106)	5	1
Kas dan setara kas pada awal tahun	6.890	7.805	9.120	1.006
Kas dan setara kas pada akhir tahun	7.805	9.120	9.634	1.062

Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2011 arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi mencapai Rp30.553 miliar (US$3.368 juta) dibandingkan Rp27.759 miliar pada tahun 2010. Peningkatan arus kas Kami terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.908 miliar, atau 4,3% yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan; dan
- Peningkatan penerimaan diatas diimbangi oleh peningkatan pembayaran kas untuk beban sebesar Rp162 miliar, atau 0,6%.

Pada tahun 2010, arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi mencapai Rp27.759 miliar dibandingkan Rp29.811 miliar pada tahun 2009. Penurunan arus kas Kami terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran beban sebesar Rp4.197 miliar, atau 19,9%.

Peningkatan pembayaran beban diimbangi oleh peningkatan penerima dan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp1.728 miliar, atau 2,7%.

Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp21.828 miliar, Rp16.518 miliar dan Rp14.505 miliar (US$1.600 juta) masing-masing untuk tahun 2009, 2010 dan 2011.

Selain kas dan bank, Telkom menginvestasikan sebagian besar dari kelebihan kasnya dalam bentuk deposito berjangka. Sejak tanggal 14 Mei 2004 Telkom juga menginvestasikan sebagian dari kelebihan uang kasnya dalam bentuk reksadana berbasis mata uang Rupiah dan surat berharga lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2011, aset tersedia untuk dijual di reksadana dan efek yang bisa diperdagangkan adalah sebesar Rp361 miliar (US$40 juta).

Selama tahun 2011 dibandingkan dengan 2010, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi menurun sebesar Rp2.068 miliar, atau 12,5%, terutama dikarenakan penurunan sebesar Rp1.810 miliar, atau 12,1%, pada pembayaran kas untuk pembelian aset tetap.

Selama tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009, arus kas bersih yang digunakan pada kegiatan investasi menurun sebesar Rp5.310 miliar, atau 24,3%, terutama disebabkan oleh penurunan pembelian aset tetap sebesar Rp5.527 miliar, atau 27,0%.

Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan masing-masing berjumlah Rp6.749 miliar, Rp9.820 miliar dan Rp15.539 miliar (US$1.713 juta) masing-masing pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan dalam tiga tahun terakhir terdiri dari hasil pinjaman, pembayaran pinjaman dan pembayaran dividen tunai.

Pada tahun 2011, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat sebesar Rp5.719 miliar atau 58,2% terutama disebabkan oleh:

- Penurunan penerimaan kas dari obligasi sebesar Rp2.991 miliar, karena tidak ada obligasi yang diterbitkan di tahun 2011;
- Penurunan penerimaan kas dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp2.146 miliar, atau 44,3%; dan
- Kenaikan pembayaran kas untuk pembelian kembali saham yang telah diterbitkan sebesar Rp2.059 miliar, karena tidak ada pembelian semacam ini di tahun 2010.

Peningkatan tersebut diimbangi dengan penurunan pembayaran kembali pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.382 miliar, atau 15,9%.

Pembayaran Kembali Utang Bank dan Pinjaman Tahun Berjalan

Pada posisi tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, masing-masing 16,3%, 19,7% dan 20,9% dari utang bank dan pinjaman Kami dalam mata uang asing, terutama Dolar AS dan Yen Jepang. Arus kas Kami dalam Rupiah yang digunakan untuk pembayaran kembali utang jangka panjang sangat terpengaruh oleh depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS selama tahun 2011, dibandingkan dengan apresiasi Rupiah selama tahun 2010 dan 2009.

Kami mencatatkan pembayaran kembali bersih atas utang bank dan pinjaman tahun berjalan sebesar Rp7.278 miliar pada tahun 2009, Rp9.098 miliar pada tahun 2010 dan Rp7.967 miliar (US$879 juta) pada tahun 2011. Arus kas keluar pada tahun 2011 terutama digunakan untuk pembiayaan:

- Pinjaman jangka panjang sebesar Rp7.334 miliar;
- Pinjaman jangka pendek sebesar Rp272 miliar; dan
- Utang sewa pembiayaan sebesar Rp176 miliar.

LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Kami memiliki kas dan setara kas sebesar Rp9.634 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Jumlah kas dan setara kas meningkat Rp514 miliar sejak tangal 31 Desember 2010. Selama tahun 2011, arus kas terutama berasal dari kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha yaitu sebesar Rp71.105 miliar. Arus kas ini diimbangi oleh kas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, termasuk, tapi tidak terbatas pada:

- Pembayaran beban;
- Pendanaan belanja modal untuk infrastruktur, termasuk jaringan utama atau *backbone* Kami, jaringan utama yang berbasis *Internet Protocol*, *regional-metro junction*, satelit, infrastuktur bagi bisnis *new wave*, termasuk *broadband* dan *Metro-E*, jaringan komunikasi data, aplikasi TI dan konten, layanan *nodes* dan kabel, infrastruktur untuk mengoptimalkan layanan telepon kabel tidak bergerak dan Flexi yang menjadi *legacy* Kami, serta infrastruktur pendukung seperti perangkat pendukung dan pusat layanan bantuan; dan
- Pembayaran utang terkait dengan utang bank dan pinjaman saat ini, termasuk pinjaman penerusan, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun serta pinjaman jangka pendek Kami.

Pada tahun 2012, Kami berharap likuiditas dan sumber permodalan Kami, di luar dari kebutuhan modal kerja dan pembayaran pinjaman dan pajak, paling tidak akan terdiri dari belanja modal untuk infrastruktur, dividen, kontribusi pembayaran untuk rencana pensiun dan rencana kesehatan pasca kerja, akuisisi potensial untuk mengembangkan bisnis dan potensi penawaran pensiun dini kepada karyawan terpilih.

Kami menargetkan arus kas masuk Kami pada tahun 2012 terutama akan dikontribusikan oleh kas yang berasal dari kegiatan usaha, fasilitas pinjaman baru perbankan, dan jika diperlukan pendanaan oleh vendor serta penggunaan fasilitas kredit yang telah dimiliki. Pada tanggal 31 Desember 2011, Kami masih mempunyai fasilitas pinjaman sebesar Rp3,1 triliun yang belum dimanfaatkan.

Kami tidak menargetkan untuk memperoleh sumber pendanaan lain selama tahun 2012. Kemampuan Kami untuk memperoleh fasilitas kredit dan mengakses pasar modal Indonesia akan sebagian tergantung pada kondisi pasar kredit dan finansial Indonesia dan global. Kami tidak dapat memastikan bahwa Kami akan dapat memperoleh pendanaan tersebut sesuai dengan syarat dan kondisi yang Kami harapkan.

Pada tahun 2012, Kami juga memproyeksikan tren penurunan akan masih terjadi di sisi pendapatan telepon kabel tidak bergerak, dan penyesuaian tertentu terhadap tarif interkoneksi yang mengacu pada ketentuan interkoneksi berbasis biaya dapat terus mengakibatkan penurunan pada sisi pendapatan interkoneksi. Namun demikian, Kami memprediksi penurunan itu sebagian akan dapat dikompensasikan oleh kenaikan di pos lainnya, seperti bisnis *new wave* Kami. Lihat "Analisis dan Pembahasaan Manajemen atas Kinerja Perusahaan - Tinjauan Keuangan".

ASET LANCAR

Aset lancar berjumlah Rp18.729 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp21.258 miliar (US$2.344 juta) pada tanggal 31 Desember 2011 mencerminkan peningkatan sebesar Rp2.529 miliar atau 13,5%. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- Peningkatan aset tersedia untuk dijual sebesar Rp791 miliar atau 100% pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0 miliar pada tanggal 31 Desember 2010;
- Peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp419 miliar atau 11,8% dari Rp3.564 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.983 miliar pada tahun 2011;
- Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp514 miliar, atau 5,6%, dari Rp9.120 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp9.634 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Lihat analisis terperinci pada bagian arus kas bersih; dan
- Peningkatan tagihan restitusi pajak sebesar Rp238 miliar dari Rp133 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp371 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 komposisi aset lancar dalam mata uang asing masing-masing sebesar 18,7%, 12,0% dan 11,6% pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 komposisi liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing masing-masing sebesar 22,2%, 21,6% dan 24,7% terutama dalam Dolar AS dan Yen. Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing pada tahun-tahun tersebut mempengaruhi aset lancar Perusahaan.

Piutang
Untuk rincian lihat Catatan 5 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Untuk rincian lihat Catatan 11 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pada tanggal 31 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2011, saldo liabilitas jangka pendek masing-masing sebesar Rp20.473 miliar dan Rp22.189 miliar (US$2.447 juta) menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.716 miliar atau 8,4%. Peningkatan ini disebabkan oleh:
- Peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.381 miliar atau 40,5%, dari Rp3.409 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp4.790 miliar pada tahun 2011; dan
- Peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp1.122 miliar atau 17,6%, dari Rp6.357 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp7.479 miliar pada tahun 2011.

Peningkatan ini diimbangi dengan:
- Penurunan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp491 miliar atau 9,3%, dari Rp5.304 miliar tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp4.813 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan jadwal pembayaran kembali utang; dan
- Penurunan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp316 miliar atau 27,4%, dari Rp1.154 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp838 miliar pada tahun 2011.

Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Untuk rincian lihat Catatan 17 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Beban yang Masih Harus Dibayar
Untuk rincian lihat Catatan 14 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

MODAL KERJA BERSIH
Defisit modal kerja bersih, dihitung dari selisih antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek, berjumlah sebesar Rp1.744 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp931 miliar (US$103 juta) pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan defisit modal kerja bersih terutama disebabkan oleh:
- Peningkatan substansial aset tersedia untuk dijual sebesar Rp791 miliar;
- Peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp419 miliar;
- Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp514 miliar;
- Peningkatan tagihan restitusi pajak sebesar Rp238 miliar;
- Penurunan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp491 miliar;
- Penurunan utang usaha terhadap pihak berelasi sebesar Rp316 miliar; dan
- Penurunan utang dividen sebesar Rp254 miliar.

Peningkatan ini diimbangi:
- Peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.381 miliar; dan
- Peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.122 miliar.

Telkom berharap defisit modal kerja bersih dapat dipenuhi dari berbagai sumber pendanaan termasuk penerimaan kas dari kegiatan operasional dan pinjaman bank. Lihat bagian "Likuiditas dan Sumber Permodalan".

STRUKTUR MODAL
Struktur modal Telkom per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

	Jumlah (Rp miliar)	Porsi (%)
Utang jangka pendek	100	0,1
Utang jangka panjang	17.771	27,2
Kewajiban	17.871	27,3
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	47.510	72,7
Jumlah Modal Yang Investasikan	**65.381**	**100,0**

Kami melakukan pendekatan kualitatif untuk menentukan struktur permodalan dan tingkat utang. Berdasarkan perjanjian sindikasi pinjaman utang dengan BNI dan BRI per tanggal 16 Juni 2009, Kami diminta untuk menjaga tingkat rasio hutang terhadap modal tidak lebih dari 2,0 dan rasio *debt service coverage* diatas 1,25 kali. Pada tanggal 31 Desember 2011, rasio hutang terhadap modal ("DER") Telkom adalah 0,4 dan rasio *debt service coverage* adalah 4,6 kali, mengindikasikan kemampuan Perusahaan yang tinggi dalam melunasi hutangnya. Tingkat hutang ditentukan oleh rencana Kami dalam mengembangkan usaha saat ini dan usaha strategis baru. Untuk mendapatkan tingkat hutang yang optimal, Kami juga mempertimbangkan tingkat rasio hutang dengan membandingkan terhadap sesama perusahaan telekomunikasi di kawasan regional.

UTANG BANK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG

Saldo utang konsolidasian (terdiri dari pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, utang bank) pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, tercantum pada tabel berikut:

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2009 (Rp miliar)	2010 (Rp miliar)	2011 (Rp miliar)	2011 (US$ juta)
Rupiah Indonesia	18.970	17.677	14.142	1.560
Dolar AS(1)	2.513	3.147	2.561	282
Yen Jepang(2)	1.177	1.191	1.168	129
Jumlah	**22.660**	**22.015**	**17.871**	**1.971**

(1) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs Rp9.430, Rp9.015 dan Rp9.075 = US$1, yaitu nilai jual Reuters untuk Dolar AS pada setiap tanggal tersebut.
(2) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, yang dijabarkan ke dalam Rupiah pada Rp102,2, Rp110,8 dan Rp117,0 = Yen 1, yaitu nilai tukar beli untuk Yen pada setiap tanggal tersebut.

Dari seluruh hutang Telkom Group pada tanggal 31 Desember 2011, pembayaran sampai dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2012, 2013 sampai pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 sampai pada tahun 2016 masing-masing sebesar Rp4.913 miliar, Rp7.200 miliar dan Rp2.435 miliar.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai hutang Telkom dan Telkomsel, lihat Catatan 16-20 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

ESTIMASI, ASUMSI DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Untuk pembahasan yang lengkap atas estimasi, asumsi akuntansi dan kebijakan yang signifikan lihat Catatan 2 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Standar Akuntansi Baru

Lihat Catatan 2a pada Laporan Keuangan Konsolidasian Kami untuk pembahasan standar akuntansi dan pemahaman baru dan yang telah direvisi serta belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang sesuai dengan Kami dan Anak Perusahaan Kami.

Kesimpulan berikut berisikan penjelasan mengenai konsekuensi perpajakan yang berlaku di Indonesia dan negara bagian AS atas pembelian, kepemilikan dan penjualan ADS atau bagian Saham Biasa. Kesimpulan ini bukan merupakan penjelasan lengkap atas seluruh pertimbangan pengenaan yang mungkin relevan dengan keputusan untuk membeli, memiliki atau menjual ADS atau bagian dari Saham Biasa.

Investor sebaiknya mengkonsultasikan dengan penasihat perpajakan mereka mengenai konsekuensi pajak yang berlaku di Indonesia maupun di AS, terhadap mereka terkait pembelian, kepemilikan dan penjualan ADS atau bagian dari Saham Biasa.

PERPAJAKAN

Berikut ini adalah ikhtisar pajak penghasilan Indonesia dan AS yang berisi uraian mengenai konsekuensi pajak Indonesia dan US Federal terhadap pembelian, kepemilikan dan penjualan ADS atau Saham Biasa.

Para investor harus berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka mengenai konsekuensi pajak Indonesia dan US Federal terhadap pembelian, kepemilikan dan penjualan ADS atau Saham Biasa.

Perpajakan Indonesia

Berikut ini adalah ikhtisar konsekuensi pajak Indonesia atas kepemilikan dan pelepasan Saham Biasa atau ADS kepada perorangan bukan Warga Negara Indonesia atau perusahaan asing yang memiliki Saham Biasa atau ADS (Pemegang bukan Warga Negara Indonesia). "Perorangan bukan Warga Negara Indonesia" adalah Warga Negara Asing yang secara fisik tidak berada di Indonesia selama-lamanya 183 hari atau lebih selama jangka waktu 12 bulan, selama jangka waktu tersebut perorangan bukan Warga Negara Indonesia menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau penjualan Saham Biasa atau ADS dan "perusahaan asing" adalah badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau terorganisasi berdasarkan hukum yurisdiksi selain Indonesia dan tidak memiliki tempat berbisnis tetap atau menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia selama tahun pajak Indonesia tempat badan usaha bukan Indonesia tersebut menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan Saham Biasa atau ADS. Dalam menentukan kedudukan perorangan atau badan, yang dipertimbangkan adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian pajak berganda yang berlaku, Indonesia merupakan salah satu pihak yang berpartisipasi.

Dividen

Dividen yang disampaikan oleh Perusahaan di luar dari laba ditahan dan dibagikan kepada Pemegang Saham Non-Indonesia terkait Saham Biasa atau ADS dapat berubah terkait pajak di Indonesia, yang sejak tanggal dikeluarkannya Laporan Keuangan ini ditetapkan sebesar 20%, atas jumlah distribusi (dalam hal pembayaran dividen tunai) atau atas saham proporsional milik pemegang saham atas nilai distribusinya. Tingkat suku bunga yang lebih rendah yang dikenakan atas dasar dua kebijakan pajak tersebut dapat diterapkan jika penerima dividen dapat memenuhi persyaratan ketat berikut ini: (i) Penerima pendapatan itu adalah pemilik dari dividen; (ii) penerima pendapatan harus menyampaikan formulir khusus yang ditetapkan oleh Kantor Perpajakan Indonesia yang bertindak sebagai Surat Keterangan Domisili (*the "Certificate*

of Residence") yang diisi oleh penerima pendapatan itu dan disahkan oleh otoritas negara itu di mana penerima adalah warga negara ; dan (iii) penerima pendapatan tidak menyalahgunakan kebijakan pajak itu yang ditetapkan dalam ketentuan atas pencegahan penyalahgunaan kebijakan pajak itu. Indonesia telah menyelesaikan kebijakan pajak ganda dengan sejumlah negara, termasuk Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Malaysia, Belanda, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris dan AS. Di bawah peraturan perpajakan AS-Indonesia, pajak atas dividen secara umum, tanpa memperhitungkan hak suara 25%, berkurang menjadi 15%.

Capital Gains

Penjualan atau pengalihan Saham Biasa melalui BEI merupakan subyek pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Pialang yang melakukan transaksi diwajibkan memotong pajak tersebut. Kepemilikan saham pihak pendiri atau penjualan atau pengalihan saham pihak pendiri melalui BEI, berdasarkan peraturan pajak Indonesia yang berlaku saat ini, dapat terkena tambahan pajak penghasilan yang bersifat final 0,5%.

Dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan, perkiraan penghasilan bersih yang diterima atau masih akan diterima dari penjualan aset bergerak di Indonesia, yang mencakup Saham Biasa yang tidak tercatat di BEI atau ADS, oleh pemegang saham bukan Warga Negara Indonesia (kecuali penjualan aset berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia) dapat terkena pemotongan pajak penghasilan di Indonesia dengan tarif 20%. Pada tahun 1999, Kementrian Keuangan mengeluarkan keputusan yang menyatakan perkiraan penghasilan bersih untuk penjualan saham yang diterima oleh wajib pajak bukan penduduk di Perusahaan non-publik sebesar 25% dari harga jual, yang menghasilkan tarif pemotongan pajak penghasilan efektif sebesar 5% dari harga penjualan. Pajak ini merupakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final dan kewajiban membayar terletak di pihak pembeli (apabila merupakan wajib pajak Indonesia) atau perusahaan (apabila pembeli adalah wajib pajak bukan Warga Negara Indonesia). Pembebasan dari pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di perusahaan non-publik dapat diberikan kepada penjual saham yang bukan Warga Negara Indonesia tergantung ketentuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan. Agar mendapat manfaat dari pembebasan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan, penjual bukan Warga Negara Indonesia harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili Pajak kepada pembeli atau perusahaan dan kepada Kantor Pajak Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas pembeli atau perusahaan (apabila pembeli adalah wajib pajak bukan Warga Negara Indonesia).

Dalam hal pembeli atau pialang Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Pajak Indonesia, diharuskan memotong pajak atas pembayaran harga beli untuk Saham Biasa atau ADS, maka pembayaran tersebut dapat dibebaskan dari pemotongan pajak penghasilan Indonesia atau pajak penghasilan Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, dimana Indonesia merupakan salah satu pihak dalam perjanjian (termasuk perjanjian penghindaran pajak berganda AS-Indonesia). Namun, kecuali untuk penjualan atau pengalihan saham di perusahaan non-publik, peraturan pajak saat ini di Indonesia tidak menetapkan prosedur khusus untuk meniadakan kewajiban pembeli atau pialang Indonesia untuk memotong pajak dari hasil penjualan tersebut. Agar dapat memperoleh manfaat dari perjanjian penghindaran pajak berganda, pemegang saham bukan warga negara Indonesia mungkin dapat meminta pengembalian dari Kantor Pajak Indonesia dengan mengajukan permohonan tertentu yang disertai dengan Surat Keterangan Domisili yang diisi oleh penerima penghasilan dan disahkan oleh pihak perpajakan yang berwenang atau pihak yang ditunjuknya, dari yurisdiksi tempat pemegang saham bukan Warga Negara Indonesia berkedudukan.

Materei

Sejumlah dokumen yang disiapkan dalam transaksi Saham Biasa di Indonesia, yang dokumennya akan digunakan sebagai bukti di Indonesia, diharuskan bermeterai Rp6.000. Pada umumnya meterai terhutang pada saat dokumen ditandatangani.

Pertimbangan Tertentu Mengenai Pajak Penghasilan Federal AS

Menurut persyaratan-persyaratan terkait praktik menurut *Internal Revenue Service*, saran pajak apapun dalam komunikasi ini (termasuk lampiran-lampiran apapun) tidak dimaksud untuk digunakan, dan tidak dapat dipakai untuk tujuan: (i) menghindari denda yang dikenakan oleh *US Internal Revenue Code*, atau (ii) mempromosikan, memasarkan atau merekomendasikan hal-hal terkait perpajakan kepada orang lain.

Berikut ini adalah ikhtisar beberapa konsekuensi pajak penghasilan AS yang berhubungan dengan akuisisi, kepemilikan dan pengalihan ADS atau Saham Biasa oleh pemegang saham warga Amerika (seperti keterangan di bawah) yang memegang ADS atau Saham Biasa mereka sebagai *"capital asset"* (umumnya, properti yang dimiliki sebagai investasi) di bawah seksi 1221 *Internal Revenue Code* ("*Tax Code*") didasarkan pada hukum federal AS tentang pajak penghasilan yang berlaku, yang dapat diartikan secara berbeda atau dapat berubah, kemungkinan dengan dampak retroaktif.

Ringkasan berikut tidak mendiskusikan semua aspek pajak penghasilan federal AS yang mungkin penting bagi investor tertentu dalam kaitan dengan situasi investasi individual, termasuk investor yang terkena aturan pajak khusus (misalnya institusi keuangan, perusahaan asuransi, *broker-dealers*, kemitraan dan mitra mereka, serta organisasi yang mendapat keringanan pajak (termasuk yayasan pribadi) pemegang saham yang non-AS, investor yang akan memegang ADS atau Saham Biasa sebagai bagian dari *straddle*, lindung nilai, konversi, penjualan konstruktif atau transaksi terpadu lain untuk tujuan pajak penghasilan AS,

atau para investor yang memiliki mata uang fungsional selain Dolar AS, mereka mungkin tunduk pada aturan pajak yang sangat berbeda dengan apa yang diringkas di bawah ini. Di samping itu, ringkasan berikut tidak membahas konsekuensi perpajakan non-AS tingkat negara bagian, lokal atau negara. Tiap pemegang saham diminta untuk berkonsultasi dengan penasehat pajak mereka berkenaan dengan konsekuensi pajak penghasilan dan pajak lainnya baik perpajakan lokal, negara bagian, federal di AS maupun non-AS berkaitan dengan investasi mereka pada ADS atau Saham Biasa.

Untuk keperluan rangkuman berikut, seorang pemegang saham AS adalah pemilik ADS atau Saham Biasa yang untuk keperluan pajak federal AS jika merupakan: (i) seorang warga negara atau penduduk AS; (ii) sebuah perusahaan atau entitas lain yang diperlakukan sebagai perusahaan untuk keperluan pajak penghasilan federal AS, didirikan atau dijalankan di bawah hukum AS atau salah satu negara bagian atau sub divisi politik; (iii) suatu badan hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan lain yurisdiksi apabila diberlakukan seperti badan hukum AS sesuai *Tax Code*; (iv) suatu *estate* yang penghasilannya tercakup dalam pendapatan kotor untuk keperluan pajak penghasilan AS tanpa memperdulikan dari mana sumbernya: atau (v) suatu perserikatan (A) yang administrasinya tunduk pada pengawasan utama pengadilan AS dan yang mempunyai satu atau lebih orang AS yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan semua keputusan penting perserikatan tersebut atau (B) yang sebaliknya dipilih untuk diperlakukan sebagai orang AS dibawah peraturan pajak.

Jika suatu kemitraan (atau perusahaan lain yang diperlakukan sebagai "pihak yang terbuka pada pajak" untuk tujuan pajak AS) adalah pemilik ADS atau Saham Biasa, perlakuan pajak dari mitra dalam kemitraan (atau pemegang kepentingan dalam entitas "*tax-transparent*") secara umum akan tergantung pada status kemitraan dan kegiatannya. Untuk keperluan pajak penghasilan di federal AS, orang AS pemegang ADS akan diperlakukan sebagai pemilik bersangkutan Saham Biasa yang diwakili oleh ADS.

Perihal Klasifikasi Ambang PIAP

Suatu perusahaan non AS seperti Telkom akan diperlakukan sebagai Perusahaan Investasi Asing Pasif (suatu "PIAP"), untuk keperluan pajak penghasilan federal AS, jika 75% atau lebih dari pendapatan kotornya terdiri dari tipe tertentu penghasilan pasif atau 50% atau lebih asetnya adalah pasif. Berdasarkan pendapatan dan aset Perusahaan tahun 2010 Telkom meyakini bahwa Telkom tidak harus diklasifikasikan sebagai PIAP untuk tahun 2010. Oleh karena status PIAP ditentukan oleh fakta intensif yang dibuat secara tahunan, tidak ada jaminan bahwa Perusahaan tidak atau tidak akan diklasifikasikan sebagai PIAP untuk tahun 2011. Diskusi di bawah ini tentang "Dividen" dan "Penjualan atau pengalihan lainnya atas ADS atau Saham Biasa" ditulis dengan dasar bahwa Perusahaan tidak akan diklasifikasikan sebagai PIAP untuk keperluan pajak penghasilan federal AS.

Dividen

Setiap pembagian tunai yang dibayar oleh Perusahaan dari keuntungan dan laba sebagaimana ditentukan oleh prinsip-prinsip pajak penghasilan federal AS, akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dividen dan akan dimasukkan dalam penghasilan kotor pemegang saham AS pada saat diterima. Penerima penghasilan dividen yang bukan perusahaan pada umumnya akan dikenakan pajak penghasilan dividen dari suatu "perusahaan asing yang memenuhi persyaratan" dengan tingkat pajak federal pada maksimum 15% pajak federal AS dibandingkan tingkat pajak marjinal yang diterapkan pada penghasilan biasa mengingat terpenuhinya persyaratan periode kepemilikan tertentu. Perlu dicatat bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011, dividen dari sebuah perusahaan asing yang memenuhi syarat akan diperlakukan sebagai pendapatan biasa dengan tarif pajak maksimum sebesar 39,6% untuk perusahaan non-penerima dividen setelah akhir tahun 2010. Suatu Perusahaan non-AS (yang bukan PIAP) pada umumnya dianggap sebagai perusahaan asing yang memenuhi persyaratan: (i) jika ia memenuhi syarat untuk menerima manfaat suatu perjanjian pajak lengkap dengan AS yang ditentukan telah sesuai oleh *Secretary of Treasury* AS untuk tujuan perjanjian ini dan yang mencakup program pertukaran informasi; atau (ii) berkenaan dengan dividen apapun yang dibayar oleh perusahaan atas saham (atau ADS yang didukung oleh saham tersebut) yang siap diperdagangkan di suatu bursa efek yang mapan di AS. Saat ini terdapat suatu perjanjian pajak yang berlaku antara AS dan Indonesia yang telah ditentukan oleh *Secretary of Treasury* sesuai untuk tujuan ini dan Perusahaan yakin dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat-manfaat perjanjian tersebut. Disamping itu, oleh karena ADS tercatat di NYSE, suatu bursa efek yang terkemuka di AS, maka ADS tersebut dianggap mudah diperdagangkan di NYSE.

Jumlah pembagian tunai dalam Rupiah harus sama dengan nilai Dolar AS sebagaimana Rupiah pada tanggal kuitansi distribusi, tanpa memperhatikan apakah Rupiah sudah ditukar ke dalam Dolar AS pada saat itu. Keuntungan atau kerugian, jika ada, diakui pada kesempatan berikutnya baik penjualan, konversi atau pengalihan lain Rupiah pada umumnya merupakan sumber pendapatan atau kerugian biasa AS. Dividen yang diterima dari ADS atau Saham Biasa umumnya tidak akan memenuhi pengurangan dividen yang diterima yang diperbolehkan untuk perusahaan.

Dividen secara umum diperlakukan sebagai pendapatan dari sumber-sumber asing untuk keperluan kredit pajak asing AS. Pemegang saham AS mungkin memenuhi syarat, dengan sejumlah pembatasan yang kompleks, untuk mengajukan klaim kredit pajak asing berkenaan dengan pemotongan pajak asing yang dikenakan atas dividen yang diterima karena ADS atau Saham Biasa. Pemegang saham AS yang memilih tidak mengajukan klaim kredit pajak asing untuk pajak asing yang dipotong, mungkin saja mengajukan klaim pengurangan, untuk keperluan

pajak penghasilan federal AS, berkenaan dengan pemotongan tersebut, tetapi hanya dalam satu tahun yang pemegang saham memilih melakukannya untuk semua pajak penghasilan asing yang dikreditkan.

Penjualan atau Pengalihan Lainnya atas ADS atau Saham Biasa

Pemegang saham AS secara umum mengakui keuntungan atau kerugian modal dari penjualan atau pengalihan lainnya atas ADS atau Saham Biasa dalam jumlah yang sama dengan selisih antara jumlah yang terealisasi pada saat pengalihan terjadi dengan basis pajak yang telah disesuaikan bagi pemegang saham untuk ADS atau Saham Biasa tersebut. Suatu keuntungan ataupun kerugian modal bersifat jangka panjang apabila ADS atau Saham Biasa telah dimiliki selama lebih dari satu tahun dan umumnya akan menjadi sumber keuntungan atau kerugian AS untuk keperluan kredit pajak asing AS. Pengurangan dari kerugian modal harus memenuhi kriteria tertentu.

Konsekuensi PIAP

Jika Perusahaan diklasifikasikan sebagai PIAP pada suatu tahun pajak, pemegang saham AS tunduk pada aturan-aturan khusus yang umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapuskan manfaat penangguhan pajak penghasilan federal AS yang oleh pemegang saham AS dapat diperoleh dari investasinya di suatu perusahaan non-AS yang tidak membagikan semua labanya pada basis saat ini. Dalam kejadian seperti ini, pemegang saham AS mungkin tunduk pada tingkat pajak penghasilan biasa atas: (i) keuntungan yang diakui pada penjualan ADS atau Saham Biasa; dan (ii) kelebihan distribusi yang dibayarkan karena ADS atau Saham Biasa (umumnya merupakan pembagian yang melebihi 125% dari rata-rata pembagian tahunan yang Telkom bayarkan selama tiga tahun pajak sebelumnya). Di samping itu, pemegang saham AS akan dikenakan bunga atas keuntungan atau pembagian berlebih tersebut. Akhirnya tingkat maksimum 15% terhadap dividen Perusahaan tidak akan dikenakan jika perusahaan merupakan atau dikategorikan sebagai PIAP. Setiap pemegang saham AS didorong untuk berkonsultasi dengan penasihat pajaknya berkenaan dengan potensi konsekuensi pajak atas kepemilikan jika perusahaan diklasifikasikan sebagai PIAP, demikian juga pilihan-pilihan tertentu yang mungkin tersedia untuk mengurangi konsekuensi tersebut.

Cadangan Pajak Penghasilan dan Persyaratan Pelaporan Informasi

Cadangan pajak penghasilan dan persyaratan pelaporan informasi AS pada umumnya berlaku untuk beberapa pembayaran kepada beberapa pemegang saham non-korporasi. Pelaporan informasi pada umumnya berlaku terhadap pembayaran dividen dan hasil dari penjualan atau pelunasan Saham Biasa yang didapat dalam wilayah AS atau oleh pembayar pajak AS atau pihak AS yang bertindak sebagai perantara pemegang Saham Biasa (selain "penerima yang dibebaskan," termasuk perusahaan, penerima pembayaran yang bukan orang AS yang dapat memperlihatkan sertifikasi yang dibutuhkan dan beberapa orang tertentu lainnya). Suatu pihak pembayar pajak akan diwajibkan untuk menahan cadangan pajak penghasilan dari setiap pembayaran dividen, atau hasil dari penjualan atau pelunasan dari ADS atau Saham Biasa dalam teritori AS atau oleh pembayar AS atau perantara AS kepada pemegang saham, selain penerima yang dikecualikan, jika pemegang saham tersebut gagal untuk memberikan nomor pokok wajib pajak yang benar atau tidak dapat memenuhi pengecualian dari kewajiban pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan adalah 25% pada tahun 2011.

Cadangan pajak penghasilan bukanlah pajak tambahan dan mungkin saja dikembalikan kepada kewajiban pajak pendapatan Negara AS bagi pemegang saham AS atau, apabila dalam hal melebihi kewajibannya, maka akan dikembalikan oleh Kantor Pajak AS atau Internal Revenue Service ("IRS") apabila klaim untuk pengembalian uang telah disampaikan kepada IRS. Salinan dari informasi pajak atau klaim untuk pengembalian uang dari pembayaran pajak yang disampaikan oleh pemegang saham non-AS kepada IRS mungkin disediakan oleh IRS, berdasarkan perjanjian tertentu atau perjanjian lainnya untuk pertukaran informasi, bagi otoritas perpajakan dari Negara tempat pemegang saham non-AS bertempat tinggal.

ASET TETAP

Berdasarkan Undang-Undang No.5/1960, hak kepemilikan atas tanah dimiliki Negara Republik Indonesia, kecuali hak kepemilikan yang diberikan kepada individu. Penggunaan tanah diberlakukan melalui hak atas tanah termasuk Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Penguna hak atas tanah dapat menggunakan tanah sepenuhnya untuk periode tertentu, yang harus diperbarui dan diperpanjang. Hak atas tanah secara umum dapat diperjualbelikan dan dapat dijaminkan dalam kesepakatan untuk memperoleh pinjaman tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Kami, tidak termasuk Anak Perusahaan Kami, memiliki hak guna lahan atas 2.842 properti. Kami memegang hak guna bangunan (HGB) untuk sebagian besar dari properti Kami. Terkait dengan PP No.40/1996, maksimal waktu berlakunya hak guna bangunan itu adalah 30 tahun, dapat diperbarui untuk 20 tahun berikutnya. Mayoritas properti Kami digunakan untuk menyimpan perlengkapan pendukung operasional telekomunikasi Kami, termasuk terminal, stasiun transmisi dan perlengkapan radio gelombang mikro. Tidak ada properti Kami yang dihipotekkan. Kami tidak memiliki masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi penggunaan properti Kami.

INFORMASI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Pengaturan Transaksi Di Luar Neraca

Kontinjensi Kami dijelaskan pada Catatan 42 dan ikatan dan perjanjian signifikan Kami dijelaskan pada Catatan 41 dari Laporan Keuangan Konsolidasian dan diringkas dalam Tabel Pengungkapan Kewajiban Kontraktual di bawah ini. Selain dari itu, pada tanggal 31 Desember 2011 Perusahaan tidak mempunyai pengaturan transaksi di luar neraca yang kemungkinan mempunyai dampak material pada Laporan Keuangan Konsolidasian baik di masa kini maupun yang akan datang terhadap posisi keuangan, pendapatan atau beban, hasil usaha, likuiditas, belanja modal dan sumber-sumber pendanaan.

KEWAJIBAN KONTRAKTUAL

Tabel berikut menyajikan informasi tentang kewajiban kontraktual pada tanggal 31 Desember 2011.

Kewajiban Kontraktual	Jatuh Tempo Pembayaran				
	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Hutang Jangka Pendek[1)(6)]	100	100	-	-	-
Hutang Jangka Panjang[2)(6)]	17.261	4.617	6.959	2.395	3.290
Kewajiban Sewa Guna Usaha[3)]	510	196	241	40	33
Bunga atas Hutang Jangka Pendek, Hutang Jangka Panjang dan Kewajiban Sewa Guna Usaha[7)]	132	63	57	10	2
Sewa Operasi[4)]	310	87	125	68	30
Kewajiban Pengadaan yang Tidak Bersyarat[5)]	9.499	9.499	-	-	-
Jumlah	**27.812**	**14.562**	**7.382**	**2.513**	**3.355**

(1) Terkait dengan hutang bank jangka pendek yang diperoleh dari Bank Ekonomi, CIMB Niaga dan Danamon, lihat Catatan 16 pada Laporan Keuangan Konsolidasian;
(2) Lihat Catatan 17-20 pada Laporan Keuangan Konsolidasian;
(3) Terkait dengan sewa pembiayaan untuk instalasi dan peralatan, kendaraan bermotor, perangkat pemrosesan, perangkat kantor. Untuk jaringan telekomunikasi Telkom Flexi dan aset CPE;
(4) Terkait dengan sewa kantor;
(5) Modal kerja yang disepakati di bawah pengaturan kontraktual;
(6) Tidak termasuk komitmen kontraktual untuk suku bunga;
(7) Lihat "Risiko-Risiko yang Terkait dengan bisnis Telkom dan Anak Perusahaan - Risiko-Risiko Keuangan - Kami Menghadapi Risiko Suku Bunga".

Lihat catatan 41 laporan keuangan terkonsolidasi untuk lebih detail lebih lanjut mengenai komitmen kontraktual. Sebagai tambahan atas kewajiban kontraktual diatas, pada tanggal 31 Desember 2011 Telkom memiliki kewajiban jangka panjang untuk pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja dan penghargaan masa kerja. Selama tahun 2011 Telkom berkontribusi sebesar Rp361,7 miliar untuk imbalan kesehatan pasca kerja dan Rp187 miliar untuk program pensiun manfaat pasti. Lihat catatan 34 dan 36 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

- Berdasarkan akte notaris No.2 tanggal 3 Januari 2012 dari Sjaaf De Carya Siregar, S.H., pemegang saham Infomedia menerbitkan 17.142.857 saham dengan jumlah sebesar Rp9 miliar. Metra, pemegang saham Infomedia, mengambil seluruh saham yang baru diterbitkan tersebut sehingga kepemilikan Perusahaan atas Infomedia terdilusi menjadi 49%
- Pada tanggal 8 Januari 2012, sehubungan dengan berakhirnya perjanjian dengan Apple, Telkomsel dan Apple setuju untuk memperpanjang perjanjian sampai dengan 30 Maret 2012.
- Pada tanggal 20 Januari 2012, Telkomsel melunasi utang kepada ICBC sebesar US$39 juta.
- Pada tanggal 2 Februari 2012, Telkomsel melunasi utang kepada OCBC NISP sebesar Rp466 miliar.
- Pada 12 Maret 2012, Telkomsel menerima surat ketetapan sebagai hasil dari pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2010 oleh DJPT. Mempertimbangakan, nilainya yang tidak signifikan, bagian yang diterima dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012.
- Sampai dengan tangal 29 Maret 2012, Perusahaan telah membeli kembali 940.125.460 saham dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, setara dengan 4,66% saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, dengan total pembelian sebesar Rp7,5 miliar, termasuk biaya jasa perantara dan kustodian.

Informasi Setelah Tanggal Pelaporan

Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dilakukan bersamaan, oleh karena itu tidak ada kejadian lain yang signifikan setelah tanggal penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, selain yang telah disebutkan diatas.

INFORMASI TAMBAHAN (BAGI PEMEGANG SAHAM ADR)

RANGKUMAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA DAN STANDAR TATA KELOLA PERUSAHAAN NYSE

Berikut ini diuraikan secara ringkas rangkuman umum mengenai perbedaan signifikan antara praktik tata kelola perusahaan di Indonesia dan yang disyaratkan oleh standar pencatatan NYSE untuk perusahaan Amerika yang tercatat di NYSE.

Tinjauan Hukum Indonesia

Perusahaan publik Indonesia diwajibkan untuk mematuhi dan memenuhi praktik tata kelola perusahaan yang telah berlaku. Persyaratan dan standar praktik tata kelola perusahaan untuk perusahaan publik diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas ("UUPT") No.40 tahun 2007; Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"); Undang-Undang No.19 tahun 2003 mengenai BUMN; Keputusan Menteri BUMN No.KEP-117/M.MBU/2002 mengenai Pelaksanaan Praktik Tata Kelola Perusahaan; Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia (Peraturan Bapepam-LK); dan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Selain persyaratan berdasarkan undang-undang tersebut, Anggaran Dasar perusahaan publik umumnya menyertakan ketentuan-ketentuan yang mengatur praktik tata kelola perusahaan.

Seperti undang-undang AS, undang-undang Indonesia mengharuskan perusahaan publik mematuhi dan memenuhi standar praktik tata kelola perusahaan yang lebih ketat dari yang diterapkan pada perusahaan milik swasta. Di Indonesia, istilah "perusahaan publik" belum tentu merujuk pada perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek. Sesuai UUPM,

perusahaan yang tidak tercatat dapat dianggap perusahaan publik dan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang mengatur perusahaan publik, apabila perusahaan tersebut memenuhi atau melampaui persyaratan modal dan persyaratan pemegang saham yang berlaku untuk perusahaan terbuka.

Pada tanggal 30 November 2004, Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG") berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP-49/M.EKONOM/1/TAHUN 2004. Pendirian tersebut merupakan revitalisasi Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan ("KNTKP") yang didirikan pada tahun 1999. Tujuan dari KNKG adalah meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia dan untuk memberi saran kepada Pemerintah tentang hal-hal yang terkait dengan data kelola, baik di sektor korporasi dan publik.

KNKG merumuskan Kode Tata Kelola Perusahaan 2006 ("Kode") yang merekomendasikan standar tata kelola perusahaan yang lebih ketat untuk perusahaan-perusahaan Indonesia, seperti pembentukan komite audit independen, komite nominasi dan remunerasi oleh Dewan Komisaris, serta peningkatan lingkup kewajiban pengungkapan perusahaan-perusahaan Indonesia. Meskipun KNKG merekomendasikan agar Kode diterapkan oleh Pemerintah sebagai dasar reformasi hukum, namun sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, Pemerintah belum menerbitkan peraturan yang sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Komposisi Direksi dan Komisaris Independen

Standar pencatatan NYSE mensyaratkan bahwa Direksi perusahaan yang tercatat di AS harus terdiri dari mayoritas direktur independen dan bahwa komite tertentu harus terdiri dari para direktur independen. Seorang Direktur memenuhi syarat sebagai independen hanya apabila dewan dengan tegas memutuskan bahwa Direktur tidak memiliki hubungan material dengan perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung.

Tidak seperti halnya perusahaan yang didirikan di AS, manajemen perusahaan Indonesia terdiri dari dua lembaga dengan status yang sama, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Pada umumnya Direksi bertanggung jawab atas kegiatan bisnis rutin perusahaan dan diberi wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, sementara Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab mengawasi Direksi dan berdasarkan UUPT Indonesia diberi mandat untuk memberikan saran kepada Direksi.

Berkenaan dengan Dewan Komisaris, UUPT mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik memiliki setidaknya dua anggota. Meskipun UUPT tidak mengatur mengenai komposisi Dewan Komisaris, namun Peraturan Pencatatan No.1A yang dikeluarkan oleh BEI menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 30% dari anggota Dewan Komisaris perusahaan publik (seperti Telkom) harus independen.

Mengenai Direksi, dalam UUPT diatur bahwa Direksi memiliki wewenang untuk mengelola operasi rutin perusahaan dan setidaknya dua anggota, yang masing-masing harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimum yang ditetapkan dalam UUPT. Menurut Peraturan Menteri BUMN No.KEP-117/M.MBU/2002 yang telah diperbarui oleh mentri BUMN no.1 tahun 2011 menyatakan sekurang-kurangnya 20% anggota Direksi harus merupakan anggota yang tidak terafiliasi.

Dengan adanya perbedaan antara peran anggota Direksi di perusahaan Indonesia dan mitranya di perusahaan AS, undang-undang Indonesia tidak mengharuskan independensi anggota Direksi tertentu juga tidak mengharuskan dibentuknya komite tertentu yang sepenuhnya beranggotakan direktur independen.

Komite-Komite

Standar pencatatan NYSE mensyaratkan bahwa perusahaan publik yang tercatat di AS harus memiliki komite audit, komite tata kelola perusahaan dan komite kompensasi. Masing-masing komite tersebut harus terdiri atas direktur independen dan mendapatkan pengakuan tertulis yang membahas hal-hal spesifik yang terdapat pada standar pencatatan.

UUPT tidak mengharuskan perusahaan publik Indonesia membentuk setiap komite yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE. Namun, Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 dan Peraturan Pencatatan No.1A yang dikeluarkan oleh BEI mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik tercatat (seperti Telkom) membentuk komite yang akan mengawasi proses audit perusahaan yang setidaknya terdiri dari tiga orang, dimana salah satunya harus sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit. Disamping itu kedua anggota yang lain harus dari pihak independen dan setidaknya salah satu anggota harus memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan.

Telkom memiliki Komite Audit yang terdiri dari enam anggota: dua Komisaris Independen dan empat anggota yang tidak berafiliasi dengan Telkom. Peraturan pencatatan NYSE yang diterapkan sesuai Peraturan 10A-3 berdasarkan *Exchange Act* mengharuskan emiten swasta asing dengan saham yang tercatat di NYSE memiliki komite audit yang terdiri dari para direktur independen. Namun, sesuai Peraturan tersebut, emiten swasta asing dikecualikan dari persyaratan independensi apabila: (i) pemerintah atau bursa efek negara asal mengharuskan perusahaan memiliki komite audit; (ii) komite audit terpisah dari Direksi dan memiliki anggota dari dalam maupun dari

luar Direksi; (iii) anggota komite audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif perusahaan yang menjadi anggota komite audit; (iv) pemerintah atau bursa efek negara asal memiliki persyaratan untuk komite audit yang independen dari manajemen perusahaan; dan (v) komite audit bertanggung jawab atas penunjukan, retensi dan pengawasan pekerjaan auditor eksternal. Telkom dikecualikan dari hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Seksi 303A Penegasan Tertulis Tahunan yang diajukan ke NYSE. Standar pencatatan NYSE dan *charter* Komite Audit Telkom bersama-sama bertujuan untuk menetapkan sistem pengawasan akuntansi perusahaan yang independen dari manajemen dan memastikan independensi auditor. Namun, tidak seperti persyaratan yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE, Komite Audit Telkom tidak memiliki tanggung jawab langsung atas penunjukan, kompensasi dan retensi auditor eksternal Telkom. Komite Audit Telkom hanya dapat merekomendasikan penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris dan keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.

Dewan Komisaris Telkom memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite tersebut diberi tugas untuk merumuskan kriteria pemilihan dan prosedur pencalonan untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengungkapan Berkenaan Dengan Tata Kelola Perusahaan

Standar pencatatan NYSE mengharuskan perusahaan AS untuk mengambil dan menempatkan pada *website* mereka, pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan. Pedoman tersebut, antara lain, harus mencantumkan: standar kualifikasi direktur, tanggung jawab direktur, hubungan direktur dengan manajemen dan penasihat independen, kompensasi direktur, orientasi dan pendidikan yang berkelanjutan bagi direktur, suksesi manajemen serta evaluasi kinerja tahunan. Selain itu, CEO perusahaan AS harus menyatakan kepada NYSE setiap tahunnya bahwa ia tidak menemukan adanya pelanggaran apapun oleh perusahaan terhadap standar pencatatan tata kelola perusahaan NYSE. Sertifikasi harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham. Tidak ada persyaratan pengungkapan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mirip dengan standar pencatatan NYSE yang diuraikan di atas. Namun, Undang-Undang Pasar Modal pada umumnya mengharuskan perusahaan publik Indonesia mengungkapkan jenis informasi tertentu kepada para pemegang saham dan Bapepam-LK, khususnya informasi yang berkenaan dengan perubahan kepemilikan saham perusahaan publik dan fakta material yang bisa mempengaruhi keputusan para pemegang saham dalam mempertahankan kepemilikan sahamnya di perusahaan publik tersebut.

Kode Etik dan Perilaku Bisnis

Standar pencatatan NYSE mengharuskan setiap perusahaan yang tercatat di AS untuk mengadopsi dan menempatkan di *website* perusahaannya, kode etik dan perilaku bisnis bagi Direksi, pejabat dan karyawannya. Tidak ada persyaratan serupa berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, perusahaan yang diharuskan menyampaikan laporan berkala ke SEC, termasuk Telkom, harus mengungkapkan dalam laporan tahunan tentang penerapan peraturan etika untuk pejabat keuangan senior perusahaan. Meskipun persyaratan mengenai isi peraturan etika sesuai peraturan SEC tidak identik dengan yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE, namun terdapat kemiripan yang signifikan. Berdasarkan peraturan SEC, kode etika harus dirancang untuk mendorong: (a) perbuatan yang jujur dan etis, termasuk penanganan benturan kepentingan antara hubungan pribadi dan profesional; (b) pengungkapan yang lengkap, wajar, tepat dan tepat waktu dalam laporan dan dokumen yang diajukan kepada atau diserahkan kepada SEC; (c) kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku; (d) mempercepat pelaporan internal mengenai pelanggaran terhadap peraturan; dan (e) pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya, para pemegang saham harus diberikan akses ke salinan fisik atau elektronik dari kode tersebut. Lihat "Tata Kelola Perusahaan-Budaya Korporasi Dan Etika Bisnis - Kode Etik".

Ringkasan Perbedaan Signifikan antara Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan IFRS

Lihat Catatan 48 Laporan Keuangan Konsolidasian.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perusahaan ("Anggaran Dasar") telah didaftarkan sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri No.C2-7468.HT.01.04.TH.97 tahun 1997. Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") No.40 Tahun 2007 yang mencabut Undang-undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995, Perusahaan telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU.46312.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah didaftarkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 17 Oktober 2008, Lampiran Berita Negara No.20155.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan

Peraturan Bapepam-LK IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sebagaimana telah disetujui dalam RUPST pada tanggal 11 Juni 2010 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPST No.37 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Dr.A. Partomuan Pohan S.H., LLM. Perubahan Anggaran dimaksud telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat No.AHU-AH.01.10-18476 tanggal 22 Juli 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-35876.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.63 tanggal 9 Agustus 2011, Lampiran Berita Negara No.23552.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi:

Usaha Utama:
- Merencanakan,membangun,menyediakan,mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual dan meningkatkan layanan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Usaha Penunjang:
- Menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
- Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Sesuai UU PT Telkom memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi tersebut terpisah dan tidak ada individu yang dapat menjadi anggota keduanya. Setiap Direktur menerima tantiem apabila Telkom melampaui target keuangan dan operasional tertentu yang jumlahnya ditentukan oleh para pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Dalam Anggaran Dasar dinyatakan bahwa setiap transaksi yang melibatkan benturan kepentingan antara Perusahaan dan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang sahamnya harus mendapat persetujuan dalam RUPS, suatu persetujuan memerlukan lebih dari setengah jumlah suara pemegang saham independen.

Direksi bertanggung jawab memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan, mengendalikan, menjaga dan mengelola aset Perusahaan.

Anggaran Dasar tidak mencantumkan persyaratan apapun bagi Direksi untuk (i) pensiun pada usia tertentu atau (ii) memiliki suatu atau sejumlah tertentu saham Perusahaan. Hak, preferensi dan batasan yang menyertai setiap jenis saham Perusahaan adalah sebagai berikut:
- Hak atas dividen. Dividen harus dibayar sesuai kondisi keuangan Telkom dan sesuai keputusan para pemegang saham dalam RUPST, yang juga menentukan besaran dan waktu pembayaran dividen;
- Hak suara. Setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara pada RUPS;
- Hak mendapatkan bagian atas laba Perusahaan. Lihat hak atas dividen;
- Hak mendapatkan bagian atas kelebihan pada saat likuidasi. Para pemegang saham berhak atas kelebihan pada saat likuidasi sesuai proporsi kepemilikan sahamnya dengan ketentuan nilai nominal Saham Biasa yang dimiliki sudah disetor penuh;
- Ketentuan pembelian kembali. Tidak ada ketentuan mengenai pembelian kembali saham dalam Anggaran Dasar. Namun, sesuai Pasal 37 UU PT, Telkom dapat membeli kembali maksimum 10% dari saham yang telah ditempatkan dan beredar;
- Ketentuan dana cadangan. Laba ditahan hingga minimum 20% dari modal yang ditempatkan Perusahaan, harus disisihkan untuk menutup kemungkinan kerugian yang diderita Perusahaan. Apabila jumlah dana cadangan lebih besar 20% dari modal yang ditempatkan Perusahaan, maka RUPS dapat memberi wewenang kepada Perusahaan untuk menggunakan kelebihan dana tersebut bagi keperluan Perusahaan;
- Kewajiban untuk peningkatan modal dari waktu ke waktu. Para pemegang saham Perusahaan dapat diminta untuk membeli saham baru di Perusahaan dari waktu ke waktu. Hak tersebut harus ditawarkan kepada para pemegang saham sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga dan dapat dialihkan atas opsi pemegang saham. Direksi Telkom diberi wewenang untuk menawarkan saham baru kepada pihak ketiga dalam hal pemegang saham yang ada tidak dapat atau tidak bersedia membeli saham baru tersebut; dan
- Ketentuan yang membedakan antara pemegang saham yang ada atau calon pemegang saham yang disebabkan karena pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang substansial. Anggaran Dasar tidak mencantumkan ketentuan tersebut.

Untuk mengubah hak para pemegang saham, diperlukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang terkait. Setiap perubahan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan dari pemegang saham "Seri A" Dwiwarna dan pemegang saham lain atau kuasanya yang secara bersama mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh suara yang hadir pada RUPS.

RUPS hanya boleh diadakan setelah Perusahaan menyampaikan pemberitahuan seperti yang disyaratkan. Pemberitahuan harus diumumkan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar dalam bahasa Indonesia dan satu surat kabar dalam bahasa Inggris yang memiliki peredaran luas di Indonesia. Jangka waktu pemanggilan akan diadakannya RUPS Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") adalah 14 hari (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat). Kuorum untuk RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan rapat keduatanpa didahului dengan pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan rapat. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Dalam hal kuorum tidak tercapai pada rapat kedua, maka rapat ketiga dapat diadakan, kuorum untuk rapat tersebut yang akan ditentukan oleh Ketua Bapepam-LK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pemegang saham dapat memberikan suara melalui kuasa. Seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan mayoritas, kecuali Anggaran Dasar mensyaratkan mayoritas yang lebih besar. Anggaran Dasar Perusahaan tidak mencantumkan batasan apapun atas hak setiap orang untuk memiliki saham Perusahaan. Peraturan pasar modal Indonesia tidak mencantumkan batasan apapun atas hak setiap orang, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, untuk memiliki saham di suatu perusahaan yang tercatat di BEI.

Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan, maka pengambilalihan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan mayoritas yang mewakili setidaknya tiga per empat (3/4) dari seluruh saham pada rapat umum pemegang saham yang harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Tidak ada ketentuan lain dalam Anggaran Dasar yang berdampak memperlambat, menangguhkan atau mencegah perubahan kendali atas Telkom.

Setiap anggota Direktur dan Komisaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK berkenaan dengan kepemilikan saham serta perubahan kepemilikan saham di Perusahaan dan kewajiban ini juga berlaku untuk para pemegang saham yang memiliki kepemilikan 5% atau lebih atas modal yang disetor dari Perusahaan. Telkom yakin bahwa Anggaran Dasar Perusahaan Kami tidak berbeda signifikan dari yang umum berlaku di Indonesia untuk perusahaan publik yang tercatat di BEI. Telkom juga yakin bahwa ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar yang terkait dengan perubahan modal Telkom tidak lebih ketat dari yang disyaratkan oleh hukum Indonesia.

Uraian Tentang Prospek Usaha Perusahaan

Telkom adalah penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Menyusul penurunan bisnis *legacy* pada bisnis telepon kabel tidak bergerak dan turunnya pertumbuhan bisnis seluler Kami pada tahun sebelumnya, sejak tahun 2009 Telkom melakukan transformasi dari penyedia telekomunikasi tradisional menjadi penyedia layanan TIME.

INFORMASI TREN

Sejumlah perkembangan telah terjadi dan mungkin dapat berdampak secara material di masa yang akan datang terhadap hasil operasi, kondisi keuangan dan belanja modal, termasuk:

- Peningkatan pendapatan data, internet dan TI;
- Pendapatan seluler yang stabil dengan peningkatan pelanggan dan penurunan ARPU;
- Penurunan pendapatan telepon kabel tidak bergerak ;
- Penurunan pendapatan telepon nirkabel tidak bergerak; dan
- Pengurangan pendapatan interkoneksi.

Lihat diskusi dalam "Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Perusahaan dibawah sub judul "Peningkatan Pendapatan Data, Internet dan Teknologi Informatika", "Pendapatan Seluler yang Stabil, Peningkatan Pelanggan dan Penurunan ARPU", "Penurunan Pendapatan Telepon Kabel Tidak Bergerak" dan "Penurunan Pendapatan Interkoneksi".

Di samping itu, Telkom meyakini bahwa persaingan di antara para operator seluler akan berlanjut pada tahun 2012, namun demikian persaingan tidak akan seketat pada beberapa tahun terakhir yang menyebabkan pengurangan tarif secara signifikan dan kemungkinan terjadinya pengurangan belanja modal oleh banyak operator.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA PEMERINTAH

Hubungan yang terjalin antara Telkom dengan Pemerintah sangat menyeluruh dalam berbagai hal. Pemerintah adalah pemegang saham mayoritas dan pengendali Perusahaan. Sebagai regulator, Pemerintah menerbitkan lisensi serta membuat, mengawasi dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan sektor telekomunikasi dan memutuskan penetapan tarif. Di satu sisi, Pemerintah juga merupakan salah satu pelanggan dan salah satu pemberi pinjaman bagi Telkom.

Dalam bagian ini, Pemerintah diartikan sebagai Pemerintah Republik Indonesia dan kementerian, departemen dan lembaga pemerintah, namun tidak termasuk Kementerian Negara BUMN.

Pemerintah Sebagai Pemegang Saham

Dalam perannya sebagai Pemegang Saham Mayoritas, Pemerintah hingga tanggal 31 Desember 2011 menguasai 53,2% Saham Biasa dan satu Saham Seri A (Saham Dwiwarna) Telkom, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto. Menurut peraturan yang berlaku, Departemen Keuangan RI merupakan institusi yang "memiliki" Saham Biasa dan satu saham Dwiwarna di Telkom yang kemudian memberikan kewenangan kepada Menteri BUMN untuk menggunakan hak-hak yang diberikan dalam saham ini sebagai pemegang saham pengendali Telkom.

Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas berkepentingan atas kinerja Telkom, baik terkait dengan manfaat yang diberikannya kepada bangsa maupun kemampuan Telkom untuk beroperasi secara komersial. Hak dan batasan material yang berlaku untuk Saham Biasa juga berlaku untuk Saham Seri A Dwiwarna, dengan pengecualian Pemerintah tidak boleh mengalihkan Dwiwarna atau Saham Seri A. Pemerintah memiliki hak *veto* berkenaan dengan: (i) pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi; (ii) pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris; (iii) penerbitan saham baru; dan (iv) perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk tindakan untuk menggabungkan atau membubarkan Telkom, meningkatkan atau mengurangi modal dasarnya, atau mengurangi modal yang ditempatkan.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini memiliki kendali efektif atas hal-hal tersebut walaupun memiliki kurang dari mayoritas Saham Biasa yang beredar. Hak-hak Pemerintah berkenaan dengan Saham Seri A Dwiwarna tidak akan berakhir, kecuali ada perubahan sehingga diperlukan amandemen terhadap Anggaran Dasar Perusahaan yang mensyaratkan persetujuan Pemerintah sebagai pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut.

Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah dalam perannya sebagai Regulator berwenang mengatur sektor telekomunikasi melalui Menteri Komunikasi dan Informasi ("Menkominfo"). Menkominfo berwenang menerbitkan peraturan pelaksanaan atas undang-undang, yang umumnya memiliki lingkup yang luas. Berdasarkan keputusan ini Menkominfo mendefinisikan struktur industri, menentukan formula tarif, menentukan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU"), dan mengendalikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi kompetitif, usaha dan kondisi keuangan Telkom. Melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("Ditjen Postel"), Menkominfo mengatur alokasi frekuensi dan menentukan jumlah sambungan telepon tidak bergerak. Telkom wajib memperoleh lisensi dari Ditjen Postel untuk setiap jenis layanan yang ditawarkan, termasuk frekuensi yang dipergunakan (sebagaimana dialokasikan oleh Menkominfo). Telkom dan operator lain diharuskan membayar biaya hak penggunaan frekuensi. Telkomsel memiliki beberapa lisensi yang diterbitkan oleh Menkominfo (yang sebelumnya dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan) untuk penyediaan jasa selulernya, dan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia terkait dengan investasi oleh Telkomsel untuk pembangunan jasa sambungan telepon seluler dengan jangkauan nasional, termasuk perluasan jangkauan jaringannya. Pemerintah, melalui Menkominfo sebagai regulator, berwenang untuk memberikan lisensi baru untuk pendirian usaha patungan dan pengaturan baru lainnya, khususnya di bidang telekomunikasi.

Kepemilikan lisensi di atas mewajibkan Telkom membayar biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disediakan dan biaya hak penggunaan frekuensi radio kepada Menkominfo. Biaya hak penyelenggaraan adalah sebesar Rp342 miliar pada tahun 2010 dan Rp356 miliar (US$39 juta) pada tahun 2011. Persentase biaya hak penyelenggaraan tersebut terhadap jumlah beban usaha mencapai 0,7% di tahun 2010 dan 2011. Biaya hak penggunaan frekuensi radio senilai Rp2.892 miliar pada tahun 2010 dan Rp2.846 miliar (US$314 juta) di tahun 2011. Persentase biaya hak penggunaan tersebut terhadap jumlah beban usaha mencapai 6,3% pada tahun 2010 dan 5,7% tahun 2011. Telkom membayar biaya KPU kepada Menkominfo sebesar Rp835 miliar pada tahun 2010 dan Rp879 miliar (US$97 juta) pada tahun 2011. Persentase biaya KPU terhadap jumlah beban usaha mencapai 1,8% pada tahun 2010 dan 2011.

Pemerintah Sebagai Pemberi Pinjaman

Pada bulan Juli 1994 Pemerintah mengatur sebuah fasilitas dengan sejumlah institusi asing guna menyediakan dana bagi Telkom (melalui Pemerintah)

dalam bentuk "pinjaman penerusan" (sebagai *two-step loans*) yang digunakan untuk sejumlah pengeluaran tertentu. Pinjaman tersebut dijamin oleh Pemerintah. Sampai dengan 31 Desember 2011, Telkom mempunyai pinjaman dalam bentuk *"two-step loans"* sebesar Rp2.284 miliar (US$252 juta), termasuk bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (*current maturities*). Telkom diwajibkan membayar bunga kepada Pemerintah dan membayar kembali pokok pinjamannya yang selanjutnya dibayarkan oleh Pemerintah kepada masing-masing pemberi pinjaman. Sampai dengan 31 Desember 2011, 68,6% dari pinjaman penerusan tersebut merupakan pinjaman dalam mata uang asing. Sisanya, sebesar 31,4% dari pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Pada tahun 2011, tingkat suku bunga tahunan atas pinjaman yang harus dibayar kembali, dalam Rupiah sebesar 7,7%, dalam Dolar AS sebesar 4,0% dan dalam Yen Jepang sebesar 3,1%.

Pemerintah sebagai Pelanggan

Sejumlah departemen dan lembaga Pemerintah memanfaatkan layanan Kami secara langsung dengan menegosiasikan persyaratan secara komersial. Hal ini dikarenakan tidak ada layanan yang diberikan secara cuma-cuma. Kami berurusan dengan departemen dan lembaga tersebut sebagai pelanggan terpisah. Pada tahun 2011, jumlah pendapatan yang bersumber dari departemen dan lembaga Pemerintah termasuk BUMN berkisar Rp1.114 miliar, berkisar 1,6% terhadap total pendapatan konsolidasian serta bukan merupakan jumlah yang material terhadap pendapatan Perusahaan. Departemen dan lembaga Pemerintah ini diperlakukan sama halnya dengan pelanggan perumahan terkait biaya koneksi dan biaya bulanan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif layanan bisnis. Hal ini tidak berlaku terhadap tarif untuk sambungan lokal, jarak jauh, dan SLI.

Kami memiliki kebijakan untuk tidak melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi kecuali persyaratannya tidak kurang menguntungkan bagi Kami dibandingkan bila mereka melakukannya dengan pihak ketiga. Kementerian BUMN telah menyarankan Kami untuk menghindari transaksi dengan entitas lain di bawah kendali mereka kecuali dengan persyaratan yang konsisten dengan kebijakan Kami sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK, karena Kami tercatat di BEI, setiap transaksi dimana terdapat benturan kepentingan yang melekat (sebagaimana definisi di bawah) dengan perusahaan lain yang tercatat di BEI, harus disetujui oleh mayoritas pemegang Saham Biasa Kami yang tidak memiliki benturan kepentingan terhadap transaksi yang diusulkan, kecuali benturan kepentingan tersebut telah ada sebelum tercatat dan sepenuhnya diungkapkan dalam dokumen penawaran.

Peraturan Bapepam-LK mendefinisikan benturan kepentingan sebagai benturan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pemegang saham di satu sisi, dan pada sisi lain, kepentingan ekonomi pribadi anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama lainnya (didefinisikan sebagai pemegang 20% atau lebih Saham Biasa Kami) atau afiliasi mereka, baik secara bersama-sama atau secara individual. Benturan kepentingan juga terjadi jika anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau pemegang saham utama atau afiliasi masing-masing terlibat dalam transaksi di mana terdapat kepentingan pribadi yang mungkin bertentangan dengan Kami. Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan mengenai benturan kepentingan dan pemegang Saham Biasa Kami juga berhak untuk melakukan gugatan untuk menegakkan ketentuan tersebut.

Sesuai Peraturan Bapepam-LK, transaksi antara Kami dengan perusahaan BUMN atau yang dikendalikan negara lainnya mungkin menyebabkan benturan kepentingan. Dalam hal ini, persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan harus diperoleh bila benturan kepentingan terjadi. Kami yakin bahwa banyak transaksi yang dilakukan dengan perusahaan milik atau yang dikendalikan negara, bernilai komersial dan bukan merupakan benturan kepentingan yang membutuhkan suara pemegang saham independen.Transaksi tersebut meliputi penjualan layanan telepon Kami kepada perusahaan BUMN atau yang dikendalikan negara lainnya dan pembelian listrik Kami dari BUMN. Kami berharap bahwa dari waktu ke waktu, sehubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis, Kami akan melakukan usaha patungan, perjanjian atau transaksi dengan perusahaan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, Kami dapat berkonsultasi dengan Bapepam-LK untuk menentukan apakah perusahaan patungan yang diusulkan, perjanjian atau transaksi akan membutuhkan suara pemegang saham independen sesuai Peraturan Bapepam-LK. Jika Bapepam-LK memberi pandangan bahwa transaksi tersebut tidak akan membutuhkan pemungutan suara, Kami akan melanjutkannya tanpa mencari persetujuan pemegang saham independen. Jika tidak, Kami akan meminta persetujuan yang diperlukan atau meninggalkan tindakan yang diusulkan.

PENILAIAN MANAJEMEN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian dan Prosedur Pengungkapan

Di bawah pengawasan dan peran serta manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, manajemen melakukan evaluasi terhadap

efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam *Rules* 13a-15(e) dan 15(d)-15(e) *Securities Exchange Act* tahun 1934 (selanjutnya disebut *Exchange Act*), pada tanggal 31 Desember 2011. Berdasarkan evaluasi ini, Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan menyimpulkan bahwa, pada tanggal 31 Desember 2011, pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan adalah efektif. Pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan termasuk, tanpa dibatasi, pengendalian dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan di dalam laporan yang disampaikan atau diajukan berdasarkan *Exchange Act* telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan format SEC, dan bahwa informasi tersebut dikumpulkan dan disampaikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sebagaimana layaknya, untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu atas pengungkapan yang dipersyaratkan.

Laporan Tahunan Manajemen Mengenai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara memadai, sebagaimana didefinisikan dalam *Exchange Act Rules* 13a-15(f) dan 15(d)-15(f). Pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang oleh, atau di bawah pengawasan Direktur Utama dan Direktur Keuangan, dan dilakukan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personil lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Konsolidasian untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan termasuk kebijakan dan prosedur yang: (1) berkaitan dengan pengelolaan pencatatan secara rinci, akurat, dan wajar yang mencerminkan transaksi dan pelepasan aset perusahaan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat secara semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan bahwa pendapatan diterima dan biaya perusahan dikeluarkan hanya berdasarkan kewenangan manajemen dan direksi perusahaan; dan (3) memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencegahan atau deteksi secara tepat waktu dalam hal perolehan, penggunaan atau pelepasan aset perusahaan yang tidak sah yang dapat memberikan dampak material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian.

Karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, pengendalian internal atas pelaporan keuangan mungkin tidak dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Di samping itu, proyeksi atas evaluasi efektivitas pada masa mendatang mengandung risiko bahwa pengendalian mungkin menjadi tidak memadai karena perubahan kondisi, atau karena tingkat kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur mungkin menurun.

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011. Dalam melakukan penilaian ini, manajemen menggunakan kriteria dalam *Internal Control Integrated Framework* yang di terbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO). Berdasarkan hasil penilaian ini, manajemen menyimpulkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2011, pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan telah efektif.

Laporan Atestasi Kantor Akuntan Publik

Efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, kantor akuntan publik independen dan terdaftar sebagaimana dinyatakan dalam laporan mereka pada halaman F3 dan F4.

Perubahan pada Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan

Tidak ada perubahan signifikan terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan selama tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi secara material atau berpotensi mempengaruhi secara material terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan atas proses pengendalian internal, menelaah secara terperinci serta memantau prosedur dan pengendalian atas pelaporan keuangan untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan Sarbanes-Oxley dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh COSO. Perusahaan akan mencurahkan segenap sumber daya untuk meningkatkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara berkesinambungan.

PENGENDALIAN NILAI TUKAR

Informasi Nilai Tukar

Tabel berikut memuat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berdasarkan nilai tukar tengah pada akhir setiap bulan untuk periode terlampir. Nilai tukar tengah Rupiah dihitung berdasarkan kurs jual dan beli Bank Indonesia.

Kalender	Pada akhir periode (Rp. Per US$1)	Rata-rata[1]	Tertinggi[2]	Terendah[2]
2007	9.419	9.136	9.479	8.672
Kuartal Pertama	9.118	9.099	9.225	8.950
Kuartal Kedua	9.054	8.973	9.120	8.672
Kuartal Ketiga	9.137	9.246	9.479	8.990
Kuartal Keempat	9.419	9.234	9.434	9.045
2008	10.950	9.680	12.400	9.051
Kuartal Pertama	9.217	9.260	9.486	9.051
Kuartal Kedua	9.225	9.264	9.376	9.179
Kuartal Ketiga	9.378	9.290	9.470	9.063
Kuartal Keempat	10.950	11.023	12.400	9.555
2009	9.400	10.398	12.065	9.293
Kuartal Pertama	11.575	11.631	12.065	10.863
Kuartal Kedua	10.225	10.531	11.620	9.985
Kuartal Ketiga	9.681	10.002	10.255	9.580
Kuartal Keempat	9.400	9.471	9.685	9.293
2010	8.991	9.085	9.413	8.888
Kuartal Pertama	9.115	9.261	9.413	9.070
Kuartal Kedua	9.083	9.118	9.373	9.001
Kuartal Ketiga	8.924	9.001	9.094	8.924
Kuartal Keempat	8.991	8.963	9.050	8.888
2011	9.068	8.779	9.185	8.460
Kuartal Pertama	8.709	8.899	9.088	8.708
Kuartal Kedua	8.597	8.590	8.699	8.506
Kuartal Ketiga	8.823	8.610	8.988	8.460
Kuartal Keempat	9.068	9.000	9.185	8.828
September	8.823	8.766	8.988	8.539
Oktober	8.835	8.895	8.968	8.828
November	9.170	9.015	9.185	8.893
Desember	9.068	9.088	9.165	9.015
2012				
Januari	9.000	9.109	9.210	8.955
Februari	9.085	9.026	9.158	8.892
Maret (15)	9.193	9.154	9.193	9.098

(1) Rata-rata dari nilai tukar tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang berlaku untuk periode yang bersangkutan.
(2) Nilai atas dan bawah ditentukan berdasarkan nilai tukar tengah harian yang diumumkan oleh Bank Indonesia selama periode yang berlaku. Sumber: Bank Indonesia.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan aset dan kewajiban moneter yang berdenominasi dalam mata uang asing adalah nilai tukar beli dan jual yang dipublikasikan oleh Reuters pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Nilai tukar beli dan jual yang dipublikasikan oleh Reuters untuk aset dan kewajiban moneter masing – masing sebesar Rp9.420 dan Rp9.430 per Dolar AS posisi 31 Desember 2009, Rp9.005 dan Rp9.015 per Dolar AS posisi 31 Desember 2010 dan Rp9.060 dan Rp9.075 per Dolar AS posisi 31 Desember 2011.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi dinyatakan dalam Rupiah. Pencantuman konversi Rupiah ke dalam Dolar AS semata-mata demi kemudahan bagi pembaca dan menggunakan kurs rata-rata beli dan jual Rp9.067,5 per Dolar AS seperti yang dipublikasikan oleh Reuters pada tanggal 31 Desember 2011.

Pada tanggal 15 Maret 2012, nilai tukar beli dan jual Dolar AS berdasarkan Reuters masing-masing sebesar Rp9.160 dan Rp9.175 per Dolar AS.

Valuta Asing

Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mata uang asing liberal yang memungkinkan aliran bebas valuta asing. Transaksi modal termasuk pengiriman modal, laba, dividen dan bunga, bebas dari pengendalian nilai tukar. Namun demikian, beberapa peraturan mempunyai dampak terhadap sistem nilai tukar. Misalnya, hanya bank yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi atas valuta asing dan melaksanakan transaksi pertukaran terkait dengan impor dan ekspor barang. Selain itu, bank-bank Indonesia (termasuk cabang bank asing di Indonesia) diharuskan melapor ke Bank Indonesia untuk setiap transfer dana yang melebihi 10.000 Dolar AS. Sebagai Perusahaan milik Negara dan berdasarkan ketetapan Ketua Tim Koordinasi Pinjaman Komersial Luar Negeri ("PKLN"), Kami diharuskan mendapatkan persetujuan dari PKLN sebelum mendapatkan pinjaman komersial asing dan harus menyerahkan laporan berkala kepada PKLN selama jangka waktu pinjaman.

Selama tahun 2011, nilai tukar rata-rata Rupiah terhadap Dolar AS adalah sebesar Rp8.779, dengan nilai tertinggi dan terendah, masing-masing sebesar Rp9.185 dan Rp8.460. Berita-berita mengindikasikan bahwa Bank Indonesia akan melakukan intervensi terhadap pasar uang mata asing melalui pembelian dan penjualan mata uang asing untuk menstabilisasi nilai rupiah, bilamana dianggap telah terjadi fluktuasi signifikan atas nilai tukar.

KONTRAK MATERIAL

Pada tahun 2011, Telkom tidak mengajukan kontrak material baru atau mengubah kontrak material yang sudah ada, di luar kontrak yang sudah dimasukkan atau diubah dalam kegiatan usaha biasa.

BELANJA MODAL

Sampai dengan 31 Desember 2011, belanja modal Telkom sebesar Rp14.603 miliar (US$1.610 juta), lebih kecil dari anggaran belanja modal sebesar Rp21.659 miliar. Belanja modal terutama ditujukan untuk modernisasi jaringan TI dan perluasan jaringan di Telkomsel. Penurunan belanja modal ini terutama disebabkan oleh penundaan proyek fiber optik Palapa Ring dan juga penundaan program TITO (*Trade In Trade Out*), proyek kabel tembaga dan pergantian kabel tembaga menjadi kabel optik.

Telkom mengelompokkan kategori belanja modal berikut ini untuk keperluan perencanaan, dengan tiap kategori menunjukkan hubungan dengan pendapatan dan beban:

- *Optimalisasi legacy*, terdiri dari telepon nirkabel tidak bergerak dan telepon kabel tidak bergerak;
- *New wave*, terdiri dari *broadband*, aplikasi, Ti dan konten, serta *service node;*
- Infrastruktur, terdiri dari transmisi *backbone*, Metro Ethernet and *Regional Metro Junction* ("RMJ"), dan IP *backbone* serta satelit;
- Unit pendukung, terdiri dari belanja modal unit pendukung dan sistem pendukung.

Dari jumlah Rp14.603 miliar tersebut, belanja modal Telkom sebagai Induk Perusahaan sebesar Rp4.202 milar (US$463 juta), Telkomsel sebesar Rp8.472 miliar (US$934 juta) dan belanja modal Anak Perusahaan lainnya sebesar Rp1.929 miliar (US$213 juta) ditahun 2011, seperti tertera pada tabel berikut:

	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember				
	2009(1) (Rp miliar)	2010(1) (Rp miliar)	2011(1) (Rp miliar)	2012(2) (Rp miliar)	2013(3) (Rp miliar)
Telkom (Induk Perusahaan)					
Optimalisasi bisnis *legacy*	1.913	264	156	129	109
Bisnis *new wave*	1.312	1.313	1.875	3.140	2.669
Infrastruktur	2.208	1.861	1.979	2.155	2.155
Pendukung	219	185	192	197	193
Subtotal untuk Telkom (induk Perusahaan)	**5.652**	**3.623**	**4.202**	**5.621**	**5.126**
Anak Perusahaan Telkom					
Telkomsel	12.673	8.197	8.472	9.900	9.787
Lainnya	836	831	1.929	3.350	3.685
Subtotal untuk Anak Perusahaan	**13.509**	**9.028**	**10.401**	**13.250**	**13.472**
Jumlah untuk Telkom (konsolidasian)	**19.161**	**12.651**	**14.603**	**18.871**	**18.598**

(1) Jumlah untuk tahun 2009, 2010 dan 2011 adalah pengeluaran modal aktual berdasarkan barang yang diterima.
(2) Jumlah untuk tahun 2012 adalah pengeluaran modal terencana yang tercakup dalam anggaran Telkom dan dapat disesuaikan baik ke atas atau ke bawah.
(3) Jumlah untuk tahun 2013 adalah pengeluaran modal yang diproyeksikan untuk tahun tersebut dan pengeluaran

Realisasi belanja modal masa yang akan datang mungkin berbeda dengan jumlah yang tercantum pada tabel di atas yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk di antaranya tapi tidak terbatas pada perekonomian Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar, Euro dan mata uang lainnya, ketersediaan dari pemasok atau sumber pendanaan lainnya, masalah teknis atau lainnya dalam memperoleh atau instalasi peralatan yang mungkin terjadi dan apabila Telkom memasuki lini bisnis baru.

Hingga akhir tahun 2016, alokasi belanja modal Telkom Group menuju ke proporsi maksimum 20% dari total pendapatan. Perencanaan belanja modal diarahkan kepada penyiapan infrastruktur untuk mendukung bisnis *new wave* yang terdiri dari infrastruktur (*transport, service, access* dan *support node*) serta pengembangan layanan/*new adjacent services*.

Pada tahun 2012, alokasi belanja modal Perusahaan sebesar Rp18.871 miliar atau (US$2.081 juta), meliputi Rp5.621 miliar, Rp9.900miliar dan Rp3.350 miliar untuk Telkom sebagai Induk Perusahaan, Telkomsel serta Anak Perusahaan yang lainnya.

RISET DAN PENGEMBANGAN

Perusahaan melakukan investasi untuk meningkatkan produk dan layanan. Pengeluaran yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp8 miliar dan Rp13 miliar (US$1 juta) masing-masing untuk tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2011, pengeluaran dilakukan terkait dengan riset dan pengembangan program yang mendukung untuk penerapan *Mobile Broadband*, *Homenetwork*, *Machine to Machine*, dan *Cloud Computing*, baik untuk aspek *business*, *service & product* serta infrastruktur jaringan telekomunikasi. Untuk aspek *business, service & product*, riset dan pengembangan yang telah dilakukan antara lain riset dan pengembangan mengenai *Mobile Application*, e-Payment, IPTV, M2M, Telkom SmartHome, solusi Smart City, IMS QoS, *Product Retirement*, Tools dBase Signalling, Integrasi, TENOSS, dan QoS *Differentiation for Internet Service*. Untuk aspek infrastruktur jaringan telekomunikasi, riset dan pengembangan yang telah dilakukan, yaitu terkait dengan IPv6, Metro Ethernet, *Internet Exchange*, DWDM, Femtocell, LTE, WiFi, GPON, NG-PON, IMS, SBC, *Policy Management*.

Tata Kelola Perusahaan

"Saat ini penerapan *Good Corporate Governance* ("GCG") terus Kami selaraskan dengan dinamika bisnis yang terjadi. Untuk mewujudkannya, Telkom menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal. Langkah ini Kami tempuh agar Perusahaan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengelola *Governance, Risk and Compliance* ("GRC") yang sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan organisasi mencapai kelangsungan hidup Perusahaan. Terutama penerapan manajemen risiko, meskipun awalnya tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk dapat menguasai kompetensi, memperoleh keakuratan dalam mengidentifikasi risiko industri dan organisasi, serta mampu menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari budaya karyawan, akhirnya berkat kesungguhan/konsistensi dan kesabaran manajemen saat ini diperoleh hasil manajemen risiko telah mewarnai dan berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penguatan penerapan GCG di Telkom Group".

KONSEP DAN LANDASAN

Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*), dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Telkom untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan (*corporate value*), mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan.

Mengingat pentingnya GCG maka telah dilakukan bentuk penguatan komitmen manajemen seluruh komisaris dan Direksi Telkom Group pada acara Rapat Pimpinan Telkom berupa pernyataan dan penandatanganan komitmen implementasi GCG Telkom Group. Ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group untuk memprioritaskan penerapan GCG.

Komitmen Kami untuk menerapkan instrumen GCG tidak hanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal namun diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar.

Tahun 2011 merupakan tahun penguatan penerapan GCG di seluruh group usaha (tata kelola Anak Perusahaan). Menyikapi transformasi organisasi menuju *portfolio* bisnis TIME, maka Perusahaan memandang perlu untuk meningkatkan kualitas praktik GCG yang telah ada untuk dikuatkan lagi dalam sebuah komitmen GCG yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group. Penguatan GCG dalam hal ini dimaksudkan agar penerapan GCG senantiasa melekat dan selaras dengan tuntutan bisnis dan kondisi industri saat ini. Melalui Sub-Direktorat Business Effectiveness

dan Sub Direktorat Organizational Development penguatan GCG Telkom Group dibangun sekaligus terus menerus memperbaiki praktik GCG yang telah ada menuju diterapkannya pengelolaan Perusahaan yang beretika (GCG *as ethics*) dan menjadikan GCG sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari mengelola Perusahaan (GCG as *knowledge*) serta terintegrasinya pengelolaan GCG dan manajemen risiko Perusahaan.

Selain itu, sebagai Perusahaan publik yang patuh pada peraturan otoritas pasar modal, baik Bapepam-LK maupun SEC, Telkom menerapkan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tata kelola Perusahaan yang penerapannya mengacu pada *international best practices* serta Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Indonesia ("*Indonesia Code of GCG*") yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) di Indonesia.

Sebagai Perusahaan yang sahamnya tercatat di NYSE, Telkom berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang dimuat dalam *Sarbanes Oxley Act* Tahun 2002 ("SOA") serta peraturan yang masih berlaku lainnya. Peraturan dan ketentuan dalam SOA yang relevan dengan bisnis Telkom di antaranya (i) SOA Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen Telkom untuk bertanggung jawab atas dilakukannya dan dipeliharanya pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan ("ICOFR") yang memadai sehingga memastikan keandalan pelaporan keuangan Telkom dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan SAK Indonesia. Sejauh ini Telkom beserta Anak Perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan kajian dan audit menyeluruh untuk menjamin rancangan dan implementasi ICOFR yang efektif dan terintegrasi dalam laporan keuangan Perusahaan. (ii) SOA seksi 302 yang menghendaki tanggung jawab dari pihak manajemen Telkom terhadap pembuatan, pemeliharaan dan pengevaluasian terhadap efektivitas prosedur dan pengendalian pengungkapan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diungkapkan dalam laporan dengan *Exchange Act* dan telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia untuk kemudian diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, untuk kepentingan pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil kajian manajemen terhadap prosedur dan pengendalian pengungkapan ICOFR dan pengungkapan terkait dapat dilihat pada seksi "Prosedur dan Pengendalian". Kami juga mematuhi dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di Bapepam-LK dan SEC mengenai independensi anggota Komite Audit.

KERANGKA KERJA DAN KINERJA GCG TELKOM

Komitmen Kami untuk menjalankan GCG tertuang dalam kerangka kerja yang diatur sesuai kebijakan penerapan GCG yaitu Keputusan Direksi No.29 Tahun 2007. Dalam kerangka kerja tersebut terintegrasi beberapa sistem pengelolaan yang menjadi prasyarat atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG di Perusahaan, tidak lain adalah untuk menjamin dan memastikan dicapainya penerapan GCG yang efektif sampai pada tingkat operasional yaitu memastikan bahwa setiap transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal dijalankan secara beretika dan sesuai dengan praktik tata kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Telkom menyadari bahwa keberhasilan Perseroan sangat didukung oleh terbentuknya nilai-nilai inti dan budaya Perusahaan serta mampu menerapkan GCG, untuk itu Telkom membangun kerangka GCG dan *Roadmap* untuk memastikan bahwa penerapan GCG disusun berdasarkan kesepahaman bersama antara manajemen dengan seluruh elemen Perusahaan serta terinternalisasi dalam menjalankan usaha Perusahaan berdasarkan 4 (empat) pilar utama yang Kami pandang sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan GCG yang meliputi:

a. Pelaksanaan etika bisnis yang didalamnya memuat tata nilai budaya Perusahaan, yang setiap tahun dikomunikasikan dan disurvey pemahamannya kepada karyawan;
b. Pengelolaan kebijakan dan prosedur operasional yang efektif sesuai dengan tuntutan bisnis, sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan dan menjadi panduan bekerja karyawan;
c. Penerapan manajemen risiko secara terpadu berbasis COSO *Enterprises Risk Management*; dan
d. Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal berbasis COSO *Internal Control* utamanya pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Untuk mencapai hal tersebut Telkom telah menyusun sistem GCG Telkom sebagai berikut:

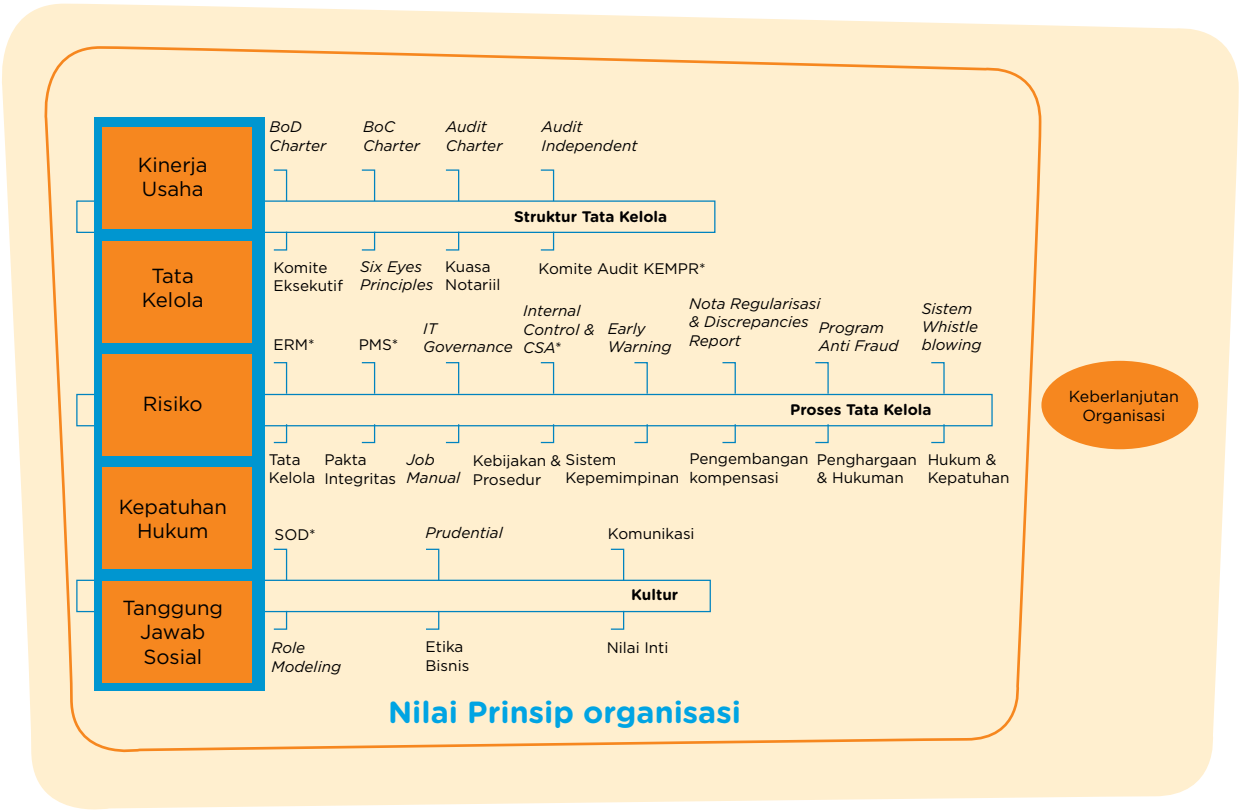

KEMPR : Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko
ERM : *Enterprise Risk Management*
PMS : *Performance Management System*
CSA : *Control Self-Assessment*
SOD : *Segregation Of Duties*

Road Map & Initiative Penguatan Tata Kelola

Telkom membangun dan terus memperbaiki kebijakan dan infrastuktur sistem pendukung yang dikelompokan dalam tiga pilar utama yaitu:

1. Struktur *Governance*,
   Membangun berbagai sistem untuk mencapai efektivitas komunikasi dan hubungan antar elemen di struktur Perusahaan untuk mengindari potensi terjadinya *agency problem* dan untuk mencapai efektivitas *chemistry* antar elemen Perusahaan dengan tetap memperhatikan *check and balances* dan bercirikan kecepatan dan keakuratan pengambilan keputusan;
2. Proses *Governance*,
   Membangun berbagai sistem sebagai panduan pengelolaan Perusahaan dan proses pengambilan keputusan untuk merealisasikan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi dan kewajaran;
3. Budaya
   Menanamkan tata nilai luhur melalui penerapan budaya Perusahaan dan etika bisnis sebagai modal dipraktikkannya etika usaha yang bermartabat dan dimilikinya karyawan dengan integritas dan moral terpuji.

Penerapan GCG di Telkom tidak terlepas dari semangat dan cita-cita Perusahaan yang telah tertanam sejak lama untuk menjadi sebuah Perusahaan yang modern dan profesional. Berikut kurun waktu strategis Telkom melakukan metamorfosa dirinya menuju praktik GCG yang modern dan bermartabat.

- **Tahun 1991**
  Telkom berubah dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia bersamaan waktunya Perusahaan dikelola dengan prinsip-prinsip dan ketentuan perseroan di antaranya ketentuan GCG yang harus ditaati sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

*DJM: Distinct Job Manual

- **Tahun 1995**
  Telkom menjadi Perusahaan terbuka dimana sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta ("BEJ"), Bursa Efek Surabaya ("BES"), NYSE dan LSE. Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan (POWL) di Tokyo Stock Exchange. Dalam kurun waktu ini, tuntutan penerapan GCG sudah semakin tinggi karena sebagai Perusahaan terbuka, maka Telkom dituntut untuk lebih baik dan profesional mengelola amanah pemilik/investor dan harus taat kepada ketentuan yang berlaku terutama dalam melakukan pengungkapan informasi dan transparansi.

- **Era 1997/98-2002**
  Pada era ini Perusahaan mengalami tekanan krisis ekonomi sebagaimana yang dirasakan oleh industri pada umumnya. Namun demikian, dalam kurun waktu ini pula Perusahaan dalam memperoleh pembelajaran berharga dalam menerapkan GCG. Tuntutan menjalankan praktik bisnis yang profesional, penuh kehati-hatian sekaligus mampu tumbuh secara berkelanjutan menjadi pengalaman berharga bagi seluruh karyawan.

Sesuai ketentuan KEPMEN BUMN Nomor 117 tahun 2002 yang selanjutnya disesuaikan dengan PERMEN BUMN Nomor 1 tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, maka Telkom dipandang sebagai Perusahaan BUMN panutan yang menjalankan praktik GCG dan melakukan evaluasi penerapan GCG sebelumnya dan memenuhi ketentuan penerapan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Sesuai ketentuan SEC tentang penerapan UU *Sarbanes Oxley seksi* 404, 302 dan 906, maka Telkom yang sahamnya diperdagangkan di NYSE wajib meningkatkan akuntabilitas praktik GCG di Perusahaan melalui penerapan Pengendalian Internal di Perusahaan.

- **Era 2006 hingga sekarang**
  Penerapan GCG setelah diberlakukannya ketentuan UU *Sarbanes Oxley* yang diterapkan di Perusahaan menjadikan pembelajaran berharga. Penerapan GCG tidak bisa dilepaskan dari penerapan pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan dan keharusan menjalankan tata kelola IT di Perusahaan.

Dalam kurun waktu ini merupakan era berharga bagi Telkom untuk menjalankan GCG dalam tataran implementatif dan tidak lagi normatif. Tata kelola akhirnya dipahami oleh keseluruhan tatanan/sistem, tujuan dan tingkat dari penerapan saling terintegrasi mulai dari tingkat entitas sampai dengan tingkat transaksi operasional.

Telkom Group berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten agar senantiasa dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu selama tahun 2011 Telkom terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG, selain itu Telkom menumbuhkan iklim beretika sebagai pendorong terwujudnya bisnis yang bermartabat baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dilakukan melalui kesungguhan Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran di bawahnya. Beberapa implementasi penerapan GCG dan etika bisnis tahun 2011 telah dilakukan secara aktif, diantaranya adalah:

1. **Komitmen Manajemen Puncak Telkom Group**
   Mengingat pentingnya GCG maka telah dilakukan bentuk penguatan atau pengembangan komitmen manajemen seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group pada acara Rapat Pimpinan Telkom II 2011 tanggal 26 Juli 2011 berupa pernyataan dan penandatanganan komitmen penguatan implementasi GCG Telkom Group dan menyebarkan Buku Pedoman GCG Telkom Group. Hal ini menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group memandang GCG sebagai kebutuhan Perusahaan.
2. **Seminar "Etika Bisnis dan GCG pada BUMN"**
   Seminar ini diadakan pada tanggal 30 Maret 2011 di The Sultan Hotel Jakarta, dengan penyelenggara BUMN *Executive Club*. Pembicara yang hadir di antaranya Menteri BUMN, Satgas Mafia Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), dan Kejaksaan. Telkom memandang penting seminar ini sebagai kelanjutan proses peningkatan GCG dan etika yang berkelanjutan.
3. ***Sharing* Pengetahuan Gratifikasi**
   Bekerja sama dengan Direktorat Gratifikasi KPK yang diikuti seluruh Anak Perusahaan. *Sharing* ini diselenggarakan Telkom untuk mendukung kampanye pemerintah dan KPK tentang program pengendalian gratifikasi. Tidak berhenti di situ, hal ini dilanjutkan kembali dengan *workshop* bersama pada tanggal 24-25 Maret 2011 dalam inisiatif peningkatan kebijakan gratifikasi dalam rangka Program Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan dinamika dan ketentuan yang ada.
4. **Forum GCG Telkom Group**
   Berbagai forum sinergi dalam pengelolaan GCG Telkom Group telah dilaksanakan dengan pesan dan arahan Dewan Komisaris dan Direksi atas kesungguhan mewujudkan GCG dan etika, di antaranya pada *Workshop* GCG Telkom Group di Bogor 15 Juni 2011.
5. **Forum Komunitas Pengusaha Anti Suap ("KUPAS")**
   Pada diskusi panel atau Forum Diskusi Group "Membangun Budaya Anti Suap di BUMN" dengan penyelenggara Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) bertempat di KPK, Telkom bertindak sebagai penyelenggara dan inisiator Industri Strategis-Manufactur BUMN. Dalam forum ini, Direktur Utama Telkom menjadi pembicara bersama Menteri BUMN dan Wakil Ketua KPK.
6. **Telkom sebagai Nara Sumber GCG Untuk Studi Prakarsa Anti Korupsi**
   Telkom diminta berpendapat dalam penyusunan indikator dan pembobotan yang meliputi: komitmen integritas manajemen puncak, pedoman etika dan perilaku, penanganan situasi konflik kepentingan, pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), pengelolaan laporan penerimaan hadiah dan larangan pemberian suap, penegakan aturan, dan prakarsa lain seperti inovasi. Hal ini mencerminkan kepercayaan Kementerian BUMN yang tinggi atas implementasi GCG dengan sistem dan proses yang telah dibangun dan dijalankan sejalan dengan etika dan kepatuhan.
7. **Telkom sebagai *Counter-Part* Penyusunan Kriteria Penilaian GCG BUMN**
   Sesuai Surat Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Tata Kelola Perusahaan bahwa Telkom dipandang telah melalui proses yang cukup panjang dengan struktur dan proses *corporate governance* yang lengkap dan optimal, membuat Telkom menjadi kontributor bagi pengembangan praktik GCG, maka Telkom diminta memberikan masukan pada konsep kriteria penilaian

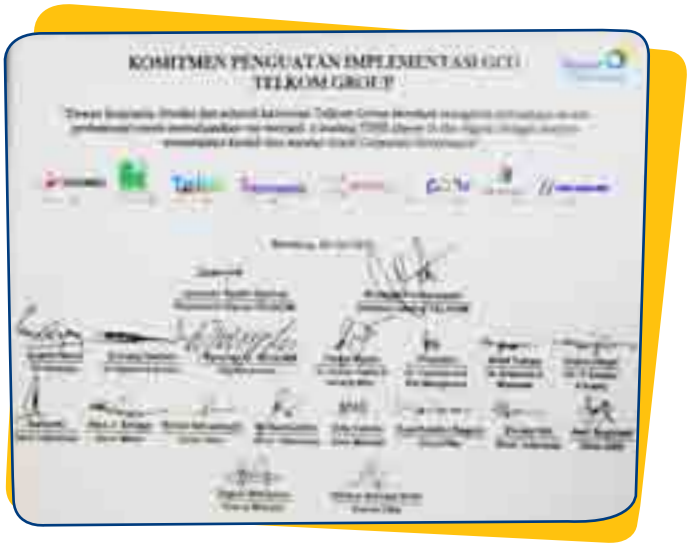

GCG Kementerian BUMN. Kontribusi Telkom diperlukan bagi Kementerian BUMN untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kriteria penilaian GCG untuk mengakomodasi perkembangan praktik GCG terkini, peraturan pasar modal, serta mempertimbangkan sasaran strategis berkaitan penerapan *best practices* GCG BUMN.

8. **Telkom Sebagai *Counter-Part* Penyusunan Peraturan GCG BUMN**
   Telkom juga diminta menjadi narasumber untuk ikut menyumbangkan pikiran atas konsep Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN untuk menyempurnakan Kepmen BUMN No.117/2002 tanggal 31 Juli 2002 dengan PERMEN BUMN No.1/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Telkom juga terlibat dalam diskusi yang rutin diadakan dengan Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG").
9. **Program Pengendalian Gratifikasi dan *Training On Trainers ("ToT")* dengan KPK**
   Training on Trainers KPK kepada Telkom dilakukan dalam 2 gelombang pada bulan Juni-Juli 2011 dalam rangka menyiapkan agen perubahan dalam rangka sosialisasi berjenjang dan masif bagi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada seluruh pemangku kepentingan. Peserta merupakan *Senior Leader Band* 1 dan 2 yang dinilai memiliki integritas dan etika terbaik yang dipilih melalui proses penilaian yang ketat baik *online* maupun *offline*. Dalam ToT ini, KPK telah menyebarkan dan praktik pengajaran materi tentang gratifikasi, etika, integritas, *managing gift*, konsep pembelajaran KPK JAMU (Jelas, Aman, Mudah, dan Untung).
10. **Fasilitator dalam Pelaporan Harta Kekayaan dengan KPK dan Kementerian BUMN.**
    Telkom mendukung KPK dan Kementrian Negara BUMN dalam Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setiap Penyelengara Negara harus bersedia diperiksa harta kekayaannya serta melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya (sebelum, selama dan sesudah menjabat).
11. **Perusahaan *Benchmark***
    Kompetensi dan pengalaman yang dimiliki Telkom dianggap dapat menjadikan sebagai tujuan *bench mark* dan telah membuatnya menjadi objek sejumlah kunjungan dari Perusahaan/institusi lembaga baik dari dalam dan luar negeri. Beberapa perusahaan yang mengunjungi Telkom pada tahun 2011 antara lain adalah Telekom Malaysia, Bank Indonesia, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Depkominfo, PT PLN, PT Timah, KAI, KPK, PT PGN, PT Pupuk Kujang dan Telecom Egypt. Melalui media ini, Telkom saling bertukar informasi terkait dengan beberapa topik bahasan antara lain adalah GCG, pengendalian internal, manajemen risiko, pelayanan, SAP, teknologi TI, SDM, *e-Learning/learning Center, wholesale management*, dan lainnya

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan GCG, Kami senantiasa memperbaiki struktur maupun prosedur pelaksanaannya dan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran di setiap lini Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta tanggung jawab baik di level Dewan Komisaris, Direksi, manajemen maupun karyawan Telkom.

Secara internal, struktur maupun prosedur pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi No.29 Tahun 2007 yang memuat kerangka kerja operasional terpadu untuk memastikan agar setiap transaksi yang dilakukan baik internal maupun eksternal telah dilakukan sesuai dengan etika maupun praktik tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Keefektifan dari setiap penggunaan kebijakan selalu dievaluasi perusahaan setiap tahun. Pada saat yang sama, perusahaan juga menjamin pengawasan terhadap pelaksanaannya akan dilakukan secara independen dan menyeluruh untuk mencapai target efesiensi di seluruh lini organisasi sekaligus menjaga integritas Perusahaan di mata otoritas dan publik secara luas.

Struktur tata kelola Perusahaan terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") baik RUPS Tahunan ("RUPST") maupun RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dalam organisasi tata kelola perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen perusahaan. RUPST wajib diselenggarakan setahun sekali sedangkan RUPSLB dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam RUPST dan RUPSLB, pemegang saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dan kedudukan yang seimbang, terutama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam

proses pengambilan keputusan penting dan strategis terkait dengan:
a. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Telkom;
b. Penetapan jumlah remunerasi dan tunjangan Komisaris dan Direksi Telkom;
c. Menilai kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang ditelaah;
d. Penentuan dan persetujuan terhadap penggunaan laba Perusahaan termasuk dividen; dan
e. Perubahan Anggaran Dasar. RUPST selain itu juga berwenang untuk mengesahkan laporan tahunan Perusahaan.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham pengendali yang memiliki saham seri A Dwiwarna, berkewajiban untuk memperhatikan tanggung jawabnya saat menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan manajemen Perusahaan, baik saat menggunakan hak suara maupun dalam hal lainnya. Pemerintah memiliki hak khusus yang dapat digunakan ketika memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, divestasi atau likuidasi melalui forum RUPST dan RUPSLB.

Mekanisme penggunaan hak suara oleh para pemegang saham saat penyelenggaraan RUPST maupun RUPSLB telah diatur sedemikian rupa sehingga pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya.

Selama tahun 2011 Telkom telah mengadakan RUPS satu kali, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 19 Mei 2011 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Agenda 1

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya disampaikan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2010. Selanjutnya menyetujui pula Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2010, yang memuat catatan agar Direksi:

- mengkaji ulang seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan agar pengelolaan Perseroan dapat lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasil kajian dan usul perubahannya kepada Dewan Komisaris selambatnya pada bulan Desember 2011;
- mengkaji dan melakukan perubahan terhadap *shareholder agreement* dan anggaran dasar Anak Perusahaan utama Perseroan, yaitu Telkomsel agar pengendalian dapat dijalankan secara lebih efektif sesuai peraturan perundang-undangan;
- mendukung serta senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan potensi terbaik dari barang dan jasa serta sumber daya dalam negeri;
- meningkatkan penerapan keterbukaan informasi sesuai prinsip tata kelola dan etika bisnis global, khususnya dalam pelaksanaan aksi korporasi. Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dminta memberikan laporan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna minimal setiap 3 (tiga) bulan terhadap kinerja induk maupun anak perusahaan Telkom serta rencana aksi korporasi, baik berupa investasi, akuisisi maupun hal lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kinerja korporasi, baik di induk maupun Anak Perusahaan;
- menjaga mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, termasuk Anak Perusahaan, agar dapat memberkan hasil yang optimal untuk kepentingan pemegang saham. Sedangkan untuk Telkomsel, agar dapat dilakukan kajian terhadap *buy-back* saham dan rencana tindak lanjutnya agar dilaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
- memberikan prioritas dan perhatian yang lebih besar, baik dalam pelaksanaan investasi, sinergi antar Anak Perusahaan, maupun kepada induknya, serta meningkatkan kompetensi *Human Capital*-nya dalam mengantisipasi transformasi bisnis Telkom untuk masuk dalam bisnis "Telecommunication-Information-Media-Edutainment (TIME)" untuk peningkatan nilai tambah perusahaan dan *customer service oriented company*.

Agenda 2

1. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan (Konsolidasian) Tahun Buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm* of PricewaterhouseCoopers) sesuai dengan laporannya Nomor: A110329002/DC2/CAW/II/2011.A tanggal 29 Maret 2011 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia";
   b. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2010, disusun berdasarkan peraturan Kementerian Negara BUMN yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdi Ichjar, BAP & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor: 019 - LAI/KAP-AR/11 bertanggal 28 Maret 2011 dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut melalui laporan kami Nomor: 018/KAP-AR/11 bertanggal 28 Maret 2011".
2. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2010 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2010, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2010, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2010 tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda 3

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2010 yang seluruhnya berjumlah Rp11.536.999.390.576 (sebelas triliun lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
   a. Dividen tunai sebesar 55% dari laba bersih atau sejumlah Rp6.345.349.664.817 (enam triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) termasuk jumlah dividen sementara (dividen interim) yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp526.157.112.865 (lima ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah), atau sebesar Rp26,75 (dua puluh enam koma tujuh puluh lima Rupiah) per-saham, sehingga dengan demikian jumlah dividen final yang masih terutang kepada pemegang saham berjumlah Rp5.819.192.551.952 (lima triliun delapan ratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau minimal sebesar Rp295,84 (dua ratus sembilan puluh lima koma delapan empat Rupiah) per-saham berdasarkan jumlah saham yang telah diterbitkan setelah dikurangi jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan yang pada saat ini berjumlah 490.574.500 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) saham.
   b. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar Rp5.191.649.725.759 (lima triliun seratus sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan Rupiah) yang akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2010 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Yang berhak menerima dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   b. Dividen tunai akan dibayarkan sekaligus pada tanggal 1 Juli 2011 dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibayarkan pada tanggal 11 Januari 2011.
3. Kepada Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Menyetujui penetapan besaran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2011 untuk dimasukan sebagai perubahan dalam RKAP Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Program Kemitraan sebesar 1% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2010 atau sebesar Rp115.369.993.906 (seratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam Rupiah).
   b. Program Bina Lingkungan sebesar 1% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2010 atau sebesar Rp115.369.993.906 (seratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam Rupiah).

Pelaksanaan program PKBL dimaksud dapat dikerjasamakan dengan BUMN lain dan berkoordinasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Agenda 4

Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan remunerasi (tantiem, gaji/honorarium serta fasilitas dan tunjangan) untuk Direksi dan Komisaris Perseroan.

Agenda 5

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm* of Pricewaterhouse Coopers) untuk melaksanakan Integrated Audit Tahun Buku 2011 yang mencakup audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan untuk Tahun Buku 2011.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Zainal, Juhana & Rekan untuk mengaudit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2011.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

Agenda 6

1. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham tahap IV ("*Share Buy Back* IV") dan mengalokasikan dana sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) yang berasal dari saldo laba Perseroan, untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS ini dan dengan persyaratan lainnya sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi tertanggal 19 April 2011 dan 20 April 2011.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk:
   a. melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan *Share Buy Back* IV sebanyak-banyaknya 645.161.290 (enam ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh) saham (dengan asumsi harga pembelian Rp7.750 per saham) atau setara dengan 3,20% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
   b. menyampaikan tambahan informasi terkait dengan penambahan alokasi dana untuk membiayai *Share Buy Back* IV dari Rp3.000.000.000.000 (tiga trilun Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) sebagaimana yang disyaratkan dalam butir 2 huruf b angka 3) , 4) dan 8) Peraturan Bapepam-LK No.XI.B.2 serta mengumumkannya melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 surat kabar harian berbahasa Inggris, keduanya yang berperedaran nasional;
   c. *Share Buy Back* IV akan dilaksanakan melalui pembelian saham pada Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange; dan
   d. melaporkan dalam RUPS Tahunan berikutnya pelaksanaan *Share Buy Back* IV.

2. Dewan Komisaris

Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif kepada pemegang saham dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Dewan Komisaris Telkom memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, termasuk perencanaan dan pengembangan, operasi dan anggaran, sesuai dengan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan dan pelaksanaan mandat dan keputusan RUPST dan RUPSLB. Dewan Komisaris tidak berwenang untuk menjalankan maupun mengelola Perusahaan, kecuali dalam situasi apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara karena suatu sebab;
b. Memberikan saran dan pendapat RUPST mengenai pelaporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perusahaan, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor dan hal-hal penting serta strategis lainnya terkait dengan aksi korporasi Perusahaan;
c. Melakukan evaluasi atas rencana kerja dan anggaran Perusahaan, mengikuti perkembangan Perusahaan, dan melakukan koordinasi dengan pihak Direksi jika ada gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang dalam masalah sehingga Direksi dapat segera mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh; dan
d. Memastikan program pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah diterapkan dan terpelihara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta komite-komite berikut ini:

a. Komite Audit;
b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
c. Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko.

Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris Telkom telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal, dengan jumlah anggota Dewan Komisaris Telkom pada saat ini adalah 5 (lima) orang, dimana 40% dari komposisi tersebut adalah Komisaris Independen. Hal ini untuk menjaga independensi fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan menjamin terlaksananya mekanisme *check and balance*. Jumlah 40% tersebut juga telah melewati batas minimum jumlah komisaris independen yang ditetapkan oleh BEI yaitu 30%. Tugas utama Komisaris Independen, selain melakukan pengawasan juga memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Struktur Dewan Komisaris

Struktur Dewan Komisaris Telkom terdiri dari Komisaris Utama yang merupakan pimpinan Dewan dan empat Komisaris, dua di antaranya merupakan Komisaris Independen. Profil anggota Dewan Komisaris terdapat pada halaman 37-38.

Komisaris	Penugasan dan kegiatan terkait
Jusman Syafii Djamal (Komisaris Utama)	Selain menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau juga mengetuai Komite Nominasi dan Remunerasi.
Bobby A.A. Nazief (Komisaris)	Beliau juga merupakan Ketua Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko (KEMPR) dan merupakan anggota Komite Audit dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Johnny Swandi Sjam (Komisaris Independen)	Beliau merupakan Wakil Ketua Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko (KEMPR), anggota Komite Audit dan menjabat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Mahmuddin Yasin (Komisaris)	Beliau merupakan Wakil Ketua Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko (KEMPR) dan menjabat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Rudiantara (Komisaris Independen)	Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris, yakni Yuki Indrayadi, yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Yuki Indrayadi telah menjabat Sekretaris Dewan Komisaris Telkom sejak

1 Oktober 2008. Pemegang gelar sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), gelar *Master* dan *Doctor of Philosophy (Ph.D.)* bidang Teknik dari Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, ini mempunyai pengalaman di pasar modal dan perencanaan korporasi. Alamat resmi Dewan Komisaris Telkom adalah Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 5, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia.

Remunerasi dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dihitung berdasarkan formula yang juga dipakai untuk penentuan gaji Direksi. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2009, RUPS dapat menetapkan penghasilan dengan jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Nilai yang dibayarkan mengacu pada persentase gaji Direktur Utama yang telah disetujui oleh RUPST. Setiap anggota komisaris berhak menerima sejumlah kompensasi yang diberikan secara bulanan dan tunjangan. Mereka juga berhak mendapatkan tantiem berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan, dengan besaran yang ditentukan dalam RUPS. Komisaris juga berhak mendapatkan tunjangan pada secara *lumpsum* saat mereka telah berhenti posisinya.

Landasan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan Kementerian BUMN. Dalam penyusunan tersebut Komite Remunerasi berpedoman pada formula yang juga dipakai untuk penentuan gaji Direksi. Besarnya nilai yang dibayarkan mengacu pada persentase gaji Direktur Utama, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Negara Nomor S326/SMBU/2002 Kementrian BUMN tanggal 3 Mei 2002 yang telah disetujui oleh RUPST, dan *benchmarking* dengan perusahaan pada industri yang sejenis. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyusun rancangan usulan remunerasi Dewan Komisaris;
b. Komite Nominasi dan Remunerasi meminta pihak independen untuk menyusun kerangka kerja (*framework)* untuk remunerasi Dewan Komisaris;
c. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan remunerasi kepada Dewan Komisaris;
d. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
e. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.

Penetapan Remunerasi

Kompensasi

Setiap anggota Komisaris berhak atas sejumlah kompensasi bulanan (honorarium), tantiem dan tunjangan lainya. Mereka berhak mendapatkan tantiem berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan, yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Komisaris juga mendapatkan tunjangan secara *lumpsum* pada saat mereka berhenti dari posisinya.

Setiap Direktur berhak atas remunerasi yang terdiri dari gaji bulanan dan tunjangan lain (termasuk tunjangan pensiun). Di samping itu Direktur juga mendapatkan bagian tantiem tahunan atas kinerja dan pencapaian Perusahaan yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Bonus dan insentif dianggarkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum diusulkan kepada pemegang saham dalam forum RUPST.

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris di Tahun 2011
(dalam juta Rupiah)

Honorarium	Tunjangan	Tunjangan Lainnya
4.436,7	7.870,3	3.996,6

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sebulan sekali atau sewaktu dianggap perlu oleh salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari salah satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya sepersepuluh saham Telkom yang beredar.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak dapat tercapai, pengambilan keputusan didasarkan pada suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang mewakili pada rapat. Apabila jumlah suara berimbang, maka keputusan yang diajukan harus ditolak. Kuorum untuk seluruh rapat Dewan Komisaris adalah lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili kuasa yang diberikan kepada salah satu Komisaris yang hadir pada rapat tersebut.

Selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 kali yang dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 13 kali di tahun 2011.

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Jusman Syafii Djamal	Komisaris Utama	9 dari 9
Bobby A.A. Nazief	Komisaris	9 dari 9
Mahmuddin Yasin	Komisaris	9 dari 9
Johnny Swandi Sjam	Komisaris Independen	9 dari 9
Rudiantara	Komisaris Independen	8 dari 9

Tabel Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Jusman Syafii Djamal	Komisaris Utama	13 dari 13
Bobby A.A. Nazief	Komisaris	13 dari 13
Mahmuddin Yasin	Komisaris	13 dari 13
Johnny Swandi Sjam	Komisaris Independen	13 dari 13
Rudiantara	Komisaris Independen	13 dari 13
Rinaldi Firmansyah	Direktur Utama/CEO	13 dari 13
Sudiro Asno	Direktur Keuangan/CFO	13 dari 13
Faisal Syam	Direktur Human Capital & General Affair	12 dari 13
Ermady Dahlan	Direktur Network & Solution	11 dari 13
I Nyoman G. Wiryanata	Direktur Konsumer	13 dari 13
Arief Yahya	Direktur Enterprise & Wholesale	13 dari 13
Prasetio	Direktur Compliance & Risk Management	13 dari 13
Indra Utoyo	Direktur IT Solution & Strategic Portfolio	13 dari 13

3. Direksi

Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tanggung jawab utama Direksi Telkom adalah memimpin dan mengelola operasional Perusahaan serta mengendalikan dan mengelola aset-aset Telkom dengan pengawasan dari Dewan Komisaris.

Direksi juga berhak untuk mengambil tindakan untuk dan atas nama Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan atas hal atau kejadian apapun, dengan pihak lain.

1. Direktur Utama
   Lingkup dan tanggung Jawab:
   - Memimpin dan mengelola Perusahaan sejalan dengan tujuan dan target Perusahaan;
   - Memperbaiki tingkat efisiensi dan efektivitas Perusahaan;
   - Mempertahankan dan mengelola, serta menjaga aset-aset Perusahaan; dan
   - Bertanggung jawab terhadap manajemen dan kepemilikan, termasuk kesepakatan dengan pihak ketiga.

2. Direktur Keuangan
   Lingkup dan tanggung Jawab:
   - Menerapkan fungsi korporasi terkait dengan Direktorat Keuangan; dan
   - Bertanggung jawab melaksanakan fungsi keuangan terpusat, termasuk mengelola fungsi operasi keuangan di seluruh unit usaha perusahaan, melalui *finance billing and collection center*, serta memastikan pengendalian seluruh kegiatan investasi Anak Perusahaan.

3. Direktur Human Capital & General Affair
   Lingkup dan tanggung Jawab:
   - Mengelola Direktorat Human Capital & General Affair; dan
   - Mengelola sumber daya manusia di seluruh unit usaha melalui Human Resources Center dan memastikan pengendalian di unit usaha lainnya dari Corporate Services, Support Services serta Enterprise Service, termasuk Human Resources Center ("HR Center"), Human Resources Assessment Service ("HRAS"), Learning Center ("LEC"), Management Consultant Center ("MCC"), Community Development Center ("CDC") dan dana pensiun serta lembaga lainnya.

4. Direktur Network & Solution
   Lingkup dan tanggung Jawab:
   - Mengelola operasional dan mengelola infrastruktur dan layanan di sektor jaringan dan solusi; dan
   - Mengelola unit usaha lain, termasuk Divisi Infratel, Divisi Access ("DIVA") dan layanan pendukung seperti Maintenance Service Center ("MSC").

5. Direktur Konsumer
   Lingkup dan tanggung Jawab:
   - Melaksanakan fungsi manajemen penyediaan *delivery channels* dan layanan konsumen bagi bisnis konsumer; dan

- Mengelola *delivery channel* dan layanan konsumen bagi bisnis, termasuk unit lain seperti Divisi Telkom Flexi ("DTF"), Divisi Consumer Service ("DCS").

6. Direktur Enterprise & Wholesale
   Lingkup dan tanggung Jawab:
   - Menerapkan fungsi manajemen di sektor *delivery channel* dan layanan konsumen di Direktorat Enterprise dan Wholesale; dan
   - Melaksanakan *delivery channel* dan layanan konsumen untuk korporasi dan bisnis *wholesale*, yang termasuk unit-unit seperti Divisi Enterprise Service ("DIVES"). Divisi Business Service ("DBS"), dan Divisi Carrier and Interconnection Services ("CIS").

7. Direktur Compliance & Risk Management
   Lingkup dan tanggung Jawab:
   - Mengelola kepatuhan, pelaksanaan hukum dan manajemen risiko di Direktorat Compliance & Risk Management; dan
   - Mengelola unit Legal & Compliance, Manajemen Risiko Perusahaan, dan Business Effectiveness, Security & Safety dan Supply Planning & Control serta pengendalian operasi unit Supply Center.

8. Direktur IT Solution & Strategic Portofolio
   Lingkup dan tanggung Jawab:
   - Bertanggung jawab terhadap strategi kebijakan TI, strategi dan tarif, strategi investasi dan perencanaan perusahaan;
   - Mengelola Information Service Center, Supply Center dan Divisi Multimedia; dan
   - Mengelola layanan pendukung Research & Development Center ("RDC").

Charter BoD

Dalam hal aktifitas dan tindakan dalam pengurusan Perusahaan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan perundang-undangan, maka dilakukan prosedur yang tetap menjunjung prinsip akuntabilitas melalui kesepakatan, persetujuan dan atau pengaturan antar anggota Direksi. *Charter* ini bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi birokrasi dalam tata kelola administrasi manajemen Perusahaan, dan mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja. Di dalam *charter* ini juga diatur mekanisme hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan hubungan kelembagaan dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dalam peran pengurusan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Struktur Direksi

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Untuk dapat dipilih, calon Direktur harus diajukan oleh Pemerintah sebagai pemegang saham Dwiwarna Seri A. Setiap Direktur Telkom memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan, kecuali jika masa jabatan akhir jatuh bukan pada hari kerja. Jika hal itu terjadi, maka masa akhir jabatan jatuh pada hari berikutnya. Pemegang saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Per tanggal 31 Desember 2011, struktur Direksi Telkom terdiri dari delapan Direktur, yaitu:

1. Rinaldi Firmansyah, Direktur Utama ("CEO");
2. Sudiro Asno, Direktur Keuangan ("CFO");
3. Faisal Syam, Direktur Human Capital & General Affairs;
4. Ermady Dahlan, Direktur Network & Solution (Pejabat pelaksana "COO");
5. I Nyoman G Wiryanata, Direktur Konsumer;
6. Arief Yahya, Direktur Enterprise & Wholesale;
7. Prasetio, Direktur Compliance & Risk Management; and
8. Indra Utoyo, Direktur IT & Supply ("CIO");

Penentuan Kinerja, Gaji dan Tunjangan Direksi

Pengukuran kinerja Direksi Perseroan mengacu pada evaluasi kinerja yang efektif yang dilakukan secara komprehensif, berjenjang dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.01/KEP/DK/2010/RHS tanggal 21 Januari 2010, dimana penilaian kinerja tersebut terdiri dari 3 (tiga) indikator utama yaitu *financial, internal business process* dan *learning & growth.*

Setiap Direktur berhak atas remunerasi yang terdiri dari gaji bulanan dan tunjangan lain (termasuk tunjangan pensiun). Di samping itu Direktur juga mendapatkan bagian tantiem tahunan atas kinerja dan pencapaian perusahaan yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPST. Bonus dan insentif dianggarkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum diusulkan kepada pemegang saham dalam forum RUPST.

- Gaji
  Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab membuat formula gaji Direksi. Formula yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Formula yang telah

ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan disetujui oleh rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kemudian diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

- Prosedur Penentuan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Direksi
  Berdasarkan keputusan RUPST pada tanggal 9 Mei 2003, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menentukan besarnya tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dengan mengacu pada hasil telaah konsultan independen. Setelah hasil telaah independen tersebut dibahas dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyusun formula yang berlaku sejak 1 Januari 2003. Besarnya tunjangan dan gaji Direksi yang ditentukan oleh Dewan Komisaris tersebut kemudian dilaporkan kepada pemegang saham Dwiwarna dalam RUPST pada tanggal 30 Juli 2005. Penentuan tunjangan dan fasilitas bagi Direksi berlaku sejak tahun fiskal 2003 dan akan diajukan kembali untuk tahun fiskal 2010.

Sesuai peraturan yang berlaku maka gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dilaporkan kepada otoritas pasar modal dan Pemegang Saham Dwiwarna.

Tabel Remunerasi Direksi di Tahun 2011 (dalam juta Rupiah)

Gaji	Tunjangan	Tunjangan Lainnya
14.081,7	26.264,5	47.749,8

Kepemilikan Saham

Setiap anggota Direktur dan Dewan Komisaris secara individual memiliki kurang dari satu persen Saham Biasa Perusahaan. Hanya 2 Direktur yang memiliki Saham Biasa Perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2011, Ermady Dahlan memiliki 17.604 saham dan Indra Utoyo memiliki 5.508 saham.

Rapat Direksi

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama namun kedudukannya dapat dipergantikan oleh Wakil Direktur apabila Direktur Utama berhalangan hadir karena alasan apapun. Apabila Wakil Direktur Utama berhalangan hadir, karena alasan apapun, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya sepersepuluh atau lebih dari jumlah Saham Biasa yang beredar.

Pengambilan keputusan rapat Direksi berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilaksanakan berdasarkan atas pengambilan suara mayoritas dari anggota Direksi yang hadir. Kuorum rapat Direksi adalah apabila lebih dari setengah dari anggota Direksi hadir atau diwakili dengan sah secara hukum dalam rapat tersebut. Setiap anggota Direksi yang hadir memiliki satu suara (dan satu suara untuk setiap Direktur lainnya yang diwakili).

Pada tahun 2011. Rapat Direksi dilaksanakan sebanyak 52 kali.

Tabel Kehadiran Rapat Direksi

Direksi	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Rinaldi Firmansyah	Direktur Utama/CEO	51
Sudiro Asno	Direktur Keuangan/CFO	52
Faisal Syam	Direktur Human Capital & General Affair	52
Ermady Dahlan	Direktur Network & Solution	52
I Nyoman G. Wiryanata	Direktur Konsumer	52
Arief Yahya	Direktur Enterprise & Wholesale	50
Prasetio	Direktur Compliance & Risk Management	51
Indra Utoyo	Direktur IT & Supply	52

Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2011, Kami melaksanakan beberapa program pelatihan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk Pelatihan *GCG for Executive*.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Program	Lokasi	Tanggal
Jusman Syafii Djamal	The Mobile World Congress	Barcelona, Spanyol	12 – 17 Februari 2011
Johnny Swandi Sjam	The Mobile World Congress	Barcelona, Spanyol	12 – 17 Februari 2011

Peningkatan kompetensi Direksi

Nama	Program	Lokasi	Tanggal
Rinaldi Firmansyah	- Innovation workshop - The Mobile World Congress	MIT Sloan, Boston, AS Barcelona, Spanyol	4 – 7 April 2011 12 – 17 Februari 2011
Sudiro Asno	- The 6th CEE International Conference - Advance Corporate Finance	Austria United Kingdom	2-6 May 2011 7-11 November 2011
Faisal Syam	- Transformation Leaders Forum - UNI APRO Regional Conference - Workshop Metro Ethernet & IPV6 Juniper	Singapore Philippines Netherland	15-16 Februari 2011 5-7 Juli 2011 7-11 November 2011
Ermady Dahlan	Fiber Optic Network Solution	South Korea	22-26 Nopember 2011
I Nyoman G. Wiryanata	- Training visit to Best TV International tentang pengelolaan IPTV service - NAB show 2011 conference tentang pengembangan bisnis *konten*	China AS	9-12 November 2011 8-15 April 2011
Prasetio	- The Mobile World Congress - Driving Corporate Performance	Spain AS	11-18 Februari 2011 15-23 Juli 2011
Indra Utoyo	Leading Product Innovation	AS	11-15 Juli 2011

4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat *Audit Committee Charter* (yang telah diamademenkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No.20/KPE/DK/2006 tanggal 11 September 2006), yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. *Audit Committee Charter* dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Bapepam-LK dan SEC serta peraturan terkait lainnya. Pada bulan November 2011 Perusahaan melakukan amandemen terhadap *Audit Committee Charter* dan amandemen tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No.11/KEP/DK/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit Telkom Group.

Tidak ada perubahan peraturan yang merubah fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Amandemen terhadap *Audit Committee Charter*, terutama dimaksudkan untuk: (i) memutakhirkan dasar hukum dalam Keputusan Dewan Komisaris, (ii) mempertegas batasan tanggung jawab Komite Audit, dan (iii) mempertegas cakupan kerja Komite Audit yang meliputi Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dikonsolidasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee Charter secara garis besar memuat tujuan, fungsi dan tanggung jawab Komite Audit. Berdasarkan *Charter* ini, Komite Audit bertanggung jawab untuk:

- Mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan atas nama Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal.
- Mendiskusikan dengan auditor internal dan eksternal semua lingkup pekerjaan, baik pekerjaan audit dan non-audit serta rencana audit mereka;
- Menelaah laporan keuangan konsolidasian Telkom serta efektifitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan ("ICOFR");
- Mengadakan rapat secara berkala dengan auditor internal dan eksternal, tanpa kehadiran manajemen, masing-masing untuk membahas hasil evaluasi dan hasil audit mereka atas pengendalian internal Telkom serta laporan keuangan Telkom secara keseluruhan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, khususnya dalam bidang yang terkait dengan akuntansi dan keuangan, serta kewajiban lain yang diharuskan oleh SOA.

Komite Audit dapat menunjuk konsultan independen atau penasehat profesional untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Komite Audit juga bertugas untuk menerima dan menangani pengaduan.

Kebijakan dan Prosedur *Pre-Approval* Komite Audit

Telkom menerapkan kebijakan dan prosedur *pre-approval* yang mensyaratkan bahwa semua jasa non-audit yang akan diberikan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen, harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Komite Audit, sebagaimana ditetapkan dalam *Audit Committee Charter*. Berdasarkan *Charter* tersebut, jasa non-audit mungkin dapat diperkenankan untuk dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen dengan ketentuan bahwa: (i) Direksi harus menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian jasa non-audit yang akan dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen; dan (ii) Komite Audit akan memutuskan apakah jasa non-audit yang diajukan akan mempengaruhi independensi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen atau akan menimbulkan benturan kepentingan.

Konsisten dengan seksi 10A(i) (1) (B) dari *Exchange Act* paragraf (c) (7) (i) (C) dari *Rule* 2-01 *Regulation* S-X, *Audit Committee Charter* memberikan pengecualian untuk persyaratan *pre-approval* atas jasa non-audit yang diperkenankan, apabila: (i) jumlah seluruh biaya jasa non-audit tersebut tidak lebih dari lima persen dari jumlah biaya audit yang dibayarkan oleh Telkom kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor independen selama tahun buku dimana jasa tersebut diberikan atau (ii) jasa yang diajukan tidak dianggap sebagai jasa non-audit pada saat perjanjian untuk melaksanakan penugasan ditandatangani; dan (iii) selain dari kedua hal tersebut, pelaksanaan jasa non-audit harus disetujui lebih dulu oleh seorang anggota Komite Audit yang telah mendapat pelimpahan wewenang untuk memberikan *pre-approval* dari Komite Audit atau langsung oleh Komite Audit.

Independensi Komite Audit

Peraturan Bapepam-LK tentang Komite Audit mensyaratkan bahwa Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, sementara dua anggota lainnya harus merupakan pihak yang independen. Minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian (dalam konteks *item 16A* dari *Form 20-F*) dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Agar memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, anggota eksternal Komite Audit:

- Bukan pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit;
- Bukan sebagai pejabat eksektutif Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit;
- Tidak boleh terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas;
- Tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi;
- Tidak boleh memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, saham Telkom; dan
- Tidak boleh memiliki hubungan bisnis apapun yang terkait dengan bisnis Perusahaan.

Telkom memiliki Komite Audit yang terdiri dari enam anggota: dua Komisaris Independen, satu Komisaris, dan tiga anggota eksternal independen yang tidak terafiliasi dengan Telkom. Tidak ada perubahan komposisi anggota Komite Audit selama tahun 2011. Berikut adalah Susunan Komite Audit Per 31 Desember 2011:

Ketua	Rudiantara
Sekretaris	Salam
Anggota	Johnny Swandi Sjam
	Bobby A.A. Nazief
	Sahat Pardede
	Agus Yulianto

Di bawah ini adalah profil ringkas dari masing-masing anggota Komite Audit:

Rudiantara - Ketua/Anggota

Rudiantara sebagai ketua Komite Audit bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas tiap anggota Komite Audit.

Salam - Sekretaris/Anggota

Salam adalah akuntan bersertifikat dan berpengalaman dalam bidang *auditing*, akuntansi, dan keuangan. Antara tahun 1974 dan 1989, beliau adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau juga pernah menjabat sebagai AVP Divisi Pengembangan Usaha PT Rajawali Wirabhakti Utama, Kepala *Corporate Control Unit* PT Pabrik Rokok Cap Bentoel dan Direktur Keuangan PT Telekomindo Primakarya. Beliau meraih gelar sarjana bidang akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan Jakarta.

Salam bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas anggota Komite Audit, melakukan korespondensi, menyiapkan dokumentasi, menyiapkan laporan tahunan Komite Audit, dan mengkoordinasikan proses seleksi auditor independen.

Johnny Swandi Sjam - Anggota
Johnny Swandi Sjam bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tata kelola perusahaan serta memantau peraturan pasar modal dan perundangan lainnya yang terkait dengan operasi Perusahaan.

Bobby A.A. Nazief - Anggota
Bobby A.A. Nazief bertugas untuk mengawasi dan memantau TI Perusahaan.

Sahat Pardede - Anggota
Sahat Pardede adalah akuntan publik bersertifikat dan *Managing Partner* di Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat & Rekan. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dan keahlian di bidang *auditing*, akuntansi keuangan dan pengendalian internal sesuai dengan SOA Seksi 404. Pada tahun 1981 hingga 2000, beliau adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau meraih gelar sarjana bidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta dan meraih gelar Master bidang Business Administration dari Universitas Saint Mary di Halifax, Kanada.

Sahat Pardede bertugas untuk mengawasi dan memantau proses audit secara keseluruhan, proses konsolidasi laporan keuangan, penerapan standar akuntansi keuangan, dan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR).

Agus Yulianto - Anggota
Agus Yulianto adalah akuntan bersertifikat dan berpengalaman dalam bidang *auditing*, akuntansi, dan keuangan. Antara tahun 1983–1999, beliau adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau juga pernah bekerja sebagai konsultan senior pada Jakarta Initiative Task Force sebagai, *procurement audit specialist* untuk proyek-proyek yang didanai Bank Dunia. Sebelum ditunjuk sebagai anggota Komite Audit, beliau bekerja di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai Ketua Tim *Financial Management Specialist* untuk sebuah proyek di Aceh yang dikelola oleh Bank Dunia dan didanai Multi Donor Fund. Beliau meraih gelar sarjana bidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta dan meraih gelar Master bidang akuntansi dari Universitas Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, AS.

Agus Yulianto bertugas untuk mengawasi dan memantau efektivitas manajemen risiko (khususnya risiko-risiko pelaporan keuangan) yang dilaksanakan Direksi, memantau kemungkinan terjadinya kecurangan dan/atau penyimpangan yang berpotensi merugikan Perusahaan, dan penanganan pengaduan.

Ahli Keuangan Komite Audit
Dewan Komisaris telah menetapkan Sahat Pardede, anggota Komite Audit, memenuhi kualifikasi sebagai Ahli Keuangan dan Akuntansi Komite Audit seperti yang diuraikan pada butir 16A Form 20-F, dan sebagai anggota "independen" sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 10A-3 dari *Exchange Act*. Sahat Perdede telah menjadi anggota Komite Audit sejak Februari 2004. Sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit, dan sampai saat ini, beliau masih berpraktek sebagai Akuntan Publik Bersertifikat di Indonesia yang menyediakan jasa audit dan jasa keuangan lainnya kepada sejumlah perusahaan swasta dan Institusi-institusi publik. Beliau juga adalah anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.

Pengecualian dari Standar Pencatatan di AS untuk Komite Audit
Sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan memiliki struktur dua dewan (*Two Tiers board structure*) yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Fungsi manajemen eksekutif dilaksanakan oleh Direksi sedangkan tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi

kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan operasi dan manajemen Perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi.

Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 dan Peraturan Pencatatan No.1A yang dikeluarkan oleh BEI mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik yang tercatat di BEI (seperti Telkom) untuk membentuk Komite Audit yang paling sedikit terdiri dari tiga anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua Komite Audit, sementara dua anggota lainnya harus merupakan pihak yang independen, minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Standar Pencatatan NYSE yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 10A-3(c)(3) dari *Exchange Act* mengharuskan emiten swasta asing yang sahamnya tercatat di NYSE memiliki komite audit yang terdiri dari para Direktur Independen. Walaupun demikian, emiten swasta asing dapat dikecualikan dari persyaratan independensi ini apabila:

(i) Pemerintah atau bursa efek negara asal mengharuskan Perusahaan memiliki Komite Audit;
(ii) Komite Audit terpisah dari Direksi dan memiliki anggota baik dari dalam maupun luar Dewan Komisaris;
(iii) Anggota Komite Audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif Perusahaan yang menjadi anggota Komite Audit;
(iv) Pemerintah atau bursa efek negara asal memiliki persyaratan untuk Komite Audit yang independen dari manajemen Perusahaan; dan
(v) Komite Audit bertanggung jawab atas penunjukkan, retensi dan pengawasan pekerjaan auditor eksternal.

Kami memiliki Komite Audit yang terdiri dari enam anggota: dua Komisaris Independen, satu Komisaris, dan tiga anggota eksternal independen yang tidak terafiliasi dengan Telkom.

Tidak semua anggota Komite Audit Telkom merupakan Direktur Independen seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan 10A-3 dari *Exchange Act*. Telkom mengacu pada pengecualian umum berdasarkan Peraturan 10A-3(c)(3) mengenai komposisi anggota Komite Audit. Kami yakin bahwa acuan pada pengecualian umum tersebut tidak akan memberikan dampak sebaliknya secara material pada kemampuan Komite Audit untuk bertindak independen. Kami juga yakin bahwa maksud dari pembatasan bahwa tiap anggota Komite Audit merupakan Direktur Independen adalah untuk memastikan bahwa Komite Audit bebas dari pengaruh manajemen dan dapat menyediakan forum yang terpisah dari manajemen sehingga auditor dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat melakukan pembahasan masalah secara lugas. Peraturan Komite Audit yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK mensyaratkan bahwa setiap anggota Komite Audit harus independen. Peraturan Komite Audit yang dikeluarkan Bapepam-LK juga mensyaratkan bahwa paling sedikit dua anggota Komite Audit, yaitu anggota eksternal independen, tidak hanya independen terhadap manajemen tetapi juga terhadap Dewan Komisaris dan Direksi serta Perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Kami yakin bahwa standar yang ditetapkan dalam peraturan Komite Audit yang dikeluarkan Bapepam-LK cukup efektif dalam memastikan kemampuan Komite Audit untuk bertindak independen.

Pengecualian tersebut di atas telah Kami laporkan dalam *Annual Written Confirmation* yang disampaikan kepada NYSE. Namun, tidak seperti persyaratan yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE, berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Komite Audit di Indonesia, Komite Audit Telkom tidak mempunyai tanggung jawab langsung atas penunjukan, kompensasi dan retensi auditor eksternal. Komite Audit Telkom hanya dapat merekomendasikan penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris dan keputusan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan pemegang saham.

LAPORAN KOMITE AUDIT

Berikut ini adalah laporan kegiatan Komite Audit untuk tahun buku 2011:

Independensi Auditor

Komite Audit telah menelaah dan membahas dengan Auditor Independen KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, *a member firm of PricewaterhouseCoopers global network,* yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mereka mengenai kesesuaian Laporan Keuangan Konsolidasian dan daftar-daftar terkait dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan AS dan pendapat mereka mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, tidak hanya penilaian terhadap akseptabilitas tetapi juga kualitas dari standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan dan hal-hal lain yang harus di diskusikan dengan Komite Audit, seperti standar dari *Public Company Accounting Oversight Board* ("PCAOB"), Peraturan Bapepam-LK dan SEC serta peraturan-peraturan lain yang berlaku, Selain itu, Komite Audit juga telah mendiskusikan dengan PwC mengenai independensi Kantor Akuntan Publik terhadap Manajemen Kami terhadap Perusahaan Kami sendiri termasuk hal-hal yang tercantum dalam surat PwC, seperti yang diwajibkan menurut Peraturan PCAOB 3526, komunikasi dengan Komite Audit mengenai independensi. mempertimbangkan pengaruh dari jasa-jasa non-audit dari Kantor Akuntan Publik. Komite Audit telah menerima surat dari PwC yang memberikan penjelasan, seperti yang diwajibkan menurut peraturan PCAOB 3526, mengenai semua hubungan antara PwC dengan Perusahaan yang menurut pertimbangan profesional mereka dapat dianggap mengganggu independensi. PwC telah mendiskusikan independensinya dengan Komite Audit dan telah memberikan konfirmasi melalui suratnya tersebut bahwa, menurut pertimbangan profesional mereka, PwC adalah independen terhadap Perusahaan.

Integrated Audit

- Komite Audit telah menelaah laporan manajemen mengenai evaluasi manajemen terhadap efektifitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan dan laporan PwC mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Kami. Komite Audit juga telah kelemahan-kelemahan yang signifikan yang diidentifikasi selama proses evaluasi dan proses audit dengan manajemen dan PwC; dan rencana manajemen untuk meremediasi kelemahan-kelemahan pengendalian internal atas pelaporan keuangan tersebut.
- Komite Audit telah membahas dengan internal auditor Perusahaan dan PwC mengenai seluruh ruang lingkup dan rencana audit mereka. Komite Audit telah mengadakan rapat dengan internal auditor dan PwC, tanpa kehadiran manajemen, untuk membahas hasil pemeriksaan dan hasil evaluasi mereka terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan serta kualitas pelaporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

Komite Audit juga telah menelaah dan mendiskusikan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit dan daftar-daftar terkait dalam Laporan Tahunan (Form 20-F) dengan manajemen Perusahaan. Diskusi ini mencakup pembahasan mengenai kualitas dan akseptabilitas dari standar akuntansi keuangan yang diterapkan Perusahaan, kelayakan *accounting judgment* yang signifikan, dan kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian. Manajemen telah mengkonfirmasikan kepada Komite Audit bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut: (i) merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disajikan dengan penuh integritas serta obyektif; dan (ii) telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan di atas, Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris telah menyetujui agar Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah di audit dan daftar-daftar terkait serta evaluasi manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan untuk disertakan ke dalam laporan tahunan *on Form 20-F* yang akan dilaporkan Perusahaan kepada Bapepam-LK dan SEC.

Whistleblower

- Komite telah menyusun prosedur untuk menerima dan menangani pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal dan *auditing*, termasuk prosedur untuk memastikan kerahasiaan karyawan, pengaduan permasalahan tanpa nama yang disampaikan karyawan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 dan *Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 301* tentang *Public Company Audit Committee.*
- Berkaitan dengan manajemen risiko Perusahaan, Komite Audit juga mengawasi dan memonitor risiko kecurangan dan risiko-risiko pelaporan keuangan yang mungkin berdampak material pada laporan keuangan.

Penerapan Program *Whistleblower*

Sebagai bagian dari *entity level control*, sejak tahun 2006 Telkom telah menerapkan program *whistleblower* yang dirancang untuk mengakomodasi, menginvestigasi, dan menindaklanjuti pengaduan dari karyawan Telkom Group dan dari pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Penerapan program *whistleblower* yang dikelola oleh Komite Audit ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan diratifikasi dengan Keputusan Direksi.

Komite Audit akan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari karyawan Telkom Group dan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan:

- *Akuntansi dan Auditing*. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan serta permasalahan audit terutama mengenai independensi auditor independen;
- *Pelanggaran Peraturan*. Pelanggaran peraturan pasar modal dan peraturan perundangan terkait dengan operasi Perusahaan maupun pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Telkom;
- *Kecurangan dan/atau dugaan korupsi*. Dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Telkom; dan
- *Kode Etik*. Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi Telkom atau mengakibatkan kerugian bagi Telkom. Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain: tidak jujur, potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik.

Telkom juga telah membangun suatu mekanisme kerja antara Komite Audit dengan Internal Audit dan Komite Investigasi termasuk protokol dengan Telkomsel untuk menindaklanjuti pengaduan yang diterima. Selain itu, program *whistleblower* juga telah disosialisasikan dan telah dipahami oleh karyawan.

Selama tahun 2011, Komite Audit menindaklanjuti 9 pengaduan yang memenuhi syarat dengan kategori pengaduan terkait dengan akuntansi, pengendalian internal, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan pelanggaran kode etik.

Karyawan Telkom Group ataupun pihak ketiga dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis mengenai permasalahan akuntansi dan *auditing*, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi dan pelanggaran kode etik langsung kepada Komisaris Utama atau kepada Ketua Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui *e-mail*, fax atau surat dengan alamat:

E-mail : ka301@telkom.co.id
Fax : (021) 527 1800
Surat : Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710
Website : http://whistleblower.telkom.co.id

Pengaduan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Disampaikan melalui *e-mail*, fax atau surat;
- Memberikan informasi mengenai permasalahan pengendalian internal, akuntansi, audit, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi dan pelanggaran kode etik; dan
- Informasi yang dilaporkan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penanganan pengaduan untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 dan *Sarbanes-Oxley Act of 2001 Section 301* tentang *Public Company Audit Committee* harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan GCG. Karena itu, syarat pengaduan diperlukan untuk menjaga agar para pelapor menyampaikan pengaduan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Sepanjang tahun 2011, Komite Audit telah mengadakan rapat 30 kali pertemuan. Rapat ini diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dalam *Audit Committee Charter* dan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi tiap anggota dan Komite Audit. Jumlah pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Rapat Komite Audit

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Rudiantara	30	27	90%
Salam	30	30	100%
Johnny Swandi Sjam	30	20	67%
Bobby A.A. Nazief	30	16	53%
Sahat Pardede	30	30	100%
Agus Yulianto	30	30	100%

Jakarta, 30 Maret 2012

Rudiantara
Ketua Komite Audit

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.003/KEP/DK/2005 tertanggal 21 April 2005 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tujuan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi ini bertugas untuk:

- Mengembangkan sistem nominasi dan pemilihan bagi posisi strategis dalam Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan independensi;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memilih kandidat bagi posisi strategis di Perusahaan, yaitu satu level di bawah direktur, sebagaimana juga Direktur dan Komisaris pada Anak Perusahaan yang terkonsolidasi dengan kontribusi mencapai 30% atau lebih terhadap pendapatan konsolidasian Perusahaan, seperti Telkomsel. Khusus untuk Telkomsel, rekomendasi Komite dikonsultasikan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
- Merumuskan sistem remunerasi bagi Direksi berdasarkan perhitungan kewajaran dan kinerjanya.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Komite Nominasi adalah anggota yang tidak memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Berikut ini adalah susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2011:

Ketua	Jusman Syafii Djamal
Sekretaris/Anggota	Yuki Indrayadi
Anggota	Mahmuddin Yasin
	Bobby A.A. Nazief
	Rudiantara
	Johnny Swandi Sjam

Jusman Syafii Djamal - Ketua/Komisaris

Jusman Syafii Djamal merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan bertanggung jawab terhadap pemberian arahan dan koordinasi pelaksanaan tugas Komite.

Mahmuddin Yasin - Komisaris

Mahmuddin Yasin merupakan anggota Komite dan bertanggung untuk mengkoordinasikan masukan yang berasal dari pemegang saham pengendali terkait dengan isu-isu nominasi dan remunerasi.

Bobby A.A. Nazief - Komisaris

Bobby A.A. Nazief merupakan anggota Komite dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan masukan yang berasal dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pemegang saham pengendali terkait dengan isu-isu nominasi dan remunerasi

Rudiantara - Komisaris Independen

Rudiantara adalah anggota Komite dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan isu nominasi dan remunerasi dengan pihak manajemen dan pihak eksternal yang independen.

Johnny Swandi Sjam - Komisaris Independen

Johnny Swandi Sjam adalah anggota Komite dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan isu-isu nominasi dan remunerasi dengan pihak manajemen dan pihak eksternal yang independen.

Yuki Indrayadi - Sekretaris/Sekretaris Dewan Komisaris

Yuki Indrayadi adalah sekretaris merangkap sebagai anggota Komite dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengelola administrasi dan dokumentasi Komite.

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (kecuali Bobby A.A. Nazief, Mahmuddin Yasin, dan Johnny Swandi Sjam) merupakan anggota eksternal dan bersifat independen.

LAPORAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada tahun 2011, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan terhadap hal-hal terkait nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Nominasi

Komite ini bertugas sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No.07/KEP/DK/2010 tertanggal 30 April 2010 terkait dengan penunjukan posisi strategis di Perusahaan, yaitu:

1. Mengisi posisi yang berada setingkat di bawah Direksi Perusahaan atau Direksi pada Anak Perusahaan, Direksi harus berkonsultasi dengan Dewan Komisaris; dan
2. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, untuk mengisi posisi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anak Perusahaan yang terkonsolidasi yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi sebesar 30% atau lebih, Direksi Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2011, Komite telah menyampaikan masukan terkait dengan usulan pencalonan beberapa posisi strategis, yaitu: EGM Divisi Carrier & Interconnection Service, anggota Direksi PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), EGM Divisi Infrastruktur Telekomunikasi dan EGM Divisi Access. Komite juga memberikan masukan atas kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Telkomsel.

Remunerasi

Pada tahun 2011, Komite membantu Dewan Komisaris dalam menyiapkan usulan mengenai remunerasi anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan kepada pemegang saham. Dengan dibantu oleh konsultan independen, bahan usulan remunerasi tersebut disusun berdasarkan *benchmark* terhadap remunerasi Direksi perusahaan-perusahaan telekomunikasi regional.

Selama tahun 2011, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 17 kali.

Tabel Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Jusman Syafii Djamal	17	17	100%
Mahmuddin Yasin	17	15	88%
Bobby A.A. Nazief	17	17	100%
Rudiantara	17	17	100%
Johnny Swandi Sjam	17	17	100%
Yuki Indrayadi	17	17	100%

Jakarta, 30 Maret 2012

Jusman Syafii Djamal
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko

Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko atau "KEMPR" (sebelumnya Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko) dibentuk dengan mengacu pada Keputusan Dewan No.04/KEP/DK/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang merupakan perubahan dari Keputusan Dewan Komisaris No.06/KEP/DK/2006 tanggal 19 Mei 2006 dan Keputusan Dewan Komisaris No.02/KEP/DK/2009/RHS tanggal 26 Februari 2009

Tujuan pembentukan KEMPR di antaranya adalah untuk melakukan tinjauan atas rencana jangka panjang Perusahaan serta rencana kerja anggaran tahunan Perusahaan dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan kedua hal tersebut. Komite ini juga bertanggung jawab terhadap pemantauan pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan dan bertugas memberikan hasil tinjauan yang komprehensif sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam meninjau dan memantau proses pelaksanaan bisnis Perusahaan, penganggaran belanja modal, serta penerapan manajemen risiko Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko

Lingkup tugas dari KEMPR adalah untuk:

- Menyampaikan laporan evaluasi atas usulan rencana jangka panjang Perusahaan atau *Corporate Strategic Scenario* ("CSS") dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") yang diajukan oleh Direksi sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- Menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan CSS dan RKAP serta penerapan manajemen risiko Perusahaan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan CSS dan RKAP;
- Memberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko; dan
- Menjaga kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2011, susunan keanggotaan KEMPR berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.02/KEP/DK/2011 tanggal 14 Januari 2011 terdiri dari:

Ketua	Bobby A.A. Nazief
Wakil	Mahmuddin Yasin
Sekretaris	Ario Guntoro
Anggota	Johnny Swandi Sjam
	Adam Wirahadi
	Widuri Meintari Kusumawati

Bobby A.A. Nazief - Ketua/Anggota

Komisaris Bobby A.A. Nazief adalah ketua KEMPR dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas dari seluruh anggota Komite.

Mahmuddin Yasin – Wakil Ketua/Anggota

Komisaris Mahmuddin Yasin bertugas sebagai wakil ketua KEMPR yang bersama dengan Ketua KEMPR, bertanggung jawab memberikan arahan, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas anggota Komite.

Ario Guntoro – Sekretaris/Anggota

Sebagai sekretaris KEMPR, lingkup tugas mencakup mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas Komite dan penjadwalan pelaksanaan kerja Komite, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pencapaian *Corporate Strategic Scenario* ("CSS") dan *capital expenditure*. Ario Guntoro adalah seorang profesional dengan pengalaman luas di bidang keuangan, investasi, dan perbankan. Setelah berkecimpung di sektor perbankan swasta nasional mulai dari 1994 hingga 1999, sebagai corporate officer hingga Brand Manager, Ario Guntoro bekerja untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai dari 1999 hingga 2004, dengan jabatan terakhir Assistant Vice President Divisi HIPA. Sebelum bergabung ke dalam KEMPR pada tahun 2004, tugas yang diemban sebagai penasihat khusus PT (Persero) PPA. Ario Guntoro meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993.

Johnny Swandi Sjam– Anggota
Sebagai anggota KEMPR, Komisaris Johhny Swandi Sjam bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi RJPP/ CSS, implementasi RKAP dan implementasi inisiatif pertumbuhan bisnis *un-organic*.

Adam Wirahadi – Anggota
Tugas utama Adam Wirahadi adalah melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko Perusahaan, pemantauan pelaksanaan kepatuhan (*compliance*) Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan meninjau aspek legal dan kepatuhan dari hasil kerja dan keputusan Dewan Komisaris. Sebelum bergabung dengan KEMPR pada tahun 2003, Adam Wirahadi bekerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai dari 1999-2000. Kemudian, pada tahun 2001-2003 menjadi peneliti/analis di sebuah NGO dan konsultan lingkungan usaha, staf ahli DPR-RI pada tahun 2001-2002, dan anggota tim penyusun naskah akademik dan RUU pada Kementrian Perdagangan (2001) dan pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (2002). Adam Wirahadi meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (1998) dan Hukum (2007) dari Universitas Indonesia.

Widuri Meintari Kusumawati – Anggota
Tugas utama Widuri Meintari Kusumawati adalah melakukan penilaian terhadap usulan RKAP yang diajukan manajemen dan memantau pencapaiannya serta memantau pertumbuhan usaha Anak Perusahaan. Sebelum bergabung dengan KEMPR, pada tahun 2004 Widuri M Kusumawati bekerja di Kementerian Keuangan (2000-2003) dan di sebuah bank swasta dalam negeri (2003-2004). Widuri M Kusumawati merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000 dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi.

Seluruh anggota KEMPR (kecuali Bobby A.A. Nazief, Mahmuddin Yasin, dan Johnny Swandi Sjam) merupakan anggota eksternal dan bersifat independen.

Selama tahun 2011, Telkom terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG agar senantiasa dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

LAPORAN KOMITE EVALUASI DAN MONITORING PERENCANAAN RISIKO

Sepanjang tahun 2011, KEMPR melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi CSS periode berjalan, implementasi RKAP 2011, implementasi anggaran belanja modal (*capex*) dalam RKAP 2011 termasuk analisis investasi pada Anak Perusahaan dan implementasi manajemen risiko Perusahaan. KEMPR juga melakukan evaluasi atas usulan CSS tahun 2012-2016, usulan RKAP tahun 2012, serta tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

Kegiatan KEMPR pada tahun 2011:

1. *Corporate Strategic Scenario* ("CSS")

KEMPR memantau implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP")/CSS periode 2011-2015, khususnya yang terkait dengan tahun berjalan, dan melakukan evaluasi atas usulan CSS untuk periode 2012-2016 yang menjadi dasar bagi pengembangan *Corporate Annual Message* ("CAM") 2011 dan RKAP tahun 2012. Sesuai strategi pemutakhiran secara berkala atas rencana jangka panjang Perusahaan, maka CSS periode 2012-2016 merupakan pemutakhiran yang bersifat minor atas CSS periode 2011-2015 yang mencakup penyesuaian pada strategi inisiatif yang mencakup layanan *broadband*, *wireless*, solusi terintegrasi, *wholesale* dan *beyond* TIME berikut dilakukannya penataan portofolio bisnis masing-masing, rencana strategi non-organik dan proyeksi keuangan.

2. *Annual Business Budget Plan*

Dalam menjalankan RKAP 2011, Dewan Komisaris menginstruksikan kepada Dewan Direksi untuk menerapkan langkah-langkah penting, antara lain:

- Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar seluler baik dalam pendapatan maupun pelanggan;
- Mengupayakan pertumbuhan setiap unit bisnis minimal sama dengan pertumbuhan rata-rata industri;
- Optimalisasi *capex deployment* agar sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan; dan
- Melakukan pemantauan secara khusus terhadap pertumbuhan pendapatan Anak Perusahaan yang melebihi Rp1 triliun.

Dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKAP tahun 2011, KEMPR antara lain fokus pada pemantauan upaya Perusahaan dalam melakukan akselerasi peningkatan pendapatan dari bisnis *new wave* dan mempertahankan kinerja bisnis *legacy*. Akselerasi peningkatan pendapatan *new wave* mencakup *broadband*, *data communication* serta *information*, media, dan *edutainment*. Upaya mempertahankan bisnis *legacy* ditempuh dengan revitalisasi bisnis *wireline*, sambungan nirkabel tidak bergerak, serta seluler. Selain pendapatan, *cost control* juga menjadi fokus dari *monitoring* kinerja RKAP 2011. Dengan pertumbuhan beban yang lebih besar dari pendapatan, KEMPR menilai tekanan terhadap pencapaian EBITDA cukup tinggi sehingga disarankan kepada manajemen melakukan efisiensi terutama dalam operasi dan pemeliharaan. Sementara untuk beban SDM dengan melakukan aksi korporasi dengan memperbesar alokasi pensiun dini.

Untuk pemantauan kinerja Anak Perusahaan, selain Telkomsel terdapat tiga Anak Perusahaan yang menjadi fokus monitoring di tahun 2011, yaitu Mitratel, Metra, dan Telin. Mitratel sebagai perusahaan *tower provider* mencatat peningkatan pendapatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mengimbangi pertumbuhan yang cukup agresif tersebut, KEMPR memandang perlu dilakukannya pembenahan organisasi dan SDM yang memadai. Sementara itu, terhadap Metra sebagai kendaraan *akuisisi* Perusahaan khususnya di bidang *informasi*, media, dan *edutainment*, pengkajian KEMPR difokuskan pada pencapaian target akuisisi sesuai *business plan* dan penataan portofolio Metra dalam lingkup Telkom Group. Telin yang merupakan Anak Perusahaan Telkom yang bergerak di bidang layanan bisnis internasional perlu melengkapi SDM dengan kompetensi internasional, menangani operator ilegal untuk trafik internasional, serta memperhitungkan potensi akuisisi untuk pengembangan non-organik.

Dalam rangka mendapatkan hasil pemantauan yang lebih optimal, KEMPR melakukan beberapa kunjungan lapangan untuk memantau kemajuan penyebaran *capex* dan perkembangan pencapaian RKAP. Kunjungan lapangan yang telah dilakukan KEMPR pada tahun 2011 mencakup kunjungan lapangan terhadap pembangunan Mataram-Kupang *cable system*, ekspansi Jasuka, dan satelit Telkom-3. Sementara itu, kunjungan lapangan yang berkaitan dengan pengawasan kinerja mencakup seluruh unit bisnis di ketujuh wilayah kerja Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan yaitu: Mitratel, Sigma, Telin dan Indonusa.

3. *Enterprise Risk Management* ("Manajemen Risiko Perusahaan")

KEMPR bertugas melakukan pemantauan terhadap penerapan aplikasi *Enterprise Risk Management* ("ERM") pada tahun 2011 termasuk mengenai penanganan terhadap risiko-risiko yang berdampak signifikan terhadap RKAP 2011 (diantaranya termasuk risiko-risiko yang berkaitan dengan regulasi) dan rencana menanggulanginya. Beberapa catatan dalam pemantauan ERM ini diantaranya adalah terhadap risiko yang masuk dalam kategori risiko sangat tinggi yaitu risiko atas penerapan Regulasi Menara Bersama dan Perda Retribusi Menara serta risiko tidak tercapainya kinerja layanan Speedy. KEMPR merekomendasikan penanganan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan menara secara aktif dan terintegrasi mengingat potensi dampaknya yang signifikan atas kinerja Perusahaan. Sementara itu atas risiko tidak tercapainya kinerja layanan Speedy, KEMPR merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan yang dipantau secara ketat, evaluasi harga agar menjadi lebih kompetitif, serta percepatan penyebaran sesuai permintaan.

4. Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan dari Dewan Komisaris

Selama tahun 2011, KEMPR melakukan kajian terhadap tindakan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris yang antara lain terdiri dari:

- Investasi infrastruktur layanan *mobile broadband* Flexi berbasis EVDO;
- Penyuntikan modal kepada Telin untuk pendanaan akuisisi 51% saham Royal Milicom, pemilik saham CamGSM dengan persyaratan tertentu;
- Pendanaan untuk pengembangan bisnis Data Center Sigma;
- Pendanaan bagi Mitratel;
- Investasi infrastruktur Palapa Ring (*Ring* 10) Sulawesi-Maluku-Papua *Cable System*, dengan rekomendasi KEMPR penambahan ruas Ambon-Kendari; dan
- Penghapusan aset terkait program modernisasi jaringan melalui pola TITO.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya selama tahun 2011 KEMPR menghasikan berbagai laporan dan kajian (evaluasi). Perincian tersebut adalah:

	CSS	RKAP		CAPEX		ERM	Aksi Korporasi (CA)
		2011	2012	2011	2012		
Laporan	1	21	0	15	0	11	0
Kajian / Evaluasi	2	2	2	3	1	14	2

Kemudian selama 2011 KEMPR melaksanakan 25 kali rapat komite dengan perincian:

Tabel Jumlah Rapat Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko

Nama	Jumlah rapat(*)				Jumlah kehadiran	Persentase Kehadiran
	CSS	RKAP	ERM	CA		
Bobby A.A. Nazief	2	13	4	0	19	78%
Mahmuddin Yasin	2	11	1	0	14(**)	59%
Johnny Swandi Sjam	2	15	4	2	23	93%
Ario Guntoro	2	17	4	2	25	100%
Adam Wirahadi	2	17	4	2	25	100%
Widuri Meintari Kusumawati	2	17	4	2	25	100%

(*) Jumlah rapat tersebut diluar pelaksanaan 2 kali rapat internal.
(**) Terdapat Surat Kuasa atas ketidakhadiran Wakil Ketua.

Jakarta, 30 Maret 2012

Bobby A.A. Nazief
Ketua KEMPR

5. Komite-Komite di Bawah Direksi

Sesuai Anggaran Dasar, maka Direksi secara kolektif bertanggung jawab pada seluruh kegiatan Perusahaan termasuk kewenangan untuk menjalankan segala tindakan kepengurusan Perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam kepengurusannya, Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atau persetujuan Direksi melalui Komite Eksekutif *(joint approval authority)* sebagai penjabaran dari *BoD Charter*.

Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan/kegiatan operasional sesuai objek masing-masing komite. Dengan demikian, keberadaan Komite Eksekutif diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan percepatan proses pengambilan keputusan Direksi. Terkait keanggotaan Komite, ketua dan anggota Komite adalah karyawan Perusahaan dan dalam pelaksanaan tugasnya Komite Eksekutif dapat memanggil sumber-sumber yang independen. Melalui Keputusan Direksi, Komite Eksekutif diberikan kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan/kegiatan operasional yang memerlukan persetujuan 2 (dua) Direktur atau lebih, atau yang merupakan eskalasi dari satu atau beberapa Direktur.

Sejak tahun 2007, melalui Keputusan Direksi nomor KD.59/HK.000/COP-D0021000/2007 dan perubahannya nomor KD.33/HK.000/COP-D0010000/2009; maka Komite Eksekutif yang dibentuk untuk membantu Direksi meliputi:

1. Komite Etika & SDM adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan dan penegakan tata kelola perusahaan yang baik, etika perusahaan dan disiplin pegawai.
2. Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan/kegiatan operasional terkait CSR;
3. Komite Regulasi adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan rancangan/usulan regulasi dan posisi Perusahaan atas isu regulasi;
4. Komite Pengelolaan Anak Perusahaan adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk:
   a. Memberikan persetujuan atau menetapkan rencana strategis, arah dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan bisnis dan pengelolaan risiko di Anak Perusahaan;
   b. Memberikan persetujuan transaksional dan atau inisiatif-inisiatif bisnis yang terkait dengan Anak Perusahaan, dalam rangka percepatan proses pengambilan keputusan dengan menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian;
   c. Memberikan persetujuan atas usulan tindakan Direksi Anak Perusahaan yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan sebagai pemegang saham Anak Perusahaan;
   d. Memberikan persetujuan atas rencana aksi korporasi yang akan dijalankan di Anak Perusahaan, seperti penambahan dan pengurangan modal (emisi saham baru/*capital*/divestasi) di Anak Perusahaan, merger & akuisisi;
   e. Memberikan persetujuan atas usulan agenda RUPS Anak Perusahaan yang diajukan secara tertulis oleh Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan berhak mengajukan agenda RUPS Anak Perusahaan yang akan dibahas dalam RUPS Anak Perusahaan;
   f. Memberikan persetujuan atas rencana keputusan RUPS Anak Perusahaan yang akan disampaikan oleh wakil/kuasa Perusahaan sebagai pemegang saham dalam RUPS Anak Perusahaan, termasuk menetapkan penggunaan laba Anak Perusahaan, menetapkan komponen dan besaran remunerasi dan/atau kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan memerlukan persetujuan Perusahaan sebagai pemegang saham; dan
   g. Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang berasal dari luar Perusahaan.
5. Komite Risiko, Kepatuhan dan Penjaminan Pendapatan adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan/inisiatif pengelolaan risiko antara lain:
   a. Menetapkan profil risiko dan *risk appetite* Perusahaan;
   b. Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko dan kepatuhan;
   c. Mengeliminasi proses bisnis yang tidak efisien, penguatan pengendalian internal dan mitigasi risiko;
   d. Mensupervisi efektivitas proses *revenue assurance;* dan

e. Merekomendasikan pencegahan maupun perbaikan potensi kebocoran pada pendapatan.

Komite eksekutif lainnya yang tidak terkait langsung dengan penerapan GCG adalah Komite *Costing, Tariff, Pricing* & *Marketing*, Komite *Treasury*, Keuangan dan Akuntansi (disingkat Komite *Treasury* & Keuangan) dan Komite Produk, Infrastruktur dan Investasi (disingkat Komite Investasi).

Sesuai dinamika bisnis dan organisasi yang terjadi, Direksi telah meninjau ulang dan menyederhanakan keberadaan Komite Eksekutif dan selanjutnya Direksi menetapkan Komite Eksekutif dalam suatu Peraturan Perusahaan nomor PD.608.00/r.00/HK.000/COP-D0030000/2001 yang berlaku sejak 28 Oktober 2011, sehingga Komite Eksekutif menjadi:

- Komite Etika dan SDM;
- Komite *Treasury* dan Keuangan;
- Komite Pengelolaan Anak Perusahaan;
- Komite Investasi;
- Komite Risiko, Kepatuhan dan *Revenue Assurance*; dan
- Komite *Disclosure*.

6. Sekretaris Perusahaan/Investor Relations ("IR")

Dipimpin oleh seorang *Vice President* ("VP") di bawah Direktur Keuangan, *Investor Relations* ("IR") bertanggung jawab atas kesiapan penyajian informasi pada proses inter relasi antara Perusahaan dengan *shareholder* sesuai dengan aturan tata hubungan yang ditentukan, serta terpeliharanya mekanisme umpan balik yang sistematis kepada Manajemen agar mampu merespon dinamika *shareholder* dan pasar modal secara tepat dan efektif. Aktivitas utama yang dimiliki VP *Investor Relations* adalah sebagai berikut:

a. Mengarahkan, menyelenggarakan dan mengendalikan proses administratif, pemenuhan permintaan informasi (untuk laporan tahunan, *press release* dan *filing*) melalui media *online*, merancang detail *meeting & presentation*, dan diseminasi *statement;*
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan *shareholder relation*, yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari *shareholder;*
c. Mengkoordinasikan program pembinaan hubungan dengan investor yang mencakup tugas identifikasi target interaksi, program pendekatan ke seluruh investor, dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas ketertarikan investor;
d. Mengkoordinasi program pengembangan informasi, yang terdiri dari pengembangan informasi yang mencakup tugas pengembangan *platform* informasi, pengelolaan *feedback*, pengolahan informasi strategis yang terkait dengan fluktuasi dan tren harga saham dan kegiatan lainnya yang terkait dengan peningkatan nilai informasi yang dapat diperoleh Perusahaan;
e. Mengkoordinasi penyelenggaraan *annual meeting* dan *conference calls;*
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan media komunikasi dalam penyelenggaraan laporan berkala dan penyediaan *release (disclosure)*, penyediaan dokumen *filing*, pengelolaan *website*, dan kegiatan lain yang terkait dengan proses penyajian informasi yang dibutuhkan oleh investor dan komunitas pasar modal; dan
g. Memberikan rekomendasi/*advice* kepada Direksi untuk hal-hal yang terkait dengan *corporate action* dalam merespon berbagai informasi investor dan hal-hal yang berhubungan dengan pasar modal.

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Agus Murdiyatno. Agus Murdiyatno bergabung dengan Telkom Group sebagai Direktur dan Chief Operating Officer PT Sigma Cipta Caraka pada bulan Juni 2009. Pada tanggal 1 November 2009, beliau ditunjuk sebagai VP Investor Relations/Corporate Secretary. Beliau memulai karirnya sebagai auditor keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1990. Pada tahun 1996, beliau bergabung dengan Coopers & Lybrand's Jakarta Office sebagai *Senior Information Systems Auditor*. Pada tahun 1997, beliau bergabung dengan Excelcom, perusahaan seluler terkemuka di Jakarta, sebagai *Revenue Assurance Manager and Information Systems Audit Manager*. Pada tahun 1998, beliau bergabung dengan KPMG, beliau bertanggung jawab untuk mengelola risiko teknologi dan jasa audit internal. Pada tahun 2003, beliau memulai karir konsultannya saat bergabung dengan Divisi Konsultan Manajemen Ernst & Young, beliau dipromosikan sebagai Direktur Eksekutif *Business Risk Services* pada tahun 2006. Beliau memperoleh gelar sarjana akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, dan juga memiliki sertifikasi sebagai *Certified Information Systems Auditor* ("CISA") dan *Certified Internal Auditor* ("CIA").

Telkom sangat memberi perhatian pada dua prinsip penting GCG, akuntabilitas dan transparansi. Melalui unit IR dan unit Public Relations, Telkom secara berkelanjutan berupaya untuk memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan diupayakan akurat, jelas, tepat dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan integritas pasar dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Akses Informasi Publik

Telkom menyampaikan informasi Perusahaan melalui *website* Perusahaan (www.telkom.co.id). Beberapa informasi tertentu disebarluaskan secara khusus baik di media massa cetak maupun elektronik dan khusus kepada karyawan, informasi Perusahaan juga disampaikan melalui penerbitan majalah internal.

Selain itu masyarakat juga dapat menghubungi secara langsung di:
Investor Relations
Grha Citra Caraka lt.5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Telp.: 62-21-5215109
Fax.: 62-21-5220500
E-mail: investor@telkom.co.id

Di bawah ini daftar aktivitas keterbukaan dan koordinasi Kami selama tahun fiskal 2011:

Aktivitas Transparansi Informasi	Jumlah Aktivitas	Tanggal
Conference Call(*)	3	11 Mei, 3 Agustus, 1 November
Pertemuan Analis/Investor	114	6, 26, 27 Januari, 7, 16, 17, 21 Februari, 3, 10, 14, 16, 17 Maret, 4, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 April, 4, 11, 12, 26 Mei, 1, 3, 30 Juni, 6, 7, 11, 20, 28 Juli, 3, 11, 12, 13, 22, 25, 26 Agustus, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 22 September, 6, 13, 19, 26 Oktober, 7, 10, 14, 23, 24, 25 November, 1, 6, 12, 14, 22 Desember
Paparan Publik	2	5, 6 Oktober
Rapat Umum Pemegang Saham	1	19 Mei
Siaran Pers	9	4 Mei, 23 Mei, 24 Mei, 19 April, 21 April, 29 April, 29 Juli, 31 Maret
Konferensi Investor	5	1-2 Maret, 9-10 Maret, 24-25 Maret, 13-16 Juni, 29-30 November
Roadshow	1	15-16 November
Kunjungan Investor	1	14-15 Juli
Pengumuman Koran:		
a. Rapat Umum Pemegang Saham	2	4 Mei, 23 Mei
b. Laporan Keuangan	1	24 Juli
c. Dividen	1	24 Mei
d. Edaran	-	

(*) *Conference Call* adalah forum pertemuan antara Direksi Telkom dengan para Investor dalam dan luar negeri, untuk membahas hasil laporan keuangan triwulanan melalui media elektronik, yaitu *teleconference*. *Conference Call* biasanya dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya laporan triwulanan dalam bentuk Info Memo.

Tugas dan peran Sekretaris Perusahaan dipandang sangat strategis untuk menjamin implementasi tata kelola yang baik di Perusahaan maupun implementasi tata kelola dalam ruang lingkup grup usaha *(subsidiary governance)*.

Berdasarkan Keputusan Direksi No.05/2009 tanggal 4 Maret 2009 dan Keputusan Direksi No.26/2010 tanggal 27 Juli 2010, tugas dan peran Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh beberapa unit kerja, yaitu:

No.	Tugas dan Peran Sekretaris Perusahaan	Penanggung Jawab
1.	Tata kelola Perusahaan	
	a. Komunikasi, koordinasi dengan divisi-divisi terkait implementasi, *monitoring*, penilaian dan penelaahan tata kelola di Perusahaan.	Head of Corporate Communication &Affair
	b. Menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen dalam mengelola Perusahaan dan membangun nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.	
	c. Memfasilitasi dan membangun efektivitas hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan permasalahan keagenan *(agency problem)* dan tetap mengedepankan hubungan *check and balance*.	
	d. Memastikan dikelolanya hubungan kontrak antara pemilik dan pengelola serta *charter* Komisaris dan Direksi untuk memastikan tindakan pengendalian yang efektif terhadap keputusan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak dan dalam kondisi tertentu diperlukan untuk menjamin kelangsungan Perusahaan.	
	e. Menyeimbangkan kompetensi dan kecukupan informasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencegah terjadinya kesenjangan kompetensi dan informasi yang tidak simetris antara Dewan Komisaris dan Direksi.	
	f. Mengelola dan memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan *(Annual Report)* telah mencantumkan penerapan *GCG* di lingkungan Perusahaan.	Subdit Investor Relations - DITKUG

No.	Tugas dan Peran Sekretaris Perusahaan	Penanggung Jawab
	g. CSR Mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas perusahaan yang terkait dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).	Unit CDC
	h. Filosofi Perusahaan Mensosialisasikan dan monitor implementasi Filosofi Perusahaan, Nilai-Nilai Perusahaan, Sistem, Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan.	Subdit Organizational Development – DIT HCGA
	i. Kebijakan *GCG*. Menyusun kebijakan kerangka kerja dan operasional untuk pengelolaan GCG di Perusahaan termasuk kebijakan GCG dalam ruang lingkup grup Usaha (*subsidiary governance*).	Subdit Business Effectiveness – DIT CRM
2.	BoD *Administration & Corporate Office*. Membantu Direksi dalam berbagai kegiatan, informasi, dan dokumentasi antara lain : a. Menyiapkan daftar khusus, berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan.	Sub Unit Corporate Office Support Administrations - Unit Corporate Communications & Affair
	b. Membuat Daftar Pemegang Saham.	
	c. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat risalah rapat	
	d. Penyelenggaraan RUPS.	
3	Sinergi dan Koordinasi	
	a. Komunikasi dan sinergi dengan Sekretaris grup Perusahaan mengenai informasi dan hal-hal yang berkaitan visi, misi dan penyelenggaraan tata kelola Telkom Group.	Subunit Business Portfolio Synergy
	b. Komunikasi dan sinergi program dalam ruang lingkup Telkom Group.	PMO
4	*Legal/Regulatory Compliance*.	
	a. Kepatuhan atas ketentuan keuangan dan pasar modal: - Mengingatkan dan memberi masukan kepada Direksi agar Perusahaan selalu mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan pasar modal serta berpegang teguh pada Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan.	Subdit Investor Relations - *DITKUG*
	- Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta praktik-praktik internasional berkaitan dengan GCG.	
	- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perusahaan dengan Bapepam-LK dan BEI dimana saham Perseroan tercatat dan dengan pemangku kepentingan.	
	b. Kepatuhan atas ketentuan regulasi: - Mengingatkan dan memberi masukan kepada Direksi agar Perusahaan selalu mematuhi dan menjalankan ketentuan sesuai regulasi.	Subunit Regulatory Management – Unit Corporate Communication & Affair
	- Mengikuti perkembangan industri, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku dan akan berlaku bagi Perusahaan.	
	c. Kepatuhan atas ketentuan Perusahaan dan legal. - Mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa Perseroaan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan.	Subdit Legal & Compliance – DIT CRM
5	*Communication/Disclosure (Liaison Officer)*.	
	a. Komunikasi dengan Otoritas Keuangan, Investor dan Pasar Modal: - Mengelola komunikasi dua arah serta memelihara hubungan baik dengan Bapepam-LK dan BEI.	Subdit Investor Relations - DITKUG
	- Menyiapkan dan mengkomunikasikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai kinerja dan prospek Perusahaan kepada masyarakat pasar modal, serta pemangku kepentingan, bekerjasama dengan divisi terkait.	
	- Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham atas informasi yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan (contoh: *press release*, temu wartawan, media, analisis dampak makro terhadap kinerja Perusahaan).	
	- Mempublikasikan *corporate action* Perusahaan secara taktis, strategis dan tepat waktu.	
	b. Komunikasi Publik, Pelanggan dan internal: - Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik.	Subdit Public Relations –Unit Corporate Communication & Affair
	- Merevisi tampilan dan tata kelola media internal Perusahaan dan menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan acara penting.	
	- Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, baik dalam *website*, buletin, atau media informasi lainnya.	

KETERSEDIAAN DOKUMEN

Telkom menyampaikan laporan, termasuk laporan tahunan dalam Form 20-F dan informasi lain di SEC berdasarkan peraturan dan regulasi SEC yang berlaku untuk emiten swasta asing. Seluruh materi yang dilaporkan oleh Telkom sebagaimana yang ditunjukkan pada laporan tahunan Form 20-F SEC tersedia di kantor Perusahaan ruang *Investor Relations*. Alamat kantor Kami terdapat pada halaman 175.

TATA KELOLA INTERNAL AUDIT

Internal Audit

Unit Internal Audit ("IA") berperan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas aktivitas bisnis Perusahaan. Untuk tujuan itu, seperti diatur dalam peraturan pasar modal yang berlaku, IA bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Piagam Internal Audit

Guna menguatkan peran dan tanggung jawab dari IA, Piagam Internal Audit (IA *Charter*) telah mendeskripsikannya secara jelas yang berisi visi, misi, struktur, status, tugas tanggung jawab dan wewenang IA, persyaratan auditor dan persetujuan Direktur Utama termasuk Komite Audit atas isi Piagam IA, dengan berpedoman pada standar profesi internal audit internasional yaitu *The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikeluarkan oleh Institut Internal Auditor ("IIA").

Sebagai perwujudan komitmen terhadap Piagam IA tersebut, pada tahun 2011, IA melakukan penataan atas posisinya sejalan dengan format organisasi Perusahaan dan untuk meningkatkan peran serta IA dalam mengawal bisnis Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Penguatan posisi IA merupakan aktivitas strategis dalam rangka memformulasikan kontribusi peran IA terhadap penyelenggaraan bisnis Perusahaan. Aktivitas ini dilakukan melalui perumusan ulang organisasi IA sejalan dengan peran IA dalam rangka pengawalan terhadap bisnis Perusahaan, sesuai dengan fungsi utama IA sebagai pemberi jaminan (*assurance*) dan layanan konsultansi internal (*internal consulting services*). Adapun strategi dan tujuan IA diterjemahkan dalam program kegiatan audit/non audit tahun 2011 sebagai perwujudan pemahaman IA terhadap arah bisnis Perusahaan. Perumusan di atas secara garis besar tertuang di dalam *Master Plan* IA 2009-2014.

Aktivitas IA diarahkan pada komitmen bahwa misi IA dapat terselenggara secara metodologis, yang berarti setiap tahapan kegiatan audit dan konsultasi internal yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pemantauan hasil tindak lanjut merupakan proses yang terstandarisasi dan terukur. Untuk tujuan ini, pada tahap persiapan audit, metodologi audit berbasis risiko menjadi pedoman utama yang menekankan bahwa penentuan *auditable units* didasarkan pada tingkat risiko dari masing-masing proses bisnis, makin tinggi risiko makin tinggi keharusan untuk diaudit. Tingkat risiko dari sasaran audit didasarkan kepada risiko yang telah dipetakan dan ditetapkan oleh Perusahaan maupun penilaian profesional oleh IA sendiri.

Guna memfasilitasi paradigma audit berbasis risiko tersebut, IA sejak awal tahun 2009 telah dilengkapi dengan sebuah alat manajemen yaitu Sistem Manajemen Audit ("AMS") yang merupakan sebuah sistem aplikasi untuk mendokumentasikan pelaksanaan audit berbasis risiko secara *online*.

Peningkatan peran serta IA dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas *assurance* atas operasional Perusahaan melalui aktivitas audit maupun non audit. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi dapat segera diatasi melalui pengendalian internal yang efektif. Jika ditemukan ketidakefektifan pada pengendalian suatu proses bisnis dan atau risiko yang di luar kendali, maka dilakukan *substantive test*, yaitu pengujian lanjut objek audit guna mendalami akar permasalahannya. Dengan alasan itu, pada tahun 2011, audit yang dilakukan mencakup area-area bisnis yang berisiko tinggi seperti proses penerbitan laporan keuangan Telkom Group per triwulan dan periode akhir tahun, proses keterbukaan *(disclosure)* informasi Perusahaan yang dipersyaratkan otoritas pasar modal per triwulan maupun akhir tahun *(Annual Report)*, penjaminan pendapatan, proses pengelolaan atas kesiapan dan kualitas infrastruktur, proses pengawalan pelayanan dan proses pengawalan terhadap sinergi audit di Telkom Group. Disamping itu sebagai konsekuensi Telkom mencatatkan sahamnya

di BEI maupun NYSE, secara konsisten dan periodik, IA melakukan pengujian dan pengawalan terhadap efektivitas dan kecukupan pelaksanaan pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan (*Internal Control over Financial Reporting*/ICOFR). Telkom telah menjalani audit ICOFR ini sejak 2006. Telkom dapat menghilangkan kelemahan material ICOFR pada tahun 2008 dan dapat mempertahankan sampai dengan tahun 2011 ini. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan audit dan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya melakukan pengendalian internal bagi para unit bisnis, setiap triwulan, unit bisnis melakukan *Control Self Assessment* ("CSA") terhadap pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya. Secara periodik, IA melakukan evaluasi terhadap hasil CSA tersebut untuk mengukur tingkat kecukupannya dan menghasilkan rekomendasi perbaikan baik terhadap rancangan maupun pelaksanaan.

Pada tahun 2011, Perusahaan telah mengimplementasikan seluruh proses transaksi dan pelaporan keuangannya sesuai dengan *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"). IA secara aktif mendukung dan melakukan pengawalan dalam aktivitas persiapan dan koordinasi dalam rangka implementasi IFRS, dengan cara melakukan *review* laporan keuangan dan memberikan konsultasi operasional keuangan berbasis IFRS.

Tahap selanjutnya adalah ikut serta dalam kegiatan layanan konsultasi internal. Pada tahun 2011, layanan konsultansi internal difokuskan pada penyelenggaraan operasional Perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi pengelolaan infrastruktur (alat produksi), produk dan layanan serta operasi pendukung, termasuk identifikasi Risiko Pelaporan Keuangan Grup (*Group Financial Reporting Risk*/GFRR), penyusunan Proses Bisnis Entitas Anak dan pengelolaan SDM. Aktivitas konsultasi internal ini lebih merupakan solusi pencegahan sebagai antisipasi agar penyelenggaraan bisnis tetap pada arah yang tepat dan mengindahkan rambu-rambu peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari Perusahaan yang punya komitmen tinggi terhadap keberhasilan GCG, IA memiliki peranan penting dalam mekanisme *whistleblower* yang merupakan domain Komite Audit dan *Executive Investigative Committee* ("EIC"), di mana kepala IA ditunjuk sebagai sekretaris EIC. Mekanisme *whistleblower* berfungsi untuk mengakomodasi setiap 'pengaduan' oleh karyawan untuk diteruskan kepada manajemen. Pada gilirannya, jika Komite Audit dan EIC menilai bahwa pengaduan perlu diselidiki lebih lanjut, IA akan mengambil peran untuk menindaklanjuti sebagai bagian dari tugas audit.

Hasil-hasil kegiatan di atas dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit. Kemudian hasil-hasil itu pun diinformasikan kepada *auditee* untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan.

Untuk memastikan bahwa *auditee* telah memberikan respon yang cukup atas hasil audit dan konsultasi internal, maka perlu dilakukan upaya pengawasan lebih lanjut. Tindak lanjut di lapangan dilakukan oleh *auditee* yang kemudian dimonitor oleh IA. Untuk hal ini, tindak lanjut dibatasi pada area-area proses bisnis yang signifikan dengan target waktu penyelesaian yang disepakati bersama. Selama tahun 2011 fokus lain IA adalah pengawasan tindak lanjut atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahun 2010. Aktivitas pengawasan telah didokumentasikan dengan baik.

Untuk memelihara dan meningkatkan tenaga auditor yang memiliki kompetensi memadai untuk dapat berperan sesuai dengan lingkup kegiatan IA dalam mengawal perkembangan bisnis Perusahaan, selama tahun 2011 IA telah melakukan upaya-upaya penting di antaranya:

1. melibatkan tenaga auditor secara intens dalam penerapan adopsi secara penuh IFRS di Telkom melalui pelatihan, pemagangan, seminar dan *workshop*;
2. mengikutsertakan auditor dalam program *direct assistance* oleh PricewaterhouseCoopers;
3. mengikutsertakan pelatihan dan atau seminar yang bersifat teknis operasional Telkom; dan
4. mengikutsertakan auditor dalam pembelajaran berkelanjutan yang bersertifikasi, baik lokal maupun internasional.

Sejak tahun 2007, IA dipimpin oleh Tjatur Purwadi, SE, MM, karyawan Perseroan yang telah meniti karir panjang pada bidang teknis operasional. Kemudian yang bersangkutan ikut aktif menyusun dan membenahi sistem akuntansi perseroan sehingga mengantarkannya pada posisi Vice President Financial & Logistic Policy sebelum memangku jabatan Head of IA.

Struktur Internal Audit

Berikut adalah bagan struktur Internal Audit Telkom:

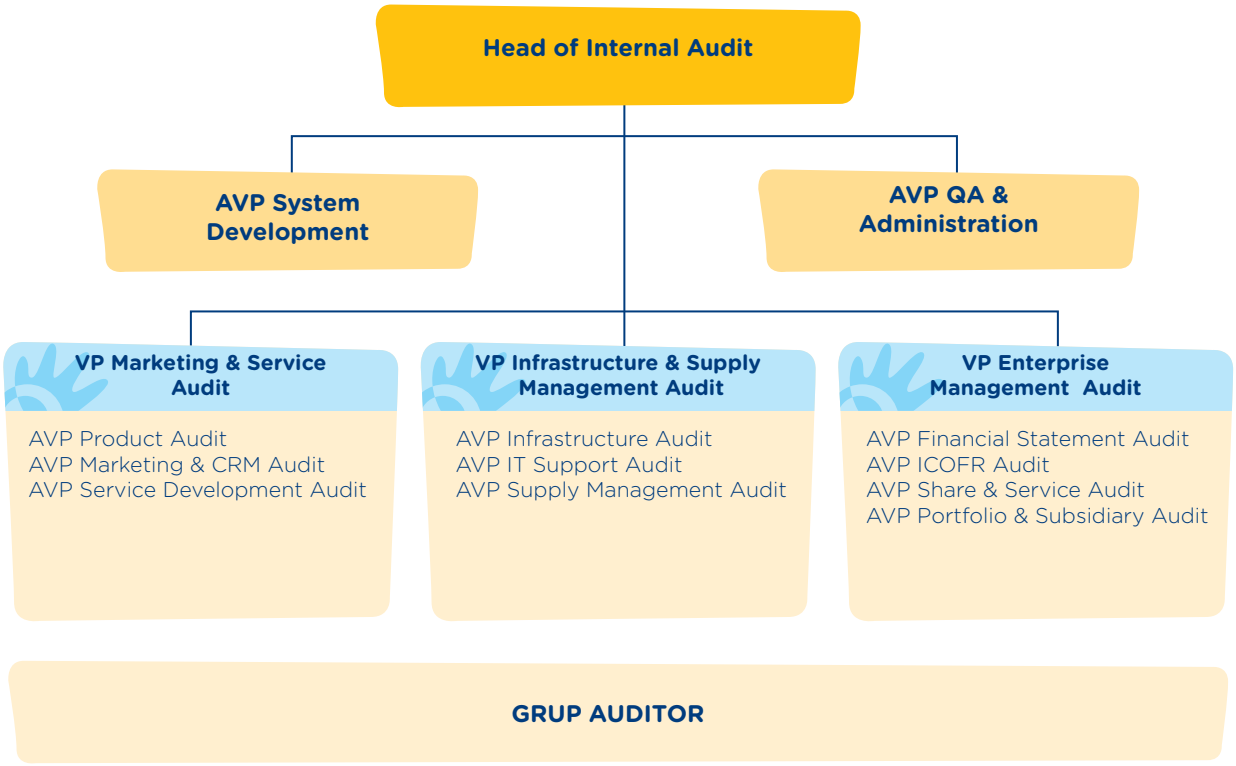
Head of Internal Audit
AVP System Development
AVP QA & Administration
VP Marketing & Service Audit
AVP Product Audit
AVP Marketing & CRM Audit
AVP Service Development Audit
VP Infrastructure & Supply Management Audit
AVP Infrastructure Audit
AVP IT Support Audit
AVP Supply Management Audit
VP Enterprise Management Audit
AVP Financial Statement Audit
AVP ICOFR Audit
AVP Share & Service Audit
AVP Portfolio & Subsidiary Audit
GRUP AUDITOR

Independensi Auditor

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2011 telah diaudit oleh PwC. Penunjukan auditor independen untuk tahun buku 2011 dilakukan sesuai dengan prosedur penunjukan yang tepat dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor independen.

Biaya dan Jasa Auditor Eksternal

Tabel berikut menyajikan ringkasan tagihan yang disampaikan PwC untuk tahun 2009, 2010 dan 2011 berturut-turut:

	Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember		
	2009	2010	2011
	(Rp juta)		
Biaya Audit	49.640	41.872	40.503**
Biaya Jasa Perpajakan*	332	398	70
Semua biaya lainnya	500	400	400

(*) Tagihan yang dibayar atas jasa kepatuhan pajak untuk Telin yang diberikan PwC, belum termasuk PPN 10%
(**)Termasuk Telkomsel dan TSFL; Metra dan Sigma; Dayamitra; Telin dan TII PTE Ltd. belum termasuk PPN 10%

Kebijakan dan Prosedur Pre-Aproval Komite Audit

TELKOM menerapkan kebijakan dan prosedur Pre-Approval yang mensyaratkan bahwa semua jasa non-audit yang akan diberikan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai Auditor Independen, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Komite Audit, harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Komite Audit. Berdasarkan perjanjian tersebut, jasa non-audit mungkin dapat diperkenankan untuk dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai Auditor Independen dengan ketentuan bahwa: (i) Direksi harus menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian jasa non-audit yang akan dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai Auditor Independen; dan (ii) Komite Audit akan memutuskan apakah jasa non-audit yang diajukan akan mempengaruhi independensi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai Auditor Independen atau akan menimbulkan benturan kepentingan.

Konsisten dengan Section 10(i) (1) (B) dari Exchange Act paragraf (c) (7) (i) (C) dari Rule 2-01 Regulation S-X Audit Committee Charter memberikan pengecualian untuk persyaratan Pre-Approval atas jasa non-audit yang

diperkenankan (i) jika jumlah seluruh biaya jasa non-audit tersebut tidak lebih dari lima persen dari jumlah biaya audit yang dibayarkan oleh TELKOM kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai Auditor Independen pada tahun buku, ketika jasa tersebut diberikan (ii) jasa yang diajukan tersebut tidak dianggap sebagai jasa non-audit pada saat kontrak untuk melaksanakannya ditandatangani, dan (iii) pelaksanaan jasa non-audit diketahui dengan tepat waktu dan disetujui sebelum penyelesaian audit oleh seorang anggota Komite Audit yang telah mendapat pelimpahan wewenang untuk memberikan pre-Approval dari Komite Audit atau langsung oleh Komite Audit.

.

PENERAPAN IFRS DI TAHUN 2011

Perubahan yang cukup besar terkait pelaporan keuangan tahun 2011 adalah berkaitan dengan penerapan standar pelaporan keuangan *International Financial Reporting Standard ("IFRS").*

Mengingat pelaporan keuangan di Telkom telah menerapkan pengendalian internal sebagaimana ketentuan SOX *Section* 404, maka rancangan dan penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan perlu mengalami penyesuaian yang cukup besar agar sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut meliputi kebijakan akuntansi, organisasi dan aplikasi TI, termasuk perubahan rancangan dan penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang diikuti dengan pengembangan kompetensi pengetahuan IFRS kepada karyawan yang terlibat.

Komitmen untuk menerapkan IFRS merupakan keputusan manajemen, bahwa Telkom akan melakukan adopsi lebih awal dari *roadmap* DSAK IAI atas Standar Pelaporan Keuangan IFRS. Untuk itu sejak tahun 2010 dibentuk tim khusus disebut dengan Gugus Tugas IFRS yang bertanggung jawab mempersiapkan implementasi IFRS mulai dari fase penilaian, desain, implementasi sampai tahap kestabilan yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2012.

Untuk lebih detailnya berikut tahapan perancangan dan penerapan IFRS:

Tahun	Fase	Kegiatan
2010	Penilaian	- Penilaian proses bisnis dan TI di Telkom - Penilaian *accounting gap* dan *practical gap* - Menentukan dan memilih opsi IFRS 1 untuk penerapan pertama IFRS - Penilaian TI dan proses bisnis yang terpengaruh implementasi IFRS - Pembuatan *Mock-up* laporan keuangan IFRS (31 Maret 2010)
2010-2011	Desain	- Pembuatan kerangka dan detail *Chart of Account ("COA")* - Pembuatan BRDs untuk aplikasi TI yang terpengaruh - Pembuatan *Mock-up* laporan keuangan IFRS (30 Juni 2010) - Pembuatan *position paper* IFRS untuk topik-topik akuntansi penting - Pembuatan *group reporting package* IFRS - Penyusunan proses pengakuan dan pengukuran untuk transaksi transisional.
2011	Implementasi	- Akuntansi dan Pelaporan – pembuatan panduan *group reporting package*, penyusunan laporan keuangan IFRS , kebijakan akuntansi IFRS, dan blank template keuangan IFRS - Data danTeknologi – implementasi aplikasi TI baru (modifikasi) - Proses dan Kontrol – mengupdate dan menyesuaikan proses bisnis SOA & SOP - Manajemen Perubahan – melakukan sosialisasi dan pelatihan atas akuntansi dan pelaporan, data dan teknologi, serta proses dan kontrol - *Overall Project Monitoring* – memonitor progres dari implementasi IFRS dan mengidentifikasi serta memitigasi risiko.
2012	*Sustain*	- Membuat dan mengoperasikan sistem pendukung implementasi IFRS - Mengidentifikasi, memprioritisasi serta menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses bisnis, kontrol, serta aplikasi TI - Mengelola tes ulang dan aktivasi aplikasi TI dan perubahan proses bisnis - Melakukan pengecekan proses dan kualitas data - Membuat daftar aktivitas dan *roadmap* untuk melakukan perbaikan - Menyusun proses transisi dari fase *sustain* ke fase bisnis sehari-hari

Bagi Telkom, implementasi IFRS memiliki tantangan tersendiri, selain harus menyampaikan Laporan Keuangan dalam standar IFRS ke US SEC, Telkom pun harus menyampaikan Laporan Keuangannya dengan SAK Indonesia ke Bapepam-LK dengan tetap memperhatikan norma-norma pengendalian internal.
Terkait dengan penerapan IFRS, Telkom juga berperan aktif mendukung implementasi IFRS di BUMN lainnya dan terlibat sebagai narasumber, berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan:

- Telkom terlibat aktif menjadi Tim Kerja Koordinasi BUMN untuk Antisipasi Penerapan IFRS ke dalam SAK Indonesia, salah satu wujudnya adalah menjadi narasumber dan pengajar untuk *workshop* penerapan SAK Indonesia Baru (IFRS) untuk BUMN;
- Telkom memberikan jasa pendampingan konvergensi SAK Indonesia-IFRS kepada salah satu BUMN di Indonesia dan ini merupakan langkah awal untuk membantu proses konvergensi di BUMN-BUMN lainnya;
- Telkom menjadi pembicara utama dalam Seminar IFRS untuk Auditor dengan tema "*Internal Auditors Need to Know IFRS Conversion*" pada tanggal 11-13 April 2011 di Bandung; dan
- Secara rutin melakukan sosialisasi dan *workshop* atas implementasi IFRS ke Anak Perusahaan Telkom.

PENERAPAN BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA BISNIS

Moral dan etika Kami maknai sebagai landasan penerapan GCG di Perusahaan, hal ini mengingat bahwa organisasi tidak lain adalah terdiri dari orang-orang di dalamnya. Seiring waktu pembelajaran Kami dalam mengelola GCG, maka penerapan GCG merupakan cara atau pendekatan mencapai sukses perusahaan melalui pencapaian keunggulan kinerja Perusahaan *(be profitable)*, kepatuhan *(obey the law)*, menjalankan bisnis yang beretika *(be ethical)* dan membentuk kesadaran Perusahaan dan karyawan yang memiliki kepekaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai wujud menjadi warga negara yang baik agar Telkom terus maju dan dicintai pelanggannya.

Code of Conduct The Telkom Way

Telkom senantiasa membangun sistem dan budaya Perusahaan yang terintegrasi sebagai pendekatan pengelolaan bisnis yang komprehensif untuk mencapai keunggulan Kinerja Perusahaan (*be profitable*), menjalankan kepatuhan (*obey the law*), menjalankan bisnis yang beretika (*be ethical*) dan dimilikinya kesadaran Perusahaan dan karyawan yang peka akan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai wujud menjadi warga negara yang baik. Lebih dari itu, sistem dan budaya dibangun untuk mewujudkan cita-cita agar Telkom terus maju, dicintai pelanggannya, kompetitif di industrinya dan dapat menjadi *role model* perusahaan sejenis. Sistem dan budaya seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, budaya perusahaan akan terbentuk karena adanya sistem yang dijalankan secara konsisten atau sebaliknya, sistem tersebut tidak akan memiliki makna tanpa disertai nilai-nilai moral yang yang mendasari perilaku karyawan dalam bekerja.

Tradisi membangun sistem dan budaya dapat kita temukan di setiap era kepemimpinan Telkom. Dalam penerapannya, budaya Perusahaan terus dikembangkan agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi, dimana sejak tahun 2009 telah dilakukan transformasi menuju budaya baru Perusahaan yang disebut dengan "*The Telkom Way*".

Nilai-nilai Perusahaan

Budaya Perusahaan *The Telkom Way* memiliki lima nilai-nilai perusahaan yaitu: *Commitment to long term, Customer first, Caring-meritocracy, Co-creation of win-win partnership,* dan *Collaborative innovation* yang selanjutnya Kami sebut dengan istilah 5C.

5 Corporate Values
Commitment to Long Term
Melakukan sesuatu tidak hanya untuk keuntungan saat ini saja tetapi juga masa mendatang
Customer First
Selalu mengutamakan pelanggan terlebih dahulu termasuk pelanggan internal
Caring Meritocracy
Memberikan pembinaan melalui penghargaan dan konsekuensi yang sesuai dengan kinerja dan perilaku
Co-creation of Win-Win partnership
Memperlakukan mitra bisnis sebagai rekanan yang setara
Collaborative Innovation
Menghilangkan internal silos di dalam Telkom dan Telkom Group serta terbuka terhadap ide-ide dari manapun sumbernya

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Etika Bisnis

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam penerapan etika bisnis, oleh sebab itu etika bisnis Telkom diterapkan mengacu pada kebijakan Perusahaan KD.05/2005 dan KD.43/2006. Dalam sosialisasi dan penerapannya, Kami selalu mengingatkan karyawan Kami mengenai tata nilai dan etika bisnis melalui survei kepada seluruh karyawan yang didalamnya memuat kuesioner dan studi kasus terkait pemahaman: GCG, etika bisnis, pakta integritas, *fraud*, manajemen risiko, pengendalian internal (SOA), *whistleblowing*, pelarangan gratifikasi, tata kelola TI, menjaga keamanan informasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan praktek tata kelola Perusahaan. Survei Kami lakukan secara *online* melalui media portal/intranet perusahaan dan diakhiri dengan peryataan kesediaan karyawan menjalankan etika bisnis perusahaan.

Sesuai ketentuan Sarbanes Oxley Act (SOA) 2002 *section* 406, Telkom menjalankan kode etik yang berlaku bagi Komisaris, Direktur Utama, Direktur Keuangan (posisi yang setara dengan *Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer*), Direktur dan pejabat kunci lainnya serta seluruh karyawan yang dapat dilihat pada *website* Kami http://www.telkom.co.id/about-telkom/business-ethics dan setiap perubahan terhadap kode etik Kami informasikan melalui *website* tersebut.

Pemahaman dan penerapan etika bisnis berikut hasil survey yang dilakukan telah diaudit secara internal maupun eksternal melalui proses audit SOA 404 terkait dengan penerapan *control environment* sesuai kerangka kerja pengendalian internal kontrol COSO pada audit tingkat entitas.

Penguatan Budaya *The Telkom Way* dan Etika Bisnis untuk Ruang Lingkup Telkom Group

Untuk mewujudkan praktek bisnis yang beretika di Telkom dan Anak Perusahaan, maka ditetapkan kebijakan penerapan GCG Telkom Group (PD.602.00/r.00/HK000/COP-D0030000/2011) yang didalamnya memuat upaya penguatan budaya dan etika bisnis di dalam Telkom Group. Berikut ini merupakan komitmen kode etik Kami dalam mengelola Telkom Group:

1. Perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group berusaha untuk menjadi Perusahaan yang jujur dan menjadi panutan dengan cara menjalankan bisnis yang sehat, kuat dan adil yang digerakkan oleh tata nilai yang terpuji serta taat kepada hukum dan menghormati semua pemangku kepentingan.
2. Perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group wajib menjalankan atau mengelola bisnis Perusahaan dengan memperhatikan prinsip etika bisnis dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan peduli kepada masyarakat, budaya dan lingkungan hidup.
4. Tindakan melawan hukum dan melanggar etika adalah tindakan yang dilarang, meskipun untuk alasan bisnis atau karena tekanan dari pihak manapun.
5. Perusahaan melindungi setiap pelapor yang memberikan informasi terkait dengan pelanggaran legal, kejadian tidak etis atau tindakan lain yang melangar prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

Dan sebagai panduan umum, Kami telah menetapkan kode etik karyawan Telkom Group bahwa setiap karyawan Telkom Group senantiasa:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan kewajaran dalam bertindak dan menjalankan tugas.
2. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
3. Menghormati hak individual dan keragaman sebagai sumber kekuatan Telkom Group.
4. Menjunjung tinggi budaya Perusahaan.
5. Menjaga keamanan aset dan melindungi kerahasiaan informasi Perusahaan.
6. Memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada pelanggan.
7. Senantiasa mengejar laba dan pertumbuhan usaha dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan etika bisnis.
8. Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dijalankan.
9. Menjaga dan meningkatkan reputasi Telkom Group.
10. Peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Evaluasi Implementasi Budaya Perusahaan

Setiap tahun Kami melakukan survei internal untuk mengetahui efektivitas penerapan budaya Perusahaan dan etika bisnis, Kami menyebutnya dengan istilah *Etika Bisnis Family survey*. Beberapa pertanyaan survei Kami tanyakan kepada karyawan secara *online* agar dapat menjangkau semua karyawan secara cepat, antara lain meliputi: GCG, etika bisnis, tata nilai *The Telkom Way*, anti kecurangan, pengendalian internal, pakta integritas, *whistleblowing system*, dan lain-lain. Hasil survei tiga tahun terakhir adalah sebesar tahun 2009, 78,13 poin; tahun 2010, 73,62 poin dan tahun 2011, 79,07 poin dari skala 100 poin.

PENERAPAN *WHISTLEBLOWING*

Telkom mengelola mekanisme *whistleblowing* sebagaimana kebijakan Perusahaan yang terbaru yaitu KD.48/2009 untuk menampung dan menjamin keamanan karyawan yang menyampaikan keluhan atau laporan tindak pelanggaran.

Mekanisme Sistem *Whistleblowing*

Dalam pelaksanaannya, laporan *whistleblowing* dikelola oleh Komite Audit untuk selanjutnya memeriksa dan apabila dipandang perlu akan melakukan tindakan investigasi lebih lanjut.

Komite Audit akan menindaklanjuti pengaduan pihak ketiga termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan Telkom Group yang berkaitan dengan:

- **Akuntansi dan *Auditing***. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan serta permasalahan audit terutama yang menyangkut independensi Kantor Akuntan Publik;
- **Pelanggaran Peraturan.** Pelanggaran terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Telkom maupun pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Telkom;
- **Kecurangan dan/atau dugaan korupsi.** Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Telkom; dan
- **Kode Etik.** Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi Telkom atau mengakibatkan kerugian bagi Telkom. Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain: tidak jujur, ada potensi benturan kepentingan *(conflict of interest)* dengan Telkom, atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik.

Hasil investigasi akan dilaporkan dan dinilai oleh Komite Eksekutif Investigasi. Selanjutnya, jika diperlukan penanganan lebih lanjut atas laporan karyawan tersebut, maka Internal Audit akan menindaklanjuti sebagai bagian dari kegiatan audit.

Para karyawan ataupun pihak lain diluar Perusahaan dapat menyampaikan persoalan-persoalan atau keluhan-keluhan mengenai segala hal yang tercakup dalam lingkup permasalahan yang diatur.

Penggunaan dan hasil Sistem *Whistleblowing*

Deskripsi	Jumlah	Keterangan
Jumlah Pengaduan	9	Pengaduan yang diterima
Memenuhi syarat	9	Pengaduan yang layak ditindaklanjuti
Kategori pengaduan	9	Dugaan kecurangan
Progress pengaduan	2	Pengaduan selesai ditindaklanjuti
	7	Sedang dalam proses tindak lanjut

LITIGASI DAN PERKARA HUKUM YANG SEDANG DI HADAPI PERUSAHAAN

Perkara Penting dan Kasus Hukum yang sedang Dihadapi Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan dan Anak Perusahaan mencadangkan sebesar Rp67 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

Berikut disampaikan penjelasan tentang kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, Anak Perusahaan dan/atau karyawan:

Kasus	Status Hukum
Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang diperiksa oleh KPPU dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No.5/1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar.	Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan dan Telkomsel telah mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008. Sehubungan dengan operator-operator mengajukan keberatan di berbagai pengadilan, selanjutnya, KPPU meminta MA untuk mengkonsolidasi kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Keputusan MA tanggal 12 April 2011, MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Perusahaan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Lihat Catatan 42 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Telkom.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sebagai wujud tanggung jawab penerapan GCG kepada pelanggan dan masyarakat dan sejalan dengan misi Kami untuk memberikan layanan yang terbaik, nyaman, produk berkualitas dan harga yang bersaing, Kami terus menjaga komunikasi dengan para pelanggan. Kami menyadari komunikasi yang lancar dan proaktif berperan penting bagi kelangsungan bisnis Perusahaan di samping memastikan kualitas yang sesuai dengan standar.

Dalam rangka memastikan pemenuhan standar layanan purna jual, Kami berkomitmen untuk menerapkan kompensasi yang adil melalui pemberlakuan SLG ("*Service Level Guarantee*", Garansi Purna Jual). Komitmen Kami terus Kami sesuaikan dengan tuntutan konsumen dan masyarakat sebagaimana ketentuan yang telah Kami atur dalam kebijakan Perusahaan KD DIRJASA No.C.tel.1758/YN000/JAS-53/04 tahun 2004 dan KD ND.C000 No.C.Tel.18/4N000/KNS-24/06 tahun 2006.

Beberapa cara telah Kami lakukan dan terus Kami sempurnakan di tahun 2011, tidak lain untuk memberikan kenyamanan dan jaminan perlindungan konsumen melalui pengelolaan keamanan produk *(product safety)*, layanan pengaduan dan jaminan purna jual antara lain:

1. Menjamin kualitas dan keamanan produk/layanan untuk memastikan kesesuaian proses pengambilan keputusan dalam peluncuran produk/layanan terhadap standar pengembangan produk/layanan yang harus Kami patuhi (Kami menyebutnya STARPRO) dan analisis 8 IC *(Internal Capabilities)* sebelum produk/layanan ditawarkan ke konsumen dan publik;
2. Memegang prinsip untuk memastikan produk dan layanan yang dihasilkan bernilai tinggi dan mampu menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya serta mampu mendorong perekonomian masyarakat dan negara;
3. Selalu menjaga kode etik dalam penjualan produk (penjualan langsung), promosi dan beriklan;
4. Menerapkan praktik beriklan yang beretika dengan memperhatikan ketentuan kode etik periklanan di Indonesia;
5. Memastikan bahwa produk dan layanan purna jual dapat secara mudah tersedia bagi publik.
6. Mendukung penerapan prinsip-prinsip dan praktek persaingan yang sehat; dan
7. Selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Pusat Layanan dan Mekanisme Pengaduan Konsumen

Telkom menyediakan pusat pelayanan konsumen yang dapat langsung didatangi di setiap kantor wilayah maupun kantor cabang Telkom, selain itu juga tersedia pusat pengaduan secara *online* di *website* Perusahaan (www.telkom.co.id) serta *call center* dengan nomor "147".

KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Sesuai prinsip transparansi dan keadilan tata kelola Perusahaan yang baik, Telkom mengelola komunikasi dan pengungkapan Perusahaan sesuai Kebijakan Direksi No.13 tahun 2009 yang dirancang berdasarkan ketentuan SOA *section* 302. Kebijakan ini berisi prosedur pengendalian keterbukaan Perusahaan *(disclosure control procedure)* yang bertujuan agar Perusahaan mampu memberikan keyakinan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan otoritas pasar modal telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan, dan disampaikan secara akurat, tepat waktu, memenuhi prinsip perlakuan seimbang dan adil, prinsip kehati-hatian dan prinsip keterbukaan penuh sesuai dengan peraturan pasar modal.

Prosedur pengendalian pengungkapan ditetapkan untuk menjamin tata kelola pengungkapan dan tidak hanya pengungkapan laporan tahunan melainkan pengungkapan signifikan lainnya meliputi:

a. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Bapepam-LK dan US SEC;
b. *Annual Securities on Form*-10;
c. *Semi Annual Report on Form*-8;
d. Surat Edaran kepada Pemegang Saham (sirkular) dalam rangka *corporate actions* seperti *merger* dan akuisisi, Pemecahan Saham, Pembelian Kembali Saham, penawaran tender, *stock option*, divestasi, *leverage buy out*, dan aksi korporasi lainnya;
e. Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
f. Laporan Pelaksanaan Paparan Publik;
g. Presentasi Direksi dalam rangka *Roadshow*, Rapat Analis (inisiatif internal), Konferensi Investor (permintaan eksternal), Materi Paparan Publik (permintaan eksternal);
h. *Info Memo;*
i. Profil Perusahaan;
j. Siaran Pers yang berkaitan dengan *investor relations*;
k. Siaran Pers yang tidak berkaitan dengan *investor relations*;
l. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
m. Surat Pemberitahuan Pemantauan Pemeringkatan;
n. Ringkasan Keuangan Perusahaan, Ikhtisar Laporan Keuangan;
o. *Website* Perusahaan; dan
p. Majalah Internal Telkom;

Proses utama yang dilakukan Telkom sesuai prosedur pengungkapan meliputi:

- Proses Representasi: merancang dan menjalankan proses representasi;
- Pembentukan Komite Pengungkapan: membentuk Komite Pengungkapan yang diketuai oleh Direktur Keuangan dengan anggota para pemimpin senior Perusahaan yang menentukan jenis pengungkapan yaitu kompleks atau non kompleks;

- Diskusi dan Analisis Manajemen: melakukan penelaahan, persetujuan dan penilaian kecukupan informasi dan memastikan bahwa semua informasi yang material telah diungkapkan secara lengkap, akurat, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme penelaahan dilakukan dengan menggunakan jenjang sub-representasi karena tiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan bekerja sama untuk melakukan tinjauan pengungkapan secara bersama-sama bertanggung jawab kepada *certifying officer/approver* untuk memastikan bahwa semua informasi yang material telah diungkapkan oleh Perusahaan akurat, lengkap, dan patuh terhadap regulasi eksternal maupun internal Perusahaan dan wajib menyediakan dokumentasi yang jelas dan lengkap serta tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi sebagai bukti pelaksanaan proses penyusunan dan tinjauan pengungkapan;
- Penelaahan oleh eksternal/spesialis: untuk pengungkapan tertentu, konsultan akan mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, hal ini mengingat Telkom merupakan Perusahaan *multilisting* di mana masing-masing bursa efek memiliki ketentuannya sendiri-sendiri;
- Proses/Protokol untuk Penelaahan Direksi: melakukan evaluasi pengungkapan oleh Direksi terkait sebelum proses penandatanganan/sertifikasi oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
- Internal Audit: melakukan audit secara berkala atas implementasi kebijakan dan penerapan pengungkapan Perusahaan mengacu pada ketentuan SOA 302 oleh *Internal Auditor*; dan
- Hubungan dengan proses *Section* 404: senantiasa menyelaraskan proses pengendalian internal dengan perancangan dan penerapan SOX 404 berikut tindak lanjut defisiensi bilamana akan berdampak pada kehandalan pengungkapan.

Kepada pemangku kepentingan dan investor publik, Telkom menyampaikan keterbukaan informasi Perusahaan yang terkini antara lain melalui:
- *Info Memo* (kuartalan);
- Presentasi Direksi;
- Siaran Pers;
- Jawaban pertanyaan DPR dalam rangka dengar pendapat;
- Konferensi Pers; dan
- Wawancara dengan pihak media.

Sebagai Perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek di AS (NYSE), Telkom wajib tunduk pada peraturan otoritas pasar modal AS di mana salah satunya adalah *Securities Exchange Act* tahun 1934 ("Peraturan Pasar Modal") yang mewajibkan Perseroan membuat Laporan Tahunan Form 20-F yang ditujukan kepada US SEC. Sedangkan dalam kaitan dengan pencatatan di Bursa Efek London (LSE) serta terdaftar namun tidak tercatat (POWL) pada Bursa Efek di Jepang, Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi, yang antara lain terdiri dari:
- *Annual Report;*
- *Half Yearly Report;*
- *Semi Annual Report on Form-10;* dan
- *Annual Securities on Form-8.*

KEPATUHAN

Komitmen Telkom untuk menyelenggarakan bisnis sesuai standar tertinggi tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan dikelola oleh unit *Legal & Compliance* dibawah Direktur *Compliance & Risk Management*. Melalui unit tersebut, Perusahaan berupaya untuk mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan Perusahaan dan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan baik yang berlaku di internal Perusahaan maupun undang-undang/regulasi eksternal yang harus dipatuhi Perusahaan termasuk pemenuhan aspek legal atas hubungan Perusahaan dengan pihak lain.

Secara proaktif, Telkom menjalankan praktik usahanya dengan mematuhi hukum sampai pada tingkat unit bisnis atau tingkat transaksional yang terus dipelihara sampai dengan saat ini. Beberapa aktivitas yang dilakukan selama tahun 2011 antara lain adalah:
- Melakukan dukungan aktivitas bisnis melalui *legal advisory* kepada unit bisnis dengan menyampaikan kajian hukum *(Legal Opinion)* atas rencana tindakan dan permasalahan yang telah terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku. *(Legal Advisory)*;
- Melakukan evaluasi kajian risiko dan legal *(risk & legal review)* atas inisiatif rencana bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh Perusahaan. (*Legal Review of Business & Policy Initiative*).
- Penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi *(litigation)*;
- Menyelenggarakan layanan data kepada pihak eksternal sebagai bentuk kewajiban operator telekomunikasi untuk menyediakan data kepada Aparat Penegak Hukum sampai dengan Triwulan 3, setelah Triwulan 3 dialihkan kepada unit Risk Management.

KONSISTENSI PENERAPAN GCG DI TAHUN 2011

Pengalaman dan pembelajaran Telkom dalam mengelola GCG selama ini memberikan pemahaman GCG yang lebih baik dari sebelumnya. Kami meyakini bahwa dalam penerapannya, GCG merupakan sebuah sistem yang dinamis dan senantiasa menuntut untuk terus diperkuat dan dipebaharui agar sejalan dengan perubahan bisnis yang terjadi dan secara nyata mampu menunjukan dukungannya pada pertumbuhan usaha dan bukan sebaliknya dianggap sebagai penghambat kelincahan organisasi.

Saat ini, penerapan GCG terus Kami selaraskan dengan dinamika bisnis yang terjadi. Untuk mewujudkannya, Telkom menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajamen risiko dan pengendalian internal. Praktik ini menuntut Kami untuk mampu mengelola *Governance, Risk and Compliance* ("GRC") yang sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan kelangsungan bisnis Perusahaan. Dalam penerapan manajemen risiko, meskipun awalnya tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk dapat menguasai kompetensi, memperoleh keakuratan dalam mengenali risiko industri dan organisasi, serta mampu menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari budaya karyawan, akhirnya berkat kesungguhan, konsistensi dan kesabaran manajemen, maka diperoleh hasil dimana manajemen risiko saat ini telah memberikan warna baru dan berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penguatan penerapan GCG di Telkom Group.

Beberapa aktivitas utama yang terus dijaga konsistensi penerapannya untuk mendukung praktik GCG yang searah dengan pengelolaan bisnis antara lain adalah :

1. Penguatan GCG Telkom Group untuk mendukung Transformasi portofolio bisnis TIME di Tahun 2011

Sesuai visi *"To Become a Leading* TIME *Player in the Region"* dan pelaksanaan transformasi organisasi sejak Oktober 2009 meliputi transformasi portofolio bisnis TIME, organisasi, infrastruktur dan budaya, maka Perusahaan harus mampu memastikan Perseroan tetap dikelola sesuai dengan tuntutan bisnis yaitu memiliki *competitive sustainable growth* di satu sisi dan menjalankan praktek GCG guna menjamin kelangsungan hidup Perusahaan.

Selama dua tahun (2010 - 2011) penerapan GCG terus disesuaikan agar sesuai dengan tuntutan bisnis, oleh karenanya GCG yang Kami pandang sebagai sebuah sistem yang dinamis terus Kami kembangkan melingkupi tata kelola grup usaha *(subsidiaries governance)*. Tujuannya tidak lain agar GCG dapat melekat sekaligus mendukung rencana pengembangan portofolio bisnis TIME dimana kedepannya akan melibatkan Anak Perusahaan secara aktif.

Wujud komitmen bersama penerapan GCG dalam ruang lingkup grup usaha ditetapkan melalui kebijakan Perusahaan nomor PD.602.00/r.00/HK000/COP-D0030000/2011 dan penandatanganan bersama oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group pada pertemuan Rapat Pimpinan (RAPIM) Telkom Group tanggal 26 Juli 2011 yang antara lain semangatnya adalah:

(i) Penguatan tata kelola Perusahaan yang baik dalam ruang lingkup grup usaha (Telkom Group) untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan atas transaksi antara induk dan antar Anak Perusahaan dengan tetap memegang prinsip bahwa Anak Perusahaan adalah perseroan yang independen;
(ii) Penguatan visi, budaya dan etika bisnis grup untuk menyamakan persepsi dalam memajukan Telkom Group dan menjamin kelangsungan grup usaha; dan
(iii) Peningkatan komitmen dan *awareness* sinergi grup.

2. Sistem Pengelolaan Kinerja

Untuk mewujudkan komitmen penerapan tata kelola Perusahaan yang baik khususnya penerapan prinsip akuntabilitas, Telkom mengelola pertanggungjawaban kinerja karyawan dalam sebuah Sistem Manajemen Performansi Karyawan sesuai yang diatur pada kebijakan Perusahaan KD.66/2006. Sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, maka azas obyektif adil dan transparan diterapkan mengacu pada pedoman pengukuran dan penilaian kinerja yang bertanggung jawab dalam mekanisme kontrak manajemen, penetapan indikator kinerja sesuai ruang lingkup tugas dan peran unit dan individu di organisasi dan penetapan target yang disepakati mengacu pada target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan dalam rencana Perusahaan.

Target kinerja disusun berdasarkan rencana Perusahaan dan diturunkan secara berjenjang ditingkat unit, sub unit sampai dengan karyawan dengan memperhatikan prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Realistic,* dan *Time Related* ("SMART"), sedangkan evaluasinya dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan) sesuai indikator kinerja yang diukur dalam mekanisme penelaahan manajemen, yang didukung beberapa aplikasi secara *online*.

Penerapan kontrak manajemen yang ditetapkan dengan basis *balanced scorecard* digunakan untuk menilai pertanggungjawaban kinerja Direksi, pemimpin tertinggi, pemimpin senior/unit dan karyawan dan selanjutnya menjadi acuan penetapan remunerasi. Evaluasi kontrak manajemen dilakukan setiap triwulan yang pencapaiannya diukur melalui aplikasi pedoman kinerja. Pada tahun 2011, sistem ini tetap dipertahankan dan terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Sejak tahun 2006, Kami telah menerapkan manajemen risiko mengacu pada kerangka kerja COSO *Enterprise Risk Management*. Dalam penerapannya, manajemen risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG dan pengendalian internal di Perusahaan.

Visi Kami terkait dengan penerapan manajemen risiko adalah : "Menjadikan pengelolaan risiko sebagai BUDAYA YANG MELEKAT dalam pelaksanaan proses bisnis dan operasional". Untuk itu, sejak tahun 2008

Kami menyusun *roadmap* tahapan pengembangan manajemen risiko di Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 2008: menjadikan pengelolaan risiko dan kepatuhan sebagai kebutuhan dalam setiap proses;
- 2009: memastikan penerapan pengelolaan risiko dan kepatuhan;
- 2010: menjadikan pengelolaan risiko dan kepatuhan sebagai budaya yang melekat;
- 2011: memastikan pengelolaan risiko dan kepatuhan berjalan efektif;
- 2012: menjadi *role model* dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan di BUMN/industri telekomunikasi.

Upaya mengintegrasikan manajemen risiko sebagai bagian yang yang tidak terpisahkan dari proses bisnis dan operasional

Beberapa langkah strategis telah Kami lakukan untuk mengintegrasikan risiko sampai pada tingkat transaksional (proses bisnis dan operasional) antara lain meliputi:

- Membangun visi pengelolaan risiko;
- Penciptaan iklim Perusahaan yang mendukung penerapan manajemen risiko;
- Menyusun kebijakan manajemen risiko sebagai pedoman pengelolaan risiko di Perusahaan;
- Mengembangkan kompetensi dan proses pembelajaran manajemen risiko secara berkesinambungan;
- Menetapkan *risk register* dan secara berkala melakukan penilaian tingkat risiko dan rencana mitigasi yang diperlukan untuk mengendalikan risiko sesuai *risk register;*
- Menentukan skala prioritas penanganan risiko dan alternatif rencana mitigasi dengan mempertimbangkan tingkat *cost and benefit;*
- Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko dan melakukan komunikasi kepada seluruh unit di Perusahaan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kualitas pengendalian atas risiko; dan
- Melakukan pengawasan implementasi program mitigasi dan dampaknya terhadap perubahan tingkat risiko secara berkala untuk memastikan tingkat risiko dapat dikendalikan.

Penguatan Manajemen Risiko di Tahun 2011

Penerapan manajemen risiko pada tahun 2011 lebih diarahkan pada pengelolaan risiko yang memberi dukungan nyata pada pengelolaan bisnis, yaitu menjadikan manajemen risiko sebagai *partner* strategis unit bisnis melalui beberapa aktivitas yang dilakukan antara lain:

- Menjadikan manajemen risiko sebagai salah satu indikator kinerja utama dan kinerjanya dinilai sebagai pencapaian KM (Kontrak Manajemen);
- Konsisten melakukan penilaian risiko *(risk assessment)* dengan menyusun profil risiko dan menjadikannya sebagai masukan dan pertimbangan dalam menyusun rencana Perusahaan;
- Melakukan pengukuran risiko unit setiap triwulan sebagai indeks manajemen risiko yang kinerjanya dinilai sebagai pencapaian kontrak manajemen Nilai Kinerja Unit;
- Terus melakukan pemberdayaan pengelolaan risiko di tingkat unit; dan
- Terus melakukan pengawasan, pelaporan dan peringatan dini dengan menyajikan perubahan kondisi risiko kepada manajemen yang disampaikan setiap triwulan sebagai masukan Rapat Direksi dan Rapat Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko.

Manajemen Kelangsungan Usaha

Manajemen kelangsungan usaha merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mengelola risiko di Perusahaan. Kami menyusun sistem perencanaan pemulihan bencana *(Dissaster Recovery Plan)* untuk memastikan tetap terpeliharanya bisnis dan operasional bahkan di saat terjadi bencana dan untuk mengantisipasi iklim yang tidak menentu termasuk bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini, Kami terus menyempurnakan sistem BCM Kami dan membentuk tim penanggulangan bencana yang disebut *crisis management team* dengan tugas utama adalah mengamankan aset Perusahaan dan menjamin kelangsungan bisnis dan operasional. Beberapa sektor tertentu terkait dengan pengelolaan kelangsungan usaha dan penanggulangan bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikasi ISO 27001:2005 yang telah Kami peroleh.

Menjamin Kelangsungan Pendapatan

Menjamin kelangsungan pendapatan Perusahaan merupakan salah satu perhatian utama Perusahaan. Telkom senantiasa memastikan tidak terjadi kebocoran pendapatan melalui penyediaan, pengembangan dan pengendalian sistem proses *revenue assurance*. Terdapat beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mengancam kelangsungan pendapatan dalam bisnis Kami melalui kebocoran yang dapat terjadi sejak awal transaksi. Melalui kebijakan internal KD.08/2009, Perusahaan mengelola kelangsungan pendapatan untuk meminimalkan risiko kebocoran pendapatan dengan mengelola kelompok pendapatan dari berbagai sektor, termasuk pengembangan produk, *pre-sales/sales*, peraturan yang mengikat, jaringan, perantara, peringkat tagihan, penagihan dan penerapan akuntansi yang tepat.

Program Anti* Fraud - *Pengelolaan Kecurangan

Wujud lainnya penerapan manajemen risiko adalah pengelolaan program anti *fraud* di Perusahaan yang penerapannya mengacu pada kebijakan internal Perusahaan yaitu:

- KD.43/HK.290/COP-D0031000/2008, 2 Desember 2008 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di lingkungan Telkom;

- KR.05/HK290/COP-D0031000/2009, 23 Oktober 2009 tentang Pedoman Pencegahan Penanganan *Fraud* Telekomunikasi pada Siklus Pendapatan untuk POTS, Flexi, Speedy dan SLI;
- KR.03/HK.290/COP-D0030000/2007, 29 Desember 2007 tentang Manajemen Risiko Kecurangan; dan
- KD.41/2008 tentang peraturan disiplin dan KD.22/2008 tentang pedoman penindakan sebagai acuan pengambilan keputusan oleh Komite Investigasi.

Terkait pencegahan kecurangan pelaporan keuangan, Kami secara berkelanjutan melakukan penilaian risiko kecurangan atas perancangan proses bisnis yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagaimana persyaratan kepatuhan *Sarbanes Oxley ("SOX") section 404*.

Penerapan program anti *fraud* adalah cara pendekatan Kami untuk membangun Perusahaan yang bebas dari *fraud*, korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengutamakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan tercela melalui:

- Tindakan pencegahan dengan cara membangun lingkungan usaha yang jujur, menerapkan etika bisnis, membangun budaya transparansi, menciptakan kemandirian, menciptakan akuntabilitas, membangun tanggung jawab dan menciptakan kewajaran;
- Menciptakan lingkungan kerja yang positif;
- Meminimalkan peluang dan kesempatan untuk melakukan *fraud*;
- Melakukan komunikasi/sosialisasi program anti *fraud*;
- Memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan; dan
- Melakukan *assesment*/penilaian risiko *fraud* secara berkala.

Mengingat penerapan manajemen risiko dan *fraud* sampai dengan tingkat operasional, maka Kami melakukan pengembangan dan penerapan beberapa sistem aplikasi pendukung antara lain : aplikasi *enterprise risk management online ("ERM online")*, aplikasi *revenue assurance* ("TRUST"), aplikasi *fraud management system* ("FRAMES"), aplikasi *security and safety portal/dashboard*.

4. Pengendalian Internal dan Pengendalian Pengungkapan

Konsistensi pada pengendalian dan prosedur pengungkapan sebagaimana uraian Kami di atas tentang komunikasi dan keterbukaan informasi akan terus Kami terapkan mengacu pada ketentuan SOA *section 302*.

Manajemen melakukan pengendalian dan prosedur pengungkapan termasuk, tanpa dibatasi meliputi pengendalian dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan di dalam laporan yang disampaikan atau diajukan berdasarkan *Exchange Act* telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan format SEC, dan bahwa informasi tersebut dikumpulkan dan disampaikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sebagaimana layaknya, untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu atas pengungkapan yang dipersyaratkan.

Laporan Manajemen Mengenai Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara memadai, sebagaimana didefinisikan dalam Exchange Act Rules 13a-15(f) dan 15d-15(f). Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang oleh, atau di bawah pengawasan Direktur Utama dan Direktur Keuangan, dan dilakukan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personil lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kehandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan termasuk kebijakan dan prosedur yang: (1) berkaitan dengan pengelolaan pencatatan secara rinci, akurat dan wajar yang mencerminkan transaksi dan pelepasan aset Perusahaan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat secara semestinya untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan bahwa pendapatan dan biaya Perusahaan diterima dan dikeluarkan hanya berdasarkan kewenangan manajemen dan Direksi Perusahaan; dan (3) memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencegahan atau deteksi secara tepat waktu dalam hal perolehan, penggunaan atau pelepasan aset Perusahaan yang tidak sah yang dapat memberikan dampak material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian.

Dengan keterbatasan yang ada, pengendalian internal atas pelaporan keuangan kemungkinan tidak dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Di samping itu, proyeksi atas evaluasi efektivitas pada masa mendatang mengandung risiko bahwa pengendalian mungkin menjadi tidak memadai karena perubahan kondisi, atau karena tingkat kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur mungkin menurun.

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011. Dalam melakukan penilaian, Manajemen Perseroan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh *Internal Control – Integrated Framework* yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission ("COSO"). Berdasarkan penilaian ini, manajemen menyimpulkan bahwa hingga 31 Desember 2011, pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perseroan telah efektif.

Laporan Atestasi Kantor Akuntan Publik

Efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, kantor akuntan publik independen dan terdaftar sebagaimana dinyatakan dalam laporan mereka tercantum dalam halaman F-3 dan F-4.

Perubahan dalam Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan sepanjang tahun fiskal yang baru saja berakhir yang akan sangat mempengaruhi atau kemungkinan akan sewajarnya berpengaruh secara material, terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk terus memperbaiki proses internal kontrol dan akan terus melakukan peninjauan dan pemantauan atas kontrol pelaporan keuangan serta prosedurnya untuk memastikan kepatuhan atas persyaratan dalam Sarbanes-Oxley Act serta aturan terkait yang ditentukan oleh COSO. Perusahaan juga akan terus mencurahkan sumber daya secara signifikan untuk peningkatan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dari waktu ke waktu.

5. Penerapan Pakta Integritas dan Penguatan Anti Gratifikasi

Konsistensi penerapan Pakta Integritas telah dimulai sejak ditetapkan kebijakan Pakta Integritas pada tahun 2009. Dalam konsepnya, kebijakan Pakta Integritas adalah mempertajam penerapan GCG di perusahaan terutama berkaitan dengan 9 area implementasi GCG yaitu:

- Kode Integritas;
- Etika Bisnis;
- Menghindari Benturan Kepentingan/Konflik Kepentingan *(conflict of interest)*;
- Larangan Melakukan Gratifikasi;
- Larangan Melakukan Transaksi oleh Orang Dalam *(insider trading)*;
- Menjaga Kerahasiaan Informasi;
- Pencegahan atas tindakan memperkaya diri atau pihak lain yang merugikan keuangan Perusahaan pada Area Pengadaan dan Kemitraan;
- Integritas Layanan; dan
- Integritas Pelaporan Keuangan Perusahaan.

Meskipun Perusahaan telah menerapkan praktek GCG, namun masih dipandang perlu untuk memberikan atensi khusus pada area-area tertentu untuk mencegah potensi kerugian keuangan Perusahaan dan mewujudkan *'island of integrity'* (salah satu alat atau instrumen reformasi birokrasi dan pencegahan KKN dengan konsentrasi pada upaya penciptaan keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi).

Penguatan Anti Gratifikasi di tahun 2011

Meskipun penerapan anti gratifikasi telah dilaksanakan sejak tahun 2006 melalui kebijakan internal Perusahaan nomor: KF.67/PR180/SDM-10/2006 tentang Larangan Melakukan Gratifikasi dan setiap tahun dikeluarkan Instruksi Direksi untuk mengingatkan karyawan, namun demikian, penerapan gratifikasi masih dirasakan belum efektif.

Untuk itu, pada tahun 2011 Telkom bersama dengan KPK melakukan kerjasama untuk memperkuat anti gratifikasi di Perusahaan, khususnya memperjelas kategori gratifikasi yang, membangun efektivitas pelaporan gratifikasi dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi ("UPG") di Perusahaan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah *training of trainer change agent* dan pendampingan penyusunan kebijakan pengelolaan UPG.

6. Pengelolaan Proses Berbasis ISO

Sejak tahun 1996/1997, Telkom secara konsisten telah menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO dan mengintegrasikannya dengan kriteria keunggulan kinerja berbasis Malcolm Baldrige sejak tahun 2001. Penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO dan Malcolm Baldrige tidak lain adalah untuk membangun proses tata kelola dan kinerja melalui disiplin proses dan pendokumentasian yang baik yang dijalankan untuk mencapai keunggulan Perusahaan berbasis proses kinerja.

Konsistensi Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9000/QM 9004

Beberapa sertifikasi yang telah diperoleh adalah ISO 9001: 2008 (sistem manajemen mutu - peningkatan kepuasan pelanggan) sejak tahun 1996/1997, QM/ISO 9004:2000 (sistem manajemen mutu - peningkatan kinerja) sejak tahun 2007 dan ISO 27001:2005 (*Information Security Management System*) sejak tahun 2009.

Konsistensi Pengelolaan Keunggulan Kinerja berbasis Malcolm Baldrige

Penerapan keunggulan dan penilaian kinerja berbasis Malcolm Baldrige telah diterapkan sejak tahun 2001. Konsistensi penerapaannya masih tetap terjaga hingga saat ini. Tahun 2011, penerapan dan penilaian keunggulan kinerja berbasis *Malcolm Baldrige* diterapkan untuk tingkat Unit, Unit Network Regional dan Unit Divisi Enterprises meliputi UNER, UNES, Unit DBS dan Unit CISC.

Perluasan Penerapan ISO 27000 (Information Security Management System) di Tahun 2011

Pengelolaan keamanan informasi telah diterapkan sejak tahun 2006 melalui kebijakan internal Perusahaan nomor KD.57/HK-290/ITS-30/2006. Tahap demi tahap untuk area produk strategis telah dijaminkan dan disertifikasi dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 27001:2005 sejak tahun 2009. Pada tahun 2011, penerapaan ISO 27000 kembali diperluas untuk produk strategis lainnya.

7. Penerapan Tata Kelola Perencanaan Perusahaan

Konsistensi tata kelola perencanaan merupakan salah satu perhatian utama manajemen dalam menerapkan GCG. Sesuai kebijakan Perusahaan nomor KD.74/LB100/CA-20/2006, manajemen memastikan bahwa perencanaan perusahaan dilakukan secara sistematis, lebih mudah, teratur, terintegrasi, sesuai visi dan misi Perusahaan, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya; juga memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pada saat pelaksanaannya.

Model perencanaan Perusahaan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) tahap perencanaan yaitu:

- **Penyelarasan harapan pemangku kepentingan**
  Pada tahap ini, Perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan menganalisis harapan setiap pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama Telkom dalam hal ini meliputi pemegang saham, pelanggan, karyawan, masyarakat, pemerintah dan rekan bisnis. Analisis atas harapan pemangku kepentingan utama tersebut memberikan informasi yang sangat berguna untuk menyusun perencanaan strategis dan sasaran strategis perusahaan. Peran GCG sangat penting pada tahap ini untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan harapan dan keinginan semua pemangku kepentingan utama agar tidak menimbulkan benturan kepentingan satu dengan yang lainnya.

- **Perumusan strategi Perusahaan (*strategic formulation*)**
  Pada tahap ini, perumusan strategi diawali dengan penetapan visi dan misi Perusahaan dengan memperhatikan harapan-harapan semua pemangku kepentingan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis *strength, weaknesses, opportunities* dan *treat* ("SWOT") organisasi dikaitkan dengan tingkat persaingan, pertumbuhan industri, perubahan teknologi, perubahan perilaku pelanggan, makro dan mikro ekonomi, dan lain-lain.

  Langkah berikutnya dilakukan pemetaan sasaran strategis organisasi yang tertuang pada dokumen *Corporate Strategy Scenario* ("CSS"). CSS merupakan hirarki perencanaan tertinggi sebagai acuan utama menyusun perencanaan Perusahaan. CSS disusun berdasarkan masukan/usulan dari Direktorat dengan arahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. CSS diharapkan memenuhi persyaratan perencanaan yang baik antara lain adalah menuangkan nilai kuantitatif, dapat diukur, realistis, mudah dipahami, menantang, hirarkis dan dapat dicapai.

  Dalam menyusun CSS, Perusahaan menggunakan beberapa rujukan antara lain:
  1. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal Perusahaan, peluang bisnis serta tantangan persaingan;
  2. Analisis portofolio bisnis (portofolio perusahaan, portofolio produk, *Boston Window*);
  3. Analisis pangsa pasar/cakupan, kekuatan merk/ modal; dan
  4. Rumusan strategi jangka panjang Telkom yang disebut dengan CSS yang berisi penetapan kebijakan, program dan proyeksi keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Setiap tahun, Telkom mengkaji kembali CSS berdasarkan faktor-faktor perubahan internal dan eksternal dan menuangkannya dalam *Corporate Annual Message* (CAM).

  Mekanisme penyusunan CSS dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Penyusunan rancangan strategi yang dipersiapkan oleh Dewan Direksi;
  2. Penelahan intensif oleh Dewan Komisaris dan Komite Perencanaan dan Pengelolaan Risiko ("KPPR");
  3. Pembahasan antara KPPR dengan tim teknis manajemen yang diwakili oleh Unit Strategic Investment and Corporate Planning ("SICP");
  4. Pembahasan antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
  5. Penyusunan rancangan akhir CSS oleh SICP dan KPPR; dan
  6. Persetujuan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

- **Penerapan Strategi bisnis**
  Pada tahap ini, CSS dijabarkan menjadi perencanaan bisnis jangka panjang (*master plan*) dan turunannya sebagai perencanaan jangka pendek atau tahunan. Dalam *master plan* ditetapkan sasaran dan rencana kerja Perusahaan lima tahun sesuai lingkup fungsional perencanaan, sedangkan pada perencanaan jangka pendek telah tercantum sasaran dan rencana kerja tahunan yang lengkap disertai rencana kerja dan anggarannya.

  Beberapa dokumen perencanaan bisnis dan perencanaan tahunan pada tahap ini meliputi:
  1. CSS, adalah dokumen utama rencana Perusahaan yang berisi visi, misi, sasaran, strategi korporasi, strategi inisiatif, kebijakan dan program utama yang disusun dalam waktu lima tahun kedepan;
  2. *Group Business Plan* ("GBP") atau *Master Plan* ("MP"), merupakan rencana jangka panjang Perusahaan di tingkat Direktorat yang merupakan penjabaran dari CSS;
  3. *Corporate Annual Message* (CAM), yaitu arahan Direktur Utama mengenai program prioritas satu tahun anggaran mendatang yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dalam kerangka waktu satu tahun mendatang;
  4. Rencana Kerja Manajerial ("RKM"), adalah rencana kerja yang disusun sebagai penjabaran *Corporate Annual Message* ("CAM") yang akan dipakai dalam penyusunan RKAP dan disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran;
  5. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP"), adalah program-program kerja dan anggaran Perusahaan yang disusun dalam kerangka waktu satu tahun mendatang; dan
  6. Rencana Kerja dan Anggaran ("RKA"), merupakan program-program kerja dan anggaran yang disusun dalam kerangka waktu satu tahun anggaran oleh Direktorat operasi, unit fungsional korporasi, unit *corporate support*, unit bisnis, Anak Perusahaan dan yayasan.

  Peran GCG dalam perencanaan Perusahaan adalah untuk menjamin dan memastikan keseluruhan proses dan kegiatan perencanaan dapat berlangsung baik, bertanggungjawab, transparan dan mampu memberi nilai tambah yang berkesinambungan bagi Perusahaan, serta tentu saja tidak bertentangan dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

8. Penerapan Tata Kelola TI

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bisnis informasi, Telkom senantiasa berusaha untuk memanfaatkan seluas mungkin penggunaan teknologi dalam pengelolaan Perusahaan. Hampir seluruh titik dalam *value-chain* Perusahaan telah terintegrasi dalam jaringan TI. Selain untuk pengoperasian jaringan seluruh infrastruktur alat produksi, semua aspek penting dalam manajemen Perusahaan seperti keuangan, logistik, sumber daya manusia termasuk juga pelayanan kepada karyawan, pelanggan, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya telah memanfaatkan jaringan TI Telkom.

Manajemen Telkom yakin bahwa penerapan TI secara luas dalam Perusahaan akan secara langsung meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan menjadi lebih baik lagi karena disamping akan mendorong terselenggaranya prinsip pokok transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran juga akan memudahkan sosialisasi, pengawasan dan penegakannya (*enforcement*).

Pembentukan pengendalian umum TI dan pengendalian aplikasi melalui penilaian risiko telah memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan TI sebagai faktor pendukung dan instrumen yang memfasilitasi usaha Telkom pada saat ini maupun di masa mendatang.

Kerangka kerja pengelolaan tata kelola IT mengacu pada *Control Objectives for Information and related Technologies* ("COBIT") yang dituangkan sebagai kebijakan Keamanan Sistem Informasi (KD 57/Tahun 2007) meliputi:
- Informasi, sistem pengolahan data/informasi, jaringan dan sarana penunjang merupakan aset informasi yang sangat penting bagi Perusahaan;
- Penerapan sistem keamanan informasi untuk menjamin integritas aset dan informasi, sehingga dapat menjaga nilai kompetitif, arus kas, profitabilitas, kepatuhan hukum dan citra komersial Perusahaan;
- Penerapan sistem keamanan informasi meliputi penilaian risiko, penilaian keamanan, kepatuhan pada peraturan dan hukum dan kebutuhan bisnis; dan
- Keberhasilan penerapan sistem keamanan informasi dapat dicapai dengan menerapkan pemahaman yang sama, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.

Beberapa contoh praktek tata kelola TI dalam operasi Kami adalah:
a. *User Access Review*, dalam level operasional, hak akses oleh setiap user pada setiap aplikasi sistem informasi ditetapkan sesuai kewenangannya yang tercantum pada *Distinct Job Manual* ("DJM") dan setiap perubahan yang terjadi karena adanya perubahan aplikasi, perubahan organisasi, mutasi karyawan, pensiun karyawan dan lain sebagainya maka secara berkala dievaluasi untuk memastikan keamanannya;

b. *Password Management*, untuk menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi di tingkatan operasional, secara berkala penggantian *password* harus dilakukan dengan standar ketentuan *password*, dan penyalahgunaan *password* merupakan pelanggaran atas disiplin pegawai yang mendasar dan akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan (KR 30/Tahun 2007);
c. *Audit Log/Audit Trail*, dalam operasi pengelolaan TI, setiap aplikasi harus memiliki kemampuan untuk menyimpan setiap transaksi atau kejadian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas atas sistem informasi sehingga setiap kejadian dapat dilacak dan urutan kejadiannya dapat dibuktikan untuk keperluan pendeteksian/ pemeriksaan atas kecurangan, pencegahan atas kejadian yang tidak diinginkan, perbaikan atas kesalahan dan untuk umpan balik/masukan untuk peningkatan sistem; dan
d. *End User Computing*, dalam tingkatan operasional penggunaan aplikasi independen yang ada pada masing-masing pengguna komputer harus dikelola dan diatur sesuai *standard end user computing* yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Pada tahun 2010, Telkom meraih penghargaan BUMN *Award* sebagai *the best of IT* BUMN yang dinilai dari aspek pelanggan, relasi dan jaringan.

9. Penerapan *e-procurement*

Sebagai wujud komitmen penerapan GCG dan Pakta Integritas, Telkom terus konsisten hingga saat ini untuk mengelola proses pengadaan dan kemitraan dengan berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan. Sejak tahun 2004, proses pengadaan telah diselenggarakan secara elektronik dengan sistem *e-auction* melalui aplikasi JALINTRADE. Melalui penerapan aplikasi tersebut, keseluruhan proses tender dan negosiasi telah berbasis komputer sehingga berlangsung adil dan transparan.

Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas *e-procurement*. Beberapa manfaat yang telah diperoleh antara lain: kecepatan proses tender, penetapan calon peserta tender secara elektronik sesuai persyaratan yang ditentukan, pemilihan pemenang secara elektronik, dan manfaat lainnya terkait dengan kualitas proses yang semakin baik, kewajaran harga, keadilan, transparansi dan mencegah terjadinya intervensi.

Dengan *e-procurement*, kontak fisik antara pemasok/ mitra dengan panitia diminimalkan dan semua kegiatan tender dilakukan dengan sistem komputer sehingga menunjang transparansi dengan seluruh pemasok memperoleh informasi yang sama.

10. Pengembangan kompetensi SDM

Sesuai kerangka kerja GCG yang Kami rumuskan, kompetensi dan kemampuan SDM merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan Perusahaan untuk dapat mewujudkan praktik GCG. Sebaik apapun kebijakan dan proses yang telah dirancang tidak akan membuahkan hasil yang optimal jika manusia yang menjalankan aktivitas tersebut tidak cukup profesional.

Telkom terus mengelola SDM berbasis kompetensi (*human capital competenced based*). Dalam implementasinya tentu saja diselaraskan untuk mendukung portfolio bisnis TIME, sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan dan *master plan* SDM.

Beberapa aktivitas utama yang dilakukan di tahun 2011 terkait pengembangan kompetensi SDM antara lain:
a. Mengevaluasi dan merevisi direktori kompetensi sesuai portofolio bisnis TIME;
b. Menyesuaikan tingkat kemampuan dari setiap kompetensi selaras dengan transformasi organisasi;
c. Melaksanakan penilaian kompetensi; dan
d. Mengembangkan kebijakan dan proses SDM sesuai portofolio bisnis TIME terkait dengan perencanaan SDM, perekrutan dan seleksi, pengukuran kinerja SDM, remunerasi, pengembangan kompetensi, pengembangan karir dan program pensiun.

11. Pengelolaan Pengetahuan

Sejak Telkom melakukan transformasi portofolio bisnisnya dari Infocom ke TIME, peran pengetahuan menjadi sangat penting untuk mendukung Perusahaan dalam mempertahankan laju pertumbuhan dan memenangkan persaingan.

Perubahan portofolio bisnis yang telah digambarkan dalam *Corporate Strategic Scenario*) ("CSS") ini menimbulkan implikasi dari sisi *knowledge*, sebab Telkom yang selama ini lebih berfokus dalam kompetensi T (*telecommunication*), dituntut untuk segera beradaptasi dengan kompetensi IME (*Information*, *Media* dan *Edutainment*).

Berdasarkan kondisi ini, strategi selanjutnya dirumuskan dalam pengelolaan pengetahuan untuk menentukan cara dan metode mengakuisisi pengalaman dan pengetahuan karyawan menjadi pengetahuan Perusahaan, menyediakan pengetahuan berdasarkan kompetensi yang diperlukan, serta mendukung efektivitas implementasi strategi bisnis Telkom.

Untuk mendukung strategi ini, Perusahaan telah menyediakan sistem pengelolaan pengetahuan yang disebut KAMPIUN. Setiap karyawan dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dengan cara mengunggah atau mengunduh melalui sistem, dimana dengan cara tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas beranekaragam permasalahan pekerjaan. KAMPIUN juga merupakan bank data (*repository*) pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan karyawan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan produktivitas dan kualitas pekerjaan.

Saat ini KAMPIUN, diprioritaskan dalam pengembangan konten pengetahuan yang terkait dengan kompetensi TIME, menyediakan akses kepada karyawan yang ingin melakukan "migrasi kompetensi" dari kompetensi lama ke kompetensi IME serta sebagai media untuk *knowledge sharing* antar Anak Perusahaan di lingkungan Telkom Group yang telah memiliki kompetensi IME.

Itu sebabnya, upaya menyusun dan mengembangkan konten KAMPIUN yang merupakan penjabaran dari direktori kompetensi menjadi sangat penting dalam rangka mengembangkan aset intelektual dan mendukung perusahaan meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan melalui peran aktif karyawan, sekaligus dapat menghemat biaya pelatihan klasikal yang selama ini dirasa sangat besar.

Pengelolaan pengetahuan tidak sebatas hanya pada penyediaan KAMPIUN, tetapi diarahkan juga untuk membentuk budaya berbagi pengetahuan yang diawali dengan pembentukan komunitas praktisi/*Community of Practice* ("CoP") dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan.

Beberapa CoP telah memberikan kontribusi yang cukup bernilai bagi Perusahaan, diantaranya CoP Telkom *Corporate Customer Engineer Forum* ("TCCEF"), CoP Sinergi BUMN dan Sinergi Telkom Group, serta CoP *Creating New Revenue Trough* DRC *Services*.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi biaya, program-program pengelolaan pengetahuan juga berorientasi pada upaya menyediakan pengetahuan yang tepat untuk kepentingan solusi atas permasalahan bisnis nyata yang dihadapi Perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan pengetahuan harus menjadi bagian dari rantai nilai yang penting dalam menuju kinerja terbaik Perusahaan.

Tujuan akhir dari pengelolaan pengetahuan adalah menuju *learning organization*, yaitu suatu kondisi dimana organisasi akan tetap berjalan terus tanpa ketergantungan kepada pegawai tertentu. Dengan semakin lancarnya arus informasi dalam berbagi pengetahuan, maka diharapkan Telkom mampu memproyeksikan dirinya menjadi *Knowledge based Enterprise* pada tahun 2013.

12. Pengelolaan Kepemilikan Informasi dan *Intangible Asset*

Informasi dan segala *intangible asset* termasuk hasil riset, teknologi dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan. Perusahaan mempunyai Peraturan tentang Pengelolaan Pengetahuan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual sesuai PD.605/2011. Dengan terlindungi dan terkelolanya kekayaan intelektual maka diharapkan dapat menambah *income generate* dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kreativitas dan inovasi atas produk dan jasa baru atau yang telah ada menjadi aset Perusahaan. Perusahaan mengelola *database* meliputi ciptaan, merek, desain industri, invensi, rahasia dagang, hak cipta, hak atas merek, hak atas desain industri, paten dan hak atas rahasia dagang. Secara rutin Perusahaan mengelola berbagai kegiatan yang menjadi *intangible asset* seperti inovasi melalui portal http://inovasi.telkom.co.id yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

13. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Memahami dan mengerti harapan para pemangku kepentingan adalah bagian yang dibutuhkan oleh manajemen dalam mengelola GCG untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan kepada pemangku kepentingan. Melalui pendekatan budaya Perusahaan "*The Telkom Way*", manajemen berusaha untuk menanamkan tata nilai dan budaya Perusahaan dengan pendekatan pemahaman karyawan akan nilai yang harus disampaikan kepada semua pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai pusat inspirasi termasuk norma dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Berikut nilai-nilai pemangku kepentingan yang diidentifikasi:

Pemangku Kepentingan	Nilai Pemangku Kepentingan
Pelanggan	Tingkat kepuasan produk dan layanan
	Akurasi dan transparansi penagihan dan operasi
	Jaminan kelangsungan produk dan layanan
Pemegang Saham	Selalu memberikan dividen kepada pemegang saham
	Tren harga saham terus naik
	Selalu beradaptasi dengan lingkungan baru
	Memenangkan pasar dan selalu siap berkompetisi
	Kelangsungan pertumbuhan kinerja keuangan
	Jaminan tata kelola ekspansi bisnis
	Praktek manajemen kelas dunia
Karyawan	Kesejahteraan karyawan
	Tempat berkarir yang baik
Pemerintah	Kepatuhan pada aturan pemerintah
	Transparansi dan kepatuhan pajak
	Menjadi contoh bagi BUMN-BUMN
	Turut serta meningkatkan PDB
Pesaing	Persaingan bisnis yang adil
	Kemitraan bisnis yang saling membangun
	Membagi sumber daya untuk menekan biaya
Investor & Komunitas Keuangan	Transparansi pelaporan Perusahaan
	Laporan keuangan Perusahaan yang andal
Masyarakat	Lapangan kerja
	Multiplier effect ekonomi
	Memberikan dampak positif bagi masyarakat luas

Menindaklanjuti keluhan pelanggan dan masyarakat

Mengelola keseimbangan keinginan dan harapan semua pemangku kepentingan di era bisnis saat ini ketika penetrasi layanan telekomunikasi sudah mencapai lebih dari 100% dan pertumbuhan penggunaan telepon (*voice*) yang sudah mencapai titik jenuh, serta persaingan usaha yang semakin ketat, tentu merupakan tantangan tersendiri dalam menerapkan GCG. Beberapa keluhan pelanggan dan masyarakat yang terjadi di industri layanan telekomunikasi pada umumnya, Kami evaluasi dan perbaiki terus menerus dari waktu ke waktu, seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini yaitu perang tarif yang berdampak pada penurunan ARPU dan penurunan kualitas layanan, keluhan layanan tagihan tetap, fenomena sedot pulsa dan lain-lain. Maka setiap ada keluhan dari pelanggan dan masayarakat, Kami akan segera menyelesaikan karena telah menjadi komitmen Kami untuk selalu mengedepankan praktik usaha yang beretika dan memberikan kepuasan layanan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

EVALUASI GCG

Untuk mengetahui pencapaian kinerja GCG, setiap tahun Perusahaan dinilai oleh *The Indonesian Institutes for Corporate Governance* ("IICG") yaitu lembaga independen pemeringkat GCG di Indonesia. Dalam proses pemilainnya, IICG melakukan riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* ("CGPI") terhadap Perusahaan publik (emiten), BUMN dan Perusahaan lain diluar kategori emiten dan BUMN, dan akhirnya menetapkan peringkat beberapa Perusahaan termasuk Telkom. Hasilnya, Telkom memperoleh predikat terbaik sebagai: *The Most Trusted Company* sesuai tema penilaian GCG yaitu "GCG sebagai Etika" pada tahun 2011.

Penilaian CGPI meliputi empat tahap dengan bobot nilai yang berbeda:

1. *Self assessment*, Perusahaan diminta untuk mengisi kuesioner sesuai tema penilaian GCG;
2. Observasi dokumen, Perusahaan menyampaikan kebijakan, prosedur dan bukti-bukti lain yang menunjukkan penerapan GCG di Perusahaan;
3. Penilaian makalah dan presentasi, Perusahaan menyusun makalah yang menjelaskan kegiatan Perusahaan dalam menerapkan GCG sesuai tema penilaian dan mempresentasikan makalahnya kepada dewan juri; dan
4. Pengamatan Dewan Juri mengunjungi Telkom untuk melakukan tanya jawab, pengamatan dan peninjauan lokasi untuk menelaah kepastian penerapan GCG di Perusahaan mengacu pada hasil *self assessment*, pengamatan dokumen dan makalah

Disamping penilaian oleh IICG, Telkom juga seringkali terpilih oleh lembaga pemeringkat GCG sebagai nominasi untuk diamati karena dipandang sebagai salah satu *benchmark* atau panutan bagi perusahaan lain. Beberapa pencapaian atas evaluasi tersebut antara lain adalah:

1. Penghargaan *Most Consistent Dividend Policy and Strongest Adherence to Corporate Governance*;
2. Penghargaan yang diterima dari Majalah Finance Asia dalam kategori *"Best Managed Company"*;
3. Penghargaan tertinggi yaitu: "*Indonesia Most Trusted Companies*" atas hasil penilaian GCG oleh lembaga independen Indonesian Institute for Corporate *Governance* ("IICG") dan Majalah Swa dengan peringkat: "Sangat Terpercaya";
4. Penghargaan "*Indonesia Trusted Company*" *based on survey to investors and analysts*;
5. Penghargaan Indonesia *Sustainability Reporting Awards* ("ISRA"); dan
6. Penghargaan Best *State-Owned Enterprises* ("SOE") BUMN, Indonesian *Institute for Corporate Directorship* ("IICD") mengenai praktek *Corporate Governance* ("CG") perusahaan terbuka di Indonesia.

Faktor-Faktor Risiko

RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN INDONESIA

Risiko-Risiko Politik dan Sosial

Peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang terjadi di Indonesia dapat berdampak pada usaha Kami

Perubahan politik di Indonesia ditandai dengan keberhasilan dilaksanakannya pemilihan umum langsung untuk memilih presiden, wakil presiden, pimpinan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat pusat dan daerah (DPR dan DPRD) pada tahun 2004. Proses ini dengan sukses berlanjut pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih untuk kedua kalinya. Demikian halnya pada tingkatan daerah, pemilihan-pemilihan kepala daerah dilaksanakan selama tahun 2010 dan 2011 tanpa adanya insiden.

Isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan telah mengemuka di Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah menetapkan sebuah undang-undang ketenagakerjaan baru yang memberikan perlindungan lebih besar kepada para pekerja. Hal ini mendorong pergerakan kaum buruh jika mereka merasa ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada mereka.

Lebih lanjut, Indonesia telah berpengalaman mengalami gejolak sosial yang disebabkan oleh separatisme khususnya di Aceh di masa lalu dan belakangan ini di Papua saat ini. Negara ini juga pernah bersinggungan dengan konflik antar etnis, misalnya di Kalimantan dan juga konflik antar agama di Maluku dan Poso.

Dalam setiap tahun, warga Indonesia menjadi lebih dewasa dalam masalah politik dan demokrasi, serta dalam mengekspresikan pendapat mereka di depan publik dan dalam mengatasi perbedaan etnik dan agama. Namun, perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi, sebagaimana yang terjadi di masa lalu dan tidak ada jaminan bahwa gejolak sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dalam skala yang lebih luas atau gejolak tersebut, secara langsung atau tidak langsung, berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Kami.

Aksi terorisme di Indonesia dapat mengganggu Indonesia, yang dapat berpengaruh pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Kami, serta harga saham Kami di pasar

Dalam tujuh tahun terakhir, telah terjadi beberapa insiden teror di Indonesia diantaranya insiden pengeboman di Sulawesi Tengah pada bulan Mei 2005, insiden bom Bali pada bulan Oktober 2005 dan pengeboman JW Marriot dan Ritz Carlton Hotel pada bulan Juli 2009.

Pihak kepolisian telah berhasil menangani beberapa aktivitas teror dalam beberapa tahun terakhir ini dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam insiden itu. Namun, insiden teror masih berlanjut dan memberikan dampak yang negatif pada investasi dan tingkat kepercayaan serta kinerja ekonomi Indonesia, dan juga dapat menyebabkan kerugian material pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi serta prospek usaha dan harga pasar dari surat berharga Kami pada pasar modal.

Walaupun pihak kepolisian terus meningkatkan kemampuan anti terorisnya, tidak ada jaminan bahwa kegiatan teroris tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, atau apabila hal tersebut terjadi, hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan bisnis atau harga pasar saham di pasar modal Indonesia.

Risiko-Risiko Makro Ekonomi

Perubahan negatif di tingkat global, regional atau kegiatan ekonomi Indonesia dapat berpengaruh negatif pada bisnis Kami

Perubahan pada ekonomi di Indonesia, regional dan global dapat mempengaruhi kinerja Kami. Dua peristiwa signifikan yang mempengaruhi ekonomi Indonesia adalah krisis di tahun 1997 dan krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2007. Krisis ekonomi tahun 1997 mempengaruhi seluruh kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, krisis ekonomi muncul karena krisis kredit rumah di AS menekan ekonomi Indonesia walaupun tidak seburuk tahun 1997.

Pada paruh kedua tahun 2011 dan awal tahun 2012, nilai tukar Euro mengalami tekanan yang kuat, terutama akibat dari defisit anggaran yang terjadi di Portugal, Spanyol, Yunani, Irlandia dan Italia. Krisis Euro sangat berpengaruh pada sektor finansial dan tidak memiliki dampak yang signifikan atau nyata pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diperkirakan Pemerintah akan tetap positif pada tahun 2012. Namun, jika krisis berkepanjangan, Kami tidak dapat menjamin tidak adanya dampak yang material dan merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta konsekuensinya terhadap usaha Kami.

Di masa lalu, volatilitas ekonomi memiliki dampak material dan negatif pada kualitas dan pertumbuhan bisnis di Indonesia selain faktor lain seperti depresiasi mata uang, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan suku bunga, kenaikan inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat serta gejolak sosial.

Selama tahun 2011, ekonomi Indonesia terbilang stabil seperti terlihat dari stabilitas nilai tukar Rupiah sekitar Rp9.000 per Dollar AS dan suku bunga SBI pada 6,75% per tahun, inflasi

single digit dalam dua tahun terakhir dan pertumbuhan positif ekonomi. Namun, tetap tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi ketidakstabilan ekonomi di masa mendatang yang tidak akan mempengaruhi kinerja bisnis Kami.

Kondisi ekonomi yang merugikan dapat berakibat pada muramnya kegiatan ekonomi, berkurangnya pendapatan yang tersedia bagi konsumen untuk dibelanjakan dan mengurangi daya beli konsumen. Hal ini akan mengurangi permintaan akan layanan komunikasi termasuk layanan Kami dan ini tentu dapat berpengaruh pada bisnis, kondisi finansial dan hasil usaha serta prospek keuangan. Tidak terdapat jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi global dan kawasan regional akan terus berlanjut atau kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terjadi lagi.

Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan bisnis Kami

Mata uang fungsional yang Kami gunakan di Indonesia adalah Rupiah. Salah satu hal terpenting yang menyebabkan krisis ekonomi di Asia dan berdampak pada perekonomian di Indonesia adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar AS. Sejak tahun 2007 hingga 2011, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berada di kisaran terendahnya dari Rp12.400 per Dolar AS sampai dengan Rp8.460 per Dolar AS. Akibatnya, Kami mencatat keuntungan sebesar Rp43 miliar pada tahun 2010, serta mencatat kerugian sebesar Rp210 miliar pada tahun 2011. Pada tanggal 31 Desember 2011, nilai tukar Rupiah/Dolar AS berada di level Rp9.067,5 per Dolar AS.

Meskipun nilai tukar Rupiah relatif stabil terhadap Dolar AS sepanjang tahun 2011, tren ini dapat berubah jika kondisi ekonomi global berubah. Saat Rupiah terdepresiasi terhadap mata uang lainnya pada tanggal 31 Desember 2011, kewajiban Kami dalam denominasi Dolar AS hutang usaha, hutang pembelian (*procurements payable*), pinjaman dalam mata uang asing dan hutang obligasi seharusnya menjadi meningkat dalam Rupiah. Depresiasi mata uang Rupiah akan mengakibatkan kerugian dalam penukaran mata uang asing, mempengaruhi pendapatan lain-lain dan laba bersih Kami serta mengurangi jumlah dividen yang akan diterima oleh pemilik saham *American Depository* Kami. Kami tidak dapat menjamin akan mampu mengelola risiko akibat nilai tukar dengan baik di masa depan dengan sukses atau mencegah dampak risiko mata uang itu terhadap usaha Kami.

Meskipun Rupiah telah bebas dipertukarkan dan dikirimkan dari waktu ke waktu, Bank Indonesia (bank sentral Indonesia) telah melakukan intervensi di pasar mata uang sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakannya, baik dengan melepas Rupiah atau dengan menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah. Kami tidak dapat menjamin bahwa kebijakan nilai tukar mata uang mengambang yang diterapkan Bank Indonesia saat ini tidak akan berubah atau Pemerintah akan mengambil langkah tambahan untuk menstabilkan, menjaga atau menaikkan nilai tukar Rupiah dan jika salah satu dari langkah ini diterapkan, akan berhasil. Perubahan pada kebijakan nilai tukar mata uang mengambang dapat berdampak signifikan pada kenaikan suku bunga domestik, kurangnya likuiditas, kontrol modal atau pasar, atau penahanan bantuan keuangan oleh lembaga pemberi pinjaman multinasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, kredit macet atau menurunnya penggunaan layanan oleh pelanggan Kami, dan hasilnya, Kami pun akan menghadapi kesulitan mendanai belanja modal dan menerapkan strategi usaha. Akibat lainnya dapat berupa dampak material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Kami.

Penurunan peringkat kredit pemerintah atau Perusahaan di Indonesia dapat mempengaruhi bisnis Kami

Pada tanggal Laporan Tahunan, utang jangka panjang berdenominasi mata uang asing Indonesia dinilai "Baa3" oleh Moody's (meningkat dari "Ba1" pada tanggal 18 Januari 2012), "BB+" oleh Standard & Poor's (meningkat dari "bb" pada tanggal 8 April 2011) dan "BBB" oleh Fitch Ratings ("Fitch"). Utang jangka pendek berdenominasi mata uang asing dinilai "B1/NP" oleh Moody's, "B" oleh Standard & Poor's dan "B" oleh Fitch. Pada tanggal 18 Januari 2012, Moody's menaikkan peringkat hutang jangka panjang Indonesia menjadi peringkat investasi. Peringkat ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi utang dan kesediaan untuk memenuhi komitmen keuangannya.

Berdasarkan informasi yang Kami peroleh saat ini, kecil kemungkinan lembaga-lembaga ini melakukan peninjauan atau perubahan peringkat menjadi lebih buruk dari tahun ini. Namun, Kami tidak dapat menjamin bahwa Moody, Standard & Poor, Fitch atau perusahaan pemeringkat lainnya tidak akan mengubah atau menurunkan *rating* kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan di Indonesia. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak negatif terhadap likuiditas pasar finansial Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan di Indonesia, termasuk Kami, untuk mengumpulkan tambahan dana dan tingkat suku bunga dan kondisi komersial lainnya dimana dana tambahan tersedia. Suku bunga atas utang berdenominasi Rupiah Kami dengan tingkat bunga mengambang juga akan meningkat. Peristiwa semacam itu dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi finansial, hasil operasi dan prospek usaha Kami.

Risiko-Risiko Bencana

Indonesia rentan terhadap bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kendali Kami, yang berpengaruh pada bisnis dan hasil usaha kami

Banyak daerah di Indonesia, termasuk daerah di mana Kami beroperasi, rentan terhadap bencana alam seperti banjir, petir, angin ribut, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran dan juga kekeringan, pemadaman listrik dan peristiwa lainnya yang berada di luar kendali Kami. Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah vulkanik paling aktif di dunia karena berada di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama ini yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa bumi, tsunami atau gelombang pasang destruktif. Dari waktu ke waktu, bencana alam telah menelan korban jiwa, merugikan atau membuat sejumlah besar masyarakat mengungsi dan merusak peralatan Kami. Peristiwa-peristiwa seperti ini telah terjadi di masa lalu, dan dapat terjadi lagi di masa depan, mengganggu kegiatan usaha Kami, menyebabkan kerusakan pada peralatan dan memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja finansial dan keuntungan Kami.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bencana alam telah terjadi di Indonesia (selain tsunami di Asia pada tahun 2004), termasuk tsunami di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006 dan 2010, gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 2006, erupsi yang kemudian berkembang menjadi banjir lumpur panas di Jawa Timur di tahun 2006, gempa di Papua, Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera pada tahun 2009.

Pada tanggal 2 September 2009, gempa melanda sebagian wilayah Jawa Barat. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada aset Perusahaan. Pada tanggal 30 September 2009 terjadi gempa di Sumatera Barat, yang mengganggu penyediaan layanan telekomunikasi di beberapa lokasi. Walaupun Tim Manajemen Krisis Kami bekerjasama dengan karyawan dan mitra Kami berhasil memulihkan layanan dengan cepat, gempa tersebut menyebabkan kerusakan parah terhadap aset Kami. Ada sejumlah gempa bumi terdeteksi pada tahun 2010, walau tidak satupun yang memberikan risiko signifikan terhadap bisnis Kami pada umumnya.

Banjir bandang dan banjir yang lebih meluas terjadi secara rutin selama musim hujan dari bulan November sampai bulan April 2011. Kota-kota besar khususnya Jakarta, sering mengalami banjir parah yang mengakibatkan gangguan besar dan kadang-kadang menimbulkan korban jiwa. Jakarta juga mengalami banjir yang signifikan pada bulan Februari 2007 dan Solo di Jawa Tengah pada bulan Januari. Pada bulan Januari 2009 terjadi hujan deras yang menyebabkan runtuhnya sebuah bendungan diluar Jakarta, membanjiri ratusan rumah di daerah padat penduduk dan menyebabkan kematian sekitar 100 orang. Longsor terjadi secara rutin di daerah pedesaan selama musim hujan.

Ada banyak gunung berapi di Indonesia yang dapat meletus tanpa peringatan. Pada bulan Oktober dan November 2010, Gunung Merapi di Jawa Tengah meletus beberapa kali, menelan korban jiwa sekitar 140 orang, beberapa ratus ribu orang lainnya pada radius 20 km terpaksa mengungsi, menyebabkan kerusakan properti sebesar miliaran dolar dan mengganggu perjalanan udara. Sejak bulan April 2008, Gunung Soputan di Sulawesi utara, Gunung Egon di Pulau Flores, Nusa Tenggara, Gunung Ibu di Maluku Utara dan Anak Krakatau di Selat Sunda telah menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Gunung Sinabung 60 km (40 mil) barat daya dari pusat kota Sumatera Utara, Medan, meletus pada tanggal 29 Agustus 2010 setelah tidak beraktivitas selama 400 tahun. Abu dan asap asam dari gunung berapi telah menyelimuti pedesaan dan tanaman.

Pada tahun 2010, kabel bawah laut yang merupakan bagian dari *backbone* Kami mengalami kerusakan akibat dari tsunami di Sumatera Barat dan gempa di Sumbawa. Namun, sudah dilakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Meskipun Kami telah menerapkan rencana kelanjutan usaha dan pemulihan bencana serta telah mengasuransikan aset Kami untuk melindungi dari kerugian akibat bencana alam atau fenomena lainnya yang terjadi di luar kendali Kami, tidak ada jaminan bahwa perlindungan asuransi akan cukup untuk menutupi potensi kerugian, premi yang akan dibayarkan untuk polis asuransi tersebut ketika diperbarui tidak akan naik secara substansial di masa depan, atau bencana alam tidak akan merusak operasional Kami secara signifikan. Selain itu, gempa bumi, bencana geologis lainnya atau bencana akibat gangguan cuaca di kota besar di Indonesia dapat sangat mengganggu ekonomi Indonesia serta menurunkan kepercayaan investor. Beberapa peristiwa yang terjadi dapat secara material berdampak pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Kami.

Akhirnya, Kami juga tidak dapat memberi jaminan bahwa peristiwa geologis atau meteorologis di masa depan tidak akan berdampak lebih besar pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi besar, gangguan geologis atau bencana lain akibat gangguan cuaca di kota yang padat manapun dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu ekonomi Indonesia dan menurunkan kepercayaan investor, sehingga berpengaruh pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Kami.

Operasional Kami dapat terpengaruh oleh merebaknya flu burung, virus flu A (H1N1) atau epidemi lainnya

Selama tiga tahun terakhir, sebagian besar wilayah Asia menghadapi perebakan penyakit flu burung. Pada tangal 2 Juni 2010, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") mengumumkan 262 kasus kematian dari total 433 kasus yang dilaporkan ke WHO, yang hanya melaporkan kasus flu burung berdasarkan hasil tes laboratorium. Terkait ini,

Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan pada WHO bahwa terdapat 115 kematian dari total 141 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, WHO mengumumkan bahwa penularan penyakit flu burung dari orang ke orang telah terjadi di Sumatera, Indonesia. Menurut data Organisasi Pangan PBB, kasus flu burung ditemukan di 31 dari 33 propinsi yang ada di Indonesia, sehingga meningkatkan kemungkinan virus tersebut bermutasi ke bentuk yang lebih mematikan. Tidak ada vaksin flu burung yang telah dikembangkan secara efektif dan vaksin tersebut tidak dapat ditemukan tepat waktu untuk melindungi dari potensi pandemi flu burung.

Pada bulan April 2009, virus flu A (H1N1) merebak, yang berasal dari Meksiko namun telah meluas ke seluruh dunia, termasuk ke Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura dan negara lainnya di Asia. Virus flu A (H1N1) diyakini sangat menular dan tidak mudah dikendalikan.

Merebaknya kasus flu burung, virus flu A (H1N1) atau epidemi sejenis, memaksa pemerintah negara yang terjangkit penyakit tersebut, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah dalam mengatasinya, karena dapat mengganggu ekonomi Indonesia dan negara lainnya serta menurunkan kepercayaan investor, sehingga berdampak secara material terhadap kondisi keuangan atau hasil operasi Kami serta nilai pasar dari sekuritas. Selanjutnya operasi Kami dapat terganggu signifikan bila karyawan Kami tetap di rumah dan tidak pada tempat usaha utama kami untuk waktu yang panjang dan dapat berdampak secara material dan negatif terhadap kondisi keuangan atau hasil operasi Kami serta nilai pasar dari sekuritas Kami.

Risiko-Risiko Lain

Standar keterbukaan informasi korporat Indonesia berbeda signifikan dengan yang diterapkan di negara-negara lain termasuk Amerika Serikat.

Mengingat Kami tercatat di BEI, LSE dan NYSE, Kami tunduk pada tata kelola perusahaan dan pelaporan di Indonesia dan AS. Mungkin lebih sedikit informasi publik yang tersedia tentang perusahaan publik Indonesia, termasuk Kami, dibanding pengungkapan yang lebih teratur oleh perusahaan publik di negara dengan pasar sekuritas yang lebih matang. Akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses ke tingkat dan jenis pengungkapan yang sama seperti yang tersedia di negara lain, dan perbandingan dengan perusahaan lain di negara lain mungkin tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Laporan keuangan Kami yang disampaikan di sini telah sesuai dengan SAK Indonesia. Namun laporan yang Kami sampaikan kepada NYSE juga telah disesuaikan dengan standar IFRS, yang tentunya memiliki perbedaan dalam beberapa aspek dengan SAK Indonesia dan Kami membagikan dividen berdasarkan laba Bersih dan laba bersih per saham yang ditentukan berdasarkan aturan dalam SAK Indonesia.

Kami mempersiapkan Laporan Keuangan Konsolidasian Kami sesuai dengan SAK Indonesia dan sejalan dengan peraturan yang diterbitkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") dan BEI. SAK Indonesia memiliki perbedaan dalam beberapa aspek dengan IFRS, dan karenanya, terdapat perbedaan dalam laporan keuangan yang Kami ajukan dengan merujuk pada SAK Indonesia dan IFRS, termasuk mengenai laporan Laba Tahun Berjalan dan Laba Bersih per Saham. Kami membagikan dividen berdasarkan Laba Tahun Berjalan dan Laba Bersih per Saham sesuai aturan SAK Indonesia. Penjelasan sejumlah perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS lihat Catatan 48 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Kami.

Berdasarkan SAK Indonesia, Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk Kami adalah sebesar Rp11.537 miliar dan Rp10.965 miliar untuk tahun buku 2010 dan 2011, sedangkan Laba Bersih per Saham terhitung sebesar Rp586,54 miliar dan Rp559,67 miliar untuk tahun 2010 dan 2011. Dividen per saham terhitung sebesar Rp322,59 untuk tahun 2010. Dividen per saham untuk tahun 2011 akan diputuskan pada AGMS 2012, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012.

Kami berbadan hukum di Indonesia, dan tidak menjamin bagi investor untuk menyampaikan proses panggilan, atau melaksanakan keputusan, atas Kami dari wilayah AS, atau melaksanakan keputusan pengadilan asing terhadap Kami di Indonesia

Kami berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, beroperasi di wilayah hukum Indonesia yang terkait dengan Perusahaan modal asing dan aset utama Kami berlokasi di Indonesia. Selain itu, anggota Komisaris dan Direksi Kami bertempat tinggal di Indonesia sedangkan sebagian besar aset mereka berada di luar AS. Oleh karenanya akan sulit bagi investor untuk mengajukan penyampaian panggilan, atau melaksanakan putusan terhadap Kami, atau terhadap pihak lain yang ada di AS, atas keputusan dari pengadilan AS.

Kami telah diberitahukan oleh Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, penasihat hukum Indonesia Kami, bahwa keputusan dari pengadilan AS, termasuk keputusan yang disampaikan berdasarkan ketentuan hak sesuai undang-undang sekuritas Federal AS atau undang-undang sekuritas dari negara bagian manapun di AS, tidak berlaku di pengadilan Indonesia, meskipun keputusan itu dapat diterima sebagai bukti yang tidak menentukan dalam pengajuan atas dasar klaim di pengadilan Indonesia. Terdapat keraguan apakah pengadilan Indonesia akan menyampaikan keputusan atas tindakan yang disidangkan di pengadilan Indonesia yang

didasarkan pada ketentuan tanggung jawab perdata dalam undang-undang sekuritas federal AS atau undang-undang sekuritas negara bagian manapun di AS. Oleh karenanya, penuntut akan diminta menyampaikan tuntutannya terhadap Kami atau para individu tersebut di pengadilan Indonesia.

Kepentingan pemegang saham pengendali Kami dapat berbeda dengan kepentingan dari pemegang saham lainnya

Pemerintah menguasai 53,2% dari saham biasa yang diterbitkan dan beredar serta berwenang untuk menentukan hasil atas seluruh tindakan yang membutuhkan persetujuan para pemegang saham. Pemerintah juga memiliki satu saham Dwiwarna, yang memberinya hak suara khusus dan hak *veto* atas hal-hal tertentu, termasuk pemilihan dan pemberhentian dari anggota Direksi maupun Komisaris Kami. Sebagai pemegang saham mayoritas atau pemegang saham Dwiwarna, mereka juga dapat menggunakan kekuasaannya untuk menerbitkan saham baru dan mengubah Anggaran Dasar Perusahaan atau mendorong aksi *merger* atau membubarkan Kami, menaikkan atau menurunkan modal disetor atau mengurangi modal yang dikeluarkan, atau mengajukan *veto* atas langkah tersebut. Satu atau lebih langkah ini dapat berakibat pada penarikan saham yang didaftarkan dari bursa efek tertentu. Kemudian, melalui Menkominfo, Pemerintah dapat menggunakan posisinya sebagai *regulator* atas industri telekomunikasi Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah memiliki 14,29% saham di PT Indosat, Tbk. ("Indosat"), pesaing Kami dalam melayani sambungan telepon tidak bergerak langsung internasional dan pesaing Anak Perusahaan Kami, Telkomsel, dalam melayani telepon seluler. Kepemilikan saham Pemerintah termasuk saham Seri A yang memiliki hak suara khusus dan hak *veto* atas hal-hal strategis dalam Anggaran Dasar Indosat, termasuk keputusan untuk pembubaran Perusahaan, likuidasi dan kebangkrutan, serta mengizinkan Pemerintah untuk mengajukan satu kandidat Direktur pada Direksi dan satu kandidat Komisaris pada Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat juga kasus dimana kepentingan Pemerintah berbenturan dengan kepentingan Kami. Tidak ada kepastian bahwa Pemerintah tidak memberikan peluang kepada; atau berpihak saat menggunakan kekuasaannya sebagai *regulator* atas industri telekomunikasi Indonesia; Indosat atau penyedia telekomunikasi lainnya dimana mereka juga berkepentingan. Jika Pemerintah akan memprioritaskan bisnis Indosat dibandingkan Kami atau akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Indosat, hal ini akan berdampak pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi serta prospek usaha Kami.

RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN BISNIS TELKOM DAN ANAK PERUSAHAAN

Risiko Operasi

Kegagalan dalam melanjutkan operasi jaringan Kami, sistem utama, gateways kepada jaringan Kami atau jaringan operator lainnya yang berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Kami

Kami sangat bergantung pada operasi jaringan yang tidak terputus dalam memberikan layanan. Misalnya, Kami tergantung pada akses terhadap sambungan telepon tidak bergerak kabel ("PSTN") untuk operasional sambungan tidak bergerak dan menghentikan serta memulai sambungan telepon seluler kepada dan dari telepon tidak bergerak kabel, dan porsi trafik sambungan telepon jarak jauh internasional dan seluler Kami yang besar dilakukan melalui PSTN. Kami juga bergantung pada akses terhadap sambungan telepon tidak bergerak nirkabel ("CDMA"), jaringan internet dan *broadband* serta jaringan seluler. Jaringan terintegrasi kami termasuk jaringan akses tembaga, jaringan akses serat optik, BTS, perangkat *switching*, perangkat transmisi optik dan radio, jaringan *IP core*, satelit dan server aplikasi.

Disamping itu, Kami juga bergantung pada interkoneksi terhadap jaringan operator telekomunikasi lainnya untuk melayani sambungan dan data yang dikirimkan pelanggan Kami kepada pelanggan operator di Indonesia dan luar negeri. Kami juga bergantung pada manajemen sistem informasi yang canggih secara teknologi dan sistem lainnya, seperti sistem pengaturan tagihan yang memungkinkan Kami untuk melakukan kegiatan operasional. Jaringan Kami, termasuk sistem informasi, TI dan infrastruktur serta jaringan operator lainnya yang memungkinkan pelanggan Kami melakukan interkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan atau gangguan dalam operasinya akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, listrik mati, kerusakan perangkat, kesalahan perangkat lunak jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa serupa lainnya.

Meskipun telah menerapkan Rencana Kelanjutan Bisnis yang komprehensif dan Rencana Pemulihan Bencana, Kami tidak dapat menjamin bahwa rencana tersebut akan berhasil sebagian atau sepenuhnya jika bagian dari jaringan tersebut mengalami kerusakan atau gangguan yang parah. Kerusakan apapun yang berujung pada gangguan operasi atau penyediaan layanan Kami, baik yang berasal dari gangguan operasional, bencana alam atau sebaliknya, dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Kami.

Jaringan Kami, terutama akses kabel jaringan menghadapi potensi ancaman keamanan, seperti pencurian atau perusakan yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap hasil operasional Kami

Jaringan dan peralatan, khususnya jaringan akses kabel Kami, menghadapi potensi ancaman keamanan baik fisik dan *cyber*. Ancaman fisik termasuk pencurian dan perusakan peralatan Kami dan serangan terorganisasi terhadap infrastruktur utama dengan maksud mengganggu kegiatan operasi. Selain itu, perusahaan telekomunikasi di seluruh dunia menghadapi peningkatan ancaman keamanan *cyber* sementara kegiatan bisnis menjadi semakin tergantung pada telekomunikasi dan jaringan komputer dan mengadopsi teknologi *cloud computing*. Ancaman keamanan *cyber* termasuk upaya mendapatkan akses tidak sah ke sistem Kami atau memasukkan virus komputer atau perangkat lunak berbahaya di sistem Kami untuk menyalahgunakan data konsumen dan informasi sensitif lainnya, merusak data atau mengganggu operasi Kami. Akses yang tidak sah juga dapat diperoleh melalui cara-cara tradisional seperti pencurian komputer *laptop*, perangkat data *portable* dan ponsel serta pengumpulan intelijen pada karyawan yang memiliki akses.

Meskipun hingga saat ini Kami belum pernah mengalami serangan *cyber* yang kuat, serangan *cyber* yang berhasil dapat membuat Kami mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaiki kerusakan atau mengembalikan data, menerapkan perubahan organisasi yang besar dan melakukan pelatihan untuk mencegah serangan serupa di masa yang akan datang serta kehilangan pendapatan dan biaya litigasi akibat dari penyalahgunaan informasi sensitif, dan menyebabkan rusaknya reputasi yang nyata. Kami melakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan, termasuk meningkatkan kerjasama dengan kepolisian, terutama di daerah yang rawan terhadap kegiatan kriminal dan secara teratur melakukan peningkatan keamanan data Kami. Namun demikian, tidak ada jaminan langkah-langkah pengamanan fisik dan *cyber* Kami akan berhasil. Kerusakan pada jaringan, peralatan atau data Kami dan kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan sebagai akibat dari serangan fisik dan *cyber* dapat mengganggu bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi secara material.

Kebocoran pendapatan dapat terjadi akibat kelemahan internal atau faktor eksternal dan jika terjadi, hal itu dapat berdampak negatif pada hasil usaha Kami

Kebocoran pendapatan adalah risiko umum bagi semua operator telekomunikasi. Kami berpotensi mengalami kebocoran pendapatan, atau kesulitan memperoleh pendapatan yang merupakan hak Kami, akibat kelemahan pada transaksi, penundaan proses transaksi, pelanggan yang tidak jujur atau faktor lainnya.

Kami telah mengambil langkah preventif untuk mengatasi potensi kebocoran pendapatan itu dengan meningkatkan fungsi pengendalian terhadap seluruh proses bisnis yang ada, menerapkan metode penjaminan pendapatan, memberlakukan kebijakan dan prosedur yang tepat serta menerapkan aplikasi sistem informasi guna menekan kebocoran pendapatan. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa tidak terjadi kebocoran pendapatan yang signifikan di masa depan atau kebocoran itu tidak akan berdampak negatif pada hasil usaha Kami.

Teknologi baru dapat berdampak negatif pada daya saing Kami

Industri telekomunikasi dicirikan oleh perubahan yang cepat dan signifikan pada sisi teknologi. Kami akan menghadapi peningkatan persaingan akibat teknologi yang tengah berkembang saat ini atau yang akan dikembangkan di masa depan. Pengembangan atau aplikasi teknologi, layanan atau standar baru atau alternatif di masa depan mensyaratkan perubahan pada model bisnis, pengembangan produk, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru yang substansial oleh Kami. Produk dan layanan baru dapat mahal untuk dikembangkan dan mendorong masuknya pesaing baru di pasar. Kami tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perkembangan perubahan teknologi di masa depan akan mempengaruhi operasi atau daya saing layanan Kami. Selanjutnya, Kami juga tidak dapat menjamin untuk dapat mengintegrasikan teknologi baru ke dalam model bisnis yang ada secara efektif.

Guna menjaga dan memperkuat pertumbuhan bisnis, saat ini Telkom tengah melakukan transformasi ke bisnis TIME. Sebagai bagian dari langkah transformasi ke bisnis TIME, Kami tengah berniat mengembangkan bisnis baru sehingga Kami dapat menyediakan konten bagi pelanggan telekomunikasi. Kami belum memiliki pengalaman substansial sebagai penyedia konten dan, Kami tidak dapat menjamin untuk dapat mengelola pertumbuhan bisnis Kami secara efektif.

Kami tidak dapat menjamin teknologi Kami tidak akan tertinggal, atau terlibat persaingan dengan teknologi baru di masa depan, atau Kami dapat memperoleh teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam kondisi yang berbeda dengan persyaratan komersial tertentu. Kegagalan Kami untuk bereaksi terhadap perubahan teknologi yang cepat dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Kami.

Satelit Kami memiliki masa operasi yang terbatas dan dapat rusak atau hancur selama masa operasi orbit. Kerugian atau kinerja yang berkurang dari satelit Kami, baik dikarenakan kerusakan perangkat atau dicabutnya lisensi, dapat merugikan kondisi keuangan, hasil operasi dan kemampuan untuk memberikan layanan

Satelit Telkom-1 dan Telkom-2 Kami memiliki masa operasi yang terbatas, saat ini diperkirakan akan berakhir masing-

masing pada tahun 2015 dan 2020. Sejumlah faktor mempengaruhi masa operasi satelit tersebut, termasuk kualitas konstruksinya, ketahanan sistem, subsistem dan komponen, cadangan bahan bakar di dalam, keakuratan peluncuran ke orbit, risiko terhadap badai mikrometeorit, atau peristiwa alam lainnya di angkasa, benturan dengan pecahan orbit, atau cara pengawasan dan pengoperasian satelit tersebut. Kami saat ini menggunakan kapasitas transponder satelit yang dikaitkan dengan banyak aspek dari bisnis Kami, termasuk penyewaan kapasitas tersebut dan *routing* untuk layanan sambungan jarak jauh internasional dan seluler.

Selain itu, peraturan yang dibuat Persatuan Telekomunikasi Internasional ("ITU") menjelaskan bahwa sebuah slot satelit yang dirancang khusus telah disediakan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak untuk menentukan pihak mana yang berwenang menggunakan slot tersebut. Saat ini, Kami memegang lisensi untuk menggunakan slot satelit khusus tersebut, jika satelit Telkom-1 dan Telkom-2 mengalami masalah teknis atau kerusakan, Pemerintah dapat menentukan bahwa Kami telah gagal memanfaatkan slot yang ada dengan lisensi yang Kami miliki sehingga dapat mendorong Pemerintah untuk mencabut lisensi Kami. Kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa Kami dapat mempertahankan penggunaan slot satelit khusus tersebut dengan cara yang dianggap cukup oleh Pemerintah.

Kami juga dalam proses mengembangkan satelit Telkom-3 yang mempunyai usia operasi hingga 15 tahun dan kapasitas transponder yang lebih tinggi, yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2012. Apabila gagal untuk meluncurkan Telkom-3, Kami akan menyewa kapasitas transponder dari pihak ketiga yang dapat menambah biaya operasional Kami.

Kami mempertahankan asuransi *in-orbit* untuk satelit Telkom-1 dan Telkom-2 dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan praktik dalam industri ini. Jika kerusakan atau kegagalan menyebabkan satelit Kami tidak dapat digunakan dan Kami gagal meluncurkan satelit Telkom-3, Kami mungkin akan memilih untuk menghentikan pengoperasian satelit Kami atau menyewa kapasitas transponder dari pihak ketiga daripada meluncurkan satelit baru. Penghentian bisnis satelit tersebut dapat menaikkan beban usaha yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi Kami yang lain, terutama di wilayah timur Indonesia yang saat ini sangat bergantung pada jangkauan satelit untuk menerima layanan telekomunikasi, serta dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Kami.

Kami menghadapi beberapa risiko terkait layanan internet

Kami saat ini menyediakan beragam layanan internet, termasuk *dial-up* dan *broadband internet access*, dan aplikasi terkait Internet lainnya. Kami menghadapi berbagai risiko dalam memberikan layanan ini.

Jaringan Kami mungkin rentan terhadap akses ilegal, virus komputer, ancaman dunia maya dan gangguan lainnya. Kami tidak dapat menjamin bahwa langkah-langkah pengamanan yang dilakukan tidak dapat dihentikan atau dengan kata lain gagal melindungi jaringan Kami. Akses illegal dapat mengganggu keamanan informasi rahasia yang disimpan oleh kami dan pelanggan di sistem komputernya. Sedangkan menghilangkan virus komputer dan masalah pengamanan lainnya dapat mengakibatkan gangguan, penundaan atau penghentian sementara layanan, sehingga menyebabkan Kami harus mengeluarkan biaya dan mengalihkan perhatian manajemen.

Selain itu, karena Kami menyediakan koneksi internet dan *host website* kepada pelanggan serta mengembangkan konten dan aplikasi internet, Kami dianggap memiliki keterkaitan dengan konten yang dialirkan melalui jaringan atau terpampang di *website* yang terdaftar di *host* Kami. Kami tidak dapat dan tidak melakukan pengawasan terhadap seluruh konten ini. Kami dapat menghadapi tuntutan hukum akibat keterkaitan dengan konten tersebut. Menurut pengalaman kami, kasus semacam ini dapat menghabiskan biaya untuk mempertahankan dan mengalihkan tenaga dan perhatian manajemen, sekaligus merusak reputasi Kami.

Risiko-Risiko Keuangan

Kami menghadapi risiko suku bunga

Hutang Kami termasuk pinjaman bank untuk mendanai operasi. Jika diperlukan, Kami selalu berupaya untuk mengurangi potensi risiko terhadap suku bunga dengan melakukan kontrak *swap* suku bunga untuk melakukan *swap* atas suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap atas tenor pinjaman tertentu. Namun, kebijakan lindung nilai (*hedging*) ini mungkin tidak cukup mengatasi risiko terhadap fluktuasi suku bunga dan hal ini dapat berdampak pada beban suku bunga yang besar dan berakibat buruk pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Kami.

Kami mungkin tidak berhasil mengelola risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar berpengaruh dan akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Kami. Sebagian besar kewajiban utang Kami dalam denominasi Rupiah dan sebagian besar belanja modal Kami dalam Dolar AS. Sebagian besar pendapatan Kami dalam Rupiah dan hanya sebagian kecil dalam Dolar AS (yang antara lain didapat dari layanan internasional). Kami dapat menambah hutang jangka panjang Kami dalam mata uang lain selain Rupiah, termasuk dalam Dolar AS, untuk mendanai belanja modal Kami.

Kami saat ini menerapkan kebijakan lindung nilai (*hedging*) yang berdasarkan *net open position* tahunan dari mata uang asing untuk melindungi usaha Kami dari risiko nilai tukar mata uang. Penerapan kebijakan lindung nilai tersebut dikaji tiap bulannya untuk mengantisipasi perubahan ekstrim pada nilai tukar mata uang.

Meskipun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS relatif stabil pada tahun 2011 pada tingkatan Rp9.000 per Dolar AS, Kami tidak dapat menjamin bahwa Kami akan mampu mengelola risiko nilai tukar dengan sukses di masa depan atau bahwa usaha, kondisi keuangan atau hasil operasi Kami tidak akan terpengaruh negatif akibat risiko nilai tukar.

Kami mungkin tidak mampu membiayai belanja modal yang dibutuhkan bagi Kami untuk tetap kompetitif di industri telekomunikasi di Indonesia

Industri layanan telekomunikasi adalah padat modal. Untuk menjadi kompetitif, Kami harus secara terus-menerus mengembangkan, memodernisasi dan memperbarui infrastruktur teknologi telekomunikasi, yang mencakup investasi modal substansial. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, belanja modal konsolidasi masing-masing berjumlah Rp19.161 miliar, Rp12.651 miliar dan Rp 14.603 miliar (US$1.610 juta). Selama tahun 2012, Kami berniat untuk mengalokasikan dana sebesar Rp18.871 miliar untuk mengoptimalisasi bisnis *legacy*, *new wave*, infrastruktur dan program-program penunjang. Kemampuan Kami untuk membiayai belanja modal di masa depan akan bergantung pada kinerja operasional masa depan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi terbaru, tingkat suku bunga dan keuangan, bisnis serta faktor-faktor lainnya, yang banyak di antaranya di luar kendali dan bergantung pada kemampuan Kami untuk mendapatkan tambahan pembiayaan eksternal. Kami tidak dapat menjamin bahwa pembiayaan tambahan akan tersedia bagi Kami dalam ketentuan yang sesuai secara komersial, atau akan tersedia pembiayaan tambahan sama sekali. Selain itu, Kami hanya dapat menambah pembiayaan sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang Kami. Oleh karenanya, Kami tidak dapat menjamin bahwa Kami akan memiliki sumber modal yang cukup untuk mengembangkan atau memperluas teknologi infrastruktur telekomunikasi agar dapat berkompetisi di pasar telekomunikasi Indonesia. Kegagalan Kami melakukan hal tersebut dapat memberi dampak yang merugikan secara material terhadap usaha Kami, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha.

Risiko-Risiko Hukum dan Kepatuhan

Jika Kami terbukti melakukan penetapan harga oleh komisi anti-monopoli Indonesia dan tuduhan class action, Kami dapat dikenakan kewajiban yang dapat menurunkan pendapatan Kami dan berdampak negatif pada bisnis, reputasi dan keuntungan Kami

Pada tanggal 1 November 2007, Komite Pengawas Persaingan Usaha Indonesia ("KPPU") menerbitkan keputusan mengenai investigasi awal terhadap Kami, Anak Perusahaan Kami dengan kepemilikan saham mayoritas, Telkomsel, dan tujuh Perusahaan telekomunikasi lainnya, atas tuduhan penetapan harga layanan SMS dan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti-monopoli ("UU No.5/1999"). Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa Telkomsel, XL Axiata, Tbk. ("XL"), PT Bakrie Telecom, Tbk. ("Bakrie Telecom"), PT Mobile-8 Telecom, Tbk. (sekarang Smartfren) ("Mobile-8") dan PT Smart Telecom ("Smart Telecom") bersama-sama melanggar Pasal 5 UU No.5/1999. Mobile-8 mengajukan banding atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana XL, Indosat, PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison"), Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler ("Natrindo") dan Perusahaan Kami dihadirkan sebagai turut tergugat dalam persidangan, sementara Perusahaan dan Telkomsel mengajukan banding atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bandung. Pada tanggal 11 April 2011, Mahkamah Agung memerintahkan penggabungan banding untuk ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lihat bagian "Litigasi dan Perkara Hukum yang sedang dihadapi Perusahaan". Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mempertimbangkan keberatan atas keputusan KPPU berdasarkan pada pengkajian kembali atas keputusan KPPU dan berkas-berkas yang disampaikan oleh KPPU tetapi Kami tidak dapat menjamin keputusan KPPU akan ditolak. Jika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang tidak menguntungkan Perusahaan dan Telkomsel, Kami dapat dikenai denda dengan jumlah tergantung pada putusan Pengadilan Negeri yang dapat berdampak negatif pada bisnis, reputasi dan keuntungan Kami.

Sejumlah gugatan dihadapi Telkomsel dan Indosat selama tahun 2007 dan 2008 di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, terkait dengan kepemilikan silang Temasek Holding terdahulu atas saham Telkomsel dan Indosat sehingga diduga telah mengakibatkan penetapan harga atas layanan telekomunikasi yang merugikan masyarakat. Penuntut lalu mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi. Pada tanggal 27 Januari 2010, pengadilan memutuskan gugatan *class action* yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima karena penggugat menolak membuktikan kecakapan hukumnya dan dua anggota penggugat dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil penggugat. Pada tanggal 24 Mei 2010, hakim memutuskan bahwa gugatan *class action* yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima dengan alasan gugatan itu dianggap tidak serius dan penggugat gagal membuktikan kecakapan hukumnya sebagai wakil penggugat. Kami tidak dapat menjamin bahwa pelanggan Kami yang lain tidak akan mengajukan kasus serupa di masa depan. Jika Pengadilan Negeri dalam perkara *class action* baru, menerbitkan putusan yang berpihak pada penggugat, Hal tersebut dapat berdampak negatif bagi bisnis, reputasi dan keuntungan Kami.

Pernyataan berisi perkiraan yang mungkin tidak akurat

Laporan Tahunan ini disertai pernyataan yang berisi tentang pengumuman tentang strategi Telkom saat ini serta proyeksi kinerja operasional dan prospek usaha di masa depan. Penggunaan kata "percaya," "mengharapkan"

"mengantisipasi," "memperkirakan," "memproyeksikan" dan kata yang serupa adalah untuk menunjukkan pernyataan yang sifatnya memperkirakan. Selain itu, seluruh pernyataan, kecuali pernyataan yang berisi data historis merupakan pernyataan yang sifatnya memperkirakan. Walau Kami yakin ekspektasi yang terkandung di dalamnya adalah masuk akal, Kami tidak dapat memberi jaminan perkiraan itu dapat terealisasi nantinya. Pernyataan semacam ini terkait dengan risiko dan situasi ketidakpastian, termasuk dinamika ekonomi, situasi sosial dan politik di Indonesia dan risiko lain yang disebutkan dalam "Faktor Risiko". Seluruh pernyataan yang sifatnya memperkirakan, baik tertulis atau pun verbal, oleh Kami atau orang yang mewakili Kami adalah terkait dengan risiko tersebut.

Risiko-Risiko Regulasi

Kami beroperasi di area hukum dan undang-undang yang tengah mengalami perubahan signifikan. Perubahan Ini akan menimbulkan peningkatan kompetisi, berujung pada penurunan margin dan pendapatan operasional, di antaranya akan memberikan efek material negatif kepada Kami.

Reformasi peraturan telekomunikasi Indonesia yang telah dimulai oleh Pemerintah pada tahun 1999 akan mengakibatkan liberalisasi industri, termasuk penghilangan hambatan bagi masuknya dan terjadinya persaingan. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, volume dan kompleksitas dari perubahan peraturan telah mengakibatkan kondisi peraturan yang tidak menentu. Selain itu, sejalan dengan perubahan peraturan dan hukum di sektor telekomunikasi Indonesia, perusahaan pesaing yang memiliki sumber daya lebih besar dari pada kami, dapat memasuki ke sektor telekomunikasi Indonesia dan bersaing dengan kami dalam melayani jasa telekomunikasi. Lebih jauh lagi, kami tidak mungkin mengantisipasi kebijakan yang dapat diterapkan pada teknologi baru.

Kami memperoleh pendapatan signifikan dari melayani jasa interkoneksi karena kami memiliki jaringan terbesar di Indonesia dan para pesaing kami harus membayar tarif untuk menghubungkan dengan jaringan kami. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi ("Kemenkominfo") telah mengatur ketentuan ini sejak tahun 2007 dan menetapkan tarif pada "biaya" tertentu yang dilaporkan oleh Kami dan Telkomsel sebagai penyedia layanan yang dominan, dengan Indosat dimana "biaya" jaringan selulernya dijadikan perbandingan. Berdasarkan kebijakan Kemenkominfo, tarif layanan interkoneksi saat ini yang berlaku, efektif pada tahun 2011, telah menurunkan tarif rata-rata sebesar 1,5% hingga 3,0% dibandingkan dengan tarif yang berlaku efektif pada tahun 2008. Lihat bagian "Peraturan – Interkoneksi."

Sebagai contoh lain, pada tahun 2008, Pemerintah mensyaratkan operator telekomunikasi untuk memperbolehkan para pesaing itu untuk memanfaatkan menara mereka tanpa ada diskriminasi. Para pesaing kami dapat menikmati potensi penghematan biaya yang besar daripada yang kami lakukan karena kami memiliki jaringan terbesar dan telah berinvestasi untuk membangun menara di berbagai wilayah. Lebih lanjut lagi, para pesaing kami memperoleh akses ke wilayah-wilayah yang sebenarnya mereka tidak dapat mengaksesnya karena sangat jarang atau tidak ada menara telekomunikasi berada di wilayah perkotaan yang padat penduduk sedangkan kami memiliki lebih sedikit manfaat karena kami telah menguasai lokasi di beberapa tempat. Lihat bagian "Regulasi – Menara Telekomunikasi."

Di masa depan, Pemerintah mungkin akan mengumumkan atau menerapkan perubahan peraturan lainnya yang dapat berakibat negatif bagi bisnis kami atau lisensi usaha yang ada. Kami tidak dapat meyakinkan bahwa kami dapat bersaing dengan operator telekomunikasi nasional dan asing lainnya, bahwa perubahan peraturan itu tidak akan menghemat biaya para pesaing kami atau justru sebaliknya menekan pendapatan kami, atau bahwa perubahan peraturan itu, revisi atau intepretasi dari peraturan dan hukum yang berlaku saat ini atau di masa depan yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak akan berdampak negatif bagi bisnis dan hasil-hasil usaha kami.

Penghapusan layanan SMS premium oleh pemerintah dapat berdampak negatif bagi pendapatan Perusahaan yang berasal dari layanan telepon seluler serta berakibat dikenakannya sanksi bagi Kami.

Telkomsel, Anak Perusahaan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki Perusahaan dan mengoperasikan layanan telekomunikasi seluler, memperoleh pendapatan yang besar dari layanan SMS Premium dalam beberapa tahun sebelumnya. Layanan ini termasuk layanan musik dan *ring tones*, penyediaan *wall paper* untuk *smartphone* dan gambar lainnya, pemberian suara untuk kontes tertentu dan *polling* serta layanan konten yang di antaranya horoskop, cuplikan ayat Al Qur'an dan kilas berita. Pada tahun 2011, Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyerukan agar perusahaan telekomunikasi meniadakan layanan SMS Premium dan memberitahukan penghapusan layanan tersebut dengan memberi opsi untuk menghentikan langganan. Perusahaan ini juga diminta untuk menghentikan promosi layanan SMS Premium hingga pemberitahuan lebih lanjut, merangkum besaran biaya yang dikenakan untuk layanan SMS Premium dan mengembalikan jumlah yang telah didebet dari pelanggan untuk layanan SMS Premium itu, dan melaporkan secara mingguan kepada BRTI terkait tindakan yang diambil. BRTI mengambil tindakan berdasarkan keluhan yang diterima dari pelanggan karena telah dikenakan biaya atas layanan yang mereka tidak sadari telah berlangganan dan sulit untuk berhenti berlangganan dari layanan tersebut. Pelanggan lain mengeluhkan bahwa biaya yang dikenakan tidak jelas dan sulit untuk diawasi, terutama oleh pelanggan layanan telepon prabayar. BRTI telah

menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melarang penyediaan layanan SMS Premium tersebut tetapi mengkaji ulang terlebih dulu jenis layanannya dan memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memilih berlangganan atau tidak dari layanan itu. Tindakan BRTI ini mendapat dukungan dari Menkominfo.

Gangguan terhadap layanan SMS Premium Telkomsel yang disebabkan oleh tindakan BRTI telah berdampak pada turunnya pendapatan dari layanan ini. Tindakan serupa yang diambil BRTI atau Menkominfo di masa depan dapat berdampak sama yaitu mengurangi atau membatasi pertumbuhan pendapatan Telkomsel dari layanan ini atau produk terkait atau produk baru. BRTI atau Menkominfo juga dapat mengambil tindakan yang lebih agresif yang dapat mengganggu penyediaan produk Telkomsel atau mengenakan denda atau sanksi administratif lainnya. Salah satu faktor ini dapat berdampak materil maupun negatif terhadap operasional dan kondisi keuangan Kami.

Masuknya operator telekomunikasi baru ke Indonesia sebagai penyedia layanan sambungan langsung internasional dapat mengurangi marjin usaha, pangsa pasar dan hasil operasi layanan telekomunikasi internasional Kami

Perusahaan Kami memiliki lisensi dan telah melayani layanan Sambungan Langsung Internasional (SLI) pada tahun 2004 dan memperoleh pangsa pasar yang signifikan pada akhir tahun 2006. Indosat, salah satu pesaing utama Kami, memasuki pasar ini sebelumnya dan terus mempertahankan pangsa pasar yang besar untuk layanan SLI. Pada tahun 2009, Bakrie Telecom telah memperoleh lisensi SLI untuk mulai melakukan layanan sambungan jarak jauh internasional dengan menggunakan kode akses 009 meskipun belum memperoleh izin operasional. XL Axiata dan Axis akan diberi izin di tahun 2012. Operasi para operator yang sudah ada dan masuknya operator baru ke pasar SLI, termasuk layanan VoIP oleh operator tersebut, terus menjadi ancaman kompetensi bagi Kami. Kami tidak dapat menjamin bahwa efek yang merugikan itu tidak akan berlangsung terus atau persaingan yang semakin tinggi itu tidak akan mengurangi pangsa pasar Kami atau marjin usaha dan hasil operasi layanan telepon tidak bergerak Kami.

Kami menghadapi risiko terkait pembukaan kode sambungan langsung jarak jauh (SLJJ)

Dalam upaya untuk meliberalisasi layanan SLJJ, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang meminta tiap penyedia layanan SLJJ kode akses tiga digit yang digunakan pelanggan saat melakukan panggilan SLJJ. Pada tahun 2005, Menkominfo mengumumkan kode akses tiga digit unruk panggilan SLJJ akan diterapkan secara bertahap dalam waktu lima tahun dan memberikan kepada Kami kode akses "017" untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengizinkan Kami untuk memperluasnya pada seluruh kode area. Indosat diberikan "011" sebagai kode akses SLJJ. Kami diminta untuk membuka kode akses SLJJ di seluruh wilayah yang tersisa pada tanggal 27 September 2011.

Kami tidak yakin para pesaing Kami saat ini telah mengimplementasikan kode akses SLJJ "01X". Implementasi dari tiap kode akses SLJJ baru berpotensi meningkatkan persaingan dengan menawarkan pelanggan Kami lebih banyak pilihan untuk layanan SLJJ. Selain itu, pembukaan kode akses SLJJ baru ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kompetisi dan lebih sedikit kerjasama di antara pemain lama industri, antara lain dapat mengakibatkan penurunan marjin dan pendapatan, yang semuanya mungkin memiliki dampak yang signifikan pada Kami. Kami tidak dapat menjamin bahwa kode akses Kami akan tetap utuh atau berhasil dalam meningkatkan pendapatan Kami dari layanan SLJJ.

Peraturan baru untuk konfigurasi menara BTS dapat menunda pendirian menara BTS baru atau mengubah penempatan menara yang ada dan mengurangi posisi kepemimpinan kami dengan mewajibkan kami membagi menara dengan pesaing Kami

Pada tahun 2008 dan 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pembangunan, utilisasi dan pembagian menara BTS. Menyusul regulasi berdasarkan peraturan tersebut, pembangunan menara BTS memerlukan izin dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menentukan penempatan menara, lokasi dimana menara dapat dibangun, dan juga untuk menentukan biaya lisensi untuk membangun infrastruktur menara. Peraturan tersebut juga mewajibkan Kami untuk membiarkan operator lain dapat meminjam ruang dan menggunakan menara telekomunikasi Kami tanpa ada diskriminasi.

Peraturan ini juga dapat berdampak negatif terhadap alokasi pembangunan atau rencana ekspansi dari menara BTS Kami karena pengembangan menara baru akan lebih rumit. Peraturan ini juga berdampak buruk bagi menara BTS Kami yang telah ada jika pemerintah membuat perubahan regulasi terhadap penempatan menara yang telah ada.

Persyaratan untuk membagi ruang dalam menara seluler Kami (Telkomsel) dan menara telepon nirkabel tidak bergerak (Telkom Flexi) juga akan merugikan Kami sebagai pemimpin pasar dan mengizinkan pesaing untuk berkembang cepat, terutama di daerah perkotaan, dimana tempat ruang baru bagi menara tambahan akan sulit untuk didapatkan.

Efektif 2011, Pemerintah daerah diijinkan untuk membebankan biaya hingga 2,0% dari nilai pajak menara yang dibebankan. Meskipun kita tidak berharap jumlah

biaya ini untuk menjadi material pada tahun 2012, tidak ada jaminan bahwa biaya tersebut tidak akan meningkat di masa yang akan datang.

Risiko Kompetisi Terkait dengan Telekomunikasi Tidak Bergerak Kami

Kami mungkin dapat kehilangan pelanggan sambungan telepon kabel dan pendapatan yang diperoleh dari layanan suara kabel terus menerus sehingga dapat berpengaruh negatif secara material terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Kami

Kami terus kehilangan pelanggan telepon kabel dan pendapatan dari layanan suara kabel yang kian menurun selama beberapa tahun terakhir akibat meningkatnya popularitas layanan suara bergerak dan komunikasi alternatif lainnya seperti VoIP. Tarif untuk layanan bergerak makin menurun dalam beberapa tahun ini, yang lebih lanjut mempercepat penggantian layanan suara kabel oleh layanan bergerak. Jumlah pelanggan kabel tidak bergerak menurun 0,9% pada akhir tahun 2010 dibandingkan dengan akhir tahun 2009 dan mengalami peningkatan sebesar 3,6% pada akhir tahun 2011. Pendapatan dari layanan suara kabel juga turun 3,2% di tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 dan penurunan sebesar 6,5% pada tahun 2011. Persentase pendapatan berasal dari layanan suara kabel Kami dari total pendapatan operasional terus menurun dari 16,0% pada tahun 2010 ke 14,4% pada tahun 2011.

Kami telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi dampak penurunan pelanggan telepon kabel dan menstabilisasi pendapatan Kami dari layanan suara kabel. Namun, Kami tidak dapat menjamin bahwa Kami akan berhasil dalam menanggulangi dampak negatif dari pergeseran layanan suara kabel oleh layanan suara bergerak dan komunikasi alternatif lainnya atau memperlambat penurunan pendapatan yang berasal dari layanan suara kabel. Migrasi dari layanan suara kabel ke layanan bergerak dan komunikasi alternatif lainnya mungkin kian berkembang di masa depan sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan layanan suara kabel Kami dan berdampak negatif secara material bagi hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek menyeluruh dari usaha Kami.

Layanan telepon nirkabel tidak bergerak Kami mengalami persaingan ketat

Bisnis telepon nirkabel tidak bergerak Kami menghadapi persaingan dengan meningkatnya jumlah operator, termasuk Bakrie Telecom dan Indosat dan dari layanan seluler, SMS, VoIP, dan surat elektronik. Selain itu, saat ini tidak ada *bandwidth* frekuensi baru yang disediakan Pemerintah untuk ekspansi bisnis telepon nirkabel tidak bergerak Kami. Di area padat penduduk, operasi telepon nirkabel tidak bergerak Kami telah memanfaatkan seluruh *bandwidth* frekuensi yang ada.

Persaingan di pasar telepon seluler dan nirkabel tidak bergerak tetap ketat, dimana tiap operator meluncurkan paket penawaran yang menarik dan kreatif. Menurunnya tarif rata-rata akibat tingginya persaingan di pasar seluler telah berdampak pada turunnya ARPU Telkom Flexi yang diikuti penurunan ARPU bulanan dari Rp22.000 pada tahun 2009, Rp15.000 pada tahun 2010 dan Rp9.500 pada tahun 2011.

Kami telah mengambil langkah beragam untuk menanggulangi dampak kompetisi ketat dalam bisnis kabel tidak bergerak dan keterbatasan kapasitas *bandwidth*. Namun, Kami tidak dapat menjamin bahwa Kami akan berhasil dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Kompetisi mungkin akan berkembang lebih lanjut di masa depan, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan dari layanan nirkabel tidak bergerak Kami dan berdampak negatif terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha secara menyeluruh.

Layanan data dan internet Kami menghadapi peningkatan persaingan, dan kami dapat mengalami penurunan marjin dari layanan tersebut akibat tingginya persaingan

Layanan data dan internet Kami mengalami peningkatan kompetisi dari operator data dan internet serta operator bergerak.

Operator akses *broadband* nirkabel yang telah memiliki lisensi pada tahun 2009 dengan teknologi Wi-Max memulai bisnis tersebut di kuartal keempat tahun 2010 (contohnya First Media). Operator lainnya diperkirakan akan mengoperasikan bisnisnya pada tahun 2012 dan akan berdampak negatif bagi pangsa pasar dan pendapatan layanan Speedy *Broadband* Kami.

Kepopuleran BlackBerry dan layanan telah meningkatkan jumlah pelanggan *mobile broadband*. Layanan ini juga memberikan dampak negatif bagi layanan data dan internet sebagai pilihan alternatif atau pergantian produk bagi konsumen Kami.

Kami telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi dampak dari kompetisi ketat dalam bisnis data dan internet. Kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa Kami akan sukses dalam mengatasi dampak negatif. Kompetisi akan lebih intensif di masa depan akan berdampak negatif bagi hasil operasi, kondisi dan prospek usaha secara keseluruhan.

Risiko-Risiko Terkait dengan Bisnis Seluler Kami (Telkomsel)

Persaingan antar operator yang ada dan pemain baru di industri ini dapat berdampak negatif pada bisnis seluler Kami

Bisnis seluler di Indonesia sangat kompetitif. Persaingan antar penyedia layanan seluler di Indonesia terjadi dalam berbagai faktor, termasuk harga, kualitas jaringan dan jangkauan, ragam layanan, fitur yang ditawarkan serta layanan konsumen. Bisnis seluler Kami yang dioperasikan oleh Anak Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas, Telkomsel, terutama bersaing dengan Indosat dan XL. Beberapa operator GSM dan CDMA juga menyediakan layanan seluler di Indonesia, termasuk Hutchison, Natrindo, Smart Telecom dan Bakrie Telecom. Selain penyedia layanan seluler, Menkominfo dapat menerbitkan lisensi bagi pemain seluler baru di masa depan dan pemain tersebut akan bersaing dengan Kami.

Kami meyakini bahwa persaingan bisnis layanan seluler akan terus meningkat. Adanya penyedia layanan seluler baru maupun yang ada saat ini akan menciptakan produk dan paket layanan yang lebih menarik, teknologi yang lebih canggih atau konvergensi dari beragam layanan telekomunikasi, sehingga berdampak pada tingginya tingkat pemutusan layanan, ARPU yang rendah atau penurunan, atau perlambatan pertumbuhan pada basis pelanggan seluler Kami.

Peta persaingan dalam bisnis layanan seluler juga dapat terpengaruh oleh konsolidasi industri. Pada bulan Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk menggunakan logo dan merek yang sama dengan nama "smartfren". Pada tanggal 18 Januari 2011, Mobile-8 mengakuisisi sejumlah besar saham di Smart Telecom, dan pada tanggal 12 April 2011 PT mobile-8 Telecom, Tbk. berubah nama menjadi PT Smartfren Telecom, Tbk. Penyedia layanan seluler lainnya juga dapat melakukan konsolidasi di masa yang akan datang.

Persaingan antar penyedia teknologi baru bersama, masuknya pemain baru, pemain yang sudah ada dan konsolidasi antar penyedia layanan dapat berdampak negatif pada posisi Kami, bisnis layanan seluler, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Kami.

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF ATAS RISIKO PASAR

Kami menghadapi risiko pasar yang muncul akibat perubahan nilai tukar, suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas, yang tentunya akan berdampak pada Kami. Kami tidak secara umum melakukan lindung nilai atas kewajiban jangka panjang dalam mata uang asing tetapi pada kewajiban tahun berjalan Kami. Pada tanggal 31 Desember 2011, aset Kami dalam mata uang asing mencapai 36,6% terhadap kewajiban dalam mata uang asing. Potensi terhadap risiko suku bunga dikelola melalui kombinasi kewajiban dan aset tetap dan tidak tetap, termasuk aset dengan suku bunga tetap jangka pendek. Potensi risiko pasar tersebut berfluktuasi selama tahun 2009, 2010 dan 2011 seiring dengan ekonomi Indonesia yang terpengaruh oleh perubahan pada nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dan suku bunga itu sendiri. Kami tidak dapat memperkirakan apakah kondisi itu akan berlanjut di 2012 atau seterusnya.

Risiko Nilai Tukar

Potensi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar terutama yang berasal dari transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman dalam mata uang asing. Kewajiban termasuk hutang dan piutang dalam denominasi mata uang Dolar AS, Yen Jepang. Meningkatnya risiko nilai tukar mata uang asing terhadap kewajiban Perusahaan dan Anak Perusahaannya diharapkan dapat terkompensasi sebagian oleh deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing dengan memperhatikan kecenderungan perubahan pada nilai tukar di masa datang. Penjelasan lebih lanjut mengenai aset dan liabilitas moneter Kami dalam valuta asing dapat ditemukan pada Catatan 43 di Laporan Keuangan Konsolidasian.

Informasi yang disajikan dalam tabel berikut didasarkan pada asumsi kurs jual dan beli Dolar AS dan mata uang lainnya, yang dikutip dari Reuters pada tanggal 31 Desember 2011 untuk aset dan kewajiban moneter. Kurs beli dan jual posisi per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp9.060 dan Rp9.075 terhadap US$1.

Namun Kami yakin asumsi ini dan informasi yang digambarkan dalam tabel berikut mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk fluktuasi atau depresiasi Rupiah di masa depan.

	Saldo per 31 Desember 2011		2012	2013	2014	2015	2016	Seterusnya	Nilai Wajar
	Mata Uang Asing (juta)	Setara Rp (Rp juta)	(Rp juta)						
ASET									
Kas dan Setara Kas									
US Dollar	139,03	1.260.347	1.260.347	-	-	-	-	-	1.260.347
Euro	7,72	70.038	70.038	-	-	-	-	-	70.038
Japanese Yen	1,18	138	138	-	-	-	-	-	138
Singapore Dollar	1,04	9.398	9.398	-	-	-	-	-	9.398
Malaysian Ringgit	0,01	99	99	-	-	-	-	-	99
Hongkong Dollar	0,04	362	362	-	-	-	-	-	362
Investasi Sementara									
US Dollar	6,34	57.418	57.418	-	-	-	-	-	57.418
Piutang Usaha									
Piutang usaha yang mempunyai hubungan istimewa									
US Dollar	4,73	42.862	42.862	-	-	-	-	-	42.862
Pihak Ketiga									
US Dollar	88,55	802.386	802.386	-	-	-	-	-	802.386
Euro	0,06	506	506	-	-	-	-	-	506
Piutang lain-lain									
US Dollar	24,99	226.626	226.626	-	-	-	-	-	226.626
Australian Dollar	0,01	91	91	-	-	-	-	-	91
Great Britain Pound Sterling	0,03	264	264	-	-	-	-	-	264
Singapore Dollar	0,01	69	69	-	-	-	-	-	69
Euro	0,01	100	100	-	-	-	-	-	100
Aset lancar lainnya									
US Dollar	0,16	1.449	1.449	-	-	-	-	-	1.449
Uang muka aset tak lancar lainnya									
US Dollar	10,20	92.458	92.458	-	-	-	-	-	92.458
KEWAJIBAN									
Utang usaha yang mempunyai hubungan istimewa									
US Dollar	0,41	3.736	3.736	-	-	-	-	-	3.736
Pihak Ketiga									
US Dollar	427,73	3.879.101	3.879.101	-	-	-	-	-	3.879.101
Euro	1,03	9.337	9.337	-	-	-	-	-	9.337
Great Britain Pound Sterling	0,09	820	820	-	-	-	-	-	820
Japanese Yen	0,51	60	60	-	-	-	-	-	60
Singapore Dollar	0,05	497	497	-	-	-	-	-	497
Malaysian Ringgit	0,18	1.596	1.596	-	-	-	-	-	1.596
Hutang lain-lain									
US Dollar	0,52	4.675	4.675	-	-	-	-	-	4.675
Beban yang masih harus dibayar									
US Dollar	54,84	497.345	497.345	-	-	-	-	-	497.345
Japanese Yen	35,61	4.165	4.165	-	-	-	-	-	4.165
Singapore Dollar	1,58	14.345	14.345	-	-	-	-	-	14.345
Great Britain Pound Sterling	-	11	11	-	-	-	-	-	11
Euro	0,94	8.546	8.546	-	-	-	-	-	8.546
Australian Dollar	0,01	53	53	-	-	-	-	-	53
Uang muka dari pelanggan dan pemasok									
US Dollar	0,86	7.760	7.760	-	-	-	-	-	7.760
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun									
US Dollar	66,61	604.169	604.169	-	-	-	-	-	604.169
Japanese Yen [1]	767,90	89.813	89.813	-	-	-	-	-	89.813
Wesel bayar									
US Dollar	74,75	678.346	351.616	272.402	54.328	-	-	-	678.346
Hutang jangka panjang									
US Dollar	140,99	1.278.955	-	296.836	296.895	242.319	187.193	255.712	1.278.955
Japanese Yen	9.214,77	1.077.760	-	89.813	89.813	89.813	89.813	718.508	1.077.760

(1) Hutang jangka panjang dalam tabel terdiri dari pinjaman dalam mata uang asing, pinjaman penerusan (two step loans), kewajiban penggabungan usaha, pinjaman bank jangka panjang, obligasi dan wesel yang masing-masing termasuk kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Risiko Suku Bunga

Eksposur terhadap fluktuasi tingkat bunga terutama merupakan hasil dari perubahan pada tingkat bunga mengambang diterapkan untuk utang jangka panjang. Risiko ini berkaitan dengan pinjaman di bawah program pinjaman Pemerintah yang telah digunakan untuk membiayai pengeluaran modal Kami. Fluktuasi suku bunga dipantau untuk meminimalkan dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dengan tingkat bunga variabel menghadapkan Perusahaan dan Anak Perusahaan pada risiko suku bunga. Untuk mengukur risiko pasar dari fluktuasi suku bunga, Perusahaan dan Anak Perusahaan terutama menggunakan profil tingkat bunga dan jatuh tempo dari aset dan kewajiban keuangan berdasarkan perubahan jadwal dari tingkat bunga.

Aliran kas aktual dari instrumen utang dalam denominasi Rupiah, Dolar AS, Euro dan Yen Jepang, seperti yang disajikan dalam tabel. Informasi yang disampaikan dalam tabel telah dihitung berdasarkan asumsi berikut: (i) suku bunga tetap untuk deposito berjangka Rupiah berdasarkan suku bunga rata-rata yang berlaku untuk penempatan berjangka tiga bulan efektif sejak tanggal 31 Desember 2011 yang dikenakan oleh bank tempat deposito itu ditempatkan; (ii) suku bunga variabel untuk kewajiban jangka panjang dalam Rupiah terhitung sejak tanggal 31 Desember 2011 dan berdasarkan ketentuan suku bunga dalam kontrak yang dihitung dari suku bunga deposito tabungan rata-rata 3 bulan untuk masa enam bulan yang berlaku untuk sertifikat Bank Indonesia bertenor tiga bulan atau berdasarkan suku bunga rata-rata yang dikenakan bank; (iii) suku bunga tetap atas deposito dalam Dolar AS berdasarkan suku bunga rata-rata yang berlaku untuk penempatan tiga bulan yang dikenakan lembaga pemberi pinjaman manapun tempat deposito itu ditempatkan per 31 Desember 2011; dan (iv) nilai efek yang dapat dijual dihitung berdasarkan nilai efek itu per 31 Desember 2011. Namun, asumsi ini dapat berubah di masa depan. Asumsi ini berbeda dengan suku bunga yang digunakan dalam perhitungan Laporan Keuangan Konsolidasi Kami; karenanya, jumlah yang tertera di tabel dapat berbeda dengan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Kami.

Risiko Suku Bunga

	Saldo per 31 Desember 2011			Jatuh Tempo						
	Mata Uang Asing (juta)	Setara Rp (Rp juta)	Suku Bunga (%)	2012	2013	2014	2015 (Rp juta)	2016	Seterusnya	Nilai Wajar
ASET										
Suku Bunga Tetap										
Kas dan Setara Kas										
Deposito berjangka										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	7.065.069	7.065.069	-	7.065.069	-	-	-	-	-	7.065.069
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dollar AS										
Pokok Pinjaman	113,00	1.022.836	-	1.022.836	-	-	-	-	-	1.022.836
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro										
Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dollar Singapura										
Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Sementara Tersedia untuk Dijual										
Rupiah	303.710	303.710	-	303.710	-	-	-	-	-	303.710
Dolar AS	6,34	57.418	-	57.418	-	-	-	-	-	57.418
KEWAJIBAN										
Suku Bunga Variable										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	100.461	100.461	6-15,3	100.461	-	-	-	-	-	100.461
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suku Bunga Tetap										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutang jangka panjang[1]										
Suku Bunga Variable										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	10.579.426	10.579.426	-	3.591.992	3.296.988	2.157.391	966.004	259.840	307.211	10.747.350
Bunga	1.308.791	1.308.791	9,0-14,0	506.526	415.304	199.797	85.207	31.958	69.999	-
U.S. Dollar										
Pokok Pinjaman	205	1.857.071	-	868.822	420.369	202.354	147.812	147.025	70.689	1.807.079
Bunga	7	59.213	1,14-6,67	24.992	16.997	8.288	5.175	2.885	876	-
Suku Bunga Tetap										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	1.005.000	-	1.995.000	3.181.005
Bunga	2.071.511	2.071.511	-	299.970	299.970	299.970	253.070	203.490	715.041	-
Dollar AS										
Pokok Pinjaman	80	725.805	-	94.522	148.868	148.868	94.508	40.168	198.871	761.610
Bunga	13	117.805	-	30.749	25.287	18.655	12.023	9.187	21.904	-
Yen Jepang										
Pokok Pinjaman	9.983	1.167.573	-	89.813	89.813	89.813	89.813	89.813	718.508	1.203.443
Bunga	2.090	244.454	-	35.592	32.709	29.925	27.140	24.425	94.663	-
Capital lease										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	467.688	467.688	-	179.156	122.912	92.601	23.975	16.445	32.599	467.688
Bunga	130.896	130.896	-	62.783	31.813	16.067	8.626	6.048	5.559	130.896
Dollar AS										
Pokok Pinjaman	42.140	42.140	-	16.734	24.099	1.307	-	-	-	42.140
Bunga	1.198	1.198	-	846	326	26	-	-	-	1.198

Risiko Kredit

Perusahaan dan Anak Perusahaan menghadapi risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lainnya. Risiko kredit dikelola melalui pemantauan saldo yang tersisa dan penagihan piutang usaha dan piutang lainnya. Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan nilai minimal dari risiko kredit mengingat bahwa Perusahaan dan Anak Perusahaan telah menyediakan penyisihan yang cukup atas penurunan nilai piutang untuk menutup kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang berdasarkan kerugian historis yang ada.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi di mana Perusahaan dan Anak Perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Pengelolaan risiko likuiditas yang hati-hati menyiratkan upaya menjaga kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Perusahaan dan Anak Perusahaan terus melakukan analisis untuk memonitor rasio posisi keuangan, antara lain, rasio likuiditas, rasio utang terhadap persyaratan perjanjian utang.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Lebih lanjut, pasal 74 undang-undang yang sama menjadi dasar bagi Telkom dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dalam tataran global disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* ("CSR").

Penyampaian laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 66 (2c) undang-undang yang sama yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sebagai salah satu BUMN, Telkom berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL"), yang pada hakekatnya mempunyai tujuan serupa dengan CSR. Dalam pelaksanaannya, bentuk-bentuk kegiatan dalam PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan PKBL berasal dari penyisihan laba Perusahaan bagian pemerintah. Penggunaan dana kegiatan PKBL untuk tahun 2011 berjumlah Rp302,7 miliar. Untuk tahun 2011, pembiayaan pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 berasal dari anggaran Perusahaan sebesar Rp32 miliar.

Dana PKBL digunakan untuk kegiatan Program Kemitraan yang meliputi penyaluran pinjaman bergulir dan kegiatan lain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan bina lingkungan atau pengembangan masyarakat meliputi bantuan penyediaan sarana dan prasarana, bantuan bencana alam dan bantuan lain untuk masyarakat. Sama halnya dengan bina lingkungan, dana CSR digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan lainnya untuk masyarakat dan program pelestarian lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2011, mencakup program pelestarian lingkungan terutama yang terkait dengan inisiatif mitigasi emisi karbon ("CO2"), program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat, dan program bantuan bencana alam dan bantuan masyarakat.

PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN

Komitmen Kami untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dilaksanakan melalui berbagai program, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan masyarakat. Dampak lingkungan yang timbul akibat operasional Perusahaan harus ditekan serendah mungkin dan Kami bertanggung jawab atas dampak tersebut.

Oleh sebab itu, praktik ramah lingkungan harus dilaksanakan di setiap kegiatan operasi Perusahaan. Hal ini dijalankan bukan saja dalam rangka mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh dari itu, untuk mengikuti etika, norma, dan standar yang berlaku secara universal terutama dalam mengatasi perubahan iklim.

Dalam kaitan ini, Kami berupaya untuk melakukan berbagai program, meliputi; efisiensi energi, pemakaian energi terbarukan, pengelolaan limbah, pengelolaan dan daur ulang air, serta penyuluhan dan pelestarian lingkungan bersama masyarakat.

Sebagai penyedia layanan telekomunikasi, dampak langsung kegiatan operasional Telkom terhadap lingkungan relatif sangat minim dibandingkan dengan industri lainnya dalam bidang eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, Kami menyadari bahwa dalam konteks pemanasan global, dampak lingkungan akibat operasional Telkom tidak dapat dihindari.

Sebagai contoh, pemakaian listrik dari sumber energi tak terbarukan, pemakaian BBM untuk kendaraan, perjalanan dinas dan pemakaian kertas menimbulkan emisi karbon (CO2), penyebab pemanasan global. Terkait dengan itu, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut serta mengatasi perubahan iklim melalui berbagai program ramah lingkungan.

Dalam hal keanekaragaman hayati, meskipun kegiatan operasional Kami tidak berdampak signifikan, Kami tetap berhati-hati dan menghindari pemasangan *tower* di kawasan hutan agar tidak mengganggu spesies yang dilindungi, terutama yang tercatat dalam International Union for Conservation of Nature ("IUCN") Red List.

Dampak lingkungan lainnya akibat kegiatan operasional Telkom yang relatif tidak signifikan adalah dalam hal limbah berbahaya. Namun, hal ini tetap Kami kelola secara ramah lingkungan. Limbah, seperti baterai bekas dan pelumas dari genset, ditangani dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Upaya Mitigasi Emisi Karbon

Tanggung jawab lingkungan terkait dengan emisi karbon (CO2) akibat operasional Telkom, terutama pemakaian listrik konvensional dan penggunaan BBM, telah menjadi perhatian Kami. Walaupun secara spesifik Kami belum menghitung *carbon footprint* Telkom, namun berbagai langkah strategis dalam upaya mitigasi emisi karbon telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan berlanjut sampai tahun 2011.

Telkom juga terus mendukung pengembangan dan sosialisasi teknologi yang inovatif dan praktis yang bukan saja ramah lingkungan, namun juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Efisiensi Energi Gedung Perkantoran

Sistem energi di gedung-gedung perkantoran Telkom telah Kami buat menjadi semakin efisien. Berbagai langkah strategis yang diterapkan untuk itu, antara lain adalah:

1. Penggunaan kumpulan kapasitor (*capasitor bank*) untuk mengoptimalkan penggunaan listrik;
2. Pemasangan kaca film pada jendela untuk mengurangi efek panas dari luar sehingga mengurangi kebutuhan untuk pendinginan atau pemakaian AC;
3. Penggantian penerangan konvensional dengan penerangan hemat energi;
4. Penggantian AC *chiller* dengan AC berdiri;
5. Penerapan secara ketat "nyala-mati" listrik guna menghemat pemakaian listrik;
6. Mendidik karyawan mengenai penghematan energi;
7. Pengelompokan *switch* untuk mengurangi efek pemanasan dan menghemat listrik;
8. Pemasangan alat pengatur waktu (*timer*) pada penerangan di luar gedung; dan
9. Penempatan papan peringatan dan stiker di berbagai lokasi yang strategis guna mengingatkan karyawan untuk menghemat listrik dan air.

Di beberapa lokasi operasi, penghematan energi yang signifikan berhasil Kami capai melalui pengalihan dari *switch* TDM ke teknologi *soft switch* yang memberikan penghematan dari 59,9A ke 23,9A. Sejak pertama kali diterapkan di seluruh Indonesia pada tahun 2009, proyek *softs witch* ini telah meliputi *call agents* (*softs witch*) di 12 lokasi dan gerbang *trunk* di 28 lokasi dengan kapasitas sebanyak 275.609 *Line Unit* (LU) guna menambah kapasitas sambungan telepon tidak bergerak, serta keperluan modernisasi sentral dan akses dengan mengganti TDM *switch* yang sudah melampaui usia teknis.

Efisiensi Energi BTS

Penghematan energi yang signifikan juga datang dari penggunaan BTS di luar gedung pada semua lokasi BTS Telkom Flexi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan dan Kawasan Indonesia Timur. BTS di luar gedung berukuran lebih kecil dari BTS di dalam gedung dan tidak membutuhkan gardu dan pendingin. Dalam kurun waktu satu tahun, Kami telah menghemat energi dari berkurangnya keperluan pendinginan tersebut hingga 90% atau 3.291,3 KVA.

Sementara itu, BTS dalam gedung masih Kami gunakan di sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa Tengah. Untuk melakukan penghematan energi di BTS dalam gedung, Kami menggunakan *transformer* baru yang lebih hemat energi sehingga berhasil menekan biaya dari sebelumnya Rp5-7 juta per bulan menjadi Rp500.000-Rp600.000 saja per bulan. Kedua bentuk investasi tersebut telah menghasilkan penghematan energi luar biasa dan akan Kami terapkan pada seluruh sisa BTS lainnya.

Pemakaian Energi Terbarukan

Mitigasi emisi karbon yang signifikan telah dilakukan melalui perubahan pola konsumsi energi dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan. Melalui upaya ini, dampak lingkungan dalam konteks emisi karbon (CO2) menjadi "*zero*" atau "*carbon free*".

Meskipun dalam skala kecil, Kami telah mulai melaksanakan konsep "*carbon free*" untuk beberapa kegiatan operasional. Anak Perusahaan Kami, Telkomsel, telah menjadi pelopor dalam penggunaan BTS yang menggunakan energi terbarukan dari energi matahari dan mikrohidro. Dengan menggunakan sel tenaga matahari sebagai energi untuk BTS, emisi karbon yang dapat dikurangi dapat mencapai 961,39 ton CO_2 setiap tahunnya.

Telkomsel telah mengoperasikan sebanyak 132 BTS yang menggunakan sel bertenaga matahari di seluruh Indonesia pada tahun 2009 dan 38 BTS lainnya beroperasi mulai tahun 2010 sehingga kini jumlahnya menjadi 170 BTS. Untuk keperluan tersebut, Telkomsel telah melakukan investasi sebesar Rp100 miliar untuk mengembangkan sistem energi bertenaga matahari di tahun 2009 dan menginvestasikan Rp50 miliar lagi di tahun 2010. Dengan 170 BTS bertenaga matahari, saat ini Telkomsel dipandang memiliki BTS ramah lingkungan terbanyak dibandingkan dengan operator lainnya di Asia.

Telkom juga terus meningkatkan upaya penggunaan sumber energi alternatif di daerah terpencil.

Konsep Kantor Tanpa Kertas

Upaya lainnya dalam mitigasi emisi karbon adalah dengan menerapkan konsep Kantor Tanpa Kertas. Telkom telah menerapkan konsep ini secara bertahap dengan menerapkan aplikasi nota dinas *online* sejak 1998 di beberapa unit dan telah diimplementasikan secara nasional sejak 2004 setelah diperkenalkan oleh Direktur Utama Telkom. Untuk mendukung implementasi konsep ini Direktur SDM dan BISKUNG mengeluarkan kebijakan No.KR.05/HK000/SDM-60/2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang "Pedoman Implementasi Sistem Kolaborasi Elektronik di Lingkungan Telkom". Sejak pertama kali konsep ini diimplementasikan, manajemen Telkom membuat kebijakan pemotongan anggaran pembelian kertas secara signifikan. Dengan pemakaian kertas seminimum mungkin, Kami telah mengurangi jumlah sampah kertas.

Saat ini, seluruh unit di Telkom telah menggunakan aplikasi nota dinas *online* untuk pengiriman nota dinas di internal Telkom. Selama tahun 2011, surat nota dinas yang dibuat oleh seluruh unit di Telkom melalui aplikasi nota dinas *online* berjumlah 271.256 buah.

Dengan asumsi rata-rata:

- Satu dokumen nota dinas terdiri dari 2 (dua) lembar kertas
- Satu dokumen nota dinas ditujukan kepada 3 (tiga) orang penerima
- Satu dokumen nota dinas setelah diterima, diteruskan kepada 3 (tiga) orang

Maka dapat dihitung 271.256 dokumen surat x 2 lembar x 3 penerima x 3 disposisi sama dengan 4.882.608 lembar kertas atau sama dengan 9.766 rim kertas. Dengan menggunakan aplikasi nota dinas *online*, Kami telah menghemat kertas sebanyak 9.766 rim kertas.

Tidak kalah pentingnya adalah penyuluhan tentang arti penting konsep kantor tanpa kertas agar program tersebut berjalan secara rutin dan efektif. Telkom mengedukasi para karyawan dalam menerapkan konsep tersebut, antara lain dalam hal penerbitan surat tagihan elektronik, pembayaran tagihan secara terpusat melalui *teller*, Anjungan Tunai Mandiri ("ATM"), *phone banking, internet banking, mobile banking* dan *auto debit*.

Di samping berkontribusi terhadap program mitigasi emisi karbon, manfaat nyata yang dirasakan pelanggan melalui layanan ini dipandang sangat signifikan, misalnya; waktu tempuh dan akses layanan lebih cepat, handal dan menghemat biaya. Saat ini, hampir seluruh pelanggan non korporasi ("OLO") telah memanfaatkan layanan tersebut. Penghematan yang Kami lakukan juga memiliki dampak secara tidak langsung pada operasi Perusahaan. Sejak konsep tersebut dimulai, Kami harus menyediakan *bandwidth* lebih besar untuk memperlancar lalu lintas jaringan.

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3")

Terkait dengan konsep Kantor Tanpa Kertas, pengelolaan sampah dilakukan bersama Dinas Kebersihan setempat. Pengawasan rutin diterapkan guna menekan jumlah sampah yang tercecer. Telkom juga melakukan pengelolaan sampah dan pembuangan secara bertanggung jawab di seluruh kantor operasional.

Telkom juga terus mendukung pengembangan dan sosialisasi teknologi yang inovatif dan praktis yang bukan saja ramah lingkungan, namun juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Terhadap material yang dapat didaur ulang, seperti; baterai bekas, kabel tembaga dan material logam, prosesnya diserahkan kepada pihak ketiga. Perangkat dan peralatan yang sudah tua diganti dengan perangkat dan peralatan baru dan khusus untuk AC baru diharuskan

AC yang tidak menggunakan gas Freon R6 atau Halon sehingga emisi karbon dapat dikurangi. Agar kebijakan *retrofit* gas freon berjalan efektif, Kami mengadakan *training* untuk Teknisi yang menangani *Musicool* dan memperoleh sertifikasi dari PT Pertamina (Persero).

Pengelolaan dan Pemakaian Air Daur Ulang

Air sangat vital untuk kehidupan manusia dan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan ekosistem. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pemakaian air menjadi isu yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan upaya mitigasi emisi karbon. Dalam kaitan ini, Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemakaian air.

Telkom hanya menggunakan air untuk operasional gedung dan keperluan minum karyawan. Karena relatif sedikitnya volume konsumsi air, sumber air yang terpengaruh bersifat tidak langsung, seperti dari konsumsi air yang dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum ("PDAM") di mana Kami beroperasi. Meskipun volume konsumsi air relatif sedikit, Kami telah melaksanakan langkah strategis dalam pengelolaan air dengan melakukan proses daur ulang air.

Secara sederhana, proses daur ulang Kami lakukan dengan menggunakan sistem filtrasi berbasis arang. Air hasil daur ulang tersebut Kami gunakan untuk mencuci kendaraan operasional dan menyiram tanaman di halaman kantor. Selain itu, Kami juga telah memasang biopori dan penampung air di sekeliling gedung kantor untuk mengumpulkan air hujan.

Gerakan Bersepeda ke Kantor *(Bike to Work)*

Dalam rangka hidup sehat dan sekaligus memitigasi emisi karbon, Perusahaan menghimbau karyawan untuk bersepeda ke kantor setiap hari Jumat. Himbauan ini dikeluarkan pada tahun 2009 dan pelaksanaannya direspon dengan baik oleh sebagian besar karyawan hingga tahun 2011. Kami mengharapkan hal ini akan menjadi kebiasaan yang merupakan bagian dari gerakan nasional "*Bike to Work*" dan membudaya di kalangan karyawan.

Bantuan Pelestarian Lingkungan Hidup

Telkom secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan atas kegiatan manusia pada umumnya, di samping untuk mendukung program nasional dalam mengatasi perubahan iklim.

Sebagai sebuah Perusahaan yang dikelola secara profesional, Telkom juga menunjukkan komitmennya menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan pelestarian atau rehabilitasi lingkungan hidup melalui Program Bina Lingkungan.

Sejuta Pohon untuk Indonesia (*One Billion Indonesia Trees* - "OBIT")

Sebagaimana tertuang dalam komitmen Manajemen pada tanggal 23 Desember 2011 yang lalu, yang menyatakan bahwa Telkom sebagai BUMN mendukung penuh Program OBIT sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada tahun 2020 mendatang yang dipertegas oleh Kementerian BUMN untuk membangun dan mengembangkan 2 juta hektar hutan rakyat di Pulau Jawa hingga 2014.

Pada tahun 2011, Telkom berhasil melakukan penanaman sebanyak 174.039 pohon dari rencana penanaman sebanyak 172.000 pohon atau pencapaian 101%, setelah sebelumnya pada posisi Juni 2011 telah direalisasi penanaman 58.700 pohon. Total 28 varietas jenis pohon yang ditanam.

PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Berbagai kegiatan yang dijalankan dalam program kemitraan ditujukan untuk memicu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi masyarakat. Adapun sasaran dari pelaksanaan program ini adalah kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bisnis utama Telkom.

Kami berharap berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat semakin memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mereka mampu mandiri dan pada akhirnya akan membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh Indonesia.

Ada dua bentuk kegiatan utama yang diselenggarakan selama tahun 2011:

1. Pelatihan kewirausahaan dan pemberian dana pinjaman bergulir kepada wirausahaan binaan dalam skema program kemitraan.
2. Program kreatifitas dalam skema pengembangan masyarakat.

Program Kemitraan

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN yang mengatur mengenai PKBL, pelaksanaan program ini juga mempertimbangkan keselarasan dengan potensi lingkungan masyarakat penerima program. Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah para pelaku usaha kecil dan menengah ("UKM").

Adapun sektor kegiatan usaha mereka meliputi industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor lainnya. Program pelatihan dan pemberian pinjaman bergulir diberikan berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan perkembangan dan potensi setempat pada kedelapan sektor tersebut.

Pada tahun 2011, Kami telah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang berlangsung di seluruh Indonesia. Pelatihan kewirausahaan diikuti calon mitra binaan maupun mitra binaan peserta dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp17,7 miliar.

Pada periode yang sama, Kami juga menyalurkan pinjaman bergulir untuk para pelaku UKM yang menjadi mitra binaan. Total dana yang disalurkan mencapai Rp302,7 miliar dengan jumlah mitra binaan sebanyak 9.189 unit usaha.

Kami menindaklanjuti penyaluran pinjaman bergulir dengan melakukan pemantauan atas penggunaan, pengelolaan maupun tingkat pengembaliannya. Untuk memotivasi seluruh mitra binaan agar berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengembalikan dana pinjaman tepat waktu, secara periodik dilakukan penilaian disertai pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

Beberapa contoh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan tahun 2011 adalah:

- Indigopreneur
  Pelatihan ini dibangun untuk usaha kecil menengah ("UKM") yang belum menjadi mitra binaan Telkom dengan materi *e-commerce*, kewirausahaan dan perbankan, IT, *imagineering mindset, self awareness* and *enterpreuners goal setting*, bisnis kreatif dan *platinum track*.

  Adapun tujuan program ini adalah:
  - Menjadikan industri usaha kecil menengah sebagai pilar ekonomi kerakyatan;
  - Meningkatkan kemampuan pelaku UKM dalam bidang ICT;
  - Mengoptimalkan kapasitas dan ketahanan pelaku UKM melalui pembentukan pola berpikir yang kreatif, inovatif, mandiri dan tangguh.

  Selama tahun 2011, pelatihan berlangsung 5 (lima) angkatan yang diikuti oleh 631 peserta terdiri dari pelaku UKM di wilayah Jawa Barat.

- Sari Apel Brosem (Bromo Semeru)
  Brosem merupakan Mitra Binaan Telkom Community Development ("CD") Area Jatim yang terpilih menjadi salah satu peserta lomba CSR tingkat nasional. Brosem merupakan industri minuman sari apel di Batu yang menghasilkan minuman segar khas dengan bahan baku yang banyak dihasilkan di daerah ini. Meskipun banyak industri sejenis dalam menghasilkan sari apel, Brosem mempunyai rasa yang khas menurut para pelanggan: manisnya pas dan tidak membuat tenggorokan serak.

  Brosem juga merupakan mitra binaan unggulan bagi Telkom CD Area V Jatim. Disamping angsurannya sangat tepat waktu, pengelolaan serta perkembangan usahanya pun cukup pesat. Berbagai penghargaan telah diraih oleh Brosem, antara lain Penghargaan dari Gubernur Jawa timur, Semen Gresik Awards, Walikota Batu dan penghargaan secara langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kemampuan para pengelola yang tidak diragukan lagi, Brosem dapat menaikkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi tenaga kerja ibu-ibu sekitarnya. Dengan demikian, dengan adanya Brosem sebagai topangan kebutuhan hidup sehari-hari, masalah sosial dan lingkungan dapat teratasi, Perkembangan Brosem diawali dengan dikucurkannya dana pinjaman bergulir dari program PK dan didukung oleh peningkatan sarana berupa BLC dibawah program BL.

  Pada awal usaha, produk utama Brosem difokuskan kepada jenang apel. Namun seiring berlalunya waktu, fokus produksi beralih dari jenang apel menjadi minuman sari buah apel dalam kemasan sedangkan produk jenang apel menjadi produk sampingan. Keputusan untuk memproduksi sari buah apel disebabkan pemikiran bahwa sari buah apel lebih disukai oleh masyarakat karena kesegarannya. Selain itu, sari buah apel dapat dikonsumsi sehari-hari. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Brosem lihat *website http://sariapelbrosem.com*.

Kunci kesuksesan Brosem terletak pada kualitas produk dan manajemen usaha yang baik. Untuk menjaga kualitas produksi, Brosem memiliki pemasok tetap dari sebuah kelompok tani. Seluruh bahan baku yang digunakan juga merupakan bahan baku dengan kualitas yang baik, sehingga cita rasa Brosem tidak perlu diragukan.

Kini, rata-rata produksi sari buah apel Brosem per bulan sekitar 300 dus sari buah apel dari berbagai ukuran kemasan. Namun, pada hari besar atau hari libur, produksi sari buah apel meningkat antara 400-450 dus per bulan. Rata-rata penjualan per bulan dapat mencapai Rp11,7 juta. Pertumbuhan laba dari beberapa tahun lalu hingga saat ini bertahan pada kisaran 15-30%. Hal ini menunjukkan bahwa Brosem sebagai sebuah usaha mandiri yang memiliki profitabilitas yang baik. Dalam kegiatan operasionalnya, Brosem mempekerjakan 25 tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar, 4 diantaranya adalah laki-laki dan 21 orang perempuan. Dalam mempekerjakan karyawan, Brosem menerapkan prinsip non diskriminatif sehingga setiap orang yang berkualifikasi dapat bekerja sebagai karyawan, tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, pendidikan, atau pekerjaan.

Sebanyak 200 pelaku UKM di Malang, Jawa Timur, mendapatkan pelatihan membangun ekonomi kreatif melalui internet di Gedung Graha Wangsa, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Pelatihan diselenggarakan Telkom bekerjasama dengan UKM Brosem (Bromo-Semeru). Tujuan pelatihan adalah memperluas wawasan pelaku UKM dalam menggunakan fasilitas internet sehingga dapat memberikan dampak positif pada pengembangan usaha, termasuk memperluas area pemasaran.

Materi pelatihan meliputi *browsing* hingga pengisian *form* produk dalam *website,* sekaligus pembuatan *web*. Selain itu juga, diberikan materi mencakup cara berkomunikasi dengan calon pembeli dan penyediaan *form* pembelian melalui internet. Para peserta juga disarankan untuk membentuk kelompok atau koperasi sehingga produk dan informasi yang ditampilkan dalam *web* menjadi lebih beragam serta variatif.

Target yang ingin dicapai Telkom melalui pelatihan ini antara lain pelaku UKM kian kreatif. Tidak hanya dalam menjaga kualitas produk, tetapi juga menciptakan kemasan yang menarik sehingga mampu menguasai pasar. Pada akhirnya produk-produk tersebut diharapkan dapat masuk ke jaringan ritel modern yang menjalin kerjasama dengan Telkom.

- **Kampung Patin Desa Koto Masjid dan Pulau Gadang**

Bagi masyarakat Riau, nama Desa Koto Masjid dan Pulau Gadang di Kabupaten Kampar sudah tidak asing lagi. Kedua desa ini sekarang dikenal sebagai kampung patin karena menjadi sentra penghasil ikan patin terbesar di Sumatera.

Sebagian besar masyarakat di kedua desa ini hidup dari budidaya ikan patin. Luas kolam budidaya ikan patin mencapai lebih dari 50 hektar dan mampu menghasilkan ikan patin segar rata-rata empat ton per hari. Produk utamanya tidak hanya ikan patin segar dan pembenihannya, tetapi juga berbagai bentuk olahan di antaranya selai ikan patin. Jangkauan pemasaran meliputi kota-kota di Sumatera, bahkan Malaysia dan Singapura.

Perintis budidaya ikan patin di kedua desa tersebut adalah Suhaimi, SPd. Nominator Pelopor Indonesia CSR Awards 2011 Tingkat Perorangan ini memulai usaha budidaya ikan patin sebagai mitra binaan Telkom. Kesuksesan Desa Koto Masjid dan Pulau Gadang mengembangkan budi daya ikan patin merupakan hasil kerja keras dan kerjasama semua pihak, termasuk Telkom yang membantu dalam aspek permodalan dan pembinaan.

Usaha budidaya perikanan ikan patin di desa Koto Masjid berkembang pesat. Hingga saat ini, terdapat sekitar 776 kolam ikan patin dengan total luas sekitar 42 hektar. Setiap harinya usaha tersebut dapat menghasilkan ikan patin segar antara 3 sampai 4 ton. Pak Suhaimi membentuk CV Graha Pratama Fish sebagai nama usaha Pusat Pembenihan (*Hatchery*), Pembesaran Ikan (*Aqua Culture*), Pembuatan Pakan Ikan (*Artificial Feed*) dan Pengolahan Ikan yang berupa *nugget*, salai

dan kerupuk. Khusus olahan salai ikan patin, dari bahan asal 3 ton ikan patin akan dihasilkan 1 ton salai ikan patin. Sementara untuk *nugget*, setiap kali produksinya menghasilkan 60 kg *nugget*. Tahun depan sentra pengolahan ikan patin akan dibangun dengan kebutuhan lahan sekitar 3 hektar dengan harapan mampu menyerap seluruh panen ikan patin Desa Koto Masjid yang selalu meningkat.

Program Kreativitas

Program ini hakikatnya bertujuan untuk menggali kreativitas masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi dari kegiatan yang berbasis pada teknologi TIME. Berbagai kegiatan yang telah dijalankan selama tahun 2011 tersaji dalam uraian berikut.

Komunitas Digital Indonesia (Indigo)

Indigo atau Indonesia *Community Digital* adalah program untuk menumbuhkan kreativitas digital melalui kerjasama dengan berbagai komunitas. Prakarsa strategis Indigo diluncurkan tahun 2007, untuk memfasilitasi komunitas kreatif Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital dan membangun industri yang akan ikut berkontribusi pada ekonomi nasional.

Pengembangan industri kreatif yang melibatkan komunitas adalah bagian dari strategi jangka panjang Kami untuk membangun dan mendinamiskan industri komunikasi digital infrastruktur, layanan, aplikasi, dan konten. Melalui program Indigo, Kami ingin memposisikan diri sebagai penyedia sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan para pelaku industri kreatif sehingga secara bersama-sama menumbuhkan pasar bagi karya kreatif digital di Indonesia.

Indigo Digital Music Awards

Indigo Digital Music Awards merupakan kegiatan tahunan yang ditujukan sebagai apresiasi bagi industri musik digital anak negeri, yang dinilai berhasil dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Melalui kegiatan ini, Telkom Group ingin menunjukkan kepedulian dalam mengapresiasi karya anak negeri, dengan memperhatikan *intellectual property right* (IPR) atau hak kekayaan intelektual, yang dalam media digital dilindungi oleh *digital right mechanism* (DRM).

Indigo Digital Music Awards diberikan kepada para individu di industri musik Indonesia, yang berperan dalam menggerakkan bisnis digital dalam negeri. Penjurian dilakukan dengan melihat apresiasi masyarakat melalui penggunaan *ring back tone* (RBT) dan *full track download*, kualitas karya musik, serta popularitas *airplay* di media televisi maupun radio.

Indigo Fellowship 2011

Pada tanggal 12 Juni 2011, Telkom meluncurkan *Indigo Fellowship* 2011. Program ini merupakan bentuk inisiatif Kami dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif, khususnya di bidang konten digital melalui wadah Indigo. *Indigo Fellowship* 2011 juga diharapkan mendorong tumbuhnya wirausaha digital (*digitalpreneur*) baru dalam bisnis industri kreatif digital. Tema yang diusung *Indigo Fellowship* 2011 adalah: *Digital Creativepreneur for Nation Competitiveness*.

Sejak diperkenalkan, banyak masyarakat, baik perorangan atau kelompok yang mengikuti program ini. Mereka mendaftar melalui situs www.fellowship2011.plasaindigo.com dan mengirimkan usulan tokoh maupun karya digital mereka serta mengikuti proses seleksi secara bertahap.

Salah satu keunggulan kompetitif *Indigo Fellowship* adalah sistem yang komprehensif dan berkesinambungan dalam memfasilitasi industri kreatif. Hal tersebut diwujudkan melalui tahapan:

- *Awake*, menumbuhkan *awareness* publik terhadap keberadaan *Indigo Fellowship* yang akan menginspirasi masyarakat terhadap peluang baru dalam industri kreatif digital.
- *Inspire*, melalui *story telling* mengenai bagaimana serta mengapa industri kreatif tumbuh dan berkembang. *From zero to hero*, mencari bibit unggul yang diharapkan sukses mengelola bisnis/industri kreatif digital melalui ide kreatif dan jejaring yang ada.
- *Connect*, menciptakan ekosistem yang menjalin mata rantai industri kreatif dari hulu ke hilir dan menjadikannya bagian produk/layanan yang dipasarkan menjadi produk/layanan Telkom Group.
- *Engage*, mengajak partisipasi masyarakat dan komunitas untuk membangun hubungan emosional yang harmonis dan berkesinambungan dengan pelaku/tokoh industri kreatif digital.

Seluruh rangkaian kegiatan *Indigo Fellowship* mencapai puncaknya dengan gelaran kegiatan *Indigo Award* 2011 dan mengumumkan para pemenangnya, berdasarkan kategori kompetisi.

1. *Mobile Content & Application*, adalah karya digital baik berupa konten atau aplikasi yang diaplikasikan di perangkat telepon seluler.
2. *Web Based Content & Application*, adalah karya digital dalam bentuk aplikasi atau konten berbasis *web* yang dapat diakses melalui perangkat PC maupun koneksi internet.
3. *Business Application*, adalah karya digital dalam bentuk aplikasi perangkat lunak untuk kebutuhan pelanggan korporasi dalam menjalankan bisnisnya melalui aplikasi komputer.
4. *Digital Animation/comic*, adalah karya digital dalam bentuk aplikasi atau konten yang dapat digunakan, baik di perangkat PC maupun telepon seluler dalam bentuk aplikasi atau konten.

Diantara semua pemenang Indigo Fellowship 2011, *website* www.salingsapa.com merupakan pemenang yang mendapatkan animo paling besar karena *website* ini adalah jejaring sosial Islami yang pertama kali dibuat oleh pelajar SMP dengan fitur Khazanah dan Al-Quran. Dua fitur ini ternyata banyak diminati oleh penggunanya yang telah mencapai 1,8 juta dengan 200.000 member yang tersebar di 52 negara di seluruh dunia, dengan hit sekitar 2.300.000 meskipun *website* ini belum berumur 1 tahun.

Semua pemenang *Indigo Fellowship* 2011 ini akan diberikan kesempatan untuk dievaluasi lebih lanjut oleh para pakar-pakar TIK untuk mendapatkan dana ventura di tahun 2012 sehingga dapat menjadi produk unggulan yang akan dipasarkan oleh Telkom Group.

Tabel Penyaluran Bantuan Dana Program Kemitraan tahun 2011 (dalam jutaan Rupiah)

No	Wilayah Binaan	Jumlah
1	Aceh	4.913
2	Sumatera Utara	12.136
3	Sumatera Barat	4.242
4	Riau Daratan	6.915
5	Riau Kepulauan	9.845
6	Sumatera Selatan	8.612
7	Jambi	8.582
8	Bengkulu	4.500
9	Lampung	4.649
10	Bangka Belitung	4.425
11	DKI Jakarta	16.877
12	Banten	5.785
13	Jawa Barat	59.762
14	Jawa Tengah	37.296
15	D.I. Yogyakarta	7.202
16	Jawa Timur/Madura	36.731
17	Kalimantan Timur	12.535
18	Kalimantan Barat	5.234
19	Kalimantan Tengah	6.278
20	Kalimantan Selatan	6.432
21	Bali	15.400
22	NTB	4.988
23	NTT	1.748
24	Sulawesi Selatan	2.555
25	Sulawesi Tengah	2.303
26	Sulawesi Tenggara	2.070
27	Sulawesi Utara	1.530
28	Sulawesi Barat	670
29	Gorontalo	2.735
30	Maluku	500
31	Maluku Utara	2.698
32	Papua Barat	-
33	Papua Timur	2.555
	Total	302.697

Tabel Jumlah Mitra Binaan per Wilayah menurut Sektor Usaha tahun 2011

No	Wilayah Binaan	Industri	Perdagangan	Pertanian	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	Jasa	Lainnya	Jumlah
1	Aceh	25	120	1	6	-	3	58	-	213
2	Sumatera Utara	63	261	4	7	2	5	103	-	445
3	Sumatera Barat	14	120	-	8	-	1	28	-	171
4	Riau Daratan	6	85	2	6	67	57	15	1	239
5	Riau Kepulauan	29	294	4	2	3	6	86	-	424
6	Sumatera Selatan	28	269	-	2	1	-	85	1	386
7	Jambi	46	100	4	5	-	27	45	-	227
8	Bengkulu	4	95	-	2	2	11	36	-	150
9	Lampung	36	89	1	-	-	7	41	-	174
10	Bangka Belitung	18	93	1	2	2	-	19	-	135
11	DKI Jakarta	65	324	1	1	-	3	88	-	482
12	Banten	25	106	6	2	-	1	28	-	168
13	Jawa Barat	665	588	33	34	7	65	308	4	1.704
14	Jawa Tengah	190	433	34	57	2	16	220	28	980
15	D.I. Yogyakarta	41	69	6	20	11	1	42	2	192
16	Jawa Timur/Madura	212	632	15	62	-	23	194	3	1.141
17	Kalimantan Timur	42	281	2	9	2	7	101	2	446
18	Kalimantan Barat	12	99	14	8	1	2	33	-	169
19	Kalimantan Tengah	23	175	1	16	2	3	65	-	285
20	Kalimantan Selatan	13	130	-	3	-	1	51	-	198
21	Bali	33	83	-	21	7	2	29	12	187
22	NTB	11	58	1	11	-	2	18	5	106
23	NTT	3	11	-	7	-	2	15	-	38
24	Sulawesi Selatan	12	57	1	4	-	1	14	-	89
25	Sulawesi Tengah	11	33	1	-	8	-	13	-	66
26	Sulawesi Tenggara	3	32	-	1	-	-	11	-	47
27	Sulawesi Utara	7	16	2	-	1	4	8	-	38
28	Sulawesi Barat	1	48	1	2	1	1	5	-	59
29	Gorontalo	4	32	1	1	-	-	19	-	57
30	Maluku	2	9	-	-	-	-	4	-	15
31	Maluku Utara	7	57	-	2	-	3	20	-	89
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Timur	2	33	-	-	-	1	32	1	69
	Total	1.653	4.832	136	301	119	255	1.834	59	9.189

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MASYARAKAT

Program ini dijalankan melalui partisipasi aktif pembangunan sarana dan prasarana maupun program sosial kemasyarakatan lain. Tujuan pelaksanaan program adalah membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN dan inisiatif Telkom dalam rangka mengembangkan kehidupan masyarakat (*community development*). Ada empat program prioritas yang dijalankan, yakni pendidikan, layanan umum, kebudayaan dan peradaban, serta kesehatan dan lingkungan.

Pendidikan

Bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan baik keahlian, pengetahuan maupun perilaku pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat dan keluarga besar Telkom Group. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi program-program: Bagimu Guru Ku Persembahkan, i-CHAT, dan pemberian beasiswa.

- **Bagimu Guru Ku Persembahkan**
  Program ini sudah berjalan selama lima tahun dan merupakan salah satu upaya Kami untuk ikut membangun dan menciptakan dunia pendidikan berkualitas di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan antara lain melalui pemberian pelatihan kepada para guru, ujung tombak dunia pendidikan.

Pada tahun ke-5 ini, pelatihan dititikberatkan pada pembangunan karakter selain juga memperkuat materi muatan interaktif pada penggunaan IT untuk mengajar. Ada tiga tujuan dari program "Bagimu Guru Ku Persembahkan", yaitu:

- Menjadikan guru sebagai "*agent of change*" dalam dunia pendidikan di Indonesia;
- Menambah wawasan guru dalam bidang ICT;
- Memberdayakan komunitas guru yang telah mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2011, program ini diikuti 640 peserta guru SMP dan SMA. Penyelenggaraan pelatihan dilakukan pada 10 (sepuluh) lokasi di pulau Jawa dan Sumatera dan dikemas dalam bentuk interaktif sehingga para guru dapat berinteraksi langsung dengan pemberi materi.

- **i – CHAT (*I Can Hear and Talk*)**

  i-CHAT adalah perangkat lunak yang berupa aplikasi dan portal hasil kreativitas unit Research Development Center ("RDC") Telkom yang bertujuan membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi kalangan tunarungu dan anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal pendengaran.

  Program ini memungkinkan penyandang tunarungu dapat lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat luas. Misalnya, tunarungu yang menjadi kasir dapat berkomunikasi dengan konsumen menggunakan isyarat yang diterjemahkan melalui monitor dan suara.

  Pengembangan aplikasi dan portal i-CHAT didorong untuk mempercepat dan memperluas partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kalangan tuna rungu. Terutama terkait kemampuan berbahasa mereka.

  Aplikasi yang resmi tersedia dibuat dalam dua mode: mode *offline,* yang mengharuskan pengguna untuk melakukan instalasi program pada komputernya dan mode *online* yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan mengakses situs i-CHAT di http://www.i-chat.web.id. Saat ini portal tersebut memuat aplikasi i-CHAT secara *online* yang terdiri dari lima modul: Kamus, Abjad Jari, Bilangan, Tematik, dan Susun Kalimat.

  Sejak diluncurkan pada akhir tahun 2011, Kami telah mencapai 10% dari 45.000 sekolah khusus di Indonesia, menyerahkan langsung program i-CHAT ke 122 sekolah khusus di 17 kota, sementara modul untuk 400 sekolah khusus lainnya dengan cara dikirim.

Layanan Umum

Berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi. Kegiatan yang dilakukan mencakup: Program INSAN, Program *Broadband Learning Center* ("BLC") dan taman digital. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain seperti "Mudik Asyik" dan bantuan pembangunan sarana umum.

- **Internet Sehat dan Aman ("INSAN")**

  INSAN adalah program nasional yang digerakan oleh tim sosialisasi INSAN serta ditujukan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman ke berbagai kalangan. Melalui program ini diharapkan penggunaan internet dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat. Adapun tim sosialisasi INSAN diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, dan terbuka untuk partisipasi berbagai pihak yang peduli terhadap penggunaan internet sehat dan aman.

  Sebagai BUMN yang menyediakan akses internet terbesar dan terluas di Indonesia, Telkom berkewajiban mensosialisasikan penggunaan internet untuk kegiatan-kegiatan positif dan produktif. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa selain membawa manfaat bagi pemakainya, internet juga bisa menjadi pintu masuk informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma dan budaya Indonesia, hukum dan agama.

  Untuk mencegah dampak negatif dari informasi seperti itu, Telkom meluncurkan *domain name system* ("DNS") Nawala yang merupakan sistem penyaring dalam penggunaan internet di Indonesia. DNS Nawala adalah program non-komersil Telkom bekerjasama dengan Asosiasi Warnet Indonesia ("Awari").

  Secara spesifik, DNS Nawala akan mengurangi konten-konten negatif yang tidak sesuai peraturan perundangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan bangsa Indonesia, seperti pornografi dan perjudian. Selain itu, DNS Nawala juga akan memblokir situs internet yang mengandung konten berbahaya seperti *malware*, situs *phising* (penyesatan) dan sejenisnya.

  DNS Nawala dapat digunakan secara gratis oleh pengguna internet di seluruh Indonesia. Perlindungan pengguna internet terutama anak-anak, menjadi perhatian utama Telkom dalam penyediaan DNS Nawala. Dengan adanya program ini maka diharapkan internet dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat kemajuan serta kesejahteraan bangsa.

- **Broadband Learning Center ("BLC")**
  Kegiatan lain yang dijalankan dan berhubungan dengan perluasan akses masyarakat untuk menjangkau fasilitas TIME yang dikelola Telkom adalah pemberian bantuan membangun akses internet. Sasaran utamanya adalah jajaran pemerintahan daerah (pemda) dengan memberikan bantuan peralatan komputer yang dilengkapi fasilitas Wi-Fi.

  Peran BLC saat ini :
  1. Sebagai tempat pelatihan mengenai dasar-dasar internet,
  2. Mencerdaskan serta mendidik masyarakat melalui pelatihan internet.
  3. Mendidik para pengusaha UKM, khususnya yang menjadi mitra binaan Telkom, dengan memberikan pelatihan cara membuat *blog* untuk memasarkan produk-produknya melalui internet secara *online*.

- **Mudik Asik**
  Program Mudik Asik dilaksanakan dengan dua tujuan: sebagai apresiasi kepada pelanggan dan mitra kerja, serta dukungan terhadap imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik menggunakan sepeda motor.

  Tujuan mudik yang dilayani meliputi kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta beberapa kota di Sumatera. Peserta terdiri dari para dari *sales force*, gerai lepas/gerai pinggir jalan, petugas warung Telkom dan warung internet, *front liner* TelkomVision dan Infomedia, serta *front liner* Plasa Telkom.

  Dalam pelaksanaan tahun 2011 peserta "Mudik Asik" mencapai 8.100 orang dengan menggunakan 40 unit bus dari Jakarta dan 20 unit bus dari Surabaya. Selain memperoleh fasilitas mudik gratis menggunakan bus berpendingin udara, peserta juga mendapatkan paket tas berisi kaos, topi, kartu isi ulang Flexi, payung, kipas serta minuman dan makanan ringan. Melalui program ini, Kami ingin memanjakan pelanggan dan mitra kerja untuk pulang ke kampung halaman secara aman dan nyaman.

- **Posko Telkom Peduli dan Telkom Group 2011**
  Kepedulian kepada para pemudik lebaran juga Kami tunjukkan dengan mendirikan Posko Telkom Peduli dan Posko Telkom Group 2011. Posko-posko berada di jalur-jalur padat pemudik maupun di lokasi-lokasi strategis seperti bandara, terminal, stasiun, pelabuhan dan tempat-tempat wisata.

Kami mendirikan 6 Posko Telkom dan 4 Posko Telkom Group. Selain itu, secara mandiri Telkomsel juga menyelenggarakan 803 Posko Telkomsel Siaga di seluruh Indonesia. Lokasi "POSKO Telkom Peduli dan Telkom Group 2011" antara lain di Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, Rest Area Km 57 Jalan Toll Cikampek, Masjid Baitul Amanah Rajapolah, Masjid Darusallam Indramayu, Kampung Kopi Banaran, Masjid Fairus Batang, SPBU Margasana Purwokerto, RM Duta 1 Madiun dan Pantai Pasir Putih Situbondo.

- **Bantuan Pembangunan Sarana Umum**
  Bantuan diberikan dalam bentuk partisipasi pada berbagai kegiatan pembangunan sarana maupun prasarana, yang digunakan masyarakat luas. Pembangunan dapat dilakukan atas inisiatif pemerintah daerah maupun organisasi nirlaba yang bekerja sama dengan Telkom.

  Selama tahun 2011, Kami telah menyalurkan bantuan dalam skema Bina Lingkungan senilai Rp44,9 miliar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai pembangunan sarana publik meliputi: BUMN Peduli, Bencana Alam, Pendidikan/ Pelatihan, Kesehatan Masyarakat, Sarana Umum, Sarana Ibadah dan Pelestarian Alam.

Kebudayaan dan Peradaban

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjukkan kepedulian pada upaya melestarikan dan membina budaya, seni, olahraga, agama dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Beberapa kegiatan yang cukup menonjol adalah pelaksanaan kegiatan tahunan "Speedy Tour" dan bantuan sarana ibadah.

- **Speedy Tour D'Indonesia**
  Sebagai bentuk partisipasi Telkom dalam memajukan dunia olahraga sekaligus memberi manfaat sosial kemasyarakatan, Kami menyelenggarakan lomba balap sepeda: *Speedy Tour D'Indonesia*. Kegiatan ini diselenggarakan bersama dengan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia ("PB ISSI"). Kegiatan perlombaan ini telah masuk agenda Union Cycliste Internationale ("UCI"), dan merupakan tur bersepeda terbesar di Indonesia. Menempuh perjalanan dari Jakarta sampai dengan Denpasar, rute perjalanan terdiri dari 10 etape yaitu: dimulai dari Jawa Barat, Bandung, menuju Ciamis; Jawa Tengah menuju Tegal, Semarang, Surakarta; Jawa Timur, dari Pacitan menuju Madiun kemudian menuju Surabaya, Probolinggo dan Banyuwangi sebelum menuju Bali, dari Gilimanuk menuju ke Kintamani dan berakhir di Denpasar.

  Pada tahun ke-empatnya, *Speedy Tour D'Indonesia* diselenggarakan antara tanggal 2-12 Oktober 2011 dan menempuh jarak 1.349,4 kilometer. Adapun peserta lomba terdiri 19 tim dari 7 negara peserta yaitu Indonesia, Singapura, Belanda, Australia, Malaysia, Hong Kong dan Jerman.

- **Bantuan Sarana Ibadah**
  Telkom Group ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pembangunan maupun perbaikan sarana ibadah, Baik masjid, gereja, maupun bangunan keagaamaan lainnya.

  Pada tahun 2011, dalam rangka pelaksanaan Program Bina Lingkungan, Kami menyalurkan bantuan pembangunan sarana ibadah hingga sebesar Rp 6,5 miliar, Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan maupun perbaikan sarana ibadah sebanyak 503 objek bantuan.

Kesehatan dan Lingkungan

Pada tahun 2011, dalam rangka pelaksanaan Program Bina Lingkungan, Kami menyalurkan bantuan kesehatan masyarakat sebesar Rp4,7 miliar, bantuan tersebut digunakan untuk 178 kegiatan, antara lain khitanan massal, operasi katarak, partisipasi dalam kegiatan peduli thalassemia, penyelenggaraan posyandu dan partisipasi dalam kegiatan donor darah.

PROGRAM BANTUAN BENCANA ALAM DAN BANTUAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program dan kegiatan pemberian bantuan bagi korban bencana alam dilaksanakan melalui dua mekanisme:

1. Bantuan yang diberikan langsung baik oleh Telkom maupun Telkom Group melalui Program Telkom Peduli.
2. Bantuan yang diberikan di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui Program BUMN Peduli dan dilaksanakan bersama-sama maupun bersinergi dengan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya.

Seluruh dana Telkom Peduli (Bantuan Bencana Alam) tersebut selanjutnya didistribusikan kepada para korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia sepanjang tahun 2011. Realisasi selama 2011 adalah sebesar Rp0,5 miliar, Bantuan-bantuan tersebut adalah pembelian tenda Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk Posko Merapi, bantuan kepada korban angin puting beliung di Situbondo dan Marunda, bantuan untuk bencana alam di Painai (Papua), Balloci (Pangkep) dan bantuan untuk korban letusan gunung Lokon Manado.

Adapun untuk pelaksanaan Program BUMN Peduli, dana yang disertakan Telkom pada tahun 2011 sebesar Rp10,8 miliar. Dana tersebut telah disalurkan sebagai bantuan, meliputi pelaksanaan pasar murah BUMN Peduli di sejumlah lokasi, penghijauan di Nusa Tenggara Timur, bantuan bagi korban bencana alam di Wasior, Mentawai, bantuan bagi korban banjir di Pidie Tangse dan penanaman pohon di aliran sungai Citarum.

Bantuan Untuk Masyarakat

Kepedulian Telkom tidak hanya terbatas pada mereka yang menjadi korban bencana alam. Kami juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ini, Telkom menyediakan dana sebesar Rp5,2 miliar yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemberian bantuan untuk masyarakat sepanjang tahun 2011, meliputi pengerasan jalan di dusun Rukem-Pemalang, pembuatan artesis di dusun Wonokerto-Pekalongan, perbaikan lapangan volley dan lapangan futsal di Bandung dan pembuatan sarana air bersih dan MCK di Bekasi.

Tabel Penyaluran Bantuan Dana Program Bina Lingkungan 2011:

	Jumlah Dana (Rp juta)	Aktivitas
Bantuan Kepada Korban Bencana Alam ("BBA")	493,4	17
Bantuan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat ("BPP")	14.772,5	656
Bantuan Peningkatan Kesehatan Masyarakat ("BKM")	4.654,7	177
Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum Masyarakat ("BSU")	5.277,1	332
Bantuan Peningkatan Kegiatan Keagamaan dan Sarana Ibadah Masyarakat ("BSI")	6.503,1	503
Bantuan Pelestarian Alam ("BPA")	2.435,1	61
Bantuan BUMN Peduli ("BBP")	10.852,5	7
Total	**44.988,4**	**1.753**

ALAMAT DAN NOMOR TELEPON

Kantor Pusat

GKP Telkom
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 4527101
Fax. : (62-22) 4240313

Investor Relations
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 5
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 521 5109
Fax. : (62-21) 522 0500

Divisi Consumer Service Barat
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 10
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 525 8416
Fax. : (62-21) 5202733

Divisi Consumer Service Timur
Jl. Ketintang No. 156
Surabaya 60231
Tel. : (62-31) 828 6250
Fax. : (62-31) 828 6080

Divisi Business Service
Jl. Letjend S. Parman Kav. 8
Jakarta 11440
Tel. : (62-21) 565 8500
Fax. : (62-21) 565 2800

Divisi Access
Gedung Grha Citra Caraka,Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62–21) 529 03482
Fax. : (62–21) 522 1300

Divisi Infratel
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai M
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 522 1400, 522 1500
Fax. : (62-21) 522 9600

Divisi Enterprise Service
Gedung Chase Plaza, Lantai 22
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21
Jakarta 12910
Tel. : (62-21) 386 6600
Fax. : (62-21) 386 8400

Divisi Multimedia
Menara Multimedia, Lantai 15
Jl. Kebon Sirih No. 12
Jakarta 10110
Tel. : (62-21) 386 0500
Fax. : (62-21) 386 6267

Divisi Telkom Flexi
Jl. Kebon Sirih No. 36
Jakarta 10110
Tel. : (62-21) 344 7070
Fax. : (62-21) 344 0707

Maintenance Service Center
Jl. Japati No. 1, Lantai 4
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 4129
Fax. : (62-22) 452 4125

Telkom Learning Center
Jl. Gegerkalong Hilir No. 47
Bandung 40152
Tel. : (62-22) 201 4508, 201 4441
Fax. : (62-22) 201 4429

Telkom Supply Center
Jl. Japati No. 1, Lantai 6
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 6170
Fax. : (62-22) 720 6583

Research And Development Center
Jl. Gegerkalong Hilir No. 47
Bandung 40152
Tel. : (62-22) 457 1050, 457 1051
Fax. : (62-22) 201 3505

Information System Center
Jl. Japati No. 1, Lantai 4
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 4228
Fax. : (62-22) 720 1890

Divisi Carrier And Interconnection Services
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 5291 7007
Fax. : (62-21) 5289 2080

Management Consulting Center
Jl. Cisanggarung No. 2
Bandung 40115
Tel. : (62-22) 452 1620
Fax. : (62-22) 452 1549

Telkom Community Development Center
GKP Telkom, Lantai 8
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 8219
Fax. : (62-22) 452 8206

Assessment Service Center
GKP Telkom, Lantai 3
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 3359, 452 3360
Fax. : (62-22) 452 3344 , 452 3355

Anak Perusahaan

PT Telekomunikasi Selular
Wisma Mulia Mezzanine, Lantai 19
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 524 0811
Fax. : (62-21) 529 06091

PT Infomedia Nusantara
Jl. R.S. Fatmawati Kav. 77-81
Jakarta 12150
Tel. : (62-21) 720 1221
Fax. : (62-21) 720 1226

PT Indonusa Telemedia
Gedung TelkomVision, Lantai 3
Jl. Prof. Dr. Supomo No. 139, Tebet
Jakarta 12810
Tel. : (62-21) 829 8800, 831 2200
Fax. : (62-21) 831 7400

PT Graha Sarana Duta
Jl. Kebon Sirih No. 10-12
Jakarta Pusat 10110
Tel. : (62-21) 380 0868
Fax. : (62-21) 3483 0653

PT Telekomunikasi Indonesia International
Menara Jamsostek, Lantai 24
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 38
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 2995 2300
Fax. : (62-21) 5296 2358

PT Multimedia Nusantara
The East Tower, Lantai 37
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E3.2 No. 1
Jakarta 12950
Tel. : (62-21) 521 0123 (ext. 101)
Fax. : (62-21) 521 0124

PT Dayamitra Telekomunikasi
Gedung Grha Pratama, Lantai 5
Jl. M.T. Haryono Kav. 15
Jakarta 12810
Tel. : (62-21) 8370 9592/93
Fax. : (62-21) 8370 9591

PT Pramindo Ikat Nusantara
Plaza Kuningan Gedung Annex, Lantai 7
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C11-C14
Jakarta Selatan 12940
Tel. : (62-21) 520 2560
Fax. : (62-21) 5292 0156

Perusahaan Assosiasi

PT Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Mukakuning- Batam 29433
Tel. : (62-770) 612 300
Fax. : (62-770) 612 200

PT Citra Sari Makmur
Chase Plaza, Lantai 16
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21
Jakarta 12910
Tel. : (62-21) 520 8311, 570 0194
Fax. : (62-21) 570 4656

PT Finnet Indonesia
Menara Bidakara, Lantai 6-12-21
Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta 12870
Tel. : (62-21) 829 9999
Fax. : (62-21) 828 1999

PT Pasifik Satelit Nusantara
Gedung Kantor Taman
A9 Unit C3 - C4
Jl. Mega Kuningan Raya Lot 8/9 No. 9
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Tel. : (62-21) 576 2292
Fax. : (62-21) 576 2290

PT Patra Telekomunikasi Indonesia
Jl. Pringgodani 2 No. 33
Alternatif Cibubur
Depok 16954
Tel. : (62-21) 845 4040
Fax. : (62-21) 845 7610

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia
Jl. Mangga No. 4
Bandung 40114
Tel. : (62-22) 721 6282, 7217315
Fax. : (62-22) 720 2596

PT Sigma Citra Caraka
Menara DEA I, Lantai 8
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat IX Kav. E43
No. 1, Jakarta 12950
Tel. : (62-21) 576 2150
Fax. : (62-21) 576 2155.

Ariawest International Finance B.V
Equity Trust Co. Nv.
Strawinskylaan 3105, Atrium 7th Floor
1077 ZX Amsterdam
The Netherlands
Tel. : (31-20) 406 44 65
Fax. : (31-20) 642 76 75

PT Balebat Dedikasi Prima
Jl. Veteran II No. 17 Teluk Pinang
Ciawi
Bogor 16720
Tel. : (62-251) 824 7760
Fax. : (62-251) 824 7761

Scicom Bhd
Business Office
Scicom (MSC) Berhad
Menara TA One, 25th Floor
22, Jalan P. Ramlee
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. : (60-3) 2162 1088
Fax. : (60-3) 2164 9820

PT Administrasi Medika
Gedung Arthaloka Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.2
Jakarta 10220
Tel : (62-21) 579 33299
Fax : (62-21) 579 33288

ALAMAT PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Auditor Eksternal

KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, a member firm of PwC Global Network ("PwC")
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav X7 No. 6
Jakarta 12940
Tel.: (62-21) 521 2901
Fax. : (62-21) 5290 5555/5050

Kustodian sentral

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Jakarta Stock Exchange
Menara 1, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53
Jakarta, 12190
Tel. : (62-21) 515 2855
Fax. : (62-21) 5299 1199

Bank Kustodian ADS

The Bank of New York Mellon Depositary Receipts
101 Barclay Street
22nd Floor West
New York, NY 10286
Tel. : (1-212) 815 8162
Fax. : (1-212) 571 3050

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Wisma Diners Club Annex
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Tel. : (62-21) 5709009
Fax. : (62-21) 5709026

Agen Pemeringkat

PT Pefindo
Panin Tower Senayan City, Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270
Tel. : (62-21) 7278 2380
Fax. : (62-21) 7278 2370

Wali Amanat

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
Graha Niaga, Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel. : (62-21) 300 6420
ext. 32001 - 32003
Fax. : (62-21) 250 5777

DAFTAR ISTILAH

3G
Istilah umum untuk teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga. 3G menawarkan koneksi berkecepatan tinggi bagi telepon selular dan perangkat komunikasi bergerak lainnya, sehingga memungkinkan untuk *video conference* dan jalannya aplikasi lainnya yang membutuhkan konektivitas *broadband* ke jaringan internet.

3,5G
Pengelompokan teknologi data dan telepon bergerak yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai performa yang lebih baik daripada sistem 3G, yang merupakan langkah menuju peluncuran kapasitas 4G.

ADS
Singkatan dari American Depository Share (atau juga disebut dengan ADR), yaitu sertifikat yang diperdagangkan di pasar surat berharga AS (seperti Bursa Saham New York) yang mewakili sejumlah saham asing. Masing-masing dari sertifikat ADS Kami mewakili 40 saham Seri B Kami.

ADSL
Asymmetric digital subscriber line adalah bentuk teknologi jalur pelanggan digital, yang merupakan sebuah teknologi komunikasi data yang memungkinkan pengiriman data yang cepat dengan menggunakan kabel telepon tembaga daripada dengan kabel modem telepon konvensional.

APMK
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran dalam bentuk kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu debet.

ARPU
Singkatan dari *Average Revenue per User* adalah ukuran yang digunakan terutama oleh perusahaan jasa telekomunikasi dan jaringan, yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan dari rata-rata pengguna layanan. Istilah ini diartikan sebagai total pendapatan yang dibagi oleh jumlah pelanggan atau pengguna yang menggunakan layanan itu.

ATM
Kependekan dari *Asynchronous Transfer* Mode, yaitu mode pengiriman yang memungkinkan informasi itu diatur ke dalan bentuk sel-sel. Ini tidak tersinkronisasi dalam hal bahwa berulangnya pengaturan sel-sel yang berisi informasi dari seorang pengguna tidak harus terjadi secara berkala.

Backbone
Merujuk pada jaringan telekomunikasi utama yang terdiri dari fasilitas transmisi dan switching yang menghubungkan beberapa node akses jaringan. Jaringan transmisi antara fasilitas node dan switching termasuk gelombang mikro, kabel bawah laut, satelit, serat optik dan teknologi transmisi lainnya.

Bandwidth
Merujuk kepada kapasitas hubungan komunikasi.

Bank Indonesia
Adalah bank sentral Indonesia.

Bapepam-LK
Kependekan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BEI
Bursa Efek Indonesia.

Bisnis IME
Bisnis *Information, Media & Edutainment* adalah layanan TIME Kami.

Broadband
Broadband dalam telekomunikasi adalah metode pengiriman sinyal yang termasuk atau menangani jangkauan (pita) frekuensi yang relatif lebar.

BRTI
Adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

BSC
Singkatan dari *Base Station Controller* yang merupakan perangkat yang bertanggung jawab untuk alokasi sumber daya radio ke stasiun bergerak, pengaturan frekuensi dan pengalihan antara BTS yang dikendalikan oleh BSC

BSS
Singkatan dari *Base Station Sub System* yaitu bagian dari jaringan telepon selular yang bertanggung jawab untuk menangani trafik dan sinyal antara telepon bergerak dan subsistem switching jaringan. BSS terdiri dari dua komponen: *Base Transceiver Station* (BTS) dan *Base Station Controller* (BSC).

BTS
Singkatan dari *Base Transceiver Station* yang merupakan perangkat untuk mengirim dan menerima sinyal telepon radio ke dan dari sistem telekomunikasi lain.

BUMN
Badan Usaha Milik Negara yang dimiliki pemerintah, negara, publik atau parastatal yang merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah sebagai pemiliknya.

BWA
Broadband Wireless Access adalah sebuah teknologi yang melayani akses Internet nirkabel atau akses jaringan komputer berkecepatan tinggi di area yang luas.

Byru
Adalah layanan telekomunikasi satelit bergerak GSM pertama di Indonesia yang memanfaatkan jaringan ACeS (ASIA Cellular Satellite) dan satelit Garuda-1.

Capacity Utilization Band
atau Pita C adalah bagian dari spektrum elektromagnetik dalam kisaran gelombang mikro dari frekuensi yang berkisar dari 4 hingga 8 GHz. Ini merupakan band frekuensi pertama yang dialokasikan untuk komunikasi dari bumi ke satelit secara komersial. Satelit C Band yang khusus menggunakan frekuensi 3,7 – 4,2 GHz untuk downlink dabn 5,925 – 6,425 GHz untuk uplink.

CBHRM
Sistem *Competency Based Human Resource Management* merujuk pada sebuah pendekatan pengelolaan sumber daya yang fokus pada keterampilan

dan bakat yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas tertentu secara efektif.

CDMA
Singkatan dari *Code Division Multiple Access* adalah teknologi jaringan yang memiliki spektrum berpita lebar.

CPE
Customer Premises Equipment merupakan perangkat handset, penerima, *set-top box* atau perangkat lain yang digunakan oleh pelanggan layanan telekomunikasi nirkabel, tetap maupun berbasis pita lebar, yang merupakan milik dari operator jaringan tertentu dan diletakkan pada lokasi pelanggan.

DCS
Singkatan dari Digital Communication System yang merupakan sistem selular bergerak dengan menggunakan teknologi GSM yang beroperasi di pita frekuensi 1800 MHz.

Deppen
Departemen Penerangan. Lihat Kemenkominfo.

DGPIO
Merujuk pada Dirjen Pos dan Operasi Informasi dari Kemenkominfo.

DGRE
Merujuk pada Dirjen Pos dan Sumber Daya Informasi dan Peralatan dari Kemenkominfo.

Dial-Up
Istilah teknologi informasi yang merujuk pada akses kepada internet dengan menggunakan saluran telepon tetap atau telepon bergerak

DINAccess
Merujuk pada produk telekomunikasi Kami – Layanan Komunikasi Data.

Ditjen Postel
Merujuk pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang kemudian digantikan oleh Dirjen Pos dan Sumber Daya Informasi dan Peralatan dan Dirjen Pos dan Operasi Informasi.

Downlink
Merujuk pada frekuensi sinyal radio yang dipancarkan oleh satelit ke stasiun bumi

DPR
Singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan parlemen nasional Indonesia

DPRD
Singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan parlemen daerah di Indonesia

DSL
Singkatan dari *Digital Subscriber Line* adalah teknologi yang menyediakan kombinasi pelayanan mencakup voice, data dan penyiaran video satu arah yang dikirimkan melalui distribusi exsisting copper feeder dan saluran pelanggan

DTF
Divisi Telkom Flexi) adalah Unit bisnis Kami yang mengelola layanan telekomunikasi nirkabel dengan merek "Flexi".

DTH
Penyiaran satelit *Direct-to-Home* adalah pendistribusian sinyal televisi yang berasal dari satelit stasiun bumi berkekuatan tinggi ke antena kecil dan alat penerima satelit yang terpasang di rumah-rumah di seluruh Indonesia.

Dual Band
Kemampuan jaringan selular bergerak dan perangkat selular bergerak untuk beroperasi melewati dua pita frekuensi, sebagai contohnya GSM 900 dan GSM 1800.

E1 Link
Unit transmisi backbone yang mengoperasikan dua kumpulan kabel yang terpisah, biasanya pasangan kabel yang dijalin. Angka data E1 link adalah 2.048 Mbps (*full duplex*) yang terbagi menjadi 32 slot waktu.

e-Business
Merujuk pada solusi *Electronic Business* termasuk layanan pembayaran elektronik, *data center* internet dan solusi aplikasi dan konten.

e-Commerce
Electronic commerce merupakan penjualan dan pembelian produk atau layanan melalui sistem elektronik seperti jaringan internet dan jaringan komputer lainnya.

e-Money
Electronic money adalah uang yang dipertukarkan secara elektronik.

e-Payment
Electronic funds transfer ("EFT") adalah pertukaran atau pengiriman uang secara elektronik dari satu rekening ke rekening lain, baik dalam satu institusi keuangan yang sama atau beberapa institusi keuangan yang beragam, melalui sistem komputer.

EDGE
Enhanced Data rates for GSM Evolution merupakan teknologi telepon bergerak digital yang memungkinkan pengiriman data yang lebih baik sebagai perpanjangan teknologi GSM yang sesuai.

Edutainment
Kependekan dari Edukasi dan Hiburan (*Entertainment*).

Electronic Data Capture
Adalah sistem komputer yang dirancang untuk pengumpulan data klinis dalam bentuk elektronik untuk digunakan terutama pada uji coba klinis pada manusia.

Enterprise Business Solution
Merupakan solusi konsultasi bagi pelanggan korporasi yang menjadi bagian solusi TIME, dan demo simulasi (untuk *e-Payment* dan VPN (*Virtual Private Network*) melalui Jaringan Telepon Tetap, GSM dan Flexi).

EVDO
(*Evolution Data Optimize*) merupakan layanan telepon berbasis pita lebar nirkabel berteknologi 3G dan berkecepatan tinggi untuk layanan CDMA.

Fiber Optik
Adalah kabel yang menggunakan serat optik dan teknologi laser di mana pantulan cahaya yang mewakili data dikirim melalui filamen kaca yang tipis.

FMB
Flexi Mobile Broadband adalah program promosi produk Flexi yang menawarkan akses Internet berbasis EVDO.

Frame Relay
Frame Relay adalah protokol *packet switching* (di mana pesan terbagi menjadi paket-paket sebelum mereka dikirim) untuk perangkat penghubung yang terpasang di jaringan komputer yang terbentang di daerah yang relatif luas.

FTA
Free To Air merujuk pada layanan siaran (TV) dan radio yang jernih (*unencrypted*) sehingga pengguna yang memiliki alat penerima dapat menerima sinyal dan menyimak atau mendengarkan konten yang disiarkan tanpa harus berlangganan (atau dikenakan biaya tambahan) atau hanya membayar sekali (misalnya per siaran yang diterima).

FTTx
Fiber To The x adalah istilah umum untuk arsitektur jaringan *broadband* yang menggunakan serat optik untuk menggantikan seluruh atau sebagian dari loop lokal logam biasa yang digunakan untuk telekomunikasi terakhir. Istilah ini berasal dari generalisasi beberapa konfigurasi dari penyebaran serat seperti serat ke rumah, serat ke node, serat ke gedung dll.

FUP (MB)
Fair Usage Policy adalah program promosi produk Flexi yang menawarkan Internet akses berbasis EVDO. FUP dirancang untuk memastikan program FMB Kami dapat melayani pelanggan dengan lebih cepat dan dapat diandalkan.

Gateway
Gateway adalah perangkat yang menjembatani jaringan berbasis paket (IP) dan jaringan berbasis sirkuit (PSTN).

Gb
Gigabyte adalah satuan ukuran informasi yang digunakan, misalnya, untuk mengukur memori atau kapasitas penyimpanan pada komputer.

Gbps
Gigabyte per second. Dalam telekomunikasi, Gbps adalah jumlah bits, karakter, atau blok per unit waktu yang bergerak antara perangkat dalam sistem pengiriman data. Biasanya diukur dalam kumpulan bit unit per detik atau byte per detik.

GHz
Giga Hertz. Hertz (yang disimbolkan Hz) adalah satuan ukuran frekuensi SI yang dituliskan sebagai jumlah siklus per detik dari sebuah fenomena berkala.

GPON
Gigabyte-Passive Optical Network. Jaringan optik pasif (PON) adalah jaringan serat optik dengan koneksi satu titik ke berbagai titik lain yang terhubung ke arsitektur jaringan di suatu lokasi, di mana pemecah optik yang tak dialiri listrik dipasang untuk memungkikan serat optik untuk melayani beberapa lokasi, umumnya 16-128.

GPRS
Singkatan dari *General Packet Radio Service* yang merupakan teknologi packet switching data yang memungkinkan informasi dikirim dan diterima di seluruh jaringan bergerak dan hanya menggunakan jaringan tersebut saat ada data yang akan dikirim.

GSM
Singkatan dari *Global System for Mobile Telecommunication* yang merupakan standar Eropa untuk telepon selular digital.

HSPA
Singkatan dari *High Speed Packet Access* (HSPA+) yang merupakan Proyek Kemitraan Generasi ketiga (3GPP) seri 7 dengan arsitektur berpusat di IP yang lebih sederhana untuk jaringan telepon bergerak yang melampaui sebagian besar model perangkat lama. HSPA + dapat mencapai kecepatan pengiriman data tertinggi hingga 42 Mbit/detik untuk kegiatan *downlink* dan 22 Mbit/detik untuk *uplink*.

IMT-2000
International Mobile Telecommunications-2000 adalah spesifikasi yang ditetapkan oleh Persatuan Telekomunikasi Internasional. Layanan aplikasi termasuk telepon nirkabel untuk wilayah yang luas, akses Internet bergerak, panggilan video dan TV bergerak, di lingkungan yang serba bergerak.

Intelligent Network atau IN
Adalah jaringan telekomunikasi *independent* di mana fungsi logis telah dipindahkan dari *switch* dan ditempatkan di noda komputer yang disebarkan melalui jaringan tersebut. Ini memungkinkan alat tersebut untuk mengembangkan dan mengendalikan layanan dengan lebih efisien sehingga layanan telepon baru dapat diluncurkan dengan cepat.

Interkoneksi
Dalam telekomunikasi, interkoneksi adalah hubungan fisik dari jaringan sebuah *carrier* dengan peralatan atau fasilitas yang tidak merupakan bagian dari jaringan itu.

IP Core
Adalah kelompok data logis yang digunakan untuk membuat *field programmable gate array* (FPGA) atau *application-specific integrated circuit* (ASIC) untuk sebuah produk.

IP DSLAM
Kependekan dari *Internet Protocol-Digital Subscriber Line Access Multiplexer* (DSLAM) yang memungkinkan saluran telepon terhubung secara cepat ke internet. Ini merupakan perangkat jaringan, yang ditempatkan dekat lokasi pelanggan yang menghubungkan banyak saluran telekomunikasi berlangganan dengan tekonologi digital (DSL) untuk saluran *backbone* internet berkecepatan tinggi yang menggunakan teknik *multiplexing*.

IP VPN
Adalah layanan komunikasi data yang menggunakan IP *Multi Protocol Label Switching* (MPLS) dan menjadi dasar bagi hubungan satu perangkat ke perangkat lain. Layanan ini terhubung ke sistem keamanan data, L2TP dan IPSec. Kecepatannya tergantung pada kebutuhan pelanggan, mulai dari 64 Kbps hingga 2 Mbps.

IPTV
(*Internet Protocol Television*) adalah sistem yang memungkinkan layanan televisi disiarkan dengan menggunakan *Internet protocol* melalui jaringan *packet-switched* seperti Internet, dan bukan melalui jaringan umum, sinyal satelit, dan televisi kabel.

ISDN
Singkatan dari Integrated Services Digital Network, yaitu sebuah jaringan yang menyediakan konektivitas digital secara menyeluruh dan memungkinkan pengiriman suara, data dan video secara bersamaan serta menyediakan konektivitas internet berkecepatan tinggi.

ITeS
IT enabler Services adalah layanan TIME Kami.

ITO
Adalah IT Outsourcing atau Aplikasi yang Terkelola yang merujuk pada penjelasan layanan TIME.

ISP
(*nternet Services Provider*) adalah organisasi yang menyediakan akses Internet.

ITU
Adalah kependekan dari *International Telecommunications Union.*

Kapasitas Terminal Lokal
Merujuk pada sekumpulan saluran di terminal lokal tertentu yang terhubung dan dapat dihubungkan dengan pembangkit luar.

Kemenkominfo
Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi yang memiliki wewenang mengeluarkan regulasi telekomunikasi, yang dipindahtangankan dari Deppen pada Februari 2005.

KPPU
Adalah kependekan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KSO
Adalah Kerja Sama Operasi yang merupakan bentuk perjanjian yang mencakup *Build, Operate dan Transfer* yang sebelumnya digunakan Telkom dengan konsorsium mitranya di mana konsorsium itu menginvestasikan dan mengoperasikan fasilitas milik Telkom divisi regionalnya. Mitra konsorsium itu dimiliki oleh operator internasional dan perusahaan swasta nasional atau pada saat tertentu Telkom telah mengakuisisi mitra konsorsium tersebut.

LAN
Kependekan dari *Local Area Network* adalah jaringan dengan stasiun yang saling terkoneksi yang memungkinkan pembagian sumber daya jaringan satu sama lain. LAN umumnya mencakup suatu wilayah yang terbatas (misalnya dalam sebuah gedung).

Lambda
Lambda merujuk pada panjang gelombang, terutama dalam ilmu fisika, teknik elektro dan matematika.

Lines In Service ("LIS")
Merujuk pada saluran penghasil pendapatan yang terhubung pada pelanggan, termasuk telepon berbayar, tapi tidak termasuk pelanggan telepon selular bergerak atau saluran yang digunakan di internal kami.

Lisensi Moderen
Adalah izin usaha sesuai UU Telekomunikasi yang menggantikan lisensi usaha yang ada untuk pelayanan telekomunikasi.

LSE
Bursa Saham London.

LTE
Long Term Evolution adalah standar teknologi untuk komunikasi data nirkabel yang berkecepatan tinggi untuk telepon bergerak dan terminal data.

Manfaat Iuran Pensiun Pasti
Merujuk pada jenis program pensiun yang besaran kontribusi tahunan dari perusahaan telah ditentukan. Rekening pribadi disiapkan bagi para peserta program dan manfaatnya dihitung berdasarkan jumlah yang disetorkan ke dalam rekening tersebut (melalui kontribusi perusahaan dan, jika mungkin, kontribusi karyawan) ditambah dengan pendapatan investasi apapun dalam bentuk uang yang tersimpan di dalam rekening tersebut. Hanya kontribusi perusahaan kepada rekening tersebut yang dijamin, bukan manfaat di masa depannya. Dalam program iuran pasti, manfaat masa depan sangat berfluktuasi berdasarkan pendapatan investasinya.

Manfaat Pensiun Pasti
Merujuk pada jenis program rencana pensiun di mana perusahaan menjanjikan manfaat bulanan tertentu terkait pensiun yang ditetapkan oleh sebuah formula sejak awal dengan berdasarkan pada sejarah pendapatan, masa kerja dan usia karyawan tersebut, bukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi. Program ini dijelaskan dalam kaitannya dengan formula untuk menghitung kontribusi perusahaan yang telah diketahui sejak awal.

Master Plan INSYNC2014
Adalah rencana korporasi Telkom untuk membangun jaringan *Backbone* NGN untuk mendukung layanan berbasis pita lebar Kami.

Mbps
Merujuk pada *Megabyte per second,* yang merupakan satuan pengukuran pengiriman sinyal digital yang disebutkan dalam jutaan bit per detik.

Menkeu
Menteri Keuangan.

MHz
Kependekan dari Megahertz yang merupakan satuan pengukur frekuensi. Satu MHz setara dengan satu juta siklus per detik.

Mobile Broadband
Adalah istilah pemasaran untuk akses Internet nirkabel melalui modem *portable*, telepon bergerak, modem USB nirkabel atau perangkat bergerak lainnya.

MSAN
Multi Service Access Network adalah teknologi jaringan akses serat optik generasi ketiga dan *platform* tunggal yang dapat mendukung teknologi dan layanan tradisional serta baru selain menyediakan *gateway* untuk jaringan inti NGN. MSAN memungkinkan kita menyediakan layanan *triple play* yang menggabungkan akses Internet berkecepatan tinggi, layanan paket suara dan IPTV melalui infrastruktur jaringan yang sama.

Network Access Point
Network Access Point adalah fasilitas pertukaran jaringan publik di mana penyedia layanan internet terkoneksi dengan satu sama lain melalui pengaturan *peering*.

NGN
Merujuk pada *Next Generation Network* yang merupakan istilah umum yang merujuk pada jaringan berbasis paket untuk meyediakan layanan, termasuk jasa telekomunikasi, dan dapat menggunakan teknologi *broadband*, teknologi yang memungkinkan pemindahan kualitas layanan dan di mana fungsi-fungsi terkait layanan bertindak secara independen dari teknologi terkait pemindahan yang menjadi dasarnya. NGN dimaksudkan untuk dapat, dengan satu jaringan, memindahkan beragam jenis informasi dan layanan (*voice*, data dan seluruh jenis media, seperti video) dengan merangkumnya ke dalam paket-paket, seolah ini dioperasikan di internet. NGN umumnya dibangun di sekitar Internet Protocol.

Node b
BTS untuk jaringan 3G W-CDMA/UMTS.

NYSE
Bursa Saham New York.

Off-net
Dalam telekomunikasi, panggilan *off-net* adalah komunikasi antara dua pelanggan dari operator berbeda.

On-net
Merujuk pada panggilan *on-net*, yaitu komunikasi antara dua pelanggan dari operator telekomunikasi yang sama.

OLO
Singkatan dari *Other License Operator* yang merujuk pada operator telekomunikasi lain di luar Telkom.

Outside Plant
Adalah perangkat dan fasilitas untuk menghubungkan lokasi pelanggan dengan terminal telepon lokal.

PBH
Pola Bagi Hasil adalah jenis perjanjian yang mencakup *Build, Operate* dan *Transfer* antara Telkom dan perusahaan swasta nasional lainnya. Skema ini memungkinkan perusahaan swasta berinvestasi membangun fasilitas telekomunikasi yang akan dioperasikan oleh Telkom.

PDN
Packet Data Network adalah jaringan komunikasi digital yang memecah kumpulan data yang akan dikirim ke segmen-segmen yang disebut paket, yang kemudian disalurkan sendiri-sendiri.

Periode KSO
Merujuk pada periode berlakunya Perjanjian KSO.

Perjanjian KSO
Merujuk pada perjanjian yang terus mengalami revisi dari waktu ke waktu, yang mengatur operasional dari jaringan di wilayah KSO tertentu untuk periode KSO. Lihat "Periode KSO".

Pemerintah
Merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia.

Pemanfatan Kapasitas
Merujuk pada rasio saluran layanan terhadap saluran terpasang atau kapasitas pertukaran lokal.

PKLN
Adalah Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang merupakan tim gabungan yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia dengan permintaan khusus dari perusahaan BUMN seperti Telkom untuk memperoleh pinjaman komersial dari luar negri.

Pulsa
Pulsa adalah satuan perhitungan biaya telepon.

POWL
Adalah kependekan dari *Public Offering Without Listing* atau penawaran publik tanpa harus mendaftarkan sahamnya di bursa.

PTSN
Singkatan dari *Public Switched Telephone Network* yaitu jaringan telepon yang dioperasikan dan dipelihara oleh Telkom dan Unit KSO untuk dan atas nama Telkom.

RIO
Singkatan dari *Reference Interconnection Offer* adalah sebuah regulasi mencakup semua fasilitas, termasuk tarif interkoneksi, fasilitas teknis dan masalah administrasi yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan operator telekomunikasi kepada operator lainnya untuk akses interkoneksi.

RMJ
Regional Metro Junction adalah layanan instalasi jaringan kabel antara kota di satu wilayah atau provinsi.

Roaming
Adalah istilah khusus telekomunikasi nirkabel yang merujuk pada perpanjangan layanan konektivitas di suatu lokasi yang berbeda dengan lokasi rumah di mana layanan itu terdaftar.

RUPS
Merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham, yang juga dapat berarti RUPST atau RUPSLB.

RUPSLB
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saluran Sewa
Adalah saluran transmisi telekomunikasi yang menghubungkan satu poin yang tidak bergerak dengan titik lainnya, yang disewa dari satu operator untuk keperluan khusus.

Saluran Terpasang
Merupakan saluran yang dibangun sebagai poin distribusi dan siap untuk dihubungkan kepada pelanggan.

SCCS
Singkatan dari Submarine Communications Cable System, yaitu kabel yang dibentangkan di bawah laut antara stasiun yang dibangun di daratan untuk menghantarkan sinyal telekomunikasi melalui jalan bawah laut.

SDP
Istilah Service Delivery Platform ("SDP") merujuk pada sejumlah komponen yang menyediakan arsitektur penghantar layanan (seperti penciptaan layanan, kendali sesi dan protokol) untuk sebuah jenis layanan.

SEC
Adalah Komisi Pasar Modal dan Sekuritas AS.

SIM atau Kartu SIM
Singkatan dari Subscriber Identity Module yaitu kartu pintar yang dimasukkan ke dalam telepon selular yang dapat mengidentifikasi jaringan GSM yang berlangganan dan berisi data pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori untuk penyimpanan pesan.

Sistem CMS
Singkatan dari *Content Management System* yaitu sistem yang berisi sejumlah prosedur yang digunakan untuk mengelola alur kerja di lingkungan terpadu.

SISKOMDAT
Sistem Komunikasi Data terkait dengan perizinan.

Sistem Duopoli
Sistem Duopoli merupakan sebuah sistem yang memungkinkan dua operator nasional, yaitu Telkom dan Indosat di Indonesia, untuk menyediakan layanan telekomunikasi tidak bergerak termasuk SLJJ dan SLI.

SLI
Sambungan Langsung Internasional merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin melakukan panggilan internasional tanpa bantuan seorang operator daru terminal telepon manapun.

SLJJ
Sambungan Langsung Jarak Jauh adalah bentuk panggilan jarak jauh yang dirancang untuk pelanggan di wilayah lain namun masih berada di satu Negara. Secara umum, pelanggan tinggal di wilayah yang berbeda-beda yang memiliki kode wilayah berbeda.

SMS Premium
Layanan Pesan Pendek atau *Short Message Service Premium* adalah layanan pengiriman pesan teks melalui telepon, web, atau sistem komunikasi bergerak dengan menggunakan protokol komunikasi standar yang memungkinkan pertukaran pesan antara perangkat telepon kabel tidak bergerak atau telepon bergerak.

Spektrum Frekuensi Radio
Spektrum radio adalah bagian spektrum gelombang elektromagnetik yang berhubungan dengan frekuensi radio – yaitu, frekuensi yang lebih rendah daripada 300 GHz (atau setara dengan panjang gelombang yang lebih panjang dari sekitar 1 mm).

Softs Switch
Adalah perangkat sentral dalam jaringan telepon yang menghubungkan panggilan dari satu saluran telepon ke saluran lainnya, dengan mengandalkan piranti lunak yang dijalankan di dalam sistem komputer. Pekerjaan ini sebelumnya dikerjakan oleh piranti keras dengan papan tombol untuk mengarahkan panggilan.

STM-1
Adalah Synchronous Transport Module level 1 yang merupakan standar transmisi jaringan serat optik SDH ITU-T. Modul ini memiliki kecepatan 155,52 Mbit/detik. Level lainnya adalah STM-4, STM-16 dan STM-64.

Stasiun Bumi
Antenna dan perangkat terkait yang digunakan untuk menerima atau mengirim sinyal telekomunikasi via satelit.

Switch
Adalah perangkat elektronik, listrik atau mekanis yang berfungsi membuka atau menutup sirkuit, melengkapi atau menghentikan jalur listrik, atau memilih jalur atau sirkuit, yang digunakan untuk mengarahkan trafik di jaringan telekomunikasi.

Telepon Nirkabel Tidak Bergerak
Adalah hubungan telepon nirkabel lokal dengan menggunakan teknologi selular, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan pengguna di suatu lokasi ke terminal telepon.

Telepon Kabel Tidak Bergerak
Adalah layanan telepon melalui kabel tidak bergerak yang menghubungkan seorang pengguna di lokasi tertentu yang tidak bergerak ke terminal telepon lokal, biasanya dengan menggunakan nomor telepon sendiri.

Tera Router
Tera router atau terabit router pada teorinya memungkinkan kapasit as jaringan pada skala terabits (1 terabit = 1 juta gigabits).

TITO
Trade In Trade Off adalah bentuk Pengembangan Jaringan pada proyek "Model Pengembangan dan Modernisasi Akses *Broadband* melalui TITO (*Trade In Trade Off*)".

Tidak Bergerak
Merujuk pada layanan telepon tidak bergerak kabel dan tidak bergerak nirkabel.

TIME
Kependekan dari *Telecommunication, Information, Multimedia* dan *Edutainment.*

Terminal *Trunk*
Terminal yang berfungsi menghubungkan satu terminal telepon ke terminal telepon lainnya baik itu terminal lokal atau *trunk*.

Transformasi OBCE
Operational support system, Business support system, Customer support system and Enterprise relations management adalah Inisiatif Strategis Kami.

Transmisi Gelombang Mikro
Adalah transmisi yang terdiri dari gelombang elektromagnetik di spektrum frekuensi radio di atas 890 juta siklus per detik dan di bawah 20 miliar siklus per detik.

Transponder Satelit
Adalah perangkat penyiaran radio yang dipasang di satelit untuk menerima sinyal dari bumi dan memperkuatnya lalu mengirimnya kembali ke bumi.

TTCS
Telecommunication Traffic Clearing System adalah topik mengenai Regulator Telekomunikasi.

TV Berbayar
TV berbayar, TV premium atau saluran premium adalah layanan siaran televisi berlangganan yang disediakan melalui kabel digital dan analog serta satelit tapi juga melalui jalur digital dan televisi Internet.

UMTS
Kependekan dari *Universal Mobile Telephone System* yang merupakan sistem telekomunikasi bergerak Generasi ke-3 (3G) yang dikembangkan dalam kerangka IMT-2000.

VAS
Value Added Services adalah bagian layanan TIME.

VoIP
Kependekan dari *Voice over Internet Protocol* yang merupakan cara mengirim informasi suara menggunakan IP.

VPN
Kependekan *Virtual Private Network*, yaitu koneksi jaringan private yang aman, yang dibangun pada puncak infrastruktur yang mudah diakses publik, seperti internet atau jaringan telepon publik. VPN umumnya mengombinasikan beberapa enkripsi, sertifikat digital, pengeidentifikasian pengguna yang kuat dan kendali akses agar dapat mengamankan trafik. Ini menyediakan konektivitas ke banyak mesin yang berada di belakang gateway atau firewall.

VPN Frame Relay
Adalah layanan VPN yang menggunakan jaringan *frame relay*.

VSAT
Kependekan dari *Very Small Aperture Terminal* yang merupakan antena kecil berdiameter 1,5 hingga 3,0 meter, yang ditempatkan dilokasi pengguna dan digunakan untuk komunikasi dua arah oleh satelit.

Wireless Access Network
Adalah jenis jaringan komputer yang tidak terhubung dengan kabel apapun. Metode ini memungkinkan rumah, jaringan telepon dan instalasi perusahaan menghindari proses penarikan kabel yang mahal ke gedung, atau koneksi antara berbagai lokasi perangkat.

USO
Kependekan dari *Universal Service Obligation* yang merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap seluruh operator jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan bagi publik di Indonesia.

WAP
Kependekan dari *Wireless Application Protocol*, yaitu platform standar teknologi global dan terbuka yang memungkinkan pengguna layanan telekomunikasi bergerak untuk mengakses dan berinteraksi melalui layanan informasi bergerak, seperti as email, situs, informasi keuangan, perbankan *online*, dan informasi dan hiburan (*entertainment*), permainan dan pembayaran mikro.

Wi-MAX
Kependekan dari *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, yang merupakan teknologi telekomunikasi untuk pengiriman data via nirkabel dengan menggunakan mode pengiriman, mulai dari titik ke titik hingga akses internet portable.

Wireless Broadband
Adalah teknologi yang melayani akses internet nirkabel berkecepatan tinggi atau akses jaringan komputer untuk wilayah yang luas.

REFERENSI PERATURAN BAPEPAM-LK NO. X.K.6

NO	Deskripsi Persyaratan	Halaman
1.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	
	a. Penjualan/pendapatan usaha	4
	b. Laba (rugi) kotor	4
	c. Laba (rugi) usaha	4
	d. Laba (rugi) rugi	4
	e. Jumlah saham yang beredar	6
	f. Laba (rugi) bersih per saham	4, 6
	g. Proforma penjualan/pendapatan usaha (jika ada)	6
	h. Proforma laba (rugi) bersih (jika ada)	6
	i. Proforma laba (rugi) bersih per saham (jika ada)	6
	j. Modal kerja bersih	3
	k. Jumlah aktiva	3
	l. Jumlah investasi	4
	m.Jumlah kewajiban	3
	n. Jumlah ekuitas	3
	o. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aktiva	4
	p. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	4
	q. Rasio lancar	4
	r. Rasio kewajiban terhadap ekuitas	4
	s. Rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva	4
	t. Rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan (khusus untuk perbankan)	N/A
	u. Rasio kecukupan modal (khusus untuk perbankan)	N/A
	v. Informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan Perusahaan	4
2.	Ikhtisar Saham	
	a. Harga saham tertinggi	11 - 12
	b. Harga saham terendah	11 - 12
	c. Harga saham penutupan	11 - 12
	d. Volume saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada)	11 - 12
3.	Ikhtisar Obligasi	
	a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar	12
	b. Tingkat bunga/imbalan	12
	c. Tanggal jatuh tempo	12
	d. Peringkat obligasi/sukuk	12
4.	Laporan Dewan Komisaris	
	a. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan	15
	b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi	14
	c. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris	16
	d. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris (jika ada)	N/A

NO	Deskripsi Persyaratan	Halaman
5.	Laporan Direksi	
	a. Kinerja Perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi Perusahaan	18
	b. Prospek usaha	21 - 22
	c. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan	20
	d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada)	20
6.	Tanda Tangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri	241
	b. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan	242
	c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya	241
	d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	N/A
7.	Profil Perusahaan	
	a. Nama dan alamat Perusahaan	24
	b. Riwayat singkat Perusahaan	25 - 26
	c. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan	47
	d. Struktur organisasi dalam bentuk bagan	31
	e. Visi dan misi Perusahaan	27
	f. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris (umur, pendidikan, pengalaman kerja)	37 - 38
	g. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi (umur, pendidikan, pengalaman kerja)	39 - 40
	h. Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misalnya: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan)	56 - 58
	• Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi	55
	• Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan	55
	• Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan dengan memperhatikan kesetaraan gender	57
	• Biaya yang telah dikeluarkan	57

NO	Deskripsi Persyaratan	Halaman
	i. Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya yang terdiri dari	67
	• Pemegang saham yang memiliki 5% (lima per seratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik	67
	• Direktur dan komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik	68
	• Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima per seratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik	67
	j. Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada)	33 - 36
	k. Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada)	68
	l. Kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat efek (jika ada)	70
	m. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek (jika ada)	66, 229
	n. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal	66, 229
	o. Akuntan Perseroan	66, 229
	p. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima Perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional (jika ada)	43 - 44
	q. Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).	228
8.	Analisis dan Pembahasan Manajemen	
	a. Tinjauan operasi per segmen usaha, antara lain memuat pembahasan mengenai:	127 - 129
	• Produksi	127 - 129
	• Penjualan/pendapatan usaha	127 - 129
	• Profitabilitas	127 - 129
	• Peningkatan kapasitas produksi	103 - 107
	b. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, antara lain mengenai:	112 - 127
	• Aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva	130 - 131
	• Kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban	131
	• Penjualan/pendapatan usaha	115 - 116, 119 - 120
	• Beban usaha	117 -118, 120 - 122
	• Laba bersih	123
	c. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan	130
	d. Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*), kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*), dan tingkat solvabilitas perusahaan	131
	e. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait	145
	f. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi	136
	g. Komponen-komponen substansial dari pendapatan atau beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan	115 - 116
	h. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru	N/A
	i. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun	114, 119
	j. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	136
	k. Prospek usaha dari perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya	97 - 98
	l. Aspek pemasaran atas produk dan jasa Perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar	50 - 51
	m. Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen (kas per saham dan atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	69

NO	Deskripsi Persyaratan	Halaman
	n. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan saat terakhir apabila belum dinyatakan habis. Dalam hal terdapat perubahan dari Prospektus agar dijelaskan	N/A
	o. Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan Pihak Afiliasi	142 - 143
	p. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	N/A
	q. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	132 - 135
9.	Tata Kelola Perusahaan	
	a. Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	156 - 158
	• uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris	156
	• pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris	157
	• frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris	158
	b. Direksi, mencakup antara lain:	158 - 161
	• ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi	158 - 159
	• pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi	159 - 160
	• frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi	160
	• program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi	161
	c. Komite Audit, mencakup antara lain:	161 - 166
	• nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Audit	162 - 163
	• uraian tugas dan tanggung jawab	161
	• frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit	166
	• laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit	165 - 166
	d. Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan (seperti: komite nominasi dan komite remunerasi), yang mencakup:	167 - 172
	• nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite	167, 169
	• independensi anggota komite	167, 169
	• uraian tugas dan tanggung jawab	167, 169
	• frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite	168, 172
	• uraian pelaksanaan kegiatan komite	168, 169
	e. Uraian mengenai kebijakan penetapan remunerasi bagi Direksi yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan	159 - 160
	f. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan	174 - 176
	• nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat Sekretaris Perusahaan	174
	• uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan	174
	g. Uraian mengenai sistem pengendalian interen yang diterapkan oleh Perusahaan dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan intern (internal control and audit)	177 - 179
	h. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, misalnya: risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan Pemerintah	197 - 212
	i. Uraian mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan konsumen	185
	j. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan	214 - 226
	k. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, antara lain meliputi:	184
	• pokok perkara/gugatan	184
	• kasus posisi	184
	• status penyelesaian perkara/gugatan	184
	• pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan	184
	l. Penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan.	24, 175, 227
	m. Etika Perusahaan	182
	n. Pengungkapan mengenai *whistleblowing system*	182 - 183

Halaman ini sengaja
Dikosongkan

LAPORAN KEUANGAN

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TERHADAP LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan 2011
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Jusman Syafii Djamal
Komisaris Utama

Bobby A.A. Nazief
Komisaris

Mahmuddin Yasin
Komisaris

Johnny Swandi Sjam
Komisaris Independen

Rudiantara
Komisaris Independen

DIREKSI

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama

Sudiro Asno
Direktur Keuangan

Faisal Syam
Direktur Human Capital & General Affair

Ermady Dahlan
Direktur Network & Solution

I Nyoman G. Wiryanata
Direktur Konsumer

Arief Yahya
Direktur Enterprise & Wholesale

Prasetio
Direktur Compliance & Risk Management

Indra Utoyo
Direktur IT, Solution & Strategic Portfolio

Surat Pernyataan Direksi
Mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010
serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anak

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Rinaldi Firmansyah
   Alamat Kantor : Jl. Japati No.1, Bandung 40133
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Cibitung I No.22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : (022) 452 7101
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Sudiro Asno
   Alamat Kantor : Jl. Japati No.1, Bandung 40133
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Rancakendal No.8A, Bandung
   Nomor Telepon : (022) 452 7201
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;

3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Maret 2012

METERAI TEMPEL D016AAAF 6000

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama

Sudiro Asno
Direktur Keuangan

Kantor Perusahaan
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Jl. Japati No.1, Bandung 40133, Indonesia
T +62 22 452 7110
F +62 22 424 0313
www.telkom.co.id

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2011 DAN 2010, DAN 1 JANUARI 2010
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

31 DESEMBER 2011 DAN 2010, DAN 1 JANUARI 2010
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Konsolidasian	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian…….....……	1-3
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian ……	4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian …….	5-6
Laporan Arus Kas Konsolidasian..……..	7-8
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian …….	9-117

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan PSAK No. 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Sesuai dengan PSAK No. 1, kepentingan nonpengendali telah direklasifikasi sebagai bagian dari ekuitas.

Standar akuntansi keuangan di Indonesia berbeda secara signifikan dalam hal-hal tertentu dengan *International Financial Reporting Standards* yang ditetapkan *International Accounting Standards Board*. Informasi mengenai perbedaan dan pengaruhnya disajikan dalam Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian.

JAKARTA
30 Maret 2012

Chrisna A. Wardhana, CPA
Surat Izin Praktek Akuntan Publik No. AP.0231

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F:+ 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010, DAN 1 JANUARI 2010
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2011	31 Desember 2010*)	1 Januari 2010*)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2c,2e,4,37	9.634	9.120	7.805
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2c,2u,37	361	370	360
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	2c,2g,2u, 5,29,37			
Pihak berelasi		932	780	605
Pihak ketiga		3.983	3.564	3.094
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	2c,2g,37	335	89	128
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang	2h,6,29	758	515	435
Uang muka dan beban dibayar di muka	2c,2i,7,37	3.294	3.441	2.497
Tagihan restitusi pajak	2t,31	371	133	666
Pajak dibayar di muka	2t,31	787	716	380
Aset tersedia untuk dijual	2j,8	791	-	-
Aset lancar lainnya	2c	12	1	125
Jumlah Aset Lancar		21.258	18.729	16.095
ASET TIDAK LANCAR				
Penyertaan jangka panjang - bersih	2f,9	235	254	151
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2l,2m,3 10,16,17,20,39	74.897	75.832	76.420
Pensiun dibayar di muka	2c,2s,34,37,47	991	744	209
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	2c,2n,11, 37,41	3.817	3.095	2.533
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2d,2k,3,12	1.789	1.785	2.428
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,31	67	62	95
Jumlah Aset Tidak Lancar		81.796	81.772	81.836
JUMLAH ASET		**103.054**	**100.501**	**97.931**

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 2a dan 47

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 DESEMBER 2011 DAN 2010, DAN 1 JANUARI 2010
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2011	31 Desember 2010*)	1 Januari 2010*)
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	2c,2o,2r, 13,37			
Pihak berelasi		838	1.154	1.759
Pihak ketiga		7.479	6.357	8.039
Utang lain-lain		37	21	2
Utang pajak	2t,31	1.039	736	1.750
Utang dividen	2w	1	255	405
Beban yang masih harus dibayar	2c,2r,14, 27,34,37	4.790	3.409	4.119
Pendapatan diterima di muka	2r,15	2.821	2.681	2.947
Uang muka pelanggan dan pemasok		271	500	111
Utang bank jangka pendek	2c,2p,16,37	100	56	44
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p, 17,37	4.813	5.304	7.716
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		22.189	20.473	26.892
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,31	3.794	4.074	3.220
Pendapatan diterima di muka	2r	242	312	393
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,35	287	242	212
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	2c,2s,36,37	888	1.050	1.802
Liabilitas diestimasi pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2c,2s,34, 37,47	1.715	1.280	1.017
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Liabilitas sewa pembiayaan	2m,10,17	314	409	542
Pinjaman penerusan - pihak berelasi	2c,2p,17, 18,37	2.012	2.741	3.094
Obligasi dan wesel bayar	2c,2p,17, 19,37	3.401	3.249	69
Utang bank	2c,2p,17, 20,37	7.231	10.256	11.087
Nilai perolehan kombinasi bisnis yang ditangguhkan		-	-	108
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		19.884	23.613	21.544
JUMLAH LIABILITAS		42.073	44.086	48.436

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 2a dan 47

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 DESEMBER 2011 DAN 2010, DAN 1 JANUARI 2010
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2011	31 Desember 2010*)	1 Januari 2010*)
EKUITAS				
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B				
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B	1c,22	5.040	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2v,23	1.073	1.073	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	2v,24	(6.323)	(4.264)	(4.264)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	2d,25	478	478	478
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	2f	386	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2u	47	50	18
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2f	240	233	231
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1d,2d	(485)	(485)	(439)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya		15.337	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		31.717	26.571	20.702
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		47.510	44.419	38.562
Kepentingan nonpengendali	2a,21	13.471	11.996	10.933
JUMLAH EKUITAS		60.981	56.415	49.495
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**103.054**	**100.501**	**97.931**

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 2a dan 47

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS)

	Catatan	2011	2010
PENDAPATAN	2c,2r,26,37	71.253	68.629
Penghasilan lain-lain	2r	665	548
BEBAN			
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	2c,2r,28,37	(16.372)	(16.046)
Penyusutan dan amortisasi	2l,2m,2r,10, 11,12	(14.863)	(14.612)
Karyawan	2c,2r,2s,14,27, 34,35,36,37,47	(8.555)	(7.332)
Interkoneksi	2c,2r,30,37	(3.555)	(3.086)
Pemasaran	2r	(3.278)	(2.525)
Umum dan administrasi	2g,2h,2r,5, 6,29,37,47	(2.935)	(2.537)
(Rugi) laba selisih kurs - bersih	2q	(210)	43
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	2f,9	(10)	(14)
Beban lain-lain	2r	(192)	(145)
Jumlah Beban		(49.970)	(46.254)
LABA SEBELUM (BIAYA) PENGHASILAN PENDANAAN DAN PAJAK PENGHASILAN		**21.948**	**22.923**
Penghasilan pendanaan	2c,37	546	421
Biaya pendanaan	2c,2r,37	(1.637)	(1.928)
Jumlah Biaya Pendanaan - Bersih		(1.091)	(1.507)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**20.857**	**21.416**
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2r,2t,31		
Pajak kini		(5.673)	(4.669)
Pajak tangguhan		286	(877)
		(5.387)	(5.546)
LABA TAHUN BERJALAN		**15.470**	**15.870**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	1d,2b,2f	7	2
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2f,2u	4	32
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain - bersih setelah pajak		11	34
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**15.481**	**15.904**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		10.965	11.537
Kepentingan nonpengendali		4.505	4.333
		15.470	15.870
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		10.976	11.571
Kepentingan nonpengendali	21	4.505	4.333
		15.481	15.904
LABA PER SAHAM DASAR	2x,32		
Laba bersih per saham		559,67	586,54
Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS)		22.386,80	23.461,60

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk												
										Saldo laba				
Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
Saldo, 1 Januari 2011-setelah direklasifikasi		**5.040**	**1.073**	**(4.264)**	**478**	**386**	**50**	**233**	**(485)**	**15.337**	**26.571**	**44.419**	**11.996**	**56.415**
Dividen kas	2w,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.819)	(5.819)	(3.030)	(8.849)
Modal saham yang diperoleh kembali - harga perolehan	2v,24	-	-	(2.059)	-	-	-	-	-	-	-	(2.059)	-	(2.059)
Keuntungan dari penyertaan surat berharga	2u	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	(7)	-	(7)
Jumlah laba komprehensif bersih tahun berjalan	1d,2b,2f, 2u,9	-	-	-	-	-	4	7	-	-	10.965	10.976	4.505	15.481
Saldo, 31 Desember 2011		**5.040**	**1.073**	**(6.323)**	**478**	**386**	**47**	**240**	**(485)**	**15.337**	**31.717**	**47.510**	**13.471**	**60.981**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk												
										Saldo laba				
Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah	Kepentingan nonpengendali*)	Jumlah ekuitas
Saldo, 1 Januari 2010		**5.040**	**1.073**	**(4.264)**	**478**	**386**	**18**	**231**	**(439)**	**15.337**	**20.793**	**38.653**	**10.933**	**49.586**
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006)	2u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(91)	(91)	-	(91)
Saldo, 1 Januari 2010 - setelah penyesuaian		**5.040**	**1.073**	**(4.264)**	**478**	**386**	**18**	**231**	**(439)**	**15.337**	**20.702**	**38.562**	**10.933**	**49.495**
Akuisisi 20% kepemilikan Sigma	1d,2d	-	-	-	-	-	-	-	(46)	-	-	(46)	(50)	(96)
Akuisisi 75% kepemilikan Admedika	2d,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Dividen kas	2w,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.142)	(5.142)	(3.224)	(8.366)
Dividen interim	2w,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(526)	(526)	-	(526)
Jumlah laba komprehensif bersih tahun berjalan	1d,2b,2f, 2u,9	-	-	-	-	-	32	2	-	-	11.537	11.571	4.333	15.904
Saldo, 31 Desember 2010- setelah direklasifikasi		**5.040**	**1.073**	**(4.264)**	**478**	**386**	**50**	**233**	**(485)**	**15.337**	**26.571**	**44.419**	**11.996**	**56.415**

*) Setelah direklasifikasi, lihat Catatan 2a dan 47

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

	2011	2010
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
Pelanggan	67.519	64.566
Operator lain	3.586	3.630
Jumlah penerimaan kas dari pendapatan	71.105	68.196
Pembayaran kas untuk beban	(25.416)	(25.254)
Pembayaran kas kepada karyawan	(8.509)	(8.993)
(Pengembalian) penerimaan kas (kepada) dari pelanggan	(226)	386
Pendapatan bunga diterima	549	420
Beban bunga dibayar	(1.591)	(1.826)
Pembayaran pajak penghasilan	(5.359)	(5.829)
Penerimaan tagihan restitusi pajak	-	659
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	**30.553**	**27.759**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Hasil dari penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual dan dividen yang diterima	59	31
Pembelian aset keuangan tersedia untuk dijual dan penempatan deposito berjangka	(33)	(6)
Hasil dari penjualan aset tetap	56	12
Hasil dari klaim asuransi	13	-
Pembelian aset tetap	(13.197)	(14.952)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	(834)	(641)
Penurunan uang muka dan aset lainnya	34	88
Pembayaran atas akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	(116)
Pembelian aset takberwujud	(603)	(723)
Pembelian kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	-	(96)
Pembelian penyertaan jangka panjang	-	(115)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi	**(14.505)**	**(16.518)**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

	2011	2010
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	(6.069)	(5.418)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham kepentingan nonpengendali entitas anak	(3.033)	(3.624)
Hasil dari utang bank jangka pendek	316	163
Pembayaran utang bank jangka pendek	(272)	(151)
Hasil wesel jangka menengah	20	35
Pembayaran wesel jangka menengah	(14)	(4)
Hasil dari pinjaman penerusan dan utang bank	2.694	4.840
Pembayaran pinjaman penerusan dan utang bank	(7.334)	(8.716)
Hasil dari obligasi	-	2.991
Pembayaran untuk pembelian kembali saham yang telah diterbitkan	(2.059)	-
Hasil dari wesel bayar	559	291
Pembayaran wesel bayar	(171)	(20)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(176)	(207)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	**(15.539)**	**(9.820)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	509	1.421
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	5	(106)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	9.120	7.805
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**9.634**	**9.120**
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS		
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Akuisisi aset tetap yang dibiayai dengan utang usaha	4.900	4.827
Penambahan aset tetap melalui pertukaran nonmoneter	1.226	-
Reklasifikasi aset tetap menjadi aset tersedia untuk dijual	791	-
Akuisisi aset tetap melalui sewa pembiayaan	80	58

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari *"Post en Telegraafdienst"*, yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero").

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia ("BAPEPAM-LK") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, serta dalam rangka penambahan maksud dan tujuan Perusahaan, berdasarkan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 37 tanggal 24 Juni 2010. Perubahan tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-18476 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat No. AHU-35876.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23552.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

a. Usaha utama:
   i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku.
   ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

b. Usaha penunjang:
   i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
   ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain meliputi pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan menerima beberapa izin telekomunikasi dari Pemerintah Indonesia yang berlaku untuk periode yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan telekomunikasi yang berlaku dan melakukan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT"). Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran izin, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP") terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Izin	No izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan jasa teleponi dasar	381/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap lokal dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan jasa teleponi dasar	382/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional dan jasa teleponi dasar	383/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap sambungan internasional dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	398/KEP/ M.KOMINFO/ 11/2010	Jaringan tetap tertutup	12 November 2010
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	384/KEP/DJPT /M.KOMINFO/ 11/2010	ITKP	29 November 2010
Izin penyelenggaraan jasa akses internet (*internet service provider*)	83/KEP/DJPPI /KOMINFO/ 4/2011	Internet service provider	7 April 2011
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	169/KEP/DJPPI /KOMINFO/ 6/2011	Jasa Siskomdat	6 Juni 2011
Izin penyelenggaraan Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*	331/KEP/ /M.KOMINFO/ 07/2011	Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*	27 Juli 2011

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan karyawan Perusahaan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat pada (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 18 tanggal 11 Juni 2010 oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., dan (ii) RUPSLB yang dinyatakan dalam akta notaris No. 33 tanggal 17 Desember 2010 oleh notaris yang sama, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Komisaris Utama	Jusman Syafii Djamal	Tanri Abeng
Komisaris	Bobby A.A Nazief	Bobby A.A Nazief
Komisaris	Mahmuddin Yasin	Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen	Rudiantara	Arif Arryman*
Komisaris Independen	Johnny Swandi Sjam	Petrus Sartono
Direktur Utama	Rinaldi Firmansyah	Rinaldi Firmansyah
Wakil Direktur Utama/*Chief Operating Officer* ("COO")	** (lihat Catatan di bawah)	** (lihat Catatan di bawah)
Direktur Keuangan	Sudiro Asno	Sudiro Asno
Direktur Jaringan dan Solusi	Ermady Dahlan	Ermady Dahlan
Direktur *Enterprise* dan *Wholesale*	Arief Yahya	Arief Yahya
Direktur Konsumer	I Nyoman Gede Wiryanata	I Nyoman Gede Wiryanata
Direktur *Compliance* dan *Risk Management*	Prasetio	Prasetio
Direktur *Information Technology Solution & Strategic Portofolio****	Indra Utoyo	Indra Utoyo
Direktur *Human Capital* dan *General Affairs* ("HCGA")	Faisal Syam	Faisal Syam

* Arif Arryman meninggal dunia pada tanggal 7 September 2010, jabatan tidak terisi pada tanggal 31 Desember 2010. Rudiantara ditunjuk mulai tanggal 1 Januari 2011 untuk jabatan ini.

** COO dirangkap oleh Direktur Jaringan dan Solusi di tahun 2011 dan 2010

*** Perubahan nama berdasarkan Peraturan Direksi No.201.04/r.00/PS.150/COP-B0030000/2011 tanggal 23 November 2011

2. Komite Audit dan Corporate Secretary

Susunan Komite Audit dan *Corporate Secretary* Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Ketua	Rudiantara	Petrus Sartono
Sekretaris	Salam	Salam
Anggota	Bobby A.A Nazief	Bobby A.A Nazief
Anggota	Agus Yulianto	Agus Yulianto
Anggota	Sahat Pardede	Sahat Pardede
Anggota	Johnny Swandi Sjam	-
Corporate Secretary	Agus Murdiyatno	Agus Murdiyatno

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan karyawan Perusahaan (lanjutan)

3. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah 26.023 orang dan 26.847 orang (diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana ("*Initial Public Offering"* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, dan RUPST Perusahaan tanggal 20 Juni 2008, dan RUPST Perusahaan tanggal 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, dan III untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 24).

Pada tanggal 31 Desember 2011, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 73.824.138 ADS telah dicatatkan pada NYSE dan LSE (Catatan 22).

Pada tanggal 31 Desember 2011, obligasi Perusahaan yang masih terutang yang merupakan obligasi Rupiah kedua dan diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2010 masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 19a).

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kepemilikan mayoritas (Catatan 2b dan 2d):

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2011	2010	2011	2010
PT Telekomunikasi Selular (**"Telkomsel"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi *Global System for Mobile Communication* ("GSM")/26 Mei 1995	1995	65	65	58.723	57.343
PT Dayamitra Telekomunikasi (**"Dayamitra"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	3.264	434
PT Telekomunikasi Indonesia International (**"TII"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	2.279	1.757
PT Multimedia Nusantara (**"Metra"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa jaringan telekomunikasi & multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	1.955	1.873
PT Pramindo Ikat Nusantara (**"Pramindo"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	1.601	1.199

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung: (lanjutan)

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2011	2010	2011	2010
PT Infomedia Nusantara (**"Infomedia"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk cetak dan media elektronik, dan jasa *call center*/ 22 September 1999	1984	100 (termasuk melalui 49% kepemilikan oleh Metra)	100 (termasuk melalui 49% kepemilikan oleh Metra)	787	649
PT Indonusa Telemedia (**"Indonusa"**), *Jakarta, Indonesia*	TV berlangganan dan jasa konten/ 7 Mei 1997	1997	100 (termasuk melalui 0,46% kepemilikan oleh Metra)	100 (termasuk melalui 0,8% kepemilikan oleh Metra)	714	343
PT Graha Sarana Duta (**"GSD"**), *Jakarta, Indonesia*	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	99,99	99,99	384	263
PT Napsindo Primatel Internasional (**"Napsindo"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi - menyediakan *Network Access Point* (NAP), *Voice Over Data* (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60`	60	5	5

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2011	2010	2011	2010
PT Sigma Cipta Caraka ("**Sigma**"), *Tangerang, Indonesia*	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, *outsourcing*, dan pemeliharaan lisensi dan piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	614	503
PT Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., *Singapura*	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	431	256
PT Balebat Dedikasi Prima (**"Balebat"**), *Bogor, Indonesia*	Percetakan/ 1 Oktober 2003	2000	65	65	86	86
PT Finnet Indonesia (**"Finnet"**), *Jakarta, Indonesia*	Data dan komunikasi perbankan/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	83	72

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) ***Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:*** (lanjutan)

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2011	2010	2011	2010
PT Administrasi Medika (**"Ad Medika"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2010	75	75	83	60
PT Metra-Net (**"Metra-Net"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	41	42
Telkomsel Finance B.V., (**"TFBV"**), *Amsterdam, The Netherlands*	Keuangan - didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meminjam, meminjamkan, dan mengumpulkan dana, termasuk menerbitkan obligasi, wesel bayar, atau instrumen utang/ 7 Februari 2005	2005	65	65	8	8
PT Telekomunikasi Indonesia International Ltd., *Hongkong*	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	56	3
Aria West International Finance B.V. (**"AWI BV"**), *The Netherlands*	Didirikan untuk memberikan jasa di bidang perdagangan dan keuangan/ 3 Juni 1996	1996; berhenti beroperasi pada tanggal 31 Juli 2003	100	100	0	0
Telekomunikasi Selular Finance Limited (**"TSFL"**), *Mauritius*	Keuangan - didirikan untuk mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham *debenture*, obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya/22 April 2002	2002	65	65	0	0

(a) Indonusa

Pada tanggal 8 Maret 2011, berdasarkan RUPS Sirkuler Indonusa yang dinyatakan dalam akta notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 18 tanggal 14 Maret 2011, Perusahaan menyetujui konversi utang sebesar Rp175 miliar menjadi saham ditempatkan dan disetor penuh (*debt to equity swap*) sehingga menjadi Rp552 miliar.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(b) GSD

Pada tanggal 27 Desember 2011, GSD membentuk entitas anak bersama Yayasan Kesehatan ("Yakes"), perusahaan afiliasi dari Perusahaan, bernama PT Telkom Landmark Tower ("TLT") dengan kepemilikan 55%. TLT bergerak dalam bidang penyediaan jasa konstruksi dan perdagangan, jasa pengembangan dan manajemen properti. Pada tanggal 31 Desember 2011, akta pendirian masih dalam proses persetujuan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, belum ada aktivitas keuangan dan operasi yang diselenggarakan oleh TLT.

e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 30 Maret 2012.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Telekomunikasi, dan Keputusan No. KEP-554/BL/2010 tentang perubahan atas Peraturan No. VIII.G.7 dan Surat Edaran No. SE-03/BL/2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tersedia untuk dijual.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Perusahaan telah mereklasifikasi kepentingan nonpengendali pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 masing-masing sebesar Rp11.996 miliar dan Rp10.933 miliar sebagai bagian dari ekuitas dan menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian pada permulaan dari periode komparatif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Pada tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK dan ISAK baru dan revisi yang efektif pada tahun 2011. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

- PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan"

  Standar yang direvisi melarang penyajian penghasilan dan beban (yakni "perubahan ekuitas non-pemilik") dalam laporan perubahan ekuitas, mengharuskan "perubahan ekuitas non-pemilik" disajikan terpisah dari perubahan ekuitas pemilik. Seluruh "perubahan ekuitas non-pemilik" disajikan dalam suatu laporan kinerja.

  Entitas dapat memilih untuk menyajikan satu laporan kinerja (laporan pendapatan komprehensif) atau dua laporan (laporan laba rugi dan laporan pendapatan komprehensif). Seluruh penghasilan dan beban disajikan sebagai bagian aktivitas normal entitas.

  Jika entitas menyajikan kembali atau mereklasifikasi informasi komparatif, entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan yang disajikan kembali pada awal periode komparatif di samping penyajian laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan dan periode komparatif.

  Perusahaan dan entitas anak memilih menyajikan satu laporan. Laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun meliputi laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif tanpa pengungkapan atas informasi awal periode komparatif dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar.

- PSAK 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis"

  Standar yang direvisi tetap menerapkan metode akuisisi untuk kombinasi bisnis, dengan beberapa perubahan signifikan. Misalnya, seluruh pembayaran untuk membeli sebuah bisnis dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dengan pembayaran kontinjen diklasifikasikan sebagai utang yang diukur kembali melalui laporan laba rugi. Bagi tiap akuisisi, terdapat pilihan untuk mengukur kepentingan nonpengendali berdasarkan nilai wajarnya atau berdasarkan bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas yang diakuisisi. Perusahaan dan entitas anak menerapkan standar ini secara prospektif untuk seluruh kombinasi bisnis mulai dari 1 Januari 2011.

  Pada tanggal 1 Januari 2011, jumlah tercatat *goodwill* yang diperoleh dari kombinasi bisnis masa lalu adalah sebesar jumlah tercatat pada tanggal tersebut. Entitas menghentikan amortisasi *goodwill* dan mengeliminasi akumulasi amortisasi yang telah ada tersebut terhadap harga perolehannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

- PSAK 7 (Revisi 2010),"Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"

  Standar yang direvisi menyempurnakan panduan untuk pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas setiap kategori pemberian upah dan kompensasi dari personil manajemen kunci. Perusahaan dan entitas anak telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi.

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi dan pencabutan standar berikut, tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas"
- PSAK 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi"
- PSAK 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan"
- PSAK 12 (Revisi 2009), "Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama"
- PSAK 15 (Revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi"
- PSAK 19 (Revisi 2010), "Aset Takberwujud"
- PSAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan"
- PSAK 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"
- PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- ISAK 7 (Revisi 2009), "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus"
- ISAK 9, "Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa"
- ISAK 10, "Program Loyalitas Pelanggan"
- ISAK 11, "Distribusi Aset Non-Kas kepada Pemilik"
- ISAK 12, "Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer"
- ISAK 14, "Aset Takberwujud - Biaya Situs Web"
- ISAK 17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai"

Pencabutan standar dan interpretasi ini tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak dan tidak material terhadap jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- PSAK 6, "Akuntansi dan Pelaporan untuk Entitas Tahap Pengembangan"
- PSAK 21, "Akuntansi Ekuitas"
- PSAK 40, "Akuntansi Perubahan Ekuitas Entitas Anak atau Asosiasi"
- ISAK 1, "Penentuan Harga Pasar Dividen"
- ISAK 2, "Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemegang Saham"
- ISAK 3, "Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan"

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi berikut telah diterbitkan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2012:

- PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"
- PSAK 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya"
- PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja"
- PSAK 28 (Revisi 2011), "Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian"
- PSAK 33 (Revisi 2011), "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum"
- PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi"
- PSAK 36 (Revisi 2011), "Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa"
- PSAK 45 (Revisi 2011), "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"
- PSAK 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan"
- PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK 53 (Revisi 2010), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK 56 (Revisi 2011), "Laba Per Saham"
- PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah"
- PSAK 62, "Kontrak Asuransi"
- PSAK 63, "Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi"
- PSAK 64, "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral"
- ISAK 13, "Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri"
- ISAK 15 - PSAK 24, "Batasan Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa"
- ISAK 18, "Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi"
- ISAK 19, "Aplikasi Pendekatan Penyajian Kembali pada PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam ekonomi hiperinflasi"
- ISAK 20, "Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham"
- ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan"
- ISAK 23, "Sewa Operasi - Insentif"
- ISAK 24, "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan suatu Bentuk Legal Sewa"

Standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi berikut ini telah diterbitkan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2012:

- PSAK 11, "Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing"
- PSAK 27, "Akuntansi Koperasi"
- PSAK 29, "Akuntansi Minyak dan Gas Bumi"
- PSAK 39, "Akuntansi Kerja Sama Operasi"
- PSAK 52, "Mata Uang Pelaporan"
- ISAK 4, "Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs"

Perusahaan dan entitas anak masih menganalisa dampak standar dan interpretasi baru/revisi serta pencabutan standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi aset dan liabilitas Perusahaan dan entitas anaknya dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki lebih dari setengah hak suara dan memiliki kemampuan mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional entitas kecuali, dalam keadaan yang jarang, dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun memiliki kurang dari atau sama dengan setengah hak suara. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Saldo-saldo dan transaksi-transaksi antar perusahaan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan dan entitas anak mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2010) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan pengecualian dalam PSAK 7 (Revisi 2010) tentang luasnya rincian pengungkapan dalam kaitannya dengan transaksi dan saldo akun pihak berelasi, termasuk ikatan dengan entitas terkait dengan pemerintah.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan dan entitas anak. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis

Akuisisi usaha dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan selisih dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang terjadi/diasumsikan dan instrumen ekuitas yang dalam pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill yang timbul dari akuisisi diakui sebagai aset dan diukur sebesar biaya yang mencerminkan selisih lebih dari keseluruhan imbalan, jumlah kepentingan nonpengendali yang ada pada perusahaan yang diakuisisi, dan nilai wajar ekuitas yang sebelumnya dimiliki perusahaan pengakuisisi (jika ada) dikurangi nilai wajar bersih aset dan kewajiban teridentifikasi saat tanggal akuisisi.

Kepentingan nonpengendali yang memberikan hak kepada pemegangnya bagian prorata dari aset bersih entitas pada saat kejadian likuidasi yang pada awalnya dapat diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasian sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akusisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi secara terpisah, atau disebut unit penghasil kas. Jika jumlah terpulihkan dari suatu unit penghasil kas lebih rendah dari nilai tercatat unit tersebut, maka rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat *goodwill* yang dialokasikan pada unit tersebut dan selanjutnya ke aset lain pada unit tersebut secara prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Akuisisi entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan nilai buku seperti metode akuntansi penyatuan kepemilikan (*carry over basis*). Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali" pada bagian ekuitas.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan dimana Perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perusahaan mengakui bagian atas laba atau rugi entitas asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Ketika bagian Perusahaan atas rugi melebihi nilai tercatat dari entitas asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan hingga nihil dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali apabila Perusahaan memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)

Penyertaan pada ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dimana bagian partisipasi pada suatu ventura bersama pada awalnya dibukukan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan terhadap perubahan dalam bagian venturer atas aset bersih dari ventura bersama yang terjadi setelah perolehan.

Perusahaan dan entitas anak pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Perusahaan dan entitas anak menghitung nilai penurunan sebagai selisih antara nilai entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya dan mengakui nilai perkiraan bagian dari laba (rugi) dari entitas asosiasi dalam laporan keuangan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Aset-aset ini termasuk dalam penyertaan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN") dan PT Citra Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dolar A.S.") dan mata uang fungsional Scicom (MSC) Berhad adalah Ringgit Malaysia ("RM"). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut dengan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama tahun tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" dalam bagian ekuitas.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi atas penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen dan modul, yang kemudian dibebankan atau dialihkan ke aset tetap pada saat pemakaian. Komponen dan modul mewakili terminal telepon, kabel, suku cadang pemasangan transmisi dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), kartu *Removable User Identity Module* ("RUIM"), pesawat telepon, *set top box*, modem *wireless broadband* dan vaucer prabayar yang dibebankan pada saat penjualan. Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea cukai, pajak lainnya, transportasi, penanganan, dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai terealisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan (lanjutan)

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM, kartu RUIM, pesawat telepon, *set top box*, modem *wireless broadband* dan vaucer prabayar dan metode identifikasi khusus untuk persediaan modul.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasian sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari aset takberwujud yang berasal dari akuisisi entitas anak/bisnis, lisensi (3G dan akses nirkabel pita lebar) dan piranti lunak komputer. Aset takberwujud diakui jika Perusahaan dan entitas anak kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan entitas anak harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	Tahun
Lisensi	10
Aset takberwujud lainnya	2-10

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap - perolehan langsung

Aset tetap yang diperoleh secara langsung diakui berdasarkan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya, dan (c) estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap harus disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20-40
Prasarana bangunan	3-7
Peralatan sentral telepon	5-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	5-25
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-10
Peralatan pengolahan data	3-10
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	5-8
Customer Premise Equipment (“CPE”)	10
Peralatan lainnya	5

Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai residu dari suatu aset harus direview paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika tepat.

Terkait dengan PSAK 16R, sejak 1 Januari 2010, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat instalasi bangunan dan bangunan kantor (merupakan bagian dari bangunan) dari 20 tahun menjadi 40 tahun, Sistem Komunikasi Kabel Laut (“SKKL”) / Sistem Komunikasi Serat Optik (“SKSO”) (merupakan bagian dari peralatan dan instalasi transmisi) dari 20 tahun menjadi 25 tahun, dan antena dan tower (merupakan bagian dari peralatan dan instalasi transmisi, dan satelit, stasiun bumi dan peralatannya) dari 15 tahun menjadi 20 tahun, berdasarkan review masa manfaat di industri telekomunikasi yang sejenis dengan Perusahaan dan ekspektasi penggunaan berdasarkan spesifikasi teknis. Pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut diperhitungkan secara prospektif dan menghasilkan pengurangan dalam beban yang dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2010 (Catatan 10d.iii).

Perusahaan dan entitas anak secara periodik menelaah kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset tetap, dimana terdapat kejadian dan kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat diperoleh kembali. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap - perolehan langsung (lanjutan)

Suku cadang dan peralatan pemeliharaan dicatat sebagai persediaan dan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi pada saat dikonsumsi. Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut harus dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi secara spesifik menjadi aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

Peralatan yang untuk sementara tidak digunakan direklasifikasi sebagai peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya.

m. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi dan bukan pada bentuk kontraknya. Aset tetap sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Perusahaan dan entitas anak ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjensi dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasikan untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang mendasar bahwa Perusahaan dan entitas anak akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat ekonomisnya

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Beban tangguhan - hak atas tanah

Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan dan perpanjangan masa hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode hak atas tanah tersebut.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang dagang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya fee yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya fee ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah Rupiah dan pembukuan Perusahaan dan entitas anak diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	Perusahaan dan entitas anak			
	2011		2010	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar Amerika Serikat (“US$”) 1	9.060	9.075	9.005	9.015
Euro1	11.706	11.727	12.011	12.025
Yen1	116,69	116,96	110,68	110,82

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2l).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan termasuk biaya tambahan dan diakui sebagai pendapatan sepanjang estimasi periode hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan review atas informasi historis dan tren konsumen, Perusahaan menentukan jangka waktu hubungan dengan pelanggan yang diharapkan pada tahun 2011 dan 2010 adalah 10 tahun. Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

ii. Pendapatan telepon seluler dan jaringan tetap nirkabel

Pendapatan dari jasa pasca bayar, yang terdiri dari pendapatan penggunaan dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan pulsa dan biaya pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.

- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM untuk telepon seluler atau kartu RUIM untuk telepon nirkabel dan vaucer perdana) dan vaucer isi ulang diakui sebagai berikut:

- Penjualan kartu SIM dan RUIM diakui sebagai pendapatan pada saat kartu perdana tersebut diserahkan kepada distributor, penyalur, atau langsung kepada pelanggan.

- Penjualan vaucer pulsa isi ulang (baik digabungkan dalam paket perdana ataupun dijual secara terpisah) diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jangka waktu dan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vaucer prabayar telah habis masa berlakunya.

- Potongan promosi yang belum digunakan disajikan sebagai pengurang pendapatan diterima di muka.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan operator Perusahaan dan entitas anak (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Perusahaan dan entitas anak (*transit*).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

iv. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian dan kinerja, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan konsumen.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari pendapatan Pola Bagi Hasil ("PBH") dan penjualan jasa atau barang telekomunikasi lainnya.

PBH dicatat sama seperti sewa pembiayaan, dimana aset dan liabilitas PBH disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Semua pendapatan yang dihasilkan dari perjanjian PBH diakui sebagai bagian pendapatan, sementara pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai biaya pendanaan dan pengurang liabilitas PBH.

Pendapatan jasa atau barang telekomunikasi lainnya diakui pada saat jasa dan atau barang diserahkan kepada pelanggan.

Pendapatan dalam rangka Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU") diakui saat akses telekomunikasi siap dan jasa tersebut diserahkan.

vii. Multiple-elements arrangements

Dimana dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan diatas.

viii. Beban

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain harus diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat pegawai telah memberikan jasa kepada Perusahaan dan entitas anak.

ii Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuaria yang tidak diakui, dan biaya jasa lalu yang tidak diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan sebagaimana saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan, yaitu berdasarkan informasi harga kuotasi pasar saham. Nilai dari pensiun dibayar dimuka yang diakui dibatasi pada jumlah bersih dari akumulasi kerugian aktuarial bersih dan biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai kini dari manfaat ekonomi tersedia dalam bentuk pengembalian dari program atau pengurangan pada kontribusi yang akan datang pada program.

Laba atau rugi aktuarial yang timbul dari adanya penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuaria, yang melebihi nilai tertinggi antara 10% dari nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program, dibebankan atau dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan yang bersangkutan. Biaya jasa lalu diakui jika telah menjadi hak (*vested*) atau diamortisasi selama periode *vesting*.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya bersih berkala untuk tahun iuran tersebut terutang dan dicatat sebagai biaya karyawan.

iii. Penghargaan masa kerja ("Long Service Awards" atau "LSA") dan cuti masa kerja ("*Long Service Leave" atau "LSL")*

Telkomsel memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Laba atau rugi aktuaria yang muncul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan asumsi aktuarial, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Kewajiban sehubungan dengan LSA dan LSL dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Perusahaan berkomitmen untuk memberi imbalan Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Perusahaan dianggap berkomitmen untuk melakukan Pendi jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana Pendi formal yang tidak dapat dibatalkan.

v. Masa persiapan pensiun ("MPP")

Karyawan Perusahaan memperoleh manfaat selama MPP, dimana karyawan mulai tidak aktif selama 6 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Selama masa MPP, karyawan masih akan menerima manfaat yang diberikan kepada karyawan aktif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaji rutin, fasilitas kesehatan, libur tahunan, bonus, dan tunjangan lainnya. Manfaat yang diberikan kepada karyawan yang memasuki MPP dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

vi. Imbalan pasca kerja lainnya

Karyawan memperoleh tunjangan persiapan pensiun dan tunjangan fasilitas perumahan terakhir saat masa pensiun pada usia 56 tahun. Manfaat tersebut dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi menghasilkan imbalan, atau menghasilkan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti.

t. Pajak Penghasilan ("PPh")

PPh dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut berkaitan dengan pos-pos yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, misalnya selisih nilai transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali dan efek penyesuaian penjabaran mata uang asing untuk penyertaan tertentu di entitas asosiasi, dalam hal mana PPh-nya juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas pendapatan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diharapkan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak Penghasilan ("PPh") (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan dan entitas anak juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau yang secara substansial telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan tetap berlaku terhadap laba kena pajak untuk tahun-tahun dimana perbedaan temporer tersebut terpulihkan atau direalisasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan pajak, atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

u. Instrumen keuangan

Pada tahun 2006, DSAK menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Kedua pernyataan ini menggantikan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Kedua pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.

Penerapan standar-standar tersebut tidak mengakibatkan dampak yang material terhadap hasil usaha dari Perusahaan dan entitas anak. Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK No. 55 (Revisi 2006), dampak yang berasal dari perhitungan ulang atas cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp91 miliar telah disesuaikan ke laba ditahan per 1 Januari 2010.

Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan kewajiban keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan kewajiban keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Aset keuangan Perusahaan termasuk kas dan setara kas, aset keuangan tersedia untuk dijual, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan yang dicatat sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada 31 Desember 2011 dan 2010.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya, dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada awalnya pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamotisasi, menggunakan metode bunga efektif.

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Perusahaan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
b) investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
c) investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari surat berharga yang tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk penjualan dan pembelian reguler aset keuangan.

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) dan efek untuk diperdagangkan dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan tahun berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual di bawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dan dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar efek untuk diperdagangkan disajikan dalam laporan laba rugi di dalam (beban)/penghasilan lain-lain dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut

ii. Liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan obligasi dan wesel bayar.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman, obligasi, dan wesel bayar.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

iii. Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

v. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Harga pokok dari penjualan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

x. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 40, yaitu jumlah saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

y. Informasi segmen

Informasi segmen Perusahaan dan entitas anak disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas; a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional Perusahaan dan entitas anak misalnya Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. *Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting*

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perusahaan dan entitas anak membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. *Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting* (lanjutan)

i. Imbalan pasca kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Perusahaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 34,35, dan 36.

ii. Provisi atas penurunan nilai piutang

Perusahaan dan entitas anak berkesinambungan mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran.

iii. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

iv. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Perusahaan dan entitas anak melakukan pengujian penurunan nilai untuk *goodwill* setiap tahun. Aset non-keuangan lain diuji untuk penurunan nilai ketika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, yang dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Dalam menentukan nilai pakai, Perusahaan dan entitas anak menggunakan pertimbangan manajemen dalam menentukan proyeksi kinerja operasional masa depan dan dalam menentukan tingkat pertumbuhan dan tingkat diskonto. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diterapkan berdasarkan pemahaman manajemen atas informasi historis dan ekspektasi atas kinerja operasional masa depan. Perubahan asumsi penting, termasuk asumsi tingkat diskonto atau tingkat pertumbuhan di dalam proyeksi arus kas, dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai pakai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. *Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting* (lanjutan)

iv. Penurunan nilai dari aset non-keuangan (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai atas aset tetap yang digunakan untuk jasa sambungan nirkabel tidak bergerak sebesar Rp563 miliar (2010: Nihil). Kenaikan sebesar 1% pada tingkat diskonto yang digunakan akan menambah rugi penurunan nilai menjadi Rp907 miliar. Namun jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak sangat dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam melaksanakan rencananya, termasuk rencana untuk menyelenggarakan jasa sambungan nirkabel bergerak, yang diharapkan akan menghasilkan surplus arus kas dan tingkat profitabilitas sesuai proyeksi. Apabila kinerja dari unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak terus mengalami penurunan atau rencana-rencana manajemen tidak terlaksana seperti yang diharapkan dalam periode keuangan selanjutnya, analisa harus dilakukan untuk menentukan apakah terdapat tambahan penurunan nilai di tahun yang akan datang (Catatan 10c).

3. AKUISISI PT ADMINISTRASI MEDIKA ("AD MEDIKA")

Pada tanggal 25 Februari 2010, Metra menandatangani *Sales Purchase Agreement* ("SPA") dengan para pemegang saham Ad Medika atas transaksi pembelian saham tersebut dengan harga perolehan sebesar Rp130 miliar (termasuk biaya konsultan akuisisi).

Ad Medika adalah perusahaan yang bergerak di bidang *electronic health care network*. Ad Medika merupakan perusahaan pengelola administrasi layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Melalui akuisisi ini, Perusahaan memulai untuk menyediakan jasa *Insure Net* sebagai cikal bakal program *e-Health* Nasional.

Akuisisi Ad Medika dicatat dengan menggunakan metode akuntansi pembelian, dimana harga perolehan dialokasikan ke nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang diestimasi. Perusahaan memilih untuk mengakui kepentingan nonpengendali pada bagian proporsionalnya atas nilai aset teridentifikasi bersih yang diperoleh. Alokasi harga perolehan adalah sebagai berikut:

	Rp
Aset dan liabilitas yang berasal dari akuisisi adalah sebagai berikut:	
Aset lancar	26
Aset tetap	17
Aset takberwujud	46
Liabilitas jangka pendek	(22)
Liabilitas jangka panjang	(8)
Liabilitas pajak tangguhan	(10)
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi	49
Kepentingan nonpengendali	(4)
Goodwill	85
Jumlah harga perolehan	130
Dikurangi:	
Kas dan setara kas pada entitas anak yang diakuisisi	(14)
Arus kas keluar akibat akuisisi	**116**

3. AKUISISI PT ADMINISTRASI MEDIKA ("AD MEDIKA") (lanjutan)

Metra memperoleh kendali atas Ad Medika pada tanggal 25 Februari 2010 dan penilaian dilakukan oleh penilai independen dengan menggunakan saldo laporan posisi keuangan pada tanggal 28 Februari 2010, sebagai tanggal laporan posisi keuangan terdekat. Hasil usaha konsolidasian Perusahaan meliputi hasil usaha Ad Medika terhitung sejak 1 Maret 2010. Aset takberwujud yang diperoleh termasuk kontrak perjanjian dan hubungan dengan konsumen, hubungan baik dengan pelanggan, merek dagang, dan kontrak perjanjian untuk tidak berkompetisi (Catatan 12).

4. KAS DAN SETARA KAS

	2011	2010
Kas	6	4
Bank		
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	687	439
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	302	199
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	101	7
Lain-lain	18	4
	1.108	649
Mata uang asing		
Bank Mandiri	198	169
BNI	48	57
Lain-lain	2	1
	248	227
Sub-jumlah	1.356	876
Pihak ketiga		
Rupiah		
The Royal Bank of Scotland N.V. (sebelumnya ABN AMRO Bank)	0	99
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	115	99
	115	198
Mata uang asing (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	69	75
Sub-jumlah	184	273
Jumlah bank	1.540	1.149

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2011	2010
Deposito berjangka		
Pihak berelasi		
Rupiah		
BRI	2.620	2.224
BNI	2.418	1.428
Bank Mandiri	448	1.556
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	446	330
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ("Bank Jabar")	145	496
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	77	-
PT Bank BRI Syariah ("BRI Syariah")	30	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	2	-
	6.186	6.034
Mata uang asing		
BRI	299	636
BNI	7	394
Bank Mandiri	-	2
	306	1.032
Sub-jumlah	6.492	7.066
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	190	116
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	181	174
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	180	177
PT Bank Muamalat Indonesia	95	10
PT Pan Indonesia Bank Tbk	90	95
Deutsche Bank AG ("DB")	78	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	11	165
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	54	83
	879	820
Mata uang asing		
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP" merger dengan PT Bank OCBC Indonesia)	641	-
BCA	-	65
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	76	16
	717	81
Sub-jumlah	1.596	901
Jumlah deposito berjangka	8.088	7.967
Jumlah	**9.634**	**9.120**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Rupiah	2,85% - 9,25%	4,00% - 9,50%
Mata uang asing	0,05% - 3,00%	0,05% - 4,00%

Pihak berelasi dimana Perusahaan dan entitas anak melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Perusahaan dan entitas menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan non-*retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	2011	2010
Instansi Pemerintah	810	759
CSM	86	91
PT Indonesian Satellite Corporation Tbk ("Indosat")	36	34
PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")	31	24
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	52	23
Jumlah	1.015	931
Dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang	(83)	(151)
Jumlah bersih	**932**	**780**

Piutang usaha dari pihak berelasi tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan liabilitas Perusahaan dan entitas anak kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(ii) Pihak ketiga

	2011	2010
Pelanggan individual dan bisnis	5.255	4.481
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	377	377
Jumlah	5.632	4.858
Dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang	(1.649)	(1.294)
Jumlah bersih	**3.983**	**3.564**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	2011	2010
Sampai dengan 6 bulan	726	560
7 sampai dengan 12 bulan	137	157
Lebih dari 12 bulan	152	214
Jumlah	1.015	931
Dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang	(83)	(151)
Jumlah bersih	**932**	**780**

(ii) Pihak ketiga

	2011	2010
Sampai dengan 3 bulan	3.153	3.149
Lebih dari 3 bulan	2.479	1.709
Jumlah	5.632	4.858
Dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang	(1.649)	(1.294)
Jumlah bersih	**3.983**	**3.564**

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	2011	2010
Rupiah	972	903
Dolar A.S.	43	28
Jumlah	1.015	931
Dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang	(83)	(151)
Jumlah bersih	**932**	**780**

(ii) Pihak ketiga

	2011	2010
Rupiah	4.829	4.144
Dolar A.S.	802	713
Euro	1	1
Jumlah	5.632	4.858
Dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang	(1.649)	(1.294)
Jumlah bersih	**3.983**	**3.564**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi provisi atas penurunan nilai piutang

	2011	2010
Saldo awal	1.445	1.274
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) (Catatan 2u)	-	91
Provisi diakui selama tahun berjalan (Catatan 29)	856	510
Penghapusbukuan piutang	(569)	(430)
Saldo akhir	**1.732**	**1.445**

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kerugian piutang usaha tak tertagih.

Piutang usaha tertentu entitas anak telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16 dan 20).

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PERSEDIAAN

	2011	2010
Modul	297	292
Komponen	329	159
Kartu SIM, kartu RUIM, *set top box*, dan vaucer prabayar	238	147
Jumlah	864	598
Provisi persediaan usang		
Modul	(91)	(76)
Komponen	(15)	(7)
Kartu SIM, kartu RUIM, *set top box*, dan vaucer prabayar	(0)	(0)
Jumlah	(106)	(83)
Jumlah bersih	**758**	**515**

Mutasi provisi atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Saldo awal	83	72
Provisi persediaan diakui selama tahun berjalan (Catatan 29)	27	15
Penghapusbukuan persediaan	(4)	(4)
Saldo akhir	**106**	**83**

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi (Catatan 28) pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp818 miliar dan Rp1.022 miliar.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu entitas anak telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16 dan 20).

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, modul dan komponen yang dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anak telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, risiko industri, risiko kehilangan selama perjalanan dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp235 miliar dan Rp144 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan tertentu yang mungkin dialami Perusahaan dan entitas anak.

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	2011	2010
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 41c.i dan 41c.iii)	2.211	2.394
Sewa	530	741
Gaji	201	142
Uang muka	184	66
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	168	98
Jumlah	**3.294**	**3.441**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

8. ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Akun ini mencerminkan nilai buku dari peralatan untuk ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy dengan jumlah harga yang disetujui sebesar US$93,4 juta. Peralatan tersebut akan digunakan sebagai bagian dari pembayaran untuk pertukaran peralatan dari perusahaan tersebut.

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

	2011					
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Bagian (rugi) laba entitas asosiasi	Dividen	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:						
Scicom [a]	29,71	109	(1)	(7)	(0)	101
CSM [b]	25,00	33	(6)	-	(1)	26
PT Melon Indonesia ("Melon") [c]	51,00	51	(7)	-	-	44
Patrakom [d]	40,00	40	4	(1)	-	43
PSN [e]	22,38	-	-	-	-	-
		233	(10)	(8)	(1)	214
Penyertaan jangka panjang lainnya		21	-	-	-	21
		254	**(10)**	**(8)**	**(1)**	**235**

	2010					
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan	Bagian (rugi) laba entitas asosiasi	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:						
Scicom [a]	29,71	50	64	(5)	(0)	109
PT Melon Indonesia ("Melon") [c]	51,00	-	51	0	-	51
Patrakom [d]	40,00	36	-	4	-	40
CSM [b]	25,00	44	-	(13)	2	33
PSN [e]	22,38	-	-	-	-	-
		130	115	(14)	2	233
Penyertaan jangka panjang lainnya		21	-	-	-	21
		151	**115**	**(14)**	**2**	**254**

[a] Scicom bergerak dalam bidang penyediaan jasa *call center* di Malaysia.

[b] CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (*"Very Small Aperture Terminal*" atau "VSAT"), jasa aplikasi jaringan, dan jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait.

[c] Melon bergerak dalam bidang penyediaan jasa *Digital Content Exchange Hub* ("DCEH"). Metra tidak mempunyai kendali atas Melon sebagai hasil dari adanya hak partisipasi yang substantif yang dipegang oleh pihak lain terhadap kebijakan keuangan dan operasi Melon.

[d] Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan.

[e] PSN bergerak dalam bidang penyewaan *transponder* satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Bagian rugi Perusahaan dari PSN telah melebihi nilai penyertaannya sejak 2001, oleh karena itu nilai penyertaannya telah menjadi Rp nihil.

10. ASET TETAP

	1 Januari 2011	Penambahan	Penurunan nilai	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2011
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	816	40	-	(14)	-	842
Bangunan	3.203	149	-	(66)	131	3.417
Prasarana bangunan	601	12	-	(5)	42	650
Peralatan sentral telepon	30.125	113	-	(5.565)	797	25.470
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	20	-	-	-	-	20
Peralatan dan instalasi transmisi	73.999	2.271	-	(829)	3.143	78.584
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	6.922	72	-	-	75	7.069
Jaringan kabel	24.541	1.491	-	(698)	1.058	26.392
Catu daya	8.269	466	-	(151)	755	9.339
Peralatan pengolahan data	7.896	298	-	(480)	368	8.082
Peralatan telekomunikasi lainnya	494	6	-	(3)	(25)	472
Peralatan kantor	644	95	-	(59)	47	727
Kendaraan	113	3	-	(3)	(29)	84
Peralatan lainnya	108	4	-	(1)	-	111
Aset dalam pembangunan:						
Bangunan	58	148	-	-	(67)	139
Prasarana bangunan	91	82	-	-	(170)	3
Peralatan sentral telepon	1	1.851	-	-	(1.782)	70
Peralatan dan instalasi transmisi	288	6.051	-	-	(5.513)	826
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	27	164	-	-	(170)	21
Jaringan kabel	6	38	-	-	(2)	42
Catu daya	40	704	-	-	.(714)	30
Peralatan pengolahan data	68	510	-	-	(506)	72
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	303	11	-	-	(9)	305
Peralatan pengolahan data	298	68	-	-	(22)	344
Peralatan kantor	26	1	-	-	-	27
Kendaraan	53	-	-	(5)	-	48
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Aset PBH:						
Tanah	1	-	-	-	(1)	-
Peralatan sentral telepon	84	-	-	-	(3)	81
Peralatan dan instalasi transmisi	27	-	-	-	(11)	16
Jaringan kabel	398	-	-	-	(18)	380
Peralatan telekomunikasi lainnya	4	-	-	-	(2)	2
Jumlah	159.546	14.648	-	(7.879)	(2.628)	163.687

10. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2011	Penambahan	Penurunan nilai	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2011
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	1.576	104	2	(66)	55	1.671
Prasarana bangunan	443	64	-	(5)	-	502
Peralatan sentral telepon	20.912	2.695	-	(5.324)	(871)	17.412
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	17	-	-	-	-	17
Peralatan dan instalasi transmisi	30.191	6.717	320	(511)	(1.548)	35.169
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3.621	486	176	-	(148)	4.135
Jaringan kabel	15.529	1.075	39	(698)	1.007	16.952
Catu daya	3.855	1.252	12	(144)	(59)	4.916
Peralatan pengolahan data	5.819	1.079	13	(479)	(243)	6.189
Peralatan telekomunikasi lainnya	367	13	1	(3)	(25)	353
Peralatan kantor	509	63	-	(59)	10	523
Kendaraan	100	6	-	(3)	(29)	74
Peralatan lainnya	93	6	-	(1)	-	98
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	251	23	-	-	(4)	270
Peralatan pengolahan data	171	55	-	-	(9)	217
Peralatan kantor	4	5	-	-	-	9
Kendaraan	39	12	-	(4)	-	47
Aset CPE	7	2	-	-	-	9
Aset PBH:						
Tanah	1	-	-	-	(1)	-
Peralatan sentral telepon	30	6	-	-	(3)	33
Peralatan dan instalasi transmisi	22	4	-	-	(8)	18
Jaringan kabel	154	35	-	-	(14)	175
Peralatan telekomunikasi lainnya	3	-	-	-	(2)	1
Jumlah	83.714	13.702	563	(7.297)	(1.892)	88.790
Nilai Buku Bersih	**75.832**					**74.897**

10. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2010	Akusisi Ad Medika	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2010
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	781	8	35	-	(8)	816
Bangunan	2.978	6	75	(1)	145	3.203
Prasarana bangunan	527	-	74	-	-	601
Peralatan sentral telepon	28.948	-	122	(30)	1.085	30.125
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	21	-	-	(1)	-	20
Peralatan dan instalasi transmisi	67.229	-	2.121	(812)	5.461	73.999
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	6.795	-	41	-	86	6.922
Jaringan kabel	23.622	-	1.166	(249)	2	24.541
Catu daya	7.369	-	177	(16)	739	8.269
Peralatan pengolahan data	7.603	1	158	(616)	750	7.896
Peralatan telekomunikasi lainnya	477	-	17	-	-	494
Peralatan kantor	576	1	70	(8)	5	644
Kendaraan	110	1	3	(1)	-	113
Peralatan lainnya	103	-	4	-	1	108
Aset dalam pembangunan:						
Bangunan	90	-	126	-	(158)	58
Prasarana bangunan	-	-	91	-	-	91
Peralatan sentral telepon	49	-	1.036	-	(1.084)	1
Peralatan dan instalasi transmisi	358	-	5.537	-	(5.607)	288
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	-	-	69	-	(42)	27
Jaringan kabel	3	-	4	-	(1)	6
Catu daya	52	-	726	-	(738)	40
Peralatan pengolahan data	16	-	777	-	(725)	68
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	289	-	3	-	11	303
Peralatan pengolahan data	261	-	43	-	(6)	298
Peralatan kantor	248	-	12	(220)	(14)	26
Kendaraan	61	-	-	(8)	-	53
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Aset PBH:						
Tanah	1	-	-	-	-	1
Peralatan sentral telepon	93	-	-	-	(9)	84
Peralatan dan instalasi transmisi	43	-	-	-	(16)	27
Jaringan kabel	407	-	-	-	(9)	398
Peralatan telekomunikasi lainnya	4	-	-	-	-	4
Jumlah	149.136	17	12.487	(1962)	(132)	159.546

10. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2010	Akuisisi Ad Medika	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2010
Akumulasi penyusutan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	1.485	-	97	(1)	(5)	1.576
Prasarana bangunan	382	-	61	-	-	443
Peralatan sentral telepon	18.426		2.525	(30)	(9)	20.912
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	17	-	1	(1)	-	17
Peralatan dan instalasi transmisi	24.795	-	6.322	(812)	(114)	30.191
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3.137	-	476	-	8	3.621
Jaringan kabel	14.689	-	1.109	(249)	(20)	15.529
Catu daya	2.931	-	938	(12)	(2)	3.855
Peralatan pengolahan data	5.094	-	1.316	(615)	24	5.819
Peralatan telekomunikasi lainnya	352	-	15	-	(0)	367
Peralatan kantor	465	-	43	(8)	9	509
Kendaraan	95	-	6	(1)	-	100
Peralatan lainnya	87	-	5	-	1	93
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	227	-	21	-	3	251
Peralatan pengolahan data	117	-	53	-	1	171
Peralatan kantor	201	-	29	(220)	(6)	4
Kendaraan	29	-	16	(6)	-	39
Aset CPE	5	-	2	-	-	7
Aset PBH:						
Tanah	1	-	-	-	-	1
Peralatan sentral telepon	30	-	7	-	(7)	30
Peralatan dan instalasi transmisi	26	-	6	-	(10)	22
Jaringan kabel	122	-	37	-	(5)	154
Peralatan telekomunikasi lainnya	3	-	-	-	-	3
Jumlah	72.716	-	13.085	(1.955)	(132)	83.714
Nilai Buku Bersih	**76.420**					**75.832**

a. Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap

	2011	2010
Hasil penjualan aset tetap	56	11
Nilai buku bersih	(18)	(7)
Nilai buku bersih pertukaran - bersih	24	-
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	**62**	**4**

b. Perjanjian kepemilikan aset KSO

(i) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO VII dengan PT Bukaka Singtel International ("BSI"), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO VII yang telah diakuisisi tetap berada di BSI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai buku aset tetap ini sebesar Rp710 miliar. Pada tanggal 1 Januari 2011, hak legal atas aset tetap tersebut telah diserahkan kepada Perusahaan dan aset tetap tersebut telah tercermin dalam saldo diatas.

(ii) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO IV dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia ("MGTI"), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO IV yang telah diakuisisi tetap berada di MGTI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai buku bersih aset tetap ini sebesar Rp161 miliar. Pada tanggal 1 Januari 2011, hak legal atas aset tetap tersebut telah diserahkan kepada Perusahaan dan aset tetap tersebut telah tercermin dalam saldo diatas.

10. ASET TETAP (lanjutan)

c. Penurunan nilai aset

(i) Pada tanggal 31 Desember 2011, unit penghasil kas yang menghasilkan arus kas masuk secara independen adalah sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lain-lain. Terdapat indikasi penuruan nilai untuk segmen sambungan nirkabel tidak bergerak, termasuk rugi segmen sebesar Rp1.433 miliar yang dilaporkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan secara intensif di pasar sambungan nirkabel tidak bergerak yang berdampak pada tarif rata-rata yang lebih rendah, penurunan jumlah pelanggan aktif, dan penurunan rata-rata pendapatan per pelanggan ("*Average Revenue Per User*" atau "ARPU"). Perusahaan menghitung jumlah terpulihkan dari kelompok aset yang tercakup dalam unit penghasil kas tersebut dan menentukan kelompok aset dalam unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak mengalami penurunan nilai pada 31 Desember 2011, yang menyebabkan rugi penurunan nilai sebesar Rp563 miliar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai bagian dari "Penyusutan dan amortisasi". Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai. Perhitungan ini menggunakan proyeksi arus kas sebelum pajak yang telah disetujui manajemen dan mencakup periode lima tahun dengan arus kas setelah periode lima tahun diekstrapolasi menggunakan tingkat pertumbuhan perpetuitas. Proyeksi arus kas mencerminkan ekspektasi manajemen terhadap pendapatan, pertumbuhan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi ("*Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*" atau "EBITDA"), dan arus kas operasi atas dasar unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak menghasilkan surplus arus kas bersih sejak tahun 2013 dan pengembalian tingkat profitabilitas di tahun 2016. Proyeksi arus kas manajemen juga mempertimbangkan ekspektasi wajar manajemen terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro dan ekspektasi pasar terhadap industri telekomunikasi di Indonesia. Proyeksi tersebut mengasumsikan bahwa manajemen akan menerima lisensi dan menyelenggarakan jasa sambungan nirkabel bergerak secara efektif yang akan mengeliminasi keterbatasan pada jasa yang diselenggarakan sekarang dimana hanya dapat digunakan oleh pelanggan dalam kode area tertentu. Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 11,4%, yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia. Tingkat pertumbuhan perpetuitas yang digunakan adalah 0% dengan asumsi jumlah pelanggan akan terus meningkat setelah lima tahun, rata-rata pendapatan per pelanggan akan menurun sehingga hanya tingkat pertumbuhan jangka panjang yang dapat diabaikan akan dicapai dalam pasar yang kompetitif.

Apabila kinerja unit penghasil kas sambungan nirkabel tidak bergerak terus mengalami penurunan atau rencana-rencana manajemen tidak terlaksana seperti yang diharapkan dalam periode keuangan selanjutnya, analisa harus dilakukan untuk menentukan apakah terdapat tambahan penurunan nilai di tahun yang akan datang.

(ii) Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan nilai tercatat segmen kabel tidak bergerak, selular, dan lain-lain Perusahaan tidak terpulihkan.

(iii) Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan mengoperasikan dua satelit, Telkom-1 dan Telkom-2, terutama sebagai *backbone* hubungan transmisi untuk jaringan milik Perusahaan sendiri serta untuk penyediaan jasa *up-linking* dan *down-linking* satelit stasiun bumi untuk para pengguna domestik dan internasional. Pada tanggal 31 Desember 2011, tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat satelit Perusahaan kemungkinan tidak dapat terpulihkan.

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain

(i) Tidak ada bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun 2011 dan 2010.

(ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun 2011 dan 2010.

(iii) Pada tahun 2010, masa manfaat instalasi bangunan dan bangunan kantor, Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") / Sistem Komunikasi Serat Optik ("SKSO"), dan Antena dan Tower Perusahaan mengalami perubahan dan diperhitungkan secara prospektif. Dampak dari perubahan penyusutan tersebut adalah pengurangan jumlah beban penyusutan sebesar Rp126 miliar yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2010 (Catatan 2l).

(iv) Pada April 2011, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu (bagian dari prasarana) dengan harga perolehan dan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp707 miliar dan Rp189 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi. Oleh karena itu, Telkomsel mengubah masa manfaat peralatan tersebut. Dampak percepatan penyusutan tersebut adalah tambahan beban penyusutan sebesar Rp154 miliar yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2011. Selanjutnya, pada bulan Agustus dan Desember 2011, bagian dari peralatan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp185 miliar dan Rp399 miliar dihentikan pengakuannya. Pada saat penghentian pengakuannya peralatan tersebut telah disusutkan sepenuhnya.

Pada tahun 2011, sebagai akibat dari perubahan teknologi, kerusakan dan disebabkan oleh hal lain, peralatan dan piranti lunak tertentu (terutama bagian dari infrastruktur dan peralatan penunjang) dengan harga perolehan dan nilai buku bersih masing-masing sebesar Rp4.126 miliar dan Rp16 miliar, dihentikan pengakuannya.

(v) Pada bulan Mei 2011, masa manfaat peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari peralatan penunjang) diubah dari 10 tahun menjadi 6 tahun agar mencerminkan masa manfaat aset saat ini. Dampak percepatan penyusutan tersebut adalah tambahan beban penyusutan sebesar Rp295 miliar yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2011.

(vi) Pertukaran aset tetap

- Pada tanggal 24 Januari 2011 dan 25 Februari 2011, Perusahaan dan INTI menandatangani perjanjian Pengadaan dan Instalasi Modernisasi Jaringan Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola *Trade In/Trade Off* masing-masing untuk STO Cengkareng, STO Gandaria, dan STO Injoko sebesar Rp96 miliar dan untuk STO Semanggi sebesar Rp44 miliar. Pada tahun 2011, Perusahaan telah menghapusbukuan aset jaringan tembaga dengan nilai buku sebesar Rp0,1 miliar dan telah mencatat penggantian aset jaringan *fiber optic* sebesar nilai buku Rp57 miliar.

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

(vi) Pertukaran aset tetap (lanjutan)

- Pada tahun 2011, peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari prasarana) dengan harga perolehan dan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp1.730 miliar dan Rp547 miliar ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy dan PT Huawei dengan jumlah harga yang disetujui sebesar US$63 juta.

  Peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari prasarana) dengan dengan harga perolehan dan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp1.736 miliar dan Rp791 miliar, akan ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy dan PT Huawei. Oleh karena itu, peralatan tersebut direklasifikasi ke aset tersedia untuk dijual (Catatan 8).

(vii) Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 18-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2012 hingga 2052. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

(viii) Pada tanggal 31 Desember 2011, aset tetap milik Perusahaan dan entitas anak, kecuali tanah, senilai Rp72.188 miliar diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi, dan risiko lainnya dengan nilai maksimum klaim kerugian sebesar Rp1.735 miliar, US$38 juta, EUR0,36 juta, dan SGD6 juta, dan basis kerugian pertama Rp7.240 miliar termasuk pemulihan kegiatan usaha sebesar Rp486 miliar dengan *Automatic Reinstatement of Loss Clause*. Di samping itu, Telkom-1 dan Telkom-2 diasuransikan terpisah dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US$17 juta dan US$39 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

(ix) Pada tanggal 31 Desember 2011, tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan sekitar 29,69% dari nilai kontrak, dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara Februari 2012 sampai dengan Maret 2014. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.

(x) Aset tetap tertentu entitas anak telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16 dan 20).

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

(xi) Perusahaan dan entitas anak memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk aset tetap PBH, peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan Aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan. Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Tahun	2011	2010
2011	-	286
2012	259	203
2013	179	142
2014	110	98
2015	33	24
Selanjutnya	61	57
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	642	810
Bunga	(132)	(203)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	510	607
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 17a)	(196)	(198)
Bagian jangka panjang (Catatan 17b)	**314**	**409**

11. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 terdiri dari:

	2011	2010
Uang muka pembelian aset tetap	2.017	1.335
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	1.143	1.052
Beban tangguhan	435	447
Kas yang dibatasi penggunaannya	164	102
Setoran jaminan	54	62
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	4	97
Jumlah	**3.817**	**3.095**

Beban tangguhan mencerminkan beban Pola Bagi Hasil ("PBH") tangguhan, beban tangguhan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU"), dan beban tangguhan hak atas tanah. Jumlah beban amortisasi untuk beban tangguhan yang diakui pada tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp84 miliar dan Rp19 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan kas yang dijaminkan untuk garansi bank untuk kontrak USO (Catatan 41c.vi) dan kontrak lainnya.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

12. ASET TAKBERWUJUD

(i) Perubahan nilai tercatat *goodwill,* lisensi dan aset takberwujud lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	Goodwill	Aset takberwujud lainnya	Lisensi	Jumlah
Nilai tercatat bruto:				
Saldo, 31 Desember 2010	192	9.875	812	10.879
Diperoleh secara terpisah:				
Piranti lunak Perusahaan	-	293	-	293
Piranti lunak entitas anak	-	309	-	309
Lisensi entitas anak	-	-	1	1
Reklasifikasi	-	(105)	2	(103)
Pengurangan	-	(7.603)	-	(7.603)
Saldo, 31 Desember 2011	192	2.769	815	3.776
Akumulasi amortisasi:				
Saldo, 31 Desember 2010	(29)	(8.815)	(250)	(9.094)
Beban amortisasi tahun berjalan	-	(429)	(87)	(516)
Reklasifikasi	-	22	(2)	20
Pengurangan	-	7.603	-	7.603
Saldo, 31 Desember 2011	(29)	(1.619)	(339)	(1.987)
Nilai Buku Bersih	**163**	**1.150**	**476**	**1.789**
Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi	-	6,47 tahun	9,39 tahun	

	Goodwill	Aset takberwujud lainnya	Lisensi	Jumlah
Nilai tercatat bruto:				
Saldo, 31 Desember 2009	107	9.086	806	9.999
Diperoleh secara terpisah:				
Piranti lunak Perusahaan	-	174	-	174
Piranti lunak entitas anak	-	543	-	543
Lisensi entitas anak	-	-	6	6
Diperoleh melalui kombinasi bisnis:				
Akuisisi Ad Medika	85	46	-	131
Reklasifikasi	-	26	-	26
Saldo, 31 Desember 2010	192	9.875	812	10.879
Akumulasi amortisasi:				
Saldo, 31 Desember 2009	(21)	(7.386)	(163)	(7.570)
Beban amortisasi tahun berjalan	(8)	(1.414)	(87)	(1.509)
Reklasifikasi	-	(15)	-	(15)
Saldo, 31 Desember 2010	(29)	(8.815)	(250)	(9.094)
Nilai Buku Bersih	**163**	**1.060**	**562**	**1.785**
Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi	20 tahun	6,99 tahun	9,38 tahun	

(ii) *Goodwill* timbul dari akuisisi PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma") tahun 2008, Indonusa tahun 2008, dan Ad Medika tahun 2010 (Catatan 3). Aset takberwujud lainnya juga termasuk akuisisi Dayamitra, Pramindo, TII, KSO IV, dan KSO VII, dan merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO. Sehubungan dengan berakhirnya masa KSO (Catatan 10.b), nilai tercatat dan akumulasi amotisasi dari aset takberwujud lainnya telah dihapusbukukan.

12. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

(iii) Pada tahun 2006, Telkomsel diberikan lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G. Telkomsel diharuskan membayar uang muka (*up-front fee*) sebesar Rp436 miliar (Catatan 37c dan 41c.i). Uang muka (*up-front fee*) dicatat sebagai aset takberwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (10 tahun). Amortisasi dimulai pada tahun 2006, sejak aset terkait dengan pengoperasian tersebut tersedia untuk digunakan. Pada tahun 2009, Telkomsel mendapatkan tambahan lisensi 3G senilai Rp320 miliar yang dicatat sebagai aset takberwujud dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi yaitu 10 tahun.

Berdasarkan interpretasi manajemen terhadap ketentuan lisensi tersebut dan konfirmasi tertulis dari DJPT, lisensi tersebut dapat dikembalikan setiap saat tanpa adanya liabilitas finansial untuk membayar sisa iuran tahunan BHP. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui iuran tahunan BHP sebagai beban pada saat terjadinya. Manajemen melakukan evaluasi atas keberlangsungan penggunaan lisensi tersebut setiap tahun.

(iv) Estimasi beban amortisasi tahunan aset takberwujud lainnya sejak 1 Januari 2012 adalah kurang lebih sebesar Rp513 miliar.

(v) Jumlah agregat dari *goodwill* yang dialokasikan ke setiap unit penghasil kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Sigma	88	88
Ad Medika	82	82
Jumlah	170	170

Metra melakukan pengujian penurunan setiap tahun untuk unit penghasil kas tersebut berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan. Pengujian penuruan nilai menggunakan proyeksi arus kas yang telah disetujui manajemen dan mencakup periode lima tahun, dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011		31 Desember 2010	
	Sigma	Ad Medika	Sigma	Ad Medika
Tingkat diskonto	12,5%	12,1%	13,1%	-
Tingkat pertumbuhan berkelanjutan	2%	2%	2%	-

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat rugi penurunan nilai yang perlu diakui untuk goodwill yang berasal dari akusisi entitas anak, dengan kemungkinan perubahan yang wajar terhadap asumsi-asumsi penting tidak menyebabkan nilai tercatat unit penghasil kas melebihi jumlah terpulihkan.

13. UTANG USAHA

	2011	2010
Pihak berelasi		
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	409	394
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	369	556
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	60	204
Sub-jumlah	838	1.154
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	7.429	6.269
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	50	88
Sub-jumlah	7.479	6.357
Jumlah	**8.317**	**7.511**

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Rupiah	4.422	4.378
Dolar A.S.	3.883	3.126
Lain-lain	12	7
Jumlah	**8.317**	**7.511**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2011	2010
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	2.917	1.774
Gaji dan tunjangan	900	895
Umum, administrasi, dan pemasaran	805	514
Bunga dan beban bank	168	226
Jumlah	**4.790**	**3.409**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

15. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	2011	2010
Kartu pulsa prabayar	2.526	2.419
Jasa telekomunikasi lainnya	153	131
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 miliar)	142	131
Jumlah	**2.821**	**2.681**

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK

		2011		2010	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
Kreditur	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank CIMB Niaga	Rp	-	45	-	35
Bank Danamon	Rp	-	40	-	-
Lain-lain	Rp	-	15	-	21
Jumlah			**100**		**56**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank CIMB Niaga							
25 April 2005[a]	Balebat	Rp	12	29 Mei 2012	Bulanan	11,50%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
29 April 2008[a]	Balebat	Rp	5	29 Mei 2012	Bulanan	11,50%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
14 Mei 2010	Infomedia	Rp	28	16 Februari 2012	Bulanan	11,50%	Piutang usaha (Catatan 5)
Bank Danamon							
5 Agustus 2011	Infomedia	Rp	40	17 Februari 2012	Bulanan	11,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
Bank Ekonomi							
25 Juni 2009[b]	Sigma	Rp	15	1 Juli 2012	Bulanan	9,00%-10,50%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 10)
7 Agustus 2009[b]	Sigma	Rp	35	1 Juli 2012	Bulanan	9,00%-10,50%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 10)
7 Agustus 2009[b]	Sigma	US$	0,001	1 Juli 2012	Bulanan	6,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 10)

Fasilitas utang bank yang diperoleh entitas anak tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

[a] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 25 Mei 2011.
[b] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 23 November 2011.

17. JATUH TEMPO UTANG JANGKA PANJANG

a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	2011	2010
Utang bank	20	3.960	4.478
Obligasi dan wesel bayar	19	385	127
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	18	272	396
Utang sewa pembiayaan	10	196	198
Nilai perolehan kombinasi bisnis yang ditangguhkan		-	105
Jumlah		**4.813**	**5.304**

Nilai perolehan yang ditangguhkan merupakan liabilitas Perusahaan kepada Pemegang Saham Penjual MGTI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO IV, dan ke BSI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO VII, yang telah dilunasi pada Januari 2011.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

b. Bagian jangka panjang

Pembayaran pokok utang yang dijadwalkan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

		(Dalam miliaran Rupiah)					
	Catatan	Jumlah	2013	2014	2015	2016	Selanjutnya
Utang bank	20	7.231	4.155	2006	722	260	88
Obligasi dan wesel bayar	19	3.401	268	133	1.005	-	1.995
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	18	2.012	197	200	202	206	1.207
Utang sewa pembiayaan	10	314	147	94	24	16	33
Jumlah		**12.958**	**4.767**	**2.433**	**1.953**	**482**	**3.323**

18. PINJAMAN PENERUSAN (*TWO-STEP LOANS*)

Pinjaman penerusan adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam valuta asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

		2011		2010	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
Kreditur	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	9.983	1.167	10.751	1.191
	Rp	-	717	-	857
	US$	44	400	121	1.089
Jumlah			2.284		3.137
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 17a)			(272)		(396)
Bagian jangka panjang (Catatan 17b)			**2.012**		**2.741**

18. PINJAMAN PENERUSAN *(TWO-STEP LOANS)* (lanjutan)

Kreditur	Mata uang	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun
Bank luar negeri	US$	Semesteran	Semesteran	4%
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,71%
	Yen	Semesteran	Semesteran	3,10%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

a. Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi masing-masing 1,5:1 dan 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia ("ADB").
b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi masing-masing 50% dan 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman yang masing-masing berasal dari Bank Dunia dan ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

19. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR

		2011		2010	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
Obligasi dan wesel bayar	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Obligasi					
Seri A	Rp	-	1.005	-	1.005
Seri B	Rp	-	1.995	-	1.995
Wesel bayar jangka menengah (*Medium Term Notes* atau "MTN")					
Metra	Rp	-	59	-	47
Sigma	Rp	-	30	-	30
PT Finnet Indonesia ("Finnet")	Rp	-	18	-	24
Promes					
Huawei Tech	US$	60	545	23	211
PT. ZTE Indonesia ("ZTE")	US$	15	134	7	64
Jumlah			3.786		3.376
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 17a)			(385)		(127)
Bagian jangka panjang (Catatan 17b)			**3.401**		**3.249**

19. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan)

a. Utang obligasi

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	1.005	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2015	Kuartalan	9,60%
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%
Total	**3.000**						

Obligasi tersebut dijamin dengan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT CIMB Niaga Tbk.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan *system* satelit), dan optimisasi *legacy dan* fasilitas penunjang (*fixed wireline dan wireless*).

Pada tanggal 31 Desember 2011, peringkat obligasi yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio *debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. Rasio EBITDA terhadap biaya pendanaan tidak kurang dari 5:1.
3. Rasio *debt service coverage* sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

b. MTN

Wesel bayar	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga
Metra				
Tahap 1	30	9 Juni 2009	19 Juni 2012	Kuartalan
Tahap 2	20	1 Februari 2010	2 Februari 2013	Kuartalan
Metra II				
Tahap 1	20	28 Desember 2011	28 Desember 2014	Kuartalan
Sigma	30	17 November 2009	17 November 2014	Semesteran
Finnet				
Tahap 1	10	16 Oktober 2009	17 November 2012	Bulanan
Tahap 2	15	18 Maret 2010	24 Maret 2013	Bulanan

19. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan)

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah PT Bahana Securities, Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan antara lain untuk mengembangkan usaha dan modal kerja.

Metra memberikan jaminan dengan nilai minimal 40% dari nilai Pokok MTN yang masih terutang. Maksimal 60% nilai pokok MTN yang masih terutang tidak dijamin dan setiap saat diperlakukan sama (*pari passu*) dengan liabilitas Metra lainnya yang tidak dijamin. Metra dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

MTN Sigma dan Finnet tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Sigma dan Finnet baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang MTN *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sigma dan Finnet dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

Berdasarkan perjanjian, Metra, Sigma, dan Finnet dipersyaratkan untuk menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2011, Metra, Sigma, dan Finnet memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

c. Promes

Pemasok	Mata uang	Pokok utang	Tanggal perjanjian	Tanggal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
PT Huawei Tech Investment ("Huawei Tech")	US$	0,3	19 Juni 2009	Semesteran 11 Januari 2012-23 Juni 2014	Semesteran	6 bln LIBOR+2,5%
PT ZTE Indonesia ("ZTE")	US$	0,1	20 Agustus 2009	Semesteran 10 Juni 2012-10 Juni 2014	Semesteran	6 bln LIBOR+1,5% 6 bln LIBOR+2,5%

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan ZTE dan Huawei Tech (*Agreement of Frame Supply and Deferred Payment Arrangement*), Promes yang dikeluarkan Perusahaan kepada ZTE dan Huawei Tech tersebut merupakan fasilitas pembiayaan pemasok tanpa jaminan untuk pembayaran 85% dari nilai berita acara serah terima proyek-proyek dengan ZTE dan Huawei Tech.

20. UTANG BANK

Kreditur	Mata uang	2011 Saldo terutang Mata uang asal (dalam jutaan)	2011 Saldo terutang Setara Rupiah	2010 Saldo terutang Mata uang asal (dalam jutaan)	2010 Saldo terutang Setara Rupiah
Sindikasi bank	Rp	-	3.225	-	4.500
BCA	Rp	-	2.271	-	2.755
Bank Mandiri	Rp	-	2.111	-	3.075
BRI	Rp	-	1.131	-	822
ABN Amro Bank N.V., Stockholm ("AAB Stockholm") dan Standard Chartered Bank	US$	85	771	54	487
BNI	Rp	-	400	-	1.150
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US$	42	381	54	486
Industrial and Commercial Bank of China Limited ("ICBC")	US$	39	350	46	417
OCBC NISP	Rp	-	466	-	622
Bank CIMB Niaga	Rp	-	81	-	24
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ("Bank Ekonomi")	Rp	-	69	-	79
	US$	0	4	-	
Bank of China ("BoC")	US$	-	-	18	159
Finnish Export Credit Ltd	US$	-	-	17	149
The Export-Import Bank of Korea ("Korea Eximbank")	US$	-	-	12	106
Lain-lain	Rp	-	1	-	8
Jumlah			11.261		14.839
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(70)		(105)
			11.191		14.734
Bagian utang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 17a)			(3.960)		(4.478)
Bagian jangka panjang (Catatan 17b)			**7.231**		**10.256**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total Fasilitas (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Sindikasi bank							
29 Juli 2008 [a] (BNI, BRI, dan Bank Jabar)	Perusahaan	Rp	2.400	Semesteran (2010-2013)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,20%	Tidak ada
16 Juni 2009 [a] (BNI dan BRI)	Perusahaan	Rp	2.700	Semesteran (2011-2014)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +2,45%	Tidak ada
BCA							
3 Juli 2009 [b]	Telkomsel	Rp	2.000	Semesteran (2010-2014)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,50%	Tidak ada
5 Juli 2010 [b&c]	Telkomsel	Rp	2.000	Semesteran (2012-2016)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,20%	Tidak ada
16 Desember 2010 [a]	TII	Rp	200	Semesteran (2011-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,25%	Tidak ada
Bank Mandiri							
3 Juli 2009 [b]	Telkomsel	Rp	2.000	Semesteran (2010-2014)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,50%	Tidak ada
5 Juli 2010 [b&c]	Telkomsel	Rp	3.000	Semesteran (2012-2016)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,20%	Tidak ada
BRI							
13 Oktober 2010 [a]	Perusahaan	Rp	3.000	Semesteran (2013-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,25%	Tidak ada
20 Juli 2011 [a]	Dayamitra	Rp	1.000	Semesteran (2011-2017)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,4%	Aset tetap (Catatan 10)
ABN Amro Bank N.V., Stockholm ("AAB Stockholm") dan Standard Chartered Bank							
30 Desember 2009 [b&d]	Telkomsel	US$	0,3	Semesteran (2011-2016)	Semesteran	6 bulan LIBOR +0,82%	Tidak ada
BNI							
13 Oktober 2010 [a]	Perusahaan	Rp	1.000	Semesteran (2013-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,25%	Tidak ada
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")							
26 Maret 2010 [a&e]	Perusahaan	US$	0,06	Semesteran (2010-2015)	Semesteran	4,56% dan 6 bulan LIBOR +0,70%	Tidak ada
Industrial and Commercial Bank of China Limited ("ICBC")							
30 Desember 2009 [b&f]	Telkomsel	US$	0,3	Semesteran (2011-2016)	Semesteran	6 bulan LIBOR +1,20%	Tidak ada
OCBC NISP							
2 November 2009 [b&g]	Telkomsel	Rp	500	Semesteran (2010-2014)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +3,00%	Tidak ada
2 November 2009 [b&g]	Telkomsel	Rp	200	Semesteran (2010-2014)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +3,00%	Tidak ada

20. UTANG BANK (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank CIMB Niaga							
21 Maret 2007 [h]	GSD	Rp	21	Kuartalan (2007-2015)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
23 November 2007 [h]	GSD	Rp	9	Bulanan (2007-2012)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10)
28 Juli 2009 [i]	Balebat	Rp	3	Bulanan (2010-2014)	Bulanan	11,50%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
24 Mei 2010	Balebat	Rp	3	Bulanan (2010-2015)	Bulanan	11,50%	Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5)
31 Maret 2011	GSD	Rp	13	Bulanan (2011-2019)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10), dan piutang usaha (Catatan 5)
31 Maret 2011	GSD	Rp	24	Bulanan (2011-2019)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10), dan piutang usaha (Catatan 5)
31 Maret 2011	GSD	Rp	12	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10), dan piutang usaha (Catatan 5)
9 September 2011	GSD	Rp	11	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10), dan piutang usaha (Catatan 5)
9 September 2011	GSD	Rp	41	Bulanan (2011-2021)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 10), dan piutang usaha (Catatan 5)
Bank Ekonomi							
7 Desember 2006 [a&j]	Sigma	Rp	14	Bulanan (2006-2012)	Bulanan	9,00%-10,50%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
9 Maret 2007 [a&j]	Sigma	Rp	13	Bulanan (2008-2012)	Bulanan	9,00%-10,50%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
10 September 2008 [a&j]	Sigma	Rp	33	Bulanan (2009-2015)	Bulanan	9,00%-10,50%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
7 Agustus 2009 [a&j]	Sigma	Rp	35	Bulanan beberapa cicilan (2009-2013)	Bulanan	9,00%-10,50%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
7 Agustus 2009 [a&j]	Sigma	Rp	20	Bulanan beberapa cicilan (2009-2014)	Bulanan	9,00%-10,50%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)

20. UTANG BANK (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank Ekonomi (lanjutan)							
23 Februari 2011 [a&j]	Sigma	Rp	30	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	9,00%-10,50%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)
23 Februari 2011 [a &j]	Sigma	US$	0,002	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	6,00%	Aset tetap (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 5)

Fasilitas utang bank yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

[a] Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan dan entitas anak telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut.

[b] Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Desember 2011, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

[c] Sehubungan dengan berakhirnya periode ketersediaan fasilitas dari BCA dan Bank Mandiri, bank-bank tersebut telah menyetujui perpanjangan periode ketersediaan menjadi Januari 2012. Persetujuan perpanjangan periode ketersediaan dari BCA dan Bank Mandiri telah diresmikan melalui amandemen perjanjian pinjaman masing-masing pada tanggal 20 dan 21 Juli 2011.

[d] Sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia ("Ericsson Indonesia") dan Ericsson AB (Catatan 41a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian EKN-Backed Facility ("fasilitas") dengan ABN Amro Bank N.V. cabang Stockholm (sebagai "*the original lender*"), Standard Chartered Bank (sebagai "*the original lender*", *"the arranger*", "*the facility agent*" dan "*the EKN agent*"), ABN Amro Bank N.V., Hong Kong (sebagai "*the arranger*") untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Ericsson. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar US$117 juta, US$106 juta, dan US$95juta. Periode ketersediaan fasilitas 1 berakhir pada Juli 2010 tanpa saldo terutang dan periode ketersediaan fasilitas 2 berakhir pada Maret 2011. Sehubungan dengan berakhirnya ketersediaan fasilitas 2, EKN setuju untuk mengurangi premi dari fasilitas yang tak terpakai sebesar US$3 juta melalui pengembalian kas.

[e] Sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NSW-Fujitsu, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan JBIC, *the international arm of Japan Finance Corporation* untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Konsorsium NSW-Fujitsu. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US$36 juta dan US$24 juta.

[f] Sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan Huawei International Pte.Ltd. ("Huawei International") dan PT Huawei Tech Investment ("Huawei Tech") (Catatan 41a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian Sinosure-*Backed Facility* dengan ICBC untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Huawei. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1 dan 2 masing-masing sebesar US$166 juta dan US$100 juta, termasuk premi sebesar US$16 juta. Periode ketersediaan sisa fasilitas 1 berakhir pada Desember 2010. Sehubungan dengan berakhirnya periode ketersediaan fasilitas 1, Telkomsel telah meminta Sinosure untuk mengurangi bagian premi dari fasilitas yang tidak digunakan. Pada Desember 2011, Sinosure menyetujui rencana Telkomsel untuk melunasi sisa saldo pinjaman pada Januari 2012 (Catatan 46.b) dan menyetujui untuk mengembalikan bagian premi dari fasilitas yang tidak terpakai. Selanjutnya, sisa pinjaman telah diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.

[g] Pada Desember 2011, Telkomsel menyampaikan pada OCBC NISP rencananya untuk melunasi sisa saldo pinjaman pada 2 Februari 2012 (Catatan 46.d). Selanjutnya, sisa pinjaman telah diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.

[h] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

[i] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 24 Mei 2010.

[j] Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 23 November 2011.

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	2011	2010
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	13.430	11.971
Metra*	33	17
Infomedia*	8	8
Jumlah	**13.471**	**11.996**

	2011	2010
Kepentingan nonpengendali atas laba komprehensif entitas anak:		
Telkomsel	4.488	4.326
Metra*	16	6
Infomedia*	1	1
Jumlah	**4.505**	**4.333**

*Jumlah ini mencerminkan bagian pihak ketiga atas kepemilikan di entitas anak pada Metra dan Infomedia.

22. MODAL SAHAM

	2011		
Keterangan	**Jumlah saham**	**Persentase kepemilikan**	**Jumlah modal disetor**
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Pemerintah	10.320.470.711	53,24	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	2.952.965.536	15,23	738
Direksi (Catatan 1b):			
Ermady Dahlan	17.604	-	0
Indra Utoyo	5.508	-	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.112.879.960	31,53	1.529
Jumlah	19.386.339.320	100,00	4.847
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 24)	773.659.960	-	193
Jumlah	**20.159.999.280**	**100,00**	**5.040**

*The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

	2010		
Keterangan	**Jumlah saham**	**Persentase kepemilikan**	**Jumlah modal disetor**
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Pemerintah	10.320.470.711	52,47	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	2.394.970.656	12,18	599
Direksi (Catatan 1b):			
Ermady Dahlan	17.604	-	0
Indra Utoyo	5.508	-	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.953.960.300	35,35	1.738
Jumlah	19.669.424.780	100,00	4.917
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 24)	490.574.500	-	123
Jumlah	**20.159.999.280**	**100,00**	**5.040**

*The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2011	**2010**
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)
Jumlah	**1.073**	**1.073**

24. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Tahap	Dasar	Jangka waktu	Maksimum pembelian	
			Lembar	Nilai
I	RUPSLB	21 Desember 2005 - 20 Juni 2007	1.007.999.964	Rp5.250 miliar
II	RUPST	29 Juni 2007 - 28 Desember 2008	215.000.000	Rp2.000 miliar
III	RUPST	20 Juni 2008 - 20 Desember 2009	339.443.313	Rp3.000 miliar
-	Bapepam-LK	13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	4.031.999.856	Rp3.000 miliar
IV	RUPST	19 Mei 2011 - 20 November 2012	645.161.290	Rp5.000 miliar

Mutasi saham yang dibeli kembali akibat dari program pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

	2011			2010		
	Jumlah Saham	%	Rp	Jumlah Saham	%	Rp
Saldo awal	490.574.500	2,43	4.264	490.574.500	2,43	4.264
Jumlah saham yang dibeli kembali	283.085.460	1,41	2.059	-	-	-
Saldo akhir	**773.659.960**	**3,84**	**6.323**	**490.574.500**	**2,43**	**4.264**

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas penggunaan saham yang diperoleh kembali dari hasil pembelian kembali saham tahap I, II, dan III, sebagai berikut: (i) dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek; (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; (iii) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan (iv) untuk keperluan pendanaan.

25. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI LAINNYA ENTITAS SEPENGENDALI

Saldo akun ini berjumlah Rp478 miliar berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri, dimana Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp537 miliar.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan telah menerima pembayaran dengan total masing-masing sejumlah Rp478 miliar terkait dengan kompensasi atas terminasi dini dari hak eksklusif yang dibayarkan tahunan oleh Pemerintah sejak 2005 sampai dengan 2008 masing-masing sebesar Rp90 miliar dan terakhir pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp118 miliar. Perusahaan mencatat jumlah ini sebagai "Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas. Jumlah ini dicatat sebagai bagian dari ekuitas karena Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali atas Perusahaan.

26. PENDAPATAN

	2011	2010
Pendapatan Telepon		
Seluler		
Pendapatan pemakaian	27.189	28.024
Fitur	838	582
Pendapatan abonemen bulanan	569	488
Pendapatan jasa sambungan	2	40
	28.598	29.134
Tidak bergerak		
Pendapatan pemakaian	8.213	9.287
Pendapatan abonemen bulanan	3.004	3.251
Pendapatan instalasi	135	179
Lain-lain	267	223
	11.619	12.940
Jumlah Pendapatan Telepon	**40.217**	**42.074**
Pendapatan Interkoneksi		
Interkoneksi domestik dan *transit*	2.071	2.174
Interkoneksi internasional	1.438	1.561
Jumlah Pendapatan Interkoneksi	**3.509**	**3.735**
Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika		
Short Messaging Service ("SMS")	13.093	11.289
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	10.548	8.297
VoIP	245	197
e-Business	38	18
Jumlah Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika	**23.924**	**19.801**
Pendapatan Jaringan		
Sewa sirkit	911	687
Sewa *transponder* satelit	390	371
Jumlah Pendapatan Jaringan	**1.301**	**1.058**
Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya		
Customer Premise Equipment ("CPE") dan terminal	739	851
Kompensasi KPU	430	342
Directory assistance	349	322
Pendapatan TV Berbayar	259	159
Penjualan Modem	163	170
Lain-lain	362	117
Jumlah Jasa Telekomunikasi Lainnya	**2.302**	**1.961**
JUMLAH PENDAPATAN	**71.253**	**68.629**

27. BEBAN USAHA - KARYAWAN

	2011	2010
Gaji dan tunjangan	3.001	2.751
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	2.814	2.575
PPh karyawan	1.043	796
Program Pendi	517	-
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 34)	501	504
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 36)	199	238
Perumahan	197	214
Beban LSA (Catatan 35)	96	78
Asuransi	70	68
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 34c)	65	66
Imbalan karyawan lainnya (Catatan 34d)	30	23
Lain-lain	22	19
Jumlah	**8.555**	**7.332**

28. BEBAN USAHA - OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

	2011	2010
Operasi dan pemeliharaan	9.191	8.836
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 37b dan 41c.iii)	2.846	2.892
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal (Catatan 37b)	1.235	1.177
Beban pokok penjualan telepon, *set top box*, kartu SIM, dan RUIM	879	1.067
Listrik, gas, dan air	836	841
Asuransi	431	384
Sewa sirkit dan CPE	406	215
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	291	283
Beban pokok jasa teknologi informatika	144	200
Perjalanan	54	60
Lain-lain	59	91
Jumlah	**16.372**	**16.046**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

29. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI

	2011	2010
Provisi atas penurunan nilai piutang dan persediaan usang (Catatan 5d dan 6)	883	525
Beban penagihan	327	401
Beban umum	326	301
Sumbangan sosial	290	171
Perjalanan	256	260
Jasa profesional	235	163
Pelatihan, pendidikan, dan rekruitmen	229	216
Keamanan dan *screening*	97	215
Rapat	86	80
Alat tulis dan cetakan	53	64
Sewa kendaraan	43	51
Lain-lain	110	90
Jumlah	**2.935**	**2.537**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

30. BEBAN USAHA - INTERKONEKSI

	2011	2010
Interkoneksi domestik dan *transit*	2.414	1.980
Interkoneksi internasional	1.141	1.106
Jumlah	**3.555**	**3.086**

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

31. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	2011	2010
Entitas anak		
PPh badan	23	15
PPh Pasal 23 - Penyerahan jasa	8	8
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	340	110
	371	**133**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak dibayar di muka

	2011	2010
Perusahaan		
PPN	43	-
Entitas anak		
PPh badan	610	667
PPN	131	47
PPh		
Pasal 23 - Penyerahan jasa	3	2
	744	716
	787	**716**

c. Utang pajak

	2011	2010
Perusahaan		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	4	7
Pasal 21 - PPh pribadi	68	67
Pasal 23 - Penyerahan jasa	11	11
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	40	32
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	1	1
Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan	1	10
PPN	-	13
	125	141
Entitas anak		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	29	15
Pasal 21 - PPh pribadi	75	36
Pasal 23 - Penyerahan jasa	25	43
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	6	405
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	10	18
Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan	682	16
PPN	87	62
	914	595
	1.039	**736**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Pajak kini		
Perusahaan	777	558
Entitas anak	4.896	4.111
	5.673	4.669
Pajak tangguhan		
Perusahaan	25	671
Entitas anak	(311)	206
	(286)	877
	5.387	**5.546**

e. PPh badan dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai entitas yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak berlaku untuk perhitungan PPh badan di Indonesia).

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan dan beban PPh konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Laba sebelum pajak konsolidasian	20.857	21.416
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	8.925	8.210
Laba konsolidasian sebelum pajak dan eliminasi	29.782	29.626
Dikurangi: laba sebelum pajak entitas anak	(18.082)	(16.932)
Laba sebelum pajak Perusahaan	11.700	12.694
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(462)	(633)
	11.238	12.061
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	2.248	2.413
Penghasilan tidak kena pajak	(1.785)	(1.640)
Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak	235	283
Liabilitas pajak tangguhan yang tidak dapat digunakan - bersih	41	112
Beban PPh badan	739	1.168
Beban PPh final	63	61
Jumlah beban PPh - Perusahaan	802	1.229
Beban PPh - entitas anak	4.585	4.317
Jumlah beban PPh konsolidasian	**5.387**	**5.546**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Laba sebelum pajak Perusahaan	11.700	12.694
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(462)	(633)
	11.238	12.061
Perbedaan temporer:		
Amortisasi aset takberwujud dan hak atas tanah	9	1.006
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(479)	(1.129)
Provisi atas penurunan nilai dan penghapusan piutang usaha	139	(11)
Keuntungan selisih kurs atas nilai imbalan kombinasi bisnis yang ditangguhkan	(0)	(31)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	45	(299)
Pembayaran nilai perolehan kombinasi bisnis yang ditangguhkan	(106)	(1.204)
Penyisihan beban Pendi		(1.029)
Pendapatan instalasi tangguhan	(86)	(87)
Penyisihan penurunan nilai aset tetap	563	-
Penyisihan lain-lain	(4)	(46)
Jumlah perbedaan temporer	**81**	**(2.830)**
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	199	229
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(8.925)	(8.201)
Lain-lain	975	1.226
Jumlah perbedaan tetap	**(7.751)**	**(6.746)**
Laba kena pajak	**3.568**	**2.485**
Beban pajak kini	714	497
Beban pajak final	63	61
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	777	558
Beban pajak kini - entitas anak	4.896	4.111
Jumlah pajak kini	**5.673**	**4.669**

Dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 juga diatur pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif tertinggi diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat, yang tercatat dan memperdagangkan sahamnya di BEI yang memenuhi persyaratan bahwa paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikannya masing-masing tidak boleh melebihi dari 5%.

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. (lanjutan)

Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan Perusahaan periode 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan telah menurunkan tarif pajak sebesar 5%. Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 20% untuk tahun fiksal 2011 dan 2010. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk tahun fiskal 2011 dan 2010.

Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2011 akan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jumlah PPh badan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

f. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan sebesar Rp255 miliar yang dilaporkan pada tahun fiskal 2008. Pada tanggal 16 Juni 2010, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") pajak penghasilan badan sebesar Rp228 miliar. Selisih antara SKPLB dengan tagihan restitusi pajak Perusahaan sebesar Rp27 miliar telah dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2010. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPN sebesar Rp1,69 miliar termasuk denda pajak sebesar Rp0,5 miliar yang dikompensasikan dengan SKPLB PPh badan. Dengan demikian Perusahaan menerima pengembalian dari DJP sebesar Rp226,5 miliar. Pada tanggal 9 Juli 2010, Perusahaan telah menerima pengembalian atas SKPLB pajak penghasilan badan tahun fiskal 2008.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pelaksanaan pemungutan atas PPh pihak ketiga (*withholding tax*) untuk tahun fiskal 2008 masih dalam proses.

(ii) Telkomsel

Pada tanggal 25 Februari 2009, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada MA, atas keputusan Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Telkomsel untuk *withholding tax* untuk tahun fiskal 2002 sebesar Rp115 miliar. Pada tanggal 3 April 2009, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, uji materi tersebut masih dalam proses.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak pada bulan Maret 2010, keberatan Telkomsel atas PPN diterima dan selanjutnya Telkomsel menerima pengembalian sebesar Rp215 miliar di bulan Juni 2010 termasuk bunga sebesar Rp103 miliar. Pada tanggal 10 Agustus 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung ("MA") atas keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 24 September 2010 Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan kontra memori tersebut masih dalam proses.

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Sebagai hasil dari pemeriksaan pajak dan keputusan Pengadilan Pajak, pada tanggal 28 Januari dan 12 Februari 2010, Telkomsel menerima pengembalian atas kelebihan bayar untuk PPh Badan tahun fiskal 2008 masing-masing sebesar Rp439 miliar dan Rp4,2 miliar.

Pada tanggal 21 April 2010, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak tentang pengajuan banding Otoritas Pajak kepada MA terkait putusan Pengadilan Pajak mengenai pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk periode Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8 miliar). Pada bulan Mei 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, kontra memori tersebut masih dalam proses.

Pada tahun 2010, Telkomsel diperiksa atas kurang bayar PPh badan, *withholding tax*, dan PPN, untuk tahun fiskal 2006 sebesar Rp212 miliar (termasuk denda Rp69 miliar). Pada tanggal 23 Desember 2010, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar potongan PPh dan PPN sebesar Rp116 miliar (termasuk denda Rp38 miliar) dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Bagian yang diterima sebesar Rp50 miliar telah diakui dan dibebankan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2008 sementara bagian sisanya sebesar Rp46 miliar dibebankan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2010. Selanjutnya pada September 2011, Otoritas Pajak menolak keberatan Telkomsel. Pada Desember 2011, Telkomsel mengajukan keberatan ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses.

Pada bulan Oktober dan November 2010, Telkomsel menerima STP atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp229 miliar (termasuk denda Rp11 miliar). STP tersebut telah dibayar pada bulan November dan Desember 2010. Pembayaran pokok sebesar Rp218 miliar diperhitungkan sebagai pembayaran di muka dalam menghitung PPh badan tahun 2010 yang pada akhirnya menghasilkan lebih bayar Rp599,87 miliar. Kelebihan bayar dan denda diakui sebagai pajak dibayar di muka pada 31 Desember 2010. Melalui suratnya di bulan November 2010, Telkomsel meminta Otoritas Pajak untuk membatalkan STP tersebut. Selanjutnya, pada bulan april 2011, Telkomsel menerima STP dari Otoritas Pajak yang merevisi STP yang diterbitkan pada bulan Oktober dan November 2010 tersebut diatas dengan tambahan denda sebesar Rp4,3 miliar.

Pada 5 Mei 2011, Otoritas Pajak menolak permohonan Telkomsel untuk membatalkan STP-STP tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2011, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Pengadilan Pajak. Kelebihan bayar dan denda diakui sebagai tagihan restitusi pajak pada tanggal 31 Desember 2011. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses.

Pada Agustus 2011, Telkomsel diperiksa atas kurang bayar *withholding tax* dan PPN, untuk tahun fiskal 2008 sebesar Rp235 miliar. Pada bulan November 2011, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp232 miliar dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Sisanya sebesar Rp3 miliar dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2011. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses.

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	31 Desember 2011
Perusahaan			
Aset pajak tangguhan:			
Nilai imbalan kombinasi bisnis yang ditangguhkan	27	(27)	-
Provisi penurunan nilai piutang	287	47	334
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	84	2	86
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	26	4	30
Penyisihan beban karyawan	86	(4)	82
Pendapatan sambungan tangguhan	106	(21)	85
Jumlah aset pajak tangguhan	616	1	617
Liabilitas pajak tangguhan:			
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.893)	(36)	(1.929)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(25)	4	(21)
Sewa pembiayaan	(39)	6	(33)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.957)	(26)	(1.983)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(1.341)	(25)	(1.366)
Telkomsel			
Aset pajak tangguhan:			
Provisi penurunan nilai piutang	50	14	64
Penyisihan beban karyawan	109	42	151
Jumlah aset pajak tangguhan	159	56	215
Liabilitas pajak tangguhan:			
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.783)	254	(2.529)
Aset takberwujud	(48)	(1)	(49)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(2.831)	253	(2.578)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(2.672)	309	(2.363)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(61)	(4)	(65)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(4.074)**	**280**	**(3.794)**
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**62**	**5**	**67**

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2009	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Akuisisi Ad Medika	31 Desember 2010
Perusahaan				
Aset pajak tangguhan:				
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	335	(308)	-	27
Provisi penurunan nilai piutang	269	18	-	287
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	160	(76)	-	84
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	54	(28)	-	26
Beban Pendi	257	(257)	-	-
Penyisihan beban karyawan	85	1	-	86
Pendapatan sambungan tangguhan	128	(22)	-	106
Jumlah aset pajak tangguhan	1.288	(672)	-	616
Liabilitas pajak tangguhan:				
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.650)	(243)	-	(1.893)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(277)	252	-	(25)
Sewa pembiayaan	(31)	(8)	-	(39)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.958)	1	-	(1.957)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(670)	(671)	-	(1.341)
Telkomsel				
Aset pajak tangguhan:				
Provisi penurunan nilai piutang	30	20	-	50
Penyisihan beban karyawan	92	17	-	109
Jumlah aset pajak tangguhan	122	37	-	159
Liabilitas pajak tangguhan:				
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.554)	(229)	-	(2.783)
Aset takberwujud	(41)	(7)	-	(48)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(2.595)	(236)	-	(2.831)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(2.473)	(199)	-	(2.672)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak - bersih	(77)	26	(10)	(61)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(3.220)**	**(844)**	**(10)**	**(4.074)**
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**95**	**(33)**	**-**	**62**

Realisasi dari aset pajak tangguhan tersebut tergantung kepada kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam menghasilkan laba di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Perusahaan dan entitas anak yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut dipertimbangkan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Administrasi

Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menkumham telah menandatangani dan mengundangkan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Pajak No. 7 tahun 1983 tentang PPh. Peraturan ini mengatur penerapan tarif tunggal untuk perhitungan Pajak badan sebesar 28% di tahun 2009 (dimana sebelumnya dihitung dengan tarif progresif 10%-30%), dan 25% di tahun 2010.

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anak menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Tidak ada pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk tahun fiskal 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, dan 2010 bagi Perusahaan. Pemeriksaan pajak telah diselesaikan untuk tahun-tahun fiskal lainnya.

Saat ini, Telkomsel sedang diperiksa oleh DJP untuk lebih bayar PPh Badan tahun fiskal 2010. Perusahaan mendapatkan sertifikat dari DJP berupa pembebasan pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2007, 2008, 2009, dan 2010, yang berlaku kecuali jika Perusahaan melaporkan SPT Tahunan Lebih Bayar, maka pemeriksaan akan dilakukan.

32. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sepanjang tahun masing-masing sejumlah 19.591.872.544, dan 19.669.424.780 pada tahun 2011 dan 2010.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp559,67, dan Rp586,54 (nilai penuh) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010.

33. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 17 tertanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2009 sebesar Rp5.666 miliar atau Rp288,06 per lembar saham (Rp524 miliar atau Rp26,65 per lembar saham dibagikan sebagai dividen kas interim di bulan November 2009).

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 21 tertanggal 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2010 sebesar Rp6.345 miliar atau Rp322,59 per lembar saham (Rp526 miliar atau Rp26,75 per lembar saham dibagikan sebagai dividen kas interim di bulan Desember 2010).

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

	2011	2010
Beban manfaat pensiun dibayar di muka		
Perusahaan	990	743
Infomedia	1	1
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	**991**	**744**
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya		
Pensiun		
Perusahaan	1.067	804
Telkomsel	264	148
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun	1.331	952
Imbalan pasca kerja lainnya	273	241
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	111	87
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	**1.715**	**1.280**
Beban (pendapatan) pensiun berkala bersih		
Perusahaan	384	429
Telkomsel	117	75
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	**501**	**504**
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 27)	**65**	**66**
Imbalan karyawan lainnya (Catatan 27)	**30**	**23**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar Rp187 miliar dan Rp485 miliar.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 untuk program pensiun manfaat pasti:

	2011	2010
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	11.924	10.131
Beban jasa	307	254
Beban bunga	1.105	1.003
Kontribusi peserta program pensiun	44	42
Rugi aktuaria	3.391	1.114
Perkiraan pembayaran pensiun	(583)	(620)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	16.188	11.924
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	15.098	12.300
Perkiraan pengembalian atas aset program pensiun	1.441	1.287
Kontribusi pemberi kerja	187	485
Kontribusi peserta program pensiun	44	42
Laba aktuaria	410	1.604
Perkiraan pembayaran pensiun	(583)	(620)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	16.597	15.098
Status pendanaan	409	3.174
Beban jasa lalu yang belum diakui	356	495
Rugi (laba) aktuaria bersih yang belum diakui	225	(2.926)
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	**990**	**743**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka (lanjutan)

Hasil aktual aset program adalah Rp1.851 miliar dan Rp2.891 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010.

Mutasi liabilitas diestimasi manfaat pensiun (dibayar di muka) selama tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Manfaat pensiun dibayar di muka pada awal tahun	(743)	(208)
Pendapatan pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	(62)	(52)
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	2	2
Kontribusi pemberi kerja	(187)	(485)
Manfaat pensiun dibayar di muka pada akhir tahun	**(990)**	**(743)**

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, aset program pensiun terdiri dari:

	2011	2010
Surat berharga ekuitas Indonesia	22,13%	24,34%
Obligasi pemerintah	39,67%	38,76%
Obligasi korporasi	17,37%	18,64%
Lainnya	20,83%	18,26%
	100,00%	**100,00%**

Aset program pensiun juga termasuk penempatan pada saham Seri B dengan nilai wajar Rp234 miliar dan Rp269 miliar yang merupakan 1,41% dan 1,78% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan obligasi yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar Rp156 miliar dan Rp156 miliar yang merupakan 0,94% dan 1,03% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Penilaian aktuaria atas program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 34b) dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, pada laporan tertanggal 7 Maret 2012, 15 Maret 2011 oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Towers Watson ("TW"). Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Tingkat diskonto	7,25%	9,5%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	9,25%	9,7%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	8%

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Beban jasa	307	254
Beban bunga	1.105	1.003
Perkiraan pengembalian aset atas program pensiun	(1.441)	(1.287)
Amortisasi beban jasa lalu	139	139
Laba aktuaria yang diakui	(170)	(159)
Pendapatan pensiun berkala bersih	(60)	(50)
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(2)	(2)
Pendapatan pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak (Catatan 27)	**(62)**	**(52)**

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun

1. Perusahaan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan yang untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp5 miliar dan Rp4 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformulation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dengan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan liabilitas Perusahaan sebesar Rp699 miliar yang akan diamortisasi selama 9,9 tahun hingga 2016. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformulation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan liabilitas Perusahaan sebesar Rp435 miliar yang akan diamortisasi selama 8,63 tahun hingga 2018.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, dan manfaat-manfaat lainnya.

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun MPS dan MPP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010:

	2011	2010
Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun		
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	2.096	1.622
Beban jasa	89	77
Beban bunga	194	197
Rugi aktuaria	244	61
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(183)	(296)
Perubahan manfaat	-	435
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir tahun	2.440	2.096
Beban jasa lalu yang belum diakui	(772)	(905)
Rugi aktuaria bersih yang belum diakui	(601)	(387)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	**1.067**	**804**

Mutasi liabilitas diestimasi manfaat pensiun selama tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	804	619
Beban pensiun berkala bersih	446	481
Kontribusi pemberi kerja	(183)	(296)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	**1.067**	**804**

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Beban jasa	89	77
Beban bunga	194	197
Amortisasi beban jasa lalu	133	173
Rugi aktuaria yang diakui	30	34
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	**446**	**481**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

2. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pension ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya berjumlah Rp2 miliar dan Rp40 miliar masing-masing untuk 2011 dan 2010.

Rekonsiliasi antara program pensiun yang tidak didanai dan jumlah liabilitas yang disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Liabilitas manfaat pensiun	(1.237)	(663)
Nilai wajar aset program pensiun	458	246
Status pendanaan	(779)	(417)
Komponen yang tidak diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian:		
Beban jasa lalu yang belum diakui	0	1
Rugi aktuaria bersih yang belum diakui	515	268
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun	**(264)**	**(148)**

Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Beban jasa	67	44
Beban bunga	59	42
Perkiraan pengembalian aset program pensiun	(22)	(16)
Amortisasi beban jasa lalu	1	0
Rugi aktuaria yang diakui	12	5
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	**117**	**75**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

2. Telkomsel (lanjutan)

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dengan laporan tertanggal masing-masing 24 Februari 2012 dan 23 Februari 2011 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2011dan 2010 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Tingkat diskonto	6,75%	9%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	6,75%	9%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	8%

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

Mutasi imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada awal tahun	241	209
Beban imbalan pasca kerja lainnya	65	66
Pembayaran oleh Perusahaan	(33)	(34)
Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun	**273**	**241**

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Beban jasa	9	18
Beban bunga	37	36
Amortisasi beban jasa lalu	7	7
Rugi aktuaria yang diakui	12	5
Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya - bersih (Catatan 27)	**65**	**66**

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

d. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp111 miliar dan Rp87 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp30 miliar dan Rp23 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 (Catatan 27).

35. PENGHARGAAN MASA KERJA ("*LONG SERVICE AWARDS*" ATAU "LSA")

Telkomsel memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode *projected unit credit*, sebesar Rp287 miliar dan Rp242 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp96 miliar dan Rp78 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 (Catatan 27).

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom ("Yakes").

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Kontribusi pembayaran Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp19 miliar dan Rp20 miliar.

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan mutasi liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

	2011	2010
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	8.741	7.166
Beban jasa	43	84
Beban bunga	818	744
Rugi aktuaria	1.208	1.035
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(263)	(288)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	10.547	8.741
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	8.005	6.022
Perkiraan pengembalian aset program	662	589
Kontribusi pemberi kerja	361	991
Laba aktuaria	222	691
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(264)	(288)
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	8.986	8.005
Status pendanaan	(1.561)	(736)
Rugi (laba) aktuaria bersih yang belum diakui	673	(314)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	**(888)**	**(1.050)**

Hasil aktual aset program adalah Rp884 miliar dan Rp1.280 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010.

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Beban jasa	43	84
Beban bunga	818	744
Perkiraan pengembalian atas aset program	(662)	(589)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	199	239
Jumlah yang dibebankan ke entitas anak berdasarkan perjanjian	-	(1)
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak (Catatan 27)	**199**	**238**

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, aset program meliputi saham Seri B yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing sebesar Rp24 miliar dan Rp34 miliar.

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	1.050	1.802
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak (Catatan 27)	199	238
Jumlah yang dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	-	1
Kontribusi pemberi kerja	(361)	(991)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	**888**	**1.050**

Penilaian aktuaria untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 pada laporan masing-masing tertanggal 7 Maret 2012 dan 15 Maret 2011 oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Tingkat diskonto	7,25%	9,5%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program	8,00%	8,21%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7%	8%
Tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan	7%	8%
Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir	2012	2011

Peningkatan 1% pada perkiraan pertumbuhan beban kesehatan akan memberikan dampak sebagai berikut:

	2011	2010
Beban jasa dan beban bunga	974	1.021
Akumulasi liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja	12.566	10.312

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Sifat hubungan dan transaksi/akun dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Pemerintah	Pemegang saham utama	Beban bunga, dan investasi pada instrumen keuangan
Instansi pemerintah	Entitas sepengendali	Pendapatan jaringan dan beban operasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kemkominfo")	Entitas sepengendali	Beban hak penyelenggaraan, beban pemakaian frekuensi radio, beban KPU, dan pendapatan jasa telekomunikasi
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")	Entitas sepengendali	Beban operasi, pembelian aset tetap, jasa pembangunan dan instalasi, beban asuransi, beban bunga, pendapatan bunga, investasi pada instrumen keuangan
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, beban interkoneksi, beban atas penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasi dan pemeliharaan, pendapatan layanan sirkit langganan, pendapatan penggunaan transponder satelit, beban pemakaian sistem jaringan komunikasi data, dan pendapatan sewa
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Pendapatan jaringan, beban pemakaian sistem jaringan komunikasi data, dan beban layanan sirkit langganan
PT Satelit Palapa Indonesia ("Satelindo")	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Pendapatan jaringan dan beban layanan sirkit langganan
Indosat Mega Media	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Pendapatan jaringan
PT Sistelindo Mitralintas	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Pendapatan jaringan
CSM	Entitas asosiasi	Pendapatan penggunaan transponder satelit, Pendapatan layanan sirkit langganan, beban sewa transmisi
Patrakom	Entitas asosiasi	Pendapatan penggunaan transponder satelit, pendapatan layanan sirkit langganan, beban sewa transmisi
PSN	Entitas asosiasi	Pendapatan penggunaan transponder satelit, pendapatan layanan sirkit langganan, beban sewa transmisi, pendapatan interkoneksi, dan beban interkoneksi
PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI")	Entitas sepengendali	Pembelian aset tetap
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi aset tetap
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek")	Entitas sepengendali	Beban asuransi karyawan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")	Entitas sepengendali	Beban listrik
PT Pos Indonesia	Entitas sepengendali	Biaya kartu SIM
Bank milik negara	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
BNI	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
Bank Mandiri	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
BRI	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
BTN	Entitas sepengendali	Beban bunga dan pendapatan bunga
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana")	Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual, obligasi dan wesel bayar

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Pihak Hubungan Istimewa	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Pembelian aset tetap, jasa pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa kendaraan, pembelian barang dan jasa pembangunan, dan beban jasa pemeliharaan kebersihan, bagi hasil pendapatan PBH
PT Sandhy Putra Makmur ("SPM")	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban penagihan, dan beban jasa-jasa lainnya, pendapatan penjualan kartu SIM dan vaucer prabayar
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Pendapatan layanan sirkit langganan pembelian aset tetap, beban instalasi dan pemeliharaan
Direksi dan Komisaris	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Yakes	Entitas di bawah pengaruh signifikan	Beban pengobatan

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut adalah transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi:

	2011		2010	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Kisel	2.347	3,29	2.155	3,14
Indosat	857	1,20	965	1,41
Instansi Pemerintah	430	0,60	342	0,50
Lintasarta	93	0,13	103	0,15
Patrakom	67	0,09	66	0,10
CSM	57	0,08	77	0,11
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	28	0,04	30	0,04

	2011		2010	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Kemkominfo	4.165	8,34	4.153	8,98
PLN	1.243	2,49	1.623	3,51
Kopegtel	956	1,91	936	2,02
Indosat	814	1,63	910	1,97
Kisel	745	1,49	634	1,37
Jasindo	401	0,80	359	0,78
PSN	170	0,34	181	0,39
Yakes	121	0,24	136	0,29
CSM	107	0,21	121	0,26
SPM	91	0,18	182	0,39
Patrakom	77	0,15	74	0,16
PT Pos Indonesia	54	0,11	29	0,06
Jamsostek	33	0,07	31	0,07
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	47	0,09	72	0,16

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2011		2010	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
Penghasilan pendanaan				
Bank milik negara	320	58,61	233	55,34

	2011		2010	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
Biaya pendanaan				
Bank milik negara	621	37,94	938	48,65
Pemerintah	143	8,74	163	8,45
Jumlah	**764**	**46,67**	**1.101**	**57,10**

	2011		2010	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
PEMBELIAN ASET TETAP (Catatan 10)				
Kopegtel	183	1,25	127	1,02
BUMN	116	0,79	140	1,12
SPM	18	0,12	7	0,06
Gratika	5	0,03	29	0,23

Saldo akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2011		2010	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 4)	**7.848**	**7,62**	**7.942**	**7,90**
b. Aset keuangan tersedia untuk dijual				
BUMN	110	0,11	116	0,11
Pemerintah	140	0,14	138	0,14
Bahana	64	0,06	58	0,06
Jumlah	**314**	**0,31**	**312**	**0,31**
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	**932**	**0,90**	**780**	**0,78**
d. Uang Muka dan beban dibayar di muka (Catatan 7)				
Kemkominfo	2.206	2,14	2.393	2,38
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	27	0,03	8	0,00
	2.233	**2,17**	**2.401**	**2,38**
e. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 11)				
BNI	92	0,09	94	0,09
Bank Mandiri	-	-	47	0,05
Lain-lain	5	0,00	1	0,00
Jumlah	**97**	**0,09**	**142**	**0,14**

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2011		2010	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
f. Utang usaha (Catatan 13)				
Kemkominfo	409	0,97	394	0,89
Kopegtel	92	0,22	140	0,32
INTI	66	0,16	14	0,03
Indosat	52	0,12	62	0,14
BUMN	41	0,10	287	0,65
Yakes	35	0,08	61	0,14
Gratika	12	0,03	34	0,08
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp30 miliar)	131	0,31	162	0,37
Jumlah	**838**	**1,99**	**1.154**	**2,62**
g. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 14)				
Bank milik negara	50	0,12	29	0,07
Pemerintah	22	0,05	36	0,08
	72	**0,17**	**65**	**0,15**
h. Uang muka pelanggan dan pemasok				
Pemerintah	**151**	**0,36**	**170**	**0,39**
i. Utang bank jangka pendek (Catatan 16)				
Bank milik negara	**7**	**0,02**	**4**	**0,01**
j. Pinjaman penerusan (Catatan 18)				
Pemerintah	**2.284**	**5,43**	**3.137**	**7,12**
k. Obligasi dan wesel bayar (Catatan 19)				
Bahana	**107**	**0,25**	**101**	**0,23**
l. Utang bank jangka panjang (Catatan 20)				
BNI	2.273	5,40	3.749	8,50
BRI	2.131	5,07	2.197	4,98
Bank Mandiri	2.110	5,02	3.073	6,97
Bank Jabar	350	0,83	525	1,19
BTN	-	-	7	0,02
Jumlah	**6.864**	**16,32**	**9.551**	**21,66**

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 18).

Perusahaan dan entitas anak membayar beban hak penyelenggaraan untuk jasa telekomunikasi yang diberikan dan beban pemakaian frekuensi radio kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kemkominfo").

Telkomsel membayar *up-front fee* untuk lisensi 3G sebesar Rp756 miliar dan mencatat sebagai aset takberwujud (Catatan 12).

Mulai tahun 2005, Perusahaan dan entitas anak membayar beban KPU kepada Kemkominfo sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005.

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011, dan dapat diberlakukan sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006 (Catatan 40). Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak seluler GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan entitas anak, yaitu PT Indosat Mega Media, Lintasarta, dan PT Sistelindo Mitralintas. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

iii. Lain-lain

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan entitas asosiasi yaitu CSM, Patrakom, PSN, dan Gratika untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi dan sirkit langganan Perusahaan.

Telkomsel mengadakan perjanjian dengan PSN untuk sewa jaringan transmisi PSN. Berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 14 Maret 2001, jangka waktu sewa minimum adalah 2 tahun sejak pengoperasian jaringan transmisi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang hingga 29 Maret 2013.

Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel") adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, pencetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan vaucer pulsa isi ulang.

d. Remunerasi personil manajemen kunci

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1b.

Perusahaan dan entitas anak memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris. Perusahaan dan entitas anak memberikan gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2011		2010	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	181	0,36	166	0,36
Dewan Komisaris	57	0,11	53	0,11

38. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan dan entitas anak memiliki tiga segmen operasi utama di Indonesia, yaitu sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, dan seluler. Segmen sambungan kabel tidak bergerak menyediakan jasa telepon lokal, SLJJ, dan internasional, dan jasa telekomunikasi lainnya (termasuk di antaranya sirkit langganan, teleks, *transponder*, satelit, dan VSAT), serta jasa pendukungnya. Segmen sambungan nirkabel tidak bergerak menyediakan jasa telekomunikasi berbasis CDMA yang menawarkan pelanggannya kemampuan untuk menggunakan pesawat telepon nirkabel dengan area terbatas (dalam kode wilayah lokal). Segmen seluler menyediakan jasa telekomunikasi dasar, khususnya jasa telekomunikasi seluler bergerak. Segmen operasi yang tidak diawasi secara terpisah oleh pengambil keputusan operasional disajikan sebagai "Lain-lain", yang terdiri dari usaha layanan informasi teknologi, buku petunjuk telepon, dan pengelolaan gedung.

38. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antar segmen usaha dan dinilai sebesar nilai pasar.

	2011						
	Sambungan kabel tidak bergerak	Sambungan nirkabel tidak bergerak	Seluler	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen							
Pendapatan							
Pendapatan eksternal	21.970	2.101	46.632	550	71.253	-	71.253
Pendapatan antar segmen	6.549	126	2.054	941	9.670	(9.670)	-
Jumlah pendapatan segmen	28.519	2.227	48.686	1.491	80.923	(9.670)	71.253
Pendapatan lainnya							
Pendapatan lainnya eksternal	292	11	295	67	665	-	665
Pendapatan lainnya antar segmen	17	-	-	183	200	(200)	-
Jumlah pendapatan segmen lainnya	309	11	295	250	865	(200)	665
Beban							
Beban eksternal	(18.250)	(3.571)	(26.734)	(1.405)	(49.960)	-	(49.960)
Beban antar segmen	(5.135)	(100)	(4.580)	(55)	(9.870)	9.870	-
Jumlah beban segmen	(23.385)	(3.671)	(31.314)	(1.460)	(59.830)	9.870	(49.960)
Hasil segmen	5.443	(1.433)	17.667	281	21.958	-	21.958
Bagian rugi bersih entitas asosiasi							(10)
Penghasilan pendanaan							546
Biaya pendanaan							(1.637)
Beban PPh							(5.387)
Laba tahun berjalan							15.470
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan - bersih setelah pajak							7
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih setelah pajak							4
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan							15.481
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk							10.965
Kepentingan nonpengendali							4.505
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk							10.976
Kepentingan nonpengendali							4.505
Informasi lain							
Aset segmen	42.937	4.167	58.221	1.177	106.502	(4.474)	102.028
Aset tersedia untuk dijual	-	-	791	-	791	-	791
Investasi pada entitas asosiasi	215	-	20	-	235	-	235
Jumlah aset konsolidasian							103.054
Jumlah liabilitas konsolidasian	(24.632)	(778)	(20.656)	(481)	(46.547)	4.474	(42.073)
Pembelian barang modal	(5.857)	(219)	(8.460)	(112)	(14.648)	-	(14.648)
Penyusutan dan amortisasi	(3.249)	(1309)	(10.261)	(44)	(14.863)	-	(14.863)
Beban non-kas lain-lain	(708)	(19)	(155)	(1)	(883)	-	(883)

38. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	2010						
	Sambungan kabel tidak bergerak	Sambungan nirkabel tidak bergerak	Seluler	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen							
Pendapatan							
Pendapatan eksternal	21.619	2.951	43.592	467	68.629	-	68.629
Pendapatan antar segmen	5.434	174	1.931	745	8.284	(8.284)	-
Jumlah pendapatan segmen	27.053	3.125	45.523	1.212	76.913	(8.284)	68.629
Pendapatan lainnya							
Pendapatan lainnya eksternal	291	22	220	15	548	-	548
Pendapatan lainnya antar segmen	23	-	-	37	60	(60)	-
Jumlah pendapatan lainnya	314	22	220	52	608	(60)	548
Beban							
Beban eksternal	(18.301)	(2.754)	(24.163)	(1.022)	(46.240)	-	(46.240)
Beban antar segmen	(3.967)	(123)	(4.223)	(31)	(8.344)	8.344	-
Jumlah beban segmen	(22.268)	(2.877)	(28.386)	(1.053)	(54.584)	8.344	(46.240)
Hasil segmen	5.099	270	17.357	211	22.937	-	22.937
Bagian rugi bersih entitas asosiasi							(14)
Penghasilan pendanaan							421
Biaya pendanaan							(1.928)
Beban PPh							(5.546)
Laba tahun berjalan							15.870
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan- bersih setelah pajak							2
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih setelah pajak							32
Jumlah laba komprehensif periode berjalan							15.904
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk							11.537
Kepentingan nonpengendali							4.333
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk							11.571
Kepentingan nonpengendali							4.333
Informasi lain							
Aset segmen	39.392	5.262	57.652	917	103.223	(2.976)	100.247
Investasi pada entitas asosiasi	234	-	20	-	254	-	254
Jumlah aset konsolidasian							100.501
Jumlah liabilitas konsolidasian	(22.421)	(827)	(23.466)	(348)	(47.062)	2.976	(44.086)
Pembelian barang modal	(4.052)	(147)	(8.198)	(90)	(12.487)	-	(12.487)
Penyusutan dan amortisasi	(4.211)	(730)	(9.637)	(34)	(14.612)	-	(14.612)
Beban non-kas lain-lain	(337)	(34)	(148)	(6)	(525)	-	(525)

39. POLA BAGI HASIL ("PBH")

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian PBH yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, instalasi telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), data dan jaringan internet, dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan memiliki 10 perjanjian PBH dengan 8 mitra usaha. Lokasi PBH paling banyak berada di Jawa Timur, Kalimantan, Makassar, Pare-pare, Manado, Denpasar, Mataram dan Kupang dengan periode penyelenggaraan antara 87 sampai dengan 148 bulan.

39. POLA BAGI HASIL ("PBH") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi. Setelah pembangunan selesai, Perusahaan mengelola dan mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut dan menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan selama periode bagi hasil. Secara hukum, mitra usaha berhak atas aset tetap yang dibangun mitra usaha selama periode bagi hasil. Pada akhir setiap masa bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan kepemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan pada harga nominal tertentu.

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dari pelanggan untuk biaya instalasi sambungan telepon menjadi hak mitra usaha sepenuhnya. Pendapatan dari pulsa telepon *outgoing* dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara mitra usaha dan Perusahaan berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati.

40. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap.

Berdasarkan Peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya sambungan
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon seluler

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tatacara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif seluler dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008 bahwa tarif seluler terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah
- Tarif jasa multimedia,

dengan struktur sebagai berikut:

- Biaya sambungan
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

40. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif telepon seluler (lanjutan)

Tarif dihitung berdasarkan jenis formula yang terdiri dari:
- Biaya elemen jaringan, yang dihitung dengan menggunakan Metode *Long Run Incremental Cost* ("LRIC") *Bottom Up*.
- Biaya aktivitas layanan retail ditambah marjin.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dalam suratnya No. 227/BRTI/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 untuk seluler, satelit, dan PSTN domestik dan efektif sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk akses nirkabel tidak bergerak dengan mobilitas terbatas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 201/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2011 tanggal 29 Juli 2011, BRTI menyetujui revisi Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") Perusahaan terkait tarif interkoneksi.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan, pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115/Dirjen/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan, sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit dan jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2011, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, dan jaringan kabel, adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	4.383
Dolar A.S.	564	5.113
Euro	0,2	3
Jumlah		**9.499**

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan Konsorsium G-Pas	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Instalasi *Outside Plant Fiber* Optik 2008 paket-8 Divre VII
Perusahaan dan ISS Reshetnev	2 Maret 2009	Perjanjian Pengadaan Satelit Telkom-3
Perusahaan dan APT Satellite Company Limited	23 Maret 2009	Perjanjian Kerjasama Posisi Orbit 142E Derajat (*142E Degree Orbital Position Cooperation Agreement*)
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei	27 Mei 2009 15 Juni 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-3 Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-1
Perusahaan dan Konsorsium ZTE	2 Juni 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-2
Perusahaan dan PT Aldomaru	11 Juni 2009	Perjanjian Pengadaan Roll Out Infusion PL 2009
Perusahaan dan PT Dharma Kumala Utama	29 Juli 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi Kabel Serat Optik Akses & RMJ Tahun 2009 Lokasi Jawa Tengah & Jawa Timur Paket-1
Perusahaan dan PT Sufia Technologies	29 Juli 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi Kabel Serat Optik Akses & RMJ Tahun 2009 Lokasi Jawa Tengah & Jawa Timur Paket-3

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei	3 Agustus 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi *Softswitch* dan Modernisasi MSAN Divre I, Divre II, Divre III dan Divre IV
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	4 September 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi Softswitch Modernisasi MSAN Divre VI dan Divre VII
Perusahaan dan Konsorsium Tekken-DMT	15 September 2009	Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Kabel Serat Optik Akses Divre VI Kalimantan
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei	24 November 2009	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Proyek Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project (MKCS)
Perusahaan dan Konsorsium NEC - NSN	16 Desember 2009	Perjanjian Kerjasama untuk Pengadaan dan Instalasi Perluasan Kapasitas Ring JASUKA Backbone 2009
Perusahaan dan Konsorsium Binainfo Lokatara	30 September 2010	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspansi BRAS System 2010
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	6 Oktober 2010	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspansi G-PON (Gigabit Capable Passive Optical Networks)
Perusahaan dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia	30 Desember 2010	Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Dengan Pola TI/TO
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	8 Juni 2011	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM Alcatel Lucent (ALU)
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	30 Juni 2011	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspansi Metro Ethernet ALU
Perusahaan dan PT Bina Nusantara Perkasa	9 Desember 2011	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan SKKL Sumatera-Bangka (SBCS) dan SKKL Tarakan-Tanjung Selor (TSCS)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008	Perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (*Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements*)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008	Perjanjian untuk dukungan teknik (TSA) untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G *(Combined 2G and 3G CS Core Network)*
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, Huawei International Pte. Ltd., PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	Maret dan Juni 2009	Perjanjian pembangunan jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN *Rollout* (*2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements*) sebagai penyedia jaringan 2G GSM BSS dan 3G UMTS *Radio Access Network*.
Telkomsel, PT Trikomsel OKE dan PT Mitra Telekomunikasi Selular ("MTS")	Juli 2009	Perjanjian pembelian iphone dan penyediaan jasa jaringan seluler
Telkomsel, PT Packet Systems Indonesia dan PT Huawei Tech Investment	3 Februari 2010	Perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait *Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support*
Telkomsel, PT Datacraft Indonesia dan PT Huawei Tech Investment	3 Februari 2010	Perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait *Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support*
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian *Online Charging System* ("OCS") *and Service Control Points* ("SCP") *System Solution Development*
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian *Technical Support* untuk menyediakan jasa *technical support* untuk OCS dan SCP
Telkomsel, PT Nokia Siemens Networks dan Nokia Siemens Networks Oy	27 Januari 2011	Perjanjian pembangunan Soft HLR *(Soft HLR Roll Out Agreement)*
Telkomsel dan PT Nokia Siemens Networks	27 Januari 2011	Perjanjian jasa teknik Soft HLR *(Soft HLR Technical Support Agreement)*
Telkomsel dan PT Application Solutions a	5 Juli 2011	Perjanjian *untuk pengembangan dan perpanjangan Customer Relationship Management dan Contact Center Solutions*
Telkomsel dan Nokia Siemens Networks Oy dan Huawei Investment	11 Juli 2011	Perjanjian untuk pengadaan perangkat
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	21 Desember 2011	Perjanjian pengembangan dan *rollout Operating Support System* ("OSS").

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

(i) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Telkom, dengan rincian sebagai berikut:

				Fasilitas Digunakan	
Kreditur	**Jumlah fasilitas**	**Akhir periode fasilitas**	**Mata uang asal**	**Mata uang asal (dalam jutaan)**	**Setara Rupiah**
BNI	220	31 Maret 2012	Rp	-	120
			US$	0,13	1
BRI	100	26 April 2012	Rp	-	79
			US$	0,03	0
Bank Mandiri	60	23 Desember 2012	Rp	-	46
			US$	0,02	0
Jumlah	**380**				**246**

(ii) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan dan bank garansi dan fasilitas *standby letter of credit* sebesar US$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2012. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20 miliar (setara dengan US$2,2 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G (Catatan 41c.i). Bank garansi tersebut berlaku sampai dengan 24 Maret 2012.

c. Lainnya

(i) Lisensi 3G

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, (Catatan 2k), Telkomsel diharuskan antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi pada tahun 2019. Biaya BHP tahunan untuk tahun 2011 didasarkan pada surat pemberitahuan dari DJPT yang berjumlah Rp495 miliar. Jumlah biaya per tahun bervariasi bergantung pada variabel tertentu yang ditentukan dalam formula.

2. Menyediakan akses *roaming* untuk operator 3G lainnya.

3. Berkontribusi pada pengembangan KPU.

4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah 14 propinsi pada tahun keenam diperolehnya lisensi 3G.

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Lisensi 3G (lanjutan)

5. Menerbitkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20 miliar atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya.

(ii) Konsorsium Palapa Ring

Pada tanggal 10 November 2007, Perusahaan masuk kedalam Konsorsium Palapa Ring dengan menandatangi C&MA dengan 5 perusahaan lainnya. Konsorsium ini dibuat untuk membangun jaringan serat optik di 32 kota di kawasan Indonesia Timur dengan total investasi awal sekitar Rp2.070 miliar. Melalui konsorsium ini Perusahaan akan memperoleh *bandwidth* sebesar 4 lambda dari total kapasitas sebesar 8,44 lambda. Pada tahun 2008, 2 perusahaan mengundurkan diri, sehingga jumlah anggota Konsorsium Palapa Ring menjadi 4 termasuk Perusahaan.

Pada tanggal 22 November 2011, berdasarkan surat manajemen Konsorsium Palapa Ring No. 01/PR-MC/IV/2011, perjanjian Konsorsium Palapa Ring diakhiri. Selanjutnya, berdasarkan surat manajemen Konsorsium Palapa Ring No. 02/PR-MC/IV/2011 tanggal 28 Desember 2011, rekening *escrow* telah ditutup dan saldo dana *escrow* sebesar US$4,6 juta telah dikembalikan ke Perusahaan.

(iii) Pemakaian frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tanggal 15 Desember 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 16 Januari 2009, biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900MHz, dan 1800MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan. Peraturan tersebut berlaku selama 5 tahun sampai diubah lebih lanjut.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut diatas, pada tanggal 15 Desember 2010, dalam Surat Keputusan No. 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan Telkomsel tahun pertama (Y_1) untuk pita frekuensi 900MHz dan 1800MHz adalah sebesar Rp716 miliar dan dibayar pada tanggal 30 Desember 2010.

Berdasarkan surat keputusan yang sama di atas dan Surat Keputusan No. 5039/T/DJPT.4/KOMINFO/12/2010 pada tanggal 16 Desember 2010, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan Perusahaan tahun pertama (Y1) untuk pita frekuensi 800MHz adalah sebesar Rp52 miliar dan dibayar pada tanggal 27 Desember 2010.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan No. 590/KEP/M.KOMINFO/11/2011 pada tanggal 14 November 2011, Perusahaan dan Telkomsel dinyatakan lebih bayar sebesar Rp31 miliar dan Rp117 miliar, yang diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka biaya tahunan penggunaan frekuensi radio tahun kedua.

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iii) Pemakaian frekuensi radio (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan No. 349/KEP/M.KOMINFO/08/2011 dan No. 350/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun kedua (Y2) masing-masing untuk Perusahaan dan Telkomsel sebesar Rp142 miliar dan Rp1.834 miliar. Biaya ini dibayar pada bulan Desember 2011, bersih setelah pembayaran dimuka.

Sebelum penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan telekomunikasi yang berlaku, operator diwajibkan untuk mendaftarkan stasiun radionya kepada DJPT untuk mendapatkan lisensi penggunaan frekuensi, kecuali stasiun radio yang menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz (Catatan 41c.i). Biaya pemakaian frekuensi radio tersebut terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT. Biaya ditentukan berdasarkan jumlah *carrier* ("TX") untuk Telkom dan *transceivers* ("TRX") untuk Telkomsel yang terdaftar dari stasiun radio, dengan biaya berkisar dari Rp0,07 juta hingga Rp17,55 juta untuk tiap TX dan dari Rp3,4 juta hingga Rp15,9 juta untuk tiap TRX (Catatan 7).

(iv) Apple, Inc

Pada tanggal 9 Januari dan 16 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian dengan Apple, Inc untuk pembelian produk iPhone dan pemasaran kepada para pelanggan bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Trikomsel OKE dan PT Mitra Telekomunikasi Selular), serta penyediaan layanan jaringan seluler selama 3 tahun. Jumlah minimum kumulatif iPhone yang harus dibeli pada 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 125.000, 300.000, dan 500.000 unit.

(v) Sewa Operasi

	Pembayaran sewa minimum			
	Jumlah	**Kurang dari 1 tahun**	**1-5 tahun**	**Lebih dari 5 tahun**
Sewa operasi	310	87	193	30

Sewa operasi merupakan perjanjian sewa kantor beberapa entitas anak yang tidak dapat dibatalkan.

(vi) Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")

Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005, yang mengatur kebijakan program KPU dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan KPU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, besaran kontribusi diubah menjadi 1,25% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban sambungan).

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(vi) KPU (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 dan Surat Keputusan Menkominfo No. 38/Per/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007, yang antara lain mengatur bahwa, dalam menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU), penyelenggara ditentukan melalui serangkaian proses seleksi oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010, BTIP diubah menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI").

Pada tanggal 16 Januari 2009 dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun, yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku, dan Papua. Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz-2.400 MHz.

Selanjutnya, pada tahun 2010 dan 2011, perjanjian-perjanjian tersebut telah diubah, meliputi, antara lain, untuk mengubah harga menjadi Rp1.758 miliar dan untuk mengubah periode pembayaran dari kuartalan menjadi bulanan atau kuartalan.

Pada bulan Januari 2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi dari kementerian untuk menyediakan jasa jaringan tetap lokal dalam program KPU.

Pada tanggal 12 Maret 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan senilai Rp322 miliar, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan yang bersifat bergerak senilai Rp528 miliar, yang meliputi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU *(Upgrading)* di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dan Program KPU "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga masing-masing sebesar Rp830 miliar dan Rp261 miliar.

42. KONTINJENSI

a. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan dan entitas anak mencadangkan sebesar Rp67 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

b. Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang diperiksa oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ("KPPU") dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar.

   Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan dan Telkomsel telah mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

   Sehubungan dengan operator-operator mengajukan keberatan di berbagai pengadilan, selanjutnya, KPPU meminta MA untuk mengkonsolidasi kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Keputusan MA tanggal 12 April 2011, MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelidiki dan menuntaskan kasus ini.

   Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan Telkomsel belum mendapat pemberitahuan dari Pengadilan.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap keuangan Perusahaan dan entitas anak.

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	2011			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	139,03	1,18	8,81	1.340
Aset keuangan tersedia untuk dijual	6,34	-	-	57
Piutang usaha				
Pihak berelasi	4,73	-	-	43
Pihak ketiga	88,55	-	0,06	803
Piutang lain-lain	24,99	-	0,06	227
Aset lancar lainnya	0,16	-	-	1
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	10,20	-	-	93
Jumlah aset	274,00	1,18	8,93	2.564
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,41)	-	-	(4)
Pihak ketiga	(427,73)	(0,51)	(1,35)	(3.891)
Utang lain-lain	(0,52)	-	-	(5)
Biaya yang masih harus dibayar	(54,84)	(35,61)	(2,53)	(524)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,86)	-	-	(8)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(66,61)	(767,90)	-	(694)
Obligasi dan wesel bayar	(74,75)	-	-	(678)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(140,99)	(9.214,77)	-	(2.357)
Jumlah liabilitas	(766,71)	(10.018,79)	(3,88)	(8.161)
Liabilitas bersih	**(492,71)**	**(10.017,61)**	**5,05**	**(5.597)**

*Aset dan kewajiban dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan mengunakan nilai tukar umum pada akhir periode pelaporan.

	2010			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	138,07	0,39	19,20	1.415
Aset keuangan tersedia untuk dijual	8,84	-	-	80
Piutang usaha				
Pihak berelasi	3,16	-	-	28
Pihak ketiga	79,19	-	0,16	714
Piutang lain-lain	0,48	-	0,01	4
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	7,34	-	0,03	67
Jumlah aset	237,08	0,39	19,40	2.308

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

	2010			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(5,73)	-	-	(52)
Pihak ketiga	(341,80)	(0,73)	(0,72)	(3.081)
Utang lain-lain	(0,07)	-	-	(1)
Biaya yang masih harus dibayar	(39,72)	(38,35)	(2,21)	(381)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,90)	-	-	(8)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(78,11)	(767,90)	-	(789)
Obligasi dan wesel bayar	(30,54)	-	-	(275)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(240,76)	(9.982,67)	-	(3.274)
Jumlah liabilitas	(737,63)	(10.789,65)	(2,93)	(7.861)
Liabilitas bersih	**(500,55)**	**(10.789,26)**	**16,47**	**(5.553)**

*Aset dan kewajiban dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan mengunakan nilai tukar umum pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak membuka kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Perusahaan dan entitas anak melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 menggunakan kurs tanggal 30 Maret 2012, keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi bertambah sebesar Rp18 miliar.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit Treasury Management di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit Treasury Management mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar Amerika Serikat dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan dan entitas anak tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap kewajiban Perusahaan dan entitas anak diharapkan dapat disalinghapus dengan deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas terutang.

b. Risiko harga pasar

Perusahaan dan entitas anak rentan terhadap perubahan dalam harga pasar utang dan ekuitas terkait penyertaan tersedia untuk dijual yang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penyertaan tersedia untuk dijual diakui pada ekuitas.

Kinerja penyertaan tersedia untuk dijual Perusahaan dan entitas anak dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Perusahaan dan entitas anak.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk penyertaan tersedia untuk dijualnya adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang kemungkinan besar terjadi.

c. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Perusahaan dan entitas anak terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 16,18,19, dan 20). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan dan entitas anak melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Tabel di bawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, berdasarkan mana yang lebih dahulu antara penetapan harga kembali berdasarkan kontrak atau tanggal jatuh tempo.

	31 Desember 2011			
	Satu tahun atau kurang	**Lebih dari satu tahun**	**Tidak dikenakan bunga**	**Jumlah**
Aset				
Kas dan setara kas	9.628	-	6	9.634
Aset keuangan tersedia untuk dijual	251	-	110	361
Aset lancar lainnya	12	-	-	12
Aset tidak lancar lainnya	-	164	54	218
Jumlah aset keuangan	9.891	164	170	10.225

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

	31 Desember 2011			
	Satu tahun atau kurang	Lebih dari satu tahun	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Liabilitas				
Utang bank jangka pendek	100	-	-	100
Pinjaman penerusan	716	1.568	-	2.284
Obligasi dan wesel bayar	767	3.019	-	3.786
Utang bank	10.878	313	-	11.191
Jumlah liabilitas keuangan	12.461	4.900	-	17.361
Jumlah *gap repricing* suku bunga	**(2.570)**	**(4.736)**		**(7.306)**

d. Risiko kredit

Perusahaan dan entitas anak rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan piutang usaha dan piutang lain-lain.

Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit berdasarkan saldo dari tiga pelanggan utama masing-masing kurang dari 1% dari piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Perusahaan dan entitas anak telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak secara terus menerus melakukan analisa untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain, rasio likuiditas, rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi *arms-length*.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak pada nilai wajarnya:

	31 Desember 2011	
	Nilai Buku	**Nilai Wajar**
Pinjaman penerusan	2.284	2.357
Obligasi dan wesel bayar	3.786	3.974
Utang bank	11.191	11.325

Perusahaan dan entitas anak memperhitungkan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan jangka pendek mendekati nilai tercatatnya, sebagai dampak dari pendiskontoannya yang tidak signifikan. Nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang diestimasikan pada nilai kini arus kas masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat bunga yang saat ini ditawarkan oleh bank kepada Perusahaan dan entitas anak untuk utang dengan jatuh tempo sejenis, kecuali untuk penyertaan tertentu lainnya dan obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

45. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2011		2010	
	Jumlah	**Bagian**	**Jumlah**	**Bagian**
Utang jangka pendek	100	0,15%	56	0,08%
Utang jangka panjang	17.771	27,18%	21.959	33,06%
Total utang	17.871	27,33%	22.015	33,14%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	47.510	72,67%	44.419	66,86%
Jumlah	**65.381**	**100,00%**	**66.434**	**100,00%**

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang saham lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Perusahaan melakukan penilaian hutang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya hutang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi yang terbatas, Perusahaan akan mempertimbangkan pembelian kembali saham-sahamnya atau pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya.

45. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Sebagai tambahan terkait kepatuhan terhadap pembatasan utang, Perusahaan juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Perusahaan dan mengkaji efektifitas utang Perusahaan. Perusahaan memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan pada 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Jumlah utang dengan bunga	17.871	22.015
Dikurangi: Kas dan setara kas	(9.634)	(9.120)
Utang bersih	8.237	12.895
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	47.510	44.419
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	17,34%	29,03%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 18,19,20, Perusahaan dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditur. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

46. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Berdasarkan Akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., No. 2 tanggal 3 Januari 2012, para pemegang saham Infomedia menerbitkan 17.142.857 lembar saham sebesar Rp9 miliar. Metra yang merupakan pemegang saham Infomedia membeli seluruh saham baru yang diterbitkan. Hasilnya, kepemilikan Perusahaan atas Infomedia terdilusi menjadi 49%.
b. Pada 8 Januari 2012, sehubungan dengan berakhirnya perjanjian dengan Apple (Catatan 41c.iv), Telkomsel dan Apple setuju untuk memperpanjang perjanjian sampai dengan 30 Maret 2012. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel masih dalam proses memperoleh perpanjangan kembali.
c. Pada 20 Januari 2012, Telkomsel melunasi utang kepada ICBC sebesar US$39 juta (Catatan 20).
d. Pada 2 Februari 2012, Telkomsel melunasi utang kepada OCBC NISP sebesar Rp466 miliar (Catatan 20).
e. Pada 12 Maret 2012, Telkomsel menerima Surat Ketetapan sebagai hasil dari pemeriksaaan pajak untuk tahun fiskal 2010 oleh DJPT. Berdasarkan surat tersebut, Telkomsel kelebihan bayar PPh Badan dan kurang bayar PPN masing-masing sebesar Rp597,4 miliar (Catatan 31) dan Rp302,7 miliar (termasuk denda Rp73,3 miliar). Telkomsel menerima lebih bayar PPh Badan dan kurang bayar PPN sebesar Rp12,1 miliar (termasuk denda Rp6,3 miliar). Mempertimbangkan, nilainya yang tidak signifikan, bagian yang diterima dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012. Telkomsel berencana mengajukan keberatan kepada DJPT atas kurang bayar PPN sebesar Rp290,7 miliar (termasuk denda Rp67 miliar).
f. Sampai dengan tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan telah membeli kembali 940.125.460 saham dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, setara dengan 4,66% saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, dengan total pembelian sebesar Rp7.474 miliar, termasuk biaya jasa perantara dan kustodian (Catatan 1c dan 24).

47. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berawal 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, dengan rincian reklasifikasi akun yang signifikan adalah sebagai berikut :

	Sebelum reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010:			
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Pensiun dibayar di muka	1	743	744
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas diestimasi pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	(537)	(743)	(1.280)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010:			
Beban			
Karyawan	(7.517)	185	(7.332)
Umum dan administrasi	(2.352)	(185)	(2.537)
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 1 JANUARI 2010:			
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Pensiun dibayar di muka	1	208	209
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas diestimasi pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	(809)	(208)	(1.017)

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA SAK DAN IFRS

Tabel berikut menyajikan rekonsiliasi antara laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011, dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk masing-masing perbedaan antara laporan keuangan konsolidasian berdasarkan SAK dan IFRS.

PENJELASAN	SAK	REKONSILIASI	IFRS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2011			
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	9.634	-	9.634
Aset keuangan tersedia untuk dijual	361	-	361
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu			
Pihak berelasi	932	143	1.075
Pihak ketiga	3.983	-	3.983
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	335	-	335
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang	758	-	758
Uang muka dan beban dibayar di muka	3.294	-	3.294
Tagihan restitusi pajak	371	-	371
Pajak dibayar di muka	787	-	787
Aset dimiliki untuk dijual	791	-	791
Aset lancar lainnya	12	-	12
Jumlah Aset Lancar	21.258	143	21.401
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	235	-	235
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	74.897	(259)	74.638
Pensiun dibayar di muka	991	(226)	765
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	3.817	-	3.817
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	1.789	2	1.791
Aset pajak tangguhan - bersih	67	8	75
Jumlah Aset Tidak Lancar	81.796	(475)	81.321
JUMLAH ASET	**103.054**	**(332)**	**102.722**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	838	-	838
Pihak ketiga	7.479	-	7.479
Utang lain-lain	37	-	37
Utang pajak	1.039	-	1.039
Utang dividen	1	-	1
Beban yang masih harus dibayar	4.790	-	4.790
Pendapatan diterima di muka	2.821	-	2.821
Uang muka pelanggan dan pemasok	271	-	271
Utang bank jangka pendek	100	-	100
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	4.813	-	4.813
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.189	-	22.189

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA SAK DAN IFRS (lanjutan)

PENJELASAN	SAK	REKONSILIASI	IFRS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2011 (lanjutan)			
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.794	(346)	3.448
Pendapatan diterima di muka	242	-	242
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	287	-	287
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	888	673	1.561
Liabilitas diestimasi pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	1.715	1.296	3.011
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Liabilitas sewa pembiayaan	314	-	314
Pinjaman penerusan - pihak berelasi	2.012	-	2.012
Obligasi dan wesel bayar	3.401	-	3.401
Utang bank	7.231	-	7.231
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	19.884	1.623	21.507
JUMLAH LIABILITAS	42.073	1.623	43.696
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham	5.040	-	5.040
Tambahan modal disetor	1.073	-	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	(6.323)	-	(6.323)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	478	(478)	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	(386)	-
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	47	(47)	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	240	(240)	-
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan minoritas pada entitas anak	(485)	485	-
Cadangan lain		56	56
Saldo laba	47.054	(1.189)	45.865
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	47.510	(1.799)	45.711
Kepentingan nonpengendali	13.471	(156)	13.315
JUMLAH EKUITAS	60.981	(1.955)	59.026
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**103.054**	**(332)**	**102.722**

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA SAK DAN IFRS (lanjutan)

PENJELASAN	SAK	REKONSILIASI	IFRS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011			
PENDAPATAN	71.253	(15)	71.238
Penghasilan lain-lain	665	1	666
BEBAN			
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	(16.372)	(81)	(16.453)
Penyusutan dan amortisasi	(14.863)	40	(14.823)
Karyawan	(8.555)	(116)	(8.671)
Interkoneksi	(3.555)	-	(3.555)
Pemasaran	(3.278)	-	(3.278)
Umum dan administrasi	(2.935)	-	(2.935)
Rugi selisih kurs	(210)	-	(210)
Bagian (rugi) laba bersih entitas asosiasi	(10)	-	(10)
Beban lain-lain	(192)	-	(192)
Jumlah beban	(49.970)	(157)	(50.127)
LABA SEBELUM (BIAYA) PENGHASILAN PENDANAAN DAN PAJAK PENGHASILAN	**21.948**	**(171)**	**21.777**
(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN			
Penghasilan pendanaan	546	74	620
Biaya pendanaan	(1.637)	(25)	(1.662)
Jumlah biaya pendanaan	(1.091)	49	(1.042)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**20.857**	**(122)**	**20.735**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(5.387)	2	(5.385)
LABA TAHUN BERJALAN	**15.470**	**(120)**	**15.350**
(BEBAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	7	-	7
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	4	-	4
Rugi aktuaria program pensiun manfaat pasti	-	(1.958)	(1.958)
Jumlah (beban) pendapatan komprehensif lain	11	(1.958)	(1.947)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**15.481**	**(2.078)**	**13.403**

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA SAK DAN IFRS (lanjutan)

PENJELASAN	SAK	REKONSILIASI	IFRS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 (lanjutan)			
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	10.965	(117)	10.848
Kepentingan nonpengendali	4.505	(3)	4.502
	15.470	(120)	15.350
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	10.976	(2.007)	8.969
Kepentingan nonpengendali	4.505	(71)	4.434
	15.481	(2.078)	13.403
LABA PER SAHAM DASAR			
Laba bersih per saham	559,67	(5,97)	553,70
Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS)	22.386,80	(238,80)	22.148,00

Catatan atas rekonsiliasi SAK ke IFRS

a. Perjanjian Konsesi Jasa

Sebelum 1 Januari 2012, SAK tidak mengatur secara khusus mengenai bagaimana pencatatan transaksi perjanjian konsesi jasa. Pada periode-periode tersebut, Perusahaan dan Telkomsel memperlakukan perjanjian ini sebagai kontrak pelaksanaan pada laporan keuangan versi SAK. Selanjutnya, infrastruktur yang dibangun dibawah perjanjian ini diklasifikasikan ke dalam aset tetap dan didepresiasikan sepanjang masa manfaat aset terkait.

Berdasarkan IFRS, perjanjian tersebut diperlakukan sebagai perjanjian konsesi jasa dalam lingkup IFRIC 12, "Perjanjian Konsesi Jasa". Dalam interpretasi ini, Perusahaan dan Telkomsel mengakui dan mengukur pendapatan dari jasa yang dilakukan dibawah perjanjian tersebut sesuai dengan IAS 11, Kontrak Konstruksi (untuk pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan konstruksi dan jasa *upgrade*) dan IAS 18, Pendapatan (untuk pendapatan dan biaya terkait jasa operasi).

Lebih lanjut, aset infrastruktur yang dibangun dalam perjanjian ini tidak diakui sebagai aset tetap operator karena perjanjian ini tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan aset infrastruktur layanan publik.

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA SAK DAN IFRS (lanjutan)

Catatan atas rekonsiliasi SAK ke IFRS (lanjutan)

b. Imbalan karyawan

Perusahaan dan entitas anak telah memilih pengecualian yang diberikan oleh IFRS 1 untuk mengakui semua keuntungan dan kerugian aktuarial kumulatif ke saldo laba per 1 Januari 2010 (mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial kembali ke nihil pada tanggal transisi ke IFRS). Selanjutnya, pendekatan untuk mengakui langsung keuntungan dan kerugian aktuarial ke laba komprehensif lainnya telah dipilih untuk pengakuan berikutnya. Dengan demikian, setiap penyesuaian terhadap aset pensiun yang timbul dari perhitungan batasan atas aset (*asset ceiling*) juga diakui ke laba komprehensif lainnya.

c. Penyesuaian translasi kumulatif

Perusahaan dan entitas anak telah memilih pengecualian yang diberikan oleh IFRS 1 untuk menganggap perbedaan translasi kumulatif untuk semua operasi asing menjadi nihil pada tanggal transisi ke IFRS. Dengan demikian, perbedaan translasi kumulatif yang terdapat pada 1 Januari 2010 di dalam laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK direklasifikasi ke saldo laba.

d. Hak atas tanah

Berdasarkan SAK, hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi kecuali manajemen tidak bisa memperpanjang atau memperbarui hak atas tanah tersebut. Biaya-biaya yang terjadi dalam memproses dan memperpanjang hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus sepanjang periode hak atas tanah.

Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Hak atas tanah diamortisasi selama masa sewa. Perusahaan dan entitas anak mengakui beban amortisasi hak atas tanah sebesar Rp18 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010.

Halaman ini sengaja
Dikosongkan

Laporan Tahunan 2011

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Investor Relations
Grha Citra Caraka Lantai 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710

Tel. : (62-21) 521 5109
Fax. : (62-21) 522 0500
e-mail : investor@telkom.co.id

IDX : TLKM
NYSE : TLK
LSE : TKIA

www.telkom.co.id

Laporan ini dicetak pada kertas daur ulang

© OPTIMA